Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



SEJARAH POS DAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN-DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google

SEJARAH POS DAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Digitized by Google

Digitized by Google

Untuk mengenang,
menghargai serta menghormati
para pahlawan POSTEL.

Digitized by Google

Digitized by Google

SEJARAH POS DAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Masa Demokrasi Terpimpin

Jilid IV

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN-DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Digitized by Google

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Jalan Kebon Sirih No.37
JAKARTA PUSAT

Dicetak oleh:
C.V. Cahaya Makmur

Disain Buku:
Markus Djajadiningrat
Ronny Ridwan
Yan Chandra

Digitized by Google

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	7
BAB I BEBERAPA PERUBAHAN MENGENAI STATUS JAWATAN PTT, P.N. POSTEL, ORGAN DEPARTEMEN DLL	13
1. Struktur dan Organisasi	13
a. Perubahan Jawatan PTT menjadi P.N. Postel	13
b. Perubahan P.N. Postel menjadi P.N. Pos dan Giro, dan P.N. Telekomunikasi	18
c. Perubahan Organ Departemen	23
d. Perubahan Perubahan tugas-tugas Dewan Telekomunikasi	24
e. Pembaharuan perundangan kolonial menjadi perundangan nasional	26
2. Partisipasi P.N. Postel dalam Trikora dan Dwikora	29
a. Partisipasi P.N. Postel dalam Trikora	29
b. Partisipasi P.N. Postel dalam Dwikora	66

Digitized by Google

3. Peristiwa G 30 S/PKI

a. Perebutan Gedung Telekomunikasi Gambir dan Kantor Telegrap Dtx 72
b. Pembersihan 73

BAB II PEMBINAAN DAN ORGANISASI EXTRA

1. Pembinaan

a. Seminar, Konperensi Dinas dan Rapat Kerja 79
b. Pembukaan Dinas Giro dan Cekpos 84
c. Tindakan-tindakan penyelesaian G 30 S/PKI 89
d. Hubungan Internasional 92
e. Kepegawaian 94
f. Pendidikan dan Latihan 98

2. Organisasi-organisasi di Lingkungan Postel 103

a. Kegiatan Organisasi Wanita 103
b. Kegiatan Organisasi Buruh 108

BAB III OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN

1. Kegiatan-kegiatan operasional 119

a. Dinas Pos 119
b. Dinas Telekomunikasi 128

2. Keuangan 140

3. Pembangunan 143

Digitized by Google

LAMPIRAN 156
BIBLIOGRAFI 169
INDEX 171

Keterangan gambar kulit luar.
Anggota-anggota "Corps Irian Barat" (CIB) PTT, berbaris dihadapan para karyawan Kantor Pusat PTT di Bandung.

Digitized by Google

Digitized by Google

PRAKATA

HE
7255
S44
1980
4-5

Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka diumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.1) Mulailah Masa Demokrasi Terpimpin di mana terdapat dinamika politik yang banyak membawa perubahan di pelbagai bidang.

Dekrit Presiden R.I. Pertama itu menyelamatkan negara dari suatu krisis politik di mana terdapat ancaman pemberontakan yang ditumpangi intervensi tertutup kekuatan-kekuatan besar asing, dan di mana partai-partai poltik sebagai keseluruhan memperlihatkan impotensinya*). Karena keselamatan negara adalah hukum tertinggi dalam masyarakat yang goncang karena masalah pembaharuan Undang-undang Dasar Negara, Presiden Soekarno mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekrit Presiden dalam pertengahan tahun itu disusul dengan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut dinamakan "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang oleh Sidang Umum MPR(S) I/1960 ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Buku Sejarah Pos dan Telekomunikasi, Jilid IV ini Team Penulis berusaha untuk menyusun perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh Pos dan Telekomunikasi yang banyak kaitannya dengan kebijaksanaan politik masa itu, di mana Kepala Negara sering memberi pengarahan kepada aparat-aparat pemerintahannya supaya melakukan "Think and rethink, shape and reshape". Masanya memang tepat bagi Jawatan PTT untuk mengadakan perubahan dalam statusnya sebagai perusahaan I.B.W. yang kurang dapat bergerak dengan bebas untuk menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1960 dikeluarkanlah Perpu No.19/1960 tentang Perusahaan Negara. Maka berubahlah Jawatan PTT menjadi P.N. Postel mulai 1 Januari 1962. Karena Pemerintah menganggap perlu untuk

*) *Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poeponegoro, Nugroho Notosusanto, "Sejarah Nasional Indonesia VI", Departemen P dan K, Balai Pustaka Jakarta 1977, hal. 103 dan 103.*

Digitized by Google

membentuk Dewan Perusahaan, maka dibentuklah Dewan Perusahaan dalam P.N. Postel pada pertengahan tahun 1963. Pada tahun itu pula dibentuklah Dewan Telekomunikasi yang merupakan duplikasi dalam tugas-tugas pemerintahan di bidang telekomunikasi. Akhirnya Dinas Pos yang karena fungsinya lebih sosial daripada fungsi Dinas Telekomunikasi yang lebih banyak melayani dunia bisnis, dipisahkanlah Dinas Pos dan Dinas Telekomunikasi sehingga masing-masing menjadi P.N. Pos dan Giro, dan P.N. Telekomunikasi pada tanggal 6 Juli 1965.

Perubahan ini mengakibatkan perubahan pula dalam organ Departemen.

Ketika P.N. Postel memencar menjadi dua Perusahaan Negara, Dinas Pendidikannya tidak dipecah menjadi dua Pusat Pendidikan yang langsung dibawahkan masing-masing perusahaan, tetapi dimasukkan ke dalam Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Perubahan politik dan ketatanegaraan untuk menciptakan perimbangan kekuatan dalam pemerintahan demikian cepatnya, sehingga organ departemen dikembangkan menjadi Departemen Pos dan Telekomunikasi.

Gerak dinamika politik yang lebih hebat terjadi sebelumnya ketika Presiden Soekarno memberikan komandonya untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang berhasil dengan kemenangan. Kalau Tri Komando Rakyat sukses dan dapat mempersatukan bangsa Indonesia, namun ide Nasakom yang memaksakan Nasakomisasi pelbagai bidang justru tidak membawa persatuan dan kesatuan, melainkan keretakan yang menuju perpecahan dan adu kekuatan meskipun diciptakan Panca Setia, indoktrinasi dan kursus TAVIP. Akhirnya meletuslah G 30 S/PKI yang merasa kuat karena berani untuk merebut kekuasaan. Gedung Telekomunikasi di mana terdapat media komunikasi nasional dan internasional yang lengkap menjadi sasaran pertama untuk dikuasai dan diputus supaya transmisi lumpuh dan alat-alat negara kacau tanpa sistem informasi yang cepat. Namun perebutan kekuasaan itu gagal dan berfungsilah kembali Pos dan Telekomunikasi untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai, apa yang terjadi. Lawan sudah jelas dan harus dibersihkan dari tubuh P.N. Pos dan Giro dan P.N. Telekomunikasi.

Dalam peristiwa G 30 S/PKI banyak pegawai kedua Perusahaan Negara itu terlibat, sehingga mereka dipecat dan dirumahkan yang mengurangi jumlah tenaga kerja. Meskipun demikian Pos dan Telekomunikasi berjalan terus dengan tenaga kerja yang jauh di bawah formasi. Berlakulah kenyataan, bahwa bukan yang banyak yang baik, melainkan yang baik dan bermutu itulah yang banyak. Dengan sisa yang baik yang tidak dipolitikkan kedua Perusahaan Negara itu berjalan terus dan meneruskan pembangunannya masing-masing.

Data yang tersusun dalam Jilid IV ini sebagian besar bersumber kepada Surat Keliling PTT No.1, Surat Keliling Postel No.1 dan Surat Keliling POSGIR No.1 yang pada tiap-tiap awal Tahun Baru memberikan ikhtisar keadaan Jawatan PTT, P.N. Postel dan P.N. Pos dan Giro dari tahun 1960 sampai dengan 1965. Sejauh dapat diteliti, selama Masa Demokrasi Terpimpin, baik Jawatan PTT maupun P.N. Postel, tidak mengeluarkan buku Laporan Tahunan yang tercetak seperti yang terdapat

Digitized by Google

selama Masa Demokrasi Liberal. Mengingat Surat Keliling No.1 pada umumnya belum memberi angka-angka yang depinitip mengenai "output" pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada para pemakai, maka penulisan Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV ini lebih menitikberatkan pada peristiwa-peristiwa yang baru dan penting yang terjadi dalam perkembangan Pos dan Telekomunikasi selama masa ini.

Rancangan Naskah Pertama setelah diperbanyak dikirimkan kepada para Kepala Daerah Pos dan Giro, pada Kepala Wilayah Usaha Telekomunikasi dan para pensiunan karyawan Pos atau Telekomunikasi yang terkemuka dan lain-lainnya, untuk ditelaah, dikoreksi dan atau ditambah mana yang salah atau yang kurang. Setelah menerima tanggapan-tanggapan, rancangan naskah pertama diedit lagi dan tersusunlah Buku Sejarah Pos dan Telekomunikasi Jilid IV, Masa Demokrasi Terpimpin. Team Penulis mengakui bahwa buku ini belum dapat dikatakan paripurna. Berhubung dengan itu perbaikan-perbaikan dari para pembaca dan pemerhati yang merasa terlibat untuk menyempurnakan isi buku ini, dengan senang hati akan kami terima.

Akhirnya pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara-saudara yang tidak kami sebut satu per satu di sini, atas segala perhatian dan waktu yang diberikan untuk turut serta mewujudkan buku dalam rangka untuk mengawetkan rangkaian peristiwa-peristiwa Pos dan Telekomunikasi selama Masa Demokrasi Terpimpin. Mudah-mudahan masa lampau ini berguna bagi masa kini dengan harapan supaya yang baik sajalah yang terus diulang dan dikembangkan dalam proses Pos dan Telekomunikasi untuk melayani Pemerintah dan para pemakai, sedangkan yang tidak baik dibuang untuk dikenang sebagai peringatan supaya tidak terulang dalam pelaksanaan.

Panitia Penyusun dan Perumus.

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB I

BEBERAPA PERUBAHAN MENGENAI STATUS JAWATAN PTT, PN POSTEL, ORGAN DEPARTEMEN DLL

Digitized by Google

Digitized by Google

bab I

BEBERAPA PERUBAHAN MENGENAI STATUS JAWATAN PTT, PN POSTEL, ORGAN DEPARTEMEN DLL

1. Struktur dan Organisasi.

a. Perubahan Jawatan P.T.T. menjadi P.N. Postel.

Didalam Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia, Jilid III, Masa Demokrasi Liberal, telah disinggung bahwa dalam Konperensi Dinas di Bandung pada tahun 1956, untuk pertama kali disarankan secara resmi oleh Direktur Jendral P.T.T., Mr. R. Soekardan, perubahan status Jawatan P.T.T. Menurut saran tersebut, status yang paling tepat serta yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan P.T.T. ialah status "Public Corporation".

Pada tahun 1960 berlakulah Peraturan Pemerintah, pengganti U.U. No.19/1960 tentang Perusahaan Negara yang mengatur keseragaman di dalam cara menyusun, menguasai serta bentuk hukum Perusahaan Negara pada waktu itu, mengatur ketentuan-ketentuan mengenai penampungan Perusahaan-perusahaan asing yang diambilalih, serta Perusahaan-perusahaan lain yang ada yang dibentuk berdasarkan I.B.W. ataupun I.C.W. Jawatan P.T.T. (Pos, Telegrap dan Telepon) bersumber pada peraturan I.B.W. (Indische Bedrijven Wet).

Sebagai pelaksanaan Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 yang dimaksud di atas, maka pada tanggal 21 Desember 1961 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.240 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, disingkat P.N. Postel. Peraturan Pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962. Sejak saat itu berubahlah status Jawatan pada Jawatan P.T.T. menjadi Perusahaan Negara.

Kesempatan yang timbul karena perubahan status Jawatan P.T.T. ini dipergunakan juga untuk mengganti namanya menjadi P.N. Pos dan Telekomunikasi, bukan P.N. P.T.T.

Digitized by Google

Nama lama yang dipergunakan ialah "Post-en Telegraafdienst" yang berlaku sampai 1906, dengan pengertian bahwa dinas Telepon sudah tercakup di dalamnya berdasarkan Staatsblad No.52 tahun yang memasukkan Jawatan Telepon ke dalam Jawatan Pos dan Telegrap. Baru dalam tahun 1906 dipergunakan sebutan "Post, Telegraaf en Telefoondienst" (Staatsblaad 1906 No. 395) dan nama Pos, Telegrap dan Telepon terus dipergunakan sampai tahun 1961.

Sebagai hasil kemajuan teknik, pertukaran berita (telegram dan percakapan telepon) tidak hanya dilakukan dengan saluran kawat, tetapi dapat dikirimkan tanpa mempergunakan kawat atau dengan gelombang radio.

Nama "Pos, Telegrap dan Telepon" disingkat PTT yang tidak menyebut-nyebut perhubungan dengan radio, dirasa kurang mewakili. Berhubung dengan itu dianggap lebih tepat untuk memakai nama "Pos dan Telekomunikasi", yang menunjukkan seluruh lapangan usaha perusahaan.

Nama tersebut telah dipergunakan pula oleh berbagai administrasi di luar negeri, yang mengurus penyelenggaraan lalulintas berita.

Selain daripada itu dalam nama Pos dan Telekomunikasi tercakup nama Pos yang menjadi anggota organisasi dunia mengenai Pos yaitu "Union Postale Universelle", serta Telekomunikasi yang menjadi anggota organisasi dunia mengenai Telekomunikasi, ialah "International Telecommunication Union".

Kedua badan tersebut merupakan Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Republik Indonesia dalam kedua badan itu diwakili oleh Jawatan PTT, yang kemudian dijadikan PN Postel.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961, dengan dileburnya Jawatan PTT ke dalam PN Postel maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, serta usaha dari Jawatan PTT beralih kepada PN Postel. Pelaksanaan peleburan termaksud diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata. Begitu juga ditetapkan bahwa perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung. Mengenai modal perusahaan adalah sebesar Rp2.859.060.000,- (Dua milyar delapan ratus limapuluh sembilan juta enampuluh ribu rupiah) dan tujuan perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 24 Mei 1963 No. A7/1/7, terhitung dari tanggal 24 Mei 1963 Pd. Direktur Jenderal PTT, S.H. Simatupang ditunjuk untuk bertindak sebagai Penjabat Direktur Jenderal PN Postel yang ditugasi pengelolaan Perusahaan Negara tersebut.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 24 Mei 1963 No. A7/1/8, terhitung mulai tanggal 24 Mei 1963, juga ditetapkan peleburan Jawatan PTT ke dalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi dan ditugaskan kepada Pd. Dirjen PN Postel untuk mengambil tindakan-tindakan selanjutnya sebagai akibat dari peleburan tersebut atas nama Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, sambil menunggu keputusan Presiden R.I. tentang pengangkatan

Digitized by Google

Dirjen PN Postel (yang tetap).

Peresmian penunjukan Pejabat Dirjen PN Postel dan peleburan Jawatan PTT dilakukan oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1963 di Kantor Pusat PN Postel di Bandung.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 29 Mei 1963 No. P 37/18/23, sambil menunggu pengangkatan oleh Presiden, terhitung tanggal 29 Mei 1963 F. Leiwakabessy, Romli, Oesadi SH, R. Notosoeseno dan S. Ardiwinata, masing-masing ditunjuk untuk bertindak sebagai Penjabat Direktur Telekomunikasi PN Postel, Penjabat Direktur Pos PN Postel, Penjabat Direktur Administrasi PN Postel, Penjabat Direktur Pos Muda PN Postel dan Penjabat Direktur Perlengkapan PN Postel dengan tugas membantu Pejabat Direktur Jenderal PN Postel dalam pengelolaan PN Postel dan bersama-sama merupakan Direksi P.N. Postel.

Dengan terwujudnya PN Postel diharap akan diperoleh kebebasan bergerak yang cukup luas dalam bidang keuangan yang akan memberi kemungkinan lebih besar untuk memperbaiki nasib pegawai, memperbesar dana untuk memenuhi kebutuhan akan perlengkapan-perlengkapan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas PN Postel, pula kemungkinan untuk lebih mempererat kerjasama dengan Organisasi-organisasi Buruh untuk mendapatkan dukungan sosial dan pengawasan sosial dan mengintensifkan pengubahan sikap mental dengan maksud agar para pegawai benar-benar mengamalkannya.

1) Struktur Organisasi P.N. Postel.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 13 Agustus 1964 No. U14/11/7 ditetapkan Struktur Organisasi bagi PN Postel.

Dalam Surat Keputusan itu diatur bahwa PN Postel dipimpin oleh seorang Dirjen yang dibantu oleh tiga orang Direktur Staf dan tiga orang Direktur Perusahaan beserta dua orang Direktur Muda Perusahaan.

Direktur Jenderal, para Direktur dan para Direktur Muda bersama-sama merupakan Direksi. Direktur Jenderal bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata, dan para Direktur kepada Direktur Jenderal atas bidangnya masing-masing.

2) Pimpinan Perusahaan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 13 Agustus 1964 No. P.37/46/3 yang berlaku mulai tanggal 13 Agustus 1964, seraya membebaskan Romli, Oesadi, SH, R. Notosoeseno dan Sabar Soediman masing-masing dari tugasnya sebagai Pj. Direktur Pos, Pj. Direktur Administrasi, Pj. Direktur Pos Muda dan Pj. Direktur Perlengkapan, telah ditetapkan - menjelang Keputusan Presiden - penunjukan-penunjukan sebagai berikut:

Digitized by Google

a. Oesadi, SH - Pj. Direktur Administrasi
b. Sabar Soediman - Pj. Direktur Perlengkapan,
c. Ir. Kwee Swan Tie - Pj. Direktur Research dan Planning,
d. Romli - Pj. Direktur Pos,
e. M. Aswani Tjitrohadikoesoemo - Pj. Direktur Giro,
f. Ir. M.J. Sahertian - Pj. Direktur Telekomunikasi,
g. D. Hage - Pj. Direktur Pos Muda,
h. Soewarno - Pj. Direktur Telekomunikasi Muda,
dengan tugas membantu Direktur Jenderal PN Postel dalam pengelolaan PN Postel dan bersama-sama merupakan Direksi.

Selain itu dengan Surat-Surat Keputusan Direktur Jenderal tanggal 13 Agustus 1964 No. 32914/Dirjen dan tanggal 13 Agustus 1964 No.32915/Dirjen yang keduaduanya juga berlaku tanggal 13 Agustus 1964, dilaksanakan pengangkatan R.M.A. Soeria Negara sebagai Sekretaris dan R. Notosoeseno sebagai Pembantu Khusus Direktur Jenderal/Kepala Pendidikan seluruh PN Postel termasuk Akademi.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 16 September 1964 No. 104/DPN/64 yang berlaku mulai tanggal 1 September 1964, diangkat Direksi PN Postel yang terdiri dari:

1) S.H. Simatupang: sebagai Pj. Dirjen Postel,
2) Oesadi, S.H.: Direktur Administrasi,
3) Sabarsoediman: Direktur Perlengkapan,
4) Ir. Kwee Swan Tie.*): Direktur Research dan Planning,
5) Romli: Direktur Pos,
6) Aswani Tjitrohadikoesoemo: Direktur Giro,
7) Ir. M.J. Sahertian: Direktur Telekomunikasi.

Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata ketika itu adalah Letnan Jenderal Hidayat.

Bagan organisasi P.N. Postel yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menhubadpostelpar tanggal 13-8-1964 No. P.37/46/3 dicantumkan pada Lampiran 1.

3) Pembentukan Dewan Perusahaan.

Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam G.B.H.N., dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin yang menuju kesuatu masyarakat adil dan makmur maka didirikan beberapa Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 19/Prp 1960.

Semua perusahaan negara yang didirikan ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempergunakan Demokrasi Terpimpin yang diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan tingkat hidup rakyat. Perusahaan Negara ydm adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.

*) *Kini Ir. Sutanggar Tengker.*

Digitized by Google



S.H. SIMATUPANG
Pj. Direktur Jenderal



OESADI
Direktur Administrasi



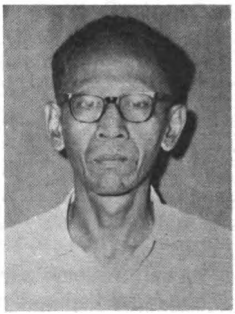
SABARSOEDIMAN
Direktur Perlengkapan.



Ir. KWEE SWAN TIE
Direktur Research dan Planning



ROMLI
Direktur Pos



M. ASWANI TJITROHADIKOESOEMO
Direktur Giro



Ir. M.J. SAHERTIAN
Direktur Telekomunikasi



D. HAGE
Pj. Direktur Pos Muda



SOEWARNO
Pj. Direktur Telekomunikasi Muda.

Digitized by Google

Untuk mengamankan kekayaan Negara yang ditanam pada perusahaan-perusahaan Negara dan untuk mempertinggi kuantitas dan kualitas produksi maka pemerintah menganggap perlu membentuk Dewan-dewan Perusahaan pada setiap Perusahaan Negara.

a) Dasar hukum Dewan Perusahaan.

Dasar hukum dari Dewan Perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 45 Prp Tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan. Undang-undang ini selanjutnya dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Surat-surat Keputusan Menteri.

b) Susunan Dewan Perusahaan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 31 Mei 1963 No. A 5/2/2 dibentuk Dewan Perusahaan PN Postel dan mengangkat anggota-anggotanya yang terdiri dari:

a. Oesadi, S.H. : Ketua/Anggota, Wakil Perusahaan (Direktur Administrasi).
b. Asrarudin : Anggota, Wakil SSPTT;
c. Sudarsono : Anggota, Wakil SSPTT;
d. B. Hudoyo : Anggota, Wakil SB Postel;
e. Sumadi : Anggota, Wakil SB Postel;
f. Achmad Basah : Anggota, Ahli Pos.

Dewan ini telah bersidang untuk pertama kalinya tanggal 8 Juni 1963 dan telah mengambil keputusan a.l. bahwa salah seorang anggota Dewan tiap kali selama tiga bulan secara bergilir bertindak sebagai Panitera.

Selanjutnya dibentuk pula suatu Kepaniteraan Dewan Perusahaan yang dipimpin oleh Panitera Dewan dan yang pimpinannya sehari-hari diserahkan kepada pengawaspos tingkat I, G. Looho, S.H.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 29 April 1964 No. A 5/1/20, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1964 Prof. Dr. Ir. O Hong Djie diangkat menjadi anggota Dewan Perusahaan.

Kemudian oleh S.B. Postel ditunjuk Soeratno, Ketua II dari PPSB Postel, sebagai anggota dari Dewan Perusahaan.

Selanjutnya sesuai dengan anjuran Menteri pada pelantikan Direktur Jenderal PN Postel dan para Direktur/Direktur Muda dalam bulan September 1964 mulai tanggal 1 Nopember 1964 Musyawarah Dewan yang semula dipimpin oleh Direktur Administrasi, dipimpin oleh Direktur Jenderal sendiri.

b. Perubahan P.N. Postel menjadi P.N. Pos dan Giro dan P.N. Telekomunikasi.

Digitized by Google

1) Usaha pemencaran.

Dalam tahun 1964 terjadi usaha-usaha untuk memencarkan P.N. Postel menjadi beberapa perusahaan Negara supaya masing-masing dapat berkembang lebih leluasa. Usaha untuk pemencaran P.N. Postel itu dilakukan oleh beberapa Kepala Daerah Pos dan Kepala Daerah Telekomunikasi di Jawa. Mereka mengadakan pertemuan tidak resmi di Kaliurang dan berkesimpulan bahwa mengingat perkembangan tehnologi sebaiknya P.N. Postel dipencarkan menjadi tiga perusahaan, ialah: Perusahaan Pos, Perusahaan Telegrap dan Telex, dan Perusahaan Telepon.

Hasil pemikiran itu ternyata mendapat tantangan dari Pimpinan P.N. Postel. Meskipun demikian masih diadakan usaha-usaha serupa, tetapi terbatas hanya di antara para Kepala Daerah Telekomunikasi. Akhirnya pelbagai bentuk pemikiran pengembangan itu bermuara pada satu kesimpulan, bahwa mengingat lapangan usaha P.N. Postel mengalami perkembangan demikian cepatnya, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap bentuk organisasi perusahaan.

Berdasarkan pemikiran yang dimaksud di atas, maka pada tahun 1965, P.N. Postel dipecah menjadi dua Perusahaan Negara. Yang pertama bernama Perusahaan Negara Pos dan Giro disingkat P.N. Pos dan Giro yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1965, dan yang kedua bernama Perusahaan Negara Telekomunikasi atau P.N. Telekomunikasi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965 (Lembaran Negara No. 62 dan No. 63 Tahun 1965). Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Juli 1965.

Dengan pembubaran P.N. Pos dan Telekomunikasi itu maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari P.N. Postel di bidang Pos beralih kepada P.N. Pos dan Giro, dan di bidang Telekomunikasi beralih kepada P.N. Telekomunikasi. Pelaksanaan peralihan itu diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Mengenai nama P.N. Telekomunikasi rasanya tidak memerlukan penjelasan, tetapi mengenai pilihan nama P.N. Pos dan Giro, perlu dijelaskan. Mengapa tidak dipilih nama P.N. Pos saja atau P.N. Pos dan Paket atau P.N. Pos dan Wesel dan sebagainya?

Dinas paketpos dan dinas weselpos telah lama dikenal masyarakat, sehingga tidak perlu ditonjolkan lagi. Tetapi Dinas Giro dan Cekpos yang dapat disingkat Giropos (Postgiro), perlu ditonjolkan karena belum dikenal oleh masyarakat luas berhubung dinas ini baru dibuka pada tanggal 23 Nopember 1961 yang bertujuan untuk mempermudah atau merasionalisasi sistem pembayaran.

Dinas Giropos di beberapa negara berkembang menjadi saluran pembayaran giral yang serba guna, termasuk pekerjaan incasso. Perkembangan serupa diharapkan terjadi di Indonesia. Demi untuk mentenarkan Dinas Giropos yang dapat dijadikan saluran pembayaran yang berdayaguna dan berhasilguna itulah maka dipakai dan diresmikan nama P.N. Pos dan Giro, dengan pengharapan bahwa pembayaran secara giral akan meningkat, dana yang mengendap akan dapat membantu likuiditas perusahaan. Kepada dana dan deposit itulah tergantung kemampuan perusahaan untuk berkembang.

Digitized by Google

2) *Struktur organisasi.*

a. Struktur organisasi dan Pimpinan P.N. Pos dan Giro.

Sebagai kelanjutan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.29 dan No.30 tahun 1965, maka dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 15-11-1965 No. U 14/14/8 dan No. U 14/14/9 ditetapkanlah Struktur Organisasi P.N. Pos dan Giro dan Struktur Organisasi P.N. Telekomunikasi.

P.N. Pos dan Giro dipimpin oleh satu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 4 orang Direktur, sedangkan P.N. Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan 5 orang Direktur. Direksi secara kolektip bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Direksi P.N. Pos dan Giro terdiri dari:

Direktur Utama	: Oesadi, S.H.
Direktur Lalu lintas Pos	: Mas Soekandar
Direktur Giro dan Lalu lintas Uang	: Sachloel Nasoetion
Direktur Administrasi	: Raden Roekmin Adiwinata
Direktur Perlengkapan dan Pembangunan	: Ardiani Muhammad Hardigaluh

b. Struktur Organisasi dan Pimpinan P.N. Telekomunikasi.

Direksi P.N. Telekomunikasi terdiri dari:

Direktur Utama	: Sabarsoediman
Direktur Operation	: Ir. Muchtil Joenoes
Direktur Teknik	: Ir. Kwee Swan Tie
Direktur Perlengkapan	: Raden Soenarjo Martosendjojo
Direktur Pembangunan	: Ir. Soekarno Abdulrachman
Direktur Administrasi	: Soewardi

Kedua Direksi yang dimaksud di atas dilantik oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 21 Nopember 1965 untuk menjabat selama 5 tahun.

Pada tanggal 22 Nopember 1965 diserahterimakan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari P.N. Postel berturut-turut kepada Organ Departemen, Direksi P.N. Pos dan Giro dan Direksi P.N. Telekomunikasi.

Dengan demikian maka terhitung mulai tanggal 22 Nopember 1965 P.N. Postel baik formal maupun materiil, telah dibubarkan. Berdirilah sebagai hasil pemencaran dua Perusahaan Negara yang bertujuan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Adapun yang dimaksud dengan Organ Departemen yang diuraikan dalam BAB I, Sub Bab 1, d. Organ Departemen, P.N. Pos dan Giro dan P.N. Telekomunikasi merupakan tiga Badan yang merupakan kesatuan yang bulat dan kokoh, yang bersama-sama diserahi tugas untuk menyelenggarakan usaha di bidang Pos, Giro dan

Digitized by Google

DIREKSI P.N. POS DAN GIRO



OESADI, S.H.
Direktur Utama



MAS SOEKANDAR
Direktur Lalu Lintas Pos



SACHLOEL NASOETION
Direktur Giro dan Lalu Lintas Uang



R.R. ADIWINATA
Direktur Administrasi



ARDIAN MUHAMMAD HARDIGALUH
Direktur Perlengkapan dan Pembangunan

Digitized by Google

DIREKSI P.N. TELEKOMUNIKASI



SABARSOEDIMAN
Direktur Utama



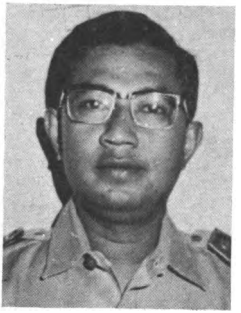
Ir. MUCHTIL JOENOES
Direktur Operation



Ir. KWEE SWAN TIE)*
Direktur Teknik



SOEWARDI
Direktur Administrasi



Ir. SOEKARNO ABDULRACHMAN
Direktur Pembangunan



RADEN SOENARJO MARTOSENDJOJO
Direktur Perlengkapan.

**) Kini Ir. Sutangar Tengker.*

Digitized by Google

Telekomunikasi di bawah bimbingan dan pengawasan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

c. Perubahan Organ Departemen (Urusan Pos, Giro dan Telekomunikasi di Departemen).

Baik P.N. Pos dan Giro maupun P.N. Telekomunikasi berada di bawah Departemen Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata. Menterinya ialah Letnan Jendral Hidayat.

Untuk mempertinggi daya guna dan daya gerak dari Badan-badan dan perusahaan-perusahaan dalam lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, maka diangkat 6 orang Pembantu Menteri yang terdiri dari:

1. Pembantu Utama Menteri:
   Brigadir Jenderal Utojo Utomo,
2. Pembantu Menteri Urusan Umum:
   Ir. Abuprajitno,
3. Pembantu Menteri Urusan Perkereta-apian:
   Hartono Wiriodinoto, SH.
4. Pembantu Menteri Urusan Pos, Giro dan Telekomunikasi:
   S.H. Simatupang.
5. Pembantu Menteri Urusan Kepariwisataan:
   Letnan Kolonel Djali Aznam, H.A.
6. Pembantu Menteri Urusan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya:
   Drs. Soehono Soemobaskoro.

Para pembantu Menteri ini dilantik tanggal 18 Nopember 1965.

Pembantu Menteri Urusan Pos, Giro dan Telekomunikasi dibantu pula oleh 4 orang Assisten, yaitu:

a. Assisten I Bidang Administrasi: D. Hage,
b. Assisten II Bidang Operasi Pos: Nyoman Rai,
c. Assisten III Bidang Operasi Telekomunikasi: Soewarno,
d. Assisten IV Bidang Logistik dan Industri: Ir. M.J. Sahertian.

Pelantikan keempat Assisten tersebut dilakukan Menteri pada tanggal 18-11-1965 juga.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1966, dengan Keputusan Presiden tanggal 21 Pebruari 1966 No. 38/1966 tentang Susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi, Pos dan Telekomunikasi dimasukkan dalam Kompartimen Distribusi. Akibat dari penyempurnaan Kabinet Dwikora tersebut ialah bahwa organ Pos dan Telekomunikasi juga mengalami perubahan. Organ Pembantu Menteri Pos, Giro dan Telekomunikasi menjadi Menteri yang berada dalam lingkungan Kompartimen Distribusi. Sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi yang pertama ialah Laksamana Udara S. Suryadarma (almarhum). Ia mempunyai kegemaran dalam pengumpulan perangko dan mempunyai perhatian kepada Sejarah Pos dan Telekomunikasi.

Digitized by Google

d. Perubahan tugas-tugas Dewan Telekomunikasi.

Sebagai anggota International Telecommunication Union (I.T.U.), Negara Republik Indonesia harus tunduk kepada kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Konvensi. Untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut dan untuk menepati Peraturan-peraturan lainnya, Negara anggota yang bersangkutan harus menunjuk suatu Departemen atau Dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut. Departemen atau Dinas yang bersangkutan lazimnya disebut Administrasi Telekomunikasi.

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional Administrasi Telekomunikasi di negara masing-masing mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
- penjatahan dan atau pencatatan penggunaan frekuensi radio;
- pengaturan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi;
- koordinasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- pengeluaran ijin-ijin dalam bidang telekomunikasi dan lain-lainnya.

Sampai dengan tahun 1961, Jawatan PTT bertindak sebagai Administrasi Telekomunikasi. Selanjutnya diteruskan oleh P.N. Postel.

Dengan dibentuknya Dewan Telekomunikasi pada tahun 1964, maka Dewan Telekomunikasi selanjutnya bertindak sebagai Administrasi Telekomunikasi.

Pada tahun-tahun berikutnya timbul sedikit kekacauan tentang siapa yang ditunjuk sebagai Administrasi, apakah Dewan Telekomunikasi, apakah Direktorat Jenderal Postel ataukah P.N. Telekomunikasi.

Dewan Telekomunikasi diadakan sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 5/1964. Pengadaannya mula pertama dimaksud sebagai forum pertimbangan kepada Presidium Kabinet Kerja No. Aa/B/51/1964. Ketua Dewantel diberi kuasa untuk dan atas nama Presidium Kabinet menanda tangani ijin-ijin stasion radio. Selanjutnya dengan keputusan Presidium Kabinet Kerja No. Aa/C/95/1964, Ketua Dewantel diberi wewenang atas nama Presidium Kabinet untuk menanda tangani perencanaan/pemasukan, pemindahan alat-alat telekomunikasi. Ketua Dewan diberi wewenang untuk mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan keputusan tersebut. Jadi sejak saat itu Dewantel menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bidang telekomunikasi dan bertindak sebagai Administrasi Telekomunikasi.

Jenis-jenis ijin di bidang telekomunikasi menurut ketentuan pasal 11 Undang-undang No. 5/1964, terdiri dari:
- Ijin penguasaan pemancar radio (termasuk dalam pengertian penguasaan di sini: pemasukan, pemindahan);
- pemasangan pemancar radio;
- penggunaan pemancar radio;
- penguasaan perangkat telekomunikasi.

Pembidangan ini dilihat dari segi sejarah kurang tepat. Beberapa peraturan perundangan yang ada pada zaman Belanda tentang perijinan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dapat disebut di sini, misalnya: Staatsblad 1876 No. 257,

Digitized by Google

dalam pasal 4 antara lain menyatakan bahwa sanksi pidana berupa denda sebesar setinggi-tingginya 1.000 gulden untuk setiap pemasangan, memiliki telegrap yang dibuka untuk lalu lintas umum tanpa memiliki ijin yang diperlukan.

Staatsblad 1936 No. 368 antara lain menyatakan bahwa Kepala PTT berwenang untuk dan atas nama Pemerintah menerbitkan ijin (vergunning) untuk pemasangan, pemilikan, dan pemakaian telegrap dan telepon yang pesawat-pesawatnya diujung-nya tidak saling dihubungkan dengan kawat.

Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Juni 1912 No. 13 (Bijblad No. 7617) antara lain dalam pasal 7 menyatakan bahwa Dinas SS (Staatsspoorwegen) berwenang untuk menetapkan/memasang kawat untuk keperluan dinas semboyan dan telegrapnya sebanyak-banyaknya 4 kawat pada tiang-tiang milik PTT sepanjang jalan kereta api yang diusahakan. Untuk memasang lebih dari 4 kawat diperlukan ijin dari Direktur Verkeer en Waterstaat.

Dari beberapa peraturan yang ada pada zaman Belanda tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi baik oleh instansi Pemerintah maupun swasta pada waktu itu sudah memerlukan ijin.

Selanjutnya sampai dengan tahun 1961 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon (PTT) meneruskan tugas-tugas pemerintahan di bidang perijinan telekomunikasi.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Jawatan PTT dirobah statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Dan selanjutnya P.N. Postel "melanjutkan" tugas-tugas di bidang perijinan ini.

Dengan keputusan Presiden No. 61 tahun 1963 dibentuk Dewan Telekomunikasi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi.

Presidium Kabinet Kerja Republik Indonesia dalam keputusannya tanggal 26 Mei 1964 No. Aa/B/51/1964 memberi kuasa kepada Ketua Dewan Telekomunikasi untuk atas nama Presidium Kabinet Kerja Republik Indonesia menanda tangani ijin-ijin stasiun radio sesuai dengan pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Perpu No. 6 tahun 1963 tersebut.

Perpu No. 6 tahun 1963 tersebut dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1964 ditetapkan menjadi Undang-undang. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 23 Undang-undang No. 5/1964, dengan Keputusan Presiden No. 209 Tahun 1964 dibentuk lagi Dewan Telekomunikasi.

Dewan Telekomunikasi ini dengan dasar Keputusan Presidium Kabinet Kerja No. Aa/C/95/1964, Nomor Aa/C/68/1965 dan Nomor Aa/C/145/1965 diberikan tugas-tugas mengenai masalah-masalah:

- pengaturan tata cara perencanaan pemasukan/pemakaian/pemindahan dari pada alat-alat telekomunikasi;
- penyelenggaraan ujian negara markonis dan telefonis;
- kebijaksanaan perkembangan telekomunikasi tahun 1965 - 1968,

di samping meneruskan tugas-tugas dalam penanda tanganan ijin-ijin stasiun radio seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presidium Kabinet Kerja No. Aa/B/51/1964 di atas.

Digitized by Google

Sejak saat itu Dewantel atas nama Pemerintah melaksanakan tugas-tugas di bidang perijinan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi oleh instansi-instansi Pemerintah, Perwakilan Diplomatik maupun oleh swasta.

Dewantel yang menurut Undang-undang No. 5/1964 dimaksud untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendidikan, research dan perkembangan industri dan kerja sama internasional di bidang telekomunikasi, dan bertugas memberikan pertimbangan kepada Presidium Kabinet dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang telekomunikasi, pada kenyataannya telah diberi tugas-tugas pemerintahan di bidang telekomunikasi yang mengakibatkan duplikasi. Berhubung dengan itu di Masa Orde Baru fungsi Dewantel dikembalikan sebagai badan yang memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang telekomunikasi.

e. Pembaharuan perundangan kolonial menjadi perundangan nasional.

1) Undang-Undang Telekomunikasi.

Dengan pertimbangan bahwa telekomunikasi perlu dikuasai dan diselenggarakan oleh Negara dan peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi yang berlaku sejak jaman Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kemajuan yang pesat dibidang teknik, maka untuk kepentingan pengamanan, kelancaran dan perkembangan telekomunikasi dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi.

Selanjutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 menetapkan Perpu No. 6 tahun 1963 menjadi Undang-Undang tentang Telekomunikasi yang mencabut berlakunya "De bepalingen omtrent de aanleg en het gebruik van telegrafen in Nederlandsch Indie (Stbl 1876 No. 257)" yang dinyatakan berlaku juga bagi hubungan telepon (Stbl 1926 No. 448) dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1927 No. 264 jo Stbl 1928 No. 415.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 yang dimaksud dengan telekomunikasi ialah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda-tanda, isyarat-isyarat, tulisan-tulisan, gambar-gambar dan suara-suara atau berita-berita melalui kawat, visual, radio atau sistim elektromagnetik lain.

Lebih lanjut Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 ini membagi telekomunikasi menjadi 3 bagian yaitu telekomunikasi untuk umum, telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi pemerintah dan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh bukan instansi pemerintah.

(a) Telekomunikasi Untuk Umum.

Telekomunikasi untuk umum diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah.

Perusahaan Negara Postel menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum. Telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi pemerintah diselenggarakan oleh ins-

Digitized by Google

tansi-instansi yang bersangkutan. Namun hal yang terakhir ini tidaklah menutup kemungkinan bagi instansi-instansi tersebut untuk menggunakan pula saluran telekomunikasi umum untuk pengiriman dan penerimaan berita-berita yang tidak bersifat khusus.

Disamping itu tidaklah ditutup kemungkinan, bahwa instansi lain selain PN Postel ikut membantu menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum, tetapi hal terakhir ini harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap berita atau percakapan yang isinya membahayakan keselamatan Negara, mengganggu ketertiban umum atau berlawanan dengan tata susila, dapat ditolak atau dihentikan kelanjutan percakapannya. Alasan penolakan atau penghentian diberitahukan kepada yang bersangkutan dan yang berwajib.

(b) Telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi Pemerintah.

Untuk keperluan khusus, instansi Pemerintah tertentu dapat menyelenggarakan telekomunikasi. Namun penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi oleh instansi Pemerintah tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah akan mengatur koordinasi dan sinkronisasi telekomunikasi untuk keperluan ini.

(c) Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh bukan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh bukan Pemerintah ialah telekomunikasi tidak untuk umum.

Setiap penguasaan, pemasangan, serta penggunaan pesawat pemancar radio dan penguasaan perangkat telekomunikasi dilarang tanpa mendapat ijin lebih dahulu dari Presidium Kabinet Kerja.

Ijin tersebut diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya sepuluh tahun dengan kemungkinan diperbaharui apabila jangka waktu tersebut berakhir.

Ijin termaksud sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Instansi yang berwenang untuk memberi ijin apabila ternyata syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang atau yang tersebut dalam Surat Ijin tidak dipatuhi.

Syarat dan cara memperoleh ijin baik ijin tetap, ijin sementara maupun ijin kadang-kala diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Syarat-syarat tersebut mengandung antara lain pembatasan-pembatasan tertentu mengenai jenis dan alat telekomunikasi.

Untuk penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi oleh kapal air berbendera asing, yang berada di perairan Indonesia tidak diwajibkan meminta ijin kecuali kalau kapal itu tetap diusahakan diperairan Indonesia.

Perlengkapan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi di kapal air yang berada diperairan Indonesia tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pelayaran yang berlaku.

Digitized by Google

Kapal berbendera asing ydm yang berada di daerah perairan pelabuhan dilarang mempergunakan pemancar radio kecuali untuk kepentingan keadaan mara bahaya, berita-berita segera dan keamanan lalulintas pelayaran.

Hal yang sama juga berlaku untuk pesawat udara.

Mengenai yang dimaksud dengan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat perlengkapan atau pesawat yang dipergunakan dalam pelaksanaan telekomunikasi.

Baik juga diketahui bahwa rahasia berita dijamin oleh Undang-Undang yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang tanpa hak menerima dan mengumumkan berita telekomunikasi yang tidak diperuntukan bagi umum, menyatakan adanya berita, menyebarkan atau menggunakan segala keterangan yang bersifat apapun, yang diperoleh dari penerimaan berita telekomunikasi tanpa hak dan tidak diperuntukan bagi umum tersebut.

Juga dilarang melakukan segala perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap telekomunikasi.

Digitized by Google

2. Partisipasi P.N. Postel Dalam Trikora dan Dwikora.

a. Partisipasi P.N. Postel dalam Trikora.

1) Asal mula sengketa.

Pasal dua perjanjian Konperensi Meja Bundar antara Indonesia - Belanda antara lain menentukan bahwa status quo Keresidenan Irian Barat (Nieuw Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.*)

Sesuai dengan perjanjian K.M.B. itu dilakukanlah perundingan-perundingan langsung antara Indonesia dan Belanda untuk menentukan status Irian Barat. Tetapi perundingan-perundingan ini tidak membawa hasil yang diharapkan.

Sementara status Irian Barat masih dalam sengketa, Pemerintah Belanda telah mengambil suatu tindakan yang tidak simpatik.

Pada pertengahan bulan Agustus 1952 dengan persetujuan Parlemen Belanda, wilayah Irian Barat dengan resmi dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Belanda. Hal ini dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Dasar Belanda, yang semula mencantumkan nama Indonesia dalam urutan wilayah Kerajaan Belanda, digantikan dengan "Nederlands Nieuw Guinea" pada pasal yang memuat tentang pembatasan kerajaan tersebut. Tentang hal ini sikap Pemerintah Belanda telah dinyatakan dalam dimuka Parlemen Belanda pada tanggal 29 Oktober 1952, bahwa Pemerintah Belanda tidak melihat manfaat apapun untuk memulai kembali perun-

*) *Notosoetardjo, "Dokumen-dokumen Konperensi Meja Bundar" N.V. Pustaka & Penerbit "Endang" Jakarta, 1956, Hal. 69.*

Digitized by Google

dingan dengan Indonesia mengenai status Irian Barat.

Setelah perundingan langsung antara Indonesia - Belanda gagal dan Belanda bersikap tidak akan berunding lagi dengan Indonesia mengenai Irian Barat, Indonesia berusaha menekan Belanda dengan perantaraan P.B.B. agar bersedia kembali berunding dengan Indonesia. Usaha perundingan dengan perantaraan P.B.B. inipun gagal pula karena tidak dapat mencapai dua pertiga suara anggota P.B.B.

Pemerintah Indonesia kemudian menyatakan bahwa ia tidak akan membawa lagi persoalan Irian Barat kemuka Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terserah pada pihak Belanda untuk mengambil inisiatif selanjutnya, meskipun Indonesia tetap bersedia mencari penyelesaian secara damai. *)

2) Tri Komando Rakyat.

Pada tanggal 5 April 1961 Belanda melantik Dewan Papua dengan perlengkapan bendera dan lagu kebangsaan Papua. Hal itu akan menjurus kepada pembentukan suatu "Negara Papua" **)

Tindakan Belanda ini merupakan titik puncak kemarahan Rakyat Indonesia, yang mengakibatkan dikumandangkannya TRIKORA oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961.

Dipilihnya kota Yogyakarta dan tanggal 19 Desember untuk menyerukan komando TRIKORA sebagai peringatan kepada "Agresi Belanda ke-2" ke Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 ***)

*) *Cholil M., Drs., "Sejarah Operasi-operasi Pembebesan Irian-Barat", Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971, hal. 14.*

**) *Cholil M., Drs., "Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat", Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971, hal. 27.*

***) *Karso, Drs., "Sejarah Kebangsaan", Penerbit ANGKASA, Bandung, hal. 162.*

Digitized by Google

Isi selengkapnya TRIKORA adalah sebagai berikut:

TRI KOMANDO RAKYAT

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik konfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas dan kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu Kolonialisme Belanda.

Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada Rakyat Indonesia, juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan TRI KOMANDO sebagai berikut:

1. *Gagalkan pembentukan negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial;*
2. *Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia;*
3. *Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

Jogjakarta, 19 Desember 1961.

Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia

SOEKARNO

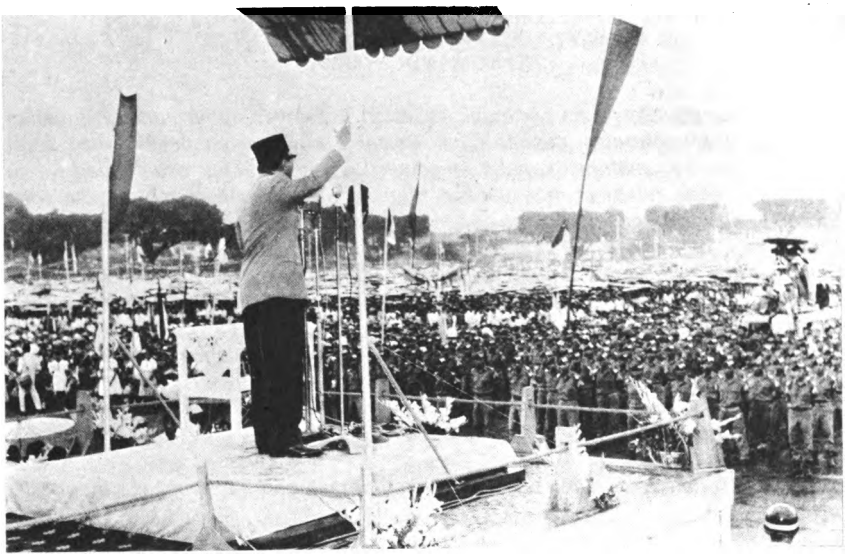
Pemimpin Besar Revolusi Indonesia
/Panglima Besar Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat

3) Pelaksanaan Trikora

Dalam rangka pelaksanaan Trikora oleh Jawatan PTT maka perhubungan pos, telegrap dan telepon dengan Negeri Belanda mulai 2 Januari 1962 dihentikan, suatu tindakan yang merupakan pukulan yang berat bagi pihak lawan dalam rangka peperangan urat syaraf.

Kepada semua Kepala Daerah Pos dan Telekomunikasi telah diinstruksikan untuk mengambil tindakan-tindakan/persiapan-persiapan seperlunya agar perhubungan pos dan telekomunikasi di seluruh Wilayah Indonesia, dalam keadaan bagaimana-pun juga, tetap terjamin. Tindakan-tindakan tersebut antara lain mengamankan semua alat untuk perhubungan dari bahaya kebakaran, kecelakaan, kerusakan atau gangguan-gangguan lainnya yang dapat menghambat perhubungan, mengadakan hubungan/kerjasama yang erat dengan fihak militer setempat dan lain sebagainya.

Digitized by Google



Yogyakarta, 19 Desember 1961.
Presiden Soekarno memberikan Komando "TRIKORA" (IPPHOS).

Digitized by Google

Untuk menambah persediaan bahan-bahan dan barang-barang yang strategis dan vital, dilakukan pemesanan-pemesanan alat-alat untuk "stockpiling" dan "spareparts" yang dibutuhkan di luar negeri yang pemasukannya sedapat mungkin dilakukan dengan "airfreight".

Untuk menjamin tetap terbukanya jaring-jaring lalulintas dan kelancaran hubungan dalam keadaan apapun juga, dilaksanakan pemindahan beberapa pemancar radio dari Amboina, pendirian Kantor Telegrap darurat dan Kantor Telepon darurat di dekat Amboina, penyediaan bahan bakar/minyak untuk pemakaian sekurang-kurangnya 3 bulan, pengiriman tenaga-tenaga pegawai ke Makasar, Amboina, Dobo, Tual, Geru, Morotai, Ternate dan Masohi sebagai tenaga-tenaga pembantu bagi penambahan perhubungan selama 24 jam.

Perhubungan teleprinter selama 24 jam dibuka antara Kepala Staf Operasi Komando Besar Pembebasan Irian Barat dan Panglima Mandala. Disamping itu terdapat pula kesempatan untuk berbicara melalui telepon radio selama 24 jam antara kedua pejabat tersebut diatas.

Untuk memberi jaminan perhubungan selama 24 jam antara kedua pejabat tersebut oleh PTT disediakan perhubungan teleprinter "point-to-point" melalui TOR WTKV, telex, telepon radio dan morse melalui Joint Message Centre.

Dari Joint Message Centre di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) telah dipasang hubungan-hubungan telepon langsung ke Kantor Sentral Telegrap Jakarta, Perhubungan Angkatan Darat, Perhubungan Angkatan Laut, Perhubungan Angkatan Udara, Perhubungan Polisi, Penerbangan Sipil Kemayoran, Jawatan Pelayaran dan R.R.I.

Perangkat dan alat-alat lainnya yang nantinya akan diperuntukkan bagi kantor-kantor PTT di Irian Barat telah dikumpulkan di gudang-gudang di Jakarta dan kemudian telah dikirimkan ke Makasar dan tempat-tempat lain yang berdekatan dengan Irian Barat.

Dalam rangka mempertinggi kewaspadaan Nasional, di kantor-kantor dibentuk Organisasi-organisasi Pertahanan Sipil, yang mendapat latihan-latihan baris-berbaris, PPPK, dan lain-lainnya, yang diperlukan guna memulihkan dan mempertinggi kewaspadaan di garis belakang. Di pelbagai tempat beberapa Pejabat PTT mengikuti pula latihan-latihan dalam rangka Wajib Latih dan L.K.P.S.

Mengenai pelaksanaan TRIKORA oleh pegawai sendiri dapat dikemukakan bahwa pada suatu hari dalam bulan Nopember 1961 Pengawaspos A. Latif Mantika Radja, pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala Kantorpos Besar Kelas I Bandung, dipanggil menghadap Romli, Direktur Pos, di Kantor Pusat PTT di Bandung. Kemudian diberitahukan bahwa ia akan diberi tugas untuk memimpin kontingen pos dalam rangka perjuangan untuk membebaskan Irian Barat yang masih dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Perjuangan fisik dipersiapkan secara rahasia sebagai alternatif apabila perjuangan melalui saluran diplomatik menemui kegagalan. Berhubung tugas itu bersifat rahasia, maka kepada Pspos A Latif Mantika Radja diinstruksikan untuk tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun, termasuk kepada istrinya sendiri.

Digitized by Google

Pada saat yang sama Sabarsoediman, waktu itu menjabat Kepala Daerah Telekomunikasi Medan, dipanggil oleh Direktur Telekomunikasi Muda, F. Leiwakassy, untuk memimpin Kontingen Telekomunikasi dalam pelaksanaan Trikora. Kedua kontingen ini selanjutnya akan merupakan inti dari Corps Irian Barat yang kemudian dibentuk oleh Jawatan PTT dari pegawai-pegawai pendaftar sukarela.

Pimpinan inti terdiri dari A. Latif, Sabar Soediman dan Ir. I. Gusti Bahder Djohan bersama pimpinan inti CIB dari Jawatan dan Instansi-instansi lain, dipersiapkan dengan gemblengan mental, dilengkapi dengan briefing untuk mengenal medan Irian Barat, selama 2 minggu di Cibogo, di bawah Komando G-V. Jadi sebelum Trikora dikumandangkan tanggal 19-12-1961 beberapa pegawai (ahli-ahli) PTT dilatih oleh SUAD I (Staf Umum Angkatan Darat I/Bagian Intelijen). Di samping latihan yang dimaksud di atas, latihan-latihan yang diberikan oleh SUAD I tersebut adalah kemiliteran, bela diri (yudo), intelijen, spionase dan sabotase.

Di antara nama-nama pegawai yang mengikuti latihan tersebut ialah:

- Dari Pos antara lain: Haratua Pangaribuan, Suryono, Toha Suatarman, Moeljoto (kini Dirutpos) dan Soetomo (kini Kdpos Ambon).
- Dari Telekomunikasi antara lain: Pratomo, Sajono, Hary Subiantoro, Soewarso, Mijil Hariadi, Edy Suhantoro, Sunoro, Achmad Sai.

Maksud melatih pegawai-pegawai ahli PTT tersebut ialah agar mereka bersama-sama dengan ABRI dapat menyusup ke Irian Barat khususnya untuk mengambil alih dan mengamankan PTT Irian Barat dari penguasaan Belanda.

4) Sekitar Pembentukan Corps Irian Barat PTT

Selanjutnya setelah Trikora dikumandangkan oleh Bung Karno pada tanggal 19 Desember 1961, para pegawai PTT bersama-sama mendaftarkan diri sebagai Sukarelawan Pembebasan Irian Barat. Jumlah Sukarelawan PTT yang mendaftarkan diri kira-kira 5.000 orang melebihi jumlah yang dibutuhkan. Terpaksa diadakan seleksi menurut kekuatan fisik, pengetahuan dan kebutuhan. Kemudian Jawatan membentuk Corps Irian Barat PTT disingkat CIB PTT yang anggotanya terdiri dari sukarelawan-sukarelawan PTT.

Sebelum melaksanakan kewajibannya anggota Corps ini diberi latihan militer yang dilaksanakan dengan bantuan pihak angkatan bersenjata. Latihan-latihan ditekankan kepada disiplin militer dan dilaksanakan di Bandung, Jakarta dan Makassar. Corps ini kelak akan diserahi kewajiban untuk melaksanakan tugas khusus di daerah Irian Barat, yakni tugas-tugas yang mutlak dalam bidang-bidang pos, telegrap, telepon dan radio dengan maksud agar supaya menyediakan dinas pertukaran berita yang dapat bekerja dengan baik dan lancar, dalam waktu sesingkat-singkatnya sesudah kekuasaan atas wilayah Irian Barat berada di tangan kita.

Nama-nama sukarelawan PTT untuk Irian Barat antara lain dapat diikuti pada Lampiran 2.

Setelah mengalami latihan kemiliteran yang cukup berat maka pada tanggal 25

Digitized by Google

Januari 1962 bertempat di ruang Aula Pusat Pendidikan di Bandung dilantik dengan resmi oleh Bapak Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata "Corps PTT Untuk Irian Barat".
Corps ini terdiri dari 200 orang yang dipilih dari 5.000 orang Sukarelawan PTT.

Pada pelantikan "Corps PTT untuk Irian Barat" Pj. Direktur Jenderal PTT, S.H. Simatupang, memberikan sambutannya sebagai berikut:

"Y.M. Menteri, Saudara-saudara sekalian !

Pada saat ini kita berada ditempat ini untuk melantik Korps untuk Irian Barat dari Jawatan PTT.

Bolehlah kiranya saya sebentar mereleveer usaha-usaha yang kita lakukan sekitar tugas Jawatan PTT di dalam perjuangan Irian Barat ini.

Pada tanggal 18-8-1961 sehari setelah PYM Presiden mengucapkan pidato 17 Agustus, YM Menteri memberikan perintah kepada saya untuk mengadakan beberapa persiapan mengenai Irian Barat. Beliau mengharapkan mengadakan persiapan-persiapan :

Pertama: untuk periode sebelum terjadi apa yang disebut oleh beliau "dor-dor",
Kedua : untuk apabila "dor-dor" telah terjadi,
Ketiga : untuk apabila telah selesai "dor-dor" tersebut.

Saudara-saudara yang berada sekarang di ruangan ini yang merupakan sebagian dari pada Korps untuk Irian Barat dari Jawatan PTT, adalah untuk periode setelah Dor-dor.

Teman kita untuk periode sebelum dor-dor, telah berada pada posnya masing-masing.

Saudara-saudara yang akan dilantik pada hari ini merupakan bagian daripada sebuah Korps yang berjumlah 201 orang : 125 dari Telekomunikasi, 78 orang dari Pos.

Saudara-saudara dipilih berhubung dengan keahlian masing-masing, mulai dari pada keahlian yang terendah sampai kepada keahlian yang tertinggi. Dalam hal ini perlu diberitahukan bahwa Saudara-saudara dipilih daripada permintaan sukarelawan yang dilakukan kepada teman-teman sekerja kita.

Jumlah sukarelawan ini adalah 5.000 orang untuk seluruh Jawatan PTT.

Saudara-saudara sekalian !

Sebentar lagi saya akan memohon kepada YM Menteri untuk melantik Saudara-saudara. YM akan memberikan wejangan nanti, apa yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan kita. Saya hanya akan memohon sesuatu hal kepada Saudara-saudara.

Di dalam perjuangan, Jawatan PTT mulai daripada 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Jawatan PTT tidak pernah absen daripada perjuangan. Jawatan PTT di dalam perjuangan berbentuk apapun selalu siap sedia di dalam menunaikan tugasnya, yaitu: menyelenggarakan perhubungan, pertukaran berita diseluruh Indonesia dalam keadaan apapun.

Sekarang kita berada pada detik-detik yang bersejarah pula dalam Sejarah Republik Indonesia, pembebasan Irian Barat.

Digitized by Google

Dalam saat ini Jawatan PTT pun akan mengetahui kewajibannya, pun akan melaksanakan kewajibannya.

Saudara-saudara dari Korps ini yang telah terpilih akan mewakili Jawatan PTT di dalam sejarahnya untuk kemudian hari.

Saya percaya, bahwa Korps ini akan menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan ini akan ditunaikan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi Saudara-saudara di dalam melakukan tugas ini.

YM Menteri, saya mohon kepada YM Menteri supaya sudi kiranya melantik Korps untuk Irian Barat dari Jawatan PTT ini.

Terima kasih banyak."

Selanjutnya Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Letnan Jenderal G.P.H. Djatikoesoemo, sebelum melantik "Korps PTT untuk Irian Barat" memberikan pengarahan seperti yang tercantum di bawah ini.

"Saudara-saudara para anggota Korps PTT untuk pembebasan Irian Barat.

Pertama-tama:

Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan Saudara-saudara untuk menjadi anggota Korps PTT untuk Irian Barat dan saya ingin juga menyatakan perasaan saya yang terharu bahwa Saudara-saudara sedia untuk meninggalkan keluarga demi kepentingan Nusa dan Bangsa.

Kalau Saudara-saudara memasuki Korps ini, hendaknya saudara jangan terdorong oleh semangat perjuangan yang menyala-nyala saja. Hendaknya jangan terdorong oleh keinginan mencari avontuur, tapi hendaknya juga terdorong oleh keinsyafan dan kesadaran bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 kita bersama-sama telah memproklamirkan suatu Negara dari Sabang sampai Merauke.

Sekarang tiba waktunya untuk melaksanakan atau mengutuhkan kekurangan yang hingga kini masih ada, yaitu: wilayah Irian Barat.

Kedua:

Kita telah membuat tujuan: kita ingin menyusun masyarakat yang adil dan makmur.

Baik Negara Kesatuan Indonesia dari Sabang hingga Merauke maupun masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa begitu saja datang tanpa pengeluaran keringat, tanpa pengeluaran, ya, sering-sering darah juga dan sering-sering juga tangis.

Tapi, Saudara-saudara, selanjutnya Bangsa Indonesia ini oleh Tuhan Yang Maha Esa diberi tempat tinggal di suatu daerah yang alamnya kaya-raya. Sungguh kita sekalian berdosa, jika anugerah Tuhan itu tidak kita gali demi kesejahteraan dari pada Bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Kalau kita sekarang berniat membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda, itu juga karena kita ingat kepada Tuhan. Tuhan yang begitu murah untuk memberikan tanah air kepada kita yang alamnya kaya dan raya.

Kalau alam yang kaya dan raya ini tidak kita gali demi kepentingan Bangsa In-

Digitized by Google

donesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, maka sudah barang tentu itu merupakan suatu kejahatan besar. Besar kejahatan kita terhadap umat manusia dan kalau kekayaan alam ini kita biarkan terlalu lama, sudah barang tentu akan datang Bangsa lain untuk menggali kekayaan alam itu.

Lagi, Saudara-saudara, kalau Saudara-saudara mencatatkan diri dalam Korps Irian Barat ini, hendaknya Saudara-saudara jangan memikir mengusir Belanda saja. Mengusir Belanda itu tidak begitu sulit. Dengan bantuan Bangsa-bangsa lain, dengan semangat yang menyala-nyala sekarang saja yakin bahwa Bangsa Belanda akan angkat kaki dari Irian Barat.

Tapi, kalau Belanda sudah pergi, what next? Apa kemudian?.

Sudah barang tentu Saudara-saudara kita yang bertempat tinggal di Irian Barat mengharapkan dari Saudara-saudaranya dari lain-lain daerah untuk ikut serta membangun daerahnya.

Apa gunanya mengusir Belanda, kalau kemudian daerah itu kita biarkan tidak dikembangkan sama sekali?.

Jadi kalau Saudara-saudara nanti pergi ke Irian Barat, saya harapkan bahwa Saudara-saudara menunjukkan keuletan. Tidak hanya ketangkasan dan keahlian saja, tapi juga keuletan.

Saya tahu bahwa untuk kerja di daerah-daerah itu membutuhkan keuletan.

Baru saja kita kembali dari daerah-daerah Maluku yang terpencil itu mengunjungi kawan-kawanmu. Saya dengan bangga dapat mengatakan, bahwa mereka benar-benar berjuang untuk tanah air dengan tidak mempunyai keinginan yang terlampau tinggi, karena mengerti, bahwa pada saat ini, apa yang dapat diberikan oleh Pemerintah, apa yang dapat diberikan oleh tanah air, belumlah begitu banyak.

Aku menjumpai kawan-kawan-mu di sana yang sudah 3 tahun belum berumah tangga. Rumahnya sederhana sekali. Saya sampaikan harapan saya: Apakah Saudara-saudara kiranya masih sanggup untuk tetap di sini sampai Irian Barat ini beres?

Ya, tidak dia saja, ada beberapa yang menjawab: Baik, pak ! Tidak terlalu banyak dia jawab.

Dengan itu timbullah kepercayaan kepada saya bahwa hari kemudian Bangsa Indonesia ini akan gilang gemilang, apabila bisa di dasarkan atas pemuda-pemuda yang ulet, sadar dan insyaf.

Daerah-daerah itu tidak bisa bangun tanpa tenaga, tenaga yang terdidik, tenaga yang terlatih, tenaga yang ulet, tenaga yang bersemangat.

Pada anak-anak sekolah saya katakan: Go east, young men ! Go east !
Pergilah ketimur, Saudara-saudara! Kalau dulu orang-orang Amerika mengatakan: Go west, young men ! Pergilah ke barat, maka saya sekarang katakan orang-orang Indonesia ini: Go east, young men !
Tanah luas, tanah kaya dan raya. Mengapa kita semua diam di sini?

Kalau Saudara-saudara nanti pergi ke Irian Barat, jangan datang sebagai orang yang menang perang! Saudara-saudara datang di sana tidak sebagai orang yang menang perang, tapi Saudara-saudara datang di sana di daerah wilayah Indonesia sendiri untuk membantu membangun. Saudara-saudara harus melihat Irian Barat

Digitized by Google

sebagai daerah Indonesia sendiri.

Kalau bisa, Saudara-saudara, saya anjurkan: Menetaplah di sana! Menetaplah di sana!

Selama Saudara-saudara pergi, selama perjuangan masih belum selesai dalam beberapa bulan ini saya dengan Dirjen beserta pembantu-pembantunya berusaha keras agar supaya keluarga-keluarga yang Saudara-saudara tinggalkan, tidak akan berkekurangan sesuatu apapun. Hendaknya Saudara-saudara pergi dengan tenang. Hanya memikirkan, bagaimana melaksanakan tugas Saudara-saudara dengan sesempurna-sempurnanya dalam keadaan yang mungkin masih serba kurang.

Saudara-saudara tentunya telah mendengar peristiwa pengalaman dari Kal Tutul, motor-torpedo-boot dari Angkatan Laut kita oleh Belanda.

Ya, bagaimana sikap kita ini?

Ada sementara orang yang mau melihat peristiwa ini sebagai insiden perbatasan, ... insiden perbatasan ....., border-incident!

Aku tanya kepada orang-orang itu: Kalau ada border incident, artinya ada border, ada perbatasan. Perbatasan dengan siapa?

Menurut keputusan kita pada tanggal 17-8-1945 padahal R.I. itu tidak mempunyai perbatasan dengan kerajaan Belanda. .... ya ? ..... ya ? Tokh ????

Tidak ada anak-anak sekolah di SMP, SMA atau SR yang mendapat pelajaran daripada gurunya bahwa Indonesia ini disebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Belanda !

En tokh, ada orang-orang yang ingin mendengar, bahwa itu suatu border incident. Itu tergolong orang-orang yang tidak konsekwen. Banyak orang-orang yang tidak konsekwen. Masih ingat, enggak?

Pada waktu antara 1945 dan 1950 banyak orang yang mengatakan itu aksi polisionil ke-1 dan ke-2, ... masih ingat enggak? .....

Ya, kalau itu ada aksi polisionil, mestinya ada orang jahat dan orang jahat itu saja, TNI, tokh?

Saya katakan! Kalau kami memang dipandang sebagai orang jahat, apa artinya Proklamasi 45?

Bahwa Belanda mau menyatakan ini aksi polisionil terhadap penjahat-penjahat, ya, kami memang penjahat terhadap Belanda, tapi kami bukan penjahat terhadap Bangsa Indonesia.

Jadi sekarang kata-kata di dalam buku sejarah Indonesia sudah di-retool, sudah dirobah. Bukan lagi itu aksi polisionil ke-1 dan ke-2, melainkan itu adalah perang kemerdekaan.

Nah, ini juga, Saudara-saudara! Ada orang-orang yang mengatakan itu border incident. Lho! Saya katakan: Sejak kapan kita bertetangga dengan Juliana? Enggah, tokh? Kan Juliana kerajaannya di negeri Belanda? Menurut keputusan kita sendiri!

Jikalau Belanda ada di situ, itu mestinya agresi. Agresi, tokh? Jangan tutup mata! Itu agresi !!.

Ketiga:

Yang menjalankan agresi itu siapa, pada hari Senin malam, kamikah atau Belanda?

Digitized by Google

Kejadian itu ada 50 mil dari pantai Irian Barat: artinya di lautan terbuka. Kalau Belanda mengatakan: Itu Indonesia menjalankan agresi, enggak !
Artinya: Jika Indonesia yang dianggap mulai menjalankan agresi, kami pada waktu itu ada di lautan terbuka.

Sekalipun kita masuk ke Irian Barat, Irian Barat itu daerah kita sendiri! Bukan? Ya konsekuensi daripada yang kita umumkan pada tanggal 17-8-1945.

Sekarang tinggal, apakah perbuatan Belanda itu kita terima sebagai insiden ataukah sebagai tindak perang?

Kalau kita terima sebagai insiden ataukah sebagai tindak perang?

Kalau kita terima sebagai insiden, cukup kita laporkan kepada PBB dan kita mengajukan protes kepada Belanda. .... Kalau kita anggap sebagai insiden .....

Kalau kita anggap sebagai tindak perang (oorlogsdaad), sebagai tindak perang. artinya:Kita juga harus membalas! Jangan tutup mata!!!

Ini sekarang terserah kepada pemimpin Negara, jalan mana yang akan kita tempuh: What is best for the Nation, for the Country and for the People.

Itu rakyat Maluku mau melihat ini sebagai insiden atau tindak perang? Mereka katakan: Tindak Perang. Baik! Kalau tindak perang, saya balas! Jangan menutup mata! Ya?

Jangan menyingkiri konsekuensi-konsekuensi daripada apa yang pernah kita buat!

Dus, akhirnya, Saudara-saudara, apakah ini nanti dengan Dor-dor, atau tidak dengan Dor-dor, dengan perang atau tanpa perang, terserah kepada kebijaksanaan pimpinan Negara.

Hanya kita sebagai pelaksana-pelaksana, kita mempersiapkan diri untuk perang! Jangan ada wishful thinking: Ah, Belanda toh akan menyerah tanpa perang! Heh, ada orang-orang itu?

Tapi sebetulnya kita ingin: Tidak perang, enggak! Ya, pukul rata Rakyat Indonesia kini cinta damai, tapi dalam keadaan ini, jangan mempunyai pikiran dua! Kita hadapi perang !!!

Dengan demikian, maka menjadi jelas, tindakan-tindakan apa, persiapan-persiapan apa yang harus di jalankan. Juga mental. Mental kita siap untuk perang.

Kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita tidak jadi perang dan Irian Barat masuk. Tapi, tokh, sekalipun kita mental siap perang kita juga akan bisa menghadapi perang itu.

Saya katakan kepada Dirjen: Jangan mempunyai wishfull thinking bahwa Belanda akan mengangkat kaki tanpa kita congkel dengan senjata.

Lagi, Saudara-saudara, kalau Saudara-saudara pergi, Saudara-saudara pergi ke sana karena kesadaran dan keinsyafan. Saya tidak minta Saudara-saudara berjanji, apalagi mengangkat sumpah. Tidak! Saudara-saudara pergi ke sana atas kesadaran dan keinsyafan bahwa Tuhan memberi kita Tanah Air yang kaya raya yang harus kita gali demi kesejahteraan Bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia umumnya.

Kejahatan besar, kalau kita melalaikan!!!

Digitized by Google

Demikian pesan saya kepada Saudara-saudara kalau Saudara-saudara berangkat nanti, ... saya tidak berkesempatan untuk bertemu lagi ..... maka: Selamat jalan, selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi Saudara-saudara dengan keluarga Saudara-saudara semuanya dan yakin, saya akan dapat meninjau dan melihat Saudara-saudara bekerja di Irian Barat, nanti.

Terima kasih."

Selesai dilantik, Korps ini kemudian ditarik dan dikumpulkan di asrama Slipi Jakarta dan selanjutnya dikirimkan ke Makassar untuk selanjutnya beroperasi bersama-sama ABRI ke garis depan.

Pimpinan CIB PTT yang ditugaskan di daerah Mandala, Makassar adalah sbb.:

Sabarsoediman, ditunjuk sebagai komandan merangkap sebagai koordinator Telekomunikasi, dan diperbantukan kepada Gubernur Militer Mandala.

A. Latif Mantika Radja, Wakil Komandan merangkap sebagai koordinator Pos dan diperbantukan pada Gubernur Militer Mandala.

Juga diperbantukan pada Gubernur Militer Mandala: Ir. G. Bahder Djohan.

Sementara korps menunggu dan terus berlatih di kota Makassar, nampaknya suasana antara Indonesia - Belanda sudah semakin panas, suasana perang fisik sudah tidak dapat dihindarkan lagi, lebih-lebih setelah terjadinya peristiwa "Laut Aru" dimana Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno gugur sebagai kusuma bangsa.

Para sukarelawan sudah resah dan kesal menunggu ingin segera diperintahkan untuk menyerbu ke Irian Barat bersama-sama dengan ABRI dalam rangka membebaskan Irian Barat dari cengkraman penjajah Belanda. Untunglah para komandan masih dapat menguasai semangat bawahannya dan disiplin tetap tinggi.

Dalam rangka kewaspadaan ketika itu, Dirjen PTT dengan suratnya tanggal 12 Maret 1962 N. 09/dgptt/rhs mengenai Instruksi Pimpinan Jawatan PTT untuk bersiap-siap menghadapi perang. Surat yang dimaksud beserta telegram agar berhati-hati terhadap Sabotase, disalin selengkapnya dibawah ini:

DJAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON

Kantor Pusat *Bandung*

Kepada :
para Kdpos/Kdtel/Kkpb Y Dkt.
Salinan kepada: Sdr.² pd Dirjen, Dirpos, Dirtel,
Kadms, Kdpl, Dirpm, Dirtm.
dan semua Kepala Bagian Kantor Pusat
(termasuk Sdr Klab dan Kbp.)

Digitized by Google

BANDUNG, 12 Maret 1962 No. 009/dgptt/Rahasia. Lamp.: 1
(hanya untuk Kepala-kepala Bagian/Klab/Kpb).
PERIHAL: Persiapan perang
(berhubung dengan pembebasan Irian Barat).

— Instruksi Umum No. 1/IB/62. —

1. *Sebagai lanjutan Ndk kami tgl 28-12-1961 No. 1045/Dirgen/Rahasia, berikut kami berikan berikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman sebagai follow up dari Ndk kami tersebut.*

2. *Dalam rangka pelaksanaan Tri Komando Rakyat instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman yang kami telah berikan kepada Saudara secara* **umum** *ialah:*

   a. *Ndk kami tersebut dalam ayat 1 yang memuat keharusan kesiap-siagaan Jawatan PTT dalam menghadapi segala kemungkinan dalam soal Irian Barat ini, terutama dalam menyelenggarakan tugas kita yang utama ialah memelihara kelancaran perhubungan Pos dan Telekomunikasi diseluruh wilayah RI dan pengamanan dan penyelamatan semua alat dari kebakaran kecelakaan, kerusakan atau gangguan-gangguan lain yang dapat menghambat lancarnya perhubungan pos dan telekomunikasi. Dalam hubungan ini karena tiap daerah berlainan suasananya hubungan yang erat dengan pembesar-pembesar militer setempat harus selalu diadakan. Pembesar-pembesar inilah yang menentukan secara* **umum** *tindakan-tindakan pengamanan†penyelamatan apa yang perlu diambil. Untuk tidak menggoncangkan situasi umum sedaerah hendaklah selalu mengadakan perembukan dengan pihak pembesar militer tersebut, sebelum mengadakan tindakan yang penting-penting.*

   Tindakan-tindakan pengaman†penyelamatan, juga yang mengenai pegawai, yang jika perlu dapat diambil adalah misalnya:

   a.1 mengenai gedung. Membuat omwallingen, penyamaran (camouflage), persediaan alat-alat pemadam kebakaran, latihan pegawai dalam memadami kebakaran.

   a.2 penyelamatan pegawai. Pembuatan lubang perlindungan (loopgraa), pengungsian keluarga, penyediaan dapur umum, PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), persediaan obat-obat.

   a.3 penyelamatan equipment (alat-alat. Dislokasi alat-alat, penyediaan cadangan (sparepart) stockpiling (d.s. penyediaan bahan-bahan yang kiranya cukup untuk waktu ± 3 bulan).Dalam pemakaian alat-alat harus **sangat** *diperhatikan soal* **penghematan.**

   a.4 penyelamatan paper-work. (barang-barang tercetak, model-model, surat-surat, juga uang). Persediaan model-model yang cukup (ancar-ancar untuk persediaan 3 bulan), penyimpanan berkas-berkas rahasia, penyimpanan surar-surat yang penting.

Digitized by Google

Mengenai gaji untuk pegawai PTT sendiri pada pendirian-pendirian yang mungkin sekali akan menghadapi kegentingan (terutama di daerah Maluku Irian Barat) harus tersedia sedikitnya 2 bulan gaji darurat (noodsalaris).

a.5 Mengenai supply. Diantaranya harus tersedia bahan bakar (fuel) untuk kira-kira 3 bulan.

a.6 Penyelamatan berita. Diambil tindakan-tindakan supaya jangan ada surat-surat, telegram-telegram yang tercuri. Supaya segala berita yang penyampaiannya dipercayakan kepada Jawatan PTT jangan sampai bocor.
Instruksi-instruksi yang lebih terperinci akan dikeluarkan, menurut keperluan, oleh Saudara-saudara Dirtel dan Dirpos mengenai bidangnya masing-masing.

b. Skill PTT No. 3 tgl 7-2-1962, perihal pembentukan Korps PTT untuk Irian Barat. Pada Skll tersebut dilampirkan pidato kami sendiri dan wejangan YM Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata. Dari wejangan YM Menteri itu dapat diambil kesimpulan tentang sikap yang kita harus ambil dalam menghadapi soal Irian Barat ini. Terutama kami minta perhatian Saudara akan salah satu kalimat pada halaman 3 yang berbunyi: "Hanya kita sebagai pelaksana-pelaksana, kita mempersiapkan diri untuk perang! Jangan ada wishfull thingking: Ah, Belanda tokh akan menyerah tanpa perang."

c. Surat kami tgl 1-3-1962 No. 9514/Adm tentang pembentukan homefront, khusus bagi keluarga pegawai PTT yang termasuk Korps PTT untuk Irian Barat, yang telah diberangkatkan ke-posnya masing-masing. Untuk diketahui salinan surat tersebut kami sampaikan juga bersama ini kepada Saudara-saudara Kepala Bagian Kantor Pusat dan Saudara-saudara Kepala Laboratoria dan Kepala Bengkel Pusat.

d. Ndk kami (untuk semua pendirian kecuali kantor pembantu tambahan†cabang) tgl 6-3-1962 No. 006/dgptt tentang istirahat dan consignatie sebagai penegasan instruksi sebelumnya. Dalam hubungan ini kami minta perhatian Saudara akan pelaksanaan a tentang menyumbangkan 12 hari cuti tahunan tahun 1962, seperti tercantum dalam Ndk tersebut atas permintaan YM Menteri kita dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat.
Yang rela menyumbangkan cutinya itu supaya Saudara daftarkan dan menyampaikan daftar itu pada waktunya kepada kami. Kepada semua yang rela diharapkan semua pegawai PTT - hendaklah saudara sampaikan terima kasih kami atas nama YM Menteri, dan semoga pengorbanan itu berguna bagi perjuangan untuk membebaskan Irian Barat itu.
Seterusnya perhatikan juga Ndk kami (untuk semua pendirian kecuali kantor pembantu tambahan/cabang) tgl 10-8-1962 No. 008/dgptt.

3. Instruksi-instruksi/petunjuk-petunjuk/pedoman-pedoman lebih lanjut yang sifatnya khusus, yang mungkin mengenai kantor-kantor tertentu saja, dalam bidangnya masing-masing akan menyusul menurut keperluan dari Saudara-saudara Dirtel dan Dirpos.

Digitized by Google

4. *Sudah barang tentu tidak semua keadaan dapat ge"covered" dengan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk ataupun pedoman-pedoman yang kami berikan. Dalam hal demikian dimana sesuatu tindakan harus diambil cepat-cepat dan tidak mungkin meminta instruksi dsb. dari pusat atau oleh sesuatu kantor dari Saudara, maka hal ini perlu suatu "improvisasi", yakni pengambilan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal perlu diambil tindakan secara cepat dan tidak ada petunjuk dalam peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi.*
5. *Selanjutnya kami menyampaikan kepada Saudara pesan YM Menteri kita, untuk mengindoktreneer semua bawahan bahwa perang ini sungguh perlu dalam rangkaian penyelesaian Revolusi Indonesia, dus wajib membantu sebagai patriot-patriot Indonesia. Sementara orang yang termasuk lawan politik Bung Karno mendesas-desuskan bahwa perang ini dipakainya untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh kemunduran dibidang ekonomi. Kenyataan adalah sebaliknya: kesukaran-kesukaran di bidang ekonomi adalah justru akibat dari belum selesainya persoalan Irian Barat. Untuk dapat mengakhiri perjuangan pengembalian Irian Barat itu dengan kemenangan difihak Indonesia dalam tahun ini juga, maka kita harus sekuat tenaga berdaya upaya dan memusatkan segala tenaga dan fikiran dalam mempertinggi hasil kerja.*
6. *Untuk instruksi-instruksi rahasia yang akan disampaikan dengan telegram, kami sedang menyusun suatu code Irian Barat yang khusus akan dipergunakan antara Pusat PTT, Kepala-Kepala Daerah Pos/Telekomunikasi dari Sulawesi, Maluku Irian Barat dan Nusa Tenggara, dan Team PTT yang pergi ke Irian Barat. Dalam hal diperlukan, penggunaan code tersebut dapat diperluas sampai Kepala-Kepala Daerah Pos/Telekomunikasi lainnya.*
7. *Akhirnya secara periodik (14 hari sekali setelah diterima instruksi umumini), kami mengharapkan laporan-laporan ringkas dari Saudara tentang tindakan-tindakan apa yang Saudara telah ambil dalam soal ini, dan perkembangan-perkembangan apa yang telah dialami di daerah Saudara. Hendaknya laporan tersebut dibuat ganda 3, yakni: dari Saudara-saudara Kdpos/Kkpb I Dkt untuk kami, Dirpos, Kdpl; dan dari Saudara-saudara Kdtel untuk kami, Dirtel dan Kdpl.*

Pj. Direktur Jenderal Pos, Telegrap dan Telepon,

ttd

(S.H. SIMATUPANG)

Peringatan:

Kebijaksanaan dan kewaspadaan Saudara-saudara dalam menggunakan instruksi rahasia ini dapat menyelamatkan ribuan jiwa atau menggugurkannya. Camkanlah hal ini.
Terima kasih.

Digitized by Google

KANTOR PUSAT PTT
BANDUNG *SALINAN*

NDK — RAHASIA — PRIBADI

para kdpos
para kdtel
kkpbsatu jakarta

SALINAN: 1. Sdr² Pd. Dirgen, Dirpos, Dirtel, Kadms, Kdpl, Dirps, Dirtm
2. Para Kepala Bagian Kantor Pusat (termasuk Klab Kpb)

rahasia - pribadi no 015/dgptt/rahasia/pribadi menyambung instruksi umum no 1/b/62 kurbuk srtk 12/3 no 009/dgptt/rhs kurtup untuk informasi dbrtk bahwa berhubung dengan sesuatu kejadian baru baru ini kita harus awas-awas terhadap usaha sabotase di proyek-proyek yang sangat vital dan penting ttk bhd itu diminta dengan sangat du dengan spy diperkeras kewaspadaan dan penjagaan keamanan bedrijf ttk hrus dicegah sekuat tenaga agar dalam ptt tidak du tidak terjadi sabotase ttk
kwtk kpd kami penerimaan dari ndk ini begitu pula apakah instruksi umum tsb diatas sudah diterima tthbs

_ dirgenptt _

diberikan oleh:
Kepala Urusan/Arsip/Ekspedisi,
ttd
(Djaridjis)

BANDUNG, 31 Maret 1962
Nask. No 015/dgptt/rhs pribadi

Untuk salinan:
Kepala Urusan Arsip/Ekspedisi,

ttd

(Djaridjis)

Digitized by Google

Agar anggota-anggota CIB PTT dapat menunaikan tugas sebaik-baiknya tanpa perlu memikirkan keadaan keluarganya yang ditinggalkan, maka Dirjen PTT dengan suratnya tanggal 1 Maret 1962 No 9514/Adm, menjamin keluarga-keluarga CIB dengan bantuan moril dan materil yang cukup.

Bantuan yang diberikan berupa jaminan kesehatan, beras, minyak tanah, sabun, gula pasir, minyak goreng dsb. Disamping itu juga diadakan kunjungan-kunjungan kerumah (huisbezoek) oleh pimpinan PTT bersama-sama dengan Persatuan Wanita PTT (PW PTT).

Begitu juga kepada anggota CIB PTT yang diberangkatkan diberi bingkisan-bingkisan tiap bulannya yang berisi a.l. rokok, handuk, sabun dan kebutuhan lainnya. Disamping itu uang harian juga ditambah 50% dari uang harian biasa.

CIB PTT ini secara taktis berada di bawah Komando Panglima Mandala dan tunduk kepada perintah-perintah dari ABRI. Secara administratif CIB berada di bawah Kantor Pusat PTT Bandung.

Berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi no. 7/Peperti tahun 1962 tentang Perbantuan komponen sipil pada Gubernur Militer Mandala, maka pada CIB PTT dibentuk 6 team komponen sipil yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur pos, telegrap, telepon dan radio.

Anggota-anggota Team tersebut adalah sbb :

Team I
1. Soetomo, pIpos
2. J.A. Zacharias Pntut
3. Idris, Pntut
4. A.A. Latumahuwiy, Patnt I

Team II
1. Moh. Effendi, Papos
2. Moehamad Ali, Patnt I
3. J.G. Matatula, PItnt I
4. K.F. Likumahuwa, Patnt I

Team III
1. Muh Sidik Sumawis, PIpos
2. Zagloel Dt. Modjopahit, PIpos
3. Soegiarto, Patnt
4. B. Pasoehoek, Prtel

Team IV
1. Mochtar, PIpos I
2. Sowandi, Papos
3. Mas Basuki, Pntnt
4. Basoeki Maditomo, Patnt

Team V
1. Soedarman, Papos I
2. A. Halim Ishak, Prtel
3. Soelarko, Patnt I
4. KJT Silangit, Patnt I

Team VI
1. M Soebagio, Papos
2. Suratman, Patnt
3. Undang Iin, Pgn
4. Koeswanto, Patnt I

Team I berangkat ke garis depan tanggal 26 Juli 1962 dan Team II serta III berangkat tanggal 24 Juli 1962. Team yang lain tidak jadi berangkat.

Team I Komponen Sipil CIB PTT ini berangkat bersama-sama dengan ABRI yang semuanya berjumlah $\pm$ 3.000 orang dengan menggunakan kapal MH Thamrin yang berbobot 10.000 ton. Kapal ini disamping mengangkut 3.000 penumpang juga mengangkut segala alat perlengkapan lainnya termasuk kendaraan, amunisi dan

Digitized by Google

peti mati. Peti mati sulit tersedia, jika penumpang ada yang gugur di dalam pertempuran.

Diperjalanan ada kalanya para penumpang disuruh turun meloncat ke sekoci kemudian mendarat dan masuk ke pulau-pulau yang tidak diketahui namanya.

Jangankan penumpang (CIB PTT), awak kapalpun tidak mengetahui nama pulau itu. Memang perjalanan operasi pembebasan Irian Barat sebagian besar dilaksanakan secara rahasia.

Anggota-anggota sukarelawan disuruh selalu siaga di asrama, sewaktu-waktu ditengah malam dibangunkan dan masuk ke dalam mobil konvoi dengan membawa semua peralatan tanpa diketahui kemana tujuannya. Semua pengalaman yang seram dan mencekam ini dilalui dengan segala ketabahan dan kebanggaan dengan tekad suci untuk ikut memperjuangkan pembebasan bumi persada tercinta dari penjajah Belanda.

Panglima Mandala juga minta bantuan tenaga operator dan teknisi CIB PTT. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Komandan CIB PTT dengan suratnya tanggal 15 Agustus 1962 No. 17/CIB. Team yang diperbantukan kepada Komando Mandala adalah sbb :

Para Teknisi

1. Mas Mashud, PItnt I
2. Oeka Soekardi, PItnt
3. Toefoer, PItnt
4. Aan, Patnt

Para Operator

5. Udin Suwarna, Prtel I
6. Sadimoen, Prtel I
7. Darmadji, Prtel
8. Djamain, Prtel
9. Agoes Salim, Prtel
10. Soekirman, Prtel
11. Soekiman, Prtel
12. Soewito, Prtel
13. Soemardi, Prtel
14. Moch Soleh, Prtel
15. Sutarto, Prtel
16. Mukimin, Prtel
17. Supadmo, Prtel
18. Swijanto, Prtel
19. Ngatidjo, Prtel
20. Saridjo, Prtel
21. Soedarmo, Prtel
22. Koesno Eroedi, Prtel
23. Mumu, Prtel
24. Juhana, Prtel.

Agar pelaksanaan operasi dan pekerjaan dapat berjalan sebaik dan selancar mungkin maka oleh Jawatan telah diberikan instruksi kepada anggota CIB PTT mengenai pengambilalihan PTT Irian Barat bila dilakukan pendaratan oleh Angkatan Bersenjata dengan jalan pertempuran atau dengan jalan damai.

Juga diberikan instruksi umum mengenai cara-cara melakukan timbang terima dan selanjutnya pedoman kerja dalam masa peralihan apabila terjadi penguasaan dengan kekuatan senjata atau damai.

Anggota CIB PTT juga dibekali dengan peralatan dan perlengkapan kantor yang akan digunakan kelak di Jawatan PTT Irian Barat.

Digitized by Google

Tidak ayal lagi dengan tenaga-tenaga CIB PTT yang terlatih, dibekali dengan pengetahuan militer yang berdisiplin tinggi dan instruksi-instruksi serta peralatan dan perlengkapan yang memadai maka setelah tercapainya perdamaian New York pada tgl 15 Agustus 1962, satu-satunya jawatan yang pertama-tama dapat dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah Jawatan PTT Irian Barat.

5) Bertugas di Irian Barat Masa UNTEA

Penyusupan-penyusupan sukarelawan Indonesia baik melalui laut maupun udara berhasil mencapai daratan Irian Barat dan selanjutnya membangun kantong-kantong gerilya di beberapa tempat.

Di kantong-kantong gerilya ini sukarelawan yang terlatih dan bersenjata lengkap itu mengkonsolidasi diri dan sekali-kali mengadakan penghadangan dan pencegatan terhadap patroli-patroli tentara Belanda.

Tidak puas hanya dengan penghadangan dan pencegatan saja, diwaktu malam hari sering juga sukarelawan Indonesia melakukan secara mendadak serbuan-serbuan kilat ke tangsi-tangsi tentara Belanda. Kontak-kontak senjata tidak dapat dihindarkan dan korban-korban berjatuhan pada kedua belah pihak.

Meskipun taktik yang dilakukan gerilyawan adalah hit and run, namun tekanan yang dilakukan oleh sukarelawan-sukarelawan tersebut sangat menggoncangkan pemerintah Belanda dan menarik perhatian dunia.

Bagi rakyat Indonesia sudah jelas dengan atau tanpa perang Irian Barat pasti dapat dibebaskan dari penjajah Belanda. Ketegangan-ketegangan antar Indonesia-Belanda semakin hari semakin memuncak dan mencemaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba memprakarsai secara tidak langsung usaha-usaha perdamaian untuk meredakan ketegangan. Pada tanggal 26 Mei 1962 tampillah suatu konsep perdamaian, terkenal dengan usul Ellsworth Bunker yang diumumkan oleh Pejabat Sekretaris Jenderal PBB, U Thant.

Atas jasa-jasa PBB yang menugaskan Ellsworth Bunker akhirnya Belanda bersedia berunding kembali dengan Indonesia.

Sebagai hasil dari perundingan-perundingan tersebut, maka pada tanggal 31 Juli 1962 tercapai suatu persetujuan sementara (Preliminary Understanding) yang berisi pokok-pkok sebagai berikut :

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda maka selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 penguasa dari Badan Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority/UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Saat itu juga bendera Belanda diturunkan, yang berarti kekuasaan atas daerah tersebut diserahkan kepada UNTEA.
2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik Sipil maupun alat-alat keamanan bersama-sama dengan alat-alat keamanan putera-putera Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.

Digitized by Google

3. Pasukan-pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.
4. Angkatan Perang Belanda mulai saat itu secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang berangkat akan ditempatkan dalam pengawasan PBB dan tidak boleh dipergunakan untuk operasi-operasi militer.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lain berlaku lalulintas bebas.
6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah R.I. secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintah Sementara PBB.

Setelah persoalan-persoalan teknis dapat diselesaikan kemudian meningkat memasuki taraf perundingan formil secara terbuka. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 persetujuan tersebut ditanda-tangani di Markas Besar PBB New York dan mendapat pengesahan dari Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 1962 *)

Sesuai dengan persetujuan New York maka pada tanggal 1 Oktober 1962 dilakukanlah serah terima Pemerintahan dari Belanda kepada UNTEA dan turunlah bendera Belanda di bumi Irian Barat dan untuk sementara digantikan oleh Bendera PBB.

Masa peralihan kekuasaan pemerintah dari tangan Belanda kepada Indonesia melalui Badan Pemerintah Sementara PBB tersebut berlangsung selama 6 bulan, ialah :

a. Antara 1 Oktober 1962 sampai 31 Desember 1962 masa peralihan antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Badan Pemerintahan Sementara PBB.

b. Antara 1 Januari 1963 sampai 1 Mei 1963, masa peralihan antara Badan Pemerintahan Sementara PBB dengan Pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian maka mulai 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat secara de-facto maupun de-jure masuk ke dalam wilayah kekuasaan RI. Untuk menjaga ketertiban selama Pemerintahan Peralihan berlaku, maka ditempatkan pasukan-pasukan dari Pakistan yang berstatus sebagai pasukan keamanan PBB. Sebagai Kepala Pemerintahan Sementara semula ditunjuk Ellsworth Bunker, tetapi karena tidak bersedia, maka ditetapkan Dr. Djalal Abdoh dari Pakistan **)

Sejak tanggal 1 Oktober 1962 ini Pemerintah Sementara PBB memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama-sama dengan alat-alat keamanan putera-putera Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.

Meskipun telah menanda-tangani perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 namun Pemerintah Belanda masih tetap menyebarkan issue-issue yang hendak me-

*) *Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat. Drs. Cholil. Hal. 89.*

**) *Cholil M., Drs. "Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat." Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1974.*

Digitized by Google

mecah belah orang Irian Barat dengan orang Indonesia lainnya.

Seperti yang ditulis oleh Koresponden Suratkabar Belanda "de Telegraaf" di Irian Barat, bahwa orang-orang "Papua", demikian pihak Belanda menyebutnya di Holandia (Kotabaru pada waktu itu) telah mengasah parang-parangnya "Scherp als scheermessen" (setajam pisau cukur) untuk nanti digunakan bagi menyambut orang-orang Republik Indonesia yang akan datang, secara hangat *)

Ternyata sewaktu rombongan Pemerintah Republik Indonesia yang pertama di bawah pimpinan Mr. Soedjarwo Tjondronegoro mendarat di Kotabaru pada sore hari tanggal 1 Oktober 1962 itu keadaan aman-aman saja**)

Rombongan pertama CIB PTT berangkat dari Jakarta tanggal 5 Oktober 1962 hari itu juga sampai di Biak jam 13.15 dan terus melanjutkan perjalanan dan tiba di Kotabaru jam 16.00.

Di lapangan terbang Biak, oleh pihak Belanda yang masih bertugas disana dicoba untuk memeriksa barang-barang dari rombongan RI hal mana oleh Mr. Maramis diprotes keras. Akhirnya tanpa pemeriksaan, maka barang-barang dari semua anggota rombongan dipindahkan dari pesawat langsung ke pesawat-pesawat Dakota Kroonduif yaitu dari rombongan tentara ke pesawat Dakota UNTEA dan rombongan sipil ke 2 buah pesawat Dakota Kroonduif.

Pekerjaan memindahkan barang-barang tersebut turut dibantu oleh para anggota rombongan, karena pelayanan di lapangan terbang itu sangat tidak memuaskan; walaupun tibanya di Biak sebenarnya jam makan namun dilapangan tersebut tidak ada persediaan atau kemungkinan untuk makan, sehingga seluruh anggota rombongan dengan perut kosong harus meneruskan perjalanan ke Kotabaru.

Tiba di rumah Kepala Perwakilan RI sudah malam hari. Menurut keterangan pihak Perwakilan RI, sebenarnya rombongan PTT belum diharapkan akan tiba pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober, melainkan baru ditunggu kedatangannya pada hari Senin 8 Oktober. Berhubung dengan itu tidak diadakan persiapan-persiapan untuk menerima rombongan PTT. Rombongan PTT disambut/dijemput oleh Saudara Pratomo.

Patut dihargakan bantuan/aktivitas dari Staf Perwakilan RI yang segera dapat mencari tempat penginapan untuk rombongan PTT dan para anggota staf perwakilan sendiri yang menanak nasi untuk rombongan PTT. (pelayan-pelayan hanya bekerja sampai sore hari). Makan malam hari itu pada jam 22.30.

Tempat menginap rombongan PTT ialah gedung Lagere school di Dok V yang sudah kosong/tutup karena murid-muridnya pulang ke Negeri Belanda. Rombongan PTT yang jumlah anggotanya 16 orang tersebut dimasukkan dalam satu kamar ukuran 8 x 71/2 M, masing-masing mendapat satu kasur dan karena tidak ada tempat tidur, semuanya berjejer diatas lantai. Kamar mandi dengan does waterleiding, lampu listrik sepanjang hari/malam.

Rombongan pertama CIB PTT yang mendarat di Kotabaru Irian Barat tanggal 5 Oktober 1962 itu terdiri dari :

1. Ban Seng Hok, PIpos I (Ketua Rombongan)

*) *"Rendez-vous dengan Revolusi" di Irian Barat, Idayu Press, Jakarta 1977. Hal. 31*
**) *"Rendez-vous dengan Revolusi" di Irian Barat, Idayu Press, Jakarta 1977. Hal. 32*

Digitized by Google

2. Soebandi, PIpos I
3. R. Achmad Moh Chairoedin, PIpos
4. Soetomo, PIpos
5. Soewandi, Prpos I
6. Soedarjono, Prpos I
7. Maskoen, Prpos I
8. Endang Thomas, Prpos
9. Soemitro, Prpos
10. Soetojo, Prpos
11. Soebandi, Prpos
12. Maralempang Harahap, Prpos
13. Auw Jang Bung Hong, Prtel I
14. Jusuf Sudarno, Prtel I
15. Soekarwono, Prtel
16. Nur Sahid, Prtel

Rombongan ke-dua CIB PTT pimpinan A. Latif Mantika Radja tiba di Kotabaru tanggal 12 Oktober 1962. Rombongan ke-dua ini diikuti oleh rombongan-rombongan berikutnya.
Akhirnya semua anggota CIB PTT yang tiba dan bertugas di Irian Barat adalah 232 orang.

Selanjutnya lebih dulu, perlu dikemukakan dari Perwakilan RI bahwa semua lowongan di UNTEA harus diisi oleh tenaga-tenaga Indonesia. Tidak menjadi soal, apakah lowongan itu diisi oleh tenaga Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan pangkatnya cq. lebih tinggi atau lebih rendah nanti kemudian baru akan ditertibkan. Pokoknya harus diusahakan dengan jalan apapun juga supaya setiap lowongan yang ada diisi oleh tenaga-tenaga Indonesia *)

Dua hari setelah tiba di Kotabaru rombongan pertama CIB PTT segera mengambil alih kantor-kantor dari kekuasaan Belanda.
Pengambil alihan yang dimaksud adalah sbb :

1. Ban Seng Hok, PIpos I:
   Headoffice PTT (Chief Postal Organization Section Algemene post en Vervoerzaken A-Vpost) = mengambil oper pada tanggal 8 Oktober 1962 dari Inspecteur PD Lapre (A-Vpost Belanda).
2. Soebandi S, PIpos I:
   Postmaster GPO Biak.
3. R. Achmad Moh Chiaroedin, PIpos:
   Postmaster GPO Hollandia = Timbang terima dengan Hoofdbedrijfambtenaar P. Klaassen (Kepala Kantor Pos Belanda) pada tanggal 9-10-1962.
4. Soetomo, PIpos:
   Headoffice PTT (Chief financial matters & services section = Upos) = mengambil oper pada tanggal 8-10-1962 dari Hoofdbedrijfambtenaar W. Driessen (Upos Belanda).

*) *Laporan dari Irian Barat, Ban Seng Hok, hal. 3.*

Digitized by Google

5. Soewandi Prpos I:
   Senior clerk Fin matter.
6. Soedarjono, Prpos I:
   Senior clerk GPO Biak.
7. Endang Thomas, Prpos:
   Senior Postal Ass GPO Hollandia mulai bekerja tanggal 9-10-1962.
8. Maskoen, Prpos I:
   Berhubung rencana CIB PTT bahwa ybs kelak akan diperbantukan pada Pos Militer Kotabaru, maka ybs ditempatkan di Headoffice sebagai Postal ass. Organisation section mulai bekerja pada tanggal 11 Nopember 1962.
9. Maralempang Harahap, Prpos:
   Postal ass. GPO Biak.
10. Soemitro, Prpos:
    Postmaster PE Enarotali.
11. Soebandi, Prpos:
    Postmaster PO Teminabuan.
12. Soetojo, Prpos:
    Postmaster Tanahmerah.
13. Auw Jong Bung Hong, Prtel:
    Radio Bedrijfscentrale Biak.
14. Jusuf Sudarno, Prtel I:
    Headoffice (Telegraph Section = Ktgp) mulai bekerja tanggal 11-10-1962.
15. Soekarwono, Prtel:
    Headoffice Telegraph section = Ktgp) mulai bekerja 11-10-1962.
16. Nur Sahid, Prtel:
    *G. Postoffice Hollandia (Loket T.10) *)*

Sebenarnya pegawai-pegawai Warganegara Belanda masih ingin terus bekerja setidak-tidaknya sampai berakhirnya masa UNTEA. Tetapi pimpinan CIB PTT Ir. Sahertian mengambil tindakan tegas. Semua pekerjaan pegawai Warganegara Belanda harus segera diambil alih oleh CIB PTT, kecuali pegawai Irian Barat jika setia kepada RI dapat tetap terus bekerja. Ban Seng Hok dalam hal ini melaporkan sebagai berikut:

"Mengenai dinas-dinas yang dibuka dapat dikemukakan bahwa menurut keterangan dari Pejabat Belanda, atas perintah lisan dari Administrator UNTEA semua dinas yang dibuka sebelum 1 Oktober 1962 harus dilanjutkan. Dengan demikian maka GPO-GPO dibuka untuk dinas: kiriman tercatat, pospaket (dalam dan luar negeri = Naderland, Suriname, New Antilen, USA, Irian Timur, Australia), poswesel (dalam negeri, luar negeri = Nederland, Australia, Irian Timur dan Selandia Baru), rekening koran, Bank Tabungan Pos.

Sehubungan dengan ini atas permintaan PBB, Administrasi Pos Nederland, cq Adviseur voor overzeese PTT (Pos) - betrekingen = BO PTT bertindak sebagai inter-

G.P.O. = General Post Office.

**) Ban Seng Hok, Laporan Dari Irian Barat. Hal. 7*

Digitized by Google

mediari antara PTT (pos) UNTEA dan administrasi pos luar negeri lainnya mengenai perhitungan-perhitungan dan lain sebagainya.

Diterangkan juga oleh Pejabat Upos Belanda bahwa atas perintah lisan dari Mr. Wong pada akhir September yang lalu bendapos yang dipakai oleh PTT UNTEA ialah sisa persediaan PTT Nieuw Guinea (Mr. Wong adalah salah seorang pembantu dari Sekjen PBB dan sekarang telah kembali ke New York). Naskah resmi mengenai penunjukan pemakaian prangko PTT NG selama Pemerintahan UNTEA tidak terdapat dalam arsip Biro HPos.

Pada akhir bulan September 1962 oleh pengurus bendapos Belanda diadakan stock opname. Prangko-prangko, Kartupos, Aerogram dan Warkatpos yang (akan) diedarkan, diberikan teraan (overdruk) "UNTEA"

Tetapi ternyata dua minggu kemudian telah terjadi "run" oleh para philatelis disemua Kantorpos di Irian Barat sehingga menyulitkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan prangko guna pemerangkoan kiriman-kiriman pos mereka.

Dalam dua minggu pertama itu diberikan oleh Headoffice kepada kantor-kantor kurang lebih 50.000 seri, tapi toh hampir dari semua Distriek Commisioner (Residen) diterima laporan-laporan/pengaduan-pengaduan/kekurangan prangko. Karena hal itu menyulitkan chief Postal Organisation Section yang baru mulai bertugas dan guna mengatasi kesulitan itu maka terpaksa dengan pengetahuan Postgen UNTEA dikeluarkan instruksi kepada kantor-kantor untuk membatasi penjualan prangko hanya kepada para pemakai pos bonafide, yaitu melulu guna pemerangkoan kiriman-kiriman pos.

*Perlu diketahui bahwa Landsdrukkerij yang melakukan pekerjaan peneraan "UNTEA" pada prangko-prangko, warkatpos dan kartupos tidak dapat byhanden permintaan/kebutuhan kantor-kantor dan para philatelis; kapasitet sehari hanya kurang lebih 5.000 seri sehari kerja, itupun kalau aliran listrik tidak mendapat gangguan dan pekerja masuk bekerja. Mesin cetak hanya satu buah dan dapat dimaklumi kiranya bahwa peneraan velle yang sudah diberi gom itu agak seret karena harus diambil/dipegang satu demi satu vel baru dimasukkan ke dalam mesin cetak *)*

Semua anggota CIB PTT yang bekerja pada Jawatan PTT Irian Barat sejak tanggal 1 Oktober 1962 sampai 30 April 1963 statusnya adalah sebagai pegawai UNTEA Dengan demikian mereka juga digaji oleh UNTEA. Meskipun status mereka adalah sebagai pegawai UNTEA namun dalam prakteknya mereka sehari-hari bekerja untuk kepentingan RI.

Pengangkatan dan penetapan gaji pokok (Pegawai CIB PTT yang dipekerjakan pada UNTEA) didasarkan atas peraturan gaji pegawai Belanda di Irian Barat, yaitu "Bezoldigingsregeling Landsdinaren Ned. NG. 1957 , disingkat BLANG 1957. Gaji kotor dari masing-masing pegawai terdiri atas gaji pokok + tunjangan-tunjangan kemahalan (bagi yang kawin 171/2% x gaji pokok, yang tidak kawin 5%) + tunjangan anak (tiap anak 10% dengan maksimum 100%), sedangkan potongan-potongan ialah pajak peralihan, sumbangan perawatan dokter, sewa rumah, listrik, waterleiding.

**) Progres Report No. 3. Ban Seng Hok, Hal. 11*

Digitized by Google

"Dalam rapat yang diadakan di Perwakilan RI, juga diputuskan agar supaya semua pegawai dari Indonesia yang bekerja pada UNTEA harus memberikan sumbangan wajib tiap bulan waktu penerimaan gaji, besar uang sumbangan mana ditetapkan sebagai berikut:

a. Gaji bersih : ..... di bawah F.600,- 10%
b. Gaji bersih : F.60,- s/d F. 1.000,- 15%
c. Gaji bersih : F.1.000,- dan keatas 20%

Sumbangan wajib ini mulai berlaku dengan penerimaan gaji bulan Oktober yang lalu dan para Ketua Rombongan pegawai Departemen/Jawatan masing-masing bertanggung-jawab atas pemungutannya dari masing-masing anggota rombongannya" *)

Beberapa orang anggota CIB PTT yang diperbantukan kepada dinas Pos Militer sebagai anggota Joint Board Posmilla, yaitu:

1. A. Latif
2. L. Rubini
3. R. Achmad Moh. Chiaroedin
4. Ibrahim Rachman
5. J.S. Walanda
6. Soedarman
7. J. Rieuwpassa
8. Prijo Soegono
9. A. Moeis.

Mengenai anggaran belanja dari UNTEA dikemukakan dalam UNTEA Bulletin of Economic Affair tanggal 5 Nopember 1962 bahwa penerimaan adalah sebesar NGF1 20.473.500,- dan pengeluaran sebesar NGFL 70.385.000,- sehingga dengan demikian akan mengalami deficit sebesar NGFL 49.911.500,- deficit mana menjadi tanggungan bersama antara Pemerintah RI dan Nederland (catatan US $ 1.00 = NGFL 3,62).

Baik sekali diketahui bahwa anggota CIB PTT yang tiba di Irian Barat segera disebar ke daerah-daerah untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan di Kotabaru yang telah ditinggalkan Belanda. Setelah mereka tiba di daerah-daerah ternyata pegawai Jawatan lain belum ada yang datang. Seperti halnya dengan Soebandi, Pjpos adalah tugas Pemerintah RI yang pertama-tama tiba di Teminabuan tanggal 1 Nopember 1962 mendahului petugas-petugas ABRI atau lain Jawatan dan merangkap Kepala Stasiun Radio. Dalam melakukan tugas banyak ancaman-ancaman terhadap jiwanya dari unsur-unsur yang anti RI. Untunglah ABRI segera tiba dan memberikan bantuan di bidang sekuriti.

Bahkan ada juga seorang anggota CIB PTT seperti Soemitro Kepala Kantor Pos Pembantu Enarotali karena jasa-jasanya kemudian oleh Soedjarwo Tjondronegoro,

*) *Laporan dari Irian Barat. Ban Seng Hok. Hal. 4*

Digitized by Google

SH, Kepala Perwakilan RI semasa UNTEA diberikan tempat di Konsultat RI di Hongkong. *)

Sehubungan dengan kebijaksanaan pimpinan CIB PTT yaitu agar semua pekerjaan pegawai warganegara Belanda harus segera diambil alih maka semua anggota CIB PTT yang telah tiba di Kotabaru segera disebar ke daerah-daerah sehingga semua jabatan penting pada permulaan Januari 1963 telah dijabat oleh CIB PTT. Jika masa UNTEA diperpendek, semua tugas sudah dapat dilaksanakan.

Jika bulan Oktober 1962 adalah bulan pendaratan dan penyebaran anggota CIB PTT keseluruh daerah-daerah Irian Barat dalam rangka pengambil alihan tugas-tugas pekerjaan, maka bulan Nopember 1962 adalah bulan penerimaan laporan-laporan dari dan peninjauan-peninjauan ke daerah.

Pada tanggal 12 Nopember 1962 A. Latif berangkat dengan pesawat bersama dengan Ir. Sahertian, Ir. Bahdar Djohan dan Pltnt Razak mengikuti Mr. Etherington (Dir. Communication, Transport & Power) dalam perjalanan peninjauan ke Biak, Manokwari dan Sorong. Plpos Soetomo dengan dibantu oleh Prpos I Soewandi mulai mengadakan perjalanan peninjauan ke Biak, Fakfak, Serui, Sorong dan Manokwari tanggal 14 Nopember 1962 **)

Dari daerah-daerah diterima laporan dari Prpos Subandi (Teminabuan) 7 Nopember 1962, Prpos I Soedarjono (Kokonao), Prpos Soemitro (Enarotali), Prpos Soetojo (Tanah Merah) ***)

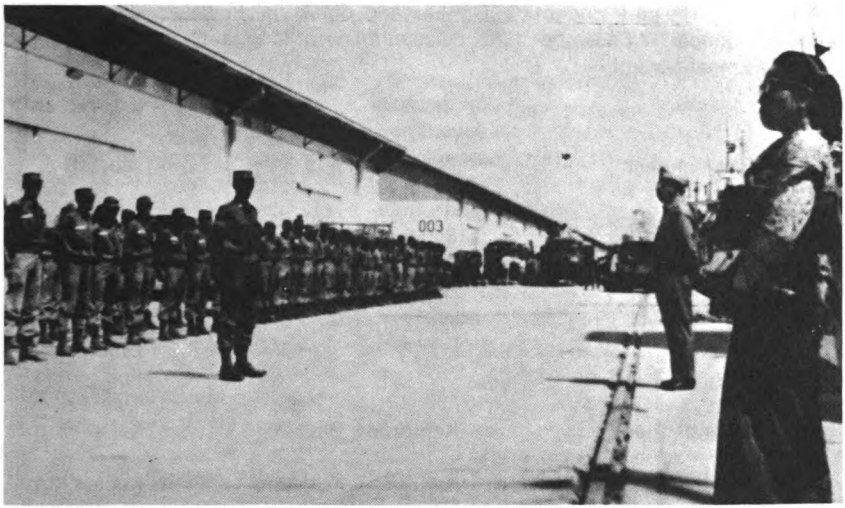
Laporan dari daerah berisi a.l.:

1. Kedatangan di daerah dan keadaan kantor.
2. Tenaga dan alat-alat yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dan kesetiaan pegawai pribumi Irian Barat kepada Pemerintah RI. Putera-putera Serui sejak dulu terkenal di Irian Barat sebagai golongan pribumi yang sejak dulu tetap konsekwen memihak RI.
4. Minta dikirim foto Bung Karno, Bendera Merah Putih dan majalah-majalah.
5. Inventaris kantor yang sudah ada.
6. Penurunan bendera Belanda (oleh Prpos Soemitro).

Dalam menjalankan tugas di Irian Barat di masa UNTEA pernah juga terjadi ketegangan antara CIB PTT dengan UNTEA menghendaki agar hubungan telekomunikasi dengan luar negeri tetap dilaksanakan seperti dulu yaitu melalui negeri Belanda, sedangkan CIB PTT melaksanakannya melalui Jakarta. UNTEA menganggap hal itu suatu pelanggaran. CIB PTT bersikeras melalui Jakarta atau anggota CIB PTT meninggalkan Irian Barat! Akhirnya UNTEA menyetujui hubungan telekomunikasi dengan luar negeri melalui Jakarta.

*) *Progress Report, Ban Seng Hok. Hal. 18, 20.*
**) *Progress Report, Ban Seng Hok, Hal. 18*
***) *Progress Report, Ban Seng Hok, Hal. 18*

Digitized by Google



Direktur Jenderal PTT, S.H. Simatoepang dan Ketua PW PTT, Ny. Momod Ranawidjaja menyaksikan Apel Siaga anggota-angota CIB PTT di Tanjung Priok, Jakarta.

Digitized by Google

Adapun daftar para anggota CIB PTT yang dipekerjakan dalam dinas UNTEA (keadaan sampai 17 Desember 1962, disusun menurut tanggal tibanya di Kotabaru) adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama/pangkat	Tempat bekerja	Jabatan
Tanggal tiba di Kotabaru: 5 Oktober 1962			
1.	S.H. Ban, PIpos I	Headoffice, Kotabaru	Chief Postal Organization Section
2.	Soebandi, PIpos I	Kantorpos, Biak	Kepala Ktp
3.	R. Achmad Moh. Chiaroedin, PIpos	Kantorpos, Kotabaru	Kepala Ktp
4.	Soetomo, PIpos	Headoffice Kotabaru	Chief Fin Matters & Postal Services
5.	Soewandi, Prpos I	idem	Senior Clerk Fin. Matters & Postal Services
6.	Soedarjono, Prpos I	Kantorpos, Biak	Senior Clerk
7.	Maskun, Prpos I	Kantorpos Pembantu, Hollandia Binnen	Pengurus
8.	Endang Thomas, Prpos	Kantorpos Kotabaru	Senior Clerk
9.	Sumitro, Prpos	Kantorpos Pembantu, Enarotali	Pengurus

Digitized by Google

No. Urut	Nama/pangkat	Tempat bekerja	Jabatan
10.	Sutojo, Prpos	Kantorpos Pembantu, Tanahmerah	idem
11.	Subandi, Prpos	Kantorpos Pembantu Teninabuan	idem
12.	Maralempang Harahap, Prpos	Kantorpos, Biak	Senior Clerk
Tanggal tiba di Kotabaru **12 Oktober 1962**			
13.	A. Latif, Pspos	Headoffice Kotabaru	Chief Postal Services Division
14.	Tasono, Prpos I	Kantor Telepon Kotabaru	Ketua Tata Usaha
15.	Soedar, Prpos I	Kantorpos Pembantu Kokonao	Pengurus
16.	Soeparno, Prpos I	Kantorpos Kotabaru	Ketua Pos
17.	Dulgani, Prpos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Administrasi
18.	M. Noor Latuconsina, Prpos	Kantorpos Pembantu	Pengurus
Tanggal tiba di Kotabaru: **30 Oktober 1962**			
19.	Mochtar, Plpos I	Kantorpos Biak	Bendaharawan
20.	Abdoel Moeis, Plpos	Kantorpos Kotabaru	idem

Digitized by Google

No. Urut	Nama/Pangkat	Tempat Bekerja	Jabatan
Tanggal tiba di Kotabaru: **16 Nopember 1962**			
21.	J. Walanda, PIpos	Kantorpos Sorong	Kepala Kantor
22.	Moh. Sidik Sumawis, PIpos	Kantorpos Manokwari	idem
23.	Sjoekri Nasri, PIpos	Headoffice Kotabaru	Supervisor Account-Current Services
24.	Sudarman, Papos I	Kantorpos Merauke	Kepala Kantor
25.	R. Soenarto, Papos I	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Mail Transport Section
26.	S.A. Lakona, Papos I	idem	idem
27.	K.R. Verdouw, Papos I	idem	Supervisor Money Order Service
28.	Ibrahim Rachman, Papos	idem	Chief Stamp Supply Section
29.	Mintargo Sarpinoedji Papos	Kantorpos Biak	Ketua Pos
30.	Hadjar Subagio, Papos	idem	Pengawas Kantor-pos Kantorpos Pembantu
Tanggal tiba di Kotabaru **21 Nopember 1962**			
31.	Moeljoto, PIpos I	Headoffice Kotabaru	Chief Mail Transport Section

Digitized by Google

No. Urut	Nama/Pangkat	Tempat Bekerja	Jabatan
Tanggal tiba di Kotabaru: **3 Desember 1962**			
32.	Soekirman, PIpos	Kantorpos Kotabaru	Ketua Adminis-trasi
33.	Soewarso, Papos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Telekomunikasi
34.	Bawoek Sutarmin, Papos	Kantorpos Sorong	Bendaharawan
35.	Soewondo, Papos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Mail Transport Section
36.	M. Naula, Papos	idem	Senior Clerk/ Telekomunikasi
37.	Sjamsuddin, Papos	Kantorpos Kotabaru	Ketua Pos
38.	Njakban, Papos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Telekomunikasi
39.	Soekaton, Papos	idem	idem/Adminis-trasi
40.	Mochamad Sneltrein Papos	idem	idem
41.	M.A. Limaheluw, Papos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Telekomunikasi
42.	Darminta, Prpos I	Kantorpos Manokwari	Ketua Pos
43.	Prijo Sugono, Prpos I	Kantorpos Pembantu Kaimana	Pengurus

Digitized by Google

No. Urut	Nama/Pangkat	Tempat Bekerja	Jabatan
44.	Sairi Sjamsul Bahri Prpos I	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Telekomunikasi
45.	Atje, Prpos I	Kantorpos Pembantu Serui	Pengurus
46.	J. Rieupassa, Prpos I	Kantorpos Pembantu Fakfak	idem
47.	Warsoko, Prpos I	Kantorpos Sorong	Ketua Pos
48.	Usman Ali, Prpos	Kantorpos Kotabaru	Senior Clerk
49.	R. Pandji Soekarso Prpos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Telekomunikasi
50.	Sarwono, Prpos	idem	Senior Clerk/ Administrasi
51.	Njoman Wirata, Prpos	Kantorpos Pembantu Hollandia Binnen	Senior Clerk
52.	Mochtar Effendi Prpos	Kantorpos Pembantu Servis	Pengurus
53.	Piet Withuyzen, Prpos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Administrasi
54.	Kasih Soewandi, Prpos	Kantorpos Kotabaru	Senior Clerk
55.	Jonas Alfons, Prpos	Kantorpos Merauke	idem

Digitized by Google

No. Urut	Nama/Pangkat	Tempat Bekerja	Jabatan
56.	Hassan, Prpos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Telekomunikasi
57.	Kardono, Prpos	Kantorpos Manokwari	Senior Clerk
58.	Jajat Prijatna, Prpos	Kantorpos Merauke	Senior Clerk
59.	Den Massaela, Prpos	Headoffice Kotabaru	Senior Clerk/ Telekomunikasi
60.	Djoemasi, Prpos	Kantorpos Pembantu Ransiki	Pengurus
61.	W. Sahulata, Prpos	Kantorpos Sorong	Senior Clerk *)

Pelaksanaan tugas oleh anggota CIB PTT ini berjalan lancar sampai habis masa UNTEA tanggal 30 April 1962.

Tanggal 1 Mei 1963 adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan Saudara-saudara kita di Irian Jaya pada khususnya. Pada hari itu telah dilakukan serah terima pemerintahan atas wilayah Irian Jaya dari UNTEA kepada Republik Indonesia.

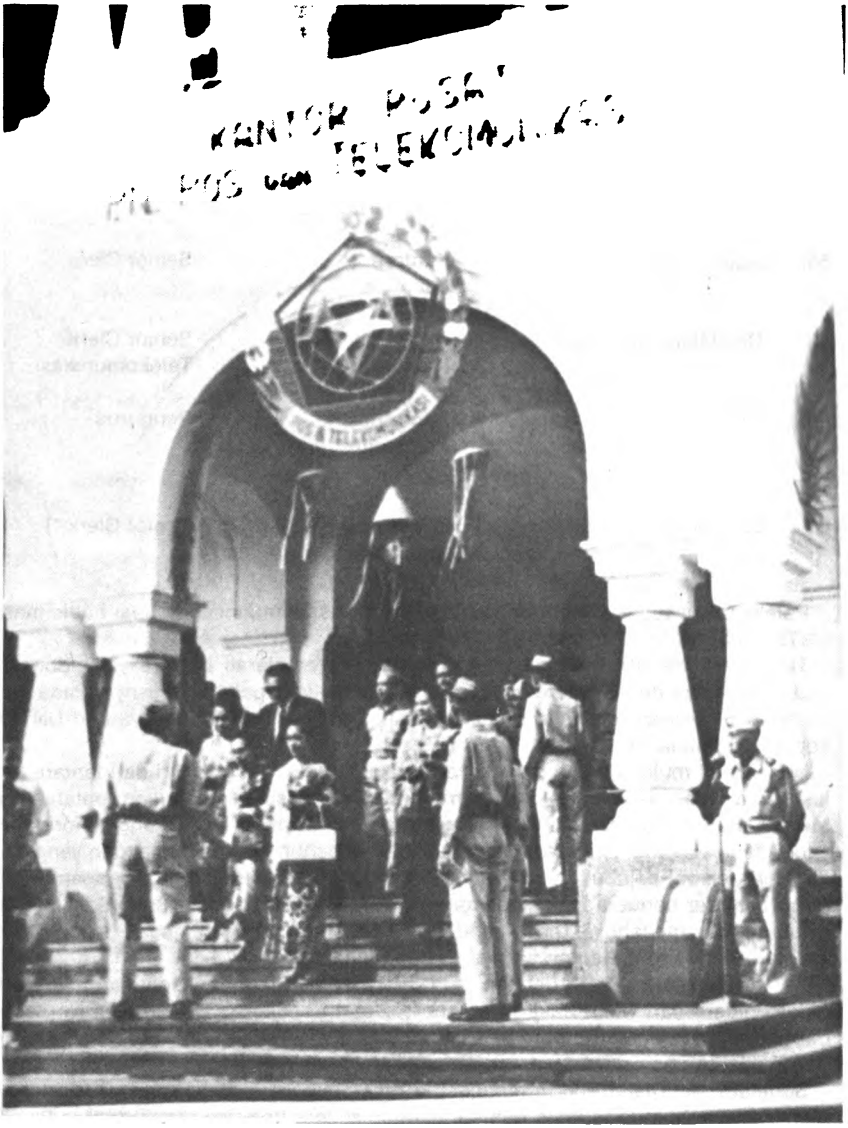
Upacara di mulai dengan masuknya pasukan UNTEA yang terdiri dari tentara Pakistan ke dalam lapangan, kemudian diikuti oleh masuknya pasukan tentara kita. Mereka membentuk barisan yang sangat rapih. Di kanan-kiri panggung kehormatan yang membelakangi jalan raya, kursi-kursi telah penuh dengan undangan yang terdiri dari pejabat-pejabat diplomatik, sipil dan militer. Disamping muka kanan panggung berkibar bendera PBB, sedangkan di samping kiri berkibar Sang Saka Merah Putih dengan megahnya. Diseberang jalan raya berdiri dengan megah gedung Perwakilan Rakyat yang hampir selesai pembangunannya.

Setelah upacara dibuka dengan pidato singkat dari panitia, kemudian menyusul pidato-pidato dari wakil-wakil RI antara lain dari Soedjarwo Tjondronegoro. Sebagai puncak acara ialah pidato wakil PBB atau pimpinan UNTEA Mr. Djalal Abdoh dari Pakistan.

Sebelum Mr. Djalal Abdoh mengakhiri pidatonya yang panjang lebar itu, tanpa menunggu komando terlebih dahulu, dengan segera tiba-tiba sekali tentara Pakis-

*) *Progress Report, Ban Seng Hok. Hal 33.*

Digitized by Google



Kantor Pusat P.N. Pos & Telekomunikasi saat pelepasan CIB.

Digitized by Google



Sukarnopura (Jayapura), 1 Mei 1963.
Upacara serahterima pemerintahan atas wilayah Irian Jaya dari UNTEA kepada Republik Indonesia.

Digitized by Google

tan yang bertugas di bawah tiang bendera PBB melepaskan tali bendera yang sedang dipegangnya, hingga bendera yang sedang berkibar itu meluncur dengan cepat ke bawah laksana pakaian basah yang jatuh dari udara. Kejadian ini berlangsung hanya dalam beberapa detik saja. Semua hadirin kelihatan terkejut dan heran.

Setelah Mr. Djalal Abdoh selesai berpidato, ia mendapat tepukan yang meriah dari hadirin. Acara penurunan bendera PBB tidak mungkin diadakan lagi, karena bendera PBB sudah ada di bawah. Yang masih berkibar dengan megahnya tinggal Sang Saka Merah Putih yang seolah-olah mengajak kita semuanya untuk segera memulai membangun wilayah yang baru saja bebas dari penjajahan. *)

Dengan kembalinya Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, utuhlah sudah wilayah Negara Kesatuan dari Sabang sampai Merauke.

Pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda dengan Trikora yang dikumandangkan tanggal 19 Desember 1961 merupakan puncak pengabdian dari Bung Karno yang gandrung kepada persatuan dan kesatuan Bangsa dan Wilayah Indonesia yang dicintainya selama hayat dikandung badan.

Tepat pada 1 Mei 1963 itu pula PN Postel membentuk daerah Pos dan Telekomunikasi Irian Barat yang meliputi seluruh daerah Irian Barat dan yang di dalamnya terdapat semua pendirian Postel di daerah tersebut. Daerah Postel Irian Barat dipimpin oleh Kepala Daerah Pos dan Telekomunikasi Irian Barat yang berkedudukan di Kotabaru yaitu Ir. M.J. Sahertian.

Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Juli 1962 daerah Postel Irian Barat dipecah menjadi Daerah Pos dan Telegrap Irian Barat, dan Daerah Telekomunikasi Irian Barat yang meliputi seluruh daerah Irian Barat pula. Daerah Pos dan Telegrap Irian Barat dan Daerah Telekomunikasi Irian Barat dipimpin oleh masing-masing Kepala Daerah Pos Telegrap Irian Barat, dan Kepala Daerah Telekomunikasi Irian Barat yang keduanya berkedudukan di Kotabaru.

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1963 pula A. Latif Mantika Radja ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Daerah Pos dan Telegrap Irian Barat dan Ir. Gusti Bahder Djohan sebagai Penjabat Kepala Daerah Telekomunikasi Irian Barat.

Bagan Daerah-daerah Pos dan Telegrap setelah daerah Irian Barat Pos dan Telegrap terbentuk dapat diikuti pada Lampiran 8.

6) Selesai Bertugas di Irian Barat

Sejak pendaftaran menjadi Sukarelawan perjuangan pembebasan Irian Barat sampai tanggal 1 Mei 1963 saat turunnya bendera UNTEA, yang dapat dianggap saat selesainya tugas khusus, CIB PTT tidak pernah menuntut hak-hak istimewa kepada Jawatan PTT yang kemudian menjadi Perusahaan negara Pos dan Telekomunikasi ataupun kepada Pemerintah RI.

Mereka bertekad hanya menjalankan tugas suci demi pengabdian kepada bangsa dan negara tanpa pamrih dan janji-janji apapun baik dari Perusahaan maupun dari Pemerintah. **)

*) *Soemirto, "Turunnya Bandera PBB dan Kenangan CIB.", Gema Telekomunikasi, Hal. 37, 38.*

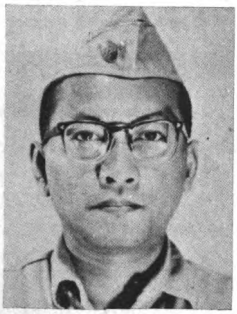
**) *Wawancara dengan A. Latif Mantika Radja.*

Digitized by Google

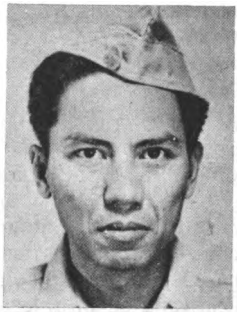
PIMPINAN PTT IRIAN BARAT



Ir. M.J. Sahertian
Kepala PTT Irian Barat.



A. Latif Mantika Radja
Kepala Daerah Pos Irian Barat, yang pertama



Ir. Gusti Bahder Djohan
Kepala Daerah Telekomunikasi Irian Barat, yang pertama.

Digitized by Google

Bingkisan-bingkisan yang diberikan kepada mereka yang diberangkatkan ke garis depan, jaminan-jaminan yang diberikan kepada anggota keluarga di garis belakang oleh Perusahaan, begitu juga gaji yang diberikan oleh UNTEA selama anggota CIB PTT diperbantukan pada UNTEA sama sekali di luar perhitungan mereka.

Meskipun mereka tidak menuntut, namun penghargaan adalah pantas untuk diberikan kepada mereka baik oleh Perusahaan, Pemerintah atau oleh Rakyat Indonesia.

PN Postel telah memberikan "Piagam Penghargaan" kepada seluruh anggota CIB PTT yang diberangkatkan ke Irian Barat.

Beberapa orang dari anggota CIB PTT juga mendapat tanda penghargaan dari Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto karena jasa-jasa mereka sewaktu diperbantukan sebagai anggota dalam Joint Board Pos Militer Komando Mandala, dan tugas-tugas militer lainnya.

Mereka yang mendapatkan tanda penghargaan dari Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, antara lain :

1. Sabarsoediman
2. A. Latif Mantika Radja
3. L. Rubini
4. R. Achmad Moch. Chiaroedin
5. Ibrahim Rachman
6. J.S. Walanda
7. Soedarman
8. J. Riewpassa
9. Prijo Soegono
10. A. Muis.

b. Partisipasi P.N. Postel dalam Dwikora

Dalam Masa Demokrasi Terpimpin ini Indonesia menentang pembentukan Malaysia, karena sebagai akibat pengaruh PKI, Presiden Soekarno menganggap bahwa Malaysia adalah proyek neo-kolonialisme Inggris yang "membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai". Karena itu Malaysia harus dicegah berdirinya dan setelah tetap dipaksakan berdirinya, harus dihancurkan.

Untuk melaksanakan niat itu dilancarkanlah konfrontasi bersenjata yang dilakukan oleh sukarelawan yang sebagian diambil dari ABRI dan sebagian dari masyarakat luas. Berlandaskan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yakni:

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunai, untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

para gerilyawan Indonesia berusaha masuk ke daerah Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara dan di sana melancarkan operasi-operasi terhadap angkatan perang Persemakmuran Inggris.

Sebelumnya Presiden Soekarno memberi amanat pada penutupan Konperensi

Digitized by Google



Anggota-anggota CIB PTT berparade di hadapan karyawan, didepan Kantor Pusat PTT Bandung. "Maju ***terus pantang mundur. Bebaskan Irian Barat dengan atau tanpa pertumpahan darah".***



Suasana penuh haru waktu melepas anggota CIB PTT menuju Irian Barat. "Selamat berjuang Anggota CIB PTT !"

Digitized by Google

Presidium Kabinet Kerja dengan Catur Tunggal seluruh Indonesia di Istana Negara pada tanggal 16 Maret 1964, di mana Presiden mengomandokan supaya dilaksanakan gerakan Sukarelawan di seluruh Indonesia untuk mempertinggi ketahanan Revolusi kita dan kesiapsiagaan dalam menghadapi "Malaysia" dan dalam rangka membantu dan melancarkan tugas-tugas KOTI.

Pendaftaran Sukarelawan-sukarelawan yang segera diadakan di mana-mana sebagai sambutan atas Amanat Komando tersebut, dalam waktu yang singkat sekali telah menghasilkan sejumlah 21 juta orang Sukarelawan/Sukarelawati sehingga barisan Sukarelawan/Sukarelawati itu merupakan himpunan potensi yang besar sekali.

Dalam lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata, Amanat Komando itu disambut oleh Menteri Perhubungan dengan menginstruksikan pembentukan Brigade Sukarelawan Angkutan dan Telekomunikasi pada tanggal 21 Maret 1964.

Tujuan pembentukan Brigade Sukarelawan ini ialah menyalurkan bakat, ketrampilan dan keahlian dari para karyawan, petugas dan buruh di bidang angkutan dan telekomunikasi secara efisien dan terkoordinir dalam satu kesatuan yang akan memiliki daya guna dan daya tempur yang sebesar-besarnya.

Brigade Sukarelawan ini juga terbuka bagi karyawan, petugas dan buruh angkutan dan telekomunikasi di luar lingkungan Departemen seperti mereka yang tergabung dalam Organda dan lain-lain Organisasi Swasta, sehingga dengan demikian pengintegrasian potensi Pemerintah dan Swasta terwujud. Dalam lingkungan P.N. Postel telah terdaftar lebih dari 13.000 orang pegawai sebagai Sukarelawan/Sukarelawati Brigade tersebut.

Pada tanggal 17-8-1964 Presiden Soekarno selanjutnya memberi amanat "Tahun Vivere Pericoloso" atau amanat TAVIP, yang mengajarkan bahwa rakyat Indonesia harus mengenal romantika, dinamika dan dialektika Revolusi untuk mengenal hukum-hukum Revolusi, untuk berjuang, berusaha dan membanting tulang, tanpa kemunafikan, ikhlas berkorban untuk cita-cita yang tinggi, untuk merapatkan barisan, senantiasa siap siaga dan bersatu di bawah Bendera Revolusi.

Sebagai tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan DWIKORA dan TAVIP dapat dicatat:

1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Komando Operasi Tertinggi tanggal 2 September 1964 No. 5P/300/KOTI/9/1964 tentang pencabutan semua izin cuti bagi semua pegawai, pekerja dan anggota Angkatan Bersenjata.
2. Instruksi Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 3 September 1964 tentang konsinyasi dari semua anggota Direksi dan pejabat-pejabat utama lainnya di Pusat dan di Daerah dalam lingkungan PN Postel.
3. Instruksi Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 7 September 1964 tentang pembatalan PORDEP ke-II (Pesta Olah Raga dan Seni Departemen PDPTP) yang sedianya akan diadakan sekitar tanggal 27 bulan itu.

Digitized by Google

4. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tanggal 8 September 1964 No. 02/INSPR/KOTOE tahun 1964 tentang penertiban serikat-serikat buruh.
5. Perintah Umum untuk Sukarelawan/Sukarelawati yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi tanggal 11 September 1964, tentang pengadaan kesiap-siagaan tingkat pertama (tingkat tertinggi).
6. Perintah Harian Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PN Postel ke XIX tanggal 27 September 1964 untuk mempertinggi daya ketahanan Revolusi, untuk mengabdi kepada tugas pokok kita ialah sebagai alat Revolusi mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur, serta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan.
7. Perintah Harian Wakil Perdana Menteri III tanggal 26 Oktober 1964 No. 28/D/Instr/1964 tentang mempertinggi kewaspadaan Nasional, meningkatkan daya kerja dan daya produksi serta memantapkan romantika, dinamika dan dialektika Revolusi dalam dada setiap karyawan Perusahaan Negara.

Seperti telah dinyatakan di atas, DWIKORA dan TAVIP beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya merupakan faktor-faktor yang tidak saja besar pengaruhnya bagi PN Postel bahkan merupakan faktor-faktor yang menentukan bagi segala aktivitas Perusahaan. Dalam tahun 1964 DWIKORA dan TAVIP dan pula Tri program Pemerintah merupakan pedoman dan penuntun utama dalam kegiatan-kegiatan PN Postel. Segala aktivitas dari Perusahaan terutama ditujukan kepada pelaksanaan DWIKORA, TAVIP dan Triprogram Pemerintah, seperti yang dengan sendirinya boleh diharapkan dari suatu Perusahaan Negara yang menjadi alat revolusi.

Dengan mengingat tujuan tersebut, dalam bidang mental oleh Departemen PDPTT dalam bulan Oktober telah diselenggarakan "Kursus Tavip C", kursus indoktrinasi bagi para pejabat pimpinan dalam lingkungan Departemen mengenai pelbagai masalah pokok, sehingga para pejabat tersebut mempunyai landasan pengertian yang sama mengenai Revolusi Indonesia, mempunyai cara berfikir yang sama, agar dapat melaksanakan cara bertindak yang sama pula. Kursus tersebut diikuti oleh 57 orang pejabat pimpinan PN Postel dari Pusat dan dari Daerah-daerah dan oleh Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Buruh. Selain itu agar para ibu-ibu memiliki jiwa, pengertian dan tekad yang sama seperti para suaminya mengenai Revolusi dan tujuan-tujuannya, maka dalam bulan Nopember diselenggarakan oleh Departemen Training Centre Dwikora Wanita Departemen PDPTT, yang diikuti oleh 25 orang istri-istri dari pejabat-pejabat pimpinan PN Postel dari Pusat dan Daerah-daerah, istri-istri dari Wakil-wakil Organisasi Buruh dan Wakil-wakil dari Organisasi-organisasi Wanita dalam PN Postel (Persatuan Wanita PN Postel).

Dalam bulan-bulan September s/d Desember 1964 diadakan pendidikan dan latihan khusus bagi para sukarelawan Brigade Angkutan dan Telekomunikasi dengan tujuan memberikan pengetahuan dasar kemiliteran dan ketrampilan dalam bidang tugasnya yang diperlukan sebagai bekal untuk mempertinggi daya ketahanan Nasional. PN Postel mengirimkan 80 orang sukarelawan ke pendidikan termaksud.

Digitized by Google

Kepada para pegawai PN Postel diberikan indoktrinasi secara terus menerus, baik melalui pidato-pidato maupun melalui surat-surat edaran.

Dalam bidang keamanan telah dibentuk SEKSI KEAMANAN di Pusat dan di Daerah, dengan maksud untuk mengadakan pengamanan terhadap personil, kelengkapan/materiil dan operasi/aktivitas PN Postel serta mengadakan pencegahan gangguan atau sangat memperkecil kemungkinan bagi lawan untuk melakukan gangguan terhadap kelengkapan dan kegiatan-kegiatan PN Postel, demi kelangsungan pekerjaan yang menjadi tugas perusahaan.

Dalam bidang pembangunan titik berat diletakkan pada terutama pembangunan daerah-daerah perbatasan dan pembangunan-pembangunan lain guna memperlancar pelaksanaan DWIKORA, TAVIP dan Triprogram Pemerintah.

Para Sukarelawan1Sukarelawati dari PN Postel tergabung dalam "Brigade Sukarelawan Angkutan dan Telekomunikasi" yang berada di bawah Komando Pembantu Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Urusan Perusahaan Negara, Brigadir Jenderal TNI Utojo Utomo dan anggota-anggotanya terdiri dari para Sukarelawan/Sukarelawati dari kalangan karyawan, petugas dan buruh dari Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, serta Perusahaan-perusahaan Negara, Jawatan-jawatan dan Organisasi-organisasi Angkutan Swasta di lingkungannya.

Dengan Surat-surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata masing-masing tanggal 1 Agustus 1964 No. P.37/44/7 dan 3 Agustus 1964 No. P.37/49/20 a/1/ telah ditetapkan Simbol dari Brigade dan perlengkapan pokok perorangan bagi Sukarelawan/Sukarelawati.

Demikianlah kesibukan-kesibukan ekstra yang dihadapi lagi PN Postel yang belum lama menyelesaikan tugasnya di Irian Barat. Namun konfrontasi Dwikora tidak kunjung sukses, berbeda dengan operasi-operasi pembebasan Irian Barat.

Karena Malaysia yang menjadi sasaran Dwikora itu diterima menjadi anggota Dewan Keamanan maka Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sejak tanggal 1-1-1965. Setelah itu, Indonesia mengalami kemerosotan di bidang ekonomi dan kekacauan di bidang politik yang memuncak dengan dengan terjadinya peristiwa G.30.S/PKI.

Digitized by Google

3. Peristiwa G 30 S/PKI

Salah satu tragedi yang menimpa bangsa Indonesia terjadi pada tanggal 30 September 1965 yaitu peristiwa perampasan kekuasaan yang gagal, yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan peristiwa G 30 S/PKI.

PKI melalui SOBSI, menjalin jaringannya dengan mendirikan Serikat Buruh Postel, disingkat S.B. Postel, dalam tubuh PN Postel. Melalui Serikat Buruh Kereta Api, disingkat S.B.K.A., PKI menjalin jaringannya pula dan berhasil menanamkan pengaruhnya pada sebagian pegawai PJKA ex Deli Spoorweg Maatschappij di Medan yang melayani perhubungan telepon.

Dalam tubuh PN Postel hanya terdapat satu organisasi yang bernaung di bawah PKI yaitu S.B. Postel. Peraturan Dasar S.B. Postel disyahkan oleh Kongres S.B. Postel ke VII di Bandung yang dilangsungkan pada tanggal 5 Nopember 1955 sampai dengan tanggal 12 Nopember 1955. Dalam mukadimah Peraturan Dasar yang dimaksud di atas dinyatakan antara lain: "Serikat Buruh Postel yang didirikan pada tahun 1917, seperti halnya dengan organisasi-organisasi progresip lainnya, setelah dilumpuhkan oleh kekejaman Pemerintah Kolonial Belanda digerakkan kembali pada waktu gelombang revolusi nasional bergelora pada tanggal 11 Nopember 1945 dan disyahkan dalam Kongresnya yang pertama di Kediri pada tanggal 11 Nopember 1946. Selanjutnya untuk menggalang kekuatan sebesar-besarnya dalam membela dan memperjuangkan tujuannya, maka bersama-sama dengan organisasi-organisasi buruh lainnya, di antaranya 17 organisasi buruh negeri, S.B. Postel pada permulaan tahun 1947 ikut serta membentuk Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (S.O.B.S.I.). S.B. Postel tetap menjadi anggota S.O.B.S.I. hingga meletusnya G 30 S/PKI.

Sebelum G 30 S/PKI meletus, dalam tubuh PN Postel terdapat organisasi-organisasi massa lainnya seperti yang diuraikan dalam Bab III. Menjelang akhir Septem-

Digitized by Google

ber 1965 S.B. Postel menunjukkan kegiatannya yang meningkat yang pada hakekatnya merupakan bagian persiapan organisasi induknya yaitu PKI untuk merebut kekuasaan.

a. Perebutan Gedung Telekomunikasi Gambir dan Kantor Telegrap Dtx.

Gedung Telekomunikasi Gambir merupakan pusat lalu lintas Telekomunikasi dari dan keluar negeri, jadi merupakan salah satu penghubung yang penting sekali dalam pemerintahan. Dalam peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965, gedung ini dijadikan prioritas yang pertama-tama direbut oleh G 30 S/PKI di samping RRI yang ada di sekitar Lapangan Monas. Pendudukan gedung ini dipelopori oleh S.B. Postel yang jelas menunjukkan ketaatannya kepada PKI pada peristiwa tersebut.

Sebalum tanggal 30 September 1965, pegawai-pegawai yang tergabung dalam S.B. Postel mengadakan semacam "Show of Force" terhadap S.S.P.T.T., K.B. Postel/Buruh Marhaenis. Pada tanggal 30 September 1965, bertepatan dengan penutupan Konperensi Ikatan Teknisi di Kantor Telepon Gambir, pegawai-pegawai yang tergabung dalam S.B. Postel mengadakan aksi pendudukan gedung Kantor Telegrap Dtx. Salah seorang anggota S.B. Postel memutuskan hubungan telekomunikasi baik dengan luar negeri maupun dengan dalam negeri, pada malam harinya. Keesokan harinya tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, Kepala kantor Telegrap Dtx dan Stafnya, bersama-sama berusaha menghidupkan kembali hubungan ke luar negeri dan hubungan ke dalam negeri. Ternyata bahwa suasana di Kantor Telegrap Dtx Jl. Moh. Husni Thamrin, sangat sepi. Kantor Telegrap Dtx pada saat itu betul-betul sudah dikuasai oleh pegawai-pegawai anggota S.B. Postel yang memakai pakaian hijau dengan ikat kepala merah.

Ketika mereka memasuki gedung Kantor Telegrap Dtx, mereka diberi tahu oleh seorang S.B. Postel, bahwa keadaan aman. Atas pertanyaan mengapa keadaan sepi dan mengapa hubungan keluar negeri dan ke dalam negeri diputuskan, mereka mendapat jawaban bahwa pemutusan hubungan tersebut diperintahkan oleh Cakrabirawa pokoknya perintah dari baju hijau.

Mereka segera menghidupkan kembali hubungan yang terputus, akan tetapi tiba-tiba datang satu regu pemberontak bersenjata lengkap masuk ke dalam kantor. Mereka diperintahkan untuk memutuskan lagi hubungan tersebut, kalau tidak keselamatan jiwa mereka akan terancam. Perintah itu terpaksa dijalankan.

Kepala Kantor Telegrap Dtx langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Daerah Telekomunikasi I, Ir. Soehana, yang pada saat itu sedang sakit. Meskipun demikian, Kdtel I berusaha datang dan melaporkan peristiwa tersebut langsung kepada Menteri P.D.P.T.P. yang tidak dapat dijumpainya karena Menteri sudah berada di Kostrad. Ir. Soehana lalu pergi ke Sentral Telepon Gambir di Jl. Merdeka Selatan. Ternyata di sana sudah penuh dengan tentara. Di Gambir Ir. Soehana dihadapkan kepada seorang Mayor dan menyampaikan hal-hal yang di alami di Dtx. Mayor tersebut tidak menanggapi laporan itu bahkan menyuruh

Digitized by Google

mendengarkan siaran radio yang menyiarkan pengumuman dari Kolonel Untung dari Cakrabirawa bahwa telah terjadi penghianatan Dewan Jenderal. Waktu itu ± jam 07.00 pagi tanggal 1 Oktober 1965. Siaran tersebut merupakan ulangan siaran pada malam hari tanggal 30 September 1965.

Tanggal 1 Oktober 1965 kurang lebih jam 21.00 WIB, terdengar siaran dari Pangkostrad, Mayor Jendral Suharto, melalui R.R.I., bahwa RRI dan Gedung Telekomunikasi sudah dibebaskan dari penghianat. Keesokan harinya tanggal 2 Oktober 1965, Kepala Kantor Telegrap Dtx dan staf pergi ke kantor namun gedung Dtx masih dikuasai oleh S.B. Postel. Mereka mengira bahwa penguasaan kembali gedung Telekom oleh Kostrad tersebut termasuk gedung Dtx, ternyata yang baru dikuasai ialah gedung Telekomunikasi Gambir. Berhubung dengan itu mereka segera pergi ke Gedung Telekomunikasi Gambir dan melaporkan kepada Komandan yang ada di situ, bahwa gedung Dtx masih dikuasai oleh S.B. Postel. Mereka jelaskan bahwa Dtx merupakan salah satu sarana hubungan ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Berdasarkan laporan mereka itu, Komandan yang ada di Gambir, Mantik, memerintahkan Skogar untuk merebut Gedung Dtx. Tanpa perlawanan yang berarti Skogar dapat menguasai kembali gedung Dtx. Dalam perebutan tersebut, gugur seorang pegawai Telekomunikasi, bukan anggota S.B. Postel karena tertembak ketika ia lari dalam kepanikan.

Setelah gedung Dtx dikuasai kembali, seluruh anggota S.B. Postel termasuk Pemuda Rakyat yang tidak memberi perlawanan, dilucuti. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanpa latihan yang memadai, persenjataan tidak mencapai tujuannya. Mereka diberi senjata dan pakaian hijau dan ditempatkan begitu saja di pos tersebut tanpa perbekalan, mungkin dengan keyakinan bahwa golongan mereka pasti menang.

b. Pembersihan.

Segera setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, Menteri P.D.P.T.P menginstruksikan dengan surat keputusannya tanggal 15 Oktober 1965 No P 26/39/20, pembekuan segala kegiatan dari S.B. Postel untuk sementara waktu dan memerintahkan kepada Direktur Jenderal P.N. Postel untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan demi pengamanan P.N. Postel, a.l. dengan mengikutsertakan dalam tindakan-tindakan tersebut organisasi-organisasi buruh/karyawan yang telah nyata dan tegas mendukung Pemerintah dalam menumpas G 30 S/PKI. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan, demi pengamanan Perusahaan termaksud di atas, oleh Direktur Jenderal P.N. Postel dengan suratnya tanggal 18 Oktober 1965 No. 31422/Dirjen yang ditujukan kepada para Kepala Daerah Pos dan Telekomunikasi dimintakan perhatian antara lain mengenai:

a) Personalia.

(1) supaya jabatan-jabatan penting dan tugas-tugas keamanan (hansip, penjaga

Digitized by Google

malam, dan sebagainya) dibersihkan dari unsur-unsur S.B. Postel atau unsur-unsur lainnya yang secara politis diragukan kesetiaannya terhadap Perusahaan atau Negara.

(2) sesuai dengan Instruksi Ketua Gabungan 5/KOTI tanggal 13 Oktober 1965, supaya setiap hari harus diadakan appel pada waktu mulai masuk bekerja dan sebelum mengakhiri pekerjaan sedangkan para pegawai yang sejak tanggal 30 September 1965 atau sesudahnya tidak masuk bekerja tanpa sesuatu kabar cq yang beritanya diterima kemudian tetapi ternyata alasannya tidak benar, hendaknya diambil tindakan yang tegas dan jika perlu supaya dischors.

b) Operasi.

(1) lancarnya pekerjaan sehari-hari harus senantiasa diperhatikan dan diawasi.
(2) supaya dijaga jangan sampai tibul kemacetan dalam pembayaran-pembayaran, terutama pembayaran gaji, pensiun dan tunjangan beras.
(3) dalam melaksanakan sensor supaya senantiasa mengadakan hubungan erat dengan Pepelrada yang bersangkutan.

c) Alat-alat/Perlengkapan termasuk gedung-gedung.

(1) Supaya diadakan tindakan preventif terhadap keselamatan alat-alat/perlengkapan-perlengkapan yang vital alat-alat pengangkutan (kendaraan bermotor, sepeda, dan sebagainya).
(2) Di semua kantor sedapat mungkin diadakan penjagaan selama 24 jam terus-menerus oleh petugas Hansip.

Sejalan dengan tindakan-tindakan tersebut di atas pada tanggal 19 Oktober 1965 dalam tubuh P.N. Postel telah dibentuk "Team-Team Pengamanan P.N. Postel" yaitu:

- Team I, meliputi wilayah Jakarta dan Jawa Barat Pos;
- Team II, meliputi wilayah Jakarta dan Jawa Bawat Telekomunikasi;
- Team III, meliputi wilayah-wilayah Jawa Tengah/Timur Pos dan Telekomunikasi;
- Team IV, meliputi wilayah Sumatra Pos dan Telekomunikasi.

Team-Team tersebut masing-masing diketuai oleh seorang pejabat tinggi (Direktur atau Direktur Muda) dan beranggotakan wakil-wakil Organisasi massa tingkat Pimpinan Pusat/Pengurus Besar. Team-Team termaksud dalam waktu singkat berangkat ke daerah-daerah, guna mengambil tindakan-tindakan pengamanan dalam bidang personalia, operation dan material.

Pada tempat kedudukan Kepala-Kepala Daerah oleh Ketua Team dibentuk pula Team Pengamanan Daerah masing-masing untuk Pos dan Telekomunikasi. Pada tanggal 22 Oktober 1965 dalam rangka yang sama di Kantor Pusat P.N. Postel di Bandung telah pula dibentuk "Team Pengamanan dan Pengawasan".

Sejak P.N. Postel dipecah menjadi dua Perusahaan terhitung mulai tanggal 15

Digitized by Google

Nopember 1965, maka Team-Team Pengamanan P.N. Postel disesuaikan pula dengan perubahan tersebut. Berhubung dengan itu, dengan surat edaran Direktur Utama P.N. Pos dan Giro tanggal 20 Desember 1965 No. 1970/Pegpos, diinstruksikan supaya Kepala Daerah Pos dan Kepala Sentral Giro membentuk "Team Pengamanan dan Pengawasan" dengan diketuai oleh mereka sendiri. Pada Kantor-Kantor Pos Besar jika dianggap perlu dapat pula dibentuk "Pembantu Team Pengamanan dan Pengawasan" yang diketuai oleh Kepala Kantornya sendiri. Team-Team tersebut ditugaskan untuk membersihkan Perusahaan dari oknum-oknum G 30 S/PKI serta mengambil tindakan-tindakan yang positip untuk mengamankan harta kekayaan negara di dalam Perusahaan sesuai dengan Instruksi Presiden Kabinet DWI-KORA No. 47/Instr/65.

Pada pokoknya Team-Team tersebut melanjutkan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dirintis oleh "Team Pengamanan P.N. Postel" sejak Oktober 1965. Adanya Instruksi Panglima KOSTRAD kepada Direktur Perhubungan Angkatan Darat, maka mulai Desember 1965 pada Kantor Pusat P.N. Pos dan Giro dan P.N. Telekomunikasi di Bandung ditempatkan Perwira Proyek Pengamanan dan Penertiban Postel, guna memberikan bantuan kepada masing-masing Direksi. Di tingkat Daerah Pos dan Telekomunikasi dan kantor-kantor Pos dan kantor-kantor Telekomunikasi, di mana perlu ditempatkan juga Perwira Pengawas.

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB II

PEMBINAAN DAN ORGANISASI EKSTRA

Digitized by Google

Digitized by Google

bab II

PEMBINAAN DAN ORGANISASI EKSTRA

1. Pembinaan

a. Seminar, Konperensi Dinas dan Rapat Kerja.

Dalam rangka untuk memecahkan pelbagai macam masalah dan untuk memudahkan pengambilan keputusan pimpinan serta untuk memperoleh pandangan-pandangan baru, selama Masa Demokrasi Terpimpin Jawatan P.T.T. yang kemudian berubah menjadi P.N. Postel, menyelenggarakan Seminar sekali, Konperensi Dinas dua kali dan Rapat Kerja sekali.

1) Seminar P.T.T. 1960.

Seminar ini diadakan di Kantor Pusat P.T.T. di Bandung dari tanggal 3 Mei 1960 s/d 5 Mei 1960 atas prakarsa Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. Para peserta terdiri dari Direktur Jenderal P.T.T., Direktur Pos, Direktur Telekomunikasi, Direktur Pos Muda, Direktur Telekomunikasi Muda, Kepala Dinas Administrasi, Kepala Dinas Perlengkapan, Para Kepala Bagian di Kantor Pusat, Para Kepala Daerah Pos dan Telekomunikasi, Kepala Laboratoria dan Kepala Bengkel Pusat PTT.

Dalam Seminar tersebut Menteri memberi amanat tentang amat pentingnya peranan Jawatan PTT dalam menjalankan tugas Negara dengan sesempurna-sempurnanya, baik di bidang pemerintahan, pertahanan, masyarakat, sosial dan komersial, maupun pengembangan tehnik.

a) Pemrasaran.

Beberapa pemrasaran berturut-turut memberi prasaran sebagai berikut:

Digitized by Google

(1) Prof. Dr. Mr. Prajudi, Direktur Lembaga Administrasi Negara, tentang: Perlunya diadakan pengembangan dan perluasan dinas P.T.T. yang merupakan faktor yang penting dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Administrasi Negara guna menegakkan pemerintahan dan memelihara kestabilan masyarakat.
(2) Kol. Dr. Roebiono Kertopati tentang: Peranan Jawatan P.T.T. dalam pertahanan Negara dalam usaha mencapai suatu sistem perhubungan pemberitaan yang secepat-cepatnya dan selancar-lancarnya tanpa kesalahan.
(3) Drs. Surjo Sediono, Pegawai Tinggi Departemen Perindustrian dan Pertambangan, tentang: Peranan Jawatan P.T.T. dalam memajukan/memperkembangkan perekonomian Indonesia.
(4) Prof. Dr. Ir. O Hong Djie, Kepala Bagian Elektro Tehnik Institut Teknologi Bandung, tentang: Langkah-langkah yang harus diambil guna mencapai cara penyaluran pemberitaan yang sesempurna-sempurnanya.

b) Kesimpulan dan saran Seminar antara lain:

(1) Status PTT sebagai perusahaan IBW tidak dapat memberi banyak kemungkinan untuk mengadakan perbaikan dan perluasan dalam bidang kepegawaian, perlengkapan dan anggaran.
(2) Perlu dibentuk suatu Dewan Telekomunikasi untuk membahas dan merencanakan persoalan perhubungan sebaik-baiknya.
(3) Perlu diadakan Kantorpos Kereta Api dan mengadakan modernisasi dengan jalan mekanisasi.
(4) Mengadakan Dinas Giro dan Cekpos.
(5) Memperbanyak Kantorpos-kantorpos Pembantu sampai ke Kecamatan.
(6) Dalam soal pengangkutan perlu diadakan koordinasi antara Pos, Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Angkutan Udara.
(7) Di bidang telekomunikasi, meneruskan rencana dan melaksanakan multy channel communication, sehingga kota-kota di Kepulauan Nusa Tenggara, Jawa dan Sumatera dapat dihubungkan dalam sistem "long dictance direct dialing", tidak hanya untuk perhubungan telepon, tetapi sangat diperlukan untuk menjamin perhubungan Telex.

2) Konperensi Dinas 1960.

Dalam bulan Mei 1960 juga telah diadakan Konperensi Dinas antara Pimpinan Jawatan dengan para Kepala Bagian dan Kepala Daerah PTT seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Bandung.

Dalam konperensi dinas ini dirundingkan segala sesuatu tentang Jawatan, baik kesulitan-kesulitan yang dialami dan harus dipecahkan maupun langkah-langkah lebih lanjut yang harus diambil guna lebih menyempurnakan tugas Jawatan.

Digitized by Google

3) Konperensi Dinas 1963.

Dari tanggal 14 s/d 19 Oktober 1963 PN Postel mengadakan Konperensi Dinas di Bandung, yang diikuti oleh seluruh Direksi PN Postel, Kepala-Kepala Bagian di Kantor Pusat, Kepala Laboratoria dan Kepala Bengkel Pusat, serta para Kepala Daerah Pos dan Telegrap/Kepala Kantor Pos dan Telegrap Besar Kelas I Jakarta dan para Kepala Daerah Telekomunikasi dari seluruh Indonesia, termasuk Kepala-Kepala Daerah dari Irian Barat. Turut pula dalam Konperensi tersebut Dewan Perusahaan PN Postel. Konperensi termaksud diadakan dengan berthemakan kepada perubahan status dari Jawatan PTT kedalam PN Postel dan kepada perkembangan-perkembangan dari keadaan Negara dewasa itu. Sifat dari Konperensi tersebut adalah mengadakan informasi, konsultasi dan konsolidasi.

Untuk mencapai tujuan ini, maka selain mengadakan pembicaraan yang bersifat khas kedinasan, pada Konperensi telah diminta pula kepada beberapa tokoh terkemuka untuk memberikan ceramah-ceramah yang meliputi soal-soal Negara, Dekon Nation Building, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata serta ceramah-ceramah yang merupakan background information bagi PN Postel.

a) Pemberi-pemberi ceramah.

Adapun pemberi-pemberi ceramah termaksud ialah:

(1) Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tentang "Apa yang dapat diharapkan dari PN Postel";
(2) Wampa bidang Distribusi tentang "Transport dan Komunikasi dalam Dekon";
(3) Wampa Bidang Khusus tentang "Peranan PN Postel serta badan-badan penyelenggara komunikasi umumnya dalam Nation Building";
(4) Drs. Muljatno Sindudarmoko, Kepala Biro Ekonomi dan Keuangan pada Kabinet Menteri Pertama, tentang: "Kedudukan Perusahaan-perusahaan Negara dalam Administrasi Pemerintahan";
(5) Drs. Lie See Tik dari Bank Indonesia tentang "Perbankan dan Dinas Giro dalam lalulintas Giral di Indonesia";
(6) Brigjen Dr. R. Roebiono Kertopati Ketua Dewan Telekomunikasi tentang "Dewan Telekomunikasi";
(7) Prof. Dr. Ir. O Hong Djie guru Besar pada ITB tentang "Pendidikan Teknik di Indonesia".

b) Keputusan-Keputusan.

Dalam Konperensi termaksud antara lain diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

(1) Pernyataan tentang penghargaan PN Postel terhadap bimbingan, kewibawaan dan restu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, sehingga PN Postel,

Digitized by Google

sungguhpun mengalami berbagai kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangan hingga kini tetap melaksanakan kewajibannya sebagai alat revolusi dengan sebaik-baiknya. Juga dinyatakan bahwa Jiwa Besar dari Bung Karno yang menyinari Revolusi Indonesia, merupakan sumber ilham yang tak kunjung padam, dan menjiwai tekad rakyat termasuk pegawai dan pimpinan PN Postel, untuk meneruskan tugasnya dalam penyelesaian revolusi, menuju masyarakat adil, makmur, materiil dan spirituil.

(2) Tiga resolusi mengenai Dekon, Ganefo dan apa yang menyebutkan diri "Malaysia", yang isinya mendukung sepenuhnya usaha dan kebijaksanaan Pemerintah dalam soal-soal tersebut serta menyatakan tekad serta kesanggupan untuk mengerahkan segala potensi dan fasilitas PN Postel guna membantu Pemerintah dalam usahanya tersebut.

(3) Resolusi yang meminta supaya sesuai dengan tugas dan fungsi Pos dan Telekomunikasi yang mencerminkan sifat Nation-wide, dibentuk Departemen Pos dan Telekomunikasi tersendiri.

4) Rapat Kerja tahun 1965.

Dalam bulan Maret 1965 telah diadakan rapat-kerja PN Postel dari tanggal 22 s/d 31 Maret 1965 yang dihadiri oleh Kepala-Kepala Daerah Pos, Telekomunikasi dan Sentral Giro seluruh Indonesia Kepala-Kepala Bagian dari semua Direktorat, anggota-anggota dan anggota-anggota pengganti Dewan Perusahaan dengan pimpinan Direksi PN Postel.

a) Hasil-hasil yang dicapai dalam rapat kerja:

(1) Panitia I (General Problems):

(a) Sebuah pernyataan mengenai kesanggupan untuk:
- i bersama-sama dengan alat-alat revolusi lainnya melaksanakan Dwikora sebaik-baiknya.
- ii berusaha keras untuk ikut serta mensukseskan "Dasa Warsa" KAA dan Ganefo sebaik-baiknya, khususnya dalam bidang Pos, Telekomunikasi, dan
- iii selalu berdiri di belakang Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan melaksanakan komando beliau dengan konsekuen.

(b) Tiga buah revolusi yang memutuskan:

i. Resolusi Pertama:

- agar Pimpinan Perusahaan berusaha meneruskan secara kontinu pemberian indoktrinasi kepada para pegawai/buruh.
- khususnya untuk meningkatkan kegairahan dan kegotong-royongan para

Digitized by Google

pegawai/buruh dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mempergiat usaha-usaha kearah Nation-building dan Character building serta memberantas phobi-phobian supaya Direksi mengirimkan team yang terdiri dari Wakil-wakil Direksi dan Dewan Perusahaan ke-daerah-daerah guna memberikan ceramah-ceramah/dorongan kepada para pegawai/buruh.

ii. Resolusi ke-dua:

Agar dapat dirasakan terutama oleh Rakyat di Irian Barat, bahwa Republik Indonesia benar-benar ada minat dan kemampuan untuk membangun Irian Barat dalam segala bidang dan karenanya mengurangi/menghilangkan kemungkinan-kemungkinan masih adanya maksud-maksud dari Rakyat Irian Barat agar diadakan plebisit pada waktunya, maka mengharapkan perhatian sepenuhnya dari Pemerintah supaya:

- pembangunan di Irian Barat termasuk pembangunan PN Postel terus ditingkatkan, lebih-lebih setelah Indonesia keluar dari PBB.
- untuk lebih melancarkan dan menyesuaikan dengan rencana-rencana pembangunan PN Postel secara Nasional, alangkah baiknya apabila Pos dan Telekomunikasi di Irian Barat diurus dan dibimbing langsung oleh Pusat PN Postel.

iii. Resolusi ke-tiga:

- menyatakan siap sedia segera keluar dari UPU dan ITU yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah.
- guna lebih mempercepat kedudukan politis bagi Nefo khususnya Republik Indonesia, siap memelopori terbentuknya UPU dan ITU Nefo yang Sekretariatnya ditempatkan di Indonesia.

(2) Panitia II (Kepegawaian) telah mengambil beberapa kesimpulan-kesimpulan di bidang kepegawaian. Diantaranya yang terpenting adalah mengenai incentive, untuk menaikkan kegairahan bekerja perlu diberikan incentive kepada para pegawai dalam batas-batas kemungkinan anggaran belanja dan pengolahan serta pelaksanaannya di serahkan kepada para Direktur yang bersangkutan.

(3) Panitia III (Keuangan):
Memahami sepenuhnya tugas yang diberikan kepadanya, yaitu mencari way out terhadap basic problem. Konsentrasi pemikiran telah diarahkan terhadap tiga masalah pokok yaitu:
(a) Basic Principles Anggaran Belanja;
(b) Basic Principles Likuiditas Perusahaan;
(c) Miljarden-way-out Anggaran Belanja 1965.

(4) Panitia IV (Perlengkapan):

Digitized by Google

Telah mengambil beberapa perumusan, diantaranya yang terpenting ialah penghematan kendaraan bermotor.

(5) Panitia V (Pembangunan):
Menyarankan antara lain modernisasi dalam PN Postel untuk dapat memenuhi rising demand dalam masyarakat sekarang.

(6) Panitia VI (Pendidikan dan Hubungan Masyarakat)
Mengusulkan antara lain career planning dalam kenaikan pangkat dan supaya diadakan Sekolah Staf/Pemimpin/Manager.

b. Pembukaan Dinas Giro dan Cekpos.

Dalam Jilid I, Bab II, Sub Bab e 18, diutarakan bahwa pada tahun 1937 dibuka Dinas Rekening Pos yang merupakan pelopor Dinas Giro dan Cekpos.

Dinas Rekening Pos ini sampai tahun 1961 tidak dapat berkembang dengan pesat karena administrasi rekening dipusatkan di Kantor Pusat P.N. Postel di Bagian Uang Pos. Jumlah pemegang rekeningnya hanya mencapai 24, suatu kenyataan bahwa Dinas tersebut tidak dapat pemakai yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyebabnya ialah karena semua storan kepada rekeningpos nasabah maupun penarikan surat perintah pembayaran dari rekening nasabah harus dikirimkan lebih dahulu ke Bandung untuk ditambahkan kepada dan atau dikurangkan dari saldo rekening koran nasabah, barulah surat perintah pembayaran secara tunai dikirimkan kepada tertunjuk, di Bandung atau di luar Bandung, yang dapat menguangkannya di Kantor Pos setempat.

Sistem pembayaran secara ini, meskipun telah menyediakan kemudahan pembayaran secara pemindahbukuan, karena administrasi rekening korannya terpusat di satu tempat di Bandung, harus mengalami pembaharuan dengan mengubah sentralisasi administrasi rekening koran menjadi pemencaran administrasi rekening koran di beberapa tempat. Saatnya yang serasi dan tepat bagi perubahan itu akhirnya tiba.

Pada tahun 1960 jumlah uang yang beredar di Indonesia makin lama makin banyak. Uang yang beredar di Jawatan P.T.T. sendiri sudah mencapai 53,7 milyar Rupiah, sedangkan pada tahun 1950 jumlah perputaran uang di Kantor Pos baru mencapai 5,5 milyar Rupiah. Ini berarti bahwa dalam 10 tahun uang yang dikerjakan oleh P.T.T. naik 1000% atau 100% tiap tahun. Jumlah perputaran uang itu berarti rata-rata 4,5 milyar sebulan. Pada awal 1960 uang yang beredar di Kantorpos-kantorpos di Indonesia terdiri dari 26,4 milyar uang kartal dan 8,5 milyar uang giral yang berjumlah 34,9 milyar Rupiah. 1)

Banyaknya uang yang beredar di masyarakat mengandung risiko akan bahaya inflasi, sehingga menimbulkan daya upaya untuk menanggulanginya antara lain: dengan mengurangi pembayaran secara tunai. Pada tahun 1961 Menteri Pertama

1) *Moeljoto G.M., Bc.A.P., "Pengantar Dinas Giropos", Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Pos dan Giro", 1977.*

Digitized by Google

R.I. dengan suratnya tanggal 11 Maret 1961 No. 5901/61 bahkan turut berusaha agar pembayaran tanpa tunai mendapat perhatian para Menteri d.m.k. surat Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. tanggal 7 Januari 1961 No. C.1E/1/15. Pada ayat 2 surat Menteri Pertama tersebut dicantumkan sebagai berikut:

"Untuk menyehatkan keadaan keuangan Negara dengan mengurangi jumlah uang kartal yang beredar serta hal-hal yang lain seperti yang dikemukakan oleh Y.M. Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. itu, maka dengan ini diinstruksikan kepada Y.M. agar Y.M. memerintahkan kepada pejabat-pejabat yang diberi tugas pengurusan keuangan dari Departemen Y.M. (beserta instansi-instansi†Jawatan-jawatannya) supaya Dinas Rekeningpos tersebut dipergunakan sebanyak-banyaknya".

Pembayaran secara giral benar-benar mendapat perhatian Pemerintah. Ketika banyaknya uang yang beredar meningkat sampai titik yang membahayakan nilai Rupiah, maka Presiden R.I. dengan surat keputusannya No.470 tahun 1961 tanggal 23 Agustus memutuskan dan menetapkan:

"1. Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk berturut-turut mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan melaksanakan perobahan lalulintas pembayaran yang dewasa ini terutama bersifat kartal menjadi lalulintas pembayaran yang terutama bersifat giral;

2. Menguasakan Menteri Keuangan melaksanakan perobahan tersebut pada sub 1 dalam waktu sesingkat-singkatnya".

Berhubung dengan itu Menteri Keuangan dengan surat keputusannya tanggal 27-12-1961 No. B.U.M. 18-143-9/II memutuskan:

"Pertama : Pejabat-pejabat pada Badan-badan Pemerintah baik Sipil maupun Militair/Badan-badan Pemerintah Daerah, Badan-badan Semi Pemerintah (Yayasan-yayasan Pemerintah) dan Badan-badan lain yang diberi tugas pengurusan uang Negara harus mempunyai rekening atas nama Jabatannya selaku pejabat yang diserahi pengurusan uang Negara pada suatu Bank Negara, atas uang Negara yang pengurusannya yang diserahkan kepadanya;

Kedua : Pembayaran-pembayaran antara Badan-badan tersebut pertama dan Perusahaan-perusahaan Negara satu sama lain, begitu juga antara Badan-badan itu, Perusahaan-perusahaan Negara dan Kreditur-kreditur harus dilakukan dengan pemindahbukuan lewat Bank;

Ke tiga : Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku mulai tanggal 1 Januari 1962.

Ke empat : Peraturan-peraturan pelaksanaan dikeluarkan oleh Thesaurir Jenderal.

Dalam pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan pertama, yang permulaan pelaksanaannya dimulai 1 Januari 1961, antara lain dimuat pembukaan suatu Dinas Giro dan Cekpos. Maka pada permulaan tahun 1961 mulai diadakan persiapan untuk pembukaan Dinas tersebut. Akhirnya setelah selama lebih dari 40 tahun berkali-kali ditinjau dan diselidiki kemungkinan pembukaannya oleh pelbagai instansi dan panitya, maka pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 1961, Dinas Giro

Digitized by Google

dan Cekpos di Indonesia dibuka. Karena kesulitan tempat kerja, untuk sementara Sentral Giro Jakarta ditempatkan di ruang atas Kantor Pos di Jalan Pos No.2.

Berkatalah Pd. Direktur Jenderal P.T.T., S.H. Simatupang, antara lain sebagai berikut:

"Pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Nopember tahun 1961, Dinas Giro dan Cek Pos berujud menjadi suatu realitas. Pada hari ini kita menunjukkan kepada bangsa kita dan kepada dunia luar, bahwa kita bangsa Indonesia sanggup mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan saja oleh kita sendiri bahkan juga oleh bangsa-bangsa lain dianggap sebagai pekerjaan yang sulit dan berat.

Hari ini bagi Jawatan PTT adalah hari yang bersejarah oleh karena pada hari ini kita mempersembahkan kepada bangsa kita suatu karya yang dapat digolongkan sebagai karya yang besar dan dengan mempersembahkan karya itu kita mempersembahkan juga tekat dan kesanggupan kita untuk menyelenggarakan pekerjaan yang besar serta sulit itu dengan cara yang baik dan memuaskan.

Tugas kewajiban dan tanggung jawab ini adalah sangat berat akan tetapi sangat mulia. Dan Saudara-saudaralah yang oleh sejarah ditunjuk untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab itu.

Dinas Giro dan Cek Pos ini kami persembahkan kepada masyarakat dengan pengharapan, bahwa persembahan ini tidak hanya merupakan suatu dinas baru dari PTT dan Pemerintah, akan tetapi juga merupakan perluasan dari service tidak kepada "selected few", akan tetapi kepada rakyat banyak."

Pada upacara pembukaan Dinas Giro dan Cek Pos petugas-petugas PTT mulai mengenakan pakaian seragam untuk memberi kesan pertama yang menarik. Penampilan serupa itu memang dituntut agar mendapat kepercayaan, dan kepercayaan yang dapat diraih dari masyarakat merupakan kemenangan suatu dinas pembukuan yang masih harus ditenarkan.

1) Dasar hukum Dinas Giro dan Cekpos.

Dasar hukum Dinas Giro dan Cekpos, disingkat Dinas Giropos, ialah Undang-undang Pos (Undang-undang No.4 Tahun 1959, Lembaran Negara No.12/1959, Pasal 1 ayat 2 juncto Peraturan Pemerintah No.26/1959 tentang Pos Dalam Negeri).

Dinas Giropos belum diatur dengan Undang-undang tersendiri. Hal ini disebabkan karena antara Dinas Rekening Pos yang telah dibuka sejak 1937 dan Dinas Giropos yang dibuka sejak 1961, tidak ada perbedaan prinsipiil dan fundamental maupun yuridis. Dinas Rekening Pos mula-mula nanya diperuntukkan bagi Jawatan-jawatan, lalu untuk Perusahaan Swasta, hanya perorangan belum diikutsertakan menjadi nasabah, sedangkan Dinas Giropos terbuka lebar bagi siapapun untuk menjadi nasabah, sehingga lapangan kerjanya jauh lebih luas. Dinas Rekening Pos adalah pelopor dari Dinas Giropos, sebaliknya Dinas Giropos merupakan usaha untuk penyempurnaan dinas-dinas rekening koran sebelumnya di Jawatan P.T.T. Berhubung dengan itu Undang-undang Pos sudah mencukupi untuk dijadikan dasar hukum bagi Dinas Giropos di Indonesia. Untuk keperluan pembukaannya

Digitized by Google

cukup dikeluarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 8 September 1961 No. GIE/10/14 yang mulai berlaku pada tanggal 27 September 1961.

Usaha di bidang Giropos selanjutnya akan lebih ditampakkan dalam Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1965 tentang Pendirian P.N. Pos dan Giro, Bab II, Pasal 6, di mana dicantumkan, bahwa perusahaan ini berusaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan Giro.

2) Tujuan Dinas Giropos.

Tujuan Dinas Giropos di Indonesia ialah mengajak untuk memasuki taraf yang lebih tinggi dari pembangunan bidang lalulintas pembayaran dengan mempersilahkan sektor Pemerintah maupun sektor Swasta, dunia perindustrian maupun perdagangan, perseorangan maupun badan-badan dan perusahaan-perusahaan, untuk mempergunakan jasa-jasa dari lembaga keuangan ini untuk pembayaran-pembayaran dan penyelesaian transaksi-transaksi keuangan tanpa pemakaian uang kartal. Dengan lain perkataan tujuan Dinas Giropos ialah untuk menyederhanakan, mempermudah atau merasionalisasi sistem pembayaran.

3) Manfaat Dinas Giropos.

Mengingat tujuan Dinas Giropos ialah menyederhanakan sistem pembayaran. Dalam kesederhanaannya ini Dinas Giropos memberikan kemudahan bagi siapapun yang mempunyai rekening giropos. Mempunyai rekening giropos antara lain berarti:

(a) Dapat menerima storan dari semua pihutang yang melunasi hutangnya melalui Kantor Pos dan Giro yang tersebar di seluruh Indonesia. Storan-storan yang disubstitusi menjadi uang giropos ini dapat mengurangi banyaknya penguangan weselpos biasa, weselpos tebusan, weselpos kwitansi dan weselpos dengan daftar.

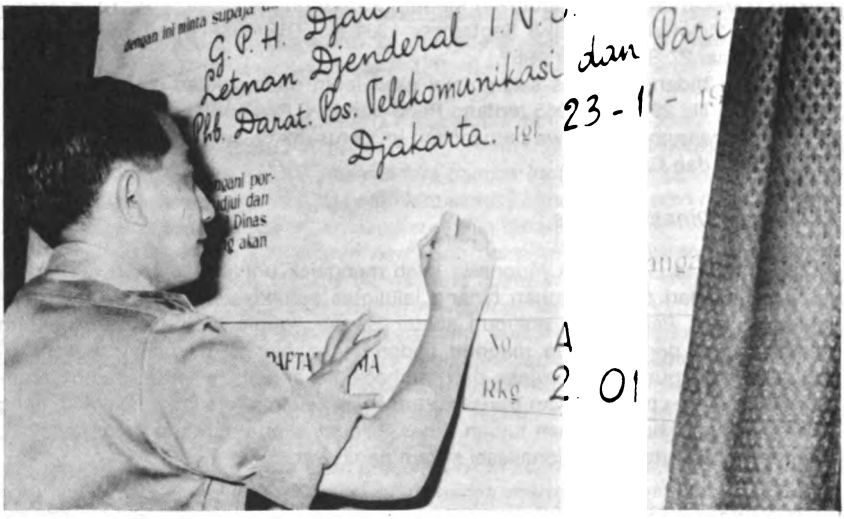
(b) Dapat menarik cekpos biasa, cekpos gabungan atau kolektip. Cekpos biasa setelah disampuli cukup dimasukkan dalam bis surat di tepi jalan atau bis surat di Kantor Pos dan Giro dan di Sentral Giropos.

(c) Dapat melakukan pembayaran tanpa tunai degan menarik surat giropos yang setelah disampuli cukup dimasukkan dalam bis surat kepada Sentral Giropos tertarik.

Pembayaran secara giral ini meniadakan segala macam perantara, meniadakan uang susuk atau uang kecil untuk pengembalian dan dapat menciptakan uang sebesar yang dikehendaki asal saldo mencukupi.

Dapat melakukan pembayaran secara berkala melalui pemindahbukuan atau secara otomatis pada tanggal yang ditetapkan tiap bulan oleh nasabah debitur sehingga ia tidak memikirkan lagi tanggal pembayaran ini dan itu. Sebaliknya nasabah kreditur tidak perlu mengadakan penagihan dengan mendatangi pihutang-pihutangnya. Kemudahan ini bermanfaat sekali bagi perusahaan-perusaha-

Digitized by Google



Jakarta, 23 Nopember 1961
Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Letjen G.P.H. Djatikusumo sedang mengisi contoh pembukaan rekening pada peresmian Pembukaan Dinas Giro dan Cekpos.

Digitized by Google

an air minum, gas, telekomunikasi dan lain-lainnya.

(d) Dapat mempersatukan loket-loket dinas keuangan di Kantor Pos dan Giro dan loket-loket perusahaan lain yang menjadi nasabah giropos. Loket-loket itu nampaknya berbeda-beda, tetapi dapat dipersatukan menjadi satu loket di tepi jalan yang berupa bis surat yang terbuka non stop, bahkan tanpa loketpun pembayaran secara berkala dapat dilakukan secara otomatis di Sentral Giro.

(e) Dapat memiliki sistem pelaporan yang mutakhir, cepat dan benar, karena tiap-tiap kali ada mutasi keuangan dibuat surat saldo yang dilampiri berita tambah dan atau berita kurang di mana terdapat keterangan untuk apakah pembayaran tersebut dilakukan.

4) Organisasi Dinas Giropos.

Mula-mula Dinas Giropos dipimpin oleh Direktur Giro yang langsung membawahkan Sentral-sentral Giro. Sentral Giro pada hakekatnya merupakan kantor pembukuan di mana administrasi rekening koran para nasabah diselenggarakan. Dalam perkembangannya, Dinas Giropos lalu mempunyai Direktorat penuh dan berkedudukan di Jakarta dengan pertimbangan untuk mendekati dunia usaha. Tak lama kemudian Direktorat ini ditiadakan. Untuk tidak mengecilkan arti dinas ini dan sesuai dengan nama P.N. Pos dan Giro, bersama-sama dinas-dinas keuangan lainnya, Dinas Giropos lalu dibawahkan oleh Direktur Giro dan Lalulintas Uang.

Direktorat ini membawahkan Bagian Uang Pos, Bagian Operations Giro, Bagian Administrasi dan Kepegawaian Giro dan Bagian Umum. Karena kedua Bagian terakhir ini merupakan duplikasi, Bagian Administrasi dan Kepegawaian Giro ditiadakan sehingga administrasi kepegawaian Sentral-sentral Giro ditangani kembali langsung oleh Kepala Bagian Kepegawaian Pos.

Mengingat Operasi Pos dan Giro perlu terpadu, Direktorat Lalu Lintas Pos dan Direktorat Giro dan Lalu Lintas Uang akhirnya disatukan menjadi Direktorat Operasi mulai September 1971 dan dipimpin oleh seorang Direktur Operasi Pos dan Giro.

Inspeksi terhadap Sentral Giro dan Sentral Giro Gabungan dilakukan oleh petugas dari Kantor Pusat. Akhirnya setelah tenaga pemeriksa di Kantor Daerah Pos dan Giro siap, pekerjaan pemeriksaan terhadap Sentral Giro dan Sentral Giro Gabungan dilakukan oleh Kepala Daerah Pos dan Giro.

c. Tindakan-tindakan penyelesaian G 30 S/PKI

Dalam rangka penumpasan Gerakan 30 September/PKI dan pemulihan keamanan dalam negeri sebagai akibat dari gerakan tersebut, dilakukan tindakan pembersihan terhadap golongan/satuan/oknum Sipil maupun Militer yang terlibat, tindakan politik terhadap organisasi PKI yang sudah terbukti menjadi perancang dan pelaksana G 30 S/PKI untuk merebut kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang syah, dan tindakan penyelesaian kaum tahanan sebagai akibat tindakan pembersihan tersebut.

Untuk melakukan kegiatan pembersihan terhadap personil aparatur pemerintah/

Digitized by Google

negara, KOPKAMTIB mendirikan badan-badan khusus; di tingkat Pusat dengan nama Team Screening Pusat disingkat TENINGPU; di tingkat Daerah dengan nama Team Screening Daerah disingkat TENINGDA; di Departemen dan Badan Lembaga Pemerintah/Negara lainnya dengan nama Team Screening Departemen atau Team Screening Badan/Lembaga Pemerintah/Negara. Semua badan tersebut bekerja atas dasar satu kebijaksanaan penertiban/pembersihan personil aparatur Pemerintah/Negara serta kebijaksanaan pokok akibat G 30 S/PKI. Pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada KOPKAMTIB. *)

1) Penertiban dan Pembersihan Personil Pos dan Telekomunikasi.

Dengan instruksi Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 28 Januari 1966 No. 1030/Pen.Men/Postel/1966 kepada Direksi P.N. Pos dan Giro serta Direksi P.N. Telekomunikasi diinstruksikan untuk melaksanakan kelanjutan penertiban dan pembersihan personil dari oknum-oknum/unsur-unsur G 30 S/PKI.

Dalam instruksi tersebut ditetapkan pula klasifikasi sasaran dan penindakan administrasinya, yang dasarnya diambil dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam instruksi tanggal 15 Nopember 1965 No.22/KOTI/65. Petunjuk pelaksanaan dari pada instruksi Menteri tersebut diterapkan oleh Direktur Utama kedua Perusahaan Negara dengan surat edaran bersama tanggal 7 Pebruari 1966
No. 408/Dirmapos/Rhs
No.333/Dirmatel/Rhs

Struktur organisasi berdasarkan instruksi Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(a) Pada tingkat Departemen P.D.P.T.P. dibentuk "Team Khusus Penertiban dan pembersihan Personil" yang bertugas membantu Menteri dalam menyelenggarakan pengkoordinasian, pengawasan dan penindakan khusus terhadap personil di lingkungan bidang Pos dan Telekomunikasi.

(b) Pada tingkat Pusat Perusahaan dibentuk Staf Penyelesaian Tindakan Penertiban dan Pembersihan Personil yang diserahi tugas menampung, mengkoordinasikan dan menyelesaikan segala persoalan yang bertalian dengan tindakan penertiban dan pembersihan personil dari daerah-daerah. Susunan para anggotanya terdiri dari:
   (a) Wakil Direksi Perusahaan
   (b) Wakil/Wakil-wakil Team Kostrad.

(c) Pada tingkat Daerah Perusahaan dibentuk Team Pengamanan dan Pengawasan/ Team Screening yang selain diserahi tugas dalam bidang pengamanan Perusahaan, juga diserahi tugas dalam rangka penertiban dan pembersihan personil.

*) *KASKOPKAMTIB, "Pembinaan masyarakat: Pemantapan Kamtibmas & Penyelesaian Tahanan G.30.S./PKI", Indonesia Sejak Orde Baru, Laidin Girsang, Penerbit "Yayasan Laita", Jakarta, 1979 hal.570 dan 571.*

Digitized by Google

Susunan para anggotanya terdiri dari:
(a) Wakil-wakil Perusahaan.
(b) Wakil-wakil Organisasi massa.
(c) Wakil-wakil Hansip.
(d) Wakil-wakil Team Kostrad.

Terhadap setiap pegawai yang berkeanggotaan PKI serta organisasi massa yang seazas/bernaung/berlindung di bawahnya dan atau oknum-oknum lainnya yang terlibat dalam G 30 S/PKI oleh Team Pengamanan dan Pengawasan/Team Screening Daerah, dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan disertai usul penindakan administratifnya, yang kemudian oleh Staf Penyelesaian di Bandung atas nama Direktur Utama diadakan penelitian satu demi satu dan diberikan keputusan penindakan administratip yang definitif.

Dasar hukum Team Screening mula-mula diatur dengan Instruksi Presiden tanggal 15 Nopember 1965 No. 22/KOTI/1965 jo. Instruksi Presiden tanggal 13 Mei 1966 No. Inst.09/KOGAM/5/1966.

2) Team Screening di P.N. Pos dan Giro.

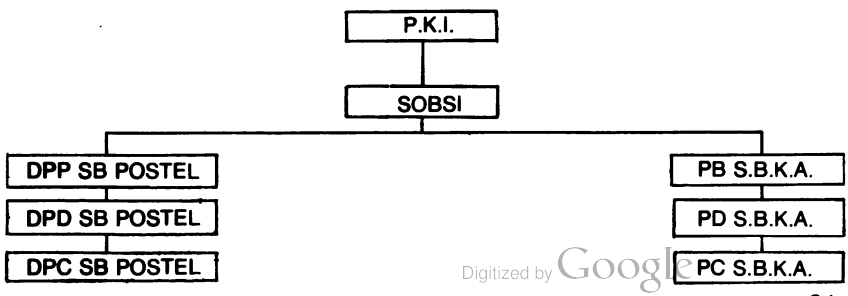
Pembersihan personil di P.N. Pos dan Giro dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Direktur Utama P.N. Pos dan Giro tanggal 20 Desember 1965 No. 1970 mengenai pembentukan "Team Pengamanan dan Pengawasan".

Di Kantor Pusat P.N. Pos dan Giro Bandung "Team Pengamanan dan Pengawasan" P.N. Pos dan Giro dibentuk pada tahun 1966.

Pada hari-hari pertama Team bekerja siang malam meneliti screen semua anggota S.B. Postel yang bekerja di Kantor Pusat P.N. Pos dan Giro. Gembong-gembong S.B. Postel seperti Aswani, B. Hoedojo, Soemarsono, dan lain-lainnya tidak terkecuali menjalani screening yang kadang-kadang berlangsung sampai subuh.

3) Team Screening di P.N. Telekomunikasi.

1) Jaringan-jaringan P.K.I.
dalam tubuh Perum Telekomunikasi.



Digitized by Google

Keterangan:

a). S.B. Postel tercantum dalam lampiran keputusan Presiden/Pangti ABRI tanggal 12-12-1966 No. 233/Koti/1966 Sub B. No. urut 45. SBKA tercantum dalam lampiran tersebut Sub B No. urut 30.

b). S.B. Postel tersebar di seluruh unit usaha Perum Telekomunikasi.

c). Pegawai P.J.K.A. (ex D.S.M.) Medan yang mengerjakan Telepon mulai dengan tahun 1967 diserahkan kepada Perum Telekomunikasi. Di antara mereka ini ada yang menjadi anggota SBKA. Mereka ini ditempatkan khusus di Ktlp Medan dan discreen oleh Perum Telekomunikasi.

4). Perkembangan organisasi screening.

Dalam rangka mengambil tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan Perusahaan dari Pengaruh G 30 S/PKI berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 28 Januari 1966 No.1030/Pen/Men/Postel/1966, Dirmatel telah mengeluarkan instruksi tanggal 7 Pebruari 1966 No.332/Tel/Rhs kepada seluruh daerah Perum Telekomunikasi untuk membentuk Team Pengaman dan Pengawasan yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil organisasi massa dan hansip.

Untuk tingkat Pusat, Perum Telekomunikasi membentuk Staf Penyelesaian Tindakan Penertiban/Pembersihan Personil Perum Telekomunikasi dengan surat keputusan Dirmatel tanggal 19 Pebruari 1966 No.1466/Tel.

Dasar untuk melaksanakan screening yang digunakan oleh Team Pengamanan maupun oleh Staf Penyelesaian Tindakan Penertiban Pembersihan Personil Perum Telekomunikasi ialah Inpres/Pangti ABRI No.22/KOTI/1965 dan Inpres Pangti ABRI No. Inst.09/Kogam/5/1966.

d. Hubungan Internasional.

Dalam Masa Demokrasi Terpimpin Indonesia sebagai anggota U.P.U. dan I.T.U. mengirimkan delegasinya ke pelbagai Konperensi yang diselenggarakan oleh Badan-badan tersebut. Akan tetapi setelah Indonesia keluar dari P.B.B. pada tahun 1965, maka hubungan dengan kedua Badan Khusus dari P.B.B. tersebut putus.

Konperensi-konperensi yang dihadiri oleh delegasi Indonesia sebelum Indonesia keluar dari P.B.B. sebagai berikut:

1) Dalam tahun 1959 Indonesia mengirimkan delegasinya ke Sidang Sub Komisi Revisi Umum Konvensi Persatuan Pos Sedunia yang diselenggarakan di Montreux (Swiss) dari tanggal 21 September 1959 s/d 30 September 1959.
2) Dalam tahun ini pula Indonesia mengirimkan delegasinya ke Konperensi Administrasi Radio dan Konperensi Plenipotentiary di Jenewa yang diselenggarakan dari tanggal 17 Agustus 1959 s/d pertengahan Desember 1959.
3) Pada akhir bulan Pebruari 1960 diadakan Sidang Sub Komisi Revisi Umum Konvensi U.P.U. dan Sidang Sub Komisi Paketpos. Pemerintah Indonesia dalam

Digitized by Google

hal ini menunjuk Direktur Pos Muda, Romli, untuk mewakili Indonesia dalam Sidang tersebut.

4) Dalam bulan Mei 1960 A.M. Hardigaluh mewakili Indonesia untuk menghadiri Sidang Tahunan Komisi Eksekutip dan Penghubung dari U.P.U. yang diselenggarakan di Bern.
5) Pada akhir tahun 1960 Kepala Bagian Pendidikan P.T.T., R.M.A. Soerianegara dan Ahli-Teknik P.T.T., Ir. Bahder Djohan mewakili Indonesia untuk menghadiri Sidang-sidang Study Groups dan Sub Groups dari I.T.U. yang diselenggarakan dalam bulan-bulan Nopember dan Desember 1960.
6) Dalam tahun 1961 Indonesia mengirimkan perutusan yang terdiri dari S.H. Simatupang, Penjabat Direktur Jendral P.T.T., sebagai Ketua Delegasi, dan A.M. Hardigaluh, Kepala Hubungan Internasional, sebagai anggota, untuk menghadiri sidang tahunan C.E.L. di Bern dari tanggal 15 Mei 1961 s/d 20 Mei 1961 dan sidang "Sous Commision pour le development de l'assistence Technique directe entre des Administrations" di Bern pada tanggal 8 Mei 1961.
   Dalam tahun 1963 S.H. Simatupang, Pj. Direktur Jenderal Postel, mewakili Indonesia dalam sidang C.E.L. di Bern dari tanggal 1-6-1963 s/d 3 Nopember 1963.
7) Pada tanggal 5-2-1964 Indonesia mengirimkan D. Hage, Direktur Giro dan Cekpos, ke Tokio untuk mengikuti Seminar Pos yang dihadiri oleh Wakil-wakil beberapa Negara Asia.
8) Pada tanggal 12-2-1964 Romli, Penjabat Direktur Pos, menuju Bern untuk mewakili Indonesia dalam Konperensi Persiapan Kongres U.P.U. ke XV. Kongres U.P.U. ke XV ini diadakan di Wina dalam bulan Mei 1964. Hadir dalam Kongres U.P.U. tersebut sebagai delegasi Indonesia ialah S.H. Simatupang, Penjabat Direktur Jenderal P.N. Postel, dan Romli, Penjabat Direktur Pos.
9) Dalam tahun 1964 pula S.R. Riupassa, Pengawas Pos I, menuju New York pada tanggal 26-3-1964 bersama-sama rombongan Bapenyf untuk bertugas selama enam bulan dalam New York World's Fair.

Seperti telah disinggung dalam Sub Bab 1, d Bab II, dalam Rapat Kerja P.N. Postel Tahun 1965 diresolusikan, bahwa P.N. Postel siap sedia keluar dari U.P.U. dan I.T.U. dan siap mempelopori terbentuknya U.P.U. dan I.T.U. NEFO yang Sekretariatnya ditempatkan di Indonesia. Ketika itu politik luarnegeri R.I. menempuh politik luar negeri dengan sistim poros-porosan yang pada hakekatnya mempersempit ruang gerak R.I. di forum internasional yang menyimpang prinsip dasar politik yang bebas aktif.1) Bagi P.N. Pos dan Telekomunikasi seharusnya berlaku prinsip: "La Post ignore la politique!" yang berarti "Pos tidak mengenal politik" dan "Pos tidak mengenal batas!", meskipun ada ketentuan Uni Terbatas.

Ide pembuatan UPU dan ITU NEFO untuk menandingi UPU dan ITU yang berubah menjadi badan khusus PBB itu nampak jelas terlampau idealnya politik mercu suar Indonesia, sehingga tak terwujud dengan gagalnya percobaan kudeta G.30.S./PKI. Berlakulah kembali bagi Pos dan Telekomunikasi: "Dunia adalah satu!".

---

1) Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hal. 338.

Digitized by Google

e. Kepegawaian.

1) Formasi dan jumlah pegawai.

Sejak 1960 s/d 1965 data mengenai jumlah pegawai menurut formasi, yang ada dan kekurangannya sebagai berikut:

Tahun	Formasi	Yang ada	Kekurangan
1960	37.028	31.960	5.068
1961	37.578	33.004	4.574
1962	37.578	33.763	3.815
1963	40.107	38.361	2.744
1964	40.629	37.885	1.746
1965	40.629	40.629	37.386

Jawatan PTT merupakan Jawatan yang dalam perjalanan sejarahnya merupakan tempat penghematan. Dari tahun 1960 sampai dengan 1965 Jawatan PTT meskipun menjadi P.N. Postel, tetap bekerja di bawah formasi. Namun adanya kekurangan pegawai tersebut bukan tanpa alasan. Berhubung dengan masih berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai penghematan keuangan yang dikeluarkan dalam tahun 1959, maka dalam tahun 1960 masih dialami banyak kesulitan dalam pengangkatan pegawai baru untuk mengatasi kekurangan tenaga pegawai. Demikian pula dialami kesulitan dalam perwakilan, pemindahan dan pemondokan pegawai untuk memelihara kelancaran jalannya perusahaan. Terutama di daerah-daerah tertentu, misalnya di Riau daratan dan di Sumatera Selatan sukar sekali untuk mendapatkan tenaga baru berhubung tingginya upah yang dapat diperoleh di luar Jawatan PTT. Padahal tiap-tiap tahun diadakan peremajaan pegawai. Di samping itu terdapat pegawai-pegawai yang diberhentikan dengan pensiun atas permintaan sendiri, yang berhenti dengan uang lepas atau uang tunggu, yang dipecat dan yang meninggal.

Untuk mengisi formasi 1959 (termasuk penggantian pegawai-pegawai yang berhenti, pensiun atau meninggal), maka selama tahun 1960 diselesaikan kenaikan pangkat sebanyak 3213 orang, dan pengangkatan pegawai baru (termasuk lulusan Pendidikan PTT) sebanyak 1186 orang.

Selama tahun 1961 diselesaikan kenaikan pangkat sebanyak 4219 orang dan penerimaan dan pengangkatan pegawai baru (termasuk lulusan Pendidikan PTT) sebanyak 1238 orang.

Dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai (K.U.P.) tanggal 8-2-1962 No. B.65-1-24/Bw.7-36, pengisian susunan pegawai tahun 1961 yang meliputi 37.578 orang diijinkan oleh Pemerintah.

Penyesuaian pangkat P.G.P.N. 1955 ke dalam P.G.P.N. 1961 yang berlaku terhitung mulai 1-1-1961 dan diinstruksikan dengan surat keputusan K.U.P. tanggal

Digitized by Google

22-1-1962 no A.49-2-42/Aw 4-20, sepanjang mengenai pegawai-pegawai golongan E ke atas dan semua pegawai di Kantor Pusat seluruhnya selesai dikerjakan. Mengenai pegawai-pegawai sampai dengan golongan DD/III di daerah-daerah baru dapat diselesaikan pada tahun 1963.

Selama tahun 1963 jumlah pegawai-pegawai baru yang diterima dan diangkat (termasuk lulusan pendidikan P.N. Postel) tercatat 4.525 orang.

Rencana formasi pegawai tahun 1964 meliputi 40.629 orang. Jumlah sebesar itu dibutuhkan demi untuk kelancaran pekerjaan yang berhubungan dengan perubahan organisasi Perusahaan, pemisahan Dinas Telegrap dari Dinas Pos, pengoperan Kantor-kantor Telepon dari Pamong Praja, B.P.M. dan D.S.M., pengambil-alihan Cable & Wireless, perluasan Dinas Giropos, pengiriman tenaga-tenaga ke garis depan dalam rangka pelaksanaan DWIKORA.

Dengan surat keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 14-1-1964 No P. 41/1/3 ditetapkan Peraturan Gaji P.N. Postel (P.G.P. P.N. Postel) yang berlaku mulai tanggal 1-1-1964. Penyesuaian pangkat dan gaji bertalian dengan keluarnya peraturan gaji baru termaksud selesai dikerjakan dalam tahun 1964.

Dalam tahun 1965 terdapat pegawai sejumlah 40.629 orang, belum termasuk tenaga-tenaga lepas organik atau bulanan dan pelajar-pelajar pada Pendidikan P.N. Postel sebanyak 3.243 orang. Jumlah tersebut dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan yang bertalian dengan pemecahan P.N. Postel menjadi P.N. Pos dan Giro, dan P.N. Telekomunikasi serta untuk perluasan dan penambahan Daerah-daerah Pos, dan Daerah-daerah Telekomunikasi. Berhubung dengan itu formasi 1965 belum dapat ditetapkan.

Dalam tahun 1965 dilakukan penerimaan dan pengangkatan pegawai baru (termasuk lulusan Pendidikan Postel) sebanyak 1.827 orang, penaikan pangkat 2241 orang, pengangkatan pegawai Negeri tetap 1031 orang, penaikan gaji berkala dan lanjutan 11.791 orang, pemberian istirahat besar, istirahat karena sakit/hamil/ alasan penting, istirahat di luar tanggungan Negara/di luar jabatan kepada 1034 orang.

2) Pemindahan pegawai.

Kalau P.N. Postel dapat beroperasi dengan tenaga kerja di bawah formasi pegawai yang dapat mengurangi pengeluaran perusahaan, namun penghematan ini dihadapkan kepada masalah pemindahan pegawai yang banyak mengakibatkan pengeluaran. Kenaikan pangkat pegawai dan pegawai yang sudah lama di suatu tempat yang mengakibatkan kelesuan, memerlukan penggantian pegawai sehingga mengakibatkan pemindahan. Pemindahan seorang pejabat tinggi dapat mengakibatkan mutasi berantai dan transfer pegawai. Kalau di masa penjajahan Belanda, pegawai-pegawai malah menolak menempati rumah dinas karena dianggap mahal sewanya dan lebih suka menempati rumah sewa di luar, pada masa ini pegawai yang pindah belum tentu dapat meninggalkan rumah dinasnya di posnya yang lama dan di posnya yang baru tak mungkin menyewa rumah, karena pada umumnya

Digitized by Google

rumah disewakan tidak lagi secara bulanan melainkan untuk masa sewa kontrak tertentu dan dengan harga sewa kontrak yang tak mungkin dibayar oleh pegawai. Akibatnya pegawai yang dipindah dengan keluarganya terpaksa masuk losmen tanpa makan atau hotel dengan makan yang mengakibatkan pengeluaran yang tinggi. Fasilitas ini adakalanya menimbulkan hal-hal yang mengirikan pegawai yang nafkahnya makin lama makin tidak cukup. Jumlah pegawai yang terpaksa dipindahkan dengan hak menempati losmen atau hotel sejak 1961 s/d 1965 berturut-turut sebanyak: 279, 273, 133, 470 dan 401. Untuk mengurangi pengeluaran Perusahaan ini, maka untuk pegawai-pegawai yang tinggal di losmen atau hotel yang taripnya selalu meningkat, diputuskan oleh Pimpinan Perusahaan bahwa untuk mereka disewakan rumah secara kontrak. Untuk keperluan tersebut diadakan penyewaan 80 rumah oleh Perusahaan. Meskipun ini merupakan kebijaksanaan yang untuk sementara dapat mengurangi pengeluaran Perusahaan, akan tetapi karena tarip sewa kontrak tiap kali kalau diperbarui sewa kontraknya naik, beban perusahaan untuk "perumahan" pegawai yang mobil, tetap merupakan masalah yang perlu dipecahkan.

Untuk menampung pegawai-pegawai yang dipindahkan ke luar Jawa dan harus melalui Jakarta, maka Mess Postel Dr. Sutomo 9 merupakan tempat singgah yang murah, bahkan tempat transit-meskipun bisa untuk beberapa tahun, yang dapat ditempati pegawai-pegawai yang dipindahkan dan bertempat di Jakarta.

Mess Postel ini mula-mula bertempat di Jl. Merdeka Selatan No. 12. Berhubung Kantor Telepon Gambir yang bertempat di Lapangan Gambir harus digusur maka untuk penggantinya didirikan Kantor Telepon Otomat Gambir yang ditempatkan di Jl. Merdeka Selatan No.12. Untuk pengganti Mess Postel Jawatan PTT membeli rumah yang antik di Jl. Dr. Soetomo No.9. Sejak tahun 1960 pengelolaan Mess Postel dilakukan oleh Siswoko selaku Ksos Jakarta. Dengan pengurusan yang tepat yang mendekati pengelolaan perhotelan, Mess Postel ini dapat melakukan swakelola atau membeayai dirinya sendiri yang merupakan suatu sumbangan kepada Jawatan PTT dan P.N. Postel untuk mengurangi pengeluaran perusahaan.

3) Kesejahteraan Pegawai.

Nilai tukar gaji pokok makin lama makin turun dan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan pegawai negeri tanpa mencari sendiri tambahannya. Berhubung dengan itu perusahaan berusaha untuk meringankan penderitaan pegawai dengan menyediakan dana untuk kesehatan, rekreasi, kredit, koperasi, olahraga, peribadatan, pakaian, beras dan bencana alam.

Jumlah Poliklinik yang disediakan perusahaan sampai dengan tahun 1965 tercatat 8.

Untuk melayani pegawai-pegawai yang sakit, sejak bulan Maret 1965 di Bandung ditempatkan dan atau diperbantukan pada poliklinik-poliklinik Postel 2 orang Dokter dari Departemen Kesehatan. Sebuah mobil ambulance disediakan di Kantor Pusat. Pada akhir bulan Desember 1965 dibuka lagi 3 buah poliklinik. Sebagian obat-obatan disediakan di "depot obat" untuk pegawai-pegawai Postel yang pe-

Digitized by Google

ngeluaran obatnya diawasi oleh kedua dokter tersebut. Pembelian obat-obatan ini dilakukan langsung dari depot pharmasi dengan harga murah sehingga meringankan beban perusahaan. Ketika itu direncanakan pula pengadaan dokter-dokter, apotik-apotik, rumah sakit - rumah sakit dan klinik-klinik bersalin kontraktor.

Untuk melayani kebutuhan beras bagi para pegawai di Jawa Barat, tanpa Jakarta, sebagai proyek utama diusahakan pembelian dan penggilingan padi di daerah Cilamaya secara kerja sama dengan Bupati Krawang dan atau Pancatunggal setempat serta pemilik pabrik. Secara ini harga beras bagi pegawai menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran bebas. Proyek tersebut ternyata dapat menekan defisit perusahaan sebesar Rp.3.000.000.000,- hingga Rp.4.000.000.000,-.

Di samping perberasan, perusahaan harus ikut menangani perminyakan untuk meringankan beban pegawai. Sejak medio 1965 diusahakan pembelian minyak tanah dari Pemerintah sebanyak $\pm$ 300.000 liter per bulan untuk Postel Jawa Barat.

Di bidang sandang, dalam hal ini pakaian dinas, pegawai-pegawai mengalami kesulitan pula. Untuk sekedar meringankan beban pegawai dalam bahan pakaian, maka perusahaan dalam bulan Oktober 1960 mulai mengadakan pembagian khaki-drill kepada para pegawai sebanyak 6 m tiap pegawai dengan harga Rp.45,- tiap meter yang pembayarannya dilakukan dalam 6 angsuran dengan jalan memotong gaji masing-masing.

Pada tahun 1963 dalam rangka untuk meringankan penderitaan pegawai, sebagai akibat dari tekanan-tekanan ekonomi, maka Perusahaan mengambil tindakan-tindakan:

- perbaikan gaji dengan membayarkan tunjangan perusahaan.
- pemberian pakaian seragam untuk seluruh pegawai.
- pemberian beras dan gula pasir menurut jatah yang ditetapkan Pemerintah.

Untuk memberikan identitas, pegawai-pegawai P.N. Postel yang berpakaian seragam diberi tanda pangkat yang berupa balok di bahu.

Adalah suatu kenyataan bahwa banyak suami dan isteri harus bekerja supaya nafkah mereka berdua mencukupi kebutuhan penghidupan. Untuk memberi rasa tenteram bagi isteri-isteri yang anaknya masih kecil kalau mereka pada waktunya harus mengakhiri cuti hamilnya masing-masing, maka pada Hari Ulang Tahun P.N. Postel tanggal 27-9-1964, di Kantor Telepon Bandung dibuka Balai Penitipan Bayi sebagai usaha untuk memperbaiki jaminan sosial pegawai.

4) Surat penghargaan dan terima kasih.

Selama masa ini Pimpinan Perusahaan tiap tahun tidak lupa untuk memberikan surat penghargaan dan ucapan terima kasih yang disertai uang kepada para pegawai yang masih bekerja aktif dan yang berhenti dengan pensiun. Sikap yang demikian merupakan pendekatan yang bijaksana, yang menunjukkan perhatian perusahaan kepada mereka yang menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan dalam melakukan tugasnya masing-masing. Jumlah pegawai yang menerima surat penghargaan tersebut sejak tahun 1961 sampai dengan 1965 berturut-turut 32, 162, 295, 330

Digitized by Google

dan 600 orang. Dapat dikemukakan secara khusus bahwa dengan surat keputusan Presiden/Panglima Tertinggi A.P.R.I. tanggal 14-2-1964 No. 1/BTK/tahun 1964 3 orang pegawai yang sudah pensiun yaitu Heru Ganadi, Abdoerachim Djojodipoero almarhum dan Kasidi, dianugerahi Bintang Gerilya sebagai penghargaan atas kesetiaan dan jasa-jasanya yang besar dan luar biasa terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan. Penyematan tanda kehormatan tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertindak sebagai wakil dari Presiden R.I. dalam suatu upacara yang khidmat pada tanggal 29-8-1964 di Bandung, dengan disaksikan oleh Panca Tunggal Jawa Barat, undangan-undangan lain, pegawai-pegawai P,N. Postel, Pers, Radio dan P.F.N. Ibukota.

Pada tahun 1965 diberikan penghargaan pula kepada mereka yang telah berhasil membongkar pencurian-pencurian kawat telepon yaitu 11 orang anggota Angkatan Kepolisian Surabaya, 1 orang dari Kejaksaan Gresik, 3 orang pegawai Postel Surabaya, 1 orang dari Anggota Kepolisian dan 2 orang pegawai Postel di Tanjungpriok.

5) Rumah Peristirahatan.

Untuk memberi kesempatan para pegawai beristirahat supaya cipta, rasa dan karsa pulih kembali habis menunaikan kewajibannya yang melesukan tenaga, maka selama masa ini perusahaan menyediakan 10 rumah peristirahatan yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Hawa yang sejuk di tengah alam yang segar memang diperlukan para pegawai yang biasanya hanya sibuk dengan pekerjaannya melulu tanpa dapat menikmati pemandangan alam yang indah. Tempat-tempat peristirahatan itu pada umumnya dimanfaatkan oleh pegawai-pegawai yang sedang melakukan inspeksi atau pegawai-pegawai pimpinan yang mempunyai kendaraan dinas. Ketika P.N. Postel dipecah, rumah-rumah peristirahatan tersebut dibagi oleh kedua Perusahaan Negara.

f. Pendidikan dan Latihan.

Salah satu faktor yang turut menentukan kelangsungan hidup dan maju atau mundurnya Jawatan PTT atau P.N. Postel ialah pegawai-pegawainya yang terdidik, terlatih dan trampil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk memperoleh mutu pegawai-pegawai yang memadai diperlukan pembinaan dalam pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Siswa-siswa yang dibina ini disiapkan untuk mengganti pegawai-pegawai yang berhenti atau untuk menambah tenaga kerja untuk mengisi formasi pegawai yang belum terpenuhi. Berhubung dengan itu pendidikan dan latihan merupakan syarat mutlak untuk melakukan penanaman tenaga kerja untuk waktu yang akan datang.

Pendidikan dan Latihan diadakan di Kantor Pusat PTT Bagian Pendidikan yang menjadi Pusat Pendidikan Pos dan Telekomunikasi di Bandung. Jumlah siswa yang dididik di Bandung dan di Daerah pada tahun 1960 s/d 1964 berturut-turut 1123, 1458, 1544, 1371 dan 817 orang. Jumlah tenaga-tenaga terdidik yang dapat diserah-

Digitized by Google

kan kepada Jawatan PTT selama masa 1956-1960 hanya mencapai ± 50% dari jumlah yang diharapkan. Hambatan-hambatan yang merintangi pelaksanaan rencana pendidikan yang ditetapkan, disebabkan antara lain kurangnya ruangan pelajaran atau kuliah, tenaga pengajar, buku-buku pelajaran, daya tampung asrama dan kurang baiknya mutu calon-calon siswa sehingga hasilnya kurang memuaskan.

Kurang baiknya mutu calon-calon siswa antara lain disebabkan karena tahun pelajaran Pendidikan-pendidikan PTT atau Postel tidak sama dengan tahun pelajaran Sekolah Umum, bahkan tidak mempunyai tahun pelajaran tertentu. Pendidikan PTT diadakan menurut kebutuhan Jawatan PTT dan tersedianya ruangan pelajaran. Berhubung dengan itu sukar untuk menyesuaikan penerimaan pelajar-pelajar baru yang seharusnya bersambungan dengan akhir ujian penghabisan dari Sekolah Umum. Karena penerimaan siswa-siswa baru yang harus disaring pada umumnya dilakukan setelah dimulainya tahun pelajaran baru baik di Akademi maupun di Universitas, Jawatan PTT atau P.N. Postel tidak kebagian pelajar-pelajar yang terbaik karena lulusan-lulusan yang terbaik itu pada umumnya sudah mendapatkan pekerjaan atau diterima di Pendidikan lain, kecuali mereka yang jauh-jauh sudah berhasrat untuk memasuki Pendidikan PTT. Akibatnya pada ujian-ujian semester banyak siswa yang tidak berbakat terpaksa dikeluarkan. Banyaknya siswa dalam satu angkatan yang dikeluarkan merupakan penyakit chronis yang merupakan pengeluaran yang mahal, bahkan merupakan pemborosan kalau penyaringan tidak dilakukan tanpa pandang bulu.

Untuk mendapatkan calon-calon siswa yang diharapkan menjadi pegawai yang cakap, rajin, jujur, teliti dan terampil atau mempunyai kepribadian yang diperlukan untuk pekerjaannya, maka seleksi siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa ditempuh melalui ujian psychologi dengan bantuan Lembaga Penyelidikan Pengajaran dari Universitas Pajajaran di Bandung.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan lainnya maka dilaksanakan pembongkaran dan pembangunan gedung pendidikan baru yang bertingkat. Untuk sementara Pusat Pendidikan PTT terpaksa menyewa beberapa ruangan klas di Sekolah Menengah Atas dan di daerah diadakan perbaikan ruangan-ruangan yang ada di Kantor-kantor (Daerah) sehingga dapat dipergunakan untuk ruangan sekolah. Dalam mencari tenaga pengajar di lingkungan PTT sendiri, Pusat Pendidikan PTT juga menghubungi beberapa Lembaga Pendidikan dan Universitas-universitas Negeri atau Partikelir di Bandung dan di Jakarta. Dalam hal ini Pusat Pendidikan PTT tidak melupakan jasa-jasa yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara yang turut serta mengusahakan alat-alat dan buku-buku pelajaran dengan pelbagai jalan.

Dalam tahun 1960 diterima siswa-siswa baru untuk Akademi PTT, jurusan Administrasi Pos dan Telegrap, dan jurusan Telekomunikasi angkatan 1961/1964, pendidikan Pengatur-Pos angkatan 1961/1963 (khusus bagi pegawai-pegawai PTT), pendidikan Perakit-pos angkatan 1960/1961, pendidikan Pengatur-Telekomunikasi angkatan 1961/1965, pendidikan Perakit-Telekomunikasi angkatan 1961/1962 dan pendidikan Operator-Telegrap CI angkatan 1961/1962.

Pusat Pendidikan PTT tidak hanya diperuntukkan bagi pendidikan bagi pegawai-pegawai atau calon-calon pegawai PTT atau Postel, tetapi dapat dimanfaatkan

Digitized by Google

oleh Instansi-instansi lain untuk menitipkan pegawai-pegawainya yang memerlukan pendidikan dan latihan Pos dan Telekomunikasi yang dapat ditrapkan pada Instansinya masing-masing. Jumlah siswa-siswa yang berasal dari Instansi-instansi tersebut selama 1960-1963 ialah sebagai berikut:

Tahun	1960	1961	1962	1963
Angkatan Perang	41	36	31	11
Jawatan Penerbangan Sipil	2	1	1	1
Jawatan Meteorologi	1	–	–	–
Jawatan Kepolisian Negara	1	1	20	1
Brigade Mobil	8	2	–	–
Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA)	9	2	1	5

Pendidikan dan Latihan di dalam negeri dirasa belum memadai berhubung pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi. Untuk menyesuaikan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja PTT atau Postel dikirimkan berturut-turut beberapa pegawai ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan dan latihan khusus.

Pada tahun 1960 dikirimkan 2 pegawai ke Jerman Barat untuk mengikuti "Telephone Exchange Training" pada Pabrik Siemens Halske dengan beaya perusahaan tersebut. Latihan tersebut berhubungan dengan pembelian alat-alat teknik untuk pelbagai proyek pembangunan PTT.

Seorang pegawai melakukan tugas belajar di Inggris dalam lapangan Tropical Architecture dengan bantuan Colombo Plan.

Pada tahun 1961 2 pegawai dikirimkan ke Italia dan Jerman Barat untuk mempelajari pekerjaan-pekerjaan teknik kabel masing-masing pada Perusahaan Pirelli dan Sud Deutche Kabel Werke dengan beaya perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada tahun 1964 dikirimkan 19 pegawai ke luar negeri dengan bantuan Colombo-Plan, U.P.U. dan I.T.U. Mereka terbagi sebagai berikut: 4 orang ke New-Zealand, 3 orang ke Jerman Barat, 11 orang ke Jepang dan 1 orang ke Perancis.

Pada tahun 1965 dikirimkan 26 orang pegawai ke luar negeri untuk tugas belajar atau untuk perjalanan dinas yang terdiri dari: 2 orang ke Rusia dan Nederland, 16 orang tugas belajar ke Jerman Barat berdasarkan kontrak jual beli dan 8 orang tugas belajar ke Jepang berdasarkan kontrak jual beli pula.

Kalau luar negeri pada umumnya dianggap sebagai sumber untuk menambah ilmu teknologi, maka P.N. Postel tidak melupakan sumber-sumber di dalam negeri yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan staf Pimpinan Perusahaan modern yang membutuhkan ilmu-ilmu pembantu dalam manajemen perusahaan. Untuk keperluan tersebut dikirimkan beberapa pegawai ke pelbagai Kursus, Akademi, Sekolah Kejuruan dan Universitas dengan bea siswa. Jumlah mereka yang menerima tugas belajar dengan bea siswa ke pelbagai lembaga pendidikan dari tahun 1960 s/d 1965 ialah sebagai berikut:

Digitized by Google

Jenis-jenis Lembaga Pendidikan.	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Pendidikan Ahli perpustakaan di Jakarta	1	–	–	–	–	–
Akademi Ilmu Statistik di Jakarta	1	1	1	–	–	–
Akademi Thesauri Negara di Jakarta	2	2	2	2	–	–
Lembaga Administrasi Negara	4	–	–	–	–	–
Institut Teknologi Bandung	–	8	6	1	4	2
Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan di Jakarta	–	1	1	1	3	3
Kursus Administrasi Negara di Jakarta	–	4	–	–	–	–
Perguruan Tinggi Ilmu Administrasi Negara	–	2	3	3	4	1
Universitas Pajajaran Fakultas Ekonomi	–	1	1	1	1	–
Universitas Parahiyangan Fakultas Ekonomi	–	1	1	2	1	1
Akademi Dinas Administrasi Negara	–	–	3	3	–	–
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat	–	–	1	–	–	–
Fakultas Sosial Politik UNPAD	–	–	–	1	1	1
Sekolah Kejuruan Perhotelan dan Pariwisata Bandung	–	–	–	2	2	2
Fakultas Kedokteran UNPAD BANDUNG	–	–	–	–	1	1
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	–	–	–	–	–	1

Dalam sejarah pendidikan Pos dan Telekomunikasi masa ini perlu dicatat, bahwa pada akhir tahun 1963 terdapat 13 pegawai menengah pos yang berasal dari Irian Barat yang telah mendapat pendidikan lanjutan di Pusat Pendidikan P.N. Postel di Bandung.

Pada tanggal 5-9-1965 s/d 22-10-1965 dibuka Kursus Penyegaran (Refresher Course) angkatan pertama tingkat Akademi jurusan Teknik Telekomunikasi yang diikuti oleh 26 orang yang terdiri dari Kepala-kepala dan Kepala-kepala Bagian Kantor Telegrap, Telepon dan Radio dari seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Tujuan dari Kursus ini ialah untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam lapangan menurut bidangnya masing-masing, ditambah dengan pengetahuan manajemen dan sikap mental yang mencakup ideologi Negara dan pengetahuan Agama. Secara ini maka perusahaan dapat menerima umpan balik dari para alumnus untuk penyempurnaan curriculum Akademi Postel yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan.

Untuk memajukan sistem pendidikan "learning by doing", maka untuk pertama kalinya pada tanggal 9-11-1965 s/d 10-12-1965 dibuka Kantor Pos Latihan "Bandung Latihan Akademi" dengan maksud untuk memberikan pendidikan praktis kepada siswa-siswa yang membuktikan kebenaran pendapat bahwa "I do, I understand". Dengan adanya Kantor Pos Latihan ini siswa-siswa dihadapkan langsung kepada publik yang harus dilayani dengan cepat, tepat dan baik sehingga pendidikannya selama itu benar-benar dapat dikatakan sudah betul. Pendidikan praktek secara ini dapat menghemat pengeluaran dan memaksa siswa-siswa bekerja dengan sungguh-sungguh karena mendapat pengawasan yang intensip.

Kalau di bidang pendidikan terdapat fakta-fakta yang merupakan kemajuan, maka

Digitized by Google

dalam pembangunan Campus Gegerkalong pada akhir 1965 terdapat kemacetan, antara lain karena terhentinya bantuan dari UNDP akibat keluarnya Indonesia dari PBB. Bangunan-bangunan yang telah didirikan meliputi sebuah gedung kuliah bertingkat, sebuah rumah "project manager" yang berupa "guest house", 10 rumah dosen, 6 rumah untuk pegawai dan sebuah gedung untuk penempatan mesin diesel. Pembangunan Campus Gegerkalong ini baru diteruskan setelah Masa Demokrasi Terpimpin berakhir.

Digitized by Google

2. Organisasi-organisasi di lingkungan Pos dan Telekomunikasi.

a. Kegiatan Organisasi Wanita.

Kira-kira pada akhir tahun 1960 S.H. Simatoepang selaku Direktur Jenderal P.T.T. pada waktu itu, menyatakan keinginannya, bahwa sebaiknya istri-istri karyawan dan karyawati menggabungkan diri menjadi satu organisasi. Singkatnya Direktur Jenderal P.T.T. menginginkan hanya ada satu organisasi wanita saja dalam Jawatan P.T.T.

Berdasarkan anjuran itu, maka pada bulan April 1961, dibawah pimpinan ibu Simatoepang, telah dibentuk suatu Badan yang disebut "BADAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENGURUS BESAR" dengan susunannya sebagai berikut:

1. Ny. S.H. Simatoepang.
2. Ny. Romli.
3. Ny. Arismoenandar.
4. Ny. Soemantri.
5. Ny. Soeko.
6. Ny. Moestadjab.
7. Ny. Aladin.
8. Ny. Emir Maulana.
9. Ny. Sapei.
10. Ny. Djoekanda.
11. Ny. Momod Ranawidjaja.

Badan tersebut diberi tugas untuk mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi wanita P.T.T. yang telah ada dengan melalui Kepala Daerah Pos dan

Digitized by Google

Kepala Daerah Telekomunikasi, dan juga dengan melalui Kepala-kepala unit usaha Pos atau Telekomunikasi, dengan ajakan untuk bersatu dalam satu wadah organisasi wanita. Ajakan tersebut dapat sambutan baik dari Persatuan Ibu-Ibu yang telah ada, antara lain dari:

1. Perukunan Wanita Keluarga P.T.T.	di Solo
2. Kekeluargaan Wanita P.T.T.	di Semarang
3. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Medan
4. Persatuan Wanita P.T.T.	di Surabaya
5. Persatuan Wanita P.T.T.	di Malang
6. Persatuan Wanita P.T.T.	di Jember
7. Persatuan Wanita P.T.T.	di Cilacap
8. Persatuan Wanita P.T.T.	di Jakarta
9. Persatuan Istri Pegawai P.T.T.	di Kediri
10. Kekeluargaan Wanita P.T.T.	di Kediri
11. Persatuan Istri Pegawai P.T.T.	di Pamekasan
12. Persatuan Istri Pegawai P.T.T.	di Kertosono
13. Persatuan Istri Pegawai P.T.T.	di Wonosobo
14. Persatuan Istri Pegawai P.T.T.	di Cirebon
15. Ikatan Keluarga Wanita P.T.T.	di Madiun
16. Ikatan Wanita P.T.T.	di Yogyakarta
17. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Padang
18. Ikatan Istri Pegawai Kantor Pos	di Magelang
19. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Jakarta
20. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Kutoardjo
21. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Purbolinggo
22. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Pemalang
23. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Banjarmasin
24. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Rengat
25. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Pati
26. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Banyuwangi
27. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Denpasar
28. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Sukabumi
29. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Garut
30. Ikatan Istri P.T.T.	di Tasikmalaya
31. Ikatan Istri P.T.T.	di Palembang
32. Ikatan Istri P.T.T.	di Singaradja
33. Ikatan Istri P.T.T.	di Ambon
34. Ikatan Istri P.T.T.	di Menado
35. Kekeluargaan P.T.T.	di Tanjungkarang
36. Keluarga Wanita P.T.T.	di Cepu
37. Ikatan Pegawai Wanita P.T.T.	di Surabaya
38. Ikatan Keluarga Wanita Telepon	di Magelang
39. Ikatan Istri P.T.T.	di Kudus
40. Ikatan Istri P.T.T.	di Bogor

Digitized by Google

41. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Purworejo
42. Ikatan Wanita P.T.T.	di Blitar
43. Ikatan Wanita P.T.T.	di Purwakarta
44. Ikatan Wanita P.T.T. Kantor Pusat	di Bandung
45. Persatuan Istri P.T.T.	di Makasar
46. Persatuan Istri P.T.T.	di Kebumen
47. Ikatan Wanita P.T.T.	di Blora
48. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Kantor Pusat Bandung
49. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Kantor Pos Bandung
50. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Kantor Telepon Bandung
51. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Laboratoria Bandung
52. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Biro Kepala Daerah Telekomunikasi VIII, Bandung.
53. Ikatan Istri Pegawai P.T.T.	di Rancaekek.

Untuk melaksanakan hubungan surat-menyurat, baik ke dalam maupun keluar organisasi, telah dibantuk suatu Sekretariat yang anggotanya terdiri dari: Ny. Djukanda, Ny. Emir Maulana, dan Ny. Momod Ranawidjaja.

Setelah ternyata bahwa perhatian dari segenap organisasi yang berada dalam lingkungan P.T.T. cukup besar, maka dibentuklah suatu "PANITIA PENYELENGGARA KONGRES" di Bandung yang terdiri dari:

Ketua	: Ny. Djoekanda
Wakil Ketua I	: Ny. S.H. Simatoepang
Wakil Ketua II	: Ny. Soemantri
Wakil Ketua III	: Ny. Moestadjab
Penulis I	: Ny. Momod Ranwidjaja
Penulis II	: Ny. Kirjoedono
Bendahari I	: Ny. Arismoenandar
Bendahari II	: Ny. Soeko
Bendahari III	: Ny. Slamet Oerip
Pembantu	: 1. Ny. Sapei
	2. Ny. Soetjahjo

Panitia Inti tersebut dibantu oleh beberapa Seksi.

Kongres tersebut diadakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober 1961 dan dihadiri oleh 49 Ikatan/Persatuan Wanita dari seluruh tempat di wilayah Indonesia. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dari Kongres tersebut antara lain ialah:

Digitized by Google

1. Musyawarah ini diakui dan disahkan sebagai Kongres ke-I dari Organisasi ini.
2. Nama organisasi disahkan menjadi "PERSATUAN WANITA P.T.T.", disingkat "PWPTT".
3. Tanggal 23 Oktober ditetapkan sebagai hari lahirnya organisasi ini.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun oleh Panitia disahkan.
5. Dipilih dan disahkan susunan Pengurus Besar yang terdiri dari:
   Ketua : Ny. Momod Ranawidjaja
   Wakil Ketua : Ny. Moestadjab
   Penulis I : Ny. Kirjoedono
   Penulis II : Ny. Soetjahjo
   Bendahari I : Ny. Samhoedi
   Bendahari II : Ny. Goerjama
   dengan berkedudukan di Bandung.
6. Kongres ke-II telah ditetapkan, yaitu di Yogyakarta pada tahun 1964.

Kegiatan kerja setelah Kongres berakhir diisi dengan konsolidasi ke dalam, yaitu dengan memberikan penerangan dan penjelasan-penjelasan ke daerah-daerah serta mempergiat aktivitas.

Pada bulan Oktober 1964 Kongres ke-II PWPTT diselenggarakan di Yogyakarta yang dihadiri oleh 65 cabang PWPTT. Kongres ini ditandai dengan suasana yang panas, karena ada unsur tertentu yang menginginkan dan berusaha keras untuk memberikan dasar dan arah yang lain dari pada bunyi anggaran dasar yang telah ada, dan juga ingin memberikan warna lain dalam azas dan tujuan. Keadaan pada hari-hari musyawarah sangat tegang, sehingga terpaksa oleh panitia diadakan pengamanan-pengamanan.

Berkat kewaspadaan dan ketangkasan pimpinan Kongres, usaha tersebut dapat digagalkan, sehingga Kongres dapat berakhir dengan selamat, dan menghasilkan beberapa keputusan, antara lain:

1. Perbaikan/perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar.
2. Perubahan nama organisasi dari PWPTT menjadi PW POSTEL, karena pada waktu itu Jawatan PTT telah menjadi PN POSTEL.
3. Pemilihan susunan Pengurus Besar baru yang terdiri dari:
   Ketua I : Ny. Momod Ranawidjaja
   Ketua II : Ny. Sofjan
   Ketua III : Ny. Soewarno
   Penulis I : Ny. Goerjama
   Penulis II : Ny. Moedjijono
   Bendahari I : Ny. Sabarsoediman
   Bendahari II : Ny. Samhoedi

Digitized by Google



Fusie antara organisasi Ibu-ibu dari seluruh Indonesia di Bandung pada bulan Oktober 1961. Tampak ***Pimpinan Sidang, dari kiri kekanan: Ibu-ibu: Moestadjab, SH Simatupang, Momod, Djukanda, Arismoenandar dan Soemantri.***

Digitized by Google

b. Kegiatan Organisasi Buruh.

1) S.S. P.T.T.

a) KONGRES SSPTT KE-III 1961 DI MALANG.

Perjuangan SS PTT dalam perbaikan nasib pegawai bertambah hebat, terutama di bidang sandang pangan. Jumlah Cabang dan anggota SS PTT meningkat. Pada waktu itu Cabang SS PTT berjumlah 169. Thema Kongres Ke-III ialah:

- Masuknya SS PTT ke PTTI (PTT Internasional).
- Meningkatkan tunjangan sandang pangan untuk para pegawai PTT.
- Meneruskan tuntutan agar Jawatan PTT dirobah statusnya menjadi Public Corporation.
  (Untuk tahap pertama dikeluarkan Keputusan ke 13 mengenai dukungan sepenuhnya untuk merubah status Jawatan PTT menjadi Perusahaan Negara).

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Pemimpin Besar Revolusi, oleh PKI digunakan untuk kepentingan perjuangannya. Mulailah pengganyangan oleh PKI, SOBSI, SB POSTEL yang ditujukan kepada SSPTT dengan dalih CIA dan sebagainya. Tetapi bukti-bukti SSPTT sebagai agen CIA tidak terdapat. PKI, SOBSI, SB POSTEL merubah siasat.

Pada tahun 1963 - 1964 mulai didengungkan bahwa ormas-orbur yang tidak berinduk kepada Partai Politik akan dibubarkan. Maka pada tanggal 2 Juli 1964 lahirlah di Kantor Pusat PN Postel suatu ikatan yang bernama IWM singkatan dari Ikatan Warga Marhaenisme.

Sungguhpun ada larangan dari KOTOE dengan Instruksinya No. 02/KOTOE/1964 tanggal 2 Agustus 1964 yang melarang mendirikan organisasi buruh baru dalam Jawatan-Jawatan dan Perusahaan-Perusahaan Negara vital, namun dengan kebijaksanaan Menteri Perburuhan Soetono berhasillah didirikan KB POSTEL/BURUH MARHAENIS pada tanggal 18 Oktober 1964.

Sekitar bulan Oktober 1964 Presiden Soekarno menyatakan larangan atas organisasi BPS beserta ajaran-ajarannya yang ditulis oleh Sayuti Malik tokoh PNI.

Akibat pendukungan oleh 3 Cabang SSPTT, yaitu Pasar Baru, Purwakarta dan Biro Barangcetakan terhadap BPS, maka SSPTT dicap BPS dan harus dibubarkan. Karena begitu dahsyatnya serangan PKI maka banyaklah aktivis-aktivis SSPTT yang goyah, dan mengundurkan diri dari SSPTT.

Serangan PKI dilancarkan dimana-mana, antara lain sejak tahun 1962 nampak jelas kegiatan-kegiatannya di Kantor Pos dan Telegrap Besar Menado dan di Kantor Telepon Menado. SB POSTEL yang berafiliasi kepada partai PKI dengan segala daya menyerang SSPTT. Selain dari pada itu terdapat gejala-gejala bahwa SB POSTEL ingin merongrong pimpinan kantor, terutama sejak pimpinan kantor Pos dan Telegrap Besar Menado diserahkan kepada H.E. Kanter, anggota SSPTT. Kepala kantor yang digantikan adalah seorang anggota SB POSTEL.

Untuk menyelamatkan Kantor Pos dan Telegrap Menado, Kepala Kantor terpaksa mengambil tindakan terhadap Ketua Umum dan Sekretaris Umum SB POSTEL Cabang Menado dengan jalan melarang mereka masuk kantor sesuai dengan wewe-

Digitized by Google

nang pimpinan kantor menurut peraturan kepegawaian. Tindakan tersebut ternyata oleh SB POSTEL/Dewan Daerah SOBSI/PKI dipolitikkan, sehingga persoalannya menjadi masalah yang ditangani oleh Panglima Kodam XIII Merdeka, Menado. Pihak Kodam XIII Merdeka membenarkan tindakan Kepala Kantor Pos Menado.

Persoalan tersebut diatas memuncak demikian rupa sehingga menjadi masalah bagi Pusat. Untuk menyelesaikan persoalan itu, Pimpinan Kantor Pusat Jawatan PTT mengirim suatu Team yang terdiri dari Jawatan, Dewan Perusahaan, Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah SB POSTEL, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah SB POSTEL, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah SSPTT, ke kantor Pos dan Telegrap Besar Menado pada tanggal 26 Mei 1965. Sesudah mengadakan perundingan-perundingan antara lain dengan Kodam XIII Merdeka Menado, Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota Menado, Team Pusat berusaha menyelesaikan sengketa antara Pimpinan kantor dan SB POSTEL yang Ketua Umumnya, anggota Pemuda Rakyat (PR) dilarang masuk kantor. Penyelesaiannya ialah menasakomisasikan Kantor Pos dan Telegrap Besar Menado mulai tanggal 1 Juni 1965 yang terdiri dari:

Pimpinan Kantor	H.E. Kanter (SSPTT)
Wakil Kepala Kantor	SB POSTEL, khusus didatangkan dari Palu, yaitu ex Kepala Kantor Pos Palu.
Pengawas Umum	KB POSTEL/BM.

Keadaan pimpinan Kantor Pos Besar Menado tersebut berlangsung sampai pemberontakan G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965.

b) MUNAS (MUSYAWARAH NASIONAL) SSPTT KE-IV 1965 DI JAKARTA.

Didalam situasi pengganyangan oleh SB POSTEL/SOBSI/PKI yang demikian hebatnya, SSPTT memberanikan diri untuk mengadakan Kongres/Munas ke IV pada tanggal 3 sampai dengan 3 Agustus 1965. Thema Kongres pada saat itu ialah "Konsolidasi organisasi".

Usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam membina Jawatan PTT/PN POSTEL (Periode 1959 s/d 1965 - Periode Demokrasi Terpimpin) oleh SSPTT baik di tingkat pusat (DPP), di tingkat daerah (DPD), maupun di tingkat Cabang (DPC), adalah:

(1) membantu Pimpinan Perusahaan disemua tingkat pendirian, sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, yaitu:
   - social participation
   - social responsibility
   - social control.

   Untuk itu SSPTT duduk di Dewan Perusahaan di tingkat Pusat, sedangkan DPD dan DPC SSPTT berturut-turut mendampingi Kepala Daerah dan Kepala Pendirian.

(2) Memperjuangkan status dari Jawatan menuju ke Public Corporation, demi peningkatan productivitas dan income Perusahaan.

Digitized by Google

(3) Mencegah agar Jawatan PTT/PN POSTEL yang vital ini jangan menjadi alat salah satu partai untuk kepentingan mereka.

Dalam membina karyawan, baik dibidang mental agar berdisiplin dan berdedikasi terhadap perusahaan dan kesejahteraannya, maka DPP SSPTT telah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

(a) Usaha pendidikan.

Untuk tercapainya mental dan disiplin serta dedikasi para karyawan, telah menyelenggarakan kursus-kursus dan seminar-seminar yang menyangkut:

- Peningkatan produktivitas,
- Kepemimpinan,
- Organisasi,
- Kekoperasian,
- Wiraswasta,
- Informasi kegiatan Perusahaan, dan lain-lainnya.

(b) Usaha Sosial.

Untuk memupuk rasa kegotong-royongan secara demokratis, maka diselenggarakan usaha-usaha:

- Dana kematian,
- Badan Sosial Ekonomi (Koperasi), usaha ini dimaksud pula untuk membina kesejahteraan para karyawan.

Dalam hal ini jelas sangat erat sekali kaitan antara membina para karyawan dan usaha membina perusahaan dengan ketahanan Nasional, karena usaha SSPTT berusaha mencegah usaha subversip baik dalam negeri maupun luar negeri yang bermaksud mempengaruhi perusahaan maupun karyawan.

Pada bulan Juli 1960 SSPTT menjadi anggota PTTI (PTT International). SSPTT tidak mempunyai hubungan langsung dengan ILO. ILO sebenarnya lebih diperuntukkan bagi buruh-buruh perusahaan, perkebunan dan lain-lain. SSPTT dapat konvensi-konvensi dari ILO yang mengenai pegawai negeri melalui PTTI.

2) KESATUAN BURUH POSTEL/BURUH MARHAENIS

Pada tanggal 4 Juli 1962 didirikan "Ikatan Warga Marhaen" dengan nama singkat IWM POSTEL.

Pada tahun 1964 di dengung-dengungkan bahwa orbur/ormas yang tidak berafiliasi pada partai politik tertentu tidak akan diberi hak hidup. Berhubung dengan itu maka pada tanggal 4 Juli 1964 IWM POSTEL melebur diri menjadi Kesatuan Buruh Postel/Buruh Marhaenis disingkat KB Postel/BM yang berinduk kepada PNI.

Organisasi ini bertujuan:

a) Memberikan wadah kepada warga marhaenis dalam tubuh Postel untuk melindungi diri dari perselisihan hukum dengan pihak lain.
b) Memberikan bantuan konkrit kepada Postel melalui saluran organisasi.
c) Memberikan pendidikan dalam hubungan kerja dengan Postel.

Digitized by Google

Pengurus Besar KB Postel/BM berada dibawah pimpinan R.K. Hardiwardojo, S.H.

Pada tanggal 23 Mei 1969 telah disahkan susunan Pengurus Besar Baru yang terdiri dari:

Ketua I : Steven Latuihamalo
Ketua II : Oentoeng Soebroto, Bc.A.P.
Ketua III : Ali Oerip
Penulis I : Sindoe Martono
Penulis II : Drs. Soebagio Bc.A.P.
Bendahara : Dana Machrom.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tercantum di lampiran Anggaran Dasar PNI.

Setelah KB Postel/Buruh Marhaenis berdiri, maka menyusul lain-lain organisasi buruh yang berafiliasi kepada partai politik, yaitu: G.B. POSTEL/SARBUMUSI, ORGANISASI BURUH POSTEL/GOBSII, dan KESPEKRI.

3) GABUNGAN BURUH POSTEL/SARBUMUSI

Sebagaian dari karyawan Postel yang beragama Islam pada tanggal 26 Mei 1965 bergabung dalam organisasi buruh yang diberi nama GABUNGAN BURUH POSTEL/ SERIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA disingkat GB POSTEL/SARBUMUSI, yang berinduk pada Partai Politik Nahdhatul Ulama (NU).

Susunan Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari:

Ketua Umum : Abbas Addam Kartadikusumah, Bc.AP.
Ketua I : R. Kamal
Ketua II : Umar Tuasikal, Bc.A.P.
Ketua III : Udju Djuanda
Sekretaris Umum : L. Laksana Hasjim, Bc.A.P.
Sekretaris I : Ateng Firman Natapoera
Sekretaris II : Djuhaeny
Bendahara : I.A. Amir.

Tujuan dari GB POSTEL/SARBUMUSI ialah:

1. Ikut membantu mensukseskan Program Pemerintah,
2. Ikut membina Mental Orde Baru, termasuk mental beragama,
3. Meningkatkan service PN Pos & Giro/Perum Telekomunikasi. *).

Peraturan Rumah Tangga tercantum pada Lampiran Anggaran Dasar Partai N.U.

*) *Gema Telekomunikasi No. 43 Tahun ke-IV, Sisdjabari, halaman 22 - 23.*

Digitized by Google

4) O.B. POSTEL/GOBSII

Sebagian dari karyawan Postel yang beragama Islam pada tanggal 11 Mei 1965 bergerak untuk mendirikan perkumpulan yang diberi nama: Organisasi Buruh Sjarikat Islam Indonesia disingkat OB POSTEL/GOBSII.

Orbur ini berinduk pada parpol: Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII).

Tujuannya ialah: Memperjuangkan nasib dan peri-kehidupan buruh Postel pada khususnya dan semua kaum buruh pada umumnya baik spiritual maupun materiil, sehingga tercapai masyarakat yang ber-Tuhan serta adil dan makmur bebas dari penghisapan dan penindasan dimana semua sumber-sumber ekonomi kekayaan alam serta alat-alat produksi dikuasai oleh Negara dan dipergunakan demi untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945.

Susunan pengurusnya terdiri dari:

Ketua I	: Rachmat Bc.A.P.
Ketua II	: A. Djamhoer
Ketua III	: R. Oesman
Sekretaris Umum	: Soemirat Kartawiria, Bc.A.N.
Sekretaris I	: Suherman Permana
Sekretaris II	: Tamar Insan, Bc.A.N.
Bendahara I	: E. Rukadjat
Bendahara II	: Loekito.

Anggaran Dasar OB POSTEL/GOBSII tercantum pada Lampiran Anggaran Dasar PSII.

5) KESPEKRI

Para karyawan yang beragama Kristen pada bulan Oktober 1965 mendirikan suatu organisasi yang diberi nama Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia dengan nama singkatan KESPEKRI.

Tujuannya ialah agar golongan Kristen di Postel dapat lebih effisien menyumbangkan tenaganya, sesuai dengan kepercayaan yang dianut berdasarkan Al Kitab dan Pancasila sebagai idiologi Negara dan dalam Program-program Pemerintah Republik Indonesia.

KESPEKRI tidak berafiliasi pada salah satu partai politik.

Pengurus Besarnya terdiri dari:

Ketua Umum	: H. Junus BA
Ketua I	: P. Tampubolon
Penulis Umum	: M.A. Pinaria, Bc.A.P.
Penulis I	: Jan Monohutu
Bendahara Umum	: Louw Geo
Bendahara I	: Ibu Doelhadi.

Digitized by Google

6) C.K. VETERAN POSTEL/L.V.R.I.

Para karyawan Postel yang pernah berjuang dalam kesatuan bersenjata atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah dalam mempertahankan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan yang telah tercatat/mendapat surat keputusan dari Kantor Veteran yang ditunjuk oleh Pemerintah, berhimpun dalam suatu organisasi yang diberi nama Corps Karyawan Veteran Postel/LVRI dan dilantik pada tanggal 26 Agustus 1969.

Pimpinan Pusat Corps Karyawan Veteran Postel/LVRI terdiri dari:

Ketua Umum	: Pratomo, Bc.T.T.
Ketua I	: Moh. Oesman
Ketua II	: Soenarjo
Sekretaris Umum	: Liliek Soehadi, Bc.A.P.
Sekretaris I	: Sukardi AAS
Sekretaris II	: Ary Moeljono
Bendahara Umum	: R. Momo Bratakoesoemah
Bendahara I	: R. Soeroso
Bendahara II	: A. Soedarno.

Seperti halnya dengan lain-lain Orbur; juga Corps Karyawan Veteran Postel/ LVRI bertujuan memperjuangkan perbaikan nasib anggota-anggotanya.

7) KOPERASI PEGAWAI PTT/KOPPOS

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para pegawai dan pensiunan PTT, maka pada tanggal 27 September 1949 telah didirikan koperasi simpan pinjam dan konsumsi yang diberi nama Koperasi Pegawai Pos, Telegrap dan Telepon, disingkat: KOPPOS.

Sebelas tahun kemudian yaitu pada tanggal 27 Desember 1961 KOPPOS dimasukkan tingkat Pengawasan, yaitu Hak Badan Hukum No. 3053.

Usaha KOPPOS yang telah dilaksanakan ialah menyediakan keperluan sehari-hari yang berupa: beras, gula, minyak tanah, tekstil, sabun dan sebagainya. Koperasi juga memberi tunjangan kematian (Dana Perlaya).

Susunan Pengurus pada tanggal 21 Pebruari 1960 terdiri dari:

Ketua	: R.O. Natawirija
Wakil Ketua	: Hoedjim
Penulis	: Jasir
Bendahara I	: A. Karsa
Bendahara II	: Rachmat.

Untuk dapat memenuhi keperluan para pegawai lebih baik dan lancar, maka ditiap unit usaha PTT diadakan koperasi lainnya.

Jawatan PTT menunjuk sebagai daerah bekerja KOPPOS Pusat I dan Pusat II (kini Perum Pos dan Giro), sedangkan daerah kerja "Hasrat Maju" ialah Pusat III

Digitized by Google

dan Pusat IV (kini Perum Telekomunikasi).

Tunjangan beras dan gula bagi para karyawan yang semula disalurkan melalui Koperasi, kini diberikan langsung oleh Jawatan melalui Bagian Keuangan dalam bentuk uang.

Minyak tanah sudah dapat dibeli lagi di luar kantor dengan mudah. Tunjangan kematian, bahan pakaian seragam (kini berupa uang) dan tekstil Lebaran kini langsung disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Pegawai.

Dengan demikian daerah usaha koperasi makin lama makin sempit. Namun koperasi masih mempunyai daya tahan untuk berdiri, karena karyawan masih dapat mengambil sabun, tepung hungkue, beras, semir sepatu dan sebagainya dengan membayar habis bulan *).

8) P.O.P.T.T.

Hasrat untuk berolahraga di kalangan pegawai PTT telah ada dan mulai tertampung sejak awal tahun 1950. Wadah yang ada pada waktu itu masih bersifat lokal dan kegiatannya sangat terbatas. Baru pada tahun 1960 terbentuk Persatuan Olah Raga PTT yang disingkat POPTT yang diketuai oleh F. Leiwakabessy. Kelahiran POPTT ini mendapat sambutan di daerah-daerah dengan hangat.

Pada bulan September 1961, setahun setelah kelahirannya, POPTT berhasil menghimpun kekuatan para anggotanya dan dapat menyelenggarakan Pekan Olah Raga I PTT. Bersamaan dengan itu juga diselenggarakan Musyawarah POPTT Pertama yang dihadiri oleh utusan-utusan dari seluruh daerah, kecuali Maluku dan Irian Barat.

Dengan berubahnya status Jawatan PTT menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (P.N. Postel), maka nama POPTT juga mengalami perubahan menjadi: Persatuan Olah Raga dan Kesenian Pos dan Telekomunikasi, disingkat PORKES Postel. Pada waktu itu kesenian sudah mulai mendapat wadah.

Pengurus Porkes Postel terdiri dari:

- Ketua I : Kamal
- Ketua II : R. Oesman
- Penulis : Ary Muljono
- Bendahara I : D. Hidayat
- Bendahara II : Utjup Suparba

Cabang olah raga yang diselenggarakan ialah sepakbola, bulu tangkis, volley, tenis lapangan, ping pong, catur, bridge dan bola sodok.

Rencana untuk mengadakan Por II Postel pada tahun 1964 tidak terlaksana berhubung dengan situasi negara pada waktu itu.

Porkes Postel ini masih tetap utuh meskipun pada tahun 1965 P.N. Postel pecah menjadi dua Perusahaan Negara.

*) *Sisdjabari, Gema Telekomunikasi No. 44 Tahun ke IV, halaman 42.*

Digitized by Google

9) PERKUMPULAN KESENIAN

Para pegawai PTT tidak hanya pandai menjual prangko atau menelpon saja, tetapi diantara mereka banyak pula yang berdarah seni.

Karena itu dalam lingkungan PTT timbul beberapa organisasi seni, ialah:

1) Persatuan Musik PTT (PMPTT)
2) Kesenian Indonesia Warga PTT (KIWPTT)
3) Lingkungan Seni Budaya PTT (Lisba PTT).

Pada bulan Oktober 1960 ada usaha untuk menyatukan ketiga organisasi tersebut, tetapi tidak berhasil.

Baru setelah diadakan musyawarah mulai tanggal 28 April s/d 10 Mei 1962, maka lahirlah suatu organisasi seni tunggal PTT yang diberi nama: Himpunan Pencinta Seni PTT, disingkat HIPSI PTT, hasil fusi dari ketiga organisasi kesenian tersebut diatas.

Berdirinya HIPSI PTT diresmikan oleh Pimpinan Jawatan pada tanggal 9 Juni 1962.

Tujuan organisasi ialah turut berusaha dan membantu mempertinggi mutu seluruh cabang seni, diantaranya:

1) Seni Sastera;
2) Seni Drama;
3) Seni Rupa;
4) Seni Tari;
5) Seni Musik/Suara;
6) Seni Karawitan.

10) IKATAN TEKNISI

Bila untuk bidang Pos Jawatan PTT mempunyai ahli-ahlinya, juga di bidang Telegrap dan Telepon terdapat banyak ahli-ahlinya, yaitu para teknisi.

Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang teknik dan untuk memajukan dan memperkokoh kedudukan, mereka bersatu dalam suatu organisasi yang diberi nama Ikatan Teknisi PTT. *)

*) *Gema Telekomunikasi No. 45 Tahun IV, Halaman 48 - 49.*

Digitized by Google



Bandung, 1961
Para teknisi PTT bergambar bersama. Yang duduk didepan Ir. S. Bratahalim dan memegang anak, Tan Peng Yang. Dibelakangnya dari kiri kekanan: Ir. Ong Tjeng Hoo, Ir. M. Junus, Ir. S. Abdulrachman, Ir. Rollin, Ir. Boedi Santoso, Ir. G. Bahdar Djohan dan Ir. Willy Moenandir M.

Digitized by Google

BAB III
OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN

Digitized by Google

Digitized by Google

bab III
OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN

1. Kegiatan-kegiatan operasional

a. Dinas Pos.

1) Kekuatan Alat Produksi.

Selain tenaga kerja yang berupa pegawai yang telah diuraikan dalam Bab II, Sub Bab 1e, alat-alat produksi yang berupa Kantor Pos, Kantor Pos Tambahan, Kantor Pos Pembantu dan Rumah Pos pada Jawatan PTT (1960), P.N. Postel (1961 - 1964) dan P.N. Pos dan Giro (1965), adalah sebagai berikut:

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Kantor Pos	149	158	163	168	178	182
Kantor Pos Tambahan	54	57	59	60	61	62
Kantor Pos Pembantu	701	706	723	731	752	756
Rumahpos	1220	1239	1242	1290	1331	1357

Pada data tahun 1965 sudah termasuk 5 Kantor Pos, 1 Kantor Pos Tambahan dan 14 Kantor Pos Pembantu di Irian Barat.

Untuk keperluan transportasi intern, setelah P.N. Postel di pecah, maka P.N. Pos dan Giro mempunyai kendaraan-kendaraan bermotor sebagai berikut:

Sedan	15
Jeep	21
Pick Up	61
Stationwagon	23

Digitized by Google

Pick Up	61
Bestelwagen	62
Truk	77
Sepeda Motor	67
Sepeda Kumbang	52
Roda Tiga	7

Di antara 385 kendaraan bermotor yang tersebut di atas, maka yang 63 buah tidak jalan dan 79 lainnya mengalami revisi besar.

1) Perhubungan Pos.

Lancarnya perhubungan pos tergantung kepada lancarnya perhubungan darat, laut dan udara, kalau kiriman pos selalu dapat diangkut oleh alat-alat pengangkutan umum di darat, di laut dan di udara. Meskipun ada Undang-undang tentang wajib angkut pos, namun Undang-undang itu tanpa perlindungan Pemerintah dalam situasi yang memerlukan penertiban, tidak berjalan dengan kewibawaan, sehingga dengan alasan bahwa "allotment" untuk pos terbatas sekali, di kapal tidak tersedia tempat atau kamar pos, pos tidak terangkut. Kapal-kapal datang dan pergi tanpa memberitahukan kedatangannya atau keberangkatannya kepada Kantor Pos setempat dengan akibat pos tertinggal dan tidak terkirim.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pengangkutan pos pada tahun 1959 oleh yang berwajib diambil tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali kelancaran pengangkutan pos. Di antaranya, perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri diharuskan oleh Penguasa Perang Pusat (Peperpu) untuk mengangkut pos dan oleh Menteri Muda Perhubungan Darat dan P.T.T. dimintakan bantuan kepada Peperpu agar Penguasa Perang Daerah (Peperda) mengawasi kewajiban GIA untuk mengangkut semua pos yang diserahkan kepadanya.

Pengangkutan pos dengan kereta api pada tahun 1961 mengalami kesulitan pula, karena mulai tidak aman yang mengakibatkan pencurian kantong pos. Untuk memecahkan masalah ini diadakan pengawalan pos yang diangkut dengan Kereta Api Ekspres Malam, trayek Jakarta-Surabaya mulai 1-8-1961. Begitu pula antara trayek Panjang-Kertapati, sehingga pada akhir 1961 ada 20 trayek dengan pengawalan pos yang menambah pengeluaran.

Pada tahun 1962 "allotment" yang diberikan GIA untuk pengiriman pos tambah menurun. Kalau pada tahun 1957 "allotment" sudah mencapai 35.950 kg untuk satu minggu, pada tahun 1962 berkurang menjadi hanya 14.585 kg untuk satu minggu, sedangkan pos udara yang tersedia 26.339 tiap minggunya.

Dalam tahun 1963 pengangkutan pos dalam negeri mengalami kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Baik kereta api, bis, kapal dan GIA kurang sekali dapat melayani kebutuhan akan angkutan pos antara lain karena kekurangan bahan bakar, sukarnya mendapatkan ban dan "spareparts", gangguan-gangguan alam, kurangnya frekuensi perjalanan kapal laut dan amat sedikitnya "allotment" yang diberikan GIA yang hanya mencapai 40% dari jumlah pos udara yang tersedia.

Digitized by Google

Akibat peristiwa P.R.R.I./Permesta maka perhubungan dan pengangkutan pos ke dan dari Sumatra atau Sulawesi masih belum lancar seperti semula.

Kalau pengangkutan pos di dalam negeri mengalami kesulitan baik di laut maupun di udara, pengangkutan pos dalam perhubungan luar negeri pada umumnya berjalan lancar. Pos merupakan langganan yang disenangi oleh perusahaan-perusahaan pengangkutan luar negeri. Tidak mengherankan bahwa waktu tempuh pos dari Indonesia ke luar negeri lebih pendek daripada waktu tempuh pos pada perhubungan pos tertentu di Indonesia. Lamanya waktu tempuh ini menyebabkan bahwa masa laku weselpos yang sebelumnya selama bulan stor dan dua bulan berikutnya, diubah menjadi selama bulan stor dan lima bulan berikutnya supaya perpanjangan masa laku weselpos mencapai sasarannya kalau weselpos dimintakan perpanjangan masa laku dari suatu tempat yang sulit perhubungannya ke Kantor Pusat P.T.T. di Bandung.

2) Aerogram

Sejak 1947 di luar negeri telah dikenal adanya warkatpos udara yang dinamakan "aerogramme" yang dikenai tarip rendah dan yang merupakan kombinasi porto dan bea udara. Mengingat pengiriman warkatpos udara ini belum dilakukan oleh Indonesia, maka sejak 1 Agustus 1959 pelayanan pengiriman berita dengan aerogramme tersebut mulai dijalankan dalam perhubungan luar negeri oleh Indonesia.

3) Kiriman Tebusan dan weselpos tebusan.

Sejak tanggal 1 Agustus 1959 dibuka dinas surat tercatat tebusan dalam Negeri. Meskipun demikian dalam perhubungan dengan daerah Kepulauan Riau hanya diperkenankan pengiriman surat tercatat tersebut dari luar daerah ke daerah Kepulauan Riau. Uang tebusan atau "rembours" dikirim dengan weselpos tebusan setelah penerima kiriman tercatat membayar harga kiriman tersebut. Dinas ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Dari bulan Agustus sampai akhir Desember 1959, jumlah wesel tebusan yang dikirimkan hanya mencapai Rp.4.265,- yang terdiri dari 9 lembar wesel tebusan. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1965 jumlah wesel tebusan yang dikirim mencapai 3.887 lembar dengan besar uang Rp.10.857.307,47

4) Weselpos luar negeri

Dinas weselpos dalam hubungan luar negeri sejak Perang Dunia ke dua dihentikan. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1960 dinas tersebut dibuka kembali meskipun hanya dalam hubungan yang sangat terbatas, hanya dalam satu jurusan, ialah dari Jepang ke Indonesia, kecuali tempat-tempat di daerah Kepulauan Riau di mana uang dollar Malaya beredar.

5) Weselpos telegrap

Digitized by Google

Di masa kini masih terdapat weselpos telegrap yang pemakaiannya makin lama makin menurun karena makin cepatnya pengiriman weselpos biasa. Di bawah ini dicantumkan data mengenai pemakaian weselpos telegrap.

Tahun	Weselpos yang diterima	Besar uang
1960	3.795	Rp 2.775.267,-
1961	43.000	32.575.000,-
1962	50.155	43.936.460,-
1963	41.644	39.145.350,-
1964	22.164	21.732.500,-
1965	12.760	12.719.650,-

6) Paketpos.

Setelah dihentikannya dinas paketpos dalam negeri antar pulau awal Desember 1957 karena tidak diijinkannya lagi pelayaran KPM di Indonesia dan belum cukupnya armada pelayaran nasional untuk menggantikan tempat yang ditinggalkan KPM, maka sejak itu setapak demi setapak dinas paketpos dibuka kembali antara pulau-pulau yang perhubungan lautnya sudah memperlihatkan kemungkinan.

Dalam tahun 1960 antara lain dibuka kembali pengiriman dan penerimaan paketpos antara kantorpos-kantorpos (pembantu) di Kalimantan Selatan dan di Sumbawa dengan Jawa/Madura-Bali-Lombok-Sumatera Selatan (kecuali daerah Jambi, Bangka dan Belitung) - Kalimantan Barat dan luar negeri.

Berhubung pengangkutan belum begitu lancar dan ruangan di kantor-kantor belum mencukupi, maka tindakan untuk mencegah banyaknya paketpos yang dikirim masih perlu dijalankan dengan pembatasan, sehingga tiap orang (termasuk Jawatan) tiap hari hanya dapat mengirim satu paketpos.

Dinas paketpos udara yang dihentikan sejak tanggal 11-12-1957 belum dapat dibuka kembali karena "allotment" pos yang diberikan oleh GIA masih belum mencukupi.

Paketpos-paketpos untuk negara-negara di Eropa yang biasanya disalurkan melalui Negeri Belanda, sejak pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17-8-1960 disalurkan melalui Singapura, Napoliporto (Italia) dan Chiasso (Swiss).

Selanjutnya dalam perkembangan dinas paketpos ini dapat dicatat bahwa dalam usaha merealisasikan persetujuan antara Pemerintah R.I. dan Pemerintah Demokrasi Korea yang ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal 24-8-1965, khusus mengenai pertukaran paketpos, pada tanggal 5-10-1965 dikirimkan surat kepada Administrasi Pos R.R.C. untuk diminta perantaraannya sebagai Administrasi Transit.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Irian Barat No. 1 tahun 1965 tentang pengeluaran barang-barang bukan dagangan dari Propinsi Irian Barat ke Daerah R.I. lainnya, maka sejak saat itu dengan resmi dibuka hubungan paketpos

Digitized by Google

antara Irian Barat dengan daerah R.I. lainnya.

Sejak 1-6-1965 publik diberi kesempatan untuk mengirimkan paketpos gabungan (bulkpospaket). Selanjutnya untuk mengurangi penumpukan paketpos di Kantorpos tujuan, sejak 29-9-1965 dilakukan antaran paketpos ke rumah penerima dengan pemungutan bea antar.

7) Dinas Giropos

(a) Sumbangan Wajib Istimewa/Kendaraan Bermotor 1962.

Suatu katalisator yang mempercepat pertumbuhan dan perkembangan dinas giropos ialah disalurkannya pembayaran SWI/KBM 1962 melalui dinas tersebut.*) Pada waktu itu Sentral Giro yang telah dibuka baru Sentral Giro A dan Sentral Giro B. Administrasi rekeningkoran dari para Kepala Inspeksi Pajak (Waktu itu masih bernama KIK) untuk penerimaan SWI/KBM 1962 hanya dikerjakan oleh kedua Sentral Giro tersebut. Dari seluruh Kantorpos di Indonesia yang diikutsertakan dalam kegiatan ini datang mengalir pertanggungan penerimaan sumbangan wajib istimewa kendaraan bermotor. Berkat adanya perhubungan telex antara Sentral Giro A dan Sentral Giro B, angka-angka pemasukan SWI/KBM segera dapat disampaikan kepada Direktorat Pajak di Jakarta. Kecepatan dalam pemberian data untuk dapat diproses lebih lanjut ternyata memuaskan. Hal ini tercapai karena adanya perhubungan giropos melalui jaring-jaring cepat pula. Dalam waktu tiga bulan saluran pembayaran ini berhasil menarik uang sebesar 3,6 milyar rupiah, suatu jumlah yang paling sedikit menambah likwiditas perusahaan. Di samping itu penyaluran pembayaran SWI/KBM melalui dinas giropos merupakan propaganda yang baik bagi dinas baru ini sehingga makin dikenal dan dimanfaatkan oleh mereka yang sering berhubungan dengan kantorpos.

(b) Dinas Giropos sebagai Pembantu Kas Negara.

Sementara itu dinas giropos berjalan terus dalam mencari dan mengumpulkan pengalamannya untuk menyempurnakan dirinya untuk menjadi kasir negara. Maka dengan surat keputusannya tanggal 5-8-1964 No.II/1/33/13/PKM Menteri Urusan Pendapatan, Pembayaran dan Pengawasan menimbang:

a. bahwa dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 470 tahun 1961 yang kemudian dipertegas lagi dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.09/Instr tahun 1964 telah ditetapkan, bahwa harus diambil tindakan-tindakan yang bertujuan melaksanakan perubahan-perubahan pembayaran dari sistim lalulintas pembayaran yang bersifat giral;
b. bahwa Inti Kabinet Kerja dalam sidangnya ke-80 pada tanggal 5 September 1961 telah disetujui usul Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pari-

*) *Moeljoto, G.M., Bc.A.P., "Dinas Giropos sebagai Kasir Negara", Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Pos dan Giro, 1977, Halaman 9.*

Digitized by Google

wisata, untuk menggunakan jasa-jasa Dinas Rekening Pos dan Dinas Giro dan Cek Pos pada P.N. Postel dalam melaksanakan keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut.

c. bahwa mengingat akan pengalaman-pengalaman serta jumlah kantorpos-kantorpos yang sudah sejak lama melakukan pekerjaan Kas Negara, ditambah pula dengan hasil-hasil yang dicapai dalam penyelesaian beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran menurut sistim giral melalui Dinas Giro dan Cek Pos dimaksud yang telah dimulai sejak tahun 1962, penggunaan jasa-jasa instansi tersebut dalam Keputusan Presiden R.I. dimaksud adalah beralasan.

Memperhatikan hasil Rapat Kerja ke-IV Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara di Lembang tentang penyempurnaan organisasi dan tata-kerja Direktorat, antara lain yang mengenai pelaksanaan perubahan pembayaran-pembayaran yang bersifat kartal menjadi lalulintas pembayaran yang bersifat giral, Menteri Urusan P3 memutuskan mencabut semua peraturan dan instruksi yang bertentangan dengan keputusan ini serta menetapkan penyaluran semua penerimaan dan pengeluaran negara melalui dinas Giro dan Cekpos pada P.N. Postel yang pelaksanaannya dilakukan tahap demi tahap menurut keadaan dan kemampuan masing-masing daerah.

Selanjutnya dengan surat keputusannya tanggal 4-11-1964 No.II/1/1/14/17/PKN Menteri Urusan P3 menetapkan instruksi tentang tatakerja dan prosedure sistim lalulintas pembayaran giral melalui giropos pada P.N. Postel yang dilaksanakan oleh Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara dan Kas Negara dengan surat keputusannya tanggal 22-12-1964 No.II/1/1/32/23/PKN.

Untuk melaksanakan proyek perbendaharaan dan Kas Negara yang dimaksud pihak Dinas Giro dan Cekpos turut menghadiri rapat kerja ke-IV Direktorat Perbendaharaan Negara dan Kas Negara seluruh Indonesia tahun 1964 di Lembang yang berlangsung dari tanggal 15 s/d 22 bulan lima 1964 dan di Cikopo Bogor tanggal 6-6-1965.

Seperti telah dijelaskan diatas, penyaluran penerimaan dan pengeluaran uang negara melalui dinas giro dilaksanakan tahap demi tahap. Maka dengan surat keputusan Menteri P3 tanggal 5-8-1964 No.II/1/1/33/10/PKN ditetapkan tentang penyaluran penerimaan dan pengeluaran uang negara di Surabaya seluruhnya melalui dinas giro sebagai pilot proyect yang mulai berjalan sejak tanggal 26-5-1963.

Kemudian menyusul lingkungan daerah pembayaran Kantor Pusat Perbendaharaan Bandung sebagai pilot proyek ke-dua sejak 1-10-1964, mulai tanggal 1-1-1965 menyusul daerah pembayaran Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang, Yogyakarta dan seluruh Jawa Tengah, sehingga mulai 1-1-1965 segala lalulintas pembayaran sektor pemerintah diseluruh Jawa Tengah telah dilakukan melalui Dinas Giro. Bagi daerah-daerah diluar Jawa dan Madura pengalihan pekerjaan Kas Negara melalui Dinas Giro dimulai tanggal 1 April 1965.

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Urusan P3 tanggal 5-8-1964 No. II/1/1/33/13/PKN tentang penyaluran semua penerimaan dan pengeluaran uang negara melalui Dinas Giro dan Cekpos, maka telah diperoleh landasan bagi bentuk organisasi dan tatakerja bagi Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara dikemudi-

Digitized by Google

an hari, sehingga tidak ada keragu-raguan lagi mengenai saluran-saluran yang akan dipergunakan dalam melaksanakan Keputusan Presiden No.470/1960.

(c) Perkembangan selanjutnya.

Setelah Sentral Giro A di Jakarta dibuka pada tanggal 23 Nopember 1961, maka untuk memencarkan administrasi rekening koran para nasabah giropos, maka dibukalah berturut-turut:
(a) Sentral Giro B di Surabaya pada tanggal 20 Juli 1962.
(b) Sentral Giro C di Ujungpandang pada tanggal 17-12-1962.
(c) Sentral Giro D di Medan pada tanggal 14-11-1966.
(d) Sentral Giro E di Bandung pada tanggal 1 Maret 1966.

Pembukaan Sentral-sentral Giro baru ini terutama dimaksud untuk mendekatkan administrasi rekening koran dengan nasabah giropos yang terbesar ialah Kantor Pusat Perbendaharaan Negara/Urusan Kas Negara. Di mana ada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara/Urusan Kas Negara, maka di kota itu akan didirikan Sentral Giro untuk mempercepat administrasi rekening induk Kas Negara dan sub-sub rekeningnya yang dipergunakan untuk melakukan penerimaan pendapatan Negara. Setelah saldo sub rekening ini dipindahkan ke rekening induk, barulah pendapatan Negara itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran surat perintah membayar uang (s.p.m.u.) untuk pembiayaan pengeluaran negara.

Mula-mula pemindahbukuan saldo sub-sub rekening dilakukan pada akhir bulan kepada rekening induknya. Setelah situasi likuiditas perusahaan dan perhubungan pos bertambah baik, pemindahbukuan secara periodik atau berkala tersebut dipercepat tiap hari, sehingga Dinas Giropos harus pandai-pandai mengatur likuiditas kantor-kantor pembayarnya. Meskipun demikian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara mempunyai kebijaksanaan untuk menyetujui Dinas Giropos menahan saldo rekening Kas Negara sebesar 1½ kali dari jumlah pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ketentuan ini diadakan karena pelaksanaan dislokasi uang untuk memelihara likuiditas kantor-kantor tidak mudah, sedangkan tujuan Dinas Giropos pada hakekatnya ialah pembayaran secara giral atau tanpa tunai. Ketika itu para bendaharawan arta karya dan rekanan-rekanannya diwajibkan membuka rekening giropos. Namun demikian, para nasabah giropos itu pada umumnya hanya menyisakan sedikit pada saldo rekeningnya karena Dinas Giropos tidak memberi jasa giro.

Untuk mempercepat penguangan cekpos yang ditarik oleh para Bendaharawan Arta Karya, maka kepada para nasabah ini diijinkan penguangan cekposnya tanpa didebitir lebih dahulu oleh Sentral Giro di mana rekeningnya terdaftar.

Dengan dibukanya Sentral Giro E di Bandung, maka Dinas Rekening Pos yang administrasi rekeningnya dikerjakan oleh Kepala Bagian Uang Pos/Urusan Gup-3 di Kantor Pusat P.N. Pos dan Giro, untuk menghindari duplikasi, akhirnya ditutup. Untuk keperluan transaksi keuangan Kantor Pusat P.N. Postel di buka beberapa

Digitized by Google

rekening giropos di Sentral Giro E Bandung.

Jumlah nasabah giropos pada akhir tahun 1965 mencapai 18.000 dengan saldo rekening koran sebesar Rp.105.000.000.000,- Meskipun pendapatan Dinas Giropos hanya sebesar Rp.150.000.000,-, tak dapat diungkiri bahwa Dinas Giropos merupakan pembantu utama untuk menjaga likuiditas P.N. Postel.

8) Bank Tabungan Negara

Sampai pertengahan tahun 1963 Bank Tabungan Pos dibawahkan Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata. Ketika itu Menteri yang mengurusi bidang perbankan ialah Menteri Urusan Bank Sentral. Mengingat fungsi Bank Tabungan Pos sebagai lembaga keuangan, maka pada tanggal 22 Juni 1963 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 1963 tentang "Perubahan dan Tambahan Undang-undang No.36 Tahun 1963 tentang Bank Tabungan Pos" (L.N. No. 86 Tahun 1963) yang mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963. Dalam Perpu No. 4/1963 tersebut antara lain ditetapkan bahwa Bank Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan Negara yang statusnya dipindahkan dari Bidang Distribusi di bawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata, ke dalam Bidang Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Perpu No.4/1963 pada tanggal 24 April 1964 dijadikan Undang-undang No.2 Tahun 1964. Dalam perkembangan selanjutnya dengan Penetapan Presiden No. 8 dan No.17 Tahun 1965 (L.N. Tahun 1965 No.45 dan No.74) serta Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 30 Juli 1965 No. Kep. 65/UBS/65, mulai tanggal 17 Agustus 1965, Bank Tabungan Negara diubah menjadi Bank Negara Unit V dalam rangka pengintegrasian Bank-bank Pemerintah.

Data mengenai Bank Tabungan Pos, Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Unit V selama masa ini ada baiknya dicantumkan di bawah ini.

B.T.P.	Tahun	Penabungan	Pembayaran Kembali
	1960	Rp 487.000.000,-	Rp 242.000.000,-
	1961	528.000.000,-	292.000.000,-
	1962	925.621.348,13	340.192.854,25
B.T.N.	1963	1.096.994.036,04	403.462.712,40
	1964	1.484.485.931,52	624.802.902,90
B.N.I. UNIT V	1965	8.040.357.293,44	677.874.300,82

*) *Moeljoto, G.M., Bc.A.P., "Dari Tabungan Pos sampai Tabungan Pembangunan Nasional", Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Pos dan Giro, 1977, Hal. 11.*

Digitized by Google

Dari data yang nampak di atas, yang menarik ialah bahwa tambahan saldo tabungan yang dapat dihimpun melalui Kantorpos-kantorpos dalam tahun 1965 melonjak sekali hingga mencapai Rp.7.362.482.992,62 yang menunjukkan bahwa rasa suka menabung meningkat justru ketika inflasi tambah melaju.

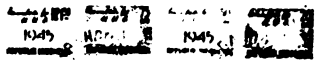
9) Prangko.

Dari tahun 1959 - 1965 di keluarkan prangko biasa, prangko peringatan, prangko istimewa dan prangko amal.

Untuk memperingati Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, dikeluarkanlah pada tanggal 17-8-1959 prangko peringatan "Berlakunya Kembali UUD 1945". Prangko tersebut terdiri dari empat buah dengan harga 20 sen, 50 sen, 75 sen. Sampul Hari Pertama diterbitkan dengan harga Rp.7,50.







Pada tanggal 26-10-1959 diterbitkan prangko peringatan seri Konperensi Kolombo ke II berhubung diadakannya Konperensi Rencana Kolombo ke II di Yogyakarta. Prangko ini terdiri dari lima buah dengan harga 15 sen, 20 sen, 50 sen, 75 sen dan 115 sen. Sampul Hari Pertama dikeluarkan dengan harga Rp.7,50.

Dalam tahun 1960 dikeluarkan prangko-prangko peringatan seri "Kongres Pemuda Seluruh Indonesia", seri "Tahun Pengungsi Sedunia", seri Hari Kesehatan Sedunia. "Pembasmian Malaria" dan prangko amal seri "Hari Sosial". Di samping itu dikeluarkan prangko biasa seri "Presiden" dan seri "Hasil Bumi".

Bertalian dengan Asean Games ke IV di Jakarta dari tanggal 22 Agustus 1962 s/d tanggal 6 September 1962, dikeluarkan 5 seri prangko Asian Games, berturut-turut pada tanggal 24 Maret 1962, 24 Mei 1962, 24 Juni 1962, 24 Juli 1962 dan 24 Agustus 1962. Bersamaan dengan pengeluaran prangko-prangko tersebut, pada hari-hari itu dikeluarkan pula Sampul Hari Pertama dan pada pembukaan Asian Games pada tanggal 24 Agustus 1962 dikeluarkan pula Carnet yang berisikan kelima seri prangko Asian Games.

Prangko Asian Games beserta carnetnya mendapat sambutan yang baik sekali dari kalangan pengumpul prangko, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Betapa besarnya perhatian pengunjung kepada prangko-prangko yang disediakan di Kantor Pos di komplek Asian Games selama Pesta Olah Raga itu, nampak pada banyaknya prangko Asian Games yang terjual bersama prangko-prangko seri Pah-

Digitized by Google

lawan, seri Ajunan Tjangkul Pertama, seri Monumen Nasional dan sebagainya. Penjualan prangko-prangko tersebut menghasilkan pendapatan lebih dari Rp. 6.600.000,-

Dalam tahun 1963 dikeluarkan 14 seri prangko baru yaitu 3 seri prangko peringatan, di antaranya seri Ganefo I, 5 seri prangko istimewa, 3 seri prangko amal antara lain seri "Bencana Alam Nasional 1963" dan prangko-prangko untuk Irian Barat yang terdiri dari seri TRIKORA dan seri BENDERA MERAH PUTIH DARI SABANG MERAUKE.

Dalam tahun 1964 dikeluarkan prangko-prangko seri Presiden, Transport dan Komunikasi dan New York World's Fair.

Akhirnya dalam tahun 1965 dikeluarkan prangko-prangko seri Hari Sosial ke VII, Pemberantasan Penyakit Kanker., K.I.A.A. dan Conefo.

Selama Masa Demokrasi Terpimpin ini Jawatan PTT, P.N. Postel dan P.N. Pos dan Giro yang mempunyai fungsi sosial dalam pengumpulan dana bagi badan-badan sosial memberikan hasil bersih dari harga tambahan prangko-prangko amal kepada badan-badan sosial yang tersebut di bawah ini:

(a) Ikatan Cacad Veteran Indonesia di Jakarta.
(b) Kerjasama Panti Asuhan di Jakarta.
(c) Yatim Piatu Angkatan Perang di Jakarta.
(d) Yatim Piatu Muhamadiyah di Kutaraja.
(e) Badan Penasehat Perkawinan Jawa Barat di Bandung.
(f) Ikatan Pandu Indonesia.
(g) Panitia Dana Sosial di Jakarta.
(h) Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Solo.

Dengan mencantumkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam negeri atau di luar negeri, maka prangko Indonesia mengabadikan peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Bukan hanya itu. Prangko Indonesia menjadi saksi-saksi sejarah, menjadi duta-duta bangsa Indonesia yang tersebar untuk menyebar-luaskan berita tentang apa yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain.

b. Dinas Telekomunikasi.

1) Perhubungan Telegrap.

Dalam tahun 1960 perhubungan telegrap masih belum berjalan dengan lancar karena masih adanya pelbagai hambatan, antara lain: kerusakan pada pesawat dan kawat, pencurian kawat, gangguan udara, kekurangan bensin untuk menjalankan agregat, gangguan keamanan dan lain-lainnya, sehingga masih ada telegram-telegram yang terpaksa harus diteruskan dengan pos (udara).

Dalam tahun 1960 dibuka untuk umum 2 Kantor Telegrap/Pembantu baru, sehingga jumlah Kantor Telegrap menjadi 623.

Dari 57 Kantor Telegrap yang ditutup karena pemberontakan-pemberontakan di Sumatera dan di Sulawesi, dibuka kembali 25 Kantor Telegrap.

Dalam tahun 1961 dibuka perhubungan telegrap aluran sewa (leased channel) untuk maskapai penerbangan asing Pan American Airways antara Jakarta dan Hongkong pada tanggal 1 Januari 1961, untuk Scandinavian Air System antara

Digitized by Google

Jakarta dan Manila pada tanggal 1 Nopember 1961 dan untuk B.P.M. antara Jakarta dan Balikpapan.

Untuk keperluan operasi telegrap selesai dikerjakan dan dibuka untuk pelayanan:
- 18 Hubungan printer dalam negeri melalui V.F.T.
- 3 Hubungan printer dalam negeri melalui saluran.
- 3 Hubungan printer luar negeri.
- 11 buah teleprinter exchange dengan kapasitas 360 sambungan.

Sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pimpinan Perusahaan, maka dalam tahun 1962 beberapa Kantor Telegrap dipindahkan ke Dinas Telekomunikasi dari Dinas Pos. Kantor-kantor tersebut ialah Kantor-kantor Telegrap Makassar, Magelang, Malang, Solo, Tanjungpriok, Jakarta/Pasarbaru dan Kebayoran-Baru.

Jumlah Kantor Telegrap pada akhir tahun 1962 adalah 653 buah.

Dalam tahun 1962 jumlah aluran sewa bertambah dengan 4 buah, yaitu untuk Garuda Indonesia Airways mulai 1-6-1962, untuk Departemen Luar Negeri antara Jakarta dan Singapore mulai 1-7-1962, untuk Qantas antara Jakarta dan Hongkong mulai 1-7-1962, dan untuk Japan Air Lines antara Jakarta dan Singapore mulai 1-9-1962.

Perubahan-perubahan diadakan dalam perhubungan telegrap yang mempergunakan morse ke TOR atau MUX. Antara Kantor Perhubungan Sentral Telegrap Jakarta Dtx dan Tanjungpinang dengan TOR, antara Jakarta Dtx dan Banjarmasin dengan TOR, antara Jakarta Dtx dan Manila dengan MUX dan antara Jakarta Dtx dan Osaka dengan MUX.

Dalam tahun 1963 dipindahkan dari Dinas Pos ke Dinas Telekomunikasi Kantor-kantor Telegrap Jakarta Dtx, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Medan, Denpasar, Banjarmasin, Palembang dan Amboina.

Penumpukan (congestie) di bidang perhubungan disebabkan karena kesukaran teknis dan personil, sehingga masih banyak telegram terpaksa dikirim dengan pos (udara). Di samping hambatan tersebut, di daerah-daerah terpencil pemberian persediaan bahan bakar untuk motor pembangkit listrik sukar sekali pelaksanaannya.

Jumlah Kantor Telegrap pada akhir tahun 1963 ialah 664.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Dinas Telegrap tahun 1964 ialah masih tidak tersedianya spareparts, media yang tidak begitu memuaskan dan pula tidak adanya "uitwijkavond/nachtfrequentie". Kelambatan-kelambatan yang masih terjadi merupakan akibat dari kurangnya kemampuan media tersebut.

Dalam rangka "Aksi Meningkatkan Service" diadakan pilot project di pulau Jawa, yakni antara Kantor-kantor Telegrap Jakarta Dtx - Bandung - Yogyakarta - Surabaya. Bila pencurian kawat tidak terjadi, maka kemajuan dari hasil pilot proyek tersebut akan terasa. Ketika itu kekurangan akan operator telegrap sangat dirasakan. Malahan banyak yang minta berhenti atau pulang ke daerahnya disebabkan kesulitan perumahan atau penghidupan yang pada gilirannya disebabkan karena gaji yang rendah nilainya. Padahal jumlah langganan telex dari tahun ke tahun meningkat. Sebaliknya penyewa atau pemakai "leased channel" tidak bertambah.

Meskipun banyak hambatan yang dihadapi, kegiatan operasional di bidang telegrap berjalan terus. Untuk mengimbangi kemajuan teknik dapat diselesaikan dan dioperasikan:

(a) perhubungan telex komersial melalui TOR V antara Jakarta-Bandaaceh.

Digitized by Google

(b) perhubungan telegrap komersial melalui sistem MUX/ARQ antara Jakarta-Karachi.
(c) Perluasan telex Jakarta, Semarang dan Surabaya, masing-masing dengan 20 nomor.

2) Transmisi.

(a) Realisasi dalam tahun 1960.

Selama tahun 1960 terdapat kegiatan penambahan aluran telepon (telephony channel) yang meliputi penyelesaian hubungan dengan 55 aluran dengan jarak 16.350 aluran km yang terdiri dari:
(1) Di Jawa : 6 hubungan dengan 39 aluran dan jarak 11.000 aluran km.
(2) Di Sumatera : 1 hubungan dengan 12 aluran dan jarak 4700 aluran km.
(3) Di Sulawesi : 1 hubungan dengan 4 aluran dan jarak 650 aluran km.

(b) Realisasi dalam tahun 1961.

Dalam tahun 1961 dapat diselesaikan:
(1) 3 Hubungan Transmisi Saluran di Jawa yang meliputi 7 saluran dengan 1300 alur km.
(2) 1 Hubungan V.H.F. dengan perobahan sistem dropping Bandung-Tangkuban-prahu-Jakarta-Cirebon.

(c) Realisasi dalam tahun 1962.

Dalam tahun ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan:
(1) Seluruh "Extended Long Distance Project" Jawa Timur-Bali yang meliputi penambahan aluran telepon untuk hubungan interlokal dan yang terbentang dari Surabaya hingga Singaraja melalui Denpasar yang terdiri dari:
- Hubungan Surabaya-Jember (12 aluran/2376 aluran km).
- Hubungan Jember-Banyuwangi (9 aluran/945 aluran km).
- Hubungan Banyuwangi-Negara-Denpasar (12 aluran/765 aluran km).
- Hubungan Denpasar-Singaraja (9 aluran/612 aluran km).
- Hubungan Surabaya-Madiun (3 aluran/622 aluran km).

(2) Penambahan aluran dalam hubungan-hubungan radio antara:
- Intel-Dayeuhkolot (12 aluran).
- Bandung-Majalaya (4 aluran).
- Bandung-Garut (1 aluran).
- Denpasar-Tampaksiring (4 aluran).

Seluruh aluran yang tersebut di atas berjumlah 444 aluran km.

(3) Pemasangan dan penggunaan hubungan-hubungan radio sinar antara:
- Bandung-Jakarta (60 aluran/648 aluran km).
- Gambir-Pancardaya (12 aluran/216 aluran km).
- Gambir-Margawarta (12 aluran/240 aluran km).
- Banyuwangi-Denpasar (12 aluran/372 aluran km).

Digitized by Google

(4) Pemindahan stasion pemancar Lamtaumeum dan stasion penerima Kutaraja ke stasion-stasion baru Kutaraja.

(5) Pembendelan dan perluasan hubungan radio di Maluku Utara antara Ambon-Ternate-Mahai-Tual dengan penambahan pesawat-pesawat dan penerima.

(6) Pemasangan 2 saluran kawat rangkap dengan syarat-syarat yang berat, sepanjang 150 km antara Jakarta dan stasion radio Anyerkidul untuk hubungan interlokal Jakarta-Palembang.

(7) Pelaksanaan pemasangan hubungan radio sinar Anyerkidul-Bukit Bunut dengan aluran permulaan sebanyak 12.

(d) Realisasi dalam tahun 1963.

Dalam tahun ini selesai dilaksanakan pemasangan dan pemindahan pesawat gelombang pembawa antara:
(1) Surabaya - Madiun sebagai realisasi pemindahan dari Surabaya - Banyuwangi.
(2) Tanjungkarang - Palembang sebagai realisasi pemindahan dari Denpasar - Singaraja.
(3) Yogyakarta - Solo sebagai realisasi pemindahan dari Jakarta - Bandung. Ketiga saluran ini mempergunakan "Three Channel System".
(4) Surabaya - Mojokerto yang mempergunakan "Four Channel System"
(5) Serang - Jakarta.
(6) Serang - Cilegon.

Kedua saluran terakhir ini mempergunakan "Single Channel System" dan dipersiapkan untuk Pabrik Baja Trikora.
Jumlah jarak enam saluran yang dimaksud di atas meliputi 2000 aluran km.

Di samping Transmisi/Saluran, maka untuk Transmisi/Radio dipasang:
(1) "Two Channel System" antara Cilacap - Nusakambangan untuk mengganti kabel laut. Cadangan pesawat T 1498.
(2) "Single Channel System" antara Surabaya - Bangkalan sebagai "stand by equipment" untuk "Three Channel System FM 3/300".
(3) "Twenty Four Channel System" jenis Mitsubishi antara Bandung-Rancaekek dan antara Bandung-Dayeuhkolot, yang digunakan untuk saluran modulasi dari Intel ke Stasion Radio Pemancar Dayeuhkolot dan Stasion Radio Penerima Rancaekek.
(4) Proyek Micro Wave Jawa Bali.

Untuk melaksanakan proyek ini, pada tanggal 15 Juni 1963 dikeluarkan undangan lelang yang diikuti oleh kurang lebih 30 rekanan. Pada tanggal 14 September 1963 penawaran yang masuk ada 6. Sistem yang dipilih ialah sistem N.E.C.

Digitized by Google

(e) Realisasi dalam tahun 1964.

(1) Pemindahan Kantor Telepon Gambir.

Dalam rangka pemindahan Kantor Telepon Gambir dari lapangan Gambir yang akan menjadi lapangan Monas, selesai dipindahkan atau diperluas:

(a) Dinas Teknik Intel dengan penambahan terminal radio hingga 18 buah (18 aluran).
(b) Hubungan radio sinar Jakarta-Bandung dengan 60 aluran yang dapat diperluas menjadi 120 aluran dan yang mempergunakan sistem Siemens FM 120/300.
(c) Hubungan radio sinar Jakarta Intel ke stasion-stasion radio Margawarta dan Pancardaya di Jakarta, masing-masing dengan 12 saluran.
(d) Hubungan carrier Jakarta-Semarang dengan 12 aluran.
(e) Saluran modulasi dengan kabel yang ditambah hingga 60 aluran.

(2) Saluran modulasi dari Intel Bandung ke Dayeuhkolot dan Rancaekek.

Ditambah dengan memasang hubungan radio sinar, masing-masing dengan 24 aluran.

(3) Pembangunan hubungan radio sinar Jawa-Sumatera.

Jalan Bukit Bunut selesai dibangun, sedangkan pembangunan Menara Puncak dalam pelaksanaan.

(4) Perkembangan Proyek Micro-Wave Jawa-Bali.

(a) Kontrak ditanda tangani dalam bulan Pebruari 1964.
(b) Approval dari Pemerintah Jepang diperoleh dalam bulan Agustus 1964.
(c) Site survey dengan optical test dalam pelaksanaan.
(d) Rute diubah dan atau dipermudah.
(e) Pembangunan Menara Puncak selesai 90%.

3) Telepon Radio.

Pada akhir tahun 1959 dibuka untuk umum perhubungan telepon radio sebanyak 111 perhubungan untuk lalu-lintas dalam Negeri. Untuk perhubungan internasional dibuka 10 perhubungan langsung dan 28 perhubungan transito.

Pada akhir tahun 1960 tersedia untuk umum perhubungan telepon radio sebanyak 124 untuk lalu-lintas dalam negeri dan untuk perhubungan internasional 9 perhubungan langsung dan 30 perhubungan transito. Stasion radio yang menyelenggarakan 124 perhubungan berjumlah 73, termasuk 41 stasion radio Pamongpraja yang menyelenggarakan 41 perhubungan untuk Pamongpraja.

Dalam perhubungan radio dengan luar negeri terdapat perhubungan dengan Arab Saudi melalui perhubungan Bandung-Bern. Sebagai akibat pemutusan hu-

Digitized by Google

bungan diplomatik dengan Belanda, perhubungan telepon radio langsung Amsterdam-Bandung diputuskan sejak 17 Nopember 1960. Perhubungan telepon radio antara Indonesia dan Belanda sejak itu disalurkan melalui perhubungan Bandung-Bern.

Perhubungan dengan Amerika Serikat diperluas hingga Hawaii, Puerto Rico dan the Virgin Island.

Selama tahun 1961 dibuka 18 perhubungan baru, sehingga pada akhir tahun 1961 tersedia untuk umum 144 perhubungan telepon radio untuk lalu-lintas dalam negeri. Dengan dibukanya perhubungan internasional langsung dengan Rusia dan Pakistan, dan perhubungan transito melalui perhubungan Bandung-Tokio dengan Birma dan Kamboja, serta perhubungan langsung Tanjung Uban-Singapore, maka untuk perhubungan internasional pada akhir tahun 1961 tersedia bagi umum 13 perhubungan telepon radio langsung dan 32 perhubungan transito. Jumlah stasion radio yang menyelenggarakan perhubungan ini ada 226. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pemeliharaan lapangan radio dalam tahun 1961 mengalami berbagai kesulitan, terutama untuk mendapatkan bahan bakar bagi berbagai stasion radio di seluruh wilayah Maluku, Irian Barat dan Nusa Tenggara yang mengalami kesulitan pula dalam pengangkutannya.

Mulai 1-8-1962 dibuka perhubungan telepon radio dalam negeri antara Padang dan Muarasikabaluan. Di samping itu diadakan perluasan jam kerja pada beberapa perhubungan lainnya.

Dalam perhubungan telepon radio antar negara dalam tahun 1962 dibuka perhubungan langsung Medan-Singapore dan perhubungan Indonesia-Mesir melalui Bern. Perluasan jam kerja diadakan pula pada beberapa perhubungan lainnya.

Untuk memperluas fasilitas percakapan diadakan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

(a) Dengan Kokusai Denshin Denwa (KKD) di Tokio dan dengan RCA di Manila dicapai persetujuan untuk menentukan perhubungan telepon Bandung-Tokio sebagai "alternate route" untuk perhubungan telepon antara Indonesia dan Filipina.
(b) Dengan PTT Swiss dan American Telephone and Telegraph Co di New York, tentang penggunaan perhubungan langsung Bandung-Bern sebagai "alternate route" untuk perhubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
(c) Dengan KDD di Tokio, mengenai penggunaan perhubungan telepon langsung Bandung-Tokio sebagai "alternate route" untuk perhubungan antara Indonesia dan beberapa negara Eropa, demikian pula antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Untuk perhubungan telepon radio antar negara pada akhir tahun 1962 tersedia bagi umum 14 perhubungan langsung dan 33 perhubungan transito.

Stasion radio baru yang dibuka dalam tahun 1962 hanya 2 buah, yaitu: Melakoni di Pulau Enggano pada tanggal 20-7-1962 dan Muarasikabaluan di Kepulauan Mentawai pada tanggal 1-8-1962. Jumlah stasion radio pada akhir 1962 menjadi 224.

Pembangunan atau perluasan stasion radio dalam tahun ini sementara dihentikan

Digitized by Google

karena adanya persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan dengan segera untuk keperluan TRIKORA. Untuk keperluan tersebut dikirimkan alat-alat telekomunikasi radio yang meliputi 8 buah pesawat pemancar dari 60 Watt, 24 buah pesawat penerima dari berbagai merek atau type, 4 buah Agregat Diesel dari 3 sampai 30 KVA dan bermacam-macam alat perlengkapan lainnya. Kembali kegiatan operasional telekomunikasi disesuaikan dengan keadaan Negara dalam persiapan perang.

Setelah Irian Barat kembali bernaung di bawah kekuasaan R.I. dan pertumbuhan situasi menuju normalisasi hubungan-hubungan dengan Belanda, pada tanggal 27 Mei 1963 dibuka kembali perhubungan telepon radio dengan Belanda melalui Bern sebagai langkah pertama. Langkah selanjutnya diadakan pembukaan kembali perhubungan Bandung-Amsterdam. Lalu-lintas telepon dengan Eropa semenjak itu disalurkan melalui 2 perhubungan langsung, ialah Bandung-Bern dan Bandung-Amsterdam.

Menjelang penyerahan kembali kekuasaan atas Irian Barat oleh PBB kepada R.I. pada tanggal 1 Mei 1963, maka mulai 29 April 1963 daerah Irian Barat diikutsertakan dalam lalu-lintas telepon antar negara melalui Bandung.

Dalam rangka untuk menaikkan nilai perhubungan radio dalam tahun 1964, di Jakarta siap dipasang 9 buah pemancar Kokusai ISB KW untuk hubungan TOR, Telex dan Telepon dengan Bandaaceh, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar dan Amboina. Di tempat-tempat itu sudah dipasang pula pemancar-pemancar yang serupa di samping pemancar-pemancar yang sudah ada buatan RCA 20 KW, MBLE 5 KW dan Callins 3 KW. Pada umumnya 3 jenis perhubungan itu dapat dijalankan dengan cukup baik, kecuali hubungan telex antara Jakarta dan Bandaaceh, Pakanbaru, Tanjungpinang dan Pontianak. Atas dasar "crash program" di ibukota-ibukota Propinsi yang dipandang perlu, akan ditempatkan pula pesawat-pesawat pemancar NEC ISB 10 KW 6 buah, pesawat penerima NEC FSK 6 buah dan aparat Vodas 19 buah yang disusul dengan perlengkapan-perlengkapan lainnya.

Di samping perhubungan telepon radio, pada bulan Maret 1964 diadakan perluasan hubungan antara lain Bandung-Samarinda dengan morse/telepon radio, antara Jakarta-Manado dengan telepon radio.

Perhubungan luar negeri antara Jakarta-Karachi yang semula dilakukan dengan morse, ditingkatkan dengan Mux.

Dengan dibukanya kembali perhubungan telepon langsung antara Bandung dan Amsterdam pada tanggal 17-1-1964, maka pada akhir tahun 1964 tersedia bagi umum perhubungan telepon radio dengan 39 negara.

4) Telepon/Otomat.

Dalam rangka otomatisasi telepon selama Masa Demokrasi Terpimpin dibuka Sentral Telepon Otomat. Sentral-sentral Telepon yang waktu Masa Perang Kemerdekaan dibumi-hanguskan diganti dengan Sentral Telepon Otomat. Namun di samping modernisasi Sentral-sentral Telepon, di beberapa tempat masih dibuka dan dioperasikan Sentral-sentral Telepon biasa.

Digitized by Google

Di bawah ini berturut-turut dicantumkan pembukaan Sentral-sentral Telepon Otomat dan yang biasa.

(a) Pada tanggal 8 Agustus 1959 dibuka Sentral Telepon Otomat di Malang dengan kapasitas permulaan 4.000 nomor.

(b) Pada tanggal 21 April 1960 dibuka Sentral Otomat Jakarta Kota dengan kapasitas permulaan 4.000 nomor dan Sentral Telepon Otomat Tanjungpriok dengan kapasitas permulaan 1.000 nomor.

(c) Dalam tahun 1961 dibuka kembali Sentral-sentral Telepon Seuleumeun, Indrapura, Kotanopan, Merbau, Lubuksikaping, Sungaidareh dan Tondano yang sejak awal tahun 1958 terpaksa ditutup akibat pergolakan daerah-daerah. Di samping itu sebagai jawaban PTT kepada komando Presiden Soekarno untuk memulai pelaksanaan Pembangungan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama, dilakukan pembukaan beberapa Kantor Telepon Otomat yang dimuat dalam Bab III, Sub Bab 2 di belakang.

Dengan dibukanya Kantor-kantor Telepon baru ini maka jumlah Kantor-kantor Telepon pada akhir tahun 1961 ada 436.

Penambahan pos-pos telepon dalam tahun 1961 ada 4340 sehingga jumlah pos-pos telepon seluruhnya meliputi 114.946 hubungan yang terdiri dari 78.789 hubungan induk, 35.855 hubungan cabang dan 302 hubungan swasta.

Jumlah T.R.O. yang dipergunakan di seluruh Indonesia dalam tahun 1961 tercatat 241 buah, diantaranya 94 buah milik PTT dan 147 buah milik Swasta, sedangkan jumlah perlengkapan T.R.T.O. (Telepon Rumah Tidak Otomat) adalah 1.320 buah, yakni 1.172 buah milik PTT dan 148 buah milik Swasta.

(d) Dalam tahun 1962 dibuka 6 Kantor Telepon Cabang baru. Di samping itu dibuka 10 Kantor Telepon Induk termasuk di antaranya Kantor-kantor Telepon yang ditutup karena pergolakan daerah.

Jumlah Kantor Telepon pada akhir tahun 1962 ialah 437 buah yang terdiri dari 199 Kantor Telepon Induk dan 238 Kantor Telepon Cabang/Sentral Pembantu.

Pada tanggal 1 Juli 1962 dibuka Sentral Telepon Otomat pada Kantor Telepon Gambir dengan kapasitas 2.000 nomor dan Kantor Telepon Otomat di Kutaraja dengan kapasitas 600 nomor.

Pada tanggal 6-8-1962 dibuka Sentral Telepon Otomat Bandung Utara untuk perluasan dan pada tanggal 27-9-1962 dibuka Sental Otomat Denpasar dengan kapasitas 4.000 nomor.

Dalam tahun ini pula diselesaikan pemasangan atau pemindahan hubungan telepon Pamong Praja di seluruh Indonesia sebanyak 29 buah sambungan dengan panjang saluran 258,6 Km. Selain itu hubungan telepon milik Pamongpraja di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara dan Sulawesi, serta milik D.S.M. di Sumatera Utara mulai diambil-alih. Rehabilitasi saluran Pamongpraja tersebut dimulai di Nusa Tenggara dalam tahun 1956, di Samarinda dalam tahun 1957, di Kalimantan Barat dalam tahun 1958 dan di Sulawesi dalam tahun 1962. Penambahan pos-pos telepon dalam tahun 1962 di seluruh Indonesia berjumlah 3.367 telepon, sehingga jumlah pos-pos telepon seluruhnya meliputi 117.124 hubungan, yang terdiri dari 79.277 hubungan induk, 37.864 hubungan

Digitized by Google

cabang dan 303 hubungan swasta.
Jumlah T.R.O. yang dipergunakan di seluruh Indonesia 467 buah, diantaranya 122 milik PTT dan 345 milik partikelir, sedangkan jumlah T.R.T.O. 1315 yang terdiri dari 1.179 milik P.T.T. dan 136 milik partikelir.

(e) Dalam tahun 1963 dibuka Kantor-kantor Telepon baru ialah: Kantor Telepon satelit Tanjungperak Surabaya pada tanggal 2-1-1963, Kantor Telepon Induk Patinlabu pada tanggal 15-1-1963, Kantor Telepon Induk Masohi pada tanggal 25-1-1963, Kantor Telepon Induk Muararupit pada tanggal 1-3-1963 dan Kantor Telepon Manna pada tanggal 1-4-1963.
Di samping Kantor-kantor Telepon biasa dibuka dengan resmi Sentral Otomat Tanjungkarang dengan kapasitas 1000 nomor. Perluasan diadakan pada Sentral Otomat Makassar dengan 3000 nomor. Selanjutnya dibuka Sentral-sentral Telepon yang diambil-alih dari Pamong Praja setempat dan dipergunakan untuk umum, antara lain: Mandai, Jeneponto, Maros, Pakanjene, Majene, Sidenreng, Rappang, Pinang, Makalo, Ende dan Maumere.
Jumlah Sentral Telepon dalam tahun 1963 ialah 468 dengan kapasitas 114.587 nomor yang terdiri dari 437 Sentral I.B. dengan kapasitas 52.967 nomor, 17 Sentral C.B. dengan kapasitas 27.813 nomor dan 14 Sentral Otomat dengan kapasitas 33.807.
Jumlah gedung Kantor Telepon ialah 468 yang terdiri dari 386 milik P.N. Postel, 45 milik Pamong Praja, 13 milik Instansi lain dan 24 milik Swasta.
Jumlah perlengkapan T.R.O. yang dipergunakan 523, yang terdiri dari 167 milik P.N. Postel dan 356 milik Swasta. Jumlah T.R.T.O. 1390 dengan kapasitas 25.005. Yang terpakai 13.682, yang terdiri dari 1252 milik P.N. Postel dengan kapasitas 19.067, yang terpakai 12.798. 138 milik Swasta dengan kapasitas 5.938, yang terpakai 1.884.
Jumlah pos-pos telepon 122.140 sambungan yang dibayar, 1.508 sambungan dinas yang diperhitungkan dan 2.936 sambungan bebas beaya. Seluruhnya berjumlah 126.284 sambungan.
Dalam tahun ini diselesaikan pula Hubungan Jarak Jauh Telepon Interlokal dengan pemasangan:
- Carrier ITI 1 + 3 (ex Jakarta-Bandung) pada hubungan Solo-Yogyakarta pada tanggal 30-7-1963.
- Carrier Z3F (ex Denpasar-Singaraja) pada hubungan Palembang-Tanjungkarang pada tanggal 1-10-1963.

Rehabilitasi saluran interlokal yang selesai dikerjakan ialah pemasangan dari 1 perangkat saluran Solo-Karanganyar dan Solo-Sragen.

(f) Dalam tahun 1964 dibuka Kantor-kantor Telepon baru:
- Katanggungan Timur pada tanggal 6-5-1964.
- Kualatungkal pada tanggal 30-6-1964.
- Kalianda pada tanggal 18-8-1964.
- Selatpanjang pada tanggal 17-6-1964.
- Sei Panyuh pada tanggal 11-9-1964.
- Losari pada tanggal 3-10-1964.

Digitized by Google

Kantor Telepon Otomat yang dibuka ialah:
- Kantor Telepon Otomat Gambir Jakarta dengan kapasitas 10.000 nomor dan
- Kantor Telepon Otomat Padang dengan kapasitas 3.000 nomor.

Pada tanggal 14-10-1964 diambil-alih dari P.T. SHELL, Sentral Telepon di Gunung Pasir Balikpapan.

Jumlah Sentral Telepon pada akhir tahun 1964 mencapai 486 dengan kapasitas 131.631 nomor.

Jumlah gedung Kantor Telepon menjadi 486 yang terdiri dari 403 gedung milik P.N. Postel, 42 gedung milik Pamong Praja, 15 gedung milik Instnasi lain dan 26 gedung milik Swasta.

Jumlah perlengkapan T.R.O. yang dipergunakan tercatat 501 yang terdiri dari 135 milik P.N. Postel dan 366 milik Swasta.

Jumlah pos-pos telepon 137.599 sambungan biasa dan 4.555 sambungan dinas yang seluruhnya berjumlah 142.154 sambungan.

Dalam tahun ini selesai dikerjakan Hubungan Jarak Jauh Telepon Interlokal
- Saluran interlokal antara Medan-Bandaaceh sepanjang 599 Km.
- Saluran antarstasion P.N.K.A. ex D.S.M.
- Saluran untuk L.D. antara Padang-Bukittinggi (88 Km), Tanjungraja - Palembang (58 Km), Tanjungraja-Kayuagung (10 Km), Bengkulu-Manna (160 Km Martapura-Muaradua (51 Km), Lubuklinggau-Muararupit (100 Km), Muararupit-Surulangunrawas (22 Km), Palembang-Jambi (70 Km).
- Saluran Banjarbaru V (11 Km).
- Saluran antara Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba (114 Km), Cigombong-Sukabumi-Cianjur (77 Km).
- Saluran interlokal antara Cirebon-Purwokerto (130 Km).

Pada tanggal 1-2-1964 dibuka pula untuk umum perhubungan interlokal Bandaaceh-Lhoseumawe dan pada awal April 1964, Bandaaceh-Lhoseumawe-Medan. Sejak tanggal 15-6-1964 dibuka perhubungan antara Padang-Sibolga dengan sked 10.30-11.00, dan mulai 1-7-1964 dibuka perhubungan Bandung-Samarinda dengan sked 09.30-10.30.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan keputusan-keputusan Konperensi Kepala-kepala Lalulintas Telepon yang diadakan dari 15-6-1964 s/d 20-6-1964, antara lain ialah:
- memperpanjang masa lalu permintaan-permintaan percakapan interlokal dari jam 24.00 menjadi jam 07.00 esok harinya.
- antara jam 00.00 - 07.00 tidak menerima permintaan percakapan interlokal di Kantor-kantor Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang, Yogyakarta dan Solo, kecuali untuk berita jenis marabahaya, dinas gangguan, HN, KT, DP, Berita Kematian atau Sakit.
- Mengadakan pengawasan selama 24 jam terhadap petugas-petugas operasional di kantor-kantor yang besar.
- Menguangkan model Itlp 1 - Itlp 20 - Itlp 2g mulai bulan Agustus 1964, sejalan dengan tindakan keharusan memberikan tanda bukti pembayaran kepada para pembicara dari KBU dan memperkecil jumlah banyaknya zone

Digitized by Google

interlokal dari 11 zone menjadi 5 zone.

(g) Dalam tahun 1965 selesai dikerjakan Sentral-sentral Telepon sebagai berikut: Kantor Telepon Satelit di Yogyakarta, Kantor-kantor Telepon Dumai, Bagansiapiapi, Muaratewe, Jeneponto, Kotamubago, Jailolo, Susupu, Saparua, Baturiti, Maumere, Bima, Raba, Seririt, Bajawa, Ruteng, Larantuka, Panguruan dan Pasar Minggu.

5) Telekomunikasi dan peristiwa-peristiwa internasional.

Kalau prangko dapat mengabadikan peristiwa-peristiwa nasional maupun internasional yang penting dan menyebarluaskannya ke seluruh dunia, maka untuk dapat mewujudkan peristiwa-peristiwa tersebut telekomunikasi merupakan sarana perhubungan untuk terselenggaranya pertemuan antar Kepala Negara yang satu dengan Kepala Negara yang lain, antara delegasi dan delegasi untuk mempererat persahabatan atau untuk mencarikan penyelesaian dalam suatu sengketa dalam rangka untuk mewujudkan hidup berdampingan secara damai. Dalam hal ini Jawatan P.T.T. atau P.N. Postel disibukkan untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia dalam menyediakan kemudahan telekomunikasi untuk melayani tamu-tamu negara. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut diadakan perhubungan telepon radio istimewa atau sementara antara negara asal dan Indonesia atau sebaliknya, baik secara langsung maupun transito untuk menyediakan fasilitas-fasilitas agar dapat melangsungkan percakapan-percakapan, siaran-siaran radio ataupun pandangan mata. Selama tahun 1960 sampai dengan tahun 1965 Jawatan PTT dan P.N. Postel setiap kali sibuk memberikan pelayanan-pelayanan dalam peristiwa-peristiwa:

(a) Tour de Java II dari tanggal 17-8-1959 s/d 4-9-1959.
(b) Konperensi Colombo di Yogyakarta dari tanggal 26-10-1959 s/d 13-11-1959.
(c) Kunjungan-kunjungan Raja Muangthai beserta Ratu, dan Perdana Menteri Sovyet Rusia ke Indonesia dalam bulan Pebruari 1960.
(d) Kunjungan muhibah Presiden RI ke luar negeri dalam Bulan April dan Mei 1960.
(e) Kunjungan Presiden Guinea ke Indonesia dalam bulan September 1960.
(f) Olympic Games di Roma dalam bulan Agustus dan September 1960.
(g) Kunjungan Marsekal Amer dari Republik Persatuan Arab Mesir dalam bulan Januari 1962.
(h) Kunjungan Pangeran Akihito dari Jepang dalam bulan Pebruari 1962.
(i) Kunjungan Jaksa Agung Amerika Serikat R. Kennedy dalam bulan Pebruari 1962.
(j) Kunjungan Wakil Perdana Menteri Mikoyan dari Uni Sovyet dalam bulan Juli 1962.
(k) Kunjungan Presiden Mexico dalam bulan Oktober 1962.
(l) Kunjungan Pangeran Sihanouk dari Kamboja dalam bulan Nopember 1962.
(m) Kunjungan Wakil Presiden Yugoslavia dalam bulan Desember 1962.
(n) Kunjungan Presiden Soekarno ke Hongkong, Jepang dan Muangthai untuk beristirahat dalam bulan Nopember 1962.

Digitized by Google

(o) Konperensi Colombo dalam bulan Desember 1962 untuk mencarikan penyelesaian mengenai sengketa perbatasan antara India dan R.R.C.
(p) Kunjungan Menlu Dr. Soebandrio ke Peking untuk membantu penyelesaian perbatasan antara R.R.C. dan India. Dalam peristiwa ini perhubungan Bandung-Shanghai dibuka pada hari Minggu.
(q) PATA Conference di Bandung dan di Jakarta dalam bulan Maret 1963 di mana disediakan fasilitas telekomunikasi bagi para anggota delegasi.
(r) Kunjungan Presiden Soekarno ke Jepang dan ke Eropa untuk beristirahat sejak 22 Mei 1963 hingga pertengahan Juni 1963. Selama itu diadakan perhubungan istimewa dan perluasan jam kerja dengan Tokio dan Bern.
(s) K.T.T. "Maphilindo" di Manila dari tanggal 28 Juni 1963 s/d 5 Agustus 1963. Selama itu perhubungan Bandung-Manila dibuka setiap hari dengan jam kerja 0700 - 2200.
(t) Kunjungan P.M. Ikeda dari Jepang dari tanggal 26-9-1963 s/d 28-3-1963. Dalam peristiwa ini diadakan fasilitas komunikasi khusus.
(u) Kunjungan Presiden Luebke dari Republik Federasi Jerman dari tanggal 28-10-1963 s/d 3-11-1963.
(v) Konperensi pendahuluan K.I.A.A.
(w) Kunjungan Presiden Soekarno ke Eropa dan Asia. Selama itu diadakan hubungan-hubungan khusus dengan luar negeri antara lain dengan Amsterdam, Bern, Wina, Moskou, Jenewa, Cairo, Paris, Tokio dan Pyongyang.
(x) Challenge Round Thomas Cup di Tokio dari tanggal 13-5-1964 s/d 22-5-1964. Selama itu diadakan fasilitas perhubungan radio antara Bandung-Tokio untuk mengadakan siaran pandangan mata oleh RRI dan TVRI.

Digitized by Google

2. Keuangan

Dalam bulan Juli 1959 Kabinet Kerja mengambil langkah-langkah di semua lapangan untuk menyehatkan keuangan Negara. Dalam bulan Agustus 1959 Pemerintah mengeluarkan peraturan penurunan nilai uang kertas Rp. 1000,- dan Rp. 500,-, masing-masing menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50,-. Di samping itu dilakukan pembekuan rekening-rekening Bank di atas Rp. 25.000,-. Akibat dari penyehatan keuangan ini maka uang dalam pengurusan PTT yang terkena peraturan tersebut tidak sedikit jumlahnya.

Selanjutnya dengan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9-9-1959 No.114474/G.T., Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan-pembatasan pengeluaran yang diperlukan oleh Jawatan-jawatan Pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk Negara. Pembatasan tersebut antara lain mengenai penerimaan pegawai baru, pembelian barang-barang di luar negeri dan di dalam negeri, perjalanan dinas di dalam negeri dan di luar negeri, pemindahan dan pendetasiran pegawai dan lain-lainnya. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah tersebut paling sedikit mempengaruhi lancarnya pekerjaan rutin dan usaha-usaha pembangunan di semua lapangan Jawatan PTT. Padahal kesulitan-kesulitan yang dialami dalam tahun-tahun sebelumnya seperti kekurangan akan alat-alat dan barang-barang untuk pembangunan, terutama yang berasal dari luar negeri, kurang lancarnya pengangkutan baik di darat, laut maupun di udara, gangguan di daerah-daerah yang masih bergolak, kekurangan tenaga-tenaga terdidik dan lain-lain, masih terasa dalam tahun 1959.

Berhubung sukarnya untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri sebagai akibat keadaan devisa Negara, diusahakan untuk mengganti bahan-bahan yang dibutuhkan dan yang berasal dari luar negeri, dengan bahan-bahan yang dibuat dalam negeri, misalnya kertas telegram impor diganti dengan kertas ampas tebu

Digitized by Google

bikinan pabrik kertas Padalarang yang menghasilkan penghematan pengeluaran devisa sebesar Rp. 7.500.000,- dalam tahun 1960.

Dalam situasi keuangan yang sulit dan ketat, sampai dengan tahun 1962, Jawatan PTT yang sejak 1961 menjadi P.N. Postel, masih belum merugi. Pendapatannya masih dapat mengimbangi beban pengeluarannya, bahkan masih dapat menghasilkan laba meskipun sedikit.

Pada akhir tahun 1960 Jawatan PTT dapat menyerahkan laba sebesar Rp.600.000,- dan sumbangan pensiun, bunga dan pengembalian modal sebesar Rp.73.900.000,- kepada Negara.

Pada akhir tahun 1961 P.N. Postel menyerahkan laba sebesar Rp.1.200.000,- dan sumbangan pensiun, bunga dan pengembalian modal sebesar Rp.121.000.000,- kepada Negara.

Pada akhir tahun 1962 laba yang diperoleh P.N. Postel bahkan meningkat menjadi Rp.9.100.000,-

Sejak 1963 P.N. Postel mulai mengalami defisit akibat inflasi yang makin melaju. Pada tahun 1963 Jawatan PTT mengalami defisit sebesar Rp.834.000.000,- dan pada tahun 1964 sebesar Rp.816.000.000,-

Pada tahun 1965 P.N. Postel memencar menjadi P.N. Pos dan Giro, dan P.N. Telekomunikasi. Meskipun demikian realisasi pemecahannya menjadi dua perusahaan sampai ke Bagian-bagian dan Urusan-urusan serta personalianya belum selesai diselenggarakan seluruhnya sehingga masih terdapat unit-unit yang terus bekerja untuk kedua perusahaan baru, sehingga mengenai bidang keuangan, kepegawaian, pendidikan dan beberapa hal lainnya yang bersifat umum, masih dilakukan secara tergabung.

Beban eksploitasi dalam tahun 1965 terus meningkat. Penyebabnya antara lain ialah bertambahnya beban biaya pegawai sebagai akibat berlakunya peraturan kenaikan tunjangan kemahalan umum mulai bulan Agustus 1965 sebesar 300% menjadi 550%, meningkatnya biaya beras bagi pegawai, biaya ongkos hotel, biaya restitusi pengobatan yang disebabkan terus meningkatnya harga obat-obatan hingga 400%, biaya pemeliharaan perusahaan yang terus bertambah besar sebagai akibat terus meningkatnya harga barang-barang, ongkos pengangkutan dan lain-lainnya. Pada tahun-tahun sebelumnya sejak 1959, Jawatan PTT dan P.N. Postel dalam berusaha untuk dapat membeayai dirinya sendiri, hampir tiap tahun menaikkan tarip pos, tarip telegrap dan atau tarip telepon. Meskipun demikian, kenaikan tarip sebesar 50%, 100% maupun 400% akhirnya tidak dapat mengimbangi kenaikan beban eksploitasi.

P.N. Pos dan Giro, dan P.N. Telekomunikasi pada tahun 1965 mengalami defisit yang tak terelakkan sebesar Rp.3.353.000.000,- tanpa memperhitungkan laju inflasi, sedangkan dengan memperhitungkan laju inflasi defisit tersebut sebesar Rp.6.000.000.000,-. Defisit tersebut setelah ada perhitungan antara P.N. Pos dan Giro dan P.N. Telekomunikasi sebagian kecil menjadi beban P.N. Pos dan Giro dan sebagian besar menjadi beban P.N. Telekomunikasi. Defisit ini masing-masing terhapus sebagian besar ketika pada awal Masa Orde Baru Pemerintah mengadakan tindakan penyehatan keuangan sehingga hutang itu tinggal sedikit karena menjadi

Digitized by Google

seperseribunya yang tak terasa.

Di bawah ini dicantumkan data penerimaan Pos, Telegrap dan Telepon selama tahun 1960 s/d 1965.

Tahun	Pos	Telegrap	Telepon
1960	Rp. 346.100.000,-	Rp. 278.100.000,-	Rp. 272.600.000,-
1961	382.100.000,-	373.900.000,-	349.200.000,-
1962	636.900.000,-	448.100.000,-	592.000.000,-
1963	1.442.000.000,-	1.030.000.000,-	1.637.000.000,-
1964	2.290.000.000,-	2.199.000.000,-	3.521.000.000,-
1965	3.004.000.000,-	1.606.000.000,-	3.879.000.000,-

Data mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran dari tahun 1960 s/d 1965 sebagai berikut:

Tahun	Seluruh Penerimaan	Seluruh Pengeluaran
1960	Rp. 859.100.000,-	Rp. 858.500.000,-
1961	1.146.000.000,-	1.144.800.000,-
1962	1.677.000.000,-	1.667.800.000,-
1963	4.000.000.000,-	5.000.000.000,-
1964	8.010.000.000,-	8.826.000.000,-
1965	6.489.000.000,-	11.842.000.000,-

Digitized by Google

3. Pembangunan

Selama masa Demokrasi Terpimpin dilakukan pembangunan gedung-gedung untuk Kantor Pos, Kantor Telepon, Stasion Radio dan Rumah Dinas untuk pengganti gedung atau kantor yang dibumihanguskan, untuk menambah potensi perusahaan dan untuk memberi kesejahteraan pegawai di bidang perumahan.

Peristiwa yang penting di bidang pembangunan ialah komando Presiden Soekarno untuk memulai pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 1961 dengan melakukan upacara ayunan cangkul pertama sebagai isyarat untuk memulai Pembangunan tersebut. Pembangunan Nasional Semesta meliputi beaya Rp.240.000.000.000,- selama masa 8 tahun. Dari beaya pembangunan sebesar Rp.240.000.000.000,- itu, maka yang Rp.8.500.000.000,- diperuntukkan bagi pembangunan proyek-proyek P.T.T. Proyek-proyek P.T.T. ini meliputi 7 proyek Dinas Pos, 8 proyek Dinas Telegrap, 8 proyek Dinas Telepon, 9 proyek Dinas Radio serta proyek-proyek di bidang Pendidikan tenaga-tenaga P.T.T., di bidang Laboratorium Research P.T.T. dan Industri Telekomunikasi.

Realisasi dari proyek-proyek pembangunan yang telah dikerjakan dari tahun 1959 sampai dengan 1965 sebagai berikut:

Sentral	Kapasitas (dalam L.U)	Keterangan (mulai dipakai)
Malang I	4.000 ex Siemens/EMD	8-8-1959
Jakarta Kota	4.000 ex Siemens/EMD	21-4-1960
Tanjungpriok	2.000 ex Siemens/EMD	1960
Kebayoran	4.000 ex Siemens/EMD	27-5-1961

Digitized by Google



Makasar (Ujungpandang), September 1961.
Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Letjen G.P.H. Djatikusumo, sedang membubuhkan cap pada sampul hari pertama waktu peresmian Gedung Kantorpos Besar I Makasar Ujungpandang.



Gedung Kantor Pos yang diresmikan (Ipphos).

Digitized by Google

Surabaya Darmo	3.000 (2.000	29-4-1961
	(1.000 "	30-5-1961
Denpasar	1.600 ex Siemens/EMD	27-9-1962
Ujungpandang	3.000 ex Lorentz/HKS	20-4-1963
Gambir	10.000 ex Siemens/EMD	30-1-1964
Tanjungkarang	1.000 ex Ericsson/LME	1963
Padang	3.000 ex Ericsson/LME	10-11-1964
Banda Aceh	600 ex Phillip/PTI	1-3-1965

Jumlah kapasitas Telepon Otomat di Indonesia s/d Th. 1965: 46.200 L.U.

Disamping pembangunan Kantor-kantor telepon otomat yang dimaksud di atas, maka pada tahun 1961 dilakukan pemancangan tiang pancang pertama Gedung Telekomunikasi Jakarta Raya pada tanggal 17 Juni 1961. Menurut rencana gedung ini bertingkat 8, di mana antara lain ditempatkan Kantor Telepon Otomat Gambir dengan kapasitas permulaan 14.000 nomor yang dapat diperluas sampai 21.000. Gedung ini merupakan pusat bagi perhubungan-perhubungan telepon, telegrap, telex dan telephoto, baik nasional maupun internasional.

Dalam tahun 1961 pula, di bidang Pos dilakukan pembukaan gedung baru Kantor Pos Solo pada tanggal 24 Oktober 1961. Dalam gedung yang bertingkat empat ini, untuk pertama kalinya dipergunakan paternoster, yaitu suatu carrier yang tak berujung pangkal yang dipasang antara tingkat bawah dan tingkat teratas, yang mengangkut secara mekanis kantongpos-kantongpos dari bawah ke atas dan sebaliknya. Gedung bertingkat di mana bagian ekspedisi justru berada di tingkat atas sehingga memerlukan paternoster, merupakan suatu eksperimen dari PTT untuk diteliti lebih lanjut akan faedah, keuntungan dan keberatannya.

Disamping itu dilakukan peresmian gedung baru Kantor Tukar Pos Laut di Tanjungpriok pada tanggal 14 Desember 1961.

Selain peresmian pembukaan gedung-gedung yang dimaksud di atas, Jawatan PTT mengadakan pembangunan dan perluasan pula di bidang-bidang lain, baik di bidang Pos, di bidang Telegrap dan Telex maupun di bidang Telepon.

Pembukaan Jaring Telex Indonesia dilakukan pada tanggal 4 Januari 1961 di Jakarta. Jaring Telex ini panjangnya 16.400 Km, menghubungkan 16 kota dan mempunyai kapasitas 480 nomor. Dalam waktu 5 tahun Jaring Telex tersebut diperluas sehingga meliputi 23 kota dan mempunyai kapasitas 1000 nomor. Jaring Telex ini selanjutnya dihubungkan dengan Jaring-jaring Telex di luar negeri sehingga langganan-langganan telex dapat mengadakan hubungan secara langsung dan otomatis dengan langganan-langganan lainnya baik dalam perhubungan lokal, interlokal maupun internasional.

Selama tahun 1961 dibuka pula:
- Sentral Telepon Induk Tual pada tanggal 2-1-1961.
- Sentral Telepon Cabang Comal pada tanggal 9-4-1961.
- Sentral Telepon Cabang Passo pada tanggal 1-8-1961.

Digitized by Google

- Sentral Telepon Pembantu Kotaalam dan Kantor Telepon Cabang Ciranjang pada tanggal 27-9-1961.
- Gabungan Telepon Palu, Kantor Telepon Induk Donggala dan Kantor Telepon Parigi dan Kantor Telepon Cabang Tawaeli yang dioper dari Pamongpraja pada tanggal 1-4-1961.
- Kantor Telepon Tapan, Kantor Telepon Mantur dan Kantor Telepon Simpang-empat yang dibuka khusus untuk kepentingan militer.

Stasion radio - stasion radio baru dibuka pula dala tahun 1961 di: Kasungan, Tambelan, Midai, Serasan, Ranai dan Tanjungbatu.

Di bidang Pos terdapat pembangunan gedung-gedung baru untuk Kantor Pos yang sudah diselesaikan sebanyak 48 dengan biaya ± Rp.53 juta.

Untuk memberi tempat tinggal bagi pegawai-pegawai telah selesai dibangun rumah-rumah dinas sebanyak 28 buah.

Di samping itu dikerjakan pembangunan rumah dinas - rumah dinas sebanyak 35 buah dengan biaya ± Rp.13.000.000,-, gedung-gedung baru untuk Kantor Pos sebanyak 25 buah dengan biaya ± Rp.37.000.000,-, gedung-gedung baru untuk Kantor Telepon sebanyak 18 buah dengan biaya ± Rp.207.000.000,- dan 6 buah gedung baru untuk stasion radio dengan biaya ± Rp.11.000.000,-. Selanjutnya dikerjakan perluasan pada 41 gedung Kantor Pos dan sebuah gedung stasion radio dengan biaya seluruhnya ± Rp.31.000.000,-

Di masa pelaksanaan ini perlu dicatat bahwa pada tanggal 26 Nopember 1963 diadakan upacara perletakan batu pertama gedung baru Kantor Pos Ibu Kota Jakarta Raya. Bagi warga P.N. Postel peristiwa tersebut memberi rasa kebanggaan, karena di samping pembangunan gedung Telekomunikasi Jakarta Raya, P.N. Postel mendapat kesempatan lagi untuk turut serta dalam usaha raksasa pada tingkat nasional untuk memodernisasikan atau mengubah wajah Ibu Kota Jakarta Raya.

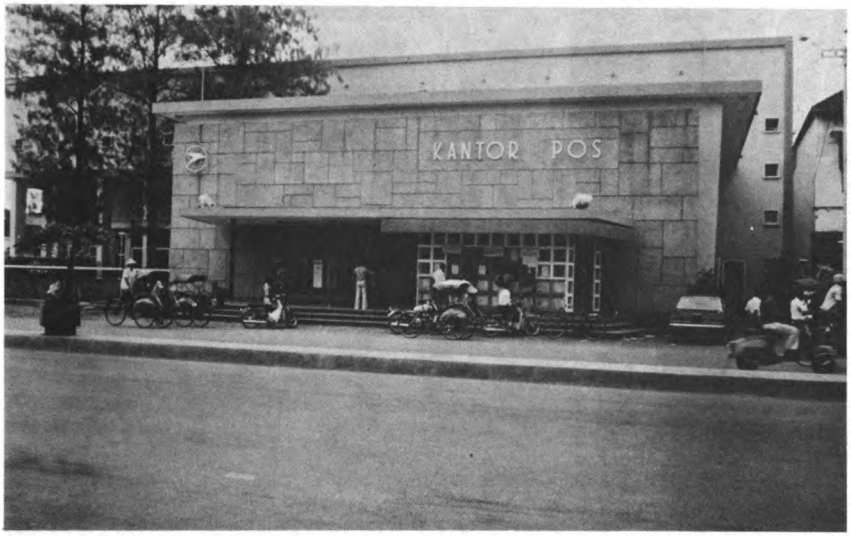
Menurut rencana gedung tersebut akan terdiri dari Bangunan Utama 14 tingkat dan Bangunan Sayap Kiri dan Sayap Kanan masing-masing 4 tingkat.

Mula-mula muka gedung disiapkan menghadap Lapangan Banteng. Oleh Presiden Soekarno rencana muka diubah menghadap ke arah Timur Laut atau jurusan Pasar Baru, dengan ide sebagai Pintu Gerbang Jakarta kalau dilihat dari arah Airport Kemayoran sebagai International Airport ketika itu. Arsitektur bagian depan mengalami perubahan pula. Setelah rencana terakhir disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk dan perubahan yang diberikan Presiden Soekarno, barulah rencana tersebut memperoleh persetujuan pribadi dari Kepala Negara.

Dalam rencana ini, Gedung Kesenian (City Theatre sekarang) dilenyapkan untuk kolam dan tempat parkir. Rencana ini dibuat oleh P.T. Sendi Bangunan pimpinan Ir. A.R. Suhud. Maket gedung dipamerkan pula di Gedung Pola.

Pembangunan itu dalam pelaksanaannya tidak lancar karena kurang tersedianya dana. Berbeda dengan pembangunan Gedung Telekomunikasi Ibu Kota Jakarta Raya di Jalan Merdeka Selatan No.12 yang harus selesai pada waktunya supaya Kantor Telepon di Lapangan Gambir dapat digusur dan tanahnya disediakan untuk keindahan Lapangan Monas, pembangunan Kantor Pos Ibu Kota Jakarta Raya ini mengalami kelambatan, bahkan kemacetan. Pada tahun 1965 disediakan anggaran

Digitized by Google



Kantor Pos Solo.

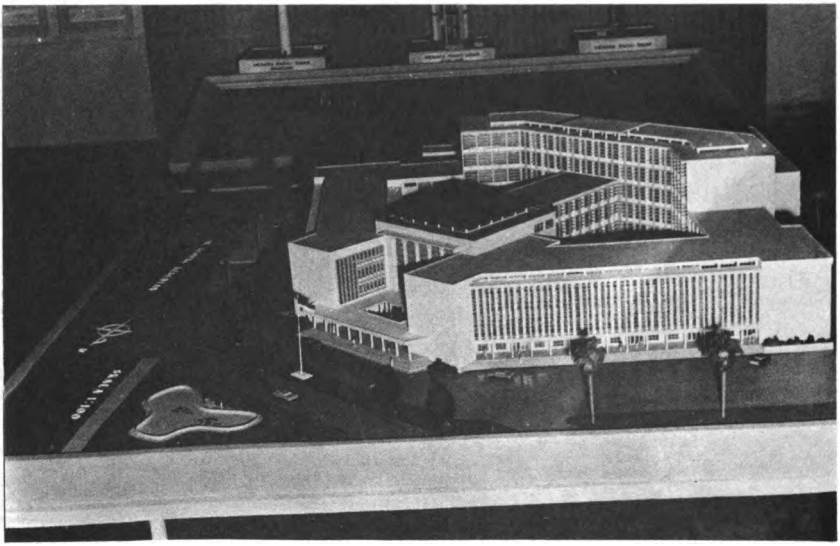


Cibinong (Bogor), 27 September 1964.
Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Hidajat, sedang membubuhkan cap pada peresmian Kantorpos Cibinong. Nampak mendampingi DIRJEN PN POSTEL S.H. Simatupang dan Kdpos I Nyoman Bai.

Digitized by Google



Jakarta, Nopember 1963
Presiden Soekarno sedang meletakan batu pertama, pada peresmian pembangunan "Gedung Pos Ibukota". Nampak mendampingi DIRJEN PTT SH Simatupang dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Hidayat (disebelah kiri dan kanan Presiden Soekarno). Gambar bawah maket "Gedung Pos Ibukota" yang belum terwujud pembangunannya. (Ipphos).



Digitized by Google

sebesar Rp.730.000.000,- untuk penyelesaian pembangunan pondasi sayap kanan gedung dan untuk pembangunan atas sayap kanan gedung. Di antara rencana-rencana arsitektur yang ditangani pula oleh Presiden Soekarno maka rencana arsitektur gedung Kantor Pos Ibu Kota Jakarta Raya hanya terwujud sebagian saja.

Pembangunan di bidang Pos dan Telekomunikasi tidak hanya berupa gedung-gedung yang megah. Pembangunan sarana Pos dan Telekomunikasi meliputi isi gedung dan sarana yang ada di luar gedung-gedung Pos dan Telekomunikasi. Lebih-lebih di bidang Telekomunikasi di mana nampak pembangunan besar-besaran, yang ada di luar gedung itu. Pembangunan*) di sini bukan hanya terbatas pada pembangunan gedung-gedung atau stasion-stasion belaka, tetapi juga yang menyangkut sistem transmisi, switching, dan sarana-sarana penunjang, yang kesemuanya harus diusahakan memenuhi koordinasi, integrasi, sinchronisasi dan simplifikasi.

Komponen dan eksponen yang menggerakkan pembangunan Telekomunikasi di Indonesia cukup unik. Dalam teknologi telekomunikasi bangsa Indonesia masih tergantung kepada luar negeri. Akibatnya pelbagai macam sistem terdapat di Indonesia. Misalnya dalam hal transmisi tidak hanya digunakan sistem kawat atau saluran phisik, tetapi juga radio, yang terbagi lagi dalam macam-macam jenis, ada HF, VHF, dan UHF, microwave. dan lain-lainnya yang masuk jenis sistem terrestrial.

Demikian pula dalam hal peralatan dan perlengkapan, Indonesia masih memerlukan luar negeri, juga dalam sistem switching di mana dikenal sistem EMD/Siemens buatan Jerman Barat, BTM buatan Belgia, PRX buatan Belanda, CIT buatan Perancis, NEC buatan Jepang yang di samping sistem juga menyediakan sarana-sarananya, menyediakan supervisor dan dananya. Berhubung dengan itu penyelenggaraan sesuatu sistem telekomunikasi mencakup segalanya yang terdiri dari transmisi, switching, gedung, peralatan-peralatan lain dan sebagainya, yang masing-masing didatangkan dari pelbagai negeri.

Dengan banyaknya sistem yang dipergunakan Telekomunikasi di Indonesia, maka siswa-siswa di Lembaga Pendidikan Postel dan di Telecommunication Training Centre, harus mempelajari pelbagai sistem telekomunikasi. Berhubung dengan itu tepat benar bahwa Indonesia harus memiliki industri Pos dan Telekomunikasi yang memadai sehingga mampu memenuhi kebutuhan vital Pos dan Telekomunikasinya.

Perkembangan pembangunan sarana telekomunikasi telah diutarakan tahun demi tahun dalam Subbab 1b, Bab III ini. Betapa besarnya kepentingan Pemerintah di bidang Pos dan terutama di bidang Telekomunikasi nampak pada dana yang disediakan, dikeluarkan dan diujudkan dalam pelbagai unit usaha Pos dan Telekomunikasi. Namun membeli dan membangun adakalanya lebih mudah daripada memelihara. Berhubung dengan itu hanya dengan pembangunan yang terus-menerus yang berupa pemeliharaan, akan menjaga supaya komponen-komponen yang tergantung satu sama lain akan benar-benar mewujudkan suatu sistem yang berfungsi dengan baik bagi pelayanan. Di sini dituntut pembangunan sikap mental yang merasa terlibat terus-menerus dalam proses untuk mempertahankan kelangsungan P.N. Pos

*) *Willy Moenandir Mangoendiprodjo, Konperensi Pers, Gema Telekomunikasi, Tahun ke XII, No. 143, April 1980, hal. 5 dan 6.*

Digitized by Google

dan Giro dan P.N. Telekomunikasi. Persatuan dan kesatuan antara pegawai-pegawai dalam hal ini diperlukan supaya ada kerja sama, rasa ikut memiliki dan rasa ikut bertanggungjawab. Dengan adanya politik nasakomisasi buruh-buruh yang nampaknya benar, dalam tubuh dua Perusahaan Negara itu pada hakekatnya justru terdapat keresahan. Maka dengan meletusnya dan tertumpasnya G.30.S./PKI, ketenangan kerja dapat dikembalikan.

Pos dan Telekomunikasi berjalan terus. Keduanya melayani pengirim dan penerima supaya dapat berkomunikasi. Di sini tidak ada jarak yang memisah dalam sistem komunikasi tanpa bergerak sehingga insan manusia merasa satu. Itulah misi Pos dan Telekomunikasi.



Jakarta, 9 Agustus 1965
Peresmian hubungan telex internasional oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Hidajat, dengan peragaan hubungan telex dengan Tokyo. (Ipphos).

Digitized by Google



Jakarta, 4 Januari 1961
Wakil Menteri Pertama/Menteri Distribusi Dr. J. Leimena dengan didampingi oleh DIRJEN PTT S.H. Simatupang sedang meresmikan pengoperasian telex.

Digitized by Google



Peragaan penggunaan pesawat telex.



Jakarta, 27 September 1961
Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Letjen G.P.H. Djatikusumo dengan didampingi oleh DIRJEN PTT S.H. Simatupang (kiri) meresmikan Kantor Telepon dan Telegrap Jakarta-Kebayoran, yang ditandai dengan peragaan pembicaraan telepon lokal. (Ipphos).

Digitized by Google

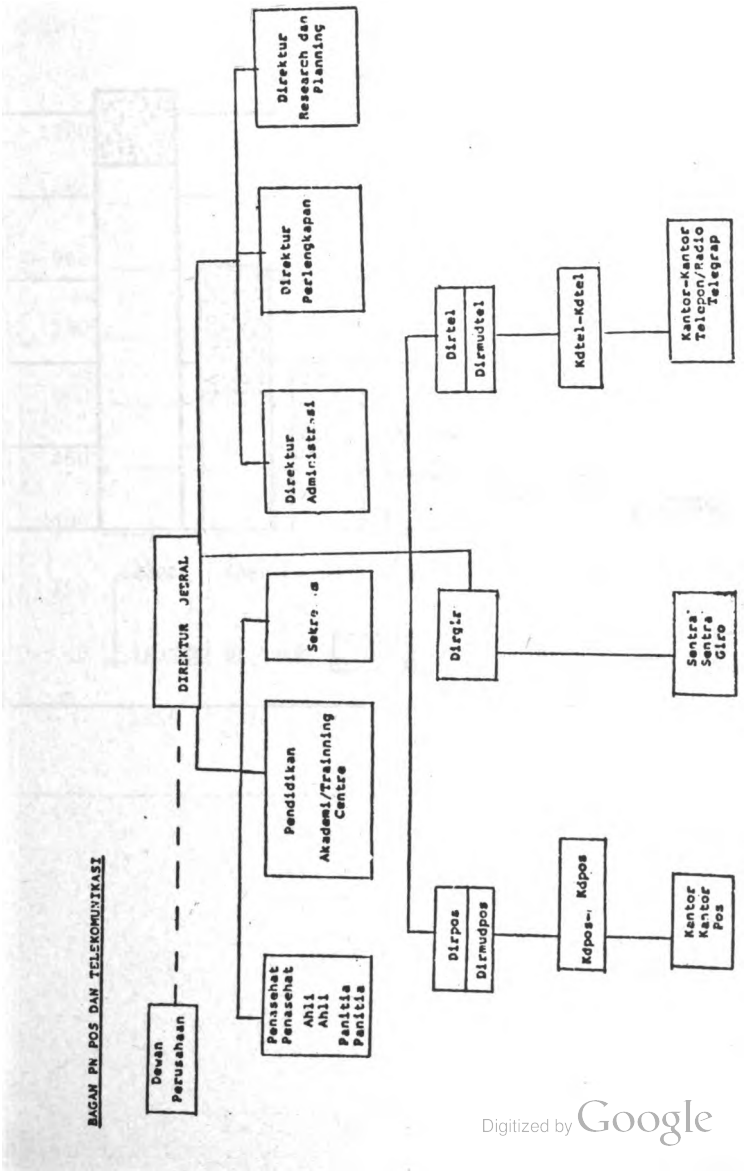
LAMPIRAN

Digitized by Google

Digitized by Google

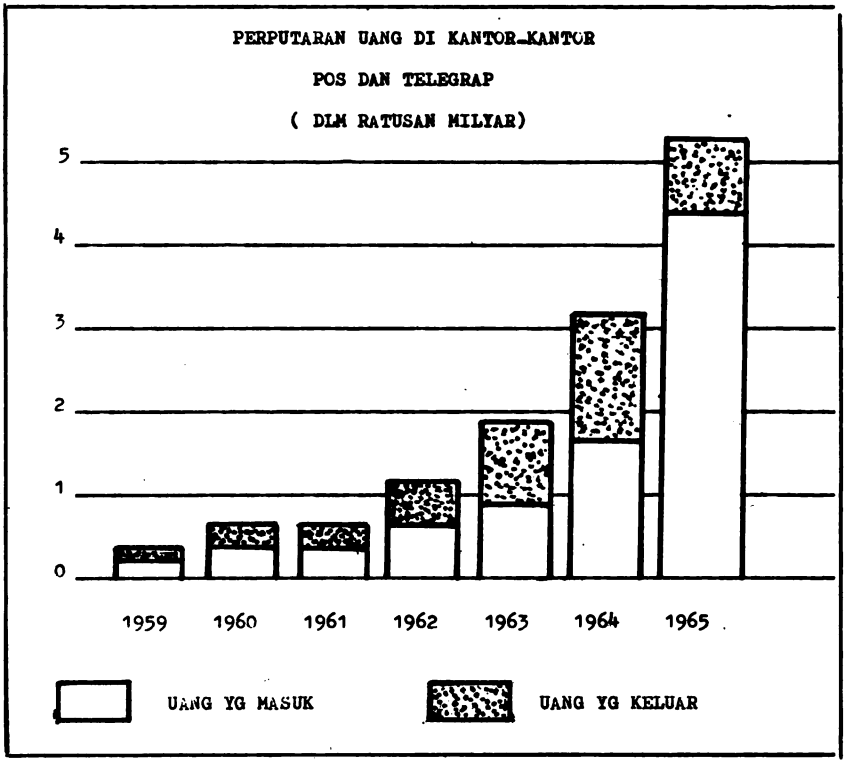
LAMPIRAN

Lampiran 1



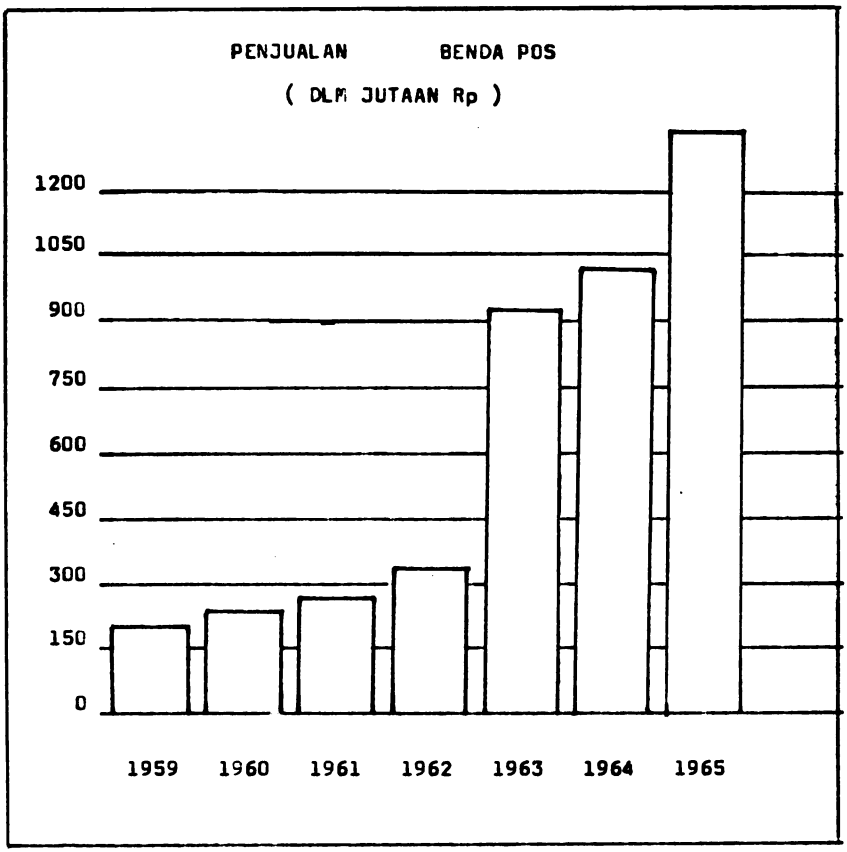
Digitized by Google

Lampiran 2



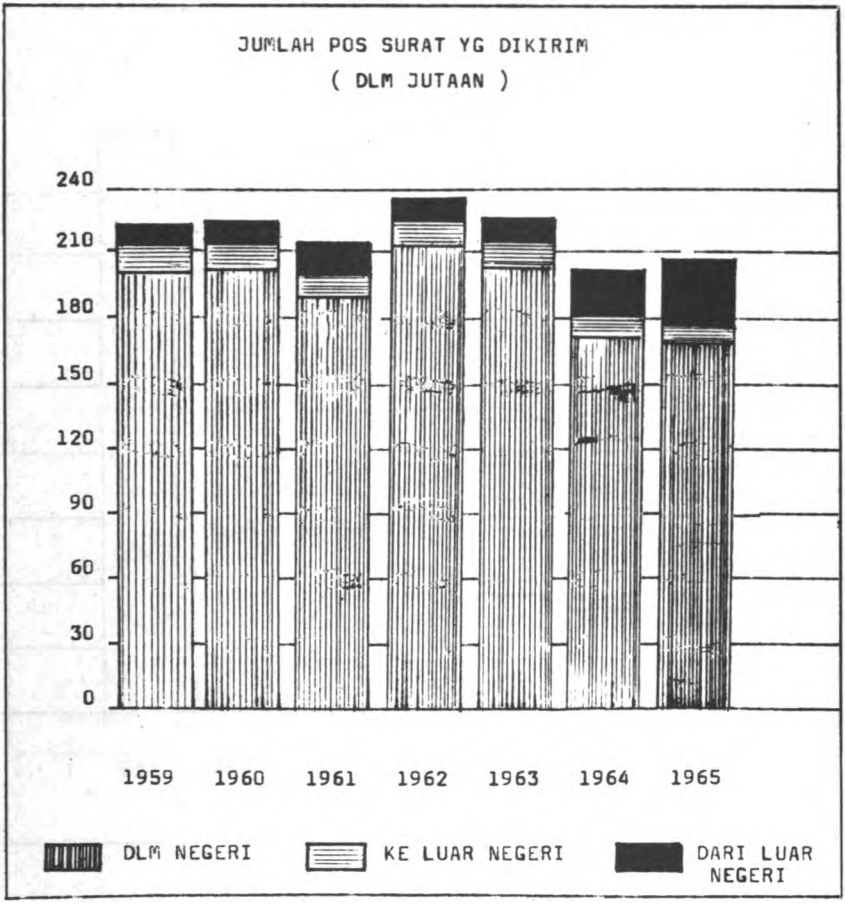
Digitized by Google

Lampiran 3



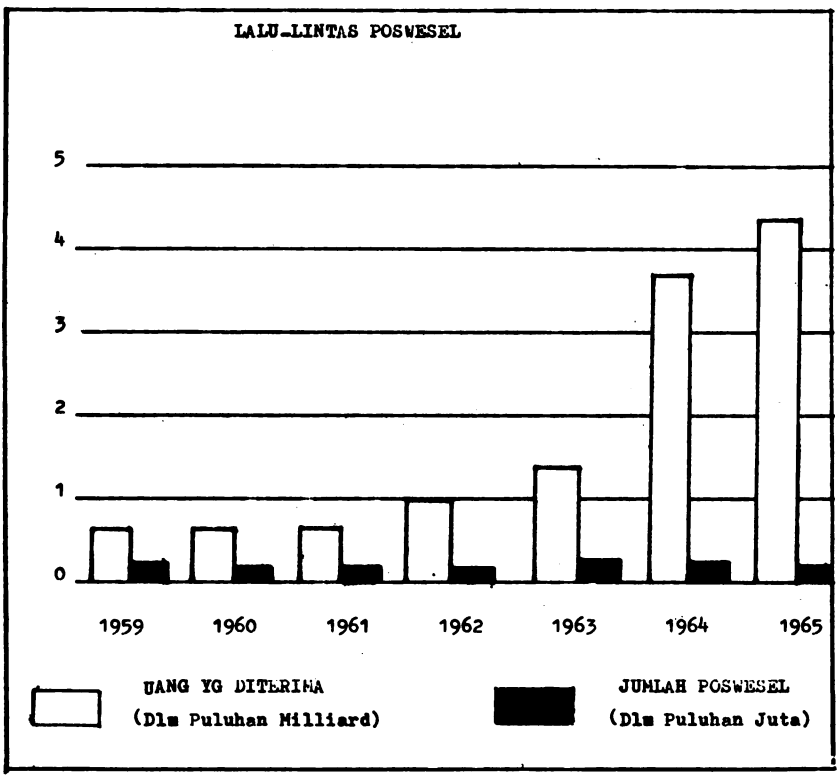
Digitized by Google

Lampiran 4



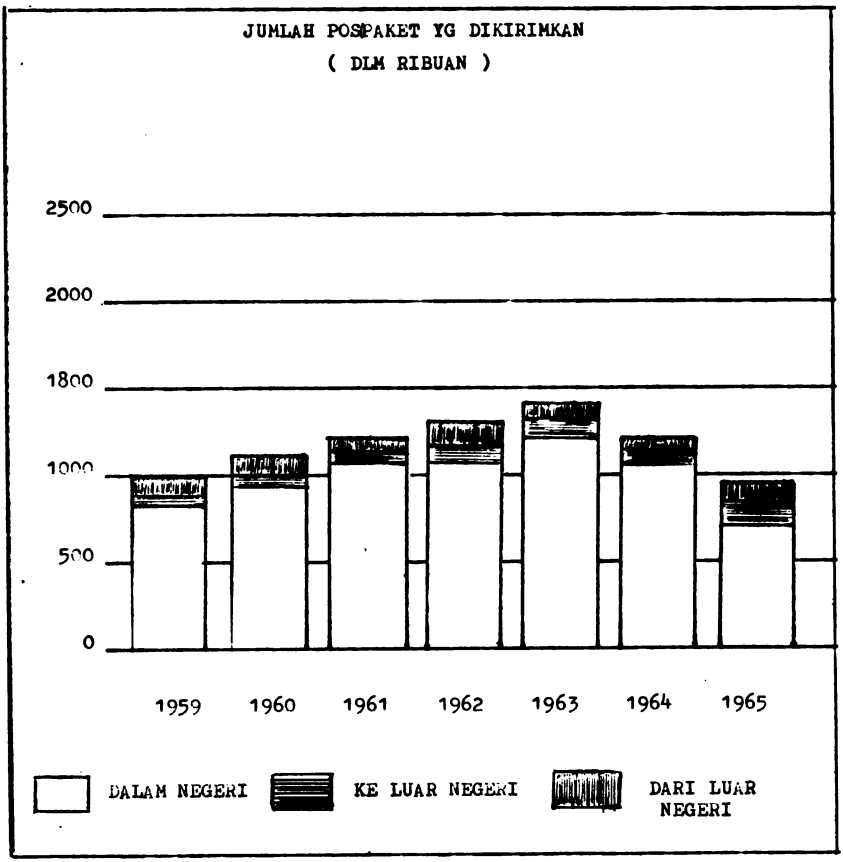
Digitized by Google

Lampiran 5



Digitized by Google

Lampiran 6

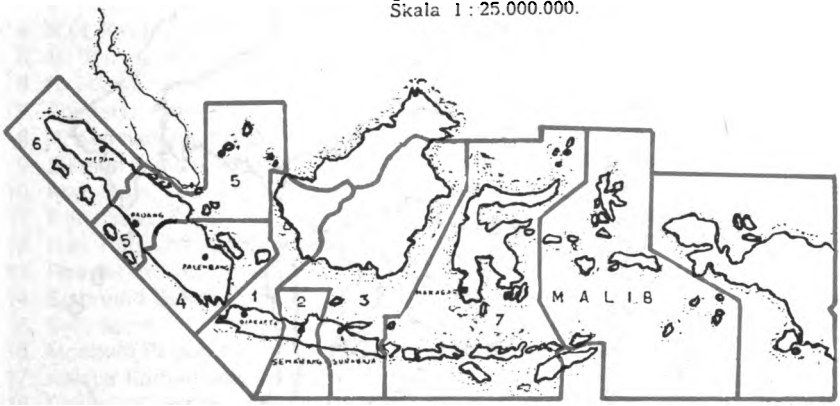


Digitized by Google

Lampiran 7

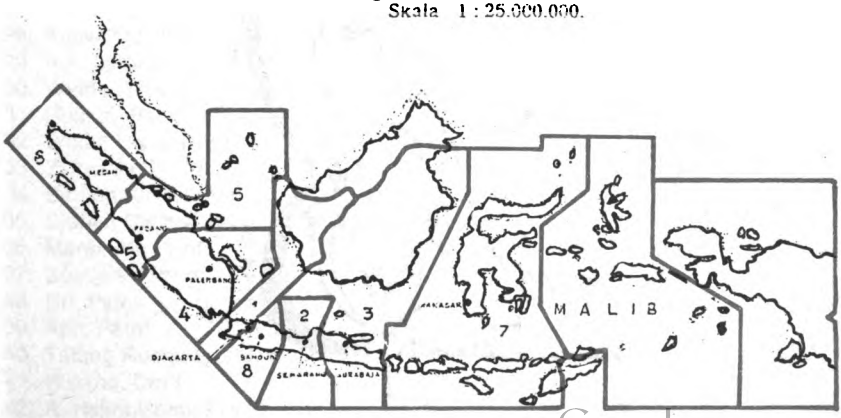
Tahun 1963

Pembagian Daerah² Pos dan Telegrap.
Skala 1 : 25.000.000.



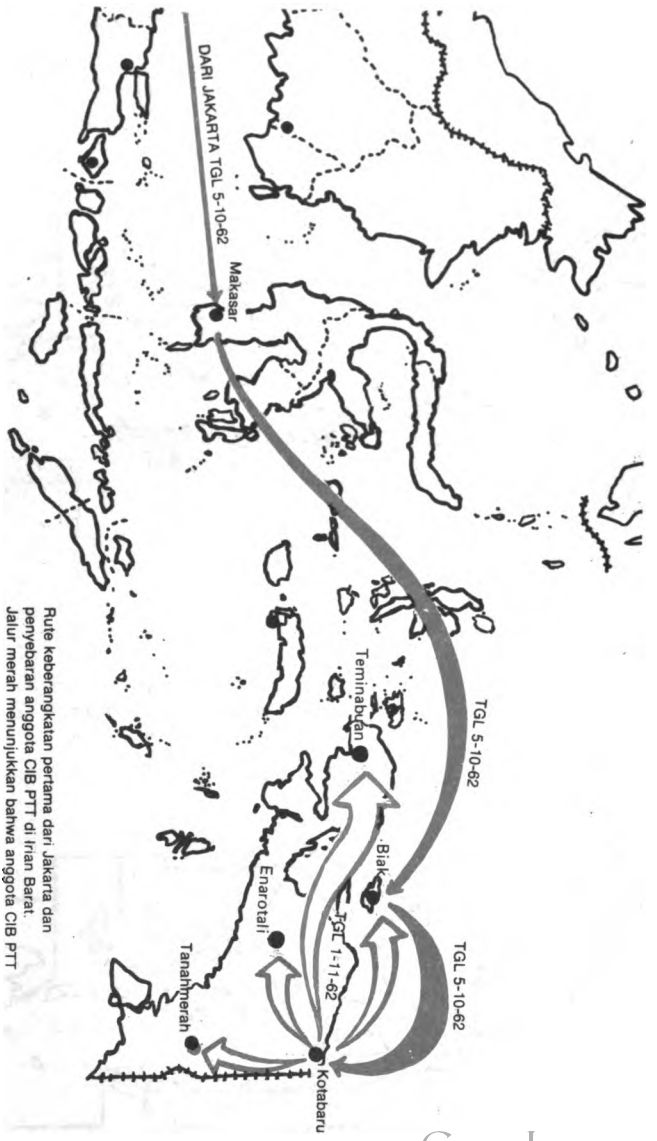
Tjatatan :
Kantor Pos dan Telegrap Besar kl. I di Djakarta merangkap sebagai Biro Inspeksi.

Pembagian Daerah² Telekomunikasi.
Skala 1 : 25.000.000.



Digitized by Google

Lampiran 8



Rute keberangkatan pertama dari Jakarta dan penyebaran anggota CIB PTT di Irian Barat. Jalur merah menunjukkan bahwa anggota CIB PTT **yang pertama-tama tiba di Teminabuan pada (1 Nopember 1962).**

Digitized by Google

Lampiran 9

Daftar nama-nama Sukarelawan P.T.T. untuk Irian Barat.

1. Ir. I Gusti Bahder Djohan, Altn
2. Martono, Pltnt I
3. M. Manuhutu, Pltnt I
4. R.M. Kayatmo, Pltntk
5. M. Kasmiri Soemamihardja Pstnt
6. R. Soedjananingrat, Altu
7. Soenarjo, Patnt I
8. R. Achmad Jusuf, Patu
9. Bikman Gunadi, Patu
10. Abd. Alam, Patu
11. F.W. Waas, Patu
12. R.M. Rafioedin, Patu
13. Roewat Ratiman, Prtu I
14. Sjahrudin Bahar, Prtnt
15. Sali, Supir
16. Moeljoto Pl pos 1
17. Achijar Kartadinata, Prtnt I
18. Soewandi, Pspos
19. J.A. Zacharias, Pltnt
20. Dadang Arifin, Prtel I
21. Tatang Bachtiar Prtel I
22. Atit Kusnadi, Prtel
23. Mustofa, Prtel
24. Saryanto, Prtel
25. Idris, Pltnt
26. Mas Basoeki, Pltnt
27. Nana bin Endjum, Pdi I
28. Kuswanto, Patnt I
29. A.A. Latumanuwuij, Patnt I
30. Widho Rahardjo, Prtnt
31. Holikin, Patnt
32. Wajan Dana, Prtnt
33. Zainal Arifin, Prtnt
34. Sjofjan Rivai, Prtnt
35. Sjofjan Djamal, Prtnt
36. Marak Ali, Prtnt
37. Soetjipto, Prtnt
38. Uri, Patnt
39. Aan, Patnt
40. Tatang Ruchiat, Dtnk I
41. Warrno, Dtn I
42. A. Halim Ishaq, Prtnt
43. Djamain, Prtel
44. Sadimun, Prtel I
45. Darmadji, Prtel I
46. Muladi, Prtel
47. Sumardi, Prtel
48. J.G. Natatula, Pltnt I
49. Endi bin Adjid, Pdi
50. Dais, Pdi
51. Oeka Suhandi, Pltnt
52. Soeratman, Pltnt
53. K.K. Likumahwa, Patnt I
54. Moh. D. Narang, Prtnt I
55. B. Pasuhuk, Prtnt
56. Soepardjo, Prtnt
57. Mohd. Sjarief, Prtnt
58. Sulaeman, Prtnt
59. Komarudin, Pdi
60. Zagloel Dt. Madjopahit, Plpos
61. Djadjana, Prtnt I
62. Sukirman, Prtel
63. Udin Suwarna Prtel I
64. Soedarmo, Prtel
65. Moh. Saleh, Prtel
66. Koesno Eroedi, Prtel
67. Soegianto, Patnt
68. Sastra, Pdi I
69. Rasa Sucarso, Pdi
70. Umar Siregar, Patnt I
71. Abdoerrachman, Patnt I
72. Djoemadi Prtnt
73. Anwar, Prtnt
74. Darwis Ahmad, Prtnt
75. Ibrahim, Prtnt
76. Syamsu, Prtnt
77. Natsir, Prtnt
78. Rachmad Soelkia, Patnt
79. Basuki Haditomo, Patnt I
60. Abidin, Pdi
81. Mukimin, Prtel
82. Sutarto, Prtel
63. Uncang Iin Pgap
84. Uud Sujadi, Ptnk

Digitized by Google

85. Otje Soenardjo, Pdi
86. Rachman Katum, Supir
87. Mas Mashoed, PItnt I
88. Bachtiar, Prtnt
89. Mardjunas, Prtnt
90. Mohd Taher, Prtnt
91. Kamal Muchtar, Prtnt
92. Iri, Pdi.
93. Sumarmo, Patnt
94. Atju, Dmk
95. Agus Salim, Prtel
96. Supadmo, Prtel
97. Saridjo, Prtel
98. Soeharko, Patnt I
99. Entos, Pdi
100. Parijun, Pdi
101. Samsudin, Supir
102. Toefur, PItnt
103. K.J. Tarigan Silangit, Patnt I
104. Jusri, Prtnt
105. Djamain, Prtnt
106. Abd Manaf, Prtnt
107. Ojo, Pdik
108. Sahdi, Dtnk I
109. Tjetjep, Patnt
110. R. Sajono Juwono Sunjoto, PItnt I
111. Harry Subijantoro, PItnt I
112. Reswandi, PItnt
113. Midjil Hariadi, PItnt
114. M. Jasmin, PItnt
115. Kamdi Soemowardoyo, PIpos
116. Thoha Sutarman, PIpos
117. Haratua Pangaribuan, PIpos
118. Abdul Latif Mantika Radja, Pspos
119. Ban Seng Hok, PIpos I
120. Soekirman, PIpos
121. S.A. Lakona, Papos I
122. M. Noer Latuconsina, Prpos
123. Achmad Hidajat, PIpos I
124. Soetomo, PIpos
125. M. Sarpinoedji, Pbp
126. Soekaton, Papos
127. Muhiddin Manta, Pbp
128. Soewondo, Papos I
129. Soedar, Prpos
130. Soeparno, Prpos I
131. S. Dharminta, Pjpos I
132. Prijo Sugono, Prpos
133. R.W. Soenjoto Pono, Prpos
134. Hartono, Prpos
135. Djoemadi, Prpos
136. Soedarsono, Pjpos
137. J. Alfons Prpos
138. Kasih Suwandi, Prpos
139. Jajat Prijatna Kartadisastra, Pjpos
140. Muchtar Effendi, Prpos
141. Muchtar, PIpos I
142. R. Soemarto, Pbp I
143. Soewandi, Prpos I
144. Atje, Prpos I
145. Winih Winardi, Prpos
146. R. Panji Soekarso, Pjpos
147. Endang Thomas, Prpos
148. Piet Withuy Zen, Prpos
149. Mohd. Sapdi, Prpos
150. Sjarif Bastaman, Prpos
151. Omod, Prpos
152. Moh. Sidik Soemawis, PIpos
153. M.A. Limaheluw, Papos
154. Nyak Ban, Papos
155. Hariadi, Prpos
156. Kardono, Prpos
157. Mispon, Prpos
158. Doelgani, Prpos
159. Suryono, Prpos
160. J.S. Walanda, PIpos
161. Soedarman, Papos I
162. Moh. Sneltren, Papos
163. Maskur, Prpos I
164. D. Masaila, Prpos
165. M.L. Harahap, Prpos
166. Nyoman Wirata, Prpos
167. W. Sahulata, Prpos
168. Abd. Moeis I.M., PIpos
169. Soewarso, Papos
170. Syamsuddin, Papos

Digitized by Google

171. Y. Rieuw Passa, Prpos I
172. Soetojo, Pjpos
173. Edison Harimoe, Pjpos
174. Hassan, Prpos
175. Sjoekri Nasri, Plpos
176. B. Soetarmin, Papos I
177. Ibrahim Rachman, Papos
178. Sairi Syamsul Bakri, Prpos I
179. Soemanto, Prpos
180. J. Soegiarto, Pjpos
181. Subandi, Pjpos
182. K.R. Nerdouw, Papos I
183. H. Soebagio, Papos
164. Warsoko, Pjpos
185. A. Kurniadi, Prpos
186. Sarwono, Pjpos
187. Bistek O'Sunggu, Prpos
188. Juhana, Prtel
189. Mumu, Prtel
190. Moh. Soleh, Pattl I
191. Chosis, Pattl I
192. Achmad Hanafi, Pattl
193. Kamdono, Pltnt
194. Abdul Salam, Pattl I
195. A. de Queljoe, Patnt
196. J.J.N. Seimahuira, Pattl
197. Ijas Endi, Supir
198. Auw Jong Boen Hong, Prtel I
199. Sukarwono, Prtel
200. Soegiono, Prtel
201. Jasin, Prtnt I
202. Soenirto, Pstnt
203. A.G. Lumaela, Patnt I
204. Ahmad Assagaf, Prtel I
205. Anang Ruslan, Prtel
206. Gan Thay Hok, Prtel
207. Wasito Mestoko, Prtel I
208. Moch Sulhani, Prtel
209. R.J. Karouw, Prtel
210. Tjoek Sukardi, Prtel I
211. Adji Santoso, Prtel
212. Moerdin Silitonga, Prtel
213. Sudjono Suradi, Prtel
214. Garnaba, Prtnt
215. F.X. A. Redjo, Prtel
216. Made Martasedana, Papbk
217. Ir. W. Moenandir Mangoendiprodjo, Altnt
218. Moelja, Pattl
219. Moeslim, Patu I
220. Moh. Arif, Patu
221. C. Soepardi, Patu
222. Henodias, Pohan, Patu
223. Mustopa, Patnt
224. Usup, Patnt
225. Empi, Pgap
226. Sachlan, Prtel

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOGRAFI

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOGRAFI

1. Jawatan P.T.T./P.N. Postel/P.N. Pos dan Giro, Surat Keliling No.1, Tahun 1960 s/d 1966.
2. Koentjaraningrat, Harsja W. Bachtiar, "Penduduk Irian Barat", P.T. Penerbitan Universitas, 1963.
3. Notosoetardjo, "Dokumen-dokumen Konperensi Meja Bundar", N.V. Pustaka & Penerbit "Endang", Jakarta, 1956.
4. Idayu Press, "Rendez-vous dengan Revolusi" di Irian Barat", Jakarta, 1977.
5. Cholil, M., Drs., "Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat", Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.
6. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poeponegoro, Nugroho Notosusanto, "Sejarah Nasional Indonesia" VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
7. Naskah Raker Ditjen Postel 1972.
8. Moeljoto, G.M., Bc.A.P., "Pengantar Dinas Giropos", Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Pos dan Giro, 1970.
9. Moeljoto, G.M., Bc.A.P., "Dinas Giropos Sebagai Kasir Negara", Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Pos dan Giro, 1970.
10. Karso, Drs., "Sejarah Kebangsaan", Penerbit Angkasa, Bandung, 1973.
11. Memet Tanuwijaya, S.H., Irjenpol, "Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian", Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1971.
12. "Sejarah Triwindu Perhubungan Angkatan Darat", 23 Nopember 1945-1969.
13. P.N. Postel, "P.N. Postel Dalam Periode Pancawarsa Manipol", 1959-1964.
14. Majalah Gema Telekomunikasi Tahun 1971 - 1974, 1980.
15. Moeljoto, G.M., Bc.A.P., "Dari Tabungan Pos Sampai Tabungan Pembangunan Nasional", Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Pos dan Giro, 1977.
16. KASKOPKAMTIB, "Pembinaan masyarakat: Pemantapan Kamtibmas & Penyelesaian Tahanan G.30.S/PKI", Indonesia Sejak Orde Baru, Laidin Girsang, Penerbit "Yayasan Laita", Jakarta, 1979.

Digitized by Google

INDEX

Digitized by Google

Digitized by Google

INDEX

A

Aboeprajitno, Ir. 23
Abdoerachim Djojodipoero 98
ABRI 40, 92
Achmad Basah 18
aerogram 121
Akademi PTT 99
allotment 120
alternate route 133
Amboina 33
American Telephone and Telegraph Co. 133
Angkatan Perang 100
Ardiani Mohammad Hardigaluh 20, 93
arsitektur 149
Asean Games 127
Asrarudin 18
Aswani Tjitrohadikoesoemo 16

B

Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) 108
Balai Penitipan Bayi 97
Ban Seng Hok 49, 50
Bank Tabungan Negara 126
Bank Tabungan Pos 126
beban eksploitasi 141
Bencana Alam 96, 128
beras 96, 97
Biak 49, 54
Bintang Gerilya 98
border incident 38
Brigade Mobil 100
Brigade Sukarelawan 68
BTM 149

C

Catur Tunggal 68
Cakrabirawa 73
carnet 127
carreer planning 84
carrier 136, 145
CEL 93
CIA 108
Conefo 128
Corps Irian Barat PTT (CIB) 34
Corps Karyawan Veteran Postel/ L.V.R.I. 113

Digitized by Google

D

Dasar hukum 18, 86
defisit 97, 141
Dekon 82
dekrit 7
Demokrasi Liberal 9
Demokrasi Terpimpin 7, 102
depot obat 96
deposit 19
Dewan Perusahaan 8, 16, 18
Dewan Telekomunikasi 8, 24, 25, 26
dinamika politik 7, 69
Dinas Giro dan Cekpos 84, 85
Dinas Pos 8, 119
Dinas Rekening Pos 84
Dinas Telekomunikasi 9, 128
distribusi 126, 151
Djalal Abdoh, Dr. 48, 61, 64
Djali Aznam H.A. 23
Djatikoesoemo, G.P.H., Letjen. 36, 88, 152
Djoekanda Ny. 105
Dobo 33
Dwikora 66, 70
Dtx 72, 73

E

Ellsworth Bunker 47, 48
Enarotali 53
Etherington, Mr. 54
Extended Long Distance Project 130
EMD/Siemens 149

F

Fakfak 54

G

G.I.A. 120, 129
G.P.O. 51
GB POSTEL/SARBUMUSI 111
G.30.S/PKI 8, 71, 92
Ganefo 82
Gedung Kantor Pos Ibu Kota 146
Gedung Telekomunikasi 8, 72
Gegerkalong 102
gelombang pembawa 131
Geru 33
giral 85, 124
Goerjama Ny, 106
gula pasir 97
Gusti Bahder Djohan, I, Ir. 34, 40, 93

H

Hage, D. 23, 93
Hartono Wiriodinoto, S.H. 23
Heru Ganadi 98
Hidayat, Letjen. 16, 23, 150
HIPSI PTT 115
hotel 96, 141
Hudojo B. 18
hubungan carrier 132
hubungan internasional 92
hubungan printer 129
hubungan radio sinar 132

I

I.B.W. 7, 13
I.C.W. 13
Ikatan Teknisi PTT 115
Ikatan Warga Marhaen (IWM POSTEL) 110
improvisasi 43
indoktrinasi 70
International Telecommunication Union (ITU) 24, 92, 93
Irian Barat 47, 64

Digitized by Google

J

Japan Air Lines 129
Jenis-jenis Lembaga Pendidikan 101
Joint Board Pos Militer 66
Joint Message Centre 33

K

Kabinet Kerja 25, 27
Kaliurang 19
Kasidi 98
Kantor H.E., 108, 109
Kantor Pos Latihan 101
Kegiatan Operasional 119
Kegiatan Organisasi Wanita 104
Kegiatan Organisasi Buruh 108
Kepegawaian Kepolisian Negara 100
Kesejahteraan Pegawai 96
Kesimpulan 80
Keuangan 140
KESPEKRI 112
Kesatuan Buruh Postel/Buruh Marhaenis (K.B. Postel/Buruh Marhaenis) 110
K.I.A.A. 128, 139
K.I.W. PTT 115
kiriman tebusan 121
Kirjoedono, Ny. 105, 106
Kokusai Denshin Denwa (K.K.D.) 133
Komisi Eksekutip dan Penghubung 93
Komisi Revisi Umum Konvensi UPU 92
Kompartimen 23
konfrontasi 70
Konperensi Administrasi Radio 92
Konperensi Colombo 138, 139
Konperensi Dinas 80, 81
Konperensi Meja Bundar 29
Konstituante 7
KOPPOS 113
KOSTRAD 75
KOTI 74
KOTOE 108
Kwee San Tie, Ir. 20

L

laporan 43
Latif A, Mantika Radja 33, 34, 40, 50, 54, 64
lawan politik 43
Lembaga Administrasi Negara (LAN) 80
Leimena J.Dr. 151
Leiwakabessy, F. 114
Lie See Tik, Drs. 81
Lisba PTT 115
losmen 96

M

Malaysia 82
Manokwari 54
Makassar 33
Masohi 33
Mandala 33, 40, 45, 46, 66
Markas Besar Angkatan Darat 33
Meteorologi 100
Menteri Urusan P3 124
Mess Postel 96
Micro-wave Jawa Bali 131
minyak 97
Moedjijono, Ny. 106
Moeljoto 34
Moestadjab, Ny. 105, 106
Momod Ranawidjaja, Ny. 105, 106
Monumen Nasional (Monas) 146
Morotai 33
Muis A, 66
Munas SSPTT 109
Muchtil Junus, Ir. 20
Muljatno Sindudarmoko, Drs 81

Digitized by Google

Mux

N

Nasakom 8
Nasakomisasi 8, 109
Negara Papua 30
New York, persetujuan 48
New York World's Fair 93, 128
Notosoeseno, R. 15, 16
Nyoman Rai 23
NEC 132, 149
NEFO 93

O

O Hong Djie, Ir. 18, 80
Oesadi, S.H. 18, 20
Operasional 119
Orde Baru 26, 141
Organda 68
Organ Departemen 8
Organisasi Buruh Postel/GOBSII 112
Organisasi extra 79
Organisasi Wanita 103

P

pakaian 96
paketpos 122
Pakistan 48
Pamong Praja
Pan American Airways 128
Panca Setia 8
Partisipasi 29, 66
Pemindahan pegawai
Pendidikan 98
Penemuan Kembali Revolusi 7
Penerbangan Sipil 100
Penyelesaian 89
pembaharuan 26
Pembangunan 143
Pemberantasan Penyakit Kanker 128
Pembersihan 90
Pembinaan 79
Pemrasaran 63, 79
Pendidikan dan Latihan 98
Penghargaan, surat 97
Perhubungan Pos 120
Perhubungan Telegrap 128
Perhubungan Telepon Radio 132
Perhubungan Telex 129
Perhubungan transito 132
peristiwa internasional 138
Perusahaan Minyak Nasional 100
Permesta 121
perundangan 26
poliklinik 96
PORDEP 68
Postgiro 19
Public Corporation 13, 109
Pusat Pendidikan PTT Postel 99, 101
P.G.P.P.N. Postel 95
P.M.P.T.T. 115
P.P.P.K. 41
P.O.P.T.T. 114
PORKES POSTEL 114
Public Corporation 13
Pratomo
Prajudi, Prof., Dr., Mr. 80
prangko 127
Preliminary Understanding 47
Prijo Soegono 66
P.W. POSTEL 106
P.W. PTT 45, 106
PRRI 121
PRX 149
PTT Internasional 108, 110

Q

Quantas 129

R

Digitized by Google

Rapat Kerja 82, 124
Refresher Course 101
Rieuwpassa S.R. 93
Romli 33, 93
Roebiono, Dr., Kol. 80
Roekmin Adiwinata, Raden 20
Rubini
Rumah peristirahatan 98
RCA 133

S

Sabar Soediman 20, 34, 40
Sabarsoediman Ny. 106
Sabotase 40
Sahertian, M.J., Ir. 23, 51, 64
Sachloel Nasoetion 20
Samhoedi, Ny. 106
Seminar 79
Serui 54
Simatupang, S.H. 23, 43, 81
sistem 149
Sofyan, Ny. 106
Sorong 54
Soebandi, S. 50
Soedarman 66
Soedarsono 18
Soedjarwo Tjondronegoro, Mr. 49, 53
Soehana, Ir. 72
Soeharto, Majen. 66
Soehono Soemobaskoro, Drs. 23
Soekandar, Mas 20
Soekardan, R. Mr.
Soekarno Presiden 30, 31, 66, 138, 139, 143, 146
Soekarno Abdoelrachman, Ir. 20
Soemitro 53
Soenarjo Martosendjojo, Raden 20
Soerianegara, R.M.A. 16, 93
Soetjahjo Ny. 105, 106
Soewardi 20
Soewarno 23
Soewarno Ny. 106
SUAD 34
Sumadi 18
Surat Keliling 8
Surjo Sediono, Drs. 80
Scandinavian Air System 128
Show of Force 72
Staf Penyelesaian Tindakan Penertiban dan Pembersihan Personil 90, 92
Study Groups
Suhud A.R. Ir, 146
Suriadarma S. 23
switching
S.B.K.A. 71, 92
S.B. Postel 71, 72
SOBSI 71
SSPTT 72
SWI/KBM 123

T

Tahun Pengungsi Sedunia 127
Tanah Merah 54
TAVIP 68, 69, 70
Telepon Radio 132
Telepon Otomat 134
Teminabuan 54
Teningpu 90
Teningda 90
Team Pengamanan dan Pengawasan/Team Screening 90, 91
Team Pengamanan P.N. Postel 75
Team Khusus Penertiban 90
TOR 129
Tual 33
Tujuan 87
Tutul 38
tunjangan kemahalan 141
Thamrin, M.H. 72
Training Centre Dwikora 69
transmisi 130
Trikora 8, 30, 33, 134
Triprogram 69, 70

Digitized by Google

TRO 135, 137
TRTO 135

U

ujian 99
Union Postale Universelle (UPU) 92, 93
United Nations Temporary Executive Authority/UNTEA 47, 51, 52, 54
Untung, Kol. 73
Utojo Utomo, Brigjen 23, 70
Ultra High Frequency (U.H.F.) 149
Undang-undang Dasar 45 7
UNDP 102

V

Very High Frequency (V.H.F.) 130, 149
Vivere Pericoloso 68
Voice Frequency Telegraph (V.F.T) 129

W

Walanda J.S. 66
weselpos luar negeri 121
weselpos tebusan 121
weselpos telegrap 121
Wong, Mr. 52

Digitized by Google

PRANGKO YANG DITERBITKAN PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 JULI 1959 SAMPAI 11 MARET 1966

Digitized by Google

1959 PRANGKO KEMBALI KE U.U.D. 45



1959 PRANGKO COLOMBO PLAN





Digitized by Google

1960 PRANGKO KONGRES PEMUDA



1960 PRANGKO TAHUN PENGUNGSI SEDUNIA





Digitized by Google

1960 PRANGKO MALARIA



1960 PRANGKO HASIL BUMI





Digitized by Google

1960 PRANGKO HARI SOSIAL KE III



Digitized by Google

1961 PRANGKO "RIAU" PRESIDEN







Digitized by Google

1961 PRANGKO AYUNAN CANGKUL PERTAMA



1961 PRANGKO BENCANA ALAM II







1961 PRANGKO THOMAS CUP II







Digitized by Google

1961 PRANGKO TOURISME





















Digitized by Google

1961 PRANGKO TOURISME



Digitized by Google

1961 PRANGKO TOURISME



Digitized by Google

1961 PRANGKO TOURISME



Digitized by Google

1961 PRANGKO TOURISME



Digitized by Google

1961 PRANGKO DWI WINDU KEMERDEKAAN R.I.







1961 PRANGKO PAHLAWAN KE I









Digitized by Google

1961 PRANGKO PAHLAWAN KE II







1961 PRANGKO PAHLAWAN KE III











1961 PRANGKO SENSUS



Digitized by Google

1961 PRANGKO BUAH-BUAHAN







1962 PRANGKO MESJID ISTIQLAL









Digitized by Google

1962 PRANGKO RAMAYANA



Digitized by Google

1962 PRANGKO ASIAN GAMES



Digitized by Google

1962 PRANGKO ASIAN GAMES



Digitized by Google

1962 *PRANGKO ASIAN GAMES*



Digitized by Google

1962 PRANGKO ASIAN GAMES







1962 PRANGKO W.H.O.









Digitized by Google

1962 PRANGKO M.I.P.I.



1962 PRANGKO MONUMEN NASIONAL



Digitized by Google

1962 PRANGKO PAHLAWAN KE IV









1962 PRANGKO PAHLAWAN KE V









Digitized by Google

1962 PRANGKO ANGGREK









1963 PRANGKO TUGU IRIAN BARAT









Digitized by Google

1963 PRANGKO KONFERENSI P.A.T.A.



1963 PRANGKO IKAN (HARI NELAYAN NASIONAL)



Digitized by Google

1963 PRANGKO K.W.A.A.









1963 PRANGKO F.F.H.C.









Digitized by Google

1963 PRANGKO SEABAD PALANG MERAH



1963 PRANGKO GUNUNG AGUNG



1963 PRANGKO MERAH PUTIH



Digitized by Google

1963 PRANGKO KUPU-KUPU









1963 PRANGKO HARI BANK









Digitized by Google

1963 PRANGKO GANEFO



Digitized by Google

1964 PRANGKO PRESIDEN SOEKARNO



Digitized by Google

1964 PRANGKO TRANSPORT & KOMUNIKASI



Digitized by Google

1964 PRANGKO 100 TAHUN PRANGKO DI INDONESIA



1964 PRANGKO NEW YORK WORLD FAIR





1964 PRANGKO THOMAS CUP III







Digitized by Google

1964 PRANGKO MONUMENT NUBIA



1964 PRANGKO HARI ARMADA





Digitized by Google

1965 PRANGKO BURUNG (SOSIAL VII)











Digitized by Google

1965 PRANGKO K.I.A.A.









Digitized by Google

1965 PRANGKO CONEFO



Digitized by Google

1965 PRANGKO PANCASILA











Digitized by Google

1965 PRANGKO PERHOTELAN









1965 PRANGKO KANKER





Digitized by Google

1965 PRANGKO DASA WARSA K.A.A.









Digitized by Google

1965 PRANGKO BUNGA I









Digitized by Google

1966 PRANGKO BUNGA II











Digitized by Google

1965 PRANGKO CETAK TINDIH "65"



Digitized by Google

1966 PRANGKO BENCANA ALAM III









Digitized by Google

1966 PRANGKO PRESIDEN SOEKARNO



Digitized by Google

1966 PRANGKO PRESIDEN SOEKARNO



Digitized by Google

1966 PRANGKO HARI BAHARI



Digitized by Google

1966 PRANGKO HARI BAHARI



Digitized by Google

RALAT JILID IV

Hal	Baris	Salah	Seharusnya
4	pertama dibawah "Halaman"	–	71
4	keenam dibawah "Halaman"	–	79
5	pertama	156	155
5	ke 3	171	173
29	ke 2 dari bawah	dalam dimuka Parlemen	kata "dalam" dihilang-kan
35	ke 25	78 orang	76 orang
41	ke 7	kami berikan berikan	kata "berikan" di-buang sebuah
41	ke 11 dari bawah	(loopgraa)	(loopgraaf)
42	ke 19	wishfull thingking	wishfull thinking
44	ke 10	1/b/62	1/IB/62
53	ke 24	sebesar NGF1	sebesar NGFL
53	ke 7 dari bawah	tugas	petugas
54	ke 6 dari bawah	UNTEA menghendaki	UNTEA yang meng-hendaki
64	ke 21	1962	1963
64	ke 2 dari bawah	*) Soemirto	*) Soenirto
70	ke 12	Sukarelawan1Sukarelawati	Sukarelawan/Sukarela-wati
86	ke 3	Pd.	Pj.
87	ke 18	Mengingat tujuan	Tujuan
87	ke 10 dari bawah	degan	dengan
91	ke 7 dari bawah	1)	ditiadakan
94	ke 9	2.744	1.7461
94	ke 10	1.746	2.744
94	ke 11 dibawah "Yang ada"	40.629	37.386
94	ke 11 dibawah "Kekurangan"	37.386	3.243
119	ke 3	1)	ditiadakan
122	pertama	kini	ini
135	ke 12 dari bawah	Sental	Sentral
148	ke 2	meletakan	meletakkan

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PS6864

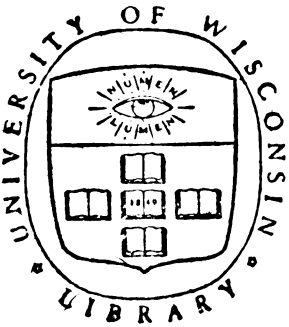
Digitized by Google



SEJARAH POS DAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Jilid V Masa Orde Baru

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN-DIREKTORAT JENDERAL [illegible]



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

SEJARAH POS DAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Digitized by Google

Digitized by Google

Untuk mengenang,
menghargai serta menghormati
para pahlawan POSTEL.

Digitized by Google

Digitized by Google

SEJARAH POS DAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Masa Orde Baru

Jilid V

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN-DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Digitized by Google

PANITIA PENGARAH DAN PERUMUS

PENGARAH

Penasehat	: *Nugroho Notosusanto, Prof. Dr.*
Ketua	: *Suryadi, Drs.*
Anggota	: *Junus, Ir. M.* *Moeljoto, Bc.A.P.* *Rollin, Ir.* *Soelaeman, Bc.A.P., M.* *Theo Suryawan, Ir.* *Willy Moenandir M, Ir.*

PERUMUS

Ketua Umum	: *E. Supandi, Bc.A.P.*
Ketua I	: *Liliek Soehadi, Bc.A.P.*
Ketua II	: *Suhana, Ir.*

Digitized by Google

Sekretaris Umum : *Soedarmadi, Bc.A.P.*

Sekretaris I : *Sjamsuddin Tanuatmadja, Drs.*

Sekretaris II : *Tasrizal Salam, Bc.A.P.*

Sekretaris III : *Musjafri Effendy, Drs.*

Anggota : *Abdurrachim, Drs., Agus Suroso, Bc.A.P., Djamil Suherman, Hutagaol, Bc.A.P., Drs, SH, Mizwar Muin, Drs., Moeljoto, Bc.A.P., GM., Moher Malana, Omdali, Bc.A.P., Sartono, SH, P., Setyanto Pr, M.A., Drs. K. Sodikin, Drs. K., Soedihardjo, Bc.T.T., R., Soegondo Atmodiwirjo, Bc.A.P., Soeharto, Bc.A.P., W.Th., Soetedjo, Bc.A.P., Drs., Subari, Bc.A.P., RM., Sukatarjo, Bc.T.T., Sumeleh, Bc.A.P., Suprapto, Bc.A.P., Drs., Zahari Maludin, SH.*

Penyunting : *Moeljoto, Bc.A.P., GM.*

Asisten : *Agus Suroso, Bc.A.P.*

Pembimbing Tehnis: *Rokhmani Santoso, Dra.*

Digitized by Google

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Jalan Kebon Sirih No.37
JAKARTA PUSAT

Dicetak oleh:
C.V. Cahaya Makmur

Disain Buku:
Markus Djajadiningrat
Ronny Ridwan
Yan Chandra

Digitized by Google

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	9
BAB I ORGANISASI DAN PEMBINAAN	15
1. Struktur dan Organisasi	15
a. Pembentukan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	15
b. Pembentukan LPP Postel, LPPI Postel dan P.T INTI	18
c. Lembaga Pendidikan dan Pos dan Telekomunikasi	19
d. Pengalihan Tugas-tugas Pemerintahan dari Dewan Telekomunikasi kepada Direktorat Jenderal Postel	22
e. Perubahan P.N. Pos dan Giro/P.N. Telekomunikasi menjadi Perum Pos dan Giro/ Perum Telekomunikasi	22
f. Badan Penasehat Perusahaan	39
g. Masa Direktur Jenderal Soehardjono	40
h. Masa Direktur Jenderal Drs. Suryadi	46
i. Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Jaya	48
j. Pos dan Telekomunikasi di Timor Timur	52

Digitized by Google

2. Pembinaan 61

a. Perubahan Dasar Hukum Team Screening 61
b. Pelaksanaan Tindakan Team Screening pada P.N. Pos dan Giro 62
c. Pelaksanaan Tindakan Team Screening pada P.N. Telekomunikasi 64
d. Pendidikan dan Latihan 66
e. Penelitian dan Pengembangan 74
f. Organisasi Pegawai KORPRI 78
g. Organisasi Wanita 86
h. Kehumasan 92
i. Olah Raga dan Kesenian 99

BAB II OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN POS DAN GIRO 109

1. Kegiatan Umum di Bidang Pos 109

a. Perhubungan dan Lalu Lintas Pos 110
b. Kegiatan di bidang Giropos dan Dinas-dinas Uang lainnya 134

2. Pembangunan Pos dan Giropos Dalam Pelita I dan Pelita II 151

a. Repelita I Pos dan Giro 151
b. Repelita II Pos dan Giro 153
c. Pelaksanaan Proyek-proyek Pelita I dan Pelita II 153
d. Repelita III Pos dan Giro 156

3. Produksi Jasa Perum Pos dan Giro 158

a. Produksi Jasa Pos 158
b. Produksi Jasa Giropos dan Dinas-dinas Uang Lainnya 159
c. Produksi Jasa Pengiriman Paketpos 159

Digitized by Google

4. Hubungan Internasional 160

a. Universal Postal Union (UPU) 161
b. Asian Oceanic Postal Union (AOPU) 164
c. ASEAN 166
d. Indonesia-Pakistan Economic and Cultural Cooperation Commission (IPECC) 167

BAB III OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI 171

1. Kegiatan Di Bidang Pembangunan 171

a. Umum 171
b. Pembangunan Stasiun Bumi Jatiluhur 179
c. Pembangunan Transmisi Gelombang Mikro Nusantara 186
d. Micro Wave dan Perkembangannya 189
e. Proyek Sistem Komunikasi Satelit Domestik 205
f. Pembangunan Proyek Telekomunikasi Nusantara 213
g. Proyek Kerja Sama Perum Telekomunikasi dan Pertamina 228
h. Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui 229
i. Repelita I dan Repelita II PERUMTEL 230
j. Repelita III PERUMTEL 235
k. Potensi dan Produksi PERUMTEL 237

2. Kegiatan di Bidang Industri Telekomunikasi 239

a. Berdirinya P.T. Industri Telekomunikasi 239
b. Industri Telekomunikasi 242
c. Repelita III Industri Telekomunikasi 244
d. Produksi P.T. INTI (Persero) 247

Digitized by Google

3. Hubungan Internasional 250

a. Fora Internasional Di Bidang Telekomunikasi Yang Penting 250
b. Kerja Sama ASEAN Di Bidang Telekomunikasi 253
c. World Administrative Radio Conference 264
d. Masalah Geostationary Satellite Orbit (GSO) 266

BAB IV PERISTIWA-PERISTIWA MUTAKHIR SAMPAI AKHIR 1980 271

LAMPIRAN 313

BIBLIOGRAFI 355

INDEX 369

Keterangan gambar kulit luar:
Presiden RI Soeharto sedang menekan "remote control" yang terdapat pada tangkai keris berkelok 17 untuk membuka layar yang menutupi prasasti, sewaktu meresmikan Proyek SKSD Palapa pada tanggal 16 Agustus 1976 di Gedung DPR/MPR RI Senayan - Jakarta.

Digitized by Google

PRAKATA

HE
7255
S44
1980
4-5

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan suatu surat perintah kepada Jenderal Soeharto yang memberinya wewenang untuk mengambil semua tindakan yang perlu guna mengatasi keadaan dan memulihkan kewibawaan Presiden. Teks surat perintah itu kemudian dirumuskan oleh Waperdam Subandrio, Waperdam Chairul Saleh dan Waperdam Leimena bersama tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat, yakni Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf dan Brigadir Jenderal Amirmachmud. dan dengan Brigjen Sabur sebagai sekretaris dan setelah selesai diketik, lalu ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

Surat Perintah 11 Maret (disingkat SP 11 Maret atau Supersemar) itu kemudian dijadikan landasan hukum oleh Jenderal Soeharto untuk membubarkan PKI, mengamankan anasir-anasir yang dianggap terlibat G.30.S./PKI atau beritikad tidak baik terhadap usaha pemulihan keamanan dan ketertiban serta kemudian untuk membentuk kabinet baru. Secara historis, Surat Perintah 11 Maret itu nampak menjadi titikpangkal bagi pembinaan Orde Baru. Adapun Orde Baru adalah:

1. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara, yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa lampau, dan berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang, sehingga mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*)

Sejak tanggal 11 Maret 1966 mulailah Masa Orde Baru yang menutup Masa Demokrasi Terpimpin yang berakhir dengan suatu tragedi yang pahit dan harus

*) *Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Posponegoro, Nugroho Notosusanto, "Sejarah Nasional Indonesia VI," Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, Hal. 125 dan 126.*

Digitized by Google

dibayar dengan mahal sekali. Namun peninggalan sejarah itu patut direnungkan untuk masa depan bangsa Indonesia supaya tidak tergoncang-goncang oleh pergolakan bagi kepentingan pembangunannya. Dengan lain perkataan, pengalaman sejarah kita sendiri di masa silam maupun tugas sejarah yang harus kita emban ke masa depan*), melahirkan kesadaran kita bahwa Pancasila harus lebih kita hayati dan makin kita amalkan, dan Undang-Undang Dasar 1945 lebih kita laksanakan secara murni dan konsekuen.

Dalam buku Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia, Jilid V, Masa Orde Baru ini akan diusahakan untuk menggambarkan rangkaian kejadian-kejadian yang berupa perubahan, pembaharuan dan pembangunan sampai di mana Pos dan Telekomunikasi mencapai kemajuannya untuk turut serta mewujudkan suatu sistim komunikasi yang terpadu dan berimbang baik-baik (a well balanced communication integrated system) seperti yang pernah digariskan oleh Menteri Perhubungan, Frans Seda. Perumusan yang pleonastis itu menunjukkan bahwa Indonesia, yang panjang territorialnya dari Barat sampai Timur kira-kira 3.200 mil dan dari Utara sampai Selatan kira-kira 1.100 mil, mempunyai daerah cepat dan lambat perhubungannya, sehingga waktu tempuh untuk suatu jarak yang dekat bisa lebih lama daripada untuk jarak yang jauh. Waktu tempuh surat dalam hal ini merupakan ukuran apakah transportasi intern dan transportasi extern sudah terkoordinasikan, terpadu dan synchron.

Penyampaian surat dari pengirim kepada penerima supaya dapat terlaksana, mempunyai ketergantungan banyak, yang menuntut kerja sama dari awal sampai akhir termasuk penerimanya yang harus memberi kemudahan bagi pengantarpos yang berupa papan nama dan nomor rumah yang jelas dan kotak surat yang mudah terjangkau dari jalan. Di sini dituntut perhatian yang terus menerus yang diperlukan bagi kepentingan umum karena siapapun suatu ketika dapat menjadi pengirim atau penerima surat.

Pos dapat dijadikan ukuran pula apakah para warga negara Indonesia sudah tinggi kesadarannya dalam memenuhi pelbagai macam pembayaran yang menjadi kewajibannya. Terutama pada pembayaran giral melalui giropos nampak suatu orde yang indah kalau pembayaran-pembayaran bulanan atau periodik dilakukan secara pemindahbukuan dari rekening pihutang kepada yang berpihutang secara periodik pula. Pembayaran secara ini menunjukkan adanya ketertiban dari wajib pajak dan wajib bayar yang memudahkan Kas Negara dan perusahaan-perusahaan lain dalam pengumpulan uang pembayaran atau penagihan.

Abad ke duapuluh ini ditandai dengan faktor kecepatan yang makin cepat. Di bidang Pos kita melihat adanya pos kilat dan surat kilat khusus. Antaran dilakukan dengan sepeda motor, bahkan surat tercatat dan paketpos diantar sampai ke rumah penerima. Namun kita masih ketinggalan dalam memperpendek waktu dan jarak. Di luar negeri sudah mulai dengan electronic mail. Meskipun demikian faktor manusia sebagai pengantarpos tidak akan dapat diganti sepenuhnya sebagai

*) *Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, "Buku I Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila," Jakarta, 1978, Halaman 9-10.*

Digitized by Google

pembantu dalam kontak perhubungan manusia. Ia akan selalu bersama dan beserta kita, kini, esok dan lusa.

Di bidang telekomunikasi kita lebih lanjut dapat melihat kemajuan yang luar biasa untuk mempercepat penyampaian berita dengan surat kabar. Perkembangan yang terlampau cepat di bidang transmisi sampai kepada penemuan dan penggunaan satelit, merupakan revolusi di bidang komunikasi dan informasi di dunia ini. Di luar negeri halaman koran dalam bentuk fac simile atau lembaran mini dapat ditransmisikan dari percetakannya di benua Eropa ke benua lain. Dengan lembaran mini yang ditransmisikan lewat satelit itu, pesawat terbang sebagai sarana angkutan koran tidak diperlukan lagi. Fungsi pesawat terbang digantikan dengan sistem pengiriman electronik. Dengan fac simile tersebut yang ditransmisikan lewat satelit, orang-orang Asia sudah bisa membaca koran pagi yang sama sambil sarapan, selagi pembaca lain di Eropa masih tidur nyenyak.*) Tidak mengherankan kalau abad 20 ini bisa dinamakan Jaman Revolusi Komunikasi "Electronic Mail"pun akan menjadi kenyataan di Indonesia. Yang lebih mengasyikkan lagi ialah bahwa sudah sejak lama dengan telepon gambar (picturephone) kini komunikator dan penerima benar-benar sudah dapat berhadapan muka dalam berkomunikasi!

Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid V dalam penyajiannya berusaha untuk mengikhtisarkan evolusi dan revolusi di bidang tehnologi telekomunikasi pada Bab III Sub bab 1,c. Sungguh pesat kemajuan telegrap, telex, telepon, radio dan telephoto di Indonesia. Satelit S.K.S.D. yang merupakan sarana transmisi mutakhir merupakan keajaiban telekomunikasi karena karya manusia itu betul-betul memenuhi ungkapan "gumantung tanpa cantelan." Namun ia berawal dan akan berakhir. Kehadirannya di ruang angkasa sebagai Palapa Generasi Pertama akan diganti dengan Palapa Generasi ke dua pada tahun 1983. Satelit Palapa memang mahal harganya, tetapi laksana buah kelapa dapat "ingalap" atau diambil kemanfaatannya banyak.

Selanjutnya Jilid V ini lebih menitikberatkan penulisan Sejarah Pos dan Telekomunikasi, Masa Orde Baru, pada Pelita I dan Pelita II. Masih banyak yang bisa ditulis sampai dengan 31-12-1980 sebagai peristiwa-peristiwa mutakhir dan penting yang telah terjadi. Namun tanggal penerbitan yang direncanakan mendesak kami untuk mengakhiri penulisan Jilid V ini yang kelak akan diteruskan dengan Jilid selanjutnya untuk memelihara kesinambungan penulisan Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia.

Jilid V ini diharapkan menjadi aureol yang menerangi Jilid-jilid sebelumnya. Namun kami merasa bahwa atribut itu terlampau indah untuk dikenakan pada Jilid ini yang masih banyak kekurangannya. Berhubung dengan itu Team Penyusun akan sangat berterimakasih bila para pembaca dan pemerhati suka memberikan koreksi untuk penyempurnaan buku ini.

Akhirnya kepada para Saudara-saudara yang tidak kami sebut satu per satu di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala kerja sama yang diberikan untuk mewujudkan Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Masa

*) *Kompas, "Segera Terbit Suratkabar Dunia Pertama", Kompas tanggal 29 Juli 1980 No.32 Tahun ke XVI, halaman I dan IX.*

Digitized by Google

Orde Baru ini. Semoga apa yang telah tercapai dalam kemajuan pembangunan baru-baru ini menambah kebanggaan kita akan hakekat Pos dan Telekomunikasi seperti yang tercantum pada sajak G.M. Moeljoto di bawah ini:

Pos dan Telekomunikasi

Postel pembawa berita dan pengetahuan
Penyebar peradaban dan kebudayaan
Penghubung perdagangan dan perindustrian
Alat hayati dalam perekonomian;
Penganjur perdamaian dan persaudaraan
Pemupuk pendekatan dan persatuan dunia;
Penghibur teman yang kesepian
Tali silaturakhmi mereka yang berjauhan;
Pengikat kerabat yang terpisah-pisah
Pengembang kerja sama dan hidup bersama;
Dutanya cinta dan kesetiakawanan
Pemersatu insan dan bangsa-bangsa;
Pemintas jalan, jarak dan waktu
Pemercepat transmisi dan transaksi;
Perantara penyelesaian hutang pihutang
Saluran pembayaran yang serba guna;
Kazanah yang rapat bagi kepercayaan
Penyimpan rahasia surat dan percakapan
Pengawal lubuk hati nurani
Pengabdi setia kemanusiaan;
Pengemban kewajiban yang penuh keluhuran
Tempat kita layak dan asyik bekerja;
Postel urat syaraf yang penting sekali
Dalam Sistem Data Informasi
Bagi masyarakat, Pemerintah dan Pertahanan Negara
Untuk kesejahteraan dan keselamatan Bangsa.

Panitia Penyusun dan Perumus

Digitized by Google

BAB I
ORGANISASI DAN PEMBINAAN

Digitized by Google

Digitized by Google

bab I
ORGANISASI DAN PEMBINAAN

1. Struktur dan Organisasi

a. Pembentukan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pada tanggal 27 Maret 1966 dengan Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966 dilakukan penyempurnaan lagi atas Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan sehingga Kementerian Pos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Departemen Pos dan Telekomunikasi yang dikepalai oleh seorang Deputy Menteri dan berada di dalam lingkungan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan.

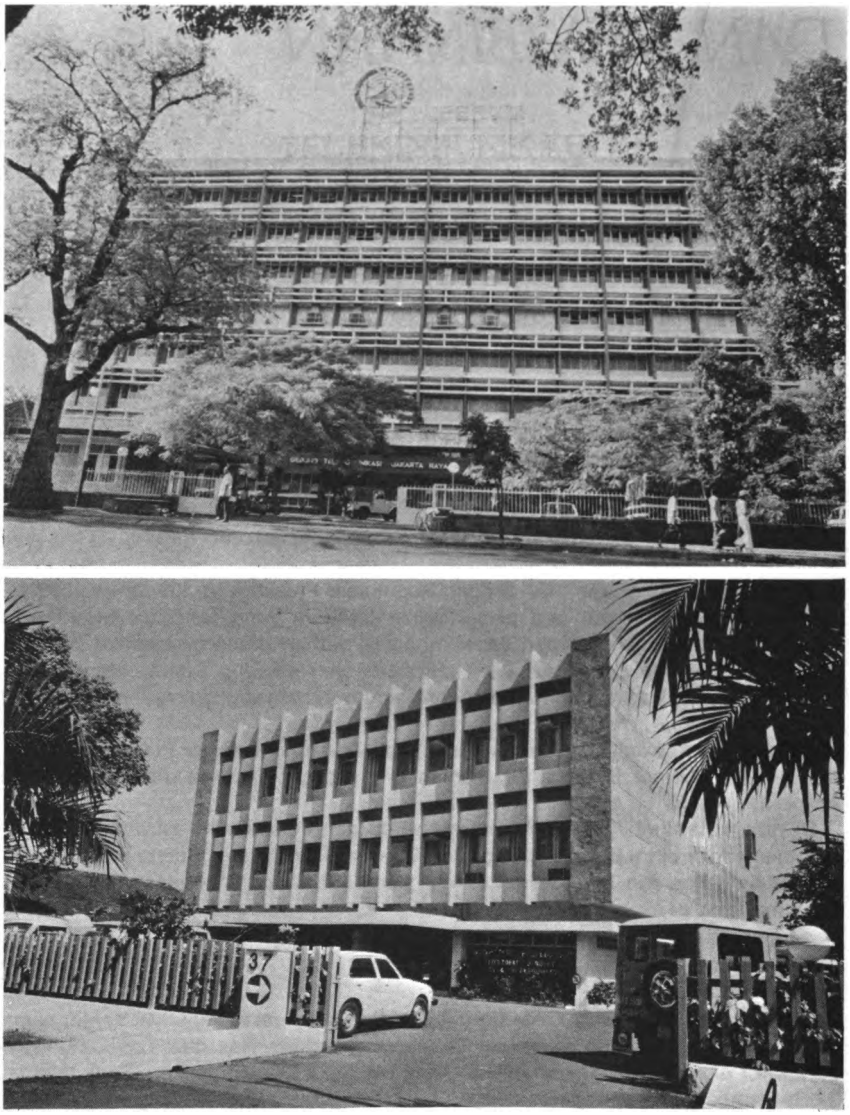
Pada tanggal 25 Juli 1966 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 Kabinet Dwikora dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera.

Di dalam Kabinet Ampera Departemen Pos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan.

1) Kantor Ditjen Postel.

Di awal permulaan masa Orde Baru Ditjen Postel belum mempunyai Kantor sama sekali. Untuk sementara karyawan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi berkantor di Gedung Telekomunikasi Jalan Merdeka Selatan Jakarta. Pada tanggal 27 September 1970 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Postel yang ke-25, Ditjen Postel pindah menempati Gedungnya yang baru di Jalan Kebon Sirih No.37 Jakarta Pusat hingga sekarang.

Digitized by Google



Gedung Telekomunikasi Jakarta Raya Jl. Merdeka Selatan 12 (gambar atas) dan Gedung Ditjen Postel Jl. Kebon Sirih 37 Jakarta Pusat (gambar bawah).

Digitized by Google

2) Tugas pokok dan fungsi Ditjen Postel.

Dalam surat keputusan Menteri Perhubungan No.415/U/Phb-75 khusus yang menyangkut "Tugas Pokok dan Fungsi" Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pasal 613 berbunyi:

Tugas Pokok Direktorat Jenderal Postel ialah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Perhubungan di bidang Pos dan Telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Kemudian dalam pasal 614 dijelaskan: Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 613 Direktorat Jenderal mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Postel dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Postel sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi lain dari Direktorat Jenderal Postel adalah fungsi bimbingan dan pembinaan serta sekaligus pengawasan terhadap kedua perusahaan antara lain berbentuk:

a) Bidang operasi Pos dan Giro:

(1) Penelaahan dan penilaian penyelenggaraan dinas pos dan giro.
(2) Pembinaan dan pengawasan ketepatgunaan perhubungan pos, yang meliputi pertukaran dan pengangkutan suratpos dan paketpos di dalam dan ke luar negeri serta penyelenggaraan dinas Pos dan Giro.
(3) Penelitian dan pengawasan terhadap penyelesaian kecurangan-kecurangan dan penindakannya dalam penyelenggaraan dinas pos.
(4) Penyusunan kebijaksanaan penetapan tarip Pos dan Giro.

b) Bidang telekomunikasi:

(1) Penelaahan dan penilaian penyelenggaraan operasional telekomunikasi.
(2) Pembinaan dan pengawasan ketepatgunaan dan kedayagunaan penyelenggaraan lalu lintas telekomunikasi.
(3) Penyusunan kebijaksanaan penetapan tarip telekomunikasi.
(4) Penelitian dan penelaahan teknis dan sistim telekomunikasi, meliputi antara lain penerapan kemajuan teknologi telekomunikasi.
(5) Pembinaan dan pengawasan pembukuan peralatan dan teknis pemeliharaan peralatan telekomunikasi.
(6) Penelitian dan pembinaan teknis rencana pembangunan telekomunikasi.

Digitized by Google

(7) Penyelenggaraan pencatatan dan pengawasan penggunaan frekuensi.

c) Bidang Administrasi:

(1) Bimbingan dan pembinaan tenaga kerja pada Perum Pos dan Giro dan Perum Telekomunikasi meliputi masalah-masalah penggajian, career planning, formasi dan manpower planning.
(2) Penelaahan Rencana Anggaran Belanja.
(3) Bimbingan dan pembinaan terhadap materiil, keuangan, hukum dan organisasi.

Di samping itu, fungsi lain Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah pengaturan perijinan seperti penerbitan dan penelitian, penggunaan frekuensi, penyelenggaraan monitoring dan lain-lain serta yang sangat penting adalah pengaturan dan pembinaan hukum sebagai fungsi pemerintahan yang menyangkut kedua perusahaan tersebut.

b. Pembentukan L.P.P. Postel, L.P.P.I. Postel dan P T INTI.

Untuk menampung bidang penelitian dan pengembangan Pos dan Telekomunikasi, dibentuklah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi, (L.P.P. Postel), yang mempunyai tugas pokok: menunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, ialah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan dalam bidang tehnologi.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi berfungsi sebagai:
1) pemberi nasehat tehnis kepada Direktur Jenderal Postel;
2) pelaksana kegiatan-kegiatan operasional penelitian dan pengembangan;
3) pembina pengaturan yang bersifat tehnis operasional penelitian dan pengembangan, yang meliputi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menentukan arah pembangunan Pos dan Telekomunikasi di Indonesia.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi tersebut berkedudukan di Jl. M. Toha 77 Bandung.

Pada tanggal 17 Pebruari 1967 Bengkel Pusat dan Laboratorium P.N Telekomunikasi diserahterimakan kepada Ir. Muchtil Joenoes sebagai Kepala pada Lembaga.

Tujuan yang hendak dicapai oleh L.P.P. Postel ialah:
1) Meningkatkan potensi kemampuan untuk memproduksi alat-alat/perangkat telekomunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Perum Telekomunikasi dan untuk kebutuhan market dalam negeri lainnya.
2) Untuk mencapai tujuan tersebut, secara bertahap mengadakan kerja sama di bidang tehnik dalam rangka transfer tehnologi.

Digitized by Google

Pada tahun 1966 diadakan kerja sama teknik antara Perum Telekomunikasi dengan Siemens AG untuk pengadaan peralatan telekomunikasi yang memerlukan sarana/unsur "industri". Tugas untuk merealisasikan kerja sama tersebut diserahkan kepada L.P.P. Postel. Dengan adanya unsur "industri" dalam tugas tersebut, maka status L.P.P. Postel berubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Postel, disingkat LPPI POSTEL.

Untuk meningkatkan aktivitas di bidang produksi, diadakan kerja sama teknik antara LPPI dengan JRC di bidang radio telekomunikasi. Dengan tersedianya kelengkapan faktor-faktor produksi dalam mendirikan suatu unit usaha yang bergerak di bidang industri telekomunikasi yang berdiri sendiri, dikeluarkanlah kebijaksanaan pembentukan Proyek Industri Telekomunikasi terpisah dari LPPI Postel dalam tahun 1973.

Dalam tahun 1974 dibentuk suatu team untuk menilai dan merumuskan pemisahan kekayaan yang berasal dari ex Perum Telekomunikasi yang masuk kedalam Proyek Industri Telekomunikasi. Sebagai kelanjutan dari hasil kerja team tersebut lahirlah P.P. No.34 tahun 1974 tentang persetujuan pendirian unit usaha dalam bidang industri telekomunikasi. Akhirnya dengan Akte Notaris Abdul Latif No.322 didirikanlah P.T. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), disingkat P.T INTI yang secara organisatoris berada di bawah Departemen Perhubungan cq Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pada tanggal 15 Januari 1976 L.P.P. Postel menyerahkan bidang penelitian Pos dan Giro kepada P.N Pos dan Giro, dan menyerahkan bidang penelitian dan pengembangan Telekomunikasi kepada Perum Telekomunikasi yang menampungnya di Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan P.N Pos dan Giro, dan di Pusat Pendidikan, Penelitian dan pengembangan Perum Telekomunikasi.

c. Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi.

Ketika P.N. Postel berkembang menjadi dua Perusahaan Negara, yaitu P.N Pos dan Giro dan P.N. Telekomunikasi, Pusat Pendidikan Pos dan Telekomunikasi tidak dipecah menjadi dua. Perubahan yang dialami Pusat Pendidikan Pos dan Telekomunikasi hanya pada namanya yang diganti menjadi Lembaga Pendidikan Postel. Lembaga Pendidikan Postel ini dibawahi Direktur Jenderal Postel.

Tugas pokok Lembaga Pendidikan Postel ialah menunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan yang sistematis dan terarah.

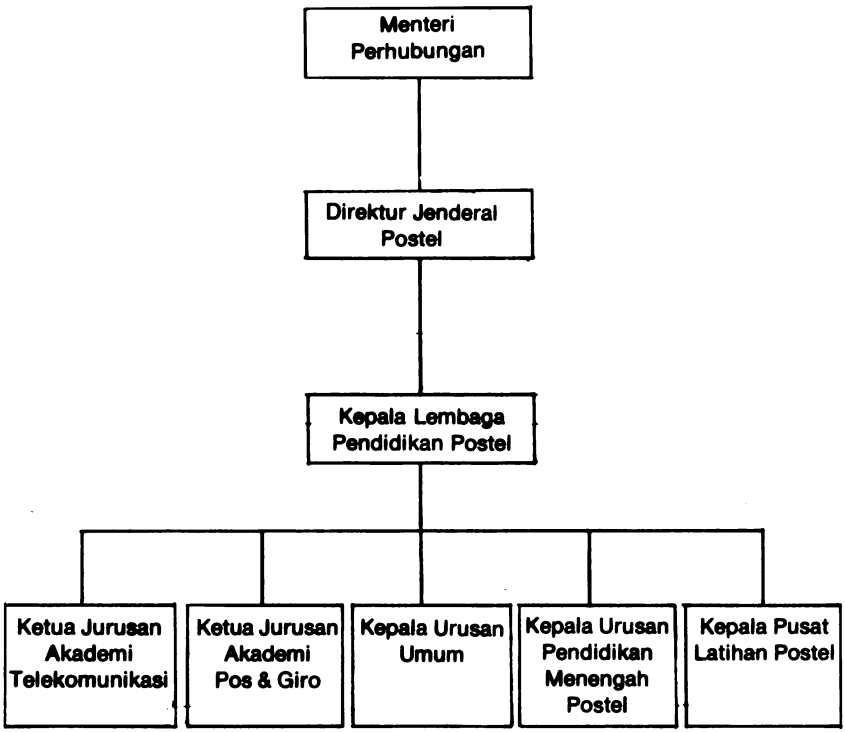
Lembaga Pendidikan Postel berfungsi sebagai pemberi nasehat teknis kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, pelaksana kegiatan-kegiatan operasional pendidikan, pembinaan pengaturan yang bersifat teknis operasional pendidikan, yang meliputi kegiatan-kegiatan pembinaan pelaksanaan operasional atas unsur-unsur pemerintahan dan pengusahaan melalui pendidikan dan latihan di bidang Pos dan Telekomunikasi sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih baik.

Lembaga Pendidikan Postel mula-mula dipimpin oleh seorang Direktur Lembaga

Digitized by Google

Pendidikan Pos dan Telekomunikasi disingkat Dirlemdik. Kemudian nama tersebut diganti dengan Kepala Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi disingkat Kalemdik.

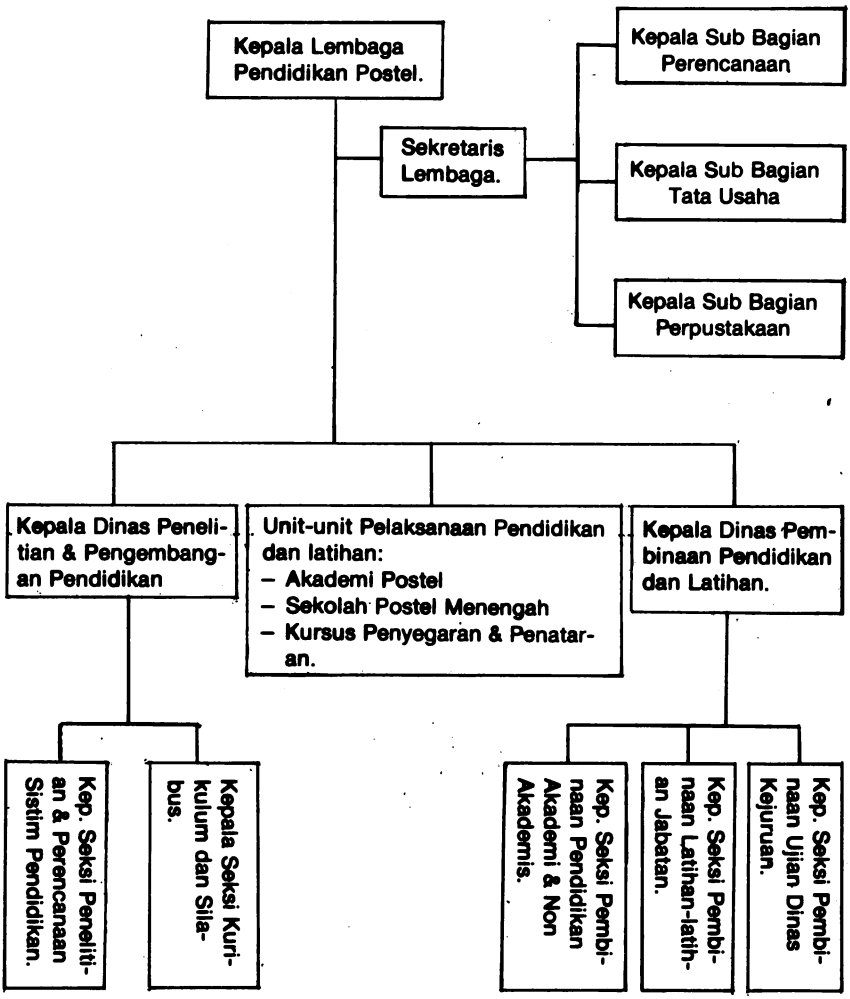
Dengan surat keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi tanggal 31-3-1970 No. 391a/K/Lemdik/70 ditetapkan struktur organisasi Lemdik Postel seperti di bawah ini.



Dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 15-3-1972 No.Sk 108/U/1972 ditetapkan "Struktur Organisasi, Uraian tugas dan Pokok-pokok Tata Kerja Departemen Perhubungan". Dalam bulan April dan Mei 1972 oleh suatu Panitia di Ditjen Postel disusun perincian Struktur Organisasi Ditjen Postel termasuk Lembaga Pendidikan Postel.

Digitized by Google

Akhirnya dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 30-1-1973 No. Km 16/U/Phb-73 ditetapkan struktur organisasi Lemdik Postel seperti yang tercantum di bawah ini.



Digitized by Google

Sementara itu diajukan saran agar tugas-tugas pendidikan dan latihan ditangani langsung oleh masing-masing perusahaan. Maka pada tanggal 15-1-1976 tugas-tugas pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan diserahterimakan dari Lemdik Postel dan L.P.P. kepada P N Pos dan Giro, dan Perum Telekomunikasi.

d. Pengalihan Tugas-tugas Pemerintahan dari Dewan Telekomunikasi kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan di bidang telekomunikasi, dengan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1969, Pemerintah menunjuk Menteri Perhubungan untuk atas nama Presiden memberikan bimbingan sehari-hari kepada Dewantel.

Sejak saat itu berangsur-angsur tugas-tugas pemerintahan di bidang telekomunikasi dikembalikan ke Departemen Perhubungan.

Dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1972 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 18/1975 fungsi Dewantel dikembalikan sebagai suatu badan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang telekomunikasi. Sedangkan tugas-tugas Dewan dalam bidang perijinan telekomunikasi dinyatakan dicabut dan penyelesaian hal yang berhubungan dengan itu diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Ketua Dewan. Peninjauan kedudukan Dewantel ini dilakukan dalam rangka penertiban dan penyempurnaan aparatur pemerintah dan untuk effisiensi dan effektivitas kerja di bidang telekomunikasi.

Atas dasar Keputusan Menteri Perhubungan No. Km.415/U/Phb-75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden No.44 dan 45 Tahun 1974, maka Direktorat Jenderal Postel yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Perhubungan, mempunyai fungsi antara lain pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Saat ini perjanjian di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Postel sesuai dengan fungsinya dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perijinan penyelenggaraan telekomunikasi ini meliputi antara lain:

- Pencatatan penggunaan frekuensi untuk ABRI.
- Penyelenggaraan telekomunikasi oleh instansi Pemerintah, Perwakilan Diplomatik maupun Swasta.

e. Perubahan Status Perusahaan Negara pada P N Pos dan Giro, dan P.N Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum.

Pada tahun 1967 dengan Instruksi Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara kedalam Tiga Bentuk Usaha

Digitized by Google

Negara, antara lain diinstruksikan supaya semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah lainnya yang membawahi perusahaan-perusahaan Negara dalam segala bentuknya supaya mengadakan persiapan penertiban/penyempurnaan/penyederhanaan dari setiap Usaha Negara, di mana modalnya sebagian atau seluruhnya terdiri baik dari kekayaan Negara yang dipisahkan maupun dari anggaran Belanja Negara, yang berupa Perusahaan Negara (PLN, PPN, PDN dan sebagainya), Perusahaan Daerah, Perseroan terbatas, Lembaga, Yayasan dan lain-lainnya untuk diarahkan kepada 3 (tiga) bentuk pokok usaha Negara, yaitu:

1. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Jawatan (Departemental Agency)
2. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Umum (Public Corporation).
3. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan (Public/State Company)

Dua tahun kemudian Presiden R.I. menetapkan Undang-Undang R.I. No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang. Bentuk-bentuk Usaha-usaha Negara yang dimaksud di atas dalam Undang-undang ini disingkat menjadi:

1. Perusahaan Jawatan (PERJAN).
2. Perusahaan Umum (PERUM).
3. Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Berbeda dengan pendirian P N Pos dan Giro, dan P N Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berturut-turut No.29 dan No.30 Tahun 1965 pada tanggal 6 Juli yang sama, perubahan status Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum pada kedua perusahaan itu tidak otomatis meskipun status P N (Perusahaan Negara) tidak ada lagi. Baru dalam tahun 1974 P N Telekomunikasi lebih dahulu menjadi Perum Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah lebih dahulu menjadi Perum Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah itu didahului dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.: Sk: 129/U/1970 tanggal 28 April 1970 yang memutuskan dan menetapkan bahwa P N Telekomunikasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1965 dilanjutkan sebagai Perusahaan Umum Telekomunikasi disingkat Perum Telekomunikasi. Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 28 April 1970. Mulai 9 Maret 1978 P N Pos dan Giro berubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9/1978.

Digitized by Google

1) Mutasi Direksi P.N. Pos dan Giro

Dalam Sejarah Pos dan Telekomunikasi, Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin Bab 1, Subbab 1, b, 2), telah diutarakan bahwa PN Pos dan Giro mula-mula dipimpin oleh satu Direksi yang terdiri dari Direktur Utama: Oesadi SH, Direktur Lalu Lintas Pos: Mas Soekandar, Direktur Giro dan Lalu Lintas Uang: Sachloel Nasoetion, Direktur Administrasi: R.R. Adiwinata dan Direktur Perlengkapan dan Pembangunan: Ardiani Muhammad Hardigaluh.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7-4-1967 No. P37/19/6 Phb., Direksi PN Pos dan Giro mengalami perubahan. Direktorat Administrasi dibagi menjadi dua Direktorat ialah Direktorat Personalia dan Tata Usaha yang dipimpin oleh Roesli Bc.AP, dan Direktorat Keuangan yang dipimpin oleh Rebo Bc.AP. Berhubung dengan itu Direksi PN Pos dan Giro berwajah baru sebagai berikut:



OESADI SH
Direktur Utama



MAS SOEKANDAR Bc AP
Direktur Lalu Lintas Pos.



SACHLOEL NASOETION Bc AP
Direktur Giro & Lalu Lintas Uang.

Digitized by Google



ROESLI Bc AP
Direktur Personalia & Tata Usaha



REBO Bc AP
Direktur Keuangan



A.M. HARDIGALUH
Direktur Perlengkapan & Pembangunan.

Pada dasarnya perubahan Struktur Organisasi termaksud hanya mengenai Direktorat Administrasi yang berubah menjadi 2 (dua) Direktorat yakni Direktorat Personalia dan Tata Usaha yang membawahi Bagian-bagian Pegawai, Kesejahteraan Pegawai dan Umum Administrasi serta Direktorat Keuangan yang membawahi satu Bagian yakni Bagian Keuangan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 11-4-1968 No. P 37/5/14/ Phb, yang berlaku mulai tanggal 11 April 1968 telah diadakan pengangkatan Direksi baru P N Pos dan Giro dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama P N Pos dan Giro ..... R.R. Adiwinata, Bc. AP
Direktur Lalu-lintas Pos ..... Soekandar, Bc. AP
Direktur Giro dan Lalu-Lintas Uang ..... R. Woerjadi, Bc. AP
Direktur Personalia dan Tata Usaha ..... M. Soekendar, Bc. AP
Direktur Keuangan ..... Rebo, Bc. A P
Direktur Perlengkapan dan Pembangunan ..... Roesli, Bc. A P

Pelantikan dari anggota-anggota Direksi tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 16 April 1968 di Aula Lembaga Pendidikan Postel Bandung.

Digitized by Google

Susunan Direksi P.N. POS & GIRO
Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 11-4-1968 No. P 37/5/14/Phb.



Direksi PN Pos dan Giro bersama 12 Kepala Daerah Pos dan Giro. Duduk dari kiri ke kanan: 1. Rebo Bc.A.P., 2. R. Woerjadi Bc.A.P., 3. M. Soekendar Bc.A.P., 4. Soekandar Bc.A.P. dan 5. Roesli Bc.A.P.

Digitized by Google

Mutasi berikutnya berlangsung dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 28-8-1971 No. 97/M Tahun 1971 yaitu dengan diangkatnya Direksi baru P N Pos dan Giro dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama ..... R. Soebagjo, Bc.AP
Direktur Operasi ..... Mas Soelaeman, Bc.AP
Direktur Keuangan ..... Moeljoto, Bc.AP
Direktur Personalia dan Tata Usaha ..... Mardijono, Bc.AP
Direktur Perlengkapan dan Pembangunan ..... R. Atang, Bc. AP

Pelantikan Direksi baru tersebut berlangsung pada tanggal 10 September 1971 bertempat di Departemen Perhubungan Jakarta.

Dengan berakhirnya masa jabatan para anggota Direksi P.N. Pos dan Giro yang dipimpin oleh Dirutpos R. Soebagjo, Bc.A.P. maka para anggota Direksi P N Pos dan Giro lama telah diberhentikan dengan hormat serta telah diangkat Direksi P.N. Pos dan Giro baru yang dipimpin oleh Dirutpos Moeljoto, Bc.A.P. dengan Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 27-12-1976 No. 157/M Tahun 1976.

Susunan Direksi selengkapnya sebagai berikut:

Direktur Utama ..... Moeljoto, Bc. A.P.
Direktur Operasi ..... H. Ahmad Mustapa, Bc.A.P.
Direktur Personalia dan Tata Usaha ..... Liliek Soehadi, Bc. A.P.
Direktur Keuangan ..... Soekarno, Bc. A.P.
Direktur Perlengkapan dan Pembangunan ..... Soetrisno, Bc. A.P.

Pelantikan para anggota Direksi tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan di Aula Departemen Perhubungan Jakarta tanggal 7 Januari 1977.

Digitized by Google

Susunan Direksi P.N. POS & GIRO
Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 28-8-1971 No. 97/M Tahun 1971.



R. SOEBAGJO Bc AP
Direktur Utama



MAS SOELAEMAN Bc AP
Direktur Operasi



MOELJOTO Bc AP
Direktur Keuangan

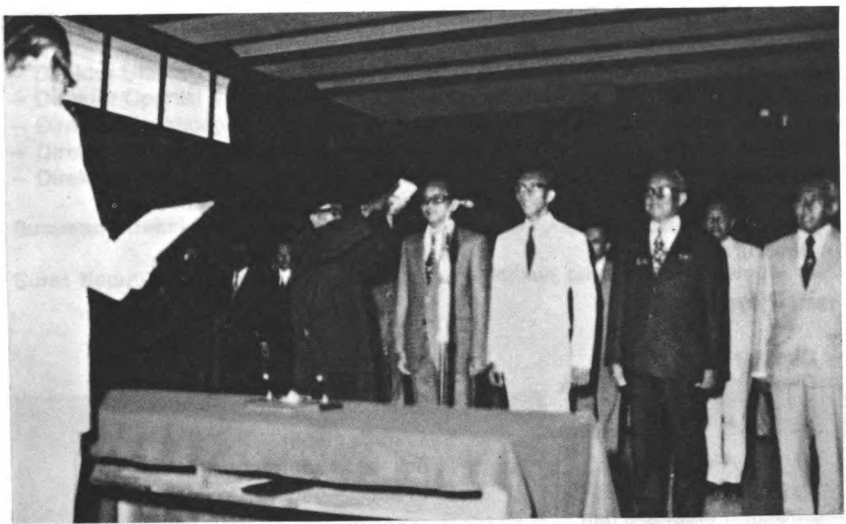


MARDIJONO Bc AP
Direktur Personalia & Tata Usaha

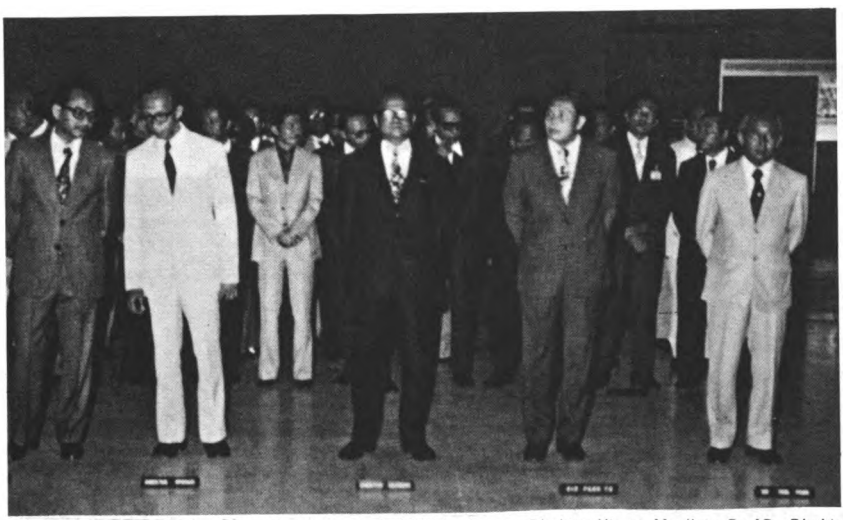


R. ATANG Bc AP
Direktur Perlengkapan & Pembangunan

Digitized by Google



Direksi baru PN Pos dan Giro sedang diambil sumpahnya oleh Menteri Perhubungan Prof.Dr. H. Emil Salim, tanggal 7 Januari 1977 (gambar atas).



Direksi baru PN Pos dan Giro selengkapnya dari kiri ke kanan: Direktur Utama Moeljoto Bc.AP., Direktur Operasi H.A. Bc.AP., Direktur Keuangan Soekarno Bc.AP., Direktur Personalia dan Tata Usaha Liliek Soehadi Bc.AP. dan Direktur Perlengkapan dan Pembangunan Soetrisno Bc.AP.

Digitized by Google

2) Mutasi Direksi P.N. Telekomunikasi.

1967 - 1968

- Direktur Utama : Sabar Soediman
- Direktur Research dan Planning: Ir. Sutanggar Tengker
- Direktur Operasi : Ir. Muchtil Joenoes
- Direktur Perencanaan : Ir. Soekarno Abdurrachman
- Direktur Administrasi : Suwardi
- Direktur Perlengkapan : R. Soenarjo Martosendjojo

1968 - 1970

- Direktur Utama : Sabar Soediman
- Direktur Operasi & Teknik : Ir. Sutanggar Tengker diganti Ir. Rollin sebagai Pejabat Sementara (1969)
- Direktur Perencanaan : Ir. Sukarno Abdurrachman
- Direktur Keuangan : RMA Surianegara
- Direktur Personalia dan Tata Usaha : H. Abdoessoeki
- Direktur Perlengkapan : Ir. Rollin

1970 - 1973

- Direktur Utama : Ir. Sutanggar Tengker
- Direktur Operasi & Teknik : Ir. Willy Munandir
- Direktur Keuangan : R. Van Raalten (Tahun 1971 diganti oleh Drs. Made Martasedana)
- Direktur Personalia & Tata usaha: Haroen Al Rasyid A.H.
- Direktur Perlengkapan : Idris Adjam

1973 - 1970

- Direktur Utama : Ir. Willy Munandir M
- Direktur Operasi & Teknik : Ir. Theo Suryawan
- Direktur Keuangan : Drs. Made Martasedana
- Direktur Personalia & Tata Usaha: Ir. Boedi Santoso
- Direktur Perlengkapan : R. Soedihardjo, Bc.T.T.

Digitized by Google

1978 - Sekarang

- Direktur Utama : Ir. Willy Munandir M
- Direktur Operasi & Teknik : Ir. Boedi Santoso
- Direktur Keuangan : Drs. Made Martasedana
- Direktur Personalia & Tata Usaha: Ir. Suhana
- Direktur Perlengkapan : Soemardi, Bc. T.T.

Susunan Direksi P N Telekomunikasi

Surat Keputusan Menteri P.D.P.T.P. pada pelantikan tanggal 20 Nopember 1965.



SABARSOEDIMAN
Direktur Utama



Ir. MUCHTIL JOENOES
Direktur Operasi



Ir. SUTANGGAR TENGKER
Direktur Teknik



SOEWARDI
Direktur Administrasi



Ir. SOEKARNO ABDULHACHMAN
Direktur Pembangunan



RADEN SOENARJO MARTOSENDJOJO
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google

Susunan Direksi P.N. Telekomunikasi

Dari tahun 1967 sampai tahun 1968.



SABAR SOEDIMAN
Direktur Utama



Ir. SUTANGGAR TENGKER
Direktur Research & Planning.



Ir. MUCHTIL JOENOES
Direktur Operasi



Ir. SUKARNO ABDURRACHMAN
Direktur Perencana



SOEWARDI
Direktur Administrasi



R. SUNARYO MARTOSENDJOJO
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google

Susunan Direksi P N Telekomunikasi

Dari tahun 1968 sampai tahun 1970
Pada tahun 1969 Ir. Sutanggar Tengker diganti oleh Ir. Rollin sebagai Pejabat Sementara.



SABARSOEDIMAN
Direktur Utama



Ir. SUTANGGAR TENGKER
Direktur Operasi & Teknik



Ir. SUKARNO ABDUR; RACHMAN
Direktur Perencanaan



RMA. SURIANEGARA
Direktur Keuangan



H. ABDOESSOEKI
Direktur Personalia & Tata Usaha



Ir. ROLLIN
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google

Susunan Direksi Perum Telekomunikasi

Dari tahun 1970 sampai tahun 1973.

Pada tahun 1971 R. Van Raalten diganti oleh Drs. Made Martasedana.



Ir. SUTANGGAR TENGKER
Direktur Utama



Ir. WILLY MUNANDIR M.
Direktur Operasi & Teknik



R. VAN RAALTEN
Direktur Keuangan



HAROEN AL RASYID A.H.
Direktur Personalia & Tata Usaha.

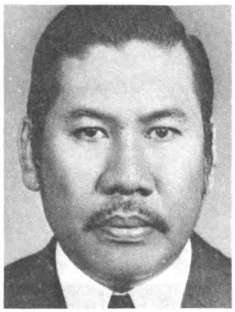


IDRIS ADJAM
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google

Susunan Direksi Perum Telekomunikasi

Dari tahun 1973 sampai tahun 1978.



Ir. WILLY MUNANDIR M
Direktur Utama



Ir. THEO SURYAWAN
Direktur Operasi & Teknik



Drs. MADE MARTA-SEDANA
Direktur Keuangan



Ir. BOEDI SANTOSO
Direktur Personalia & Tata Usaha.



R. SOEDIHARDJO Bc TT
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google



Bandung, 26 September 1969.
Dirjen Postel Soehardjono, sedang menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota Badan Penasehat Perusahaan (BPP) PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi (PPHOS).

Digitized by Google



Jakarta, 23 Maret 1978
Direksi baru Perumtel sedang dilantik oleh Menteri Perhubungan Prof. Dr. Emil Salim. Dari kiri kekanan: Ir. Willy Munandir M. Direktur Utama, Ir. Boedi Santoso - Direktur Operasi dan Teknik, Soemardi Bc.T.T. - Direktur Perlengkapan, Ir. Suhana - Direktur Personalia dan Tata Usaha dan Drs. Made Martasedana - Direktur Keuangan.



Menteri Perhubungan Prof. Dr. Emil Salim menyerahkan petikan Surat Keputusan kepada Dirut Perumtel Ir. Willy Munandir M.

Digitized by Google



Jakarta, 28 Juli 1978.
Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin sedang melantik Dirjen Postel yang baru, Drs. Suryadi (X) dalam suatu upacara di Departemen Perhubungan.



Penyerahan memorandum serah terima jabatan Dirjen Postel dari pejabat lama Soehardjono (kanan) kepada pejabat baru Drs. Suryadi (kiri pakai peci).

Digitized by Google

f. Badan Penasehat Perusahaan.

Salah satu aktivitas Organisasi massa yang ada di P N Pos dan Giro/P.N. Telekomunikasi ialah ikut serta duduk dalam Badan Penasehat Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tanggal 27-9-1968 No. 1382/Dirjen dibentuk Badan Badan Penasehat Perusahaan P N Pos dan Giro dan Badan Penasehat P N Telekomunikasi. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tanggal 22-9-1969 No. 1/Dirjen telah diangkat para anggota Badan Penasehat Perusahaan pada P N Pos dan Giro yang terdiri atas 15 (lima belas) orang, antara lain:

1). Wakil dari Direksi P.N Pos dan Giro
2). Wakil-wakil dari Organisasi massa, yaitu:
   S.S.P.T.T.
   G.B. Postel/Sarbumusi
   O.B. Postel/Gossi
   Kespekri
   Persatuan Karyawan Wanita Postel
   K.B. Postel/Buruh Marhaenis
   C.K.V. Postel/L.V.R.I.
3). Wakil dari Departemen Keuangan
4). Wakil dari Departemen Perdagangan
5). Wakil dari Departemen Dalam Negeri
6). Wakil dari Departemen Luar Negeri
7). Wakil dari Direktorat Jenderal Pariwisata
8). Wakil dari Perbankan.

g. Masa Direktur Jenderal Soehardjono (4-8-1966 s/d 28-7-1978)

Keadaan Pos dan Telekomunikasi pada awal Orde Baru masih memprihatinkan. Pendirian-pendirian Pos banyak yang tidak memenuhi syarat dan banyak dipakai ruangan-ruangan sewaan. Dengan demikian Dinas Pos dan Telekomunikasi tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan maka sejak awal Orde Baru melalui Pelita, Pemerintah telah membangun Kantor Pos dan Giro dan menambahkan sarana alat angkut baik roda dua ataupun roda empat.

Disamping pembangunan sarana fisik juga pendidikan dan ketrampilan ditingkatkan melalui kursus-kursus dan pendidikan di dalam ataupun di luar negeri.

Dengan usaha-usaha peningkatan sarana dan ketrampilan pegawai maka angka-angka produksi jasa Pos dan Giro menampakkan angka-angka kenaikan*)

Di bidang Telekomunikasi, keadaan pertelekomunikasian pada awal Orde Baru

*) *Memorandum Serah-terima Jabatan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 28 Juli 1978, Hal 1 - 4, DITJEN POSTEL, Jakarta, 1978.*

Digitized by Google

juga masih memprihatinkan. Baik transmisi maupun sentral-sentral telepon dan telegrap.

Transmisi masih menggunakan peralatan radio frekuensi tinggi (HF), yang belum dapat dibuka 24 jam sehari sehingga hubungan antar kota apalagi dengan tempat-tempat terpencil sangat sulit, bahkan tidak bisa.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, Pemerintah membangun sarana telekomunikasi, baik transmisi maupun sentral-sentral telepon dan telegrap/telex dan jaringan kabel lokal. Dalam Pelita I Pemerintah telah melanjutkan pembangunan Microwave Jawa Bali. Proyek ini kemudian diresmikan penggunaannya oleh Presiden R.I. pada tanggal 10 Maret 1973.

Setelah pengoperasian proyek ini, hubungan komunikasi dengan beberapa kota di Jawa dan Bali menjadi semakin lancar. Pemakai jasa telepon di Indonesia mulai menikmati manfaatnya dengan mengadakan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).

Proyek berikutnya adalah proyek microwave Trans Sumatera. Proyek ini diresmikan pemakaiannya oleh Presiden R.I. pada tanggal 7 Agustus 1975. Dengan demikian kedua proyek ini membentang dari Denpasar hingga Medan. Siaran Televisipun mulai dapat dinikmati oleh para penonton di Sumatera.

Proyek microwave lainnya adalah Proyek Microwave Indonesia Bagian Timur. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden R.I. pada tanggal 16 Juni 1978.

Hubungan Surabaya - Banjarmasin dihubungkan dengan Proyek Troposcatter. Penggunaannya diresmikan pada tanggal 31 Desember 1975.

Proyek-proyek lainnya adalah pembangunan proyek transmisi HF/UHF untuk beberapa daerah lainnya.

Sejalan dengan kebijaksanaan yang dianut Pemerintah yaitu yang mendasarkan politik luar negeri yang bebas aktif dan membuka kesempatan penanaman modal asing di dalam negeri, maka dicetuskanlah gagasan pemakaian sistim satelit untuk hubungan dengan luar negeri pada tahun 1967.

Tahun 1968 dibangunlah Stasiun Bumi Jatiluhur dan selesai pada tahun 1969. Sejak 29 September 1969 dengan resmi Indonesia memasuki era komunikasi satelit.

Sebagai tindak lanjut dari pemakaian satelit komunikasi internasional maka untuk memperlancar komunikasi dalam negeri sebagai penunjang tercapainya Wawasan Nusantara pada tahun 1970 telah dilakukan penelaahan yang mendalam atas rencana pembangunan satelit domestik yang kemudian dikenal dengan nama Sistim Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) PALAPA.

Tanggal 15-2-1975 pembangunan SKSD PALAPA ditanda-tangani dan pada tanggal 16-8-1976 proyek ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden R.I.

Proyek SKSD PALAPA dinyatakan sebagai proyek yang menguntungkan melalui analisa ekonomis, tetapi lebih dari itu SKSD PALAPA memberikan keuntungan-keuntungan non ekonomis yang tidak bisa diukur dengan jumlah uang.

SKSD PALAPA beroperasi sebagai pemersatu seluruh wilayah Indonesia secara teknik telekomunikasi*).

*) *Ir. Willy Munandir Mangoendiprodjo, Komunikasi Lewat Satelit, hal. 37, HUMAS PERUMTEL, Bandung.*

Digitized by Google

TVRI telah memanfaatkan sistim ini untuk mewujudkan jaringan TV Nasional. Kemungkinan lain terbuka untuk pemanfaatan di bidang pendidikan, pertahanan dan keamanan, riset dan industri ruang angkasa.

Di bidang organisasi dan personalia pada awal Orde Baru, Direktorat Jenderal POSTEL memiliki jumlah pegawai dan tenaga staf yang sangat sedikit dan terbatas sekali. Hal ini dapat dimaklumi berhubung Direktorat Jenderal POSTEL merupakan Direktorat baru dan perlu dibina dan dikembangkan dalam waktu singkat.

Sekretaris Direktorat Jenderal yang pertama ialah Raden Roekmin Adiwinata, Bc. A.P. dengan Kepala Direktorat Pos dan Giro: Nyoman Rai dan Kepala Direktorat Telekomunikasi: Ir. M.J. Sahertian untuk masa 1966 - 1968.

Sekretaris Direktorat Jenderal yang kedua, untuk masa 1968 - 1969, ialah Ir. M.J. Sahertian dengan Kepala Direktorat Pos dan Giro: Sachloel Nasution, Bc.A.P. dan Kepala Direktorat Telekomunikasi dirangkap oleh Ir. M.J. Sahertian.

PARA SEKDITJEN SEMASA DIRJEN POSTEL SOEHARDJONO:
(1966 - 1978)



Rd. R. ADIWINATA Bc.A.P.
1966 - 1968



Ir. M.J. SAHERTIAN
1968 - 1969



SACHLOEL NASOETION Bc.AP
1973 - 1974



Ir. ROLLIN
1974 - kini

Digitized by Google

PARA KEPALA DIREKTORAT POS DAN GIRO SEMASA DIRJEN POSTEL SOEHARDJONO: (1966 - 1978)



NYOMAN RAI
1966 - 1968



SACHLOEL NASOETION Bc.A.P.
(merangkap Sekditjen)
1968 - 1971



MAS SOEKANDAR Bc.A.P.
1971 - 1974



ROESLI Bc.A.P.
1974 - 1976



RADEN SOEBAGJO Bc.A.P.
1976 - 1977



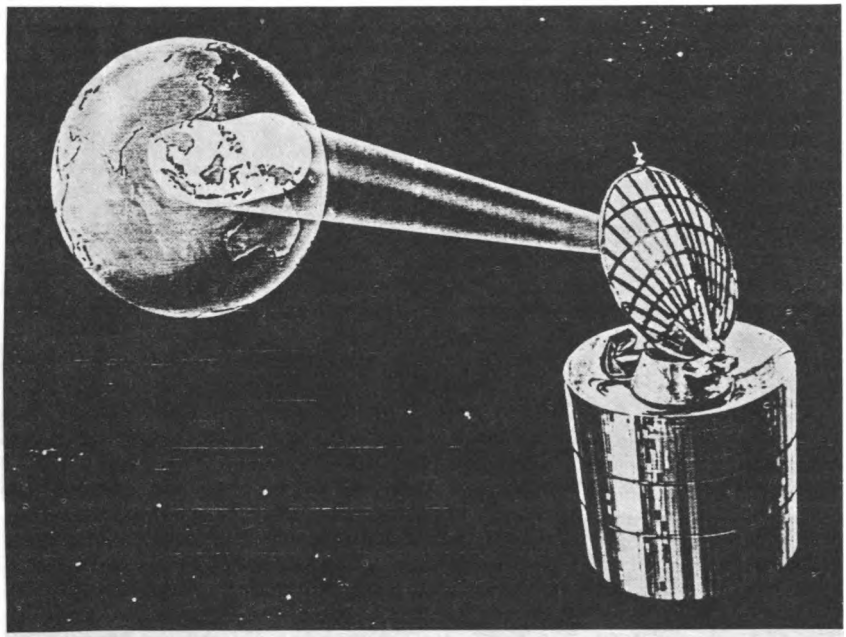
MAS SOELAEMAN Bc.A.P.
1977 - kini

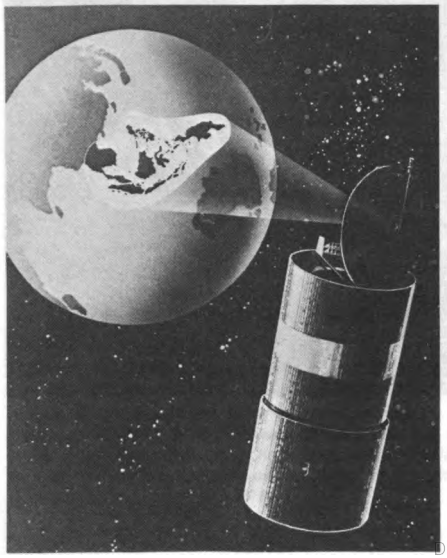
Sekretaris Direktorat Jenderal yang ketiga, masa 1969 - 1973, ialah Sachloel Nasution, Bc.A.P. dengan Kepala Direktorat Pos dan Giro: M. Soekandar, Bc.A.P. dan Kepala Direktorat Telekomunikasi: Ir. J. Sutanggar Tengker.

Sekretaris Direktorat Jenderal yang keempat, masa 1973 hingga kini, ialah Ir. Rollin dengan Kepala Direktorat Pos dan Giro: M. Soeleman, Bc.A.P. dan Kepala Direktorat Telekomunikasi: Ir. J. Sutanggar Tengker/Ir. Theo Suryawan.

Demikianlah beberapa keberhasilan di bidang operasi dan pembangunan dalam periode Pelita I dan II dimasa Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh Direktur Jenderal POSTEL yang pertama Mayor Jenderal Soehardjono. Uraian lebih lanjut akan dimuat dalam Bab III.

Digitized by Google





Gambar atas:
Model Satelit Palapa Generasi Pertama (Palapa A)
Gambar bawah:
Satelit penggantinya Palapa Generasi Kedua (Palapa B).

Digitized by Google

Sementara itu diajukan saran agar tugas-tugas pendidikan dan latihan ditangani langsung oleh masing-masing perusahaan. Maka pada tanggal 15-1-1976 tugas-tugas pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan diserahterimakan dari Lemdik Postel dan L.P.P. kepada P N Pos dan Giro, dan Perum Telekomunikasi.

d. Pengalihan Tugas-tugas Pemerintahan dari Dewan Telekomunikasi kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan di bidang telekomunikasi, dengan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1969, Pemerintah menunjuk Menteri Perhubungan untuk atas nama Presiden memberikan bimbingan sehari-hari kepada Dewantel.

Sejak saat itu berangsur-angsur tugas-tugas pemerintahan di bidang telekomunikasi dikembalikan ke Departemen Perhubungan.

Dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1972 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 18/1975 fungsi Dewantel dikembalikan sebagai suatu badan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang telekomunikasi. Sedangkan tugas-tugas Dewan dalam bidang perijinan telekomunikasi dinyatakan dicabut dan penyelesaian hal yang berhubungan dengan itu diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Ketua Dewan. Peninjauan kedudukan Dewantel ini dilakukan dalam rangka penertiban dan penyempurnaan aparatur pemerintah dan untuk effisiensi dan effektivitas kerja di bidang telekomunikasi.

Atas dasar Keputusan Menteri Perhubungan No. Km.415/U/Phb-75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden No.44 dan 45 Tahun 1974, maka Direktorat Jenderal Postel yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Perhubungan, mempunyai fungsi antara lain pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Saat ini perjanjian di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Postel sesuai dengan fungsinya dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perijinan penyelenggaraan telekomunikasi ini meliputi antara lain:

- Pencatatan penggunaan frekuensi untuk ABRI.
- Penyelenggaraan telekomunikasi oleh instansi Pemerintah, Perwakilan Diplomatik maupun Swasta.

e. Perubahan Status Perusahaan Negara pada P N Pos dan Giro, dan P.N Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum.

Pada tahun 1967 dengan Instruksi Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara kedalam Tiga Bentuk Usaha

Digitized by Google

Negara, antara lain diinstruksikan supaya semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah lainnya yang membawahi perusahaan-perusahaan Negara dalam segala bentuknya supaya mengadakan persiapan penertiban/penyempurnaan/penyederhanaan dari setiap Usaha Negara, di mana modalnya sebagian atau seluruhnya terdiri baik dari kekayaan Negara yang dipisahkan maupun dari anggaran Belanja Negara, yang berupa Perusahaan Negara (PLN, PPN, PDN dan sebagainya), Perusahaan Daerah, Perseroan terbatas, Lembaga, Yayasan dan lain-lainnya untuk diarahkan kepada 3 (tiga) bentuk pokok usaha Negara, yaitu:

1. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Jawatan (Departemental Agency)
2. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Umum (Public Corporation).
3. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan (Public/State Company)

Dua tahun kemudian Presiden R.I. menetapkan Undang-Undang R.I. No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang. Bentuk-bentuk Usaha-usaha Negara yang dimaksud di atas dalam Undang-undang ini disingkat menjadi:

1. Perusahaan Jawatan (PERJAN).
2. Perusahaan Umum (PERUM).
3. Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Berbeda dengan pendirian P N Pos dan Giro, dan P N Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berturut-turut No.29 dan No.30 Tahun 1965 pada tanggal 6 Juli yang sama, perubahan status Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum pada kedua perusahaan itu tidak otomatis meskipun status P N (Perusahaan Negara) tidak ada lagi. Baru dalam tahun 1974 P N Telekomunikasi lebih dahulu menjadi Perum Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah lebih dahulu menjadi Perum Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah itu didahului dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.: Sk: 129/U/1970 tanggal 28 April 1970 yang memutuskan dan menetapkan bahwa P N Telekomunikasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1965 dilanjutkan sebagai Perusahaan Umum Telekomunikasi disingkat Perum Telekomunikasi. Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 28 April 1970. Mulai 9 Maret 1978 P N Pos dan Giro berubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9/1978.

Digitized by Google

1) Mutasi Direksi P.N. Pos dan Giro

Dalam Sejarah Pos dan Telekomunikasi, Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin Bab 1, Subbab 1, b, 2), telah diutarakan bahwa PN Pos dan Giro mula-mula dipimpin oleh satu Direksi yang terdiri dari Direktur Utama: Oesadi SH, Direktur Lalu Lintas Pos: Mas Soekandar, Direktur Giro dan Lalu Lintas Uang: Sachloel Nasoetion, Direktur Administrasi: R.R. Adiwinata dan Direktur Perlengkapan dan Pembangunan: Ardiani Muhammad Hardigaluh.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7-4-1967 No. P37/19/6 Phb., Direksi PN Pos dan Giro mengalami perubahan. Direktorat Administrasi dibagi menjadi dua Direktorat ialah Direktorat Personalia dan Tata Usaha yang dipimpin oleh Roesli Bc.AP, dan Direktorat Keuangan yang dipimpin oleh Rebo Bc.AP. Berhubung dengan itu Direksi PN Pos dan Giro berwajah baru sebagai berikut:



OESADI SH
Direktur Utama



MAS SOEKANDAR Bc AP
Direktur Lalu Lintas Pos.



SACHLOEL NASOETION Bc AP
Direktur Giro & Lalu Lintas Uang.

Digitized by Google



ROESLI Bc AP
Direktur Personalia & Tata Usaha



REBO Bc AP
Direktur Keuangan



A.M. HARDIGALUH
Direktur Perlengkapan & Pembangunan.

Pada dasarnya perubahan Struktur Organisasi termaksud hanya mengenai Direktorat Administrasi yang berubah menjadi 2 (dua) Direktorat yakni Direktorat Personalia dan Tata Usaha yang membawahi Bagian-bagian Pegawai, Kesejahteraan Pegawai dan Umum Administrasi serta Direktorat Keuangan yang membawahi satu Bagian yakni Bagian Keuangan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 11-4-1968 No. P 37/5/14/ Phb, yang berlaku mulai tanggal 11 April 1968 telah diadakan pengangkatan Direksi baru P N Pos dan Giro dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama P N Pos dan Giro ..... R.R. Adiwinata, Bc. AP
Direktur Lalu-lintas Pos ..... Soekandar, Bc. AP
Direktur Giro dan Lalu-Lintas Uang ..... R. Woerjadi, Bc. AP
Direktur Personalia dan Tata Usaha ..... M. Soekendar, Bc. AP
Direktur Keuangan ..... Rebo, Bc. A P
Direktur Perlengkapan dan Pembangunan ..... Roesli, Bc. A P

Pelantikan dari anggota-anggota Direksi tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 16 April 1968 di Aula Lembaga Pendidikan Postel Bandung.

Digitized by Google

Susunan Direksi P.N. POS & GIRO
Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 11-4-1968 No. P 37/5/14/Phb.



Direksi PN Pos dan Giro bersama 12 Kepala Daerah Pos dan Giro. Duduk dari kiri ke kanan: 1. Rebo Bc.A.P., 2. R. Woerjadi Bc.A.P., 3. M. Soekendar Bc.A.P., 4. Soekandar Bc.A.P. dan 5. Roesli Bc.A.P.

Digitized by Google

Mutasi berikutnya berlangsung dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 28-8-1971 No. 97/M Tahun 1971 yaitu dengan diangkatnya Direksi baru P N Pos dan Giro dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama ..... R. Soebagjo, Bc.AP
Direktur Operasi ..... Mas Soelaeman, Bc.AP
Direktur Keuangan ..... Moeljoto, Bc.AP
Direktur Personalia dan Tata Usaha ..... Mardijono, Bc.AP
Direktur Perlengkapan dan Pembangunan ..... R. Atang, Bc. AP

Pelantikan Direksi baru tersebut berlangsung pada tanggal 10 September 1971 bertempat di Departemen Perhubungan Jakarta.

Dengan berakhirnya masa jabatan para anggota Direksi P.N. Pos dan Giro yang dipimpin oleh Dirutpos R. Soebagjo, Bc.A.P. maka para anggota Direksi P N Pos dan Giro lama telah diberhentikan dengan hormat serta telah diangkat Direksi P.N. Pos dan Giro baru yang dipimpin oleh Dirutpos Moeljoto, Bc.A.P. dengan Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 27-12-1976 No. 157/M Tahun 1976.

Susunan Direksi selengkapnya sebagai berikut:

Direktur Utama ..... Moeljoto, Bc. A.P.
Direktur Operasi ..... H. Ahmad Mustapa, Bc.A.P.
Direktur Personalia dan Tata Usaha ..... Liliek Soehadi, Bc. A.P.
Direktur Keuangan ..... Soekarno, Bc. A.P.
Direktur Perlengkapan dan Pembangunan ..... Soetrisno, Bc. A.P.

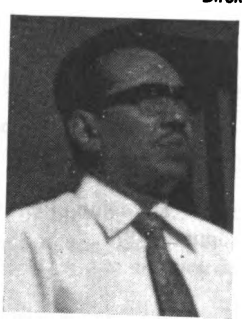
Pelantikan para anggota Direksi tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan di Aula Departemen Perhubungan Jakarta tanggal 7 Januari 1977.

Digitized by Google

Susunan Direksi P.N. POS & GIRO
Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 28-8-1971 No. 97/M Tahun 1971.



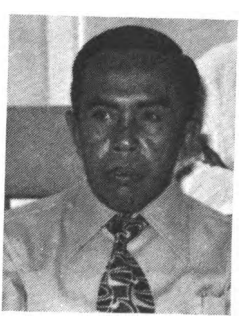
R. SOEBAGJO Bc AP
Direktur Utama



MAS SOELAEMAN Bc AP
Direktur Operasi



MOELJOTO Bc AP
Direktur Keuangan



MARDIJONO Bc AP
Direktur Personalia & Tata Usaha



R. ATANG Bc AP
Direktur Perlengkapan & Pembangunan

Digitized by Google



Direksi baru PN Pos dan Giro sedang diambil sumpahnya oleh Menteri Perhubungan Prof.Dr. H. Emil Salim, ***tanggal 7 Januari 1977 (gambar atas).***



Direksi baru PN Pos dan Giro selengkapnya dari kiri ke kanan: Direktur Utama Moeljoto Bc.AP., Direktur ***Operasi H.A. Bc.AP., Direktur Keuangan Soekarno Bc.AP., Direktur Personalia dan Tata Usaha Liliek Soehadi Bc.AP. dan Direktur Perlengkapan dan Pembangunan Soetrisno Bc.AP.***

Digitized by Google

2) Mutasi Direksi P.N. Telekomunikasi.

1967 - 1968

- Direktur Utama : Sabar Soediman
- Direktur Research dan Planning: Ir. Sutanggar Tengker
- Direktur Operasi : Ir. Muchtil Joenoes
- Direktur Perencanaan : Ir. Soekarno Abdurrachman
- Direktur Administrasi : Suwardi
- Direktur Perlengkapan : R. Soenarjo Martosendjojo

1968 - 1970

- Direktur Utama : Sabar Soediman
- Direktur Operasi & Teknik : Ir. Sutanggar Tengker diganti Ir. Rollin sebagai Pejabat Sementara (1969)
- Direktur Perencanaan : Ir. Sukarno Abdurrachman
- Direktur Keuangan : RMA Surianegara
- Direktur Personalia dan Tata Usaha : H. Abdoessoeki
- Direktur Perlengkapan : Ir. Rollin

1970 - 1973

- Direktur Utama : Ir. Sutanggar Tengker
- Direktur Operasi & Teknik : Ir. Willy Munandir
- Direktur Keuangan : R. Van Raalten (Tahun 1971 diganti oleh Drs. Made Martasedana)
- Direktur Personalia & Tata usaha: Haroen Al Rasyid A.H.
- Direktur Perlengkapan : Idris Adjam

1973 - 1978

- Direktur Utama : Ir. Willy Munandir M
- Direktur Operasi & Teknik : Ir. Theo Suryawan
- Direktur Keuangan : Drs. Made Martasedana
- Direktur Personalia & Tata Usaha: Ir. Boedi Santoso
- Direktur Perlengkapan : R. Soedihardjo, Bc.T.T.

Digitized by Google

1978 - Sekarang

- Direktur Utama : Ir. Willy Munandir M
- Direktur Operasi & Teknik : Ir. Boedi Santoso
- Direktur Keuangan : Drs. Made Martasedana
- Direktur Personalia & Tata Usaha: Ir. Suhana
- Direktur Perlengkapan : Soemardi, Bc. T.T.

Susunan Direksi P N Telekomunikasi

Surat Keputusan Menteri P.D.P.T.P. pada pelantikan tanggal 20 Nopember 1965.



SABARSOEDIMAN
Direktur Utama



Ir. MUCHTIL JOENOES
Direktur Operasi



Ir. SUTANGGAR TENGKER
Direktur Teknik



SOEWARDI
Direktur Administrasi



Ir. SOEKARNO ABDULHACHMAN
Direktur Pembangunan



RADEN SOENARJO MARTOSENDJOJO
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google

Susunan Direksi P.N. Telekomunikasi

Dari tahun 1967 sampai tahun 1968.



SABAR SOEDIMAN
Direktur Utama



Ir. SUTANGGAR TENGKER
Direktur Research & Planning.



Ir. MUCHTIL JOENOES
Direktur Operasi



Ir. SUKARNO ABDURRACHMAN
Direktur Perencana



SOEWARDI
Direktur Administrasi



R. SUNARYO MARTOSENDJOJO
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google

Susunan Direksi P N Telekomunikasi

Dari tahun 1968 sampai tahun 1970
Pada tahun 1969 Ir. Sutanggar Tengker diganti oleh Ir. Rollin sebagai Pejabat Sementara.



SABARSOEDIMAN
Direktur Utama



Ir. SUTANGGAR TENGKER
Direktur Operasi & Teknik



Ir. SUKARNO ABDUR-RACHMAN
Direktur Perencanaan



RMA. SURIANEGARA
Direktur Keuangan



H. ABDOESSOEKI
Direktur Personalia & Tata Usaha



Ir. ROLLIN
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google

Susunan Direksi Perum Telekomunikasi

Dari tahun 1970 sampai tahun 1973.

Pada tahun 1971 R. Van Raalten diganti oleh Drs. Made Martasedana.



Ir. SUTANGGAR TENGKER
Direktur Utama



Ir. WILLY MUNANDIR M.
Direktur Operasi & Teknik



R. VAN RAALTEN
Direktur Keuangan



HAROEN AL RASYID A.H.
Direktur Personalia &
Tata Usaha.

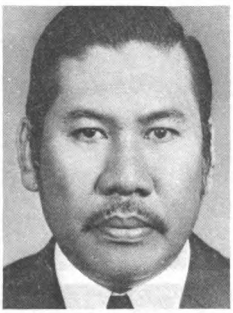


IDRIS ADJAM
Direktur Perlengkapan

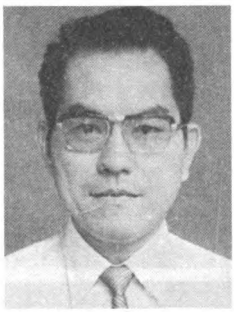
Digitized by Google

Susunan Direksi Perum Telekomunikasi

Dari tahun 1973 sampai tahun 1978.



Ir. WILLY MUNANDIR M
Direktur Utama



Ir. THEO SURYAWAN
Direktur Operasi & Teknik



Drs. MADE MARTA-SEDANA
Direktur Keuangan



Ir. BOEDI SANTOSO
Direktur Personalia & Tata Usaha.



R. SOEDIHARDJO Bc TT
Direktur Perlengkapan

Digitized by Google



Bandung, 26 September 1969.
Dirjen Postel Soehardjono, sedang menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota Badan Penasehat Perusahaan (BPP) PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi (IPPHOS).

Digitized by Google



Jakarta, 23 Maret 1978
Direksi baru Perumtel sedang dilantik oleh Menteri Perhubungan Prof. Dr. Emil Salim. Dari kiri kekanan: Ir. Willy Munandir M. Direktur Utama, Ir. Boedi Santoso - Direktur Operasi dan Teknik, Soemardi Bc.T.T. - Direktur Perlengkapan, Ir. Suhana - Direktur Personalia dan Tata Usaha dan Drs. Made Martasedana - Direktur Keuangan.



Menteri Perhubungan Prof. Dr. Emil Salim menyerahkan petikan Surat Keputusan kepada Dirut Perumtel Ir. Willy Munandir M.

Digitized by Google



Jakarta, 28 Juli 1978.
Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin sedang melantik Dirjen Postel yang baru, Drs. Suryadi (X) dalam suatu upacara di Departemen Perhubungan.



Penyerahan memorandum serah terima jabatan Dirjen Postel dari pejabat lama Soehardjono (kanan) kepada pejabat baru Drs. Suryadi (kiri pakai peci).

Digitized by Google

f. Badan Penasehat Perusahaan.

Salah satu aktivitas Organisasi massa yang ada di P N Pos dan Giro/P.N. Telekomunikasi ialah ikut serta duduk dalam Badan Penasehat Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tanggal 27-9-1968 No. 1382/Dirjen dibentuk Badan Badan Penasehat Perusahaan P N Pos dan Giro dan Badan Penasehat P N Telekomunikasi. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tanggal 22-9-1969 No. 1/Dirjen telah diangkat para anggota Badan Penasehat Perusahaan pada P N Pos dan Giro yang terdiri atas 15 (lima belas) orang, antara lain:

1). Wakil dari Direksi P.N Pos dan Giro
2). Wakil-wakil dari Organisasi massa, yaitu:
   S.S.P.T.T.
   G.B. Postel/Sarbumusi
   O.B. Postel/Gossi
   Kespekri
   Persatuan Karyawan Wanita Postel
   K.B. Postel/Buruh Marhaenis
   C.K.V. Postel/L.V.R.I.
3). Wakil dari Departemen Keuangan
4). Wakil dari Departemen Perdagangan
5). Wakil dari Departemen Dalam Negeri
6). Wakil dari Departemen Luar Negeri
7). Wakil dari Direktorat Jenderal Pariwisata
8). Wakil dari Perbankan.

g. Masa Direktur Jenderal Soehardjono (4-8-1966 s/d 28-7-1978)

Keadaan Pos dan Telekomunikasi pada awal Orde Baru masih memprihatinkan. Pendirian-pendirian Pos banyak yang tidak memenuhi syarat dan banyak dipakai ruangan-ruangan sewaan. Dengan demikian Dinas Pos dan Telekomunikasi tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan maka sejak awal Orde Baru melalui Pelita, Pemerintah telah membangun Kantor Pos dan Giro dan menambahkan sarana alat angkut baik roda dua ataupun roda empat.

Disamping pembangunan sarana fisik juga pendidikan dan ketrampilan ditingkatkan melalui kursus-kursus dan pendidikan di dalam ataupun di luar negeri.

Dengan usaha-usaha peningkatan sarana dan ketrampilan pegawai maka angka-angka produksi jasa Pos dan Giro menampakkan angka-angka kenaikan*)

Di bidang Telekomunikasi, keadaan pertelekomunikasian pada awal Orde Baru

*) *Memorandum Serah-terima Jabatan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 28 Juli 1978, Hal 1 - 4, DITJEN POSTEL, Jakarta, 1978.*

Digitized by Google

juga masih memprihatinkan. Baik transmisi maupun sentral-sentral telepon dan telegrap.

Transmisi masih menggunakan peralatan radio frekuensi tinggi (HF), yang belum dapat dibuka 24 jam sehari sehingga hubungan antar kota apalagi dengan tempat-tempat terpencil sangat sulit, bahkan tidak bisa.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, Pemerintah membangun sarana telekomunikasi, baik transmisi maupun sentral-sentral telepon dan telegrap/telex dan jaringan kabel lokal. Dalam Pelita I Pemerintah telah melanjutkan pembangunan Microwave Jawa Bali. Proyek ini kemudian diresmikan penggunaannya oleh Presiden R.I. pada tanggal 10 Maret 1973.

Setelah pengoperasian proyek ini, hubungan komunikasi dengan beberapa kota di Jawa dan Bali menjadi semakin lancar. Pemakai jasa telepon di Indonesia mulai menikmati manfaatnya dengan mengadakan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).

Proyek berikutnya adalah proyek microwave Trans Sumatera. Proyek ini diresmikan pemakaiannya oleh Presiden R.I. pada tanggal 7 Agustus 1975. Dengan demikian kedua proyek ini membentang dari Denpasar hingga Medan. Siaran Televisipun mulai dapat dinikmati oleh para penonton di Sumatera.

Proyek microwave lainnya adalah Proyek Microwave Indonesia Bagian Timur. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden R.I. pada tanggal 16 Juni 1978.

Hubungan Surabaya - Banjarmasin dihubungkan dengan Proyek Troposcatter. Penggunaannya diresmikan pada tanggal 31 Desember 1975.

Proyek-proyek lainnya adalah pembangunan proyek transmisi HF/UHF untuk beberapa daerah lainnya.

Sejalan dengan kebijaksanaan yang dianut Pemerintah yaitu yang mendasarkan politik luar negeri yang bebas aktif dan membuka kesempatan penanaman modal asing di dalam negeri, maka dicetuskanlah gagasan pemakaian sistim satelit untuk hubungan dengan luar negeri pada tahun 1967.

Tahun 1968 dibangunlah Stasiun Bumi Jatiluhur dan selesai pada tahun 1969. Sejak 29 September 1969 dengan resmi Indonesia memasuki era komunikasi satelit.

Sebagai tindak lanjut dari pemakaian satelit komunikasi internasional maka untuk memperlancar komunikasi dalam negeri sebagai penunjang tercapainya Wawasan Nusantara pada tahun 1970 telah dilakukan penelaahan yang mendalam atas rencana pembangunan satelit domestik yang kemudian dikenal dengan nama Sistim Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) PALAPA.

Tanggal 15-2-1975 pembangunan SKSD PALAPA ditanda-tangani dan pada tanggal 16-8-1976 proyek ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden R.I.

Proyek SKSD PALAPA dinyatakan sebagai proyek yang menguntungkan melalui analisa ekonomis, tetapi lebih dari itu SKSD PALAPA memberikan keuntungan-keuntungan non ekonomis yang tidak bisa diukur dengan jumlah uang.

SKSD PALAPA beroperasi sebagai pemersatu seluruh wilayah Indonesia secara teknik telekomunikasi*).

*) *Ir. Willy Munandir Mangoendiprodjo, Komunikasi Lewat Satelit, hal. 37, HUMAS PERUMTEL, Bandung.*

Digitized by Google

TVRI telah memanfaatkan sistim ini untuk mewujudkan jaringan TV Nasional. Kemungkinan lain terbuka untuk pemanfaatan di bidang pendidikan, pertahanan dan keamanan, riset dan industri ruang angkasa.

Di bidang organisasi dan personalia pada awal Orde Baru, Direktorat Jenderal POSTEL memiliki jumlah pegawai dan tenaga staf yang sangat sedikit dan terbatas sekali. Hal ini dapat dimaklumi berhubung Direktorat Jenderal POSTEL merupakan Direktorat baru dan perlu dibina dan dikembangkan dalam waktu singkat.

Sekretaris Direktorat Jenderal yang pertama ialah Raden Roekmin Adiwinata. Bc. A.P. dengan Kepala Direktorat Pos dan Giro: Nyoman Rai dan Kepala Direktorat Telekomunikasi: Ir. M.J. Sahertian untuk masa 1966 - 1968.

Sekretaris Direktorat Jenderal yang kedua, untuk masa 1968 - 1969, ialah Ir. M.J. Sahertian dengan Kepala Direktorat Pos dan Giro: Sachloel Nasution. Bc.A.P. dan Kepala Direktorat Telekomunikasi dirangkap oleh Ir. M.J. Sahertian.

PARA SEKDITJEN SEMASA DIRJEN POSTEL SOEHARDJONO:
(1966 - 1978)



Rd. R. ADIWINATA Bc.A.P.
1966 - 1968



Ir. M.J. SAHERTIAN
1968 - 1969



SACHLOEL NASOETION Bc.AP
1973 - 1974



Ir. ROLLIN
1974 - kini

Digitized by Google

PARA KEPALA DIREKTORAT POS DAN GIRO SEMASA DIRJEN POSTEL SOEHARDJONO: (1966 - 1978)



NYOMAN RAI
1966 - 1968



SACHLOEL NASOETION Bc.A.P.
(merangkap Sekditjen)
1968 - 1971



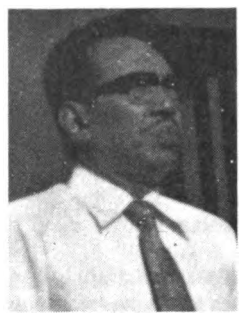
MAS SOEKANDAR Bc.A.P.
1971 - 1974



ROESLI Bc.A.P.
1974 - 1976



RADEN SOEBAGJO Bc.A.P.
1976 - 1977



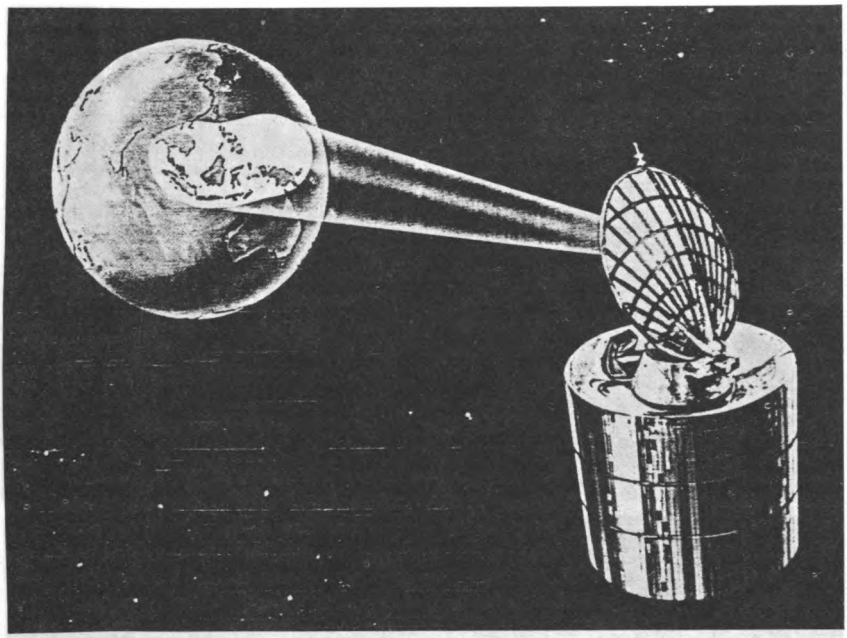
MAS SOELAEMAN Bc.A.P.
1977 - kini

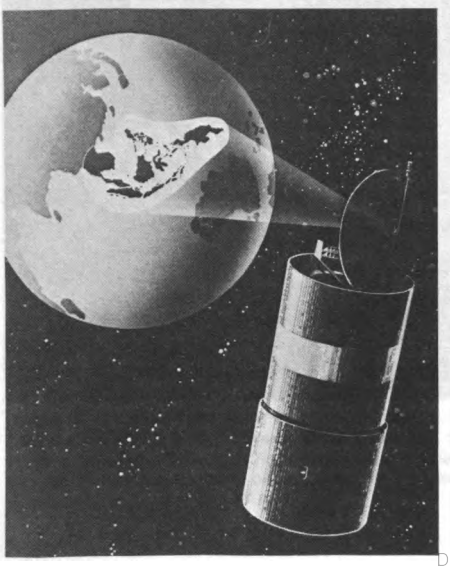
Sekretaris Direktorat Jenderal yang ketiga, masa 1969 - 1973, ialah Sachloel Nasution, Bc.A.P. dengan Kepala Direktorat Pos dan Giro: M. Soekandar, Bc.A.P. dan Kepala Direktorat Telekomunikasi: Ir. J. Sutanggar Tengker.

Sekretaris Direktorat Jenderal yang keempat, masa 1973 hingga kini, ialah Ir. Rollin dengan Kepala Direktorat Pos dan Giro: M. Soeleman, Bc.A.P. dan Kepala Direktorat Telekomunikasi: Ir. J. Sutanggar Tengker/Ir. Theo Suryawan.

Demikianlah beberapa keberhasilan di bidang operasi dan pembangunan dalam periode Pelita I dan II dimasa Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh Direktur Jenderal POSTEL yang pertama Mayor Jenderal Soehardjono. Uraian lebih lanjut akan dimuat dalam Bab III.

Digitized by Google





Gambar atas:
Model Satelit Palapa Generasi Pertama (Palapa A)
Gambar bawah:
Satelit penggantinya Palapa Generasi Kedua (Palapa B).

Digitized by Google





Digitized by Google



Jakarta, 8 - 10 Januari 1980 Rapat Kerja Postel 1980.
Dari atas kebawah: Pimpinan Rapat Dirjen Postel Drs. Suryadi (tengah) didampingi oleh dari kiri kekanan Ir. Theo Suryawan (Kadittel), Ir. Rollin (Sekditjen), M. Sulaeman Bc.A.P. (Kaditpos) dan Syarifuddin (Kaditfrek). Deretan kedua dari atas para pejabat Ditjen Postel, selanjutnya para pejabat Perum Pos dan Giro, paling bawah pejabat Perumtel dan PT INTI.

Digitized by Google

PARA KEPALA DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
SEMASA DIRJEN POSTEL SOEHARDJONO
(1966 - 1978)



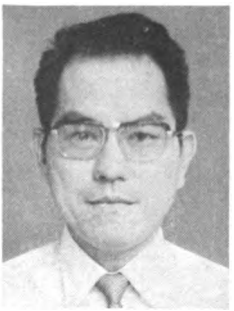
Ir. M.J. SAHERTIAN
1968 - 1972



SABARSOEDIMAN
1972 - 1973



Ir. SUTANGGAR TENGKER
1973 - 1978



Ir. THEO SURYAWAN
1978 - kini

h. Masa Direktur Jenderal Drs. Suryadi (28-7-1978 s/d kini)

Pembangunan di bidang Pos dan Telekomunikasi yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Direktur Jenderal Soehardjono, dilanjutkan oleh penggantinya: Drs. Suryadi.

Di bidang operasi Pos mulai dijajagi kemungkinan diintroduksinya suatu dinas baru yaitu: "electronic mail." Sedangkan di bidang pembangunan gedung akan diusahakan oleh Pemerintah, untuk membangun gedung Kantor Pos Besar kelas I Jakarta yang lebih dikenal masyarakat dengan gedung Kantor Pos Pasarbaru.

Di bidang operasi telekomunikasi telah disiapkan rencana peluncuran PALAPA GENERASI KEDUA untuk menggantikan PALAPA GENERASI PERTAMA yang akan berakhir masa pakainya tahun 1983. Disamping pemanfaatan PALAPA oleh negara-negara ASEAN telah pula direncanakan penambahan 75 stasiun bumi kecil di

Digitized by Google

MASA DIRJEN POSTEL Drs. SURYADI



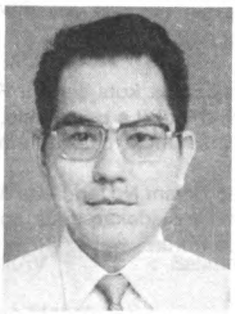
Drs. SURYADI
1978 - kini
DIRJEN POSTEL



Ir. ROLLIN
1974 - kini
SEKDITJEN



MAS SOELAEMAN Bc.A.P.
1977 - kini
KADITPOS



Ir. THEO SURYAWAN
1978 - kini
KADITTEL



SYARIFUDDIN
1980 - kini
KADITFREK

daerah terpencil sehingga secara merata daerah-daerah terpencil di seluruh tanah air akan mengetahui perkembangan negaranya melalui televisi.

Perkembangan di bidang organisasi dan personalia ditandai dengan dibentuknya dengan resmi pada awal tahun 1980 suatu Direktorat baru yaitu Direktorat Pengendalian Frekuensi. Berhubung dengan itu struktur organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi berubah sebagai berikut:

- Sekretaris Direktorat Jenderal : Ir. Rollin
- Kepala Direktorat Pos dan Giro : M. Soelaeman, Bc. AP.
- Kepala Direktorat Telekomunikasi : Ir. Theo Suryawan
- Kepala Direktorat Pengendalian Frekuensi : Sjarifuddin

Hal lain yang patut dicatat adalah diikut-sertakannya semua karyawan untuk mengikuti Penataran P-4 (Pedoman Pengamalan Penghayatan Pancasila) dan mulai dipikirkan prospek Pos dan Telekomunikasi menjelang tahun 2.000.

Digitized by Google

i. Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Jaya.

Seperti ditetapkan dalam Perjanjian New York Nopember 1962, maka Act of free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat, disingkat Pepera, di Irian Jaya akan dilaksanakan setelah 6 tahun kedaulatan di Irian Jaya diserahkan kepada Indonesia. Rakyat Irian Jaya harus menentukan pilihannya, akan terus bergabung dalam kekuasaan wilayah R.I. atau mau berdiri sendiri.

Dalam kaitan itu Gubernur Irian Jaya, Frans Kasiepo, mengatakan dalam salah satu rapat, bahwa Pepera merupakan instansi terakhir yang menyatakan bahwa Irian Jaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari R.I. Pepera dilaksanakan selama tanggal 14-7-1969 sampai dengan 2-8-1969 melalui Wakil-wakil Rakyat dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal 14-7-1969 di Merauke dengan Wakil Rakyat 175 orang
Tanggal 16-7-1969 di Wamena dengan Wakil Rakyat 175 orang
Tanggal 19-7-1969 di Nabire dengan Wakil Rakyat 175 orang
Tanggal 23-7-1969 di Fakfak dengan Wakil Rakyat 75 orang
Tanggal 23-7-1969 di Sorong dengan Wakil Rakyat 110 orang
Tanggal 29-7-1969 di Manokwari dengan Wakil Rakyat 75 orang
Tanggal 31-7-1969 di Biak dengan Wakil Rakyat 131 orang
Tanggal 2-8-1969 di Jayapura dengan Wakil Rakyat 110 orang

Untuk keperluan pelaksanaan Pepera di beberapa kota seperti Fakfak, Sorong, Biak dan Manokwari, didatangkan sebuah kapal laut (Le Haire Akto, milik P.T. Arafat) yang berfungsi sebagai hotel terapung, mengingat bahwa kemudahan penginapan di tempat itu kurang sekali.

Sidang-sidang Pepera dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, yang didampingi oleh Wakil dari PBB. Sidang terakhir diadakan di Jayapura pada tanggal 22 Maret 1969 bertempat di pendopo Gubernuran.

1) Peranan Pos sebelum dan sesudah Pepera

Untuk menghadapi Pepera Dinas Pos menerbitkan prangko khusus pada tanggal 1 Oktober 1968. Dengan penerbitan prangko ini Dinas Pos turut mengusahakan agar rakyat ingat kepada ikrar yang dicetuskan dalam Rapat Musyawarah Besar Rakyat Irian Jaya pada tanggal 9 Mei 1964.

Sejak tanggal 1 Mei 1963 telah beredar mata uang R.I. yang khusus dikeluarkan untuk daerah Irian Jaya (IB Rp.). Pada bulan Juni 1972 uang IB ini ditarik dari peredaran dan diganti dengan Rupiah seperti yang beredar di luar Irian Jaya, karena nampak ganjil kalau di satu Negara beredar beberapa jenis mata uang. Ada Rp. dan ada IB Rp. yang berlainan nilainya.

Dalam penggantian mata uang IB Rp. ke Rp., Dinas Pos turut aktip melaksanakan tugas penukaran. Walaupun di masa Belanda dahulu diedarkan juga uang logam, namun ketika uang logam diedarkan di daerah pedalaman, rakyat mula-mula tidak menyukainya, karena mereka terbiasa mempergunakan uang kertas. Untuk membiasakannya, Pemerintah memberikan penerangan secara terus-menerus sehingga uang logam tersebut menjadi alat penukar biasa.

Digitized by Google

2) Peranan Telekomunikasi dalam Pepera

Untuk menghadapi Pepera PERUMTEL harus memantapkan strateginya dalam perjuangan memenangkan Pepera. Untuk mensukseskannya, PERUMTEL perlu memantapkan seluruh jaringan telekomunikasinya yang memerlukan stabilitas personil, perlengkapan, sarana logistik dan perangkat-perangkatnya. Dibentuklah Team Pepera Propinsi dan Team Pepera Kabupaten. Pejabat-pejabat PERUMTEL di Irian Barat pada pelaksanaan Pepera ialah seperti yang tercantum di bawah ini.

a) Propinsi Irian Jaya
   (1) Kdtel XII Irian Jaya : Ir. Suhana
      (a) Kukh : Achmad Munggah
      (b) Ktu : J.J. Simahuira
      (c) Kutra/tgp : Soewardi
      (d) Kull : Soewandi Bc.T.T.
      (e) Kupl : Santoso
      (f) Kutlp : Tribaskoro Bc.T.T.

b) Kabupaten Jayapura
   (1) Kgtlp : Tribaskoro Bc.T.T. (Pgs)
   (2) Ktgp : Sumarno
   (3) Kakin : Soewarsono

c) Kabupaten Biak
   (1) Ktlp : Soeharko
   (2) Ktgp : Sadimun
   (3) Ksr XII/IV : Saliman

d) Kabupaten Manokwari
   (1) Ktlp : R. Ngadiman Bc.T.T.
   (2) Ktgp : Dadang Arifin
   (3) Ksr XII/IV : J. Sopacua

e) Kabupaten Sorong
   (1) Ktlp : Musodo
   (2) Ktgp : Hendrik Damai
   (3) Ksr XII/II : Abdurrachman

f) Kabupaten Merauke
   (1) Ktlp : Sri Utomo
   (2) Ktgp : Tatang Bachtiar
   (3) Ksr XII/III : Trisnosoedarmo.

Digitized by Google

Pemantapan dan kestabilan personil merupakan keharusan sebagai strategi dan taktik perjuangan. Ini disebabkan karena Irian Barat yang oleh Belanda sebagai daerah kekuasaannya di seberang lautan, diatur sedemikian sehingga bentuk sistem dan pertelekomunikasiannya semata-mata untuk melayani kepentingannya di Irian Barat dan perhubungan ke negeri Belanda dan Eropa. Berhubung dengan itu maka sistem telekomunikasi daerah ini berorientasi ke Barat, padahal sejak tanggal 1 Mei 1963 wilayah ini telah diserahkan oleh UNTEA kepada RI untuk mengelolanya, sehingga jalur komunikasi seharusnya diarahkan ke Jakarta sebagai Ibukota R I.

Pemerintah Belanda dahulu menyadari bahwa sebelum tahun 1962 badan PBB melalui UNTEA akan memasuki Irian Barat dan pada akhirnya wilayah ini akan berganti penguasanya. Akibatnya pemeliharaan telekomunikasi tidak lagi mendapat perhatian Belanda yang hanya memerlukannya selama 2 tahun lagi sehingga pembangunan telekomunikasi yang pernah dilakukannya di Irian Barat, terhenti total. Sebagai misal, pembangunan di Biak, yaitu di Adibai yang merupakan pusat telekomunikasi Radio Irian Barat yang diarahkan ke Eropa, terpaksa dihentikan walau sudah mencapai 60% selesai, antara lain gedung SRPM, saluran listrik tegangan tinggi 2000 Volt sepanjang 9 km, saluran modulasi, tiang-tiang antene, sebagian pesawat-pesawat pemancar 20 kw sudah digudangkan di CBL (Pusat Gudang-gudang Pemerintah).

Menjelang dilaksanakannya Pepera terjadilah pemberontakan di Inarotali dan Nabire. Pada saat terjadinya pemberontakan KSRO Enarotali, sempat ikut berjuang bersama ABRI (Puterpa) mempertahankan keamanan lapangan terbang - walau ia bertugas dalam bidangnya selaku pejabat PHB, karena lapangan tersebut merupakan jalan keluar satu-satunya dari pedalaman Enarotali. Semua pesawat pemancar radio dari SRO Enarotali sempat pula diselamatkan dan menyembunyikannya di semak-semak dengan terlebih dahulu diamankan lampu-lampunya.

Pada tanggal 14 Mei 1969 setelah pemberontakan reda, Ksro Enarotali berhasil diudarakan kembali dengan selamat.

Di Manokwari Perumtel berhasil memperpanjang sked perhubungan untuk membantu security dalam usaha penumpasan gerombolan OPM (Organisasi Papua Merdeka), di samping mengadakan hubungan H24 untuk menyalurkan berita-berita resmi dan pers dan membantu melakukan sensor terhadap berita-berita keluar negeri.

Lain pula di Sorong, para karyawan Perumtel kota ini turut aktip angkat senjata membantu ABRI menghadapi gerombolan OPM yang memberontak untuk menggagalkan Pepera. Turutnya karyawan Perumtel dalam menumpas pemberontakan karena sebagian besar para prajurit ABRI sedang cuti. Bahkan rumah kediaman Kktlp Sorong dan rumah Kepala Inspeksi Angkutan lalulintas jalan raya digunakan sebagai pos pertahanan.

Mengingat keadaan rawan, untuk pengamanan semua peralatan morse dan teleprinter serta kegiatan operasional dipindahkan ke rumah dinas Kepala Kantor telegrap di Jl. Klademak III. Salah seorang putra daerah karyawan Perumtel, Samuel Pandori mengambil peranan penting sebagai anggota DMP sebagai wakil golongan Merah Putih dalam menghadapi Pepera.

Di Wamena para karyawan Perumtel membuka hubungan telekomunikasi keluar Wamena. Adanya komunikasi melalui Perumtel lebih dapat menjamin kelancaran dropping bahan makanan melalui udara dalam usaha membantu segi keamanan setempat. Bahkan Ksro Wamena dan staf menerima tugas untuk mengatur lalulintas

Digitized by Google

udara dengan mempergunakan pesawat radio yang diperlengkapi dengan frekuensi penerbangan. Di samping itu mengcover pelaksanaan Pepera yang disiarkan sebagai laporan pandangan mata oleh RRI yang juga dipimpin oleh petugas Perumtel.

Seperti di tempat-tempat lain, di Merauke juga dibuka hubungan telekomunikasi H 24 selama 7 hari dan hubungan SSB dari Camat ke Kps secara timbal balik dalam menghadapi pelaksanaan Pepera tersebut di samping merelay pandangan mata yang disiarkan oleh RRI Merauke yang pemancarnya disediakan oleh Ksr 12/4. Seorang dari karyawan Ksr 12/4 Merauke, Anton Atek juga salah seorang anggota DMP. Ia kemudian menerima penghargaan berupa Satya Lencana Pepera dari Presiden.

Tugas Ksr 12/4 Merauke bukan sampai di situ saja. Pada tanggal 14 Mei 1969 sebelum dilaksanakannya Pepera ia dengan mengikuti operasi khusus (Opsus), menyelenggarakan siaran Radio non pemerintah yang diarahkan untuk menyalurkan informasi dan kampanye tentang pembangunan Indonesia serta siaran-siaran untuk mensukseskan Pepera, di samping mengadakan program hiburan. Siaran ini berlangsung setiap hari sampai tahun 1971.

Dalam Memorandum serahterima jabatan Kawitel XII tanggal 15-7-1970 dari Ir. Willy Moenandir M kepada Ir. Suhana tercantum sebuah "Safe guiding Telekomunikasi untuk pelaksanaan Pepera di Irian Barat" yang antara lain berisi sebagai berikut:

Persiapan Telekomunikasi Pepera:

1. Penertiban dan perbaikan sirkuit telegrap luar negeri Jayapura - Sydney dengan kerjasama antara Dtel-XII dengan OTC. Australia. Semua telegram keluar negeri yang keluar dari Irian Barat harus melalui Sirkuit ini.
2. Penertiban dan perbaikan sirkuit telegraphi dan telefoni Jayapura - Jakarta. Untuk perbaikan sirkuit ini diadakan rehabilitasi pemancar 20 kw di Jayapura untuk jurusan Jakarta, dan pembangunan antena Rhombic untuk pemancar dan penerima di Jayapura. Untuk sirkuit telegraphi dipasang Elmux dari Siemens sebagai pengganti TOR 7 unit yang sudah sejak 1966 sering mengalami kerusakan.
3. Penertiban dan perbaikan sirkuit telefoni dan telegraphi intern Irian Barat dari Jayapura, terutama ke semua ibukota kabupaten di Irian Barat, yaitu: Biak, Manokwari, Sorong, Fakfak, Nabire, Enarotali, Wamena, Serui dan Merauke.
4. Penertiban dan perbaikan rehabilitasi jaringan telepon dalam kota Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong dan Merauke.
5. Pembangunan jaringan telekomunikasi Pamong praja yang menghubungkan Gubernur Irian Barat dengan Departemen Dalam Negeri di Jakarta; juga antara Gubernur dengan Bupati di Irian Barat; antara Bupati dengan para KPS, dan antara KPS dengan Kepala Distrik. Sampai dengan Bupati jaringan sudah dapat dipergunakan saat dilangsungkan Pepera, sedangkan untuk sampai ke KPS sedang dalam pemasangan, tapi jaringan sampai kepada KPS masih diusahakan equipmentnya. Jaringan pamongpraja operasional digunakan untuk hubungan dinas antar pemerintah daerah dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pelaksanaan pemilihan umum pada medio 1971 yang akan datang. Cover untuk setiap musyawarah DMP (Dewan Musyawarah Pepera) dengan kerjasama pihak RRI, atau apabila tidak ada RRI dibangun pemancar broadcast sementara seperti yang terjadi di Nabire, Jayapura.

Digitized by Google

Dalam pelaksanaan Pepera, berita Pepera dapat disampaikan tepat pada waktunya, malahan lebih cepat dari pers asing, sehingga opini dunia dapat mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi, tidak disimpang siurkan dengan berita-berita yang terkadang bersifat negatip.

Di Jayapura para karyawan Perumtel berhasil memperbaiki sirkuit telegrap untuk hubungan Jayapura - Sydney berkat kerjasama antara Perumtel dengan pihak OTC Australia. Demikian halnya dengan bidang teleponi, dilakukan perbaikan sirkuit pemancar 20 kw untuk jurusan Jakarta serta pembangunan antena Rhombic untuk pemancar dan penerima Jayapura.

Di Biak pembangunan telekomunikasi pamongpraja dilakukan untuk menghubungkan Gubernur Irian Barat dengan Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Juga antar Gubernur dengan para Bupati di Irian Barat dan antara Bupati dengan Distrik dan Kps secara timbal balik.

Biak merupakan kota transito untuk barang yang berasal dari Jakarta yang di transport melalui pesawat udara (GIA atau Merpati) atau transportasi khusus (AURI/ charter). Pekerjaan ini dilakukan oleh Ksr 12/1 Biak baik untuk logistik atau distribusinya.

Selain itu para karyawan Ksr 12/1 juga menyelenggarakan telekomunikasi untuk pamongpraja kabupaten Teluk Cendrawasih, Serui dan Nabire, juga untuk jaringan telekomunikasi Pepera di gedung-gedung DMP. Sementara pihak pamongpraja belum siap, petugas-petugas Ksr 12/1 melaksanakan operationnya.

Di Nabire Perumtel membuka hubungan H24 selama 7 hari, sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pepera. Selanjutnya pada tanggal 18 s/d 20-7-1969 di gedung DMP para karyawan Ksr 12/1 mengambil alih penyiaran radio Broadcast langsung untuk umum, setelah beberapa hari sebelumnya menginstalir pesawat-pesawat radio untuk komunikasi pamongpraja dan radio untuk hubungan komunikasi Pepera. Bahkan turut juga membantu melakukan sensor terhadap berita-berita dari wartawan asing.

Hari pertama pelaksanaan Pepera di Merauke tanggal 14-7-1969 menghasilkan kemenangan pihak Republik. Mengudaralah semboyan: "Dari Merauke lahir cahaya kemenangan di Irian Barat."

j. Pos dan Telekomunikasi di Timor-Timur.

Setelah bergabungnya Timor-Timur kedalam wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 dan berdasarkan U.U. No.7/Tahun 1976 ditetapkan sebagai Propinsi ke-27 dari Negara Republik Indonesia, maka segera dimulailah rehabilitasi semua bidang aparatur Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu diantaranya ialah rehabilitasi bidang Pos dan Telekomunikasi.

Dalam rangka rehabilitasi bidang Postel di Timor-Timur, Direktorat Jenderal Postel ikut serta dalam Team Kerja atau Task Force yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dengan tugas pokok menyusun program rehabilitasi dan normalisasi. Sebagai anggota Team Task Force bidang Postel ditunjuk Sdr. R. Soetedjo Bc.A.P., pejabat dari Ditjen Postel.

Untuk pelaksanaan program-program yang telah disusun oleh Team Task Force, maka dibentuklah Team pendamping yang akan mendampingi para pejabat/petu-

Digitized by Google

gas putera daerah Timor-Timur dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku didaerah lainnya dari Negara Republik Indonesia.

Sewaktu jaman penjajahan Portugis, organisasi Postel di Timor Timur mirip dengan organisasi PTT dahulu, dengan singkatan CTT (Correios, Telegrafos, Telefones), maka untuk menyusun kembali organisasi Postel tidaklah banyak dijumpai kesulitan. Patut dicatat bahwa Kantorpos di Dili semasa jajahan Portugis tidak mengadakan antaran pos, dan para yang berkepentingan dipersilahkan langganan kotakpos yang pada waktu itu berjumlah 500 buah. Sebagai bekas daerah jajahan, jelas bahwa Timor-Timur sangat terbelakang, maka agar dapat mengikuti irama pembangunan yang terperinci dalam REPELITA, khususnya Repelita III untuk masa tahun 1979-1984, program pembangunan diatur dalam 3 tahap ialah tahap Rehabilitasi (1976-1977), tahap konsolidasi (1977-1978) dan tahap stabilisasi (1978-1979) untuk kemudian bersama-sama dengan propinsi-propinsi lainnya masuk dalam Pelita III (1979-1984) dan seterusnya.

Rombongan Task Force dalam mana termasuk bidang Postel, berangkat pada tanggal 31 Oktober 1976 dari Jakarta menuju Dili dengan singgah Kupang semalam dan sampai di Dili pada tanggal 1 Nopember 1976. Rombongan Team Pendamping diberangkatkan secara berangsur-angsur sehubungan dengan terbatasnya transportasi dan akomodasi, dan Team Pendamping Postel baru lengkap di Dili pada pertengahan bulan Nopember 1976. Adapun jumlah anggota Team Pendamping dari masing-masing Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen Perhubungan yang akan bertugas pada tahap pertama selama 3 bulan di Timor-Timur, -dengan kemungkinan akan diperpanjang masa tugasnya-, ialah sebagai berikut:

- Ditjen Perhubungan Darat : 2 orang.
- Ditjen Perhubungan Laut : 10 orang.
- Ditjen Perhubungan Udara : 5 orang.
- Ditjen Pos dan Telekomunikasi : 20 orang.
- Pusat Meteorologi & Geofisika : 3 orang.

Jumlah Team Pendamping Postel ternyata paling banyak, mengingat bahwa selama penjajahan Portugis tidak diberikan kesempatan kepada para putera daerah untuk menduduki jabatan penting (menengah/tinggi), apalagi dibidang teknik boleh dikata sangat minim. Team Pendamping Postel yang pertama ialah sebagai berikut:

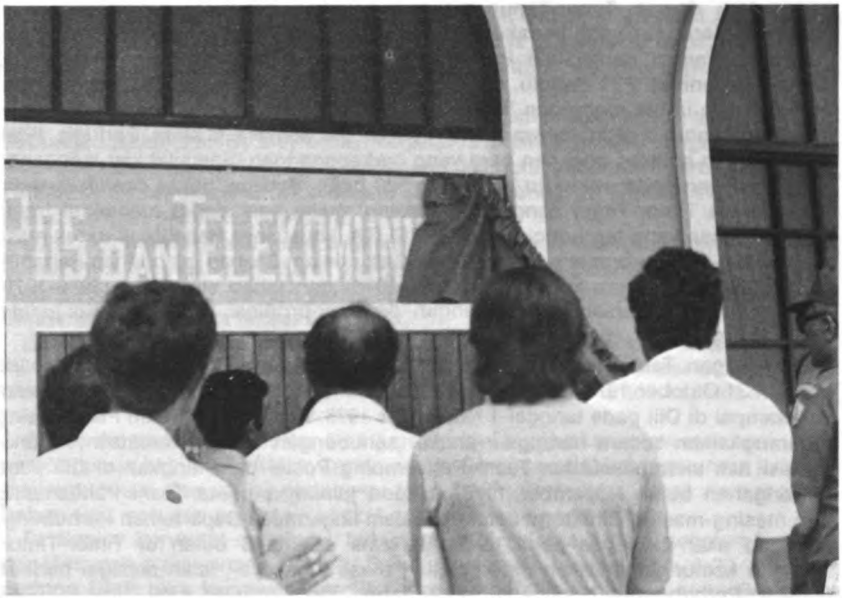
1) Team Pendamping bidang Pos:

a) Koesman, Ketua.
b) E.Z. Faah Bc.A.P.
c) D.Ch. A. Leonard.

2) Team Pendamping bidang Telekomunikasi:

a) Soewandi BcTT., Ketua.
b) H. Messakh.
c) Salim Badjideh.
d) Hidayat.

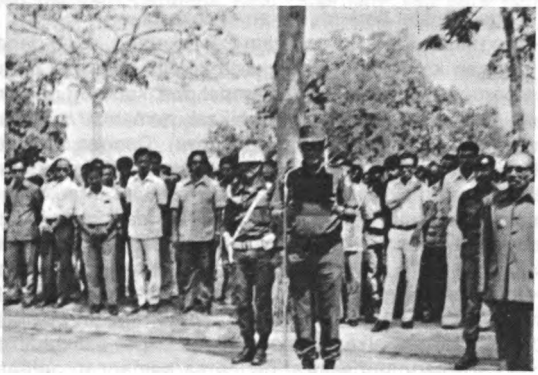
Digitized by Google



Peresmian Kantorpos Dili tanggal 12 Nopember 1976. Tampak memberikan sambutan R. Soetedjo Bc.A.P./ Kasubditumpos Ditjen Postel (kanan atas) dan Brigjen Dading K/Pangkodahankam Timor Timur dengan disaksikan oleh Gubernur Timor Timur dan Pejabat lainnya (kanan bawah).

Digitized by Google





Digitized by Google

e) Suwarno.
f) Suwarli.
g) Ito Alnito.
h) Oma Soemantri.
i) Koko.
j) Ukar Didi Sutardi.
k) Pipin Iskandar.
l) Yayat Ruchiyat I.
m) Yayat Ruchiyat II.
n) Memed.
o) Gunadi Santosa.
p) Sobari.
q) Naryadi.

dan bertindak selaku Koordinator kedua Team Pendamping tersebut ialah R. Soetedjo Bc.A.P. dari Ditjen Postel berkedudukan di Jakarta.

Sebelum keberangkatan Task Force/Team Pendamping, telah dapat dipersiapkan dan dikirimkan dengan kapal-laut dari Jakarta ke Dili berbagai peralatan yang segera dibutuhkan berupa peralatan Pos (setempel pos, kantong pos, tromol/peti pos, dan sebagainya) dan peralatan telekomunikasi pemancar/penerima, perangkat telegrap, antena, diesel agregaat, dan sebagainya). Dengan demikian Team Pendamping dapat segera mulai tugasnya, maka untuk tahap pertama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Timor-Timur No.34/Tahun 1976 tanggal 10 Nopember 1976 ditetapkan pembukaan Kantorpos di Dili dan Faute-Makassar (Oékusi). Peresmian pembukaan kembali kantorpos di Dili telah dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1976 dan hadir Panglima Komando Daerah Pertahanan Keamanan (Kodahankam) Timor-Timur Brigjen. Dading Kalbuadi, Gubernur Propinsi Timor-Timur Arnaldo Dos Reis Araujo, serta pejabat-pejabat sipil lainnya. Pembukaan bidang Telekomunikasi terpaksa tidak dapat dilakukan pada saat yang sama oleh karena pemasangan pesawat penerima/pemancar, antena, dan sebagainya memerlukan waktu cukup lama. Percobaan-percobaan perhubungan radio-telefoni/telegrafi antara Dili-Kupang dan Dili-Jakarta dengan giat dilakukan oleh Team Pendamping Telekomunikasi dibantu oleh petugas-petugas putera daerah dan sejak awal bulan Maret 1977 dapatlah fasilitas telekomunikasi dimaksud dipergunakan untuk sementara waktu khusus oleh instansi pemerintah. Adapun jaringan telepon lokal pun mengalami banyak kerusakan yang perlu direhabilitir, sedangkan Sentral Telepon Otomat Dili ialah type Pentaconta-32 dan mengalami banyak kerusakan pula. Untuk diketahui, type Pentaconta-32 tidak dipergunakan didaerah Indonesia lainnya sehingga sangat sulit untuk mendapatkan suku cadangnya. Adapun data Sentral Telepon Otomat (STO) tersebut ialah: kapasitas 800 L.U. sistim Crossbar, buatan BTM/Belgia dan dioperasikan sejak bulan Maret 1971. Kalaupun kapasitasnya 800 L.U., namun pada saat akhir jaman penjajahan Portugis hanya terpakai 670 L.U. Lokasi instalasi Telekomunikasi di Dili ada di 2 tempat, ialah Sentral Telepon Otomat di deretan Kantor Gubernur Timor-Timur dan Setasiun Radio Pemancar di Kampung Alor; Setasiun Radio Pemancar tersebut adalah milik swasta CPRM (Companhia Portuguesa Radio Marconi) dan semasa jaman

Digitized by Google

penjajahan Portugis mengadakan perhubungan khusus dengan luar Timor-Timur seperti dengan Lissabon, Macao, Sydney, Bandung dan daerah jajahan Portugis di Afrika (Angola dan Mosambique).

Mengenai pekerjaan dinas Pos pada bulan-bulan permulaan setelah pembukaan, dimulai terlebih dahulu dengan membuka kembali loket penjualan benda-pos/ meterai dan disamping itu dinas surat-surat biasa ke dalam dan luar negeri. Oleh karena penduduk Timor-Timur belum dapat berbahasa Indonesia pada umumnya, maka surat-surat untuk luar negeri masih terbatas dalam bentuk terbuka berupa kartupos ataupun kartupos bergambar sehubungan dengan policy keamanan; bahasa daerah yang banyak dikenal ialah bahasa Tetum, sedangkan penduduk kota banyak yang dapat mengerti bahasa Portugis. Angkutan pos diikutkan pada pesawat-pesawat terbang AURI (Fokker-27 atau Hercules) ataupun dengan kapallaut Kolinlamil (Komando Lintas Laut Militer) dan untuk daerah pedalaman bekerjasama erat dengan pos-militer.

Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para Penguasa Daerah, maka sebagai Kepala Kantorpos ditunjuk Salvador Vieira Gomes Ribeiro dan sebagai Kepala Telekomunikasi ditunjuk Arnaldo Ribeiro Moniz, kedua-duanya putera daerah dari Partij Apodeti, ialah partij rakyat Timor-Timur yang gigih memperjoangkan integrasi Timor-Timur dengan Negara Republik Indonesia. Perlu dicatat bahwa kedudukan Postel secara administratif ada dibawah Gubernur dan Anggaran baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan kesemuanya termasuk dalam Anggaran Daerah Propinsi Timor-Timur cq Departemen Dalam Negeri, yang bertindak sebagai Koordinator dari semua kegiatan Task Force/Team Pendamping di Propinsi Timor-Timur; dengan demikian status pegawai Postel masih merupakan pegawai Propinsi Timor-Timur, lengkap dengan penetapan pangkat, gaji, dan sebagainya. Direncanakan dalam tahun 1980, baik dinas Pos maupun dinas Telekomunikasi secara menyeluruh diserahkan kepada masing-masing Perum, ialah Perum Pos dan Giro dan Perum Telekomunikasi yang berpusat di Bandung. Pelaksanaannya tidak akan mengalami kesulitan, oleh karena dari semula telah diarahkan sesuai peraturan-peraturan serta cara kerja yang berlaku pada kedua Perum dimaksud. Hambatan dalam menormalisir Postel Timor-Timur ialah dalam penggunaan bahasa Indonesia, sehingga mempengaruhi kelancaran komunikasi antara Team Pendamping dan para petugas putera daerah. Segala usaha telah ditempuh, antara lain pada saat-saat senggang memberikan pelajaran bahasa Indonesia yang dipakai sehari-hari dan disamping itu oleh Ditjen Postel dikirimkan surat kabar Ibukota (Jakarta) untuk bahan bacaan.

Adapun perkembangan dinas Pos dan dinas Telekomunikasi setelah selesai tugas pokok, ialah menormalisir perhubungan Pos dan Telekomunikasi khususnya antara Dili dengan Kupang dan Jakarta, serta dengan daerah-daerah Negara Republik Indonesia pada umumnya, ialah sebagai berikut.

3) Perkembangan dinas Pos setelah tahap Rehabilitasi:

Team Pendamping bidang Pos yang semula terdiri atas 3 orang dikurangi menjadi 2 orang berhubung dasar-dasar pembangunan telah dapat diselesaikan.

Digitized by Google

Tugas-tugas selanjutnya dari Team Pendamping ialah memberikan bimbingan serta bantuan teknis kepada para pejabat daerah yang terdiri atas putera-putera daerah dalam mengaktifkan Dinas Pos di Timor-Timur sesuai ketentuan-ketentuan Perum Pos dan Giro, dan disamping itu mengusahakan pembibitan tenaga putera daerah untuk pada saatnya diorbitkan ke pedalaman guna melayani kantor-kantor pos pembantu di Ibukota Kabupaten/Kecamatan. Pada akhir masa penjajahan Portugis terdapat Kantorpos di Dili dan di Kantorpos pembantu di Ibukota Kabupaten Ainaro, Aileu Baucau (Villa Salazar), Ermera, Liquisa, Lospalos, Manatuto, Pante-Makasar (Oekusi), Same, Suai, Viqueque dan di Ibukota Kecamatan Atauro, Bazar Tete, Bobonaro, Maubara, Maubisse, Ossu, kesemuanya 18 Kantor Kantor Pos (Pembantu), pada hal Propinsi Timor-Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1976 kini terdiri atas 13 Kabupatn dan 61 Kecamatan sehingga kelak masih cukup banyak Kantor Pos Pembantu yang harus dibuka.

Kalau pada permulaan pembukaan kembali Kantorpos Dili pada tanggal 12 Nopember 1976 dimulai dengan pekerjaan penjualan benda pos/meterai, pengiriman/penerimaan surat-surat biasa (laut/udara) dan antaran pos, kemudian diperluas dengan pengiriman/penyerahan surat-surat tercatat serta penyerahan paket pos, maka sejak tanggal 1 Juni 1977 ditambah dengan dinas weselpos, walaupun pada tahap pertama hanya untuk pengiriman weselpos keluar wilayah Timor-Timur (Dili) dan dalam perhubungan Dalam Negeri saja, satu dan lain bersangkutan dengan masih perlu diaturnya cash-supply. Dinas poskilat pun telah dapat dilaksanakan oleh karena pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Timor-Timur telah memberi perlengkapan berupa sepedamotor khusus untuk antaran poskilat.

Demi mempercepat kemahiran para putera daerah dalam menunaikan tugas dinas Pos lainnya seperti Tabungan-Pos (Tabanas/Taska), dinas paketpos/weselpos secara lengkap, dinas poskilat-khusus dan sebagainya, sekaligus memperlancar penggunaan bahasa Indonesia, maka secara bergilir mereka ditugaskan bekerja dibeberapa Kantorpos di luar Timor-Timur seperti Kupang dan Bandung untuk beberapa bulan, disamping itu diberi kesempatan pula meninjau Kantorpos lainnya guna lebih menghayati suasana kerja di Kantorpos-Kantorpos dalam Negara Republik Indonesia. Ternyata cara demikian sangat bermanfaat bagi perkembangan dinas Pos di Timor-Timur, sehingga penggabungan kedalam Perum Pos dan Giro yang berpusat di Bandung pada waktunya tidak mengalami kesulitan.

4) Perkembangan dinas Telekomunikasi setelah tahap rehabilitasi.

Team pendamping bidang Telekomunikasi yang semula terdiri atas 17 orang berangsur-angsur diperkecil menjadi 12 orang bahkan pada awal tahun 1978 tinggal 7 orang sesuai kebutuhan, seorang bertindak sebagai Ketua dan yang lain masing-masing untuk bidang umum, transmisi, STO, saluran/kabel, telegrap dan interlokal. Masih diperlukan pendamping bagi para putera daerah untuk bidang-bidang tersebut oleh karena kesemuanya ditujukan agar dapat berjalan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku pada PERUM Telekomunikasi yang berpusat di Bandung. Perlu diketahui bahwa dalam alam penjajahan asing cq Portugis sudah jelas

Digitized by Google

jabatan-jabatan penting dipegang oleh mereka, maka sangat langka adanya teknisi dari putera daerah sehingga bertalian dengan pesatnya kemajuan bidang Telekomunikasi mereka sangat memerlukan bimbingan yang tekun. Semasa penjajahan Portugis, di Timor Timur terdapat Kantor Telepon Otomat di Dili, sedangkan di Ibukota Kabupaten/Kecamatan hanya ada Kantor Telepon Pembantu, kesemuanya masih dengan sistim manual, ialah di Ibukota Kabupaten Ainaro, Aileu, Baucau (Vila Salazar), Ermera, Liquisa, Lospalos, Maliana, Manatuto, Pante Makasar (Oekusi), Same, Suai, Viqueque dan di Ibukota Kecamatan-kecamatan sebanyak 44 tempat. Adapun stasiun Radio hanya terdapat, selain di Dili, di 3 tempat lainnya ialah di Atauro, Baucau dan Pante Makassar (Oekusi) dengan kekhususan karena Atauro terletak di pulau (Pulau Kambing), Baucau mempunyai lapangan udara internasional dan Pante Makasar terletak di daratan terpisah (enclave). Transmisi yang dipakai antar tempat-tempat lainnya ialah pisik (openwire). Guna memberikan latihan yang mendalam dalam bidang telekomunikasi, secara bergilir para putera daerah ditugaskan bekerja untuk beberapa bulan di Bandung, sekaligus memperlancar penggunaan bahasa Indonesia, dan diperkenalkan pada alat-alat moderen yang telah dipergunakan oleh Perum Telekomunikasi.

Setelah peralatan bidang transmisi selesai dipasang, maka tugas selanjutnya ialah menyempurnakan mutu guna meningkatkan service kepada masyarakat pemakai jasa Telekomunikasi; perlu dicatat bahwa untuk jurusan Dili-Jakarta dipergunakan pesawat radio pemancar ISB/Kokusai berkekuatan 1 Kilowatt, sedangkan untuk jurusan Dili-Kupang dipergunakan pesawat radio pemancar SSB berkekuatan 125 Watt, masing-masing dengan antenne setinggi 17 meter. Untuk hubungan radio-telegrafi Dili-Jakarta dan Dili-Kupang, setelah selesai dipasang perlengkapan-perlengkapan meja morse, selanjutnya diperlukan maintenance secara routine agar dapat berfungsi sebagai sarana yang berkwalitas baik sehingga telegram-telegram dapat sampai kepada sialamat dalam waktu yang tepat; fasilitas pengantaran telegram pun diperhatikan dan untuk itu dipergunakan sepeda-motor. Hubungan radio-telegrafi yang semula hanya untuk telegram-telegram dinas/pemerintah, maka berdasarkan instruksi Gubernur Timor-Timur No.2 tahun 1978 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1978 berlaku pula untuk telegram-telegram umum. Dengan pesatnya penggunaan radio-telegrafi, maka bimbingan kepada para putera daerah dalam administrasi dan pelayanan telegram, antara lain mengenai pentaripan, penghitungan kata, kode telegrap, ekspedisi serta pertanggungan keuangannya, perlu diintensifkan, keseluruhannya sesuai peraturan yang berlaku pada Perum Telekomunikasi. Berhubung dengan itu, penugasan mereka yang berkecimpung dalam bidang telegrap ke kantor lain seperti Bandung sangat perlu untuk menambah pengalaman serta kelancaran berbahasa Indonesia.

Dalam bidang telepon, perbaikan sentral telepon otomat Dili terus-menerus dilaksanakan sebab perlu dikembalikan minimal kapasitas sentral yang memadai sewaktu pada akhir jaman penjajahan Portugis. Perbaikan sentral diimbangi dengan perbaikan jaringan lokal, ialah mengganti tiang-tiang dari kayu dengan tiang-tiang dari besi, disebabkan telah banyak yang kropok bahkan ada pula yang tumbang; dalam jaman penjajahan tidak pernah digunakan tiang dari besi, melainkan senantiasa tiang dari kayu, juga untuk saluran-saluran fisik internasional. Demikian

Digitized by Google

pula kabel-kabel perlu direvisi, karena banyak dipergunakan kabel lapangan yang dipasang oleh fihak militer sebagai pengganti kabel-kabel yang rusak/putus. Adapun hubungan radio-telefoni dalam negeri, ialah dengan berbagai tempat diluar Timor-Timur makin baik mutunya, berkat ketekunan para petugas baik dalam pemeliharaan maupun checking sentral secara rutin. Sejalan dengan kelancaran mutu sarananya, maka segi bimbingan terhadap pelayanan percakapan telepon interlokal pun sangat diperhatikan, demikian administrasi keuangan serta pengisian model-model yang bertalian. Penugasan job-training ke STO di Bandung pun telah dilaksanakan guna menambah pengalaman mereka, disamping meninjau beberapa STO dikota lainnya. Akhirnya dalam bidang transmisi satelit pun tidak ketinggalan, dan setelah diusahakan dari perlengkapan-perlengkapan Setasiun Bumi yang masih tersedia, maka untuk sementara dibangun dahulu Setasiun Bumi Kecil dengan maksud pada waktunya akan diganti dengan Setasiun Bumi Lintas Tipis sesuai kedudukan kota Dili sebagai Ibukota Propinsi Timor-Timur. Setelah diadakan percobaan-percobaan dengan hasil yang memuaskan, dan kemudian siap untuk dioperasikan, maka pada tanggal 19 Mei 1979 telah diresmikan penggunaan Setasiun Bumi Kecil di Dili oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Marsekal Roesmin Nurjadin. Dan mulai saat tersebut diperbaiki pula sarana telegrap, khususnya untuk perhubungan Dili-Jakarta telah diadakan penggantian dari sarana morse ke sarana telex. Dengan beroperasinya SKSD di Dili berarti perbaikan mutu/kwalitas dibandingkan sewaktu masih dipergunakan sistim transmisi radio HF.

Dengan terlaksananya peningkatan sarana Telekomunikasi di Dili, maka tahap berikutnya yang akan ditangani ialah sarana Telekomunikasi didaerah pedalaman, khususnya daerah kabupaten paling ujung timur, ialah Lospalos dan disamping itu ditempat lapangan udara internasional ialah Baucau. Demikian perkembangan bidang Telekomunikasi sampai dengan awal dimulainya REPELITA ke-III, khususnya di Propinsi Timor-Timur. Dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam bidang Pos dan Telekomunikasi seperti diuraikan diatas, dapat diharapkan bahwasanya keterbelakangan yang dialami semasa jaman penjajahan akan dapat dikejar sehingga Propinsi termuda itu akan dapat mengikuti irama pembangunan seperti propinsi-propinsi lainnya dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Digitized by Google

2. Pembinaan

a. Perubahan dasar hukum Team Screening.

Dasar hukum Team Screening yang semula diatur dengan Instruksi Presiden tanggal 15 Nopember 1965 No.22/KOTI/1965 jo. Instruksi Presiden tanggal 13 Mei 1966 No. Inst. 09/KOGAM/5/1966 berdasarkan Keputusan Presiden No. 295 tahun 1968 diganti dengan keputusan PANGKOPKAMTIB tanggal 18 Oktober 1968 No. KEP-028/KOPKAM/10/1968 jo. tanggal 3 Maret 1969 No. KEP-010/KOPKAM/3/1969 yang menetapkan penyempurnaan dasar-dasar kebijaksanaan penertiban dan pembersihan personil sipil dan anggota ABRI pada aparatur Pemerintah/Negara. Menurut ketentuan dalam keputusan ini, cara kerja Team Screening tidak lagi dilakukan menurut garis vertikal melainkan diubah menjadi regional dengan Laksus Pangkopkamtibda selaku koordinator di setiap daerah hukumnya dan Teningda (Satgasningda) selaku pembimbing teknis.

Tugas pokok Team Screening sesuai dengan bunyi pasal 12 keputusan Pangkopkamtib No. Kep-028/Kopkam/10/1968 adalah sebagai berikut:

(1). melaksanakan penertiban dan pembersihan personil dalam lingkungan instansi masing-masing dari setiap oknum dan unsur-unsur G 30 S/PKI atas dasar kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pangkopkamtib.

(2). mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap personil di lingkungan instansi masing-masing.

(3). membantu Menteri/Kepala Jawatan/Badan/Lembaga yang bersangkutan dalam menetapkan kebijaksanaan penertiban/pembersihan personil di dalam lingkungan instansinya.

(4). melaksanakan segala instruksi, petunjuk dan lain-lain ketentuan dari Teningpu/Teningda (Satgasningpu/Sargasningda) dan Pimpinan Departemen/Jawatan/Badan/Lembaga yang bersangkutan.

Digitized by Google

Susunan organisasi Team Screening baik di Kantor Pusat maupun di Daerah terdiri atas:
(a) Ketua
(b) Sekretaris
(c) Kepala Bagian Informasi dan Pemeriksaan
(d) Kepala Bagian Penelitian dan Penindakan
(e) Kepala Bagian Indoktrinasi dan Penelitian Mental
(f) Kepala Bagian Dokumentasi dan Kartotik

Mengingat pentingnya Team Screening dalam rangka penertiban dan pembersihan personil, maka pada tanggal 15 Pebruari 1979 diadakan Rapat Kerja Team Screening Departemen Perhubungan di Jakarta.

Pada tanggal 2 dan 3 Nopember 1979 diadakan Rapat Koordinasi Antar Organorgan Team Screening ABRI/Sipil se Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Laksus Pangkopkamtibda/Satgas Ningda Jawa Barat, bertempat di Aula Pusdiklatpos di Bandung.

Pada tanggal 29 Nopember 1979 diadakan Rapat Kerja Team Screening Departemen Perhubungan tahun 1979 di Jakarta.

b. Pelaksanaan Tindakan Team Screening pada PN Pos dan Giro

1) Pengaturan

Dengan surat Direksi tanggal 4 September 1979 No. 2335/Teningposgir/Rhs telah ditetapkan diberlakukannya surat keputusan Direksi tanggal 17 Maret 1979 No. 6209/Peg/Dirutpos tentang Penyesuaian Kembali Serta Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai dan Janda/Duda pegawai terhitung mulai tanggal 1 April 1979 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1979), juga bagi para pensiunan yang diberhentikan dalam rangka pelaksanaan retooling Aparatur Negara karena terlibat "G 30 S/PKI".

2) Penertiban dan Pembersihan Personil

(a) Pelaksanaan dan Pembersihan Personil

(1) Pegawai PN Pos dan Giro yang terlibat dan diduga terlibat dalam Peristiwa G 30 S/PKI hingga akhir tahun 1967 berjumlah 4.446 orang, sedangkan pada akhir 1979 perkembangannya sebagai berikut:
Dalam tahun 1979 oleh pihak Laksus Pangkopkamtibda telah ditetapkan surat keputusan mengenai penentuan golongan/klasifikasi yang definitif terhadap 95 orang pegawai, yakni:
Dapos I ..... 57 orang
Dapos II ..... 2 orang

Digitized by Google

Dapos III ..... 28 orang
Dapos VII ..... 4 orang
Dapos XII ..... 4 orang

(2) Di samping itu, juga telah ditetapkan penggolongan kembali/reklasifikasi terhadap 4 orang (bekas) pegawai, yakni sebanyak 3 orang diputuskan non klasifikasi (tidak terlibat "G 30 S/PKI") dan 1 orang berupa penurunan klasifikasi.

(3) Dengan demikian, pada akhir tahun 1979, banyaknya pegawai yang terlibat G 30 S/PKI yang golongan/klasifikasinya telah ditetapkan definitif berjumlah 4.974 orang dengan perincian menurut klasifikasi sebagai berikut:
Klasifikasi A ..... 61 orang
B.1 ..... 244 orang
B.2 ..... 26 orang
C.1 ..... 805 orang
C.2 ..... 3.745 orang
C.3 ..... 93 orang

(4) Banyaknya pegawai yang proses screeningnya belum selesai, yang penentuan golongan/klasifikasinya belum ditetapkan definitif berjumlah 35 orang.

3) Pelaksanaan tindakan retooling

(1) Sampai tanggal 25 Juni 1975 (saat ditetapkannya keputusan Presiden No. 28 tahun 1975), banyaknya pegawai yang telah diretool berdasarkan radiogram Pangkopkamtib tanggal 26 Mei 1973 No. TR-484/KOPKAM/V/1973, berjumlah 2.884 orang.
(2) Dalam tahun 1979, terdapat 2 orang di antara 2.884 orang itu yang oleh Laksus Pangkopkamtibda ditetapkan non klasifikasi (tidak terlibag G 30 S/PKI, sehingga dengan demikian pada akhir Desember 1979, jumlah pegawai yang diretool berubah menjadi 2.882 orang.
(3) Yang diberhentikan definitif sampai akhir Desember 1978 berjumlah 1.279 orang dengan perincian sebagai berikut:
(a) uang lepas ..... 474 orang
(b) pensiun ..... 738 orang
(c) tanpa nafkah/penghasilan ..... 9 orang
(d) meninggal dunia ..... 58 orang
(4) Yang telah diberhentikan definitif dalam tahun 1979 berjumlah 94 orang dengan perincian sebagai berikut:
(a) uang lepas ..... – orang
(b) pensiun ..... 88 orang
(c) tanpa nafkah/penghasilan ..... 1 orang

Digitized by Google

(d) meninggal dunia ..... 5 orang

(5) Yang berstatus pegawai dan telah diberi perpanjangan uang tunggu dalam tahun 1979 berjumlah 1.509 orang dengan perincian:
   (a) tahun ke tiga ..... 1.363 orang
   (b) tahun ke empat ..... 144 orang
   (c) tahun ke lima ..... 2 orang

(6) Yang akan diberhentikan definitif dalam tahun 1980 berjumlah 83 orang dengan perincian:
   (a) uang lepas ..... – orang
   (b) pensiun ..... 82 orang
   (c) tanpa nafkah/penghasilan ..... 1 orang

(7) Yang masih berstatus pegawai dan akan diberi perpanjangan uang tunggu dalam tahun 1980 berjumlah 1.426 orang dengan perincian:
   (a) tahun ke empat ..... 1.288 orang
   (b) tahun ke lima ..... 138 orang

c. Pelaksanaan Tindakan Team Screening pada P N Telekomunikasi.

Atas dasar Keputusan Pangkopkamtib tanggal 18 Oktober 1968 No. Kep.028/Kopkam/10/1968 jo. tanggal 3 Maret 1969 No. Kep.010/Kopkam/3/1969, Dirmatel dengan suratnya tanggal 26 Juni 1970 Nomor 2769/Teningtel/Rhs menginstruksikan kepada seluruh Daerah Perum Telekomunikasi untuk:

1) Membubarkan Team Screening bentuk lama.
2) Untuk Pusat Telekomunikasi dibentuk Screening Perum Telekomunikasi disingkat Teningtel.
3) Untuk Daerah Telekomunikasi dibentuk Team Screening Pembantu Daerah Telekomunikasi disingkat *Teningban Dtel.*
4) Untuk Daerah Telekomunikasi yang meliputi wilayah lebih dari satu Laksus Pangkopkamtibda/Teningda, bila perlu dapat dibentuk Perwakilan Team Screening Pembantu Daerah Telekomunikasi ke disingkat *WateningbanDtel* ke
5) Untuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel dibentuk Team Screening Pembantu LPP Postel disingkat *Teningban LPP Postel* (sekarang sudah dihapuskan).
6) Calon anggota Team Screening tersebut terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Laksusda/Teningda setempat.

Digitized by Google



Gedung Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Pos dan Giro di Bandung.

Digitized by Google

Pelaksanaan tindakan screening selanjutnya dilakukan sebagai berikut:

a). Sebelum keluarnya Radiogram Pangkopkamtib No. TR. 1/Teningpu/1/1971 tanggal 20 Januari 1971 pelaksanaan screening adalah sebagai berikut:
Screening pertama dilakukan oleh Team Pengamanan dan Pengawasan Daerah Telekomunikasi (sekarang Team Screening Daerah Telekomunikasi), kemudian berkasnya diajukan ke Staf Penyelesaian Tindakan Pembersihan Personil Perum Telekomunikasi (sekarang Team Screening Perum Telekomunikasi) untuk mendapatkan keputusan depinitip (klasifikasi/penindakan).

b). Setelah keluarnya Radiogram Pangkopkamtibda No.TR.1/Teningpu/1/1971 tanggal 20 Januari 1971 pelaksanaan screening adalah sebagai berikut:
Screening pertama dilakukan oleh Team Screening Pembantu Daerah Telekomunikasi kemudian berkasnya diajukan kepada Laksus Pangkopkamtibda/ Teningda setempat untuk mendapatkan keputusan depinitip (klasifikasi/penindakan). Keputusan Laksus Pangkopkamtibda/Teningda tersebut oleh Team Screening Pembantu Daerah diteruskan kepada Team Screening Perum Telekomunikasi, untuk mengatur penyelesaian administratip kepegawaiannya.

c). Berdasarkan radiogram Kopkamtib No. TR.484/Kopkam/V/1973 pegawai ex S.B. Postel (Gol. C2 dan C3) yang masih aktip bekerja dalam tahun 1974 (antara 1-1-1974 s/d 31-12-1974) dibebaskan dari dinas aktip dengan diberikan hak-haknya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d). Surat Keputusan administrasi kepegawaian seluruhnya diatur oleh Kantor Pusat/ Teningtel.

Hasil-hasil screening yang dicapai oleh Perum Telekomunikasi tercatat sebagai berikut:

– Yang dipecat (Gol. A + B + C1)	1.572
– Yang berhenti/pensiun/meninggal dunia bukan/sebelum TR. 484/Kopkam/V/1973 (Gol. C2 + C3)	1.138
– Yang diberhentikan berdasarkan TR.484/Kopkam/V/1973 (Gol. C2 + C3)	4.889
– Yang masih aktip bekerja (Gol. C2 + C3)	22
Jumlah	7.621

d. Pendidikan dan Latihan.

Dalam Jilid IV, Bab II, 1f, sudah disinggung betapa pentingnya pendidikan dan latihan yang merupakan penanaman tenaga kerja untuk waktu yang akan datang. Pembangunan gedung dan sarana lainnya kurang atau tidak ada artinya kalau sumber daya manusia sebagai isinya tidak atau kurang bermutu. Mutu sumber daya manusia ialah nilai kemampuan tenaga kerja yang dapat menghadapi segala tantangan lingkungan maupun masa depan perusahaan. Kemajuan prasarana dan gedung belum menjamin keberhasilan atau sukses perusahaan. Sebaliknya bila suatu bangsa berhasil meningkatkan mutu sumber daya manusia, sekalipun tidak memi-

Digitized by Google

liki sumber-sumber alam, bangsa itu akan mencapai kemakmurannya*). Berhubung dengan itu selama Pelita I dan Pelita Ii P N Pos dan Giro, dan Perum Telekomunikasi mengadakan pendidikan, latihan dan penataran secara terus-menerus, di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mengirimkan penatar-penatar ke kursus-kursus yang diperlukan manajemen dan administrasinya masing-masing, supaya mereka kelak mempunyai pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tingkah laku yang dituntut perusahaannya masing-masing.

Seperti telah diutarakan di muka, maka untuk lebih mendekatkan fungsi pendidikan dan penataran kepada perusahaan yang membutuhkannya, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tanggal 23-12-1975 No.31/Dirjen/1975, tugas pendidikan dan latihan diserahkan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Postel kepada Direktur Utama P N Pos dan Giro, dan Direktur Utama Perum Telekomunikasi pada tanggal 15-1-1976.

1) Pengembangan Lembaga Pendidikan Postel.

Tanggal 15 Januari 1976 merupakan hari bersejarah bagi dunia pendidikan postel mengingat bahwa pada hari itu tugas-tugas pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan diserah-terimakan dari Lemdik Postel dan LPP Postel kepada PN Pos dan Giro dan Perum Telekomunikasi berdasarkan surat keputusan Dirjen Postel tanggal 23-12-1975 No.31/Dirjen/1975.

Sejak tanggal itu pula terbentuklah Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di masing-masing perusahaan.

Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan P N Pos dan Giro**) dipimpin oleh Harsono, Bc.A.P., dan Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Telekomunikasi dikepalai oleh Ir. Soehana ex Kepala Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi yang terakhir.

Tugas pokok Pusat Pendidikan Penelitian dan Pengembangan PN Pos dan Giro ialah menunjang pelaksanaan tugas PN Pos dan Giro dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang reguler dan penataran di bidang Pos dan Giro, menyelenggarakan ujian dinas di bidang Pos dan Giro dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pos dan Giro.

Fungsi Pusdiklitbangpos dapat dijabarkan sebagai pemberi nasehat teknis kepada Direktur Utama mengenai pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih baik dalam arti kwalitatip maupun kwantitatip disamping juga sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan operasionil pendidikan, latihan dan pengembangan.

Tugas pokok Pusat Pendidikan Penelitian dan Pengembangan Perum Telekomunikasi ialah menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan sarana telekomunikasi.***)

---

*) *Suparman Sumahamijaya, "Suatu tantangan bagi para Sarjana dan Kaum Cendekia," Majalah "Pustaka" Nomor 8 Tahun II.*

**) *Surat keputusan Dirutpos tanggal 3-2-1976 No.2691/Dirutpos.*

***) *Keputusan Direksi Perumtel No. 8592/OT/Diruttel/1979 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perumtel di Kantor Pusat, Perumtel, Bandung, hal. 347.*

Digitized by Google

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Pusat Pendidikan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: Merencanakan, melaksanakan pendidikan dan latihan menurut suatu pola yang ditetapkan; Merencanakan, melaksanakan penelitian dan pengembangan sarana/sistim telekomunikasi.

2) Pendidikan dan Latihan di dalam negeri.

Pada prinsipnya pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi tidak sama dengan pendidikan umum lainnya yang setiap tahun selalu menerima siswa atau mahasiswa baru. Pendidikan Pos dan Telekomunikasi harus dibuka atau diadakan bila P N Pos dan Giro atau P N Telekomunikasi membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih di bidang-bidang tertentu, jadi menurut kebutuhan perusahaan.

Dilihat dari jenisnya, pendidikan dan latihan yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi dan Direktorat Personalia dan Tata Usaha dari kedua Perusahaan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu yang sifatnya reguler dan yang non-reguler.

Pendidikan reguler umumnya adalah pendidikan teknis postal dan teknis telekomunikasi baik untuk tingkat Akademi untuk mencetak pegawai golongan IIc ataupun untuk tingkat pengatur yaitu untuk mencetak pegawai golongan IIa.

Pendidikan yang non-reguler ialah pendidikan yang umumnya non-teknis-postal dan non-teknis-telekomunikasi dalam hal ini termasuk didalamnya: kursus-kursus bahasa, penataran berbagai pengetahuan tambahan, kursus-kursus manajemen untuk tingkat menengah dan tinggi.

Sebagai contoh dari pendidikan postal yang reguler ialah Akademi Postel baik untuk Jurusan Pos ataupun Jurusan Telekomunikasi. Contoh lain ialah pendidikan Pengatur Muda.

Persyaratan untuk mengikuti Akademi kedinasan Pos dan Telekomunikasi adalah mereka yang berijasah SMA sesuai dengan Jurusan di Akademi. Masa pendidikan di Akademi berlangsung selama 3½ tahun.

Pada tahun 1972 khusus untuk Jurusan Administrasi Pos dan Giro dibuka sebuah angkatan yang kemudian dikenal dengan sebutan Akademi Gaya Baru yang diikuti 33 mahasiswa yang berasal dari karyawan yang telah berijazah Sarjana Muda dari berbagai Fakultas Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. Masa pendidikannya berlangsung tidak 3½ tahun tapi cukup 2 tahun. Pada angkatan berikutnya Akademi Gaya Baru tersebut tidak diteruskan lagi. Untuk selanjutnya masa pendidikannya berlangsung 3½ tahun dan lulusan SMA.

Untuk memenuhi tuntutan kualitatip yang meningkat terhadap Akademi Postel Jurusan Telekomunikasi, sebagai akibat cepatnya perkembangan tehnologi dan supaya pembangunan-pembangunan dalam rangka Pelita I dan Pelita II berjalan lancar, maka Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi bersama-sama dengan Team dari International Telecommunication Union expert pada tanggal 2 Januari 1973 meresmikan suatu sistim pendidikan Telekomunikasi tingkat Akademi Gaya

Digitized by Google

Baru. Sistim ini mengintroduksi kursus-kursus untuk Sarjana Muda Teknik (Junior Engineer Course) yang lamanya 18 bulan, setelah waktu mana para Sarjana Muda tersebut sudah siap untuk langsung menjalankan tugasnya di lapangan. Di samping Junior Engineer Course terdapat pula Senior Technician Course yang diikuti oleh petatar-petatar yang berasal dari lapangan.

Pendidikan memang tidak kunjung berhenti. Siapa yang berhenti belajar akan ketinggalan pengetahuan yang makin maju. Berhubung dengan itu di mana-mana diadakan penataran di pelbagai bidang supaya tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu terapan yang kait-mengait satu sama lain. P N Pos dan Giro dan Perum Telekomunikasi juga tidak mau ketinggalan.

Dilihat dari segi intelektualisme, situasi pegawai-pegawai yang terus-menerus disibukkan dengan pekerjaan mereka sehari-hari, dapat dianalisa sebagai berikut:

- Banyak yang masih sangat kurang dalam hal "knowledge dan skill" yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka.
- Banyak yang masih termasuk golongan tradisionalis. Ciri-cirinya adalah lebih senang bekerja pada suasana yang serba tradisional dan "established". Mereka sulit menerima perubahan-perubahan termasuk cara kerja yang baru, metoda baru atau sistem baru. Bagi mereka, masa kerja diidentikkan dengan pengalaman. Seseorang yang sudah bekerja 20 tahun misalnya, dikatakan telah "berpengalaman" 20 tahun, hal mana sebenarnya tidak benar. Pengalaman secara implicit berarti pertumbuhan kapasitas kerja.
- Banyak yang masih termasuk golongan ambivalen dengan ciri-ciri: ingin mempertahankan status quo, orientasi waktu/masa sekarang, tidak mau mengambil risiko dan opportunistis.*)

Dengan mengetahui keadaan pegawai dan keinginan perusahaan di waktu yang akan datang, maka diperlukan suatu "pattern of behaviour", kesatuan sikap dan tingkah laku untuk mencapai output yang optimum dengan input yang minimum.

Berhubung dengan itu maka sejak tahun 1973 diadakan penataran pegawai-pegawai pimpinan dan anggota Direksi sampai kepada Kepala Seksi di Kantor Pusat, dan dari Kepala Daerah sampai kepada Kepala Kantor.

Penataran tersebut terdiri dari:

- Refresher Course A yang diadakan dalam tahun 1973 selama 5 minggu dan diikuti oleh 29 peserta.
- Upgrading Course B yang diadakan dalam tahun 1973 dan 1974 selama 5 minggu yang diikuti oleh 23 dan 20 peserta.
- Kursus Pimpinan Menengah (MMC) yang diadakan dalam tahun 1974, 1975, 1976, 1977 dan 1978 yang berturut-turut diikuti oleh 72, 110, 56, 54 dan 88 peserta. Khusus untuk keperluan pendidikan instruktur diadakan:
- Kursus Petugas Latihan Instruktur (TOC) yang diadakan dalam tahun 1976 dan 1977 yang diikuti berturut-turut oleh 50 dan 26 peserta.

*) *Kepala Bagian Pegawai P.N. Pos dan Giro Liliek Soehadi Bc.A.P., Lecture tentang "Masalah Pembinaan Personil Pos dan Giro", Bandung, 1973, Halaman 14.*

Digitized by Google

Kursus untuk keperluan pengadaan guru tetap atau instruktur perlu sekali karena selama ini sulit untuk mendapatkan guru tetap. Guru yang mengajar di Lembaga Pendidikan Postel pada umumnya guru tidak tetap yang kurang mempunyai pengetahuan dasar tentang ilmu mengajar. Dengan memiliki pengetahuan mengajar yang mutakhir yang mempergunakan teknologi mengajar secara audio visual dan sebagainya, maka manajemen klas diharapkan akan tambah baik. Ada pendapat bahwa Lembaga Pendidikan Postel adalah tempat penyingkiran, sedangkan guru adalah "widyadara" atau pembawa ilmu (wetenschapsdrager) yang merupakan sumber yang diperlukan bagi kelestarian pengetahuan Pos dan Telekomunikasi.

3) Pendidikan dan Latihan di luar negeri.

Pendidikan dan latihan Pos dan Telekomunikasi selain diadakan di dalam negeri yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Postel ataupun oleh Direktorat Personalia dan Tata Usaha Kedua perusahaan, juga diadakan di luar negeri.

Pendidikan Pos dan Giro di luar negeri diselenggarakan berdasarkan adanya tawaran bea siswa dari negara-negara tertentu yang biasanya disalurkan melalui United Nations Development Programme (UNDP) dan Universel Postal Union (UPU).

Pendidikan di luar negeri umumnya dilakukan dinegara-negara yang sudah maju yaitu di Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, Inggeris, Australia, Selandia Baru dan Jepang.

Lama pendidikan berkisar antara dua bulan hingga 18 bulan dalam berbagai bidang pendidikan postal antara lain: dinas giro dan cekpos, statistik pos, instruktur pos, pengiriman pos, manajemen pos, personalia dan lain-lainnya.

Setelah Indonesia masuk Asian Oceanic Postal Union (AOPU) di tahun 1970 maka saluran pengiriman pegawai untuk dididik di luar negeri bertambah lagi yaitu melalui Asian Oceanic Postal Training School (AOPTS) yaitu suatu proyek AOPU yang bergerak dalam bidang pendidikan dan latihan yang berpusat di Bangkok dengan biaya dari UNDP.

Mulai tahun 1977 pembiayaan UNDP untuk proyek tersebut dihentikan dan dibiayai sendiri oleh anggota AOPU yang akan mengirimkan pegawainya ke AOPTS, ditambah dengan beberapa beasiswa dari beberapa anggota AOPU yang sudah maju seperti Jepang, Australia dan lain-lainnya.

Pendidikan pada AOPTS meliputi pendidikan dan latihan dalam bidang-bidang antara lain: statistik pos, instruktur pos, manajemen pos, pengiriman pos dan lain-lainnya yang berlangsung antara 8 minggu sampai dengan 8 bulan.

Masih dalam rangka AOPU, pendidikan dalam bentuk lain berlangsung pula yaitu berupa program pertukaran pejabat diantara negara-negara anggota AOPU yang berminat. Hingga awal tahun 1980 Perum Pos dan Giro sudah mengirimkan para pejabatnya terutama mereka yang sudah berpangkat minimal IVa PGP Pos dan Giro 77, ke berbagai negara anggota AOPU dalam rangka program pertukaran pejabat tersebut. Sebaliknya Perum Pos dan Giro sudah menerima para pejabat dari berbagai anggota AOPU untuk tujuan yang sama.

Digitized by Google

Pendidikan pegawai Perum Telekomunikasi di luar negeri dilaksanakan atas dasar kerjasama dengan luar negeri. Berhubung dengan kontrak-kontrak pembelian alat-alat telekomunikasi maka diadakanlah proyek-proyek bantuan luar negeri berupa proyek penyelenggaraan pendidikan dan latihan dan bantuan tenaga ahli.

Selain itu beasiswa untuk mempelajari teknik-teknik telekomunikasi diterima pula melalui saluran International Telecommunication Union, UNDP dan Colombo Plan.

4) Proyek "Telecommunication Training Centre" (TTC).

Proyek ini dimulai pada pertengahan tahun 1968 dengan bantuan UNDP/ITU berupa peralatan, tenaga akhli dan pengiriman tugas belajar ke luar negeri. Kegiatan lain berupa pemusatan latihan kegiatan pada latihan (training) berupa penataran bagi tenaga-tenaga yang telah ada guna meningkatkan keterampilan agar dapat mengisi kekosongan tugas di Unit-unit telekomunikasi sebagai akibat peristiwa G30S/PKI.*)

Proyek TTC ini dalam tahun 1969 mulai menghasilkan tenaga tenaga yang telah ditatar dalam bidang telekomunikasi yang meliputi bidang-bidang: sistim/teknik sentral-sentral telepon (telephone switching), jaringan-jaringan telepon (outside plant), radio dan transmisi, telegrap serta listrik dan tenaga (power).

Walaupun penggunaan fasilitas bantuan peralatan ini dikonsentrasikan untuk kursus-kursus penataran, tetapi pendidikan akademi dan menengah dapat menggunakan kemudahan tersebut sebagai tempat praktek pula sehingga setelah lulus, siswa-siswa tidak dianggap lagi hanya mempunyai pengetahuan teori belaka, melainkan sudah trampil dalam menerapkan ilmunya.

Yang perlu dicatat dalam rangka Proyek TTC ini ialah terjadinya perubahan dalam sistim Akademi Postel yang semula memerlukan waktu 3½ tahun setelah SMA, menjadi 1½ tahun setelah memperoleh Sarjana Muda Teknik. Pendidikannya disebut "Junior Engineer Course (JEC)" di mana para lulusannya dikualifikasikan sama dengan lulusan Akademi Postel.

Pendidikan tenaga menengahpun mengalami perubahan di mana para calon tidak lagi diambil dari lulusan SMP, kemudian menerima pendidikan selama 3½ tahun, tetapi diambil dari SMA, kemudian dididik selama 2 tahun. Perubahan ini disebabkan karena bertambah majunya teknik telekomunikasi yang menggunakan peralatan yang beraneka ragam dan sulit, sehingga diperlukan pengetahuan dasar yang lebih tinggi.

Jumlah tenaga akhli luar negeri (experts) yang terlibat dalam kegiatan TTC ini ialah pada tahap pertama 8 orang dan pada tahap ke dua 10 orang termasuk Project Manager-nya.

Tahap ke dua merupakan perpanjangan dari tahap pertama berhubung dengan adanya proyek SKSD dan Sentral Telepon Semi Elektronis. Proyek tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 1978.

---

*) *Memorandum serahterima jabatan Kepala Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Telekomunikasi, Bandung, April 1978, hal. 2.*

Digitized by Google



Gedung Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perumtel di Gegerkalong - Bandung.

Digitized by Google

Untuk lengkapnya nama-nama tenaga akhli luar negeri yang bekerja selama tahap pertama dan atau tahap ke dua dicantumkan pada Lampiran 1.

Nama-nama "Wing" atau cabang-cabang tehnologi telekomunikasi yang diajarkan pada TTC selama dua tahap, terdiri dari:

1. Telephone Switching Wing
2. Outside Plant Wing
3. Line Transmission Wing
4. Radio/Microwave Wing
5. Telegraphy and Data Transmission Wing
6. Power Plant Wing
7. Traffic Engineering Wing
8. Telephone and Telegraphy Traffic Operation Wing
9. Administration, Accounting Store Supply, Marketing Wing
10. Special Course (Instructors' Course)

Sampai di mana kemampuan TTC memproduksi tenaga trampil, dapat diikuti pada Lampiran 2 s/d 4.

Campus TTC yang kini menjadi Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Telekomunikasi, dapat dikata merupakan komplek pendidikan dan latihan Telekomunikasi yang terbesar di Asia Tenggara. Udara Bandung yang sejuk dan pemandangan yang indah dari kedudukan Campus tersebut, menambah elok dan megahnya Pusdiklitbangtel yang tata letaknya tergambar pada Lampiran 5.

Biaya pembangunan, pemeliharaan, penyelenggaraan pendidikan dan latihannya tidak dapat dikatakan sedikit. Pesemaian dan peternakan di bidang telekomunikasi memang mahal harganya tetapi tidak dapat diabaikan untuk kesinambungan Perum Telekomunikasi. Mengabaikannya berarti dapat membahayakan perusahaan. Berat tugas yang dibebankan kepada lembaga pendidikan ini. Kata Dirjen Soehardjono: "Kalau pelayanan salah, maka pendidikannya salah!" Terlepas dari kebenaran ucapan tersebut, yang jelas bahwa penanaman tenaga kerja (human investment) merupakan usaha yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional karena pendidikan merupakan suatu "tool of management".

5) UPU Study Course

Suatu kursus di bidang Pos yang sifatnya internasional, diadakan mulai tanggal 29 Januari 1974 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 1974. Indonesia sebagai Tuan Rumah memilih Lembang di Kabupaten Bandung, sebagai tempat untuk penyelenggaraan kursus tersebut.

Bagi P.N. Pos dan Giro peristiwa tersebut merupakan pengalaman internasional yang berharga sekali di mana Indonesia mendapat kepercayaan dari Universal Postel Union untuk menyelenggarakan kursus tersebut.

Tujuan kursus ini ialah untuk membahas masalah yang dihadapi Dinas Pos dalam rangka meningkatkan kelancaran penerusan dan penyampaian kiriman Pos.

Kursus tersebut diikuti oleh 13 orang peserta masing-masing 2 orang dari Admi-

Digitized by Google

nistrasi Pos Afganistan, 2 orang dari Administrasi Pos Bhutan, 2 orang dari Administrasi Pos Khmer, 2 orang dari Administrasi Pos Laos, 1 orang dari Administrasi Pos Samoa Barat dan 4 orang dari PN Pos dan Giro.

Selain ke-13 peserta tersebut turut pula dua orang pejabat dari LPP Postel sebagai peninjau yaitu Ir. Rukman (kini di Kantor Pusat Perum Telekomunikasi) dan Ir. Wachjono.

6) Proyek "Asean Domsat Training".

Proyek ini diadakan sebagai realisasi dari Sidang Kesatu dari Sub Komite Postel Asean yang bersidang di Yogyakarta dalam tahun 1977 dan beberapa sidang lainnya sebelum April 1978. Training ini diadakan sepenuhnya oleh Perum Telekomunikasi bertempat di gedung Pusdiklitbangtel Gegerkalong Bandung dalam rangka penggunaan fasilitas Palapa oleh negara-negara Asean untuk keperluan sistim komunikasi domestik dinegara masing-masing. Training berlangsung mulai dari tanggal 24 April 1978 sampai dengan tanggal 1 Agustus 1978 diikuti oleh 29 peserta yaitu dari Thailand 6 peserta (empat peserta diantaranya dari Angkatan Darat Thailand), dari Malaysia 9 orang, dari Singapore 2 orang dari Philipina 2 orang dan dari Indonesia 10 orang (4 diantaranya dari Angkatan Darat).

Tenaga pengajarnya berjumlah 22 orang yang berasal dari Ditjen Postel, Kantor Pusat Perum Telekomunikasi, Pusdiklitbangtel dan Stasiun Pengendali Cibinong.

e. Penelitian dan Pengembangan.

Bila pendidikan dan penataran merupakan suatu "tool of management", maka di masa kini penelitian dan pengembangan merupakan "tool of management pula. Cara kerja sekarang bukan cara kerja karena "bilu tahu", "sitting by Nellie", menurut tradisi atau kebiasaan. Segala sesuatu berubah sehingga cara kerja harus mengikuti perubahan dan kemajuan tehnologi kalau produktivitas hendak dicapai.

Perang dunia telah membuktikan, bahwa negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dapat meneliti dan menemukan sesuatu yang baru, yang dapat menghancurkan lawan yang belum memiliki senjata yang strategis, akan menaklukkan musuh dan keluar sebagai pemenang. Demikian pula di dunia yang ditandai kompetisi di segala bidang, maka di bidang usaha yang mempunyai ruang lingkup yang luas dan besar, diperlukan peneliti dan analis untuk memecahkan masalah, meniadakan ketidakpastian dan menemukan pembaharuan untuk pengembangan perusahaan. Kini bukan jamannya intuisi, firasat, coba-coba, coba lagi - coba lagi, melainkan jamannya pengetahuan research yang disertai pengetahuan-pengetahuan terapan atau teknologi. Timbullah yang dinamakan studi kerja.

Untuk mencapai tujuannya yang tepat dan effisien, suatu perusahaan dalam hal ini menggunakan pelbagai spesialisasi. Spesialisasi tumbuh karena kompleksnya suatu sistem sehingga dalam struktur organisasinya perusahaan memerlukan

Digitized by Google

adanya bagian penelitian dan pengembangan. Bagian ini sendiri tidak cukup memiliki spesialis suatu bidang, namun pelbagai spesialis mengingat aneka ragamnya masalah yang harus diteliti dan dipecahkan.

Berhubung dengan itu seperti yang telah disinggung di atas, di samping bidang Pendidikan dan Latihan, diadakan bidang Penelitian dan Pengembangan di Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di P N Pos dan Giro, dan di Perum Telekomunikasi.

Pada umumnya, penelitian dan pengembangan adalah rangkaian kegiatan penelaahan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, evaluasi dan analisa data yang dilakukan secara sistematis dan teliti dengan metode-metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih sempurna mengenai suatu subyek penelitian dan mengarahkan pengetahuan itu untuk diterapkan pada kegunaan praktis baik untuk sistem perencanaan maupun sistem pelaksanaan (operating system).

Tujuan penelitian dan pengembangan dapat dirumuskan untuk:

- menciptakan dan atau menyempurnakan jasa-jasa pelayanan yang atau sehingga memenuhi keinginan masyarakat;
- menciptakan dan/atau menyempurnakan perlengkapan, peralatan, model bangunan, metode, prosedure, sistem dan organisasi yang diperlukan suatu perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan secara efisien;
- menyempurnakan pengambilan keputusan baik dalam bidang sistem perencanaan maupun dalam sistem pelaksanaan.

Adapun fungsi penelitian dan pengembangan pada umumnya ialah membantu manajemen untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan yang diperlukan bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat (tepat) baik dalam bidang perencanaan maupun dalam bidang pelaksanaan pelayanan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan.

1) Penelitian dan Pengembangan Pos dan Giro.

Bidang penelitian dan pengembangan Pos dan Giro di Pusdiklitbangpos masih merupakan bidang baru dan masih berada pada tingkat persiapan. Walaupun demikian, ini bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada kegiatan-kegiatan dalam bidang penelitian. Penelitian dan pengembangan sebelumnya dilakukan dengan membentuk Panitia karena tenaga-tenaga peneliti yang khusus belum ada. Anggota-anggota Panitia tersebut terdiri dari beberapa tenaga yang berasal dari beberapa Bagian di Kantor Pusat P.N. Pos dan Giro/Perum Pos dan Giro.

Di samping itu penelitian dan pengembangan dilakukan melalui Pendidikan, baik Pendidikan Tinggi maupun Pendidikan Menengah. Bertolak dari pendapat bahwa belajar adalah meneliti, dan meneliti adalah belajar, maka siswa-siswa Pendidikan Tinggi maupun Pendidikan Menengah pada akhir masa pelajaran diharuskan membuat karya tulis sebagai salah satu syarat untuk dapat lulus. Sebelumnya mereka mendapat pelajaran Metodologi Risearch. Secara ini mereka belajar me-

Digitized by Google

mecahkan masalah melalui penelitian yang hasilnya diteruskan kepada Pimpinan Perusahaan untuk dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Karya tulis mereka hampir meliputi semua aspek kegiatan Perum Pos dan Giro yang ada masalahnya. Penelitian secara ini boleh dikata berdaya guna dan berhasil guna dalam beberapa hal. Karya tulis-karya tulis mereka antara lain menyarankan:

- peningkatan kehumasan;
- penggunaan almari sortir yang pendek tetapi yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- penyeragaman berita bayar/berita terima weselpos dan cekpos;
- dijalankannya weselpos kilat khusus yang dapat dibayar sesudah jam buka loket weselpos;
- perubahan tarip bea stor/cekpos/giro antar sentral dari permilletage ke "sliding scale";
- pengawasan penjualan pesawat televisi dan pembayaran iurannya yang lebih intensip;
- pendidikan pengantarpos yang memadai berhubung tugasnya yang terdepan;
- pencepatan pengembalian berita terima surat kilat khusus kepada pengirim.

Bidang penelitian dan pengembangan di Pusdiklitbangpos sejak dibentuk mulai menangani beberapa program kerja yang telah digariskan. Program kerja itu meliputi penelitian dan pembaharuan beberapa sarana antara lain bis surat, meja tuang, meja cap harian, almari sortir, kereta dorong, bak surat, kereta kantong pos beroda, kursi putar tanpa injakan, kursi putar pakai injakan kaki.

Kegiatan lain di bidang penelitian dilakukan dengan turut serta dalam Panitia Subproyek Penelitian Postel pada Proyek Penelitian Umum Departemen Perhubungan dalam Penelitian Daerah yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 1976/1977 dan dilanjutkan dalam tahun anggaran 1977/1978. Kegiatan penelitian berkisar pada upaya-upaya di bawah ini.*)

a) Penelitian Prototip Organisasi Kantorpos.

Penelitian dilakukan atas sembilan kantorpos "sample" yakni: Madiun, Denpasar, Balikpapan, Tanjungkarang, Pontianak, Pematang Siantar, Bogor, Purwokerto dan Jember dengan mengirimkan kwestioner. Sedangkan pengamatan langsung dilakukan di kantorpos besar Madiun dan Purwokerto.

b) Pengukuran Waktu Pelayanan loket-loket kantorpos. Pada tahun anggaran 1976/1977 kegiatan ini diarahkan kepada pengumpulan data dari Kantorpos Besar Klas I sebagai kantorpos "sample". Dalam tahun anggaran 1977/1978 kantorpos "sample" adalah Kantorpos Besar. Dengan demikian dapat dilakukan pembandingan antara keduanya.

*) *Direktorat Jenderal Postel, "Proyek Penelitian Umum Departemen Perhubungan Sub Proyek Penelitian Postel", Jakarta, 1978, Halaman 1.*

Digitized by Google

c) Pengukuran Waktu Tempuh. Pada tahun anggaran 1977/1978 pengukuran waktu tempuh dilakukan pada rute-rute administrasi pemerintahan yakni Jakarta-Ibu Kota Propinsi dan sebaliknya, antara Ibu Kota Propinsi dan Ibu Kota Propinsi - Ibu Kota Kabupaten dan sebaliknya.

d) Penelitian kriteria efisiensi. Efisiensi yang diteliti adalah efisiensi pengangkutan pos. Hal ini meliputi afisiensi angkutan lokal kantorpos dan efisiensi angkutan antar kantorpos.

2) Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi.

Dibandingkan dengan Penelitian dan Pengembangan Pos dan Giro, Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi lebih maju karena terbawa oleh kemajuan tehnologi telekomunikasi yang cepat di masa kini yang dapat dinamakan Jaman Revolusi Komunikasi.

Banyak penelitian telah dilakukan, antara lain:

a. Penelitian pesawat-pesawat "carrier" type LPP yang sedang dipakai oleh Perumtel.
b. Penelitian dan percobaan "carrier" telepon 1+1 buatan Litbangtel.
c. Penelitian "point to point Transceiver" FM dengan Freq. 150 Mc/s atau 300 Mc/s untuk penyaluran carrier.
d. Mempelajari PCM dengan mengadakan percobaan-percobaan.
e. Penelitian Batere Cell Type OKAC-300-2 dengan menggunakan "Electrolite".
f. Penelitian pembuatan "Mixer Standard" 1 Kc/s dan 50 Kc/s untuk keperluan sinkronisasi Multiplex dan call counter.
g. Penelitian Refleksi dari "Mismatching" pada kabel telepon.
h. Penelitian pesawat "telegraph convertor" ex Libangtel yang sedang dipakai oleh Perumtel.
i. Survey kerusakan "underground distribution" di Jakarta.
j. Penelitian Alat "Digital" membuat Alat pengukur Kerja pemancar.

Di bidang pengembangan telah dikembangkan:

a. Pembuatan Jaringan Kalibrasi untuk Perum Telekomunikasi.
b. Pembuatan Alat Penyaringan Air.
c. Penanganan Korosi pada K.T.O. - Solo.
d. Membuat Peralatan Tambahan untuk Pesawat VHF Radio Telepon Type JHV-266, sehingga dapat digunakan untuk menghubungkan langganan dengan Sentral Telepon.
e. Proyek Pembangunan Sentral-sentral Telepon di Jakarta.
f. Penelitian dan Pembuatan:
   1) Monitoring Telepon untuk SLJJ system MFC.
   2) Sinkronisasi "Cheaker".

Digitized by Google

g. Pembuatan Alat-alat "Interfasing" untuk hubungan Jakarta-Cikampek antara lain:
   1) Hybrid,
   2) Ringer Receiver dan redaman 24 db,
   3) Generator,
   4) Relay Repeater.
h. Pembuatan Thermaccouple Iron Constantant untuk mengukur suhu s/d 900^{O} C.
i. Perencanaan Pembuatan Prototype dan pembuatan 4 bh System penyulingan Aquabidest.
j. Membantu Pengukuran dan Pemasangan Modem di Jawa Tengah.
k. Pengukuran MW Transport Table Emergency.
l. Menunjang Alat-alat Standarisasi untuk overhauling Hubungan microwave di Denpasar Bali.
m. Bantuan Tenaga untuk pemeriksaan STO Cirebon.
n. Mengikuti pengukuran perluasan channel Multiplex Microwave Jawa Bali.
o. Bantuan Tenaga Team Pelaksanaan Pengukuran (Transmission Quality) Proyek Switching di Jakarta.
p. Bantuan tenaga pengukuran dan pencari kabel serta membuat alat pencari alur kabel.
q. Pembuatan Diale Pulse Detector.
r. Testing 7 Pengembangan Lighting Protection & Earting System pada MW Station dan SKSD.
s. Perencanaan Tambahan Lighting Protection pada Site Bima, Ruteng dan Saritene.*)

f. Organisasi Pegawai KORPRI

Adanya pelbagai wadah untuk orbur-orbur selama Masa Perang Kemerdekaan sampai tahun 1971 tidak menciptakan persatuan dan kesatuan dalam Jawatan PTT yang menjadi P.N Postel dan pecah menjadi P.N Pos dan Giro, dan P N Telekomunikasi. Dipolitikkannya orbur-orbur mengakibatkan desintegrasi yang membahayakan jalannya perusahaan. Fungsi pegawai sebagai abdi atau fungsi pelayanan kurang menunjukkan kerjasama. Hambatan ini menyulitkan manajemen perusahaan. Untuk memudahkan koordinasi, integrasi, sinkhronisasi dan simplifikasi dalam mengelola pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara, akhirnya dibentuk organisasi pegawai KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, disingkat KORPRI. KORPRI mempunyai doktrin yang disebut "BHINNEKA KARYA ABDI NEGARA", yang berarti walaupun Anggota-anggota Korps Pegawai Republik Indonesia melaksanakan tugas di berbagai bidang dengan jenis karya yang beraneka ragam tetapi adalah dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada Bangsa, Negara, dan Masyarakat Indonesia.

*) *Direktorat Jenderal Postel, "Laporan Tahunan 1977", Jakarta, 1977, Halaman 54-55.*

Digitized by Google

Untuk mengawali apa hakekat dan asas Korpri, dibawah ini dicantumkan latar belakang pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia.**)

"Sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai adalah sangat penting dan menentukan dalam setiap negara, karena pegawai adalah merupakan tulang punggung dari setiap pemerintah.

Begitu pula dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peranan Pegawai Republik Indonesia adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat serta menjadi pelaksana Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan Nasional. Hal ini telah terbukti dalam sejarah mulai dari Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dewasa ini.

Agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka seharusnya Pegawai Republik Indonesia itu dibina dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada masa yang lalu, baik dalam masa demokrasi liberal maupun dalam masa demokrasi terpimpin, pembinaan Pegawai Republik Indonesia menjadi terlantar karena adanya permainan politik yang tidak wajar dari partai/golongan tertentu, sehingga menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di bidang kepegawaian.

Dalam masa demokrasi liberal, masing-masing partai politik/golongan tertentu berusaha untuk mempengaruhi dan menarik pegawai untuk menjadi anggotanya, karena pegawai itu pada umumnya mempunyai jabatan atau kecakapan yang berpengaruh di dalam masyarakat.

Sebagai akibat permainan partai politik di bidang kepegawaian, maka sering terjadi, bahwa diantara pegawai yang satu kantor tetapi tidak satu partai politik/ golongan tertentu, terdapat suasana saling curiga mencurigai, saling mencari kesalahan, dan sulit diciptakan kerja sama, padahal kerja sama dalam suatu unit organisasi sangat diperlukan untuk melancarkan pelaksanaan tugas.

Akibatnya banyak pekerjaan menjadi terlantar atau sangat lambat pelaksanaannya, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi terlantar dan menimbulkan ketidak puasan di dalam masyarakat.

Akibat yang lebih parah adalah timbulnya hirarkhi, disiplin dan loyalitas ganda, yaitu di satu pihak seorang pegawai harus tunduk kepada kepala unit kerja sebagai atasannya yang resmi, sedang di pihak lain ia harus pula tunduk kepada atasannya yang tidak resmi yaitu pimpinan partai politik.

Apabila pada suatu saat terjadi perbedaan atau pertentangan antara kepentingan dinas dengan kepentingan partai/golongan, maka sering kali pegawai yang menjadi anggota partai politik itu mengutamakan kepentingan partai/golongannya.

Setelah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sebagai reaksi terhadap permainan partai-partai politik/golongan tertentu di bidang kepegawaian selama masa demokrasi liberal, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, yang melarang pegawai golongan F untuk menjadi anggota partai politik.

**) *Korps Pegawai Republik Indonesia, "Himpunan Hasil-hasil Musyawarah Nasional Pertama Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 1978", Jakarta, 1978, Halaman 92-96.*

Digitized by Google

Pegawai golongan F pada waktu itu dihadapkan kepada dua pilihan yaitu apakah akan tetap mempertahankan dirinya sebagai pegawai dengan konsekwensi harus ke luar dari partai politik, atau tetap mempertahankan dirinya sebagai pegawai dengan konsekwensi berhenti sebagai pegawai.

Tujuan pokok dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 itu adalah untuk memulihkan keutuhan dan kekompakan segenap pegawai. Tetapi perkembangan kemudian menunjukkan kenyataan yang lain, yaitu makin terpecah belahnya pegawai. Hal ini disebabkan oleh situasi politik NASAKOM pada masa demokrasi terpimpin yang lama kelamaan menjurus kepada kompartementasi, sehingga memaksa orang untuk memilih apakah ia akan masuk golongan "NAS", "A" atau "KOM" (Nasional, Agama, Komunis). Partai-partai politik yang menjadi tulang punggung struktur politik NASAKOM itu menuntut supaya semua lembaga Negara di-NASAKOM-kan.

Sebagai puncak kegawatan politik dalam masa demokrasi terpimpin, adalah terjadinya gerakan pengkhianatan G30S/PKI yang hendak merobohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gerakan pengkhianatan G30S/PKI itu, dalam waktu yang sangat singkat dapat dihancurkan oleh ABRI dan perangkat pemerintah sipil bersama-sama dengan rakyat yang Pancasilais.

Dalam rangka menyelamatkan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dari pengkhianatan G30S/PKI, diambillah tindakan-tindakan pengamanan. Dari hasil tindakan-tindakan pengamanan tersebut dapatlah diketahui, bahwa ada diantara pegawai yang terlibat dalam G30S/PKI baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah G30S/PKI dapat dihancurkan, maka dimulailah penyusunan Orde Baru, yaitu suatu tatanan yang bertekad mengamalkan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Dalam rangka pembangunan Orde Baru diadakan penataan Lembaga-lembaga Negara dan didudukkan kembali kepada fungsinya semula sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sesudah Pemilihan Umum 1971, dipandang sudah tiba waktunya untuk mengambil langkah-langkah guna mewujudkan keutuhan dan kekompakan segenap pegawai.

Atas dasar pemikiran sebagai yang tersebut di atas, ditetapkanlah Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh Pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan. Maka pada tanggal 29 Nopember 1971 lahirlah Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI, yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

1) Tujuan

Tujuan Korpri adalah:

a. Ikut memelihara dan memantapkan stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis, sebagai syarat mutlak bagi terlaksananya kemajuan di segala bidang menuju

Digitized by Google

tercapainya masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara kebutuhan materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.

b. Ikut memelihara dan meningkatkan mutu dan ketrampilan para anggota dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan.
c. Ikut membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerja sama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis serta mengembangkan rasa kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
d. Ikut meningkatkan keutuhan, kekompakan dan kesejahteraan semua Pegawai Republik Indonesia, sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan tenaga untuk melakukan tugas kekaryaannya.

2) Tugas Pokok.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka KORPRI melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

a. Mensukseskan pelaksanaan program-program Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
b. Membina Korps baik terhadap anggotanya masing-masing maupun terhadap keseluruhan Korps, dengan memanfaatkan hubungan fungsionil yang telah ada, sehingga terwujud kesatuan dalam landasan berpikir, ucapan dan tindakan.
c. Membina dan memelihara mutu serta kesejahteraan para anggota, sehingga menjadi seorang pegawai yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, berdaya guna, dan berhasil guna.

3) Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka KORPRI melakukan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

a. Memberikan dorongan dan memprakarsai pembaharuan dengan menyelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang konstruktip, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat, sebagai warga negara yang baik serta menjadi pelopor bagi usaha-usaha kemajuan.
b. Mendorong peningkatan pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dengan menyelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, ketulusan dan kemampuan para anggota.
c. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan tujuan-tujuan serta tugas-tugas pokok KORPRI.
d. Menampung dan mengolah serta menyalurkan keinginan-keinginan para anggota menurut kebijaksanaan Pemerintah serta perundang-undangan yang ber-

Digitized by Google

laku.

e. Menyelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan Anggota beserta keluarganya, baik materiil maupun spirituil.

4) Modal dasar.

Modal dasar KORPRI adalah:

a. Kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
b. Kesadaran, keyakinan, keberanian, kejujuran, kebijaksanaan, dan ketekunan dalam menyumbangkan karya dan bhakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Hasil karya perjuangan Pegawai Republik Indonesia bersama seluruh rakyat Indonesia yang telah dicapai di bidang Idelogi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
d. Potensi Pegawai Republik Indonesia yang tergabung dan disatukan dalam wadah KORPRI.
e. Wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

5) Keanggotaan.

Yang wajib jadi anggota KORPRI adalah semua Pegawai Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia seperti tercantum dalam Anggaran Dasar KORPRI Bab I, Pasal 1, yaitu:

a. Pegawai negeri sipil,
b. Pegawai Bank milik Negara,
c. Pegawai Bank milik Daerah,
d. Pegawai Badan Usaha milik Negara,
e. Pegawai Badan Usaha milik Daerah,
f. Pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa,
g. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikaryakan pada instansi Pemerintah, Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah,
h. Pensiunan Pegawai Republik Indonesia yang menyatakan dirinya tetap menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI),

Perum Pos dan Giro, Perum Telekomunikasi dan P.T Inti sebagai Badan Usaha milik Negara, sesuai dengan Anggaran Dasar KORPRI jelas merupakan pegawai Republik Indonesia. Dengan demikian segenap pegawai dari ketiga perusahaan ini juga harus terhimpun dalam KORPRI.

Digitized by Google

6) Susunan Pengurus KORPRI di Ditjen Postel.

Setahun setelah KORPRI dilahirkan, maka pada tahun 1972 berdirilah Pengurus Sub Unit Direktorat Jenderal Postel dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sachloel Nasoetion Bc.A.P.
Wakil Ketua : 1. M. Sukandar Bc.A.P.
2. Sabarsudiman.
Sekretaris : Toto Rachmat Dailami Bc.A.P.
Anggota : 1. R. Soetedjo Bc.A.P.
2. Ir. G. Bahdar Djohan.
3. A.B. Satyadharma.*).

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KORPRI Unit Departemen Perhubungan Tanggal 12 Mei 1979 No. SK 22/O.T. 001/Phb 79. Susunan Pengurus KORPRI Ditjen Postel mengalami perubahan. Susunan terbaru adalah:

Ketua : Ir. Rollin.
Wakil Ketua I : M. Soelaeman Bc.A.P.
Wakil Ketua II : Ir. Theo Suryawan.
Sekretaris : S.M. Hoetaoeroek Bc.A.P.
Anggota : 1. Moeljoto Bc.A.P.
2. Ir. Willy Moenandir Mangoendiprodjo.
3. Sumeleh Bc.A.P.
4. R. Soedihardjo Bc.T.T.

7) Susunan Pengurus KORPRI Perum Pos dan Giro.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Unit KORPRI Gabungan Propinsi Jawa Barat Tanggal 2 Januari 1976 No. 03/KORPRI/UG/SK/1976 telah dibentuk Susunan Pengurus Sub Unit KORPRI Kantor Pusat P.N. Pos dan Giro dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Mardijono Bc.A.P.
Wakil Ketua : R. Atang Bc.A.P.
Sekretaris : Iman Mintarsa Bc.A.P.
Anggota : 1. Liliek Soehadi Bc.A.P.
2. Atmanto Bc.A.P.
3. Abdullah Bc.A.P.

Pada tanggal 28 Pebruari 1980 dengan suratnya No. 4703/Dirutpos yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, Direktur Utama Perum Pos dan Giro mengusulkan susunan baru Pengurus KORPRI Sub Unit Kantor Pusat Perum Pos dan Giro Bandung dengan susunan sebagai berikut:

*). *Wawancara dengan Kkpb I Padang, T.R. Dailami Bc.A.P. Tanggal 17 Maret 1980 lewat telepon.*

Digitized by Google

Ketua : Liliek Soehadi. Bc.A.P.
Wakil Ketua : Soetrisno Bc.A.P.
Sekretaris : Abdullah Bc.A.P.
Bendahara : R. Soekinoen Bc.A.P.
Anggota : 1. Stephanus Soetjipto Bc.A.P.
2. Atmanto Bc.A.P.

Pengesahan susunan baru Pengurus KORPRI tersebut hingga akhir Maret 1980 masih ditunggu dari Departemen Perhubungan.

8) Susunan Pengurus KORPRI Perum Telekomunikasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Unit KORPRI Gabungan Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Juni 1974 No.35/KORPRI/UG/1974. Ketua Pengurus KORPRI Gabungan Propinsi Jawa Barat Drs. E. Koswara telah mengesyahkan pengangkatan Pengurus Sub Unit KORPRI Kantor Pusat Perum Telekomunikasi Bandung dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Ir. Boedi Santoso.
Wakil Ketua : Drs. Made Kartasedana.
Sekretaris : A. Baheram.
Anggota : 1. Koeslan Silam Bc.A.T.
2. Soekarmoen Bc.T.T.
3. Mohd. Hosen.

Berhubung dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Perum Telekomunikasi dan adanya mutasi maka dalam tahun 1979 Susunan Pengurus Sub Unit KORPRI Kantor Pusat Perum Telekomunikasi diubah menjadi:
Ketua : Ir. Suhana.
Wakil Ketua I : Drs. Made Martasedana.
Wakil Ketua II : Koeslan Silam Bc.A.T.
Sekretaris : R.M. Sri Wirasto Bc.A.P.
Anggota : 1. Tjiptadi Bc.T.T.
2. Dr. R.M. Soesilo.
3. Tohamim.
4. R. Moerwahono.
: 5. Soembodo.

Susunan Pengurus baru tersebut hingga Maret 1980 masih menunggu pengesyahan dari Ketua Unit KORPRI Gabungan Propinsi Jawa Barat.

Dari Unit KORPRI Departemen Perhubungan melalui Surat Keputusannya tanggal 30 Agustus 1979 No. SK. 48/OT.002/PHB-79 diperoleh pengesyahan pengangkatan Pengurus KORPRI Sub Unit Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:
Ketua : Ir. Willy Munandir Mangoendiprodjo.

Digitized by Google

Wakil Ketua I : Ir. Suhana.
Wakil Ketua II : Ir. Boedi Santoso.
Wakil Ketua III : Drs. Made Martasedana.
Wakil Ketua IV : Soemardi Bc.T.T.
Sekretaris I : Koeslan Silam Bc.A.T.
Sekretaris II : R.M. Sri Wirasto Bc.A.P.
Bendahara : Tohamim.
Anggota : 1. R.A. Soerjadi Bc.A.T.
2. Soeharto Bc.T.T.
3. Soemrambah Bc.A.T.
4. Eem Rachmat Bc.T.T.
5. Noertjahjo Bc.T.T.
6. Ir. Damai Sinulingga.
7. I Goesti Ngurah Oka Bc.T.T.
8. R. Sri Hadi Soemodihardjo Bc.T.T.
9. Mohamad Hosen.
10. Tjiptadi Bc.T.T.

Susunan Pengurus Sub Unit Perum Telekomunikasi tersebut hingga awal tahun 1980 belum mengalami perubahan lagi.

9) Susunan Pengurus KORPRI P.T. INTI (Persero).

Di lingkungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Telekomunikasi Indonesia telah terbentuk susunan pengurus KORPRI sejak 7 Januari 1980, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Direktur Utama
Ketua : Tjaroso Bc.T.T.
Wakil Ketua I : Drs. A. Talib R.
Wakil Ketua II : Moch. Dahlan Bc.T.T.
Wakil Ketua III : Harun Al Rasjid
Sekretaris I : Arfan E. Lison S.H.
Sekretaris II : Amir Adiwidjaja
Anggota : 1. Drs. Yunirman Bahar
2. Ir. Maksum Arsad
3. Ir. Komar Ramim
4. Ir. F. Badrun
5. Drs. Usnadibrata
6. Drs. Mislaeni
7. Suparno

Digitized by Google

g. Organisasi Wanita

1) Periska Postel

Dalam bulan April 1968 Persatuan Wanita Postel (PWPOSTEL) mengadakan Kongresnya yang ke-III di Tretes Jawa Timur. Kongres tersebut dikunjungi oleh Wakil-wakil dari 130 Cabang.

Pada Kongres ke-III inilah nama Persatuan Wanita Postel berubah menjadi Persatuan Isteri Karyawan dan Karyawati Postel, disingkat Periska Postel.

Berbeda dengan keanggotaan PWPOSTEL yang bersifat sukarela, maka pada Kongres ke-III ini diputuskan, bahwa keanggotaan Periska Postel menjadi otomatis, sehingga setiap isteri karyawan harus menjadi anggota, kecuali bagi karyawati masih tetap bersifat sukarela.

Pada waktu itu jumlah cabang seluruhnya 252 dengan jumlah anggota 20.000 orang.

Susunan Pengurus Periska Postel Hasil Kongres ke-III adalah sebagai berikut:

Pelindung	: Dirjen Postel.
Penasehat I	: Ny. Suhardjono
Penasehat II	: Ny. Sabarsudiman
Ketua I	: Ny. Momod Ranawidjaja
Ketua II	: Ny. E. Nasution
Ketua III	: Ny. Abdoesoeki
Sekretaris Umum	: Ny. Roesli
Sekretaris I	: Ny. Suwandi
Sekretaris II	: Ny. Abdulrachman
Bendahari I	: Ny. Notohamidjojo
Bendahari II	: Ny. Soekendar

Kongres ke-IV diselenggarakan pada bulan September 1972 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan keputusan-keputusan antara lain perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta struktur organisasinya. Hal tersebut dilakukannya agar Periska Postel dapat berkembang lebih luas lagi. Menjelang kongres ke-IV tersebut jumlah cabang bertambah menjadi 294 cabang dengan jumlah anggota sebanyak 23.059 orang.

Susunan pengurus hasil kongres ke-IV ini adalah sebagai berikut:

Pelindung	: Dirjen Postel
Penasihat I	: Ny. Soehardjono
Penasihat II	: Ny. E. Nasution
Ketua Umum	: Ny. Soebagjo
Ketua I	: Ny. Momod Ranawidjaja
Ketua II	: Ny. Sulaeman
Penulis I	: Ny. Harun Al Rasjid
Penulis II	: Ny. Mardijono

Digitized by Google

Bendahari I : Ny. Muljoto
Bendahari II : Ny. Eem Rachmat

Pada bulan Januari 1977 diselenggarakan Musyawarah Kerja ke-V di Bandung. Musyawarah Kerja ke-V ini dihadiri oleh 61 orang peserta dan 30 orang peninjau dari tingkat Pusat dan Wilayah.

Susunan pengurus hasil Musyawarah Kerja ke-V adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Ny. Willy Moenandir dan Ny. Moeljoto.
Ketua I : Ny. Momod Ranawidjaja.
Ketua II : Ny. Mustafa
Ketua III : Ny. Soelaeman
Ketua IV : Ny. J. Suwandi
Sekretaris I : Ny. Soetrisno
Sekretaris II : Ny. Eem Rachmat
Bendahari I : Ny. Soedihardjo
Bendahari II : Ny. Soekarno.

2) Organisasi

(1) Asas dan tujuan.

(a) Berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang 1945 dan berpedoman pada Garis-Garis Besar Haluan Negara.
(b) Bertujuan:
  i membantu para pejabat Pos dan Telekomunikasi dalam proses pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makumur, baik material maupun spiritual.
  ii membantu para pejabat Pos dan Telekomunikasi dalam proses pembangunan dengan memupuk dan meningkatkan kesejahteraan para anggota keluarga.
  iii menggalang dan mengembangkan rasa kesatuan dan kekeluargaan serta semangat gotong royong.
  iiii membina para anggota untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan kedudukannya selaku isteri, ibu rumah tangga dan wanita dalam lingkungan keluarga besar Pos dan Telekomunikasi.
  iiiii mengkoordinir semua kegiatan organisasi dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah, mengadakan hubungan dengan organisasi di luar lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

(2) Struktur:

i Struktur organisasi ditetapkan pada tingkat Pusat, Wilayah, Cabang dan Ranting.
ii Di bawah Dewan Pimpinan Pusat bernaung 3 Unit, yaitu Pengurus Pusat Unit I

Digitized by Google

(Pos dan Giro, Pengurus Pusat Unit II (Telekomunikasi) dan Pengurus Pusat Unit Khusus (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi).

iii Pengurus Pusat Unit I meliputi Pengurus Wilayah Unit I dan Pengurus Wilayah Khusus Unit I (Cabang-cabang pendirian Pos dan Giro dan Cabang-cabang Direktorat Pos dan Giro).

iiii Pengurus Pusat Unit II meliputi Pengurus Wilayah Unit II dan Pengurus Wilayah Khusus II (Cabang-cabang) pendirian Telekomunikasi dan Cabang-cabang Direktorat Telekomunikasi).

iiiii Pengurus Pusat Unit Khusus meliputi Cabang Besar dari Direktorat Jenderal Postel dan Cabang P T INTI di Bandung.

iiiiii Badan Koordinasi di antara Pengurus Wilayah Unit I dan Unit II di daerah, khusus untuk menangani pendidikan formal dan hubungan dengan organisasi luar, adalah Dewan Pengurus Wilayah tingkat I dan untuk Cabang-cabang (di tingkat Kabupaten) adalah Dewan Pengurus Wilayah tingkat II.

(3) Kegiatan

i Kegiatan organisasi ke dalam, pada tingkat Pusat di Bandung dan Jakarta; pada tingkat Wilayah di ibukota Propinsi, kedudukan Kepala Daerah pos dan Telekomunikasi; dan tingkat Cabang dan Ranting di kota tempat kedudukan Kepala pendirian Pos dan Telekomunikasi.

ii Kegiatan organisasi ke luar dalam hubungan dengan organisasi wanita lain, dengan/sebagai anggota BKOW, BPOW, GOPTKI dan KOWANI.

iii Dalam hubungan dengan Dharma Wanita, baik di Pusat maupun di Wilayah dan Cabang dilaksanakan dengan perantaraan/sebagai anggota dari Sandhyakara Murti.

(4) Program kerja.

Program kerja Periska Postel terdiri dari program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang.

(a) Program kerja jangka pendek.

i Kunjungan ke tempat-tempat terpencil, mengadakan pembicaraan dari hati ke hati dengan para isteri karyawan sambil memberikan penerangan dan petunjuk bagaimana cara berorganisasi kekeluargaan.

ii Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan keluarganya dan memberikan bantuan berupa moral maupun material.

iii Mengadakan pertemuan dengan isteri-isteri pensiunan sambil memperhatikan pula kesehatan dan kesejahteraan keluarganya.

iiii Mengaktipkan isteri-isteri pensiunan dalam kegiatan-kegiatan organisasi dengan jalan motivasi (memperhatikan kemampuan dan keakhliannya).

(b) Program kerja jangka panjang:

Digitized by Google

i Pendidikan (formal dan non formal)
- Melanjutkan pembangunan gedung-gedung sekolah sebagai usaha menanggulangi kekurangan gedung-gedung/membantu pemerintah.
- Melanjutkan membangun asrama murah di beberapa tempat dalam usaha membantu anak-anak karyawan yang memerlukan.
- Melanjutkan usaha untuk memberikan bea siswa kepada anak-anak karyawan, dengan syarat-syarat yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
- Menggalakkan kembali kursus-kursus keterampilan wanita seperti masak-memasak, menjahit dan sebagainya.
- Mengadakan macam-macam kursus bagi anak-anak karyawan yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya, sebagai persiapan hari depannya, seperti kursus montir radio, montir kendaraan, memperbaiki mesin tik, membuka bengkel dan sebagainya.

(5) Penerangan

(a) Memberikan penerangan melalui ceramah, slide, film dan majalah mengenai soal-soal yang erat hubungannya dengan cara berorganisasi, kesehatan, Keluarga Berencana, pendidikan, kemasyarakatan dan lain sebagainya yang perlu diketahui dalam masa Pembangunan.
(b) Mengeluarkan Bulletin dan majalah.

(6) Sosial.

(a) Mengunjungi para anggota yang ditimpa kemalangan dan bila mungkin memberi bantuan yang diperlukan.
(b) Mengadakan kerja sama dengan organisasi lain, dan/atau berusaha sendiri mengumpulkan beras, uang, pakaian bekas yang masih dapat dipergunakan untuk disumbangkan kepada korban bencana alam, baik disampaikan langsung maupun melalui panitia atau P.M.I.

(7) Usaha

Mengusahakan barang-barang keperluan rumah tangga dan lain sebagainya yang diperlukan oleh anggota dan keluarganya dengan mencicil dengan harga di bawah harga toko.

(8) Kesehatan dan olah raga

Mengadakan macam-macam olah raga, baik sendiri maupun dalam rangka kerja sama dengan organisasi lain.

Digitized by Google

2) *DHARMA WANITA*

Organisasi-organisasi isteri pegawai negeri terdapat pula di instansi-instansi lain dalam lingkungan Departemen Perhubungan. Berhubung dengan itu atas prakarsa Ny. Frans Seda, maka organisasi-organisasi isteri pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Perhubungan dihimpun dalam Badan Kerjasama yang disebut B.K.O.W. Departemen Perhubungan pada tanggal 30 Mei 1969.

Sementara itu atas prakarsa Dewan Pembina Korpri, Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 2 Maret 1974 diadakan rapat persiapan pembentukan Gabungan Persatuan Isteri Pegawai Republik Indonesia yang dihadiri oleh para utusan dari Persatuan Isteri Pegawai yang ada pada tiap-tiap Departemen dan Lembaga, Anggota Dewan Pembina dan Pengurus KORPRI Pusat.

Setelah diadakan persiapan seperlunya, maka pada tanggal 25 Agustus 1974 terbentuklah DHARMA WANITA yang beranggotakan Organisasi-organisasi Isteri Pegawai Negeri Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan Agung, Pemerintahan Daerah, Bank milik Negara dan Perusahaan milik Negara.

Organisasi-organisasi isteri pegawai dari Departemen-departemen, Lembaga dan sebagainya mempunyai nama sendiri-sendiri dan beranggotakan organisasi-organisasi isteri pegawai setingkat Direktorat Jenderal. Di Departemen Perhubungan organisasi itu bernama Sandhyakara Murti, yang didirikan pada tanggal 17 September 1974.

Tujuan DHARMA WANITA adalah masyarakat adil dan makmur yang berkeseimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keanggotaan adalah semua organisasi isteri pegawai negeri yang ada di Departemen-departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara, serta instansi-instansi Pemerintah lainnya, yang hampir semuanya merupakan organisasi-organisasi yang telah lama berdiri. Dalam perjalanannya sebagai organisasi gabungan telah berkembang berbagai pikiran konstruktif mengenai bentuk organisasi untuk menyongsong tugas-tugas pembangunan bangsa Indonesia di masa depan.

Pada pembukaan Musyawarah Nasional Pertama DHARMA WANITA pada tanggal 30 Mei 1979, Ketua Umum DHARMA WANITA, Ny. E.N. Sudharmono, melaporkan antara lain sebagai berikut:

"Kesadaran kami akan tugas-tugas pembangunan bangsa yang makin besar dalam tahap-tahap pembangunan berikutnya, menyadarkan kami betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam tubuh DHARMA WANITA itu dalam waktu-waktu yang akan datang. Rasa pentingnya persatuan dan kesatuan ini bagi kami semua, bukan hanya keinginan, melainkan terasa sebagai kebutuhan yang mendesak. Berbagai kalangan di antara anggota-anggota Dharma Wanita menginginkan bentuk yang lebih nyata dari persatuan dan kesatuan seluruh tubuh Dharma Wanita. Kami Presidium Dharma Wanita dan Pengurus Harian sangat menghargai dan memperhatikan hasrat tadi. Kami sangat terharu, karena hasrat untuk meningkatkan persatuan

Digitized by Google

dan kesatuan ini telah mengikhlaskan dileburnya segala atribut-atribut organisasi-organisasi anggota Dharma Wanita seperti yang ada sampai sekarang ini. Presidium Dharma Wanita memandang hasrat persatuan dan kesatuan seperti itu, tidak lain adalah manifestasi yang sangat jelas dari rasa tanggung jawab agar makin dapat menyumbangkan diri bagi suksesnya tugas-tugas pembangunan bangsa di masa depan, yang menjadi cita-cita dan tujuan pokok Dharma Wanita. Perobahan yang menjamin persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh tadi, tentu mengharuskan perobahan-perobahan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi kami."

Dalam sambutannya pada pembukaan Munas I Dharma Wanita. Berkatalah Menteri Dalam Negeri/Ketua Dewan Pembina Pusat KORPRI/DHARMA WANITA antara lain sebagai berikut:
*"Thema Musyawarah Nasional ini, yaitu "Dengan semangat kepeloporan DHARMA WANITA bersama KORPRI bertekad mensukseskan PELITA III", merupakan tanggapan yang tepat pula atas perkembangan pembangunan Bangsa pada tingkat yang dapat dicapai sekarang ini. Kebersamaan dengan KORPRI merupakan salah satu ciri khas perjuangan DHARMA WANITA, karena KORPRI dan DHARMA WANITA itu walaupun dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, ibarat sekeping mata uang, dapat dibedakan kedua belah permukaannya, namun pada hakekatnya merupakan ketunggalan yang saling menggenapi, dan oleh karenanya tidak dapat dipisah-pisahkan."**)

Sudah selayaknya dan seharusnya DHARMA WANITA berjalan bersama KORPRI, isteri sejalan dengan suami yang bekerja sebagai pegawai negeri. Daripada berupa organisasi gabungan lebih baik kalau DHARMA WANITA berobah menjadi organisasi kesatuan yang terpadu dengan nama yang satu. Demikianlah semangat yang merata pada Munas ke I DHARMA WANITA. Berhubung dengan itu pada Munas tersebut ditetapkan bahwa DHARMA WANITA menjadi satu-satunya Organisasi Isteri Pegawai Republik Indonesia. Maka seluruh Organisasi Isteri Pegawai Negeri diharuskan untuk berintegrasi dengan DHARMA WANITA dan meleburkan dirinya ke dalam DHARMA WANITA.

Pada tanggal 10 Oktober 1979 Sandhyakara Murti beserta seluruh organisasi anggotanya, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, termasuk Periska Postel, meleburkan dirinya ke dalam DHARMA WANITA.

Dengan demikian maka DHARMA WANITA yang sebelumnya bersifat koordinatip menjadi bersifat kesatuan dan pembinaan Organisasi-organisasi yang sebelumnya berbentuk vertikal, kini menganut sistem pembinaan teritorial. Dalam hubungannya dengan KORPRI, maka DHARMA WANITA mempunyai hubungan yang sangat erat dengan KORPRI, sehingga hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Dalam perobahan organisasi ini maka unsur pelaksana tingkat Pusat DHARMA WANITA dalam tubuh Postel adalah sebagai berikut:

---

*) *Menteri Dalam Negeri, "Sambutan Menteri Dalam Negeri/Ketua Dewan Pembina Pusat KORPRI/DHARMA WANITA pada pembukaan MUNAS KE I DHARMA WANITA tanggal 30 Mei 1979."*

Digitized by Google

a) DHARMA WANITA Sub Unit Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
b) DHARMA WANITA kelompok Kantor Ditjen Postel;
c) DHARMA WANITA Sub Unit Pusat Perum Pos dan Giro;
d) DHARMA WANITA Sub Unit Pusat PERUMTEL;
e) DHARMA WANITA Sub Unit Pusat P T INTI.*)

h. Kehumasan

Suatu kegiatan yang khas mulai berkembang sejak awal Masa Orde Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ialah adanya "Public Relations Service" atau Dinas Hubungan Masyarakat disingkat Humas. Baik di PN Pos dan Giro maupun di PN Postel sejak 1964 mempunyai Humas.

Humas adalah fungsi manajemen yang bertugas meneliti pendapat, keinginan dan sikap masyarakat, menyesuaikan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pimpinan dengan kepentingan masyarakat, serta melakukan usaha-usaha penerangan terpadu secara internal dan eksternal.**)

Mengingat pentingnya Humas dalam fungsi manajemen serta luasnya ruang lingkup tugas Humas dan mengingat sasaran penyelenggaraan, Humas diarahkan kepada:

- Menghilangkan citra negatip masyarakat terhadap perkembangan, kemajuan dan hasil-hasil Pembangunan di sub sektor Pos dan Telekomunikasi.
- Memelihara dan mengembangkan timbulnya opini publik yang sehat dalam usaha memperoleh pengertian dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas Pembangunan di sub sektor Pos dan Telekomunikasi.
- Menampung dan membina terwujudnya kontrol masyarakat yang membangun dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas Humas berkembang sedemikian sehingga menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan lebih-lebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Boleh dikatakan bahwa para pejabat Humas merupakan telinga, mata, bahkan juru bicara organisasinya. Lebih dari itu, dalam masyarakat modern, Humas merupakan salah satu organ yang turut menentukan dan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi.

Dalam dekade pembangunan nasional, di samping melakukan tugas penunjangan kegiatan operasional, maka fungsi dan tugas Humas mendapat tekanan khusus. sebagaimana disebutkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara bahwa "Keberhasilan pembangunan tergantung pada ketertiban dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat."

Usaha untuk mencapai tujuan Humas dalam pelayanan intern dan ekstern antara lain dengan menerbitkan majalah.

*) *Surat Pengurus Dharma Wanita Sub Unit Ditjen Postel No. 018/DW/Postel/Um, Jakarta, Desember 1979, dan No. 01/DW/Postel/Um/80, Jakarta, 5 Januari 1980.*

**) *Dephub Ditjen Postel, "Kertas-kertas Kerja Peserta Pekan Orientasi dan Rapat Koordinasi Humas di Lingkungan Ditjen Postel," Jakarta, 1980, Halaman 4, 9.*

Digitized by Google





Digitized by Google



Jakarta, 8 - 10 Januari 1980.
Rapat Anggota Dharma Wanita Sub Unit Ditjen Postel (Gambar paling atas). Pimpinan Rapat. Dari kiri kekanan: Ny. M. Junus, Ny. Theo Suryawan, Ny. Sulaeman, Ny. Suryadi, Ny. Rollin, Ny. Moeljoto dan Ny. Willy Moenandir M. Baris kedua dan ketiga Pengurus Dharma Wanita Sub Unit Ditjen Postel ketika sedang dilantik oleh Dirjen Postel Drs. Suryadi.

Digitized by Google

Sebagai organ resmi dalam rangka pembinaan karyawan dan sekaligus memberikan informasi kepada pihak luar, maka P N Pos dan Giro dan P N Telekomunikasi masing-masing menerbitkan sebuah majalah. Hal-hal yang dimuat dalam majalah itu memuat berbagai kegiatan yang bersifat informatip baik bagi pegawai sendiri, maupun bagi pihak luar.

1) Merpatipos.

P N Pos dan Giro pada tahun 1967 menerbitkan Organ Resmi perusahaan, yang pada waktu itu disebut Warta Bulanan Resmi (Wares) Pos dan Giro. Karena berbagai kesulitan pada tahun tersebut, organ resmi Pos & Giro ini hanya terbit sebanyak tiga kali penerbitan.

Pada tahun-tahun berikutnya Wares Pos & Giro terbit secara teratur tiap bulannya. Ukuran majalah adalah 13 x 20 cm dengan oplah tiap bulan sebanyak 8.500 exemplaar. Pada waktu itu setiap penerbitan masih belum menggunakan cetakan yang modern, bahkan masih distensil.

Dalam Tahun 1970 Wares mendapat Surat Ijin Terbit dari Departemen Penerangan tertanggal 29-8-1970 dengan nomor 01010/SK DIR/PP/SIT 1970.

Pada tahun 1971 organ resmi Pos & Giro berubah nama dari Warta-Bulanan Resmi menjadi Merpatipos. Perubahan nama itu terjadi atas pemikiran Surjono Bc.A.P. yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Hubungan Masyarakat Pos & Giro bersama-sama dengan Fachri Pasaribu, Drs. Kikin Sodikin dan Saiful Parmuhunan Pohan.

Pembinaan mental para karyawan melalui Merpatipos dilakukan pada tahun 1971. Dan pada tahun 1972 oplah Merpatipos yang telah menggunakan percetakan intertip berjumlah 8.500 tiap bulannya.

Pada tahun 1974 ketika terjadi pergolakan mahasiswa, maka tiap penerbitan diharuskan mempunyai ijin cetak. Merpatipos mendapatkan ijin cetak dari Laksus Pangkopkamtibda Jabar tertanggal 12 Pebruari 1974 dengan nomor 43-6/Kamda/JB74.

Pada tahun 1975 seluruh pegawai Pos & Giro setiap bulan secara teratur mendapat Merpatipos secara cuma-cuma. Pada waktu ini penggunaan cetak offset sudah dimulai. Dari tahun ke tahun mutu Merpatipos selalu ditingkatkan. Isinya berupa tulisan-tulisan mengenai postal, umum dan kerokhanian.

Pada tahun 1979 oplah Merpatipos sudah mencapai 19.500 tiap bulannya dan dibagikan kepada seluruh karyawan dan para pensiunan. Dan pada tahun ini pula, pada bulan Pebruari Merpatipos berhak menggunakan nomor kode ISSN 0126-2904 sebagai satu majalah ilmiah yang diakui secara Internasional. Pemberian nomor tersebut diberikan oleh International Serial Data System yang berkantor pusat di Paris, Perancis. Diakuinya Merpatipos sebagai majalah ilmiah oleh international dilakukan atas dasar penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

2) Gema Telekomunikasi terbit.

Digitized by Google

Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin maju, di mana diperlukan pengenalan serta pemberian informasi tentang pertelekomunikasian, baik untuk intern maupun ekstern, maka pada tanggal 1 Juni 1968 diterbitkan majalah bulanan yang bernama "Gema Telekomunikasi". Waktu itu Gema Telekomunikasi disebut "Cantel" yang berarti *Can*(dra warta) *tel*(ekomunikasi). Tahun 1980 singkatan ini diganti dengan "Gematel".

Penerbitan majalah ini didukung oleh Surat Laksusda Jabar sebagai Surat Izin Cetak (SIC) dengan no. 33-6/Kamda/Jb/74 tanggal 31 Januari 1974. Kemudian dalam tahun 1975 dikuatkan dengan STT no. 017/Sk/Dirjen PC/STT/1975 tanggal 30 Desember 1975 sebagai legalisasi dari Departemen Penerangan RI.

Bulan Juni 1968 Gema Telekomunikasi memulai penerbitan perdananya dengan bentuk sederhana dan dicetak hand set dengan mempergunakan kertas koran. Ukuran majalah kecil yaitu 20x24 cm hitam putih dan beroplaag 10.000 exp setiap bulan.

Penerbitan majalah dengan bentuk dan ukuran seperti itu berlangsung hingga nomor 49 penerbitan bulan Mei 1972. Para pengasuhnya terdiri dari: Adjas Baheram selaku Pemimpin umum; Drs. Musjafri Effendy dan Djamil Soeherman selaku Redaksi, dibantu oleh photo reporter Lalijan dan bagian Sirkulasi nyonya Soekaesih yang dikuatkan oleh SKP Diroptektel no. 655/Humastel tanggal 3 September 1975.

Kemudian pada penerbitan no. 50 bulan Juni 1972 Gema Telekomunikasi meningkatkan mutunya dengan bentuk besar berukuran 17x21 cm, dicetak offset dengan kertas HVS dan cover menggunakan kertas Kuns druk 120 gram, dilengkapi dengan tata warna color seperation untuk cover dan halaman tengah, halamannya ditambah menjadi 80 halaman dengan oplaag 20.000 tiap bulan.

Sejak nomor ini Gema Telekomunikasi berhasil merebut penggemarnya secara luas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Majalah yang semula bersifat intern ternyata menjadi organ resmi PERUMTEL. Majalah ini dikatagorikan sebagai majalah teknologi ilmiyah dan berhasil merebut minat dunia untuk mengakuinya. Gema Telekomunikasi memperoleh nomor standar dari ISDN yang berpusat di Paris melalui LIPI dengan ciri ISSN-0125-9857 (International Standard Serial Number) yang harus dicantumkan pada setiap nomor pada cover dan rubrik-rubrik penting lainnya.

Dalam tahun 1978 susunan Redaksi/pengasuhnya berubah menjadi: Eem Rachmat BcTT selaku Pemimpin Umum dan anggota staf tetap. Kemudian sejalan dengan perubahan struktur organisasi Perusahaan, di tahun 1980 susunan Redaksi berubah lagi sebagai berikut: Pemimpin Umum: Noertjahjo BcTT, Redaksi tetap ditambah dengan Staf Pembantu dari ke empat Direktorat: Kasekoptek, Kabinkugtel, Kasekkaptel dan Kabinpegtel.

3) INTI

Sejak berdirinya PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada tahun 1974, telah dirintis penerbitan majalah/bulletin INTI sebagai suatu media penerangan kepada Karyawan yang isinya dalam lingkungan teknik, ekonomi, sosial dan

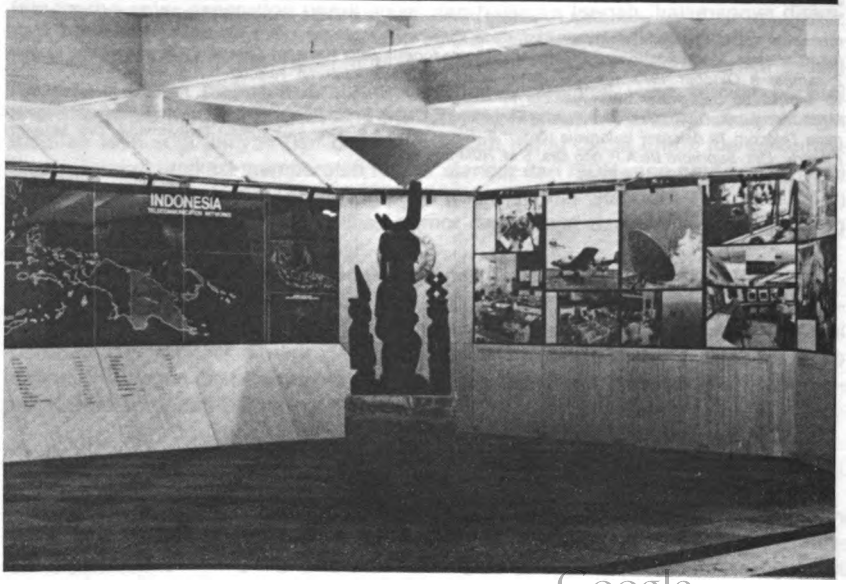
Digitized by Google



Jakarta, 1972.
Sekditjen Postel, S. Nasoetion Bc.A.P., sedang memberikan penjelasan-penjelasan kepada Presiden Soeharto, mengenai stand Pos dan Telekomunikasi, pada Pameran Perhubungan yang diselenggarakan di Bina Graha (gambar atas). Stand Administrasi Telekomunikasi Indonesia pada Pameran Telecom 75 di Jenewa dari tanggal 2 sampai 8 Oktober 1975. (gambar kanan atas) dan pada Pameran Telecom 79 di Jenewa dari tanggal 20 sampai 26 September 1979 (gambar kanan bawah). Delegasi Indonesia pada Telecom 75 terdiri dari: MKM Mangundiprodjo, Drs. Sjamsuddin Tanuatmadja, Adjas Baheram dan Drs. Suprapto Bc.A.P., sedangkan pada Telecom 79 delegasi Indonesia terdiri: E. Supandi Bc.A.P., Drs. Sjamsuddin Tanuatmadja, Drs. Musyafri Effendy, Drs. Suprapto Bc.A.P. dan Drs. S.M. Hutagaol Bc.A.P.

Digitized by Google





Digitized by Google

budaya. Disamping itu memuat juga berita-berita kegiatan Perusahaan dan karyawan.

Penerbitan dilaksanakan oleh HUMAS PT INTI dengan sirkulasi oplah 700 eksemplar dan terbit setiap bulan. Pengelolaan media tersebut dalam tahun 1974 s d 1978 oleh:

- Drs. Usnadibrata
- Arfan E Lison, SH

Dan selanjutnya pada tahun 1979 sampai sekarang dikelola oleh:

- Drs. Usnadibrata
- Kemal Asmara Hadi

i. OLAH RAGA DAN KESENIAN

OLah raga dan kesenian sebagai sarana kesegaran jasmani dan rokhani merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pegawai. Melalui olah raga dan kesenian kesegaran jasmani dan rokhani yang jenuh dapat dipulihkan. Bahkan lebih dari itu, melalui olah raga dan kesenian hubungan kekeluargaan antara atasan dengan bawahan semakin menjadi erat. Hubungan melalui olah raga dan kesenian lebih manusiawi dibanding dengan hubungan dinas yang cenderung industrial. Dengan adanya kegiatan olah raga dan kesenian di dalam kantor, maka hubungan industrial dan humanitas akan terasa lebih seimbang.

Ketika itu sebagaimana halnya dengan POPTT, PORKES POSTEL pun belum dapat bergerak secara intensif, oleh karena organisasi ini belum mempunyai program kerja yang jelas. Kegiatan-kegiatannya masih bersifat kadangkala dan biasanya terbatas pada sekitar hari Ulang Tahun P.N. Postel saja dengan ikut serta dalam pertandingan olahraga antar pegawai. Keadaan serupa ini berlangsung terus sampai akhir tahun 1971.

Sementara itu di kalangan olahragawan P N Pos dan Giro timbul keinginan yang kuat untuk menggairahkan kehidupan olah raga dan kesenian, akan tetapi hasrat tersebut belum dapat diwujudkan secara maksimal berhubung struktur organisasi dirasakan belum memberikan kemungkinan dan keleluasaan yang diharapkan. Mungkin atas dasar pertimbangan itulah maka beberapa pejabat P.N. Telekomunikasi mengambil gagasan untuk mendirikan PORKESTEL pada tahun 1971 (terpisah dari PORKES POSTEL), disusul dengan penyelenggaraan POR I PORKESTEL di Solo pada tahun itu juga.

1) Porkes Pos dan Giro.

Pada tahun 1971 beberapa tokoh olah raga di Pos & Giro merasa terdorong untuk mengambil langkah-langkah dalam mengisi kekosongan akibat bekunya Porkes Postel tersebut. Terutama bidang organisasi tingkat pusat perlu dibenahi. Pada waktu itu dilakukan pertemuan antara pimpinan Perusahaan yang diwakili oleh Dirpegpos dengan pimpinan cabang-cabang olah raga di Kantor Pusat.

Digitized by Google

Sebagai keputusan hasil pertemuan tersebut, ditunjuk Moch. Oesman, K. Lupos, sebagai formatur yang diberi tugas untuk membentuk Pengurus Pusat dan menyiapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sekaligus dengan usul mengenai besarnya dana yang dibutuhkan.

Pada tanggal 8 Agustus 1972 ditetapkan berdiri secara resmi PORKES Pos Giro. Sebulan kemudian, pada hari Ulang Tahun Postel ke XXVII, Porkes Pos Giro ikut memeriahkan hari bersejarah itu dengan menyelenggarakan pertandingan-pertandingan olah raga serta mengadakan acara kesenian. Selain itu kegiatan ke luarpun terus ditingkatkan. Dan kelahiran Porkes Pos Giro ini kemudian dilaporkan kepada Dirjen Postel pada tanggal 5 Maret 1973. Dan Dirjen Postel pada waktu itu menyambut baik kelahiran Porkes Pos Giro tersebut.

Pada bulan September 1973 diselenggarakan POR I POS GIRO di Bandung. Disamping itu juga diselenggarakan Kongres I PORKES POS GIRO. Pada kongres ini berhasil ditetapkan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Program Kerja tahun 1973 - 1976. Pekan Olah Raga I Pos Giro ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Postel, Sahlul Nasution Bc.A.P.

Peserta yang mengambil bagian berjumlah 398 orang yang mewakili semua Daerah Pos (kecuali Daerah Pos Maluku), yaitu:
- Daerah Pos I, Jakarta
- Daerah Pos II, Semarang,
- Daerah Pos III, Surabaya,
- Daerah Pos IV, Palembang,
- Daerah Pos V, Padang,
- Daerah Pos VI, Medan,
- Daerah Pos VII, Ujungpandang,
- Daerah Pos VIII, Bandung,
- Daerah Pos IX, Banjarbaru,
- Daerah Pos X, Denpasar,
- Daerah Pos XII, Irian Jaya, dan
- Daerah Khusus Kantor Pusat, Bandung.

Adapun cabang-cabang olah raga yang dipertandingkan adalah sebagai berikut: Sepak Bola, Bulu Tangkis, Bola Volley, Tenis Meja, Tenis, Catur dan Bridge.

Team putri belum diikut sertakan pada Pekan Olah Raga I ini. Begitu pula kesenian pada waktu itu belum dapat dilaksanakan karena berbagai kesulitan. Tampil sebagai juara umum pada Pekan Olah Raga I Pos Giro di Bandung ini adalah kontingen dari Daerah Pos II, Semarang.

Pekan Olah Raga II Pos Giro diselenggarakan pada bulan Juni 1976 di Magelang. Selain POR II Pos Giro, juga dilaksanakan Kongres Porkes Pos Giro II. Pekan Olah Raga II Pos Giro ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Postel, Soehardjono. POR II Pos dan Giro diikuti oleh 741 peserta yang mewakili Daerah pos - daerah pos sebagai berikut:
- Daerah Pos I, Jakarta,
- Daerah Pos II, Semarang,

Digitized by Google

- Daerah Pos III, Surabaya,
- Daerah Pos IV, Palembang,
- Daerah Pos V, Padang,
- Daerah Pos VI, Medan,
- Daerah Pos VII, Ujungpandang,
- Daerah Pos VIII, Bandung,
- Daerah Pos IX, Banjarbaru,
- Daerah Pos X, Denpasar,
- Daerah Pos XI, Amboina,
- Daerah Pos XII, Jayapura, dan
- Daerah khusus Kantor Pusat, Bandung.

Pada POR II Pos Giro ini team putri yang terdiri dari gabungan karyawati dan istri karyawan mulai diikut sertakan. Sedangkan cabang-cabang olah raga yang dipertandingkan adalah sebagai berikut:

Sepak bola, Bulu tangkis (putra-putri), Bola volley (putra-putri), Tenis meja (putra-putri), Tenis (putra-putri), Catur dan Bridge.

Bersamaan dengan POR II diselenggarakan pula Kongres II. Kongres II meninjau dan menyempurnakan PO, PRT dan menetapkan Program Kerja 1976-1979. Sekalipun di sana-sini tampak kekurangan, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa POR II lebih berhasil dari POR I, baik dalam bidang prestasi olah raga maupun dalam penyelenggaraannya. Selain itu, di POR II sudah mulai ditampilkan kegiatan kesenian yang diikuti/disumbangkan oleh 11 Daerah. Acara kesenian ini ternyata sanggup menghibur dan mempererat rasa persaudaraan di antara peserta. Dengan perkataan lain, acara kesenian telah memesrakan jalinan kekeluargaan selama POR II berlangsung.

Perlu dicatat di sini bahwa susunan Pengurus Pusat PORKES POS GIRO periode 1972 - 1977 sebagai berikut:

Ketua Umum : MARDIJONO, Bc.A.P.
Ketua I : MOCH OESMAN
Ketua II : LILIEK SOEHADI, Bc.A.P.
Ketua III : R. SOEPARDI
Ketua IV : ALADIN
Sekretaris I : OETJOEP SOEPARBA
Sekretaris II : Drs SAKSONO, Bc.A.P.
Sekretaris III : TOSSIN SOENARDI
Bendahara I : IMAM SUJITNO
Bendahara II : W.L. TOBING, Bc.A.P.
Bendahara III : LUKITO
Komisi Teknik : MARGIONO, Bc.A.P., RONNIE SETYADARMA, Bc.A.P., ABDURRACHMAN, DJAKASOEDIRDJA, FACHRI PASARIBU

Digitized by Google

Berhubung dengan pergantian Direksi Perum Pos dan Giro pada awal tahun 1977 dan adanya beberapa anggota pengurus yang memasuki masa pensiun, maka pada tanggal 11-4-1977 dilakukan pembentukan Pengurus Pusat yang baru yang terdiri dari pengurus inti dan seksi-seksi dengan jumlah anggota pengurus 20 orang. Susunan Pengurus Inti dan Seksi-seksinya Periode 1977 - 1980 adalah sebagai berikut:

INTI:

Ketua Umum	: DIREKTUR PERSONALIA DAN TATA USAHA PERUM POS DAN GIRO
Ketua I	: KOESDIJONO, Bc.A.P.
Ketua II	: ABDULLAH, Bc.A.P.
Ketua III	: SOEROSO, Bc.A.P.
Ketua IV	: Drs. DJAELANI HIDAJAT, Ak.
Pembantu Umum	: ALADIN
Sekretaris Umum	: W.L. TOBING, Bc.A.P.
Sekretaris I	: KAHADJI KALAKE, Bc.A.P.
Sekretaris II	: TOSSIN SOENARDI
Bendahara I	: ENDANG MUCHTARAM, Bc.A.P.
Bendahara II	: SUKARDI AAS.

SEKSI-SEKSI:

Ketua Seksi Kesenian	: 1. FACHRI PASARIBU
	2. PRASETYO, Bc.A.P.
Ketua Seksi Sepakbola	: ABDURACHMAN
Ketua Seksi Volley-ball	: SOEMITRO
Ketua Seksi Tenis-meja	: TJETJE HADIMAN
Ketua Seksi Bulutangkis	: RUSLAN DAUD KOTO, Bc.A.P.
Ketua Seksi Tenis-lapangan	: SUWANDOJO, Bc.A.P.
Ketua Seksi Catur	: KAMALUDIN
Ketua Seksi Bridge	: TASRIZAL SALAM, Bc.A.P.

Pengurus baru segera mengadakan konsolidasi ke dalam dan mengadakan persiapan-persiapan terutama menghadapi POR III. Mengingat pengalaman POR sebelumnya, maka jauh sebelum pelaksanaan POR III, Pengurus Pusat sudah mengadakan berbagai persiapan, antara lain dengan meninjau tempat-tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat penginapan, pertandingan dan lain-lainnya.

POR III POS GIRO diselenggarakan dari tanggal 4 s/d tanggal 9 Juni 1979 di Malang. Di samping itu diselenggarakan pula Konggres PORKES III POS GIRO. Pembukaan POR III POS GIRO dilakukan oleh Dirjen Postel, Drs. Suryadi.

POR III Pos Giro di Malang ini diikuti oleh 953 peserta yang terdiri dari 639 pria dan 314 wanita. Mereka mewakili:

– Daerah Pos I, Jakarta,

Digitized by Google

- Daerah Pos II, Semarang,
- Daerah Pos III, Surabaya,
- Daerah Pos IV, Palembang,
- Daerah Pos V, Padang,
- Daerah Pos VI, Medan,
- Daerah Pos VII, Ujungpandang,
- Daerah Pos VIII, Bandung,
- Daerah Pos IX, Banjarbaru,
- Daerah Pos X, Denpasar,
- Daerah Pos XI, Amboina,
- Daerah Pos XII, Jayapura, dan
- Daerah Khusus Kantor Pusat, Bandung.

Adapun cabang-cabang olah raga yang dipertandingkan pada POR III tersebut adalah:

Sepak Bola, Bulutangkis (putra-putri), Bola volley (putra-putri), Tenis meja (putra-putri), Tenis (putra-putri), Catur dan Bridge.

Seperti pada POR sebelumnya, POR III ini juga dimeriahkan dengan acara kesenian yang diikuti oleh seluruh daerah.

2) PORKESTEL

Pada tahun 1974 berdirilah Persatuan Olah raga dan Kesenian Telekomunikasi disingkat Porkestel. Namun berbeda dengan Porkes Pos Giro, Porkestel hanya berdiri di kantor pusat, dan tidak mencakup daerah. Di daerah olah raga dan kesenian secara fungsionil dibawah K.U.K.H. Untuk pertama kali kepengurusan Porkestel dibentuk untuk masa kerja 1974 s/d 1976, kemudian diperpanjang sampai dengan tahun 1977. Pengurus Porkestel berikutnya bekerja pada periode 1977 s/d 1980.

Porkestel telah mengikuti berbagai pertandingan olah raga nasional baik dalam rangka pertandingan antar klub maupun kejuaraan nasional. Adapun cabang-cabang olah raga yang dimiliki dan ikut serta dalam berbagai pertandingan yang diikuti pemain-pemain putera dan puteri sebagai berikut:

- Bola volley = 9 putra dan 9 putri,
- Tenis meja = 5 putra dan 3 putri,
- Bulutangkis = 3 putra dan 3 putri,
- Bridge = 4 putra,
- Catur = 4 putra,
- Aerobik = 30 putra.

Selain pertandingan antar klub dan kejuaraan nasional, Porkestel juga melakukan pertandingan persahabatan dengan daerah dan instansi lain, diantaranya dengan Kantor Telepon Tasikmalaya, Pusdikpos, Kantor Pos Besar I Bandung, JLLAJR, PJKA dan ITB.

Digitized by Google

Sedangkan kesenian yang dimiliki yaitu Calung, band, tarian Sunda, wayang golek, ketuk tilu, karawitan Jawa, Tari Bali/Nasional, Arumba, Angklung dan Paduan Suara.

Adapun susunan pengurus Porkestel yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirpegtel atas nama Direksi Perum Telekomunikasi pada tanggal 14 Desember 1977 no. 8545/Kespegtel/B1 adalah sebagai berikut:

- Ketua : MIDJIL HARIYADI Bc.T.T.
- Wakil Ketua : Drs. MUSJAFRI EFFENDY
- Sekretaris I : Ir. SALADIN.
- Sekretaris II : Drs. MONANG SIAHAAN.
- Bendahara I : NY. SUBANDIYANI JUNIFAR.
- Bendahara II : ISHAK.

Seksi-seksi kesenian:

- Seksi Calung
- Seksi Degung : TARYANA
- Band
- Paduan Suara : SUDIRMAN PARMAN
- Tari Sunda
- Wayang Golek : AMIR SYARIF HIDAYAT.
- Karawitan Jawa
- Ketuk tilu : Ir. SUDARMADI.
- Angklung
- Arumba : TATANG.
- Tari Bali/Nasional : HASAN BASRI.

Seksi-seksi Olah raga:

- Bulutangkis : ABDURACHIM ACHMAD.
- Tenis : dr. NY. NANA DIMAN.
- Tenis Meja : NY. SUBADIYANI YUNIFAR.
- Catur : ATENG FIRMAN
- Bola volley : FRANS LETTE.
- Aerobik : NY. SUBADIYANI JUNIFAT/FUNGSIONIL KESPEGTEL.
- Sepak Bola : PRAMBANG, BANKIL.

Hingga saat ini Porkestel belum mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Menurut ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar/Bakor Porkestel akan dimasukkan ke dalam KORPRI. Dan hingga kini sedang dalam taraf persiapan.

Digitized by Google

3) KORNI P T INTI

Sebagai wadah untuk menampung kegiatan olah raga dan kesenian di P T INTI terdapat "KOORDINASI OLAH RAGA DAN KESENIAN P T INTI", disingkat KORNI P T INTI yang telah berdiri sejak tahun 1974. Ketika masih berstatus LPPI POSTEL, wadah ini bernama KORNI LPPI POSTEL. Pengurusnya selama periode 1971 - 1974 terdiri dari:

Ketua : Drs. MIZWAR MUIN.
Sekretaris : Ir. PUNGGUH W.
Bendahara : DIDI SAKRAWADI

Selama periode 1974 - 1978 Pengurus KORNI P.T. INTI terdiri dari:
Ketua : Ir. KOMAR RAMIN
Sekretaris : Drs. THOMAS CH.
Bendahara : Dra. JUNIAR.

Sejak 1978 sampai sekarang Pengurus KORNI P.T. INTI terdiri dari:
Ketua : Drs. THOMAS CH.
Sekretaris : SUPARNO
Bendahara : MASLIAH

Kegiatan olah raga yang dikembangkan dalam KORNI P.T. INTI meliputi Cabang-cabang Tenis Meja, Bulu Tangkis, Bola Volley, Sepak Bola, Catur, Tenis, Bridge dan Senam. Kesenian yang dikembangkan meliputi Degung, Calung, Folksong, Band, Deklamasi dan Tari.

Untuk memupuk persahabatan melalui olah raga, KORNI mengadakan wisata untuk melakukan pertandingan-pertandingan persahabatan antara lain ke Yogya, Pangandaran dan Banten. Pertandingan-pertandingan persahabatan di kota-kota yang lebih dekat diadakan di Garut, Tasikmalaya dan di kota-kota di sekitar Bandung lainnya. Pertandingan-pertandingan persahabatan diadakan pula dengan perkumpulan-perkumpulan olah raga dari Instansi-instansi setempat.

Dalam struktur organisasi P.T. INTI kedudukan KORNI berada di Bagian Umum

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB II
OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN POS DAN GIRO

Digitized by Google

Digitized by Google

bab II
OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN POS DAN GIRO

1. Kegiatan Umum Di Bidang Pos

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1978 tentang Perum Pos dan Giro, Bagian Ke tiga, Pasal 5, ditetapkan tujuan Perum Pos dan Giro sebagai berikut: *"Tujuan Perusahaan ialah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan pos dan giropos guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan Negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur".*

Lapangan usaha Perum Pos dan Giro ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978 sebagai berikut:
"Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan dan pelayanan pos dan giropos, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dangan luar negeri;
b. Perencanaan, pembangunan dan perluasan sarana-sarana pos dan giropos;
c. Usaha-usaha lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri."

Selanjutnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN, Tap No.IV/MPR/1978) Bab IV/Ekonomi butir 5 huruf i berbunyi:
"Pembangunan Pos dan Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya."

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka tugas pokok Perum Pos dan Giro dapat disimpulkan:
1) Menyelenggarakan pelayanan pos dan giropos yang merata di seluruh Tanah

Digitized by Google

Air guna menunjang pembangunan Negara dalam rangka meningkatkan ketahanan Nasional dan mencapai masyarakat adil makmur, dan pelayanan pos ke luar negeri didalam rangka hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia Internasional.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pada sub 1) tersebut di atas, merencanakan, membangun dan memperluas sarana-sarana pos dan giropos untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya, Wawasan Nusantara dan pergaulan di dunia Internasional.

Usaha Negara ini sebelum berstatus Perum Pos dan Giro harus melalui proses yang lama dan yang tidak mudah untuk membuktikan bahwa kondisinya dapat diangkat dari P.N. Pos dan Giro menjadi Perum Pos dan Giro. Di bawah ini akan diuraikan usaha-usaha P.N. Pos dan Giro sejak awal Masa Orde Baru sampai akhir Pelita II untuk mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah kesulitan dan hambatan untuk memenuhi tugas pokoknya.

a. Perhubungan dan Lalu-lintas Pos.

Pada awal Masa Orde Baru P.N. Pos dan Giro di bidang jasa pelayanannya kepada masyarakat banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas yang dikehendaki pemakai jasa atau konsumen. Semboyan Pos dan Giro yang berbunyi: "Cepat, tepat, aman dan teratur", belum dapat direalisasikan atau diwujudkan di semua bidang jasa pelayanannya sesuai dengan keinginan fihak konsumen. Keadaan ini bertambah parah karena faktor-faktor ekstern antara lain:

- keadaan sarana angkutan pos yang tersedia untuk perhubungan dalam negeri belum memadai;
- adanya perusahaan pengangkutan swasta yang juga menyediakan jasa pelayanan yang serupa atau mirip dengan jasa pelayanan pos, tetapi dengan mutu yang lebih disesuaikan dengan selera masyarakat pemakai yang menghendaki mutu pelayanan yang lebih tinggi walaupun harus membayar yang lebih mahal.

Hal-hal inilah yang merupakan masalah yang harus diatasi dengan mencari jawaban dan pemecahannya yang tepat sesuai dengan keadaan pada masing-masing kurun waktu. Jawaban masalah ini dipilih dan ditetapkan oleh Direksi antara lain meliputi:

- Pemanfaatan semua sarana angkutanpos yang tersedia secara optimal.
- Menghindari saingan fihak pengusaha swasta.
- Menciptakan dinas-dinas yang baru atau penyesuaian dinas-dinas yang ada, sehingga memenuhi tuntutan akan jasa pelayanan fihak konsumen.
- Mengusahakan pemecahan masalah secara darurat.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas ada beberapa hal yang perlu diuraikan lebih lanjut.

Digitized by Google

1) Pemanfaatan Semua Sarana Angkutanpos.

Untuk meningkatkan pemanfaatan semua sarana angkutanpos yang tersedia untuk angkutanpos dalam negeri, baik perhubungan darat, laut dan udara, yang disediakan oleh sektor pemerintah maupun swasta, maka kepada semua pejabat dan petugas pada semua tingkatan unit diperintahkan dan dituntut untuk mengadakan hubungan kerja sama yang erat dan terus menerus, dengan semua instansi atau perusahaan yang mengatur dan atau menyelenggarakan sarana angkutanpos yang berlaku. Usaha-usaha ini pada tingkat pusat perusahaan dilakukan dengan menghubungi instansi yang berwenang, untuk mengatur ketentuan-ketentuan dan memberikan perijinan dan pengawasan pelaksanaannya, di samping perusahaan-perusahaan yang menyediakan sarana angkutannya.

Dalam hal ini telah dihubungi fihak-fihak penguasa perhubungan darat (DLLAJR) fihak perhubungan sungai, danau dan ferry (Ditjen Sundary) fihak perhubungan udara, dan fihak perhubungan Laut, juga perusahaan Angkutan seperti P.J.K.A. (Perjanka), Garuda, Merpati Nusantara, Pelni, dan lain-lainnya.

Atas dasar ini semua, diberikan petunjuk kepada Unit Daerah (Kdpos) dan Unit Usaha (Kantor Pos, dan lain-lainnya) untuk melakukan tindakan serupa dan menjaga kelestarian hubungan tersebut dan menyesuaikan diri dalam melaksanakan tugas dengan setiap perubahan. Realisasi dari usaha ini nampak jelas dari perintah untuk mempergunakan semua sarana angkutan yang ada untuk mengirimkan dan menyalurkan kantong-kantong berisi kirimanpos dan kalau perlu melakukan tutupan kantongpos dan mengirimkannya lebih dari satu kali sehari, untuk setiap perhubungan juga bagi kantorpos pembantu (unit usaha yang terkecil) meskipun untuk ini akan meningkatkan pemakaian kantongpos; tali dan alat penutup lainnya.

Akibat tidak langsung dalam hal ini ialah, penyediaan peralatan dan perlengkapan pos yang harus juga ditingkatkan di samping mungkin juga menambah jam kerja para petugas pelaksanaannya. Akan tetapi effek positip dalam pelaksanaannya sangat terasa dengan tiadanya hambatan atau tiadanya penimbunan sisa-sisa kantongpos yang tertunda penyalurannya di kantorpos antara, lebih-lebih pada masa-masa sibuk menjelang dan sekitar Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Hal ini sangat jelas terasa segi positipnya. Sejak tahun 1968 tidak ada hambatan lagi dalam angkutanpos darat lewat sarana angkutan kereta api, sehingga menjadi lancar den praktis tidak ada kelambatan/penangguhan sampainya di tempat kantor tujuan. Juga sarana angkutan udara, jalur tertentu yang ramai sudah menunjukkan kemantapan, demikian pula perhubungan laut pada lin tertentu, sehingga praktis hanya pada jalur-jalur tertentu saja masih perlu ada peningkatan sarana angkutan pos. Jalur-jalur ini kemudian dinamakan jalur-jalur "perintis" yang meliputi hubungan dengan daerah-daerah terpencil, baik di darat, laut maupun udara.

Kondisi sarana angkutan yang baik dan lebih mantap ini, merupakan modal bagi pembukaan dinas-dinas baru, maupun peningkatan dinas-dinas lama, yang akan lebih dapat memuaskan fihak (konsumen) pemakai jasa pelayanan P.N. Pos dan Giro secara kwalitatip. Selanjutnya akan diuraikan tentang usaha-usaha perusahaan Pos dan Giro dalam menghindari persaingan dari perusahaan angkutan swasta,

Digitized by Google

yang juga melakukan usaha pengangkutan surat dengan alat angkutannya.

2) Menghindari Saingan Fihak Pengusaha Swasta.

Dalam Undang-undang Pos diatur antara lain juga hal-hal yang harus diselenggarakan oleh P.N. Pos dan Giro saja, dan tidak boleh dilaksanakan oleh fihak swasta, ialah apa yang dirumuskan dengan pengertian monopolipos dalam undang-undang tersebut. Walaupun demikian dalam kenyataan di Indonesia ada beberapa pengusaha angkutan Swasta yang juga menyelenggarakan jasa pelayanan yang serupa itu untuk jalur-jalur tertentu, yang sangat menguntungkan baginya. Hal ini tentu saja pelayanan secara merata keseluruh Nusantara akan terhambat olehnya. Pihak Pos dan Giro tidak boleh menutup mata begitu saja mengenai hal ini, lebih-lebih karena kwalitas jasa pelayanan mereka lebih tinggi dan untuk ini mereka memungut ongkos yang lebih banyak jumlahnya. Ini berarti bahwa beberapa jenis konsumen jasa pelayanan ini menuntut sesuatu yang mutunya lebih tinggi, karena mampu dan dengan senang hati membayar biaya yang lebih tinggi. Untuk mengetahui, menyelidiki, gejala ini Kantor Pusat Pos dan Giro menugaskan Kepala Bagian Lupos, M. Oesman, untuk mengadakan beberapa pendekatan dengan fihak pelanggar monopoli dan kerjasama dengan instansi yang berwenang di bidang ini, dan kalau perlu menyarankan pelaksanaan langkah untuk mengatasinya.

Setelah diadakan pendekatan diambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama: Diadakan kerja sama dengan beberapa pengusaha angkutan yang juga menerima titipan surat-surat agar mereka tidak melakukan pelanggaran monopolipos dengan melakukan pemrangkoan atas surat-surat titipan yang padanya sebesar bea kilat pada waktu itu (ialah Rp.25,-). Pengawasan atas hal ini dilakukan oleh petugas pos di kantor-kantor pengusaha alat angkutan tersebut atau pada agen-agennya. Kemudian untuk praktisnya diadakan perjanjian dengan pengusaha angkutan bahwa bea kilat yang bertalian dibayar tunai setiap bulan dengan pengawasan yang ketat.

Kedua: Kira-kira dua tahun kemudian setelah tindakan ini dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, diterima perintah agar untuk lebih tertibnya, diatur secara agak berbeda. Jadi di sini fihak Pos dan Giro hanya mengeluarkan ijin persetujuan dengan memungut juga beanya tertentu untuk jangka waktu setahun setiap kalinya. Persoalan ini juga dilaporkan kepada Menteri Perhubungan, dan setelah kira-kira berjalan satu tahun maka saatnya sampai kepada tahap terakhir dari penyelesaian masalah ini.

Ketiga: Sesudah mendapat cukup bahan untuk melakukan langkah selanjutnya ialah *menciptakan* suatu jasa pelayanan yang *serupa sistem* dan *mutunya* dengan memungut beaya yang masih terjangkau oleh konsumennya, dan selanjutnya tidak mengeluarkan ijin baru mengenai hal ini.

Seperti diketahui pada waktu itu telah ada jenis suratpos yang dinamakan suratpos kilat yang telah ada sejak pertengahan tahun 1966. Maka sejak tanggal 25-7-1971 dibuka dinas "Suratpos kilat khusus" sesudah diadakan persiapan seperlunya. Uraian mengenai kedua dinas ini akan diberikan pada pasal berikutnya.

Digitized by Google

3) Penciptaan Dinas-dinas Baru atau penyesuaian.

Sesudah mengadakan pemantapan penyaluran kantong-kantongpos dengan memanfaatkan seluruh potensi sarana angkutan yang tersedia, maka dapat dimulai suatu babak baru dalam peningkatan mutu jasa pelayanan ialah dengan dibukanya:

a) DINAS POSKILAT

Sampai dengan saat itu dalam lingkungan Pos dan Giro Indonesia hanya ada satu jenis suratpos yang mendapat perlakuan khusus dalam pengerjaannya ialah suratpos espres yang hanya dalam pengantarannya mendapat perlakuan (prioritas) khusus di kantor tujuan. Bagi suratpos kilat perlakuan khusus (prioritas) ini dimulai dari pengangkatan dari bis surat dan perlakuan lainnya di kantor kirim, dalam pemilihan sarana angkutan (kalau perlu dengan angkutan udara), dan pada antaranya sampai di tangan sialamat yang dilakukan petugas kantor tujuan.

Maksudnya jelas ialah dengan skala prioritas yang tinggi pada semua tingkat pengerjaan diharapkan suratpos tersebut sampai dalam waktu cepat dan aman ke tangan si alamat. Dinas ini dimulai pada *tanggal 1 Juni 1966.*

Pada tahap pertama dilakukan antara Kantor Pos Jakarta dan Surabaya dengan sembilan kantorpos di luar Jawa yang perhubungannya melalui pesawat udara. Kemudian pada bulan Juli 1966 dimulai tahapan kedua dengan memasukkan Nusa Tenggara Barat dalam jaringan tersebut. Beberapa bulan kemudian pada tahap ketiga jaringan ditingkatkan ke seluruh kantorpos di Jawa Timur.

Untuk menunjang kelancaran penyaluran surat pos kilat maka dianggap perlu untuk memiliki kendaraan sendiri. Khusus untuk maksud ini dimulai tanggal berikut antara lain:

a). Tanggal 17-1-1968 untuk rute-rute:
   - Bandung - Jakarta pp lewat Cianjur
   - Bandung - Cirebon pp
   - Surabaya - Malang pp.

b). Tanggal 25-7-1968 untuk rute-rute:
   - Semarang - Salatiga - Solo - Klaten pp
   - Semarang - Ambarawa - Magelang - Yogyakarta pp.

c). Tanggal 20-4-1968 rute Palembang - Kayuagung pp.
   Tanggal 20-5-1968 rute Makassar - Pare-pare pp.
   Bulan Nopember 1968 rute Medan - Sibolga pp.

d). Pada tahun 1970 diadakan perluasan pemakaian kendaraan pos kilat milik Perusahaan untuk trayek-trayek:
   - Makassar - Bulukumba pp.
   - Pontianak - Singkawang pp.
   - Padangsidempuan - Kotanopan pp.
   - Lubuklinggau - Bengkulu pp.
   - Padang - Pakanbaru pp.
   - Banjarbaru - Amuntai pp.

Digitized by Google

– dan lain-lain, trayek.

Jumlah perhubungan pos kilat in mencapai 33 trayek.

Pada tahap pertama untuk keperluan kirimanpos kilat ini, hanya warkatposkilat saja, kemudian juga dipergunakan juga sampul kilat menjelang akhir tahun 1968.

Untuk pengiriman suratpos kilat antar kantor dipergunakan kantong dari bahan plastik tebal yang cukup kuat menjaga isinya agar tidak basah dan rusak selama perjalanan.

Jumlah trayek yang dilayani dengan kendaraan perusahaan pada waktu akhir-akhir ini dikurangi sesuai dengan keadaan setempat. Pengangkutannya disalurkan sarana angkutan dari fihak pengusaha pengangkutan biasa. Pada akhir tahun 1978 sudah 188 kantorpos diikut sertakan dalam penyelenggaraan dinas ini. Kemajuan lalu lintas suratpos kilat dari tahun ke tahun sangat pesat, sehingga dirasakan perlunya ada peningkatan mutu dan jenis pelayanan pos. Hal ini didasari oleh pengalaman yang diperoleh selama 5 tahun melakukan pemanfaatan sarana angkutan, dan pendekatan terhadap perusahaan alat angkutan umum yang mendapat ijin ikut melaksanakan angkutan surat pos kilat. Peningkatan ini merupakan gabungan beberapa perlakuan khusus dari suratpos kilat, suratpos tercatat, berita terima, dan antaran suratpos tercatat, ditambah dengan jaminan batas waktu penyampaian, dan jaminan ganti rugi bila hilang.

b) SURATPOS KILAT KHUSUS

Seperti diuraikan pada pesal terdahulu, pada tanggal 15 Juli 1971 dimulai dinas baru yang dinamakan *Suratpos kilat Khusus.* Diselenggarakan pada tahap pertama antara 23 kantorpos yang dianggap cukup memadai ferkwensi perhubungan, lancar dan mantap waktu tempuhnya. Pada tanggal 1-10-1971 jaringan diperluas sampai mencakup 28 kantorpos. Dalam tahap permulaan dinas belum dibuatkan sampul khusus oleh dinas pos, baru pada bulan Desember 1971 diterbitkan sampul khusus ukuran besar dan kecil yang cukup kuat menjamin isi surat kilat khusus tersebut sehingga tidak rusak dalam pengangkutan. Untuk pengiriman suratpos kilat khusus dipergunakan juga kantong dari bahan plastik juga, hanya warnanya berbeda dengan yang dipergunakan untuk suratpos kilat biasa. Juga sarana angkutan yang dipergunakan sama dengan alat angkutan yang dipergunakan surat pos kilat biasa. Pada akhir bulan September 1978 jumlah kantorpos yang diikut sertakan dalam dinas poskilat khusus berjumlah 56 kantorpos, sedangkan konsumennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Perlu pula ditambahkan di sini bahwa modal pertama yang ditanamkan pada sarana untuk penyelenggaraan dinas pos kilat khusus adalah kurang lebih sejumlah Rp.11,- juta, yang terdiri dari 55 kendaraan bermotor roda dua untuk antaran, biaya cetak untuk pembuatan kantong-kantong plastik dan keperluan-keperluan lainnya.

Digitized by Google

c) Pos Keliling Desa dan Pos Keliling Kota

Seperti dikemukakan dalam uraian terdahulu, maka jasa pelayanan oleh dinas pos hanya dapat dilakukan di kantorpos dan daerah sekitarnya pada radius tertentu menurut keperluan. Di luar daerah ini jasa pelayanan tersebut dibantu beberapa unit lain atau sarana lain yang lebih sederhana yang disesuaikan dengan keperluan, maksud dan tujuannya masing-masing.

Beberapa "unit" dan "sarana" itu yang dianggap perlu untuk dikemukakan di sini ialah antara lain dinas pos keliling desa dan dinas pos keliling kota. Untuk menyelenggarakan hubunganpos antara tempat kedudukan kantorpos (pembantu) dan tempat-tempat kedudukan Camat sebagai aparatur pemerintah, maka dalam hal ditempat tersebut tidak ada kantorpos (pembantu), diadakanlah suatu unit penghubung yang dinamakan rumahpos.

Unit penghubung ini diselenggarakan oleh petugas pamong praja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah tingkat II dan diberikan petunjuk tehnis dari fihak pos dan giro, yang dinamakan rumahpos.

Untuk mengirimkan surat-surat ke rumahpos yang lain dan kantorpos (pembantu) melalui trayek-trayek yang sudah ditetapkan oleh Pembesar Pamong Praja setelah berunding dengan fihak Pos dan Giro yang diwakili oleh Kepala Daerah Pos (Kdpos), dapat ditunjuk seorang petugas. Tugas ini dinamakan *pos kecamatan* apabila yang ditunjuk melakukannya adalah petugas pamong praja dan dinamakan *pos desa* apabila dilakukan oleh petugas pos dan giro.

Mengenai pos desa dapat dikemukakan bahwa pada umumnya selain tugas mengangkut/membawa suratpos sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, juga diberi tugas mengantarkan surat-surat yang dialamatkan pada penerimanya sepanjang trayek tersebut, dengan maksud lebih membantu mempercepat sampainya surat tersebut kealamatnya yang dituju. Sejak akhir tahun 1969 diadakan suatu peningkatan tugas-tugas pos desa dengan beberapa tugas-tugas jasa pelayanan Pos dan Giro yang lain. Di samping menjual bendapos antara lain juga melakukan:

- penyerahan suratpos biasa dan umum, dan pengeposan suratpos biasa dari umum sewaktu singgah di balai desa.
- pengeposan dan penyerahan suratpos tercatat/terdaftar.
- pengeposan dan penyerahan pospaket sampai dengan berat 3 kg.
- pengerjaan dan pembayaran weselpos sampai batas maksimum tertentu.
- penerimaan pendaftaran/pembayaran pajak pesawat radio.
- penerimaan penabungan *Bank Tabungan Negara* sampai jumlah tertentu.

Untuk meningkatkan kecepatan bergerak, maka pos desa yang sesudah ditingkatkan tugas-tugas jasa pelayanannya, dinamakan pos keliling desa. Petugas tersebut dilengkapi dengan sepeda motor. Juga rute diatur sedemikian sehingga jalan yang ditempuh pada waktu berangkat tidak sama dengan rute kembalinya ke kantor induknya.

Selain peningkatan jasa pelayanan bagi rakyat yang hidup di desa terpencil, bagi mereka yang tinggal jauh dari kantorpos, terutama di pinggiran kota besar, tempat

Digitized by Google



Pos keliling desa - pelayanan pos kepada publik dikecamatan-kecamatan atau desa-desa yang ada pendirian pos dan giro.



Pos keliling kota - pelayanan pos kepada publik dipinggiran kota yang belum ada pendirian pos dan giro.

Digitized by Google



Dinas Pos keliling Desa melalui sungai di Kalimantan.



Para pengantar Suratpos Kilat.

Digitized by Google

pemukiman, pusat perbelanjaan, pusat kegiatan industri, perkantoran, kampus perguruan tinggi, yang baru dan belum tersedia kantorpos, disediakan suatu jasa pelayanan pos dan giro, oleh suatu unit mobil yang dinamakan dinas pos keliling kota. Unit mobil ini dilayani oleh satu atau beberapa petugaspos, dengan mempergunakan kendaraan bermotor khusus, secara berkeliling, pada jam dan hari tertentu, beberapa kali seminggu, menyediakan semua jasa yang disediakan oleh kantorpos.

Kedua dinas ini mulai dilaksanakan akhir tahun 1969 dan pada akhir tahun 1970 terdapat 8 trayek Dinas Pos Keliling Kota dan 80 trayek dinas pos keliling desa. Selain itu untuk daerah Kalimantan yang banyak sungai-sungai, yang dipergunakan sebagai sarana perhubungan yang potensiil, dipergunakan perahu bermotor (motorboot) milik Pos dan Giro sendiri untuk angkutan pos antara lain dalam rute Banjarmasin - Kualakapuas pp dan Pontianak - Putusibau - Nangapinoh pp.

Dalam tahun 1971 berikutnya Dinas Pos Keliling Desa menjadi 107 buah trayek, sedangkan Pos Keliling Kota menjadi 10 buah trayek. Tahun 1972 bertambah masing-masing menjadi 118 buah, 24 buah, sedangkan perahupos berkurang karena sebuah rusak sehingga tinggal sebuah.

Tahun-tahun berikutnya jumlah trayek baik Pos Keliling Desa dan Pos Keliling Kota telah ditingkatkan sehingga dalam akhir tahun 1978 ada sejumlah 49 trayek pos keliling desa dan 61 trayek pos keliling kota sedang trayek pos desa biasa masih ada 185 buah lagi.

Data tentang jumlah Pos Keliling Desa dan Pos Keliling Kota dari tahun 1969 s/d 1978 dimuat pada Lampiran 6.

d) Dinas Ambulan Kereta-api.

Dalam tahun 1967 dirasakan perlunya mengadakan suatu dinas *pos ambulan kereta api* dengan gerbong yang dibuat khusus untuk keperluan itu, dalam tahun 1967 rencana disetujui oleh fihak P.J.K.A. dengan merubah bentuk gerbong khusus untuk Pos. Perubahan dilakukan di bengkel K.A. Manggarai sejumlah 10 buah dengan biaya P.N. Pos dan Giro masing-masing gerbong sejumlah Rp.500.000,-. Pada tahap pertama akan diselesaikan 5 buah pada akhir bulan Juni 1968, tahap berikutnya akan diselesaikan pada akhir Desember 1968. Rencana trayek perjalanan Dinas Pos Ambulan Kereta Api tersebut adalah sebagai berikut:

- Jakarta - Surabaya pp
- Bandung – Surabaya pp
- Kertopati – Panjang pp
- Jakarta – Merak pp
- Surabaya – Banyuwangi pp.

Mulai tanggal 25-7-1968 telah dibuka Dinas Pos Ambulan Kereta Api dengan trayek pertamanya ialah Jakarta - Surabaya pp lewat Utara dengan K.A. Malam gaya baru dan pada tanggal 12-8-1968 diganti dirangkaikan dengan K.A. Limex

Digitized by Google

yang kemudian hari diganti nama menjadi K.A. Mutiara Utara. Di samping itu juga dibuka Dinas Pos Restan pada Stasion K.A. yang disinggahi oleh Dinas Pos Kereta Api.

Pada tahun 1972 Dinas Pos Kereta Api berjalan lancar dan kegiatannya ditambah dengan:

- Tutupan pos antara kantorpos sepanjang trayeknya dan Dinas Pos Kereta Api dan sebaliknya.
- Tutupanpos antara Dinas Pos Kereta Api satu sama lain.
- Menjual bendapos kepada para penumpang K.A. Limex (= Mutiara Utara) atau di gerbong Restorasi.
- Loket-loket disetasion ujung dan antara begitupun Pengurus Dinas Pos Kereta Api sudah dapat menerima suratpos R, paketpos, weselpos, sedang diusahakan loket-loket di stasiun tersebut dapat dijadikan kantorpos tambahan.

Mulai bulan Oktober 1971 Gerbong Pos Kereta Api ambulan dirangkaikan dengan K.A. malam gaya baru kembali dengan akibat yang kurang menguntungkan bagi kelancaran tugas-tugasnya. Usaha untuk minta agar dirangkaikan kembali dengan K.A. Mutiara Utara (= K.A. Limex malam) tidak berhasil sampai akhirnya pada awal tahun 1975 kegiatan dihentikan.

e) Kapal Pos

Dalam tahun 1969 tampak kenaikan jumlah volume kantongpos yang harus disalurkan melalui rute Surabaya-Kupang. Untuk mengatasinya diperlukan alat angkutan laut yang teratur, yang ketika itu kurang menjamin kelancaran pos laut. PN Pos dan Giro tidak dapat terus-menerus menggantungkan diri kepada usaha-usaha Pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas perhubungan pos melalui laut. Oleh karena itu maka Dirjen Postel dan pimpinan PN Pos dan Giro menganggap perlu membantu Pemerintah dalam usaha-usahanya menjamin pengangkutan pos melalui laut yang baik, dengan mengusahakan kapal-kapal sendiri untuk mengangkut pos.

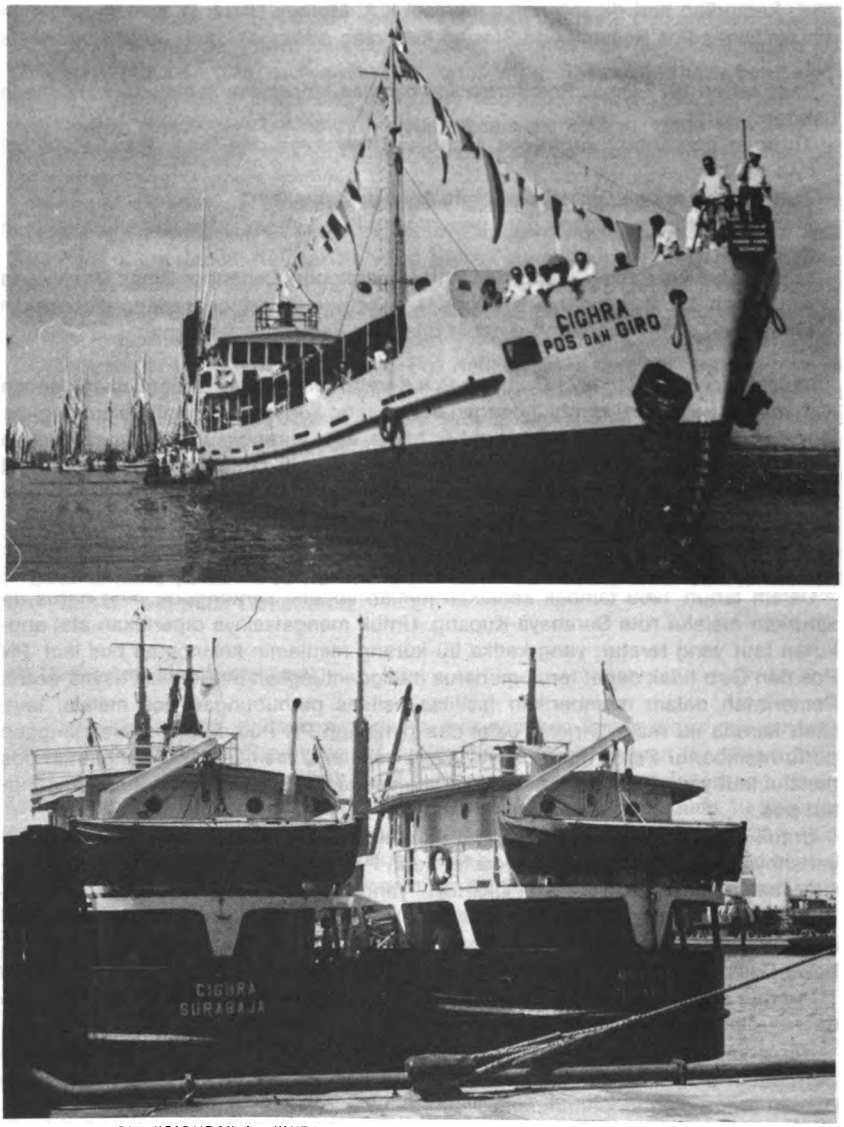
Untuk keperluan tersebut P.N. Pos dan Giro dalam rangka meningkatkan pelayanannya memesan dua buah "coaster" dari P.N. Pakin. Kapal-kapal pantai itu masing-masing diberi nama K.M. "CIGHRA" yang berarti "SEGERA", dan K.M. "NIRBHAYA" yang berarti "AMAN". Kedua kapal tersebut direncanakan mulai beroperasi pada awal bulan Juli 1970 dengan trayek: Surabaya-Buleleng-Ampenan-Sumbawa Besar-Bima-Ende-Waingapu-Siba (Pulau Sawu)-Baa (Pulau Roti)-Kupang pp.

Dengan adanya dua kapal tersebut diharapkan akan dapat dicapai pelayaran ke daerah-daerah tersebut dengan frekuensi tiga kali sebulan.

Kapal-kapal tersebut berkekuatan 280 DWT, panjang 42 m, lebar 7 m, kecepatan bermuatan 9-10 knot, jarak pelayaran 2400 miles. Awak kapal berjumlah 12 orang dan 30 orang muatan penumpang.

Pada tanggal 3 Juni 1970, bertempat di galangan kapal P.N. Pakin, Pasar Ikan Jakarta, diadakan upacara peluncuran kapal angkutan pos yang pertama K.M. "CI-

Digitized by Google



Kapal Pos dan Giro "CIGHRA" dan "NIRBAYA".

Digitized by Google

GHRA". Berkatalah Dirjen Postel, Soehardjono, dalam sambutannya antara lain sebagai berikut:

"Dalam menunjang usaha Pemerintah demi tercapainya program Pemerintah dalam bidang ekonomi, oleh P.N. Pos dan Giro diusahakan pembangunan di bidang prasarana perhubungan laut, dengan tidak mengurangi arti pentingnya peranan instansi lain yang mengusahakan angkutan laut, sehingga dengan demikian infrastruktur perhubungan yang harus dilaksanakan dengan urgensi yang tinggi dapat memberi kelancaran dan kemampuan dalam perhubungan pos yang berarti pula peningkatan kesejahteraan rakyat, materiil dan spirituil."

Baru pada tanggal 28-8-1970 kapal "CIGHRA" mulai menjalani rute Surabaya-Kupang pp untuk pengangkutan pos.

Pada pertengahan bulan Desember 1970 kapal "NIRBHAYA" mulai menjalani pelayaran percobaan dan mulai tanggal 1-1-1971 bertugas melayani rute Surabaya-Kupang pp bersama "CIGHRA" 3 kali sebulan secara bersilangan di tengah jalan secara tetap.

Untuk membantu memperlancar angkutan pos laut Surabaya-Banjarmasin pp, kedua kapal pos tersebut diberi tugas tambahan dengan melayani rute Surabaya-Banjarmasin pp sehingga rute keliling Surabaya-Kupang-Surabaya-Banjarmasin harus dilakukan dalam 30 hari.

Kapal pos ini tidak dapat bertahan lama. Mulai awal tahun 1972 "CIGHRA" dan "NIRBHAYA" praktis tidak beroperasi lagi. Pada akhir tahun 1973 perpanjangan masa kontrak dengan P T Komodo berakhir.

Sejak bulan Agustus 1973 sewa-kontrak K.M. "CIGHRA" dan K.M. "NIRBHAYA" dengan P T Komodo dihentikan. Sebagai gantinya ditunjuk P T Perusahaan Pelayaran Nusantara "Nusa Tenggara", satu dan lain setelah mendapat saran-saran dari pejabat yang berwenang. Karena K.M. "CIGHRA" masih "dokking" besar, maka untuk sementara waktu hanya K.M. "NIRBHAYA" yang dapat beroperasi.

P.P.N. "Nusa Tenggara" berkedudukan di Denpasar. Dalam tahun 1974 kedua kapal tersebut telah mengangkut kantongpos laut sebanyak 412. Akhirnya kedua kapal pos tersebut atas usul Pemerintah cq Menteri Perhubungan R.I. dijual kepada P T Pelayaran Nusa Tenggara. Penandatanganan kontrak jual beli dilakukan pada tanggal 10-10-1977. Penyerahannya secara fisik dilakukan pada tanggal 14 Oktober 1977 di Surabaya.

4) Peralatan pos

Dalam peralatan pos ini tercakup pengertian semua peralatan yang secara khusus dipergunakan dalam pengoperasian dinas-dinas pos dan giro antara lain termasuk: Bis surat, timbangan, kantongpos, cap tanggal, kotak pos, tempat-tempat simpan, mesin-mesin kantor dan perkakas lainnya.

Dalam jangka waktu mulai tahun 1966 sampai tahun 1979 di bidang ini banyak diusahakan perbaikan dan peningkatan baik mutu maupun jumlahnya sehingga sangat membantu peningkatan penyediaan jasa pelayanan. Akan diuraikan bebera-

Digitized by Google

pa hal yang dianggap penting untuk dikemukakan antara lain sebagai berikut:

a). Bis surat.

Pada permulaan tahun 1966 ada dua jenis bis surat pembantu, yaitu bis surat yang sederhana dengan *sebuah bis surat dalam* dan bis surat yang memakai pesawat clauss *tanpa bis surat dalam.*

Bis surat tanpa pesawat clauss dipergunakan sudah sejak lama, dikosongkan isinya dengan menukar bis surat dalamnya saja dan kemudian bis surat dalamnya dibuka di kantorpos dan dikosongkan selanjutnya disiapkan untuk tugas berikutnya.

Bis surat yang berpesawat clauss tidak mempunyai 'bis surat dalam' dan pengosongannya dipergunakan 'kantong' dan 'engkol' khusus, dan juga pengosongan 'kantong khusus' itu harus dilakukan pada suatu 'meja khusus' yang ada di kantorpos untuk mengeluarkan isinya. Bis surat dengan pesawat clauss (index 1112 dan 1113) diperkenalkan sejak kurang lebih 45 tahun yang lalu.

Pada permulaan tahun 1968 karena banyak bis surat berpesawat clauss yang rusak maka pemakaian pesawat clauss ditiadakan dan dibuat bis surat baru tanpa pesawat clauss tanpa bis dalam (index 111(13)) dan juga pada tahun 1972 dibuat model lain yang merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya (index 111(15)) dengan bis dalam. Model terakhir ini lebih disempurnakan dengan dana yang didapat dari PELITA pada tahun 1975/1976 dengan perbedaan pintu dan lubang tempat memasukkan surat dari arah depan, dan hanya ada satu lubang saja (index III (16)). Pada tahap pertama dibuat 350 buah dan dibagikan 100 buah untuk kantor-kantor di Jakarta 100 buah untuk Surabaya, sedangkan Bandung, Semarang dan Medan masing-masing 50 buah.

Peralatan yang juga penting untuk menyelenggarakan dinas pos ialah timbangan yang akan diuraikan di bawah ini.

b) Timbangan.

Pentingnya timbangan sebagai alat untuk pelayanan jasa pos sudah sangat jelas mengingat hampir semua tahap dan tingkat pengerjaan diperlukan timbangan.

Timbangan kapasitas besar biasanya dipergunakan untuk menimbang kantong-kantongpos terutama kantongpos udara.

Timbangan sedang dipergunakan untuk menimbang paketpos yang akan dikirim atau yang akan diantar setelah diterima dari kantor lain. Pentingnya timbangan jenis ini nyata terasa apabila didapati paket yang rusak dan berhamburan isinya yang memerlukan ketelitian dalam penanganannya. Maksimum kapasitas timbangan ini 10 kg saja. Juga ada timbangan dengan kapasitas kecil yang dipergunakan untuk menimbang surat, terutama surat pos udara, surat kilat dan kilat khusus. Kapasitasnya antara 1 s/d 3 kg.

Dalam tahun 1969 ditambahkan pada peralatan yang ada di kantor-kantor sejumlah timbangan merk Salter, 1.000 buah timbangan surat dengan kapasitas 1 kg,

Digitized by Google

dan 498 buah timbangan paketpos dengan kapasitas 10 kg. Kantongpos juga merupakan hal yang penting selain timbangan dalam mendukung berhasilnya tugas pelayanan.

c). Kantongpos.

Umumnya kantongpos dibuat dari terpal dalam beberapa ukuran dan warna sesuai dengan tujuan pembuatannya. Khusus untuk keperluan angkutan udara dipakai bahan yang lebih ringan dari kain katun biasa yang tipis, sedangkan untuk pos kilat dan pos kilat khusus seperti diuraikan pada Bab III2 dibuat dari plastik. Juga untuk beberapa tujuan lain misalnya pengangkutan benda-bendapos dibuat kantong khusus dari plastik.

Untuk mengangkut jenis suratpos yang dinamakan bulkpos (bulkpaket) berisi buku-buku, dipakai kantong dari goni.

d). Cap tanggal.

Pada dewasa ini ada tiga macam captanggal, ialah cap palu, cap bentuk rol, dan mesin cap yang digerakkan secara mekanis (elektris).

Mulai tahun 1974 nama kantor pada cap tanggal diubah sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD) secara berangsur dan bertahap.

e) Kotakpos dan tromolpos.

Kotakpos ialah suatu alat untuk jenis pelayanan antaran yang diminta secara khusus dengan menyampaikan ke dalam kotakpos tertentu yang ada di kantorpos.

Selain kotakpos ada pelayanan lain yang serupa dengan tromol (kotak) yang disediakan oleh pemakai jasa yang bertalian.

Jumlah kotakpos yang tersedia dan disewa, dan tromolpos yang disediakan pemakai tercantum pada Lampiran 6.

f). Tangplombir dan tang perfra

Untuk menyegel tali pengikat kantong, pada permulaan tahun 1966 dipakai dua macam perkakas ialah tangplombir model lama dan tang perfra model yang baru. Perbedaan utama ialah bahwa tangplombir memakai timah sebagai alat penutup dan tali jalin ukuran besar sebagai pengikat kantongnya, sedangkan tang perfra mempergunakan keping aluminium dan tali jalin ukuran kecil dan sedang. Dalam perjalanan waktu ternyata tang perfra makin banyak terlihat kelemahannya dan tingkat keamanannya kurang memadai sehingga secara berangsur tidak dipergunakan lagi atau ditarik dari pemakaian.

Lain soal tentang hal-hal yang belum dibahas karena bersifat lebih umum akan dikemukakan dalam uraian berikutnya.

Digitized by Google

g). Lambang Pos dan Giro.

Dalam tahun 1968 sesudah P.N. Pos dan Giro berdiri sendiri terpisah dari P.N. Postel sejak tahun 1965 dirasakan perlu mempunyai lambang sendiri dengan ciri-ciri khas yang menunjukkan kepribadiannya. Perlu dikemukakan bahwa sampai dengan tahun 1963 Jawatan PTT mempunyai lambang yang berbentuk "tiga burung terbang dan huruf PTT di atasnya". Kemudian bentuk perusahaan berubah dan lambang juga berubah tetapi tidak dapat dipastikan apakah sudah didaftarkan hak patentnya. Jawatan PTT sejak jaman Belanda sebelum perang sudah mendaftarkan hak patent lambangnya dan mempergunakan hampir pada setiap formulir dinas yang dipergunakan. Kemudian dalam tahun 1968 dibentuk Panitia dengan tugas memikirkan soal lambang tersebut dan menghasilkan lambang berupa yang besar dan yang kecil yang dalam tahun 1970 didaftarkan hak patentnya dengan nomor pendaftaran No. 99312 dan No. 99313. Adapun tujuan penggunaan lambang besar adalah untuk dipakai pada tanda jasa pegawai P.N. Pos dan Giro dan surat-surat berharga yang dipandang perlu oleh Direktur Utama Pos dan Giro.

Tujuan penggunaan lambang kecil adalah untuk dipakai pada formulir-formulir, kartupos, warkatpos, weselpos, kartu alamat dan lain-lainnya; formulir berharga, pedoman, buku tarif dan lain-lainnya; barang-barang tercetak yang dikeluarkan Pos dan Giro.

Lambang besar berbentuk bulatan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a). garis balik utara, garis sumbu bola dunia dan punggung burung merpati bertemu pada satu titik imaginers.
b). sayap burung sebelah atas mendatar (horizontal).
c). 5 buah bulu sayap.
d). ujung paruh ujung sayap dan ujung ekor sama jaraknya dari lingkaran sisi bola dunia.
e). Segi lima berarti Pancasila.
f). butir padi 27 buah.
g). bunga kapas 9 buah.
h). Garis mendatar (arsir) di luar segi lima ada 45 buah.
i). Initial R.I. adalah tipe huruf yang populer. Waktu jaman R.I. Yogyakarta.

Angka-angka yang terjadi dari e-f dan g ialah 27-9-45 adalah hari PTT (Postel). Ciri-ciri lambang kecil sama dengan yang disebutkan pada ciri-ciri lambang besar di atas di bawah huruf-huruf a) sampai dengan e).

h). Warna operasi Pos dan Giro.

Sejak sebelum perang dunia PTT di Indonesia memakai warna abu-abu dan jingga (orange) sebagai warna yang selalu dipergunakan untuk mencat semua barang-barang inventaris yang menjadi miliknya. Warna ini tetap dipakai untuk beberapa lama sampai tahun 1963 dan ditaati dengan patuh. Sejak saat itu (1963) ketentuan tentang warna tidak atau kurang dipatuhi sehingga timbul ketidak seragaman.

Digitized by Google

Ketidak seragaman ini menimbulkan efek yang kurang positip yang juga dirasakan oleh pimpinan perusahaan.

Pada tahun 1966 berikutnya ditetapkan bahwa warna kuning dengan huruf merah dipakai pada bis surat (P.D. I pasal 21) dan mobil tertentu, namun tidak semua mobil dicat dengan warna serupa.

Dalam tahun 1979 dengan surat Direktur Perlengkapan dan Pembangunan Pos tanggal 28-2-1979 No.1519/Dirkap ditetapkan bahwa kendaraan roda empat yang dipergunakan untuk kegiatan operasional harus dicat dengan warna jingga, atau lazim disebut taxi orange atau aviation orange. Warna itu dihasilkan oleh cat merk Nippe No.320T (Taxi orange) atau merk Seiv No.320T (taxi orange) atau merk Spartand No.72 (Aviation orange). Juga dengan surat Dirkappos tanggal 8 Maret 1979 No. 1720/Pal/Dirkap, dengan mencabut aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Dinas (P.D.) I pasal 27 ayat 4 dan 5 ditetapkan hal yang sama sebagai cat semua bis surat pembantu dengan warna huruf dengan cat putih memakai huruf 'city Bold'.

Dengan kedua ketentuan tersebut diharapkan warna operasi dari Pos dan Giro dapat seragam. Selanjutnya dalam ketentuan di atas disinggung juga soal huruf city bold yang juga telah ditetapkan untuk dipakai secara seragam dalam hal-hal tertentu.

i). Huruf City Bold.

Huruf ini ditetapkan dengan surat Direktur Perlengkapan dan Pembangunan tanggal 30 Agustus 1978 No. 5338/Pal/Dirkap sebagai huruf yang harus dipergunakan pengecetan bis surat, nama dan nomor kantongpos, papan nama kantor, sampul buku, formulir, model dan sebagainya untuk mencapai keseragaman dan menjadi ciri khas perusahaan. Pelaksanaan perubahan dilakukan dengan bertahap, terutama bila diperlukan pembaharuan atau pengecetan ulang agar tidak terlampau membebani perusahaan.

5) Perkembangan Bendapos

Yang dimaksud dengan bendapos ialah prangko, prangko pungut, pormulir-pormulir bendapos lain yang mempunyai harga jual, disediakan oleh fihak Pos dan Giro bagi para pemakai jasa pelayanan yang disediakan.

a) Prangko

Di Indonesia dikenal beberapa jenis prangko menurut maksud dan tujuan penerbitannya, antara lain prangko biasa, prangko amal dan prangko peringatan atau istimewa.

Seperti diketahui prangko pada umumnya dipergunakan sebagai bukti pelunasan pembayaran di muka atau sebelumnya bagi jasa pelayanan yang diharapkan dari

Digitized by Google

dan disediakan oleh fihak Pos dan Giro. Hal ini tidak menutup kemungkinan pembayaran secara lain karena beberapa alasan praktis. Pembayaran tanpa menggunakan prangko bagi beberapa jasa pelayanan Pos dan Giro tertentu dapat dilakukan dengan membayar secara tunai.

Menurut masa pemakaiannya dapat dibedakan antara prangko tetap dan prangko sementara.

Dalam keadaan darurat dapat dikeluarkan prangko khusus atau cara lain untuk mengganti fungsi prangko.

Yang mempunyai wewenang mencetak prangko ialah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Jumlah prangko yang perlu dicetak diberitahukan Perum Pos dan Giro kepada Direktorat Jenderal Postel yang selanjutnya memesan pencetakan prangko tersebut kepada Perum PERURI.

Di bawah ini akan diulas barang sedikit mengenai jenis-jenis prangko yang diterbitkan sejak dari tahun 1966 sampai tahun 1979.

(1). Prangko biasa.

Prangko ini pada umumnya dimaksudkan untuk melayani semua keperluan pemakaian prangko, dalam pelbagai nilai yang diperlukan, dicetak dalam jumlah yang cukup besar untuk pemakaian yang cukup lama, kalau perlu dicetak ulang, dan yang terutama tidak dikaitkan dengan peristiwa tertentu yang diperingati atau tidak ditambah pungutan tambahan disamping harga nominalnya untuk keperluan amal. Umumnya prangko biasa merupakan prangko-prangko yang bersifat tetap dalam pemakaiannya merupakan suatu seri yang luas dalam semua kopure (pecahan nilai) yang diperlukan. Sebagai contoh prangko biasa ialah antara lain: Seri alat musik yang terbit tanggal 1-3-1967, Seri Pelita yang terbit dalam tahun 1972, Seri Presiden Suharto mulai terbit tanggal 17-8-1974.

Dalam tahun 1977 dicetak ulang prangko seri Presiden Soeharto dan seri Pelita dalam jumlah yang cukup besar antara lain:

- Seri Presiden Soeharto Kopure Rp. 40,-: 32 Juta
- Seri Presiden Soeharto Kopure Rp. 100,-: 38 Juta
- Seri Presiden Soeharto Kopure Rp. 50,-: 9 Juta
- Seri PELITA Kopure Rp. 5,-: 9 Juta
- Seri PELITA Kopure Rp. 10,-: 6 Juta
- Seri PELITA Kopure Rp. 20,-: 7 Juta
- Seri PELITA Kopure Rp. 25,-: 21 Juta

Kopure-kopure lain dari kedua seri terakhir ini dicetak kurang dari 5 juta buah. Juga dalam tahun 1978 dicetak kembali dan ditambahkan prangko seri Presiden Soeharto dalam PELITA antara lain:

- Seri Presiden Soeharto Kopure Rp. 40,-: 33 juta buah.
- Seri Presiden Soeharto Kopure Rp. 100,-: 44 juta buah.
- Seri PELITA Kopure Rp. 20,-: 13 juta buah.

Digitized by Google

– Seri PELITA Kopure Rp. 25,-: 31 juta buah.
Kopure lainnya dicetak kurang dari 10 juta buah.

(2). Prangko peringatan atau Istimewa.

Prangko jenis ini umumnya dimaksudkan untuk membantu menggalakkan partisipasi masyarakat mengenai suatu program atau peristiwa peringatan peristiwa atau kegiatan tertentu baik yang bersifat nasional atau internasional. Ini merupakan suatu sumbangan positip bersifat kemasyarakatan yang diselengarakan secara kontinyu oleh fihak Pos dan Giro.

Selama ini telah diterbitkan prangko-prangko jenis ini antara lain:

Tahun 1966:
– Seri Bahari I
– Seri Bahari II
– Seri Pahlawan Revolusi

Tahun 1967:
– Seri Penerbangan Nasional
– Seri Tahun Pariwisata Internasional 1967
– Seri Prangko Kilat
– Seri Monumen Pahlawan Revolusi.
– Seri Reproduksi (lukisan) Raden Saleh
– Seri Hari Sosial ke-X

Tahun 1968:
– Seri Hak Azasi Manusia
– Seri Integrasi ABRI
– Seri Borobudur Year
– Seri World Health Organization (WHO)
– Seri 100 Tahun Kereta Api
– Seri Perkemahan Wirakarya
– Seri Pariwisata 1968
– Seri Irian Barat
– Seri Observatorium Boscha
– Seri Olympiade Mexico
– Seri Buah-buahan

Tahun 1969:
– Seri 50 Tahun ILO
– Seri Pahlawan VI
– Seri Kebangkitan Wanita Indonesia
– Seri 50 Tahun Liga Perhimpunan Palang Merah
– Seri Keluarga Berencana Asia Tenggara dan Oceania

Digitized by Google

- Seri Pariwisata 1969
- Seri PELITA I
- Seri PELITA II
- Seri Komunikasi Satelit
- Seri 50 Tahun Penerbangan Pertama Inggris Australia
- Seri Hari Sosial XII

Tahun 1970:
- Seri Expo 70
- Seri Pemurnian Peradilan
- Seri Gedung Baru Biro Internasional UPU
- Seri Pariwisata 1970
- Seri Asian Productivity Year
- Seri Seperempat Abad Kemerdekaan RI
- Seri 25 Tahun POSTEL
- Seri 25 Tahun PBB
- Seri International Education Year 1970
- Seri Hari Sosial XIII
- Seri Ukiran Kayu Irian Barat
- Seri Burung Irian Barat

Tahun 1971:
- Seri Pariwisata 1971
- Seri HUT ke 44 Kota Jakarta
- Seri Festival Ramayana Internasional 1971
- Seri Konperensi PTTI se Asia ke V
- Seri Hari Pos Sedunia 1971
- Seri 25 Tahun UNICEF
- Seri Ikan Hias Laut

Tahun 1972:
- Seri 25 Tahun ECAFE
- Seri World Health Campaign 1972
- Seri 50 Tahun Institut Tekstil Bandung
- Seri Tahun Buku Internasional
- Seri Kosmos
- Seri 10 Tahun Hotel Indonesia
- Seri Olympiade ke XX Munchen
- Seri Keluarga Berencana
- Seri Kebudayaan Indonesia
- Seri Ikan Hias Laut II

Digitized by Google

Tahun 1973:
- Seri Thomas Cup 1973
- Seri 10 Tahun IMO-WMO (Meteorologi)
- Seri 25 Tahun WHO
- Seri Pariwisata 1973
- Seri HUT ke II Gerakan Tabungan Nasional
- Seri PON ke VIII
- Seri 50 Tahun Organisasi Interpol
- Seri Kebudayaan Indonesia ke-II
- Seri 10 Tahun Program Pangan Dunia
- Seri Keluarga Berencana ke-II
- Seri Ikan Hias Laut ke-III

Tahun 1974:
- Seri Hari Dharma Samudera XIII
- Seri PATA 1974
- Seri Kebudayaan Indonesia III
- Seri Tahun Kependudukan se Dunia 1974
- Seri Keluarga Berencana ke III
- Seri Se-abad UPU
- Seri Ikan Hias Laut ke IV
- Seri Perminyakan Indonesia

Tahun 1975:
- Seri Kebudayaan Indonesia IV
- Seri Kampanye Donor Darah
- Seri Se-abad Convention du metre
- Seri Tahun Wanita Internasional 1975
- Seri Pariwisata 1975
- Seri Perbaikan Candi Borobudur
- Seri 30 Tahun Kemerdekaan RI
- Seri Keluarga Berencana
- Seri Monumen Perjuangan 1945
- Seri Ikan Hias Laut ke-V

Tahun 1976:
- Seri Indonesia Juara Bulutangkis Putra Putri
- Seri Hari Pemukiman Sedunia
- Seri Se-abad Telepon
- Seri Mencegah Kekuatan
- Seri Olympiade Montreal
- Seri Pariwisata 1976
- Seri Satelit Komunikasi
- Seri Anggrek Indonesia

Digitized by Google

- Seri Pekan Penghijauan Nasional XVI
- Seri Kebudayaan Indonesia
- Seri Meningkatkan Bacaan Anak-anak
- Seri HUT Unicef ke XXX

Tahun 1977
- Seri PEMILU 1977
- Seri Jambore Nasional ke-3 (Sibolangit) Medan
- Seri AOPU (Asian Oceanic Postal Union)
- Seri HUT ke-450 Kota Jakarta
- Seri Amsterdam Philatelic Expo 1977 (AMPHILEX 77)
- Seri POS ke-X
- Seri MTQ ke-X
- Seri Asean HUT ke X
- Seri Indonesia Pakistan Economic and Cultural Cooperation Organization (IPEEC)
- Seri Anggrek Indonesia
- Seri Kampanye Kesehatan Nasional
- Seri Margasatwa

Tahun 1978:
- Seri UNDP Conference on Technical Cooperation and Developing Countries
- Seri Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI)
- Seri Palestina
- Seri World Cup
- Seri World Health and World Hypertension Month
- Seri Wayang Indonesia
- Seri Konggres Guru se Dunia
- Seri International Anti Apartheid Year
- Seri Eight World Forestry Conggress Jakarta 1978
- Seri HUT ke-50 Sumpah Pemuda
- Seri Margasatwa II
- Seri Anggrek Indonesia

Prangko-prangko Peringatan dan Istimewa umumnya mempunyai masa laku yang singkat kira-kira 2 tahun saja, kemudian dihentikan penjualannya.

c). Prangko khusus atau darurat.

Prangko ini dikeluarkan secara darurat untuk mengatasi keadaan tertentu dan menghindari dari kekosongan persediaan prangko yang ada. Sejak tahun 1966 sampai tahun 1979 baru dikeluarkan satu kali pada tanggal 2 Januari 1966 dan berlaku sampai dengan 26 Juli 1966. Prangko-prangko itu dibuat dengan cetak tindih dengan segilima dengan angka "65" di dalamnya dan huruf "sen" di bela-

Digitized by Google

kang harga nilai, atas prangko jenis Presiden Soekarno tahun 1964 dan transport Tahun 1963. Prangko-prangko tersebut adalah nilai rupiah baru dalam sen masing-masing:

- 10 sen gambar lokomotip disel warna jingga,
- 15 sen gambar kapal laut warna biru tua,
- 25 sen gambar kapal udara warna ungu,
- 20 sen gambar Presiden Soekarno warna jingga,
- 30 sen gambar Presiden Soekarno warna biru,
- 40 sen gambar Presiden Soekarno warna coklat tua,
- 50 sen gambar Presiden Soekarno warna hijau,
- 75 sen gambar Presiden Soekarno warna merah, dan
- 100 sen gambar Presiden Soekarno warna coklat.

(2). Prangko pungut dan sumbangan ongkos cetak.

Prangko pungut dipergunakan untuk bukti pelunasan bea dan denda karena kekurangan porto surat dan sebagainya yang tidak dipungut dari si peminta jasa pelayanan tetapi dari si alamat surat atau si tertuju dari pelayanan pos tersebut. Prangko pungut dicetak dalam jumlah cukup pada waktu-waktu tertentu, dalam jenis kopure tertentu, menurut keperluan tidak tiap tahun.

Sumbangan ongkos cetak adalah carik (strook) tempel untuk bukti pelunasan ganti rugi ongkos cetak bagi formulir untuk pelayanan jasa dinas "fihak ketiga". Disediakan dalam jumlah yang cukup untuk di kantor pos, dan dicetak menurut keperluan.

b). Formulir berharga lainnya.

Yang dicakup dengan pengertian formulir berharga lainnya ialah segala formulir baik yang berbentuk kartu, warkat, kertas, sampul dan daftar atau buku tercetak yang disediakan oleh dinas pos dan giro dengan nilai tertentu, bagi pemakai jasa pos & giro untuk dipergunakan sesuai dengan maksudnya.

Formulir berharga lainnya terdiri dari:

- Kartupos,
- Warkatpos,
- Model pengiriman weselpos (W),
- Kartu Alamat paketpos (Pp2 dan Pp3),
- Keterangan Pabean (C2/Cp3),
- Sampul surat,
- Buku Tarippos,
- Daftar-daftar tertentu,
- Formulir-formulir tertentu,
- Dan lain-lain sebagainya.

Mengenai kartu pos selain bentuk yang biasa ada juga yang khusus ialah antara lain yang dipergunakan untuk:

Digitized by Google

- pengiriman poskilat,
- bergambar yang berupa pemandangan atau untuk ucapan selamat hari raya tertentu,
- khusus untuk pelajar/siswa dengan bea pengiriman yang direduksi.

Warkatpos juga mempunyai bentuk-bentuknya yang bervariasi sesuai dengan maksud penggunaannya antara lain:

- Aerogram untuk pengiriman dengan pos udara ke luar negeri.
- Kilat untuk pengiriman poskilat.
- Khusus untuk pegawai yang diberikan secara cuma-cuma pada waktu dan jumlah tertentu dibuat sejak tahun 1970 dan ditiadakan mulai 1 April 1977.

Sampul yang disediakan oleh fihak Pos dan Giro juga bermacam-macam sesuai dengan maksud tujuan masing-masing antara lain:

- sampul udara beserta kertas tipis yang sesuai,
- Sampul untuk kilat dan kilat khusus,
- sampul untuk minggu surat-menyurat Internasional yang diadakan tiap tahun untuk masa tertentu.

Juga benda-bendapos lain amat bervariasi sesuai dengan sifat keperluan dan persediaan pada setiap unit kantor pos.

Disamping menjual pormulir berharga milik sendiri, Perum Pos dan Giro menjual pormulir-pormulir berharga milik instansi lain yang terdiri dari:

- Pormulir permintaan bantuan dari Dasperi yang telah ditiadakan.
- Paspor dari Ditjen Imigrasi.
- Akte-akte Agraria dari Ditjen Agraria
- Kertas bermeterai dari Departemen Keuangan dan meterai
- Kertas bermeterai dari Departemen Keuangan dan meterai tempel untuk melunasi pajak. Jumlah benda meterai yang terakhir ini bila akan dicetak, diberitahukan oleh Perum Pos dan Giro kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Dirjen Pajak akan memesan pencetakan benda meterai yang dibutuhkan itu kepada PERUM PERURI.

c) Philateli

Sudah menjadi kenyataan bahwa prangko menciptakan philateli yang menjadi sasaran sampingan Perum Pos dan Giro. Prangko merupakan saksi tentang kenyataan-kenyataan dalam kehidupan dan penghidupan suatu bangsa. Benda kecil ini merupakan fac simile dari kemajuan industri dan perdagangan. Kertas berharga uang ini bahkan memantulkan kejayaan spiritual dan material bangsa Indonesia. Akhirnya prangko yang serba neka dan warna-warni merebut hati penerima surat atau peminat sehingga menciptakan kegemaran untuk mengumpulkannya atau yang dinamakan philateli yang dimaksud di atas. Penggemar-penggemar prangko tumbuh di mana-mana. Prangko yang mula-mula berfungsi untuk melunasi ongkos pengiriman surat menjadi kebutuhan bagi pengumpul-pengumpul prangko untuk menghiasi album mereka yang dirasa mempunyai nilai yang tinggi.

Digitized by Google

Koleksi prangko mengandung nilai-nilai yang tidak sedikit. Memperhatikan album prangko sama dengan mempelajari sejarah, ilmu bumi, etnografi, seni lukis, seni pahat, grafika, tehnologi, biologi dan kemajuan peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa.

Kumpulan prangko mampu membangkitkan cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa-bangsa, menimbulkan rasa kasih sayang kepada mereka yang kekurangan, mereka yang tertindas, mereka yang kelaparan, mereka yang tidak berdaya dan seakan-akan tidak mempunyai hak-hak azasi manusia, mereka yang menderita karena perang yang berkecamuk, mereka yang mengharapkan perdamaian dan persaudaraan. Kecuali itu philateli mendidik pengumpul prangko supaya mempunyai kesabaran, ketelitian, kerapian dan kerajinan.

Terpanggil oleh perkembangan philateli yang dapat memberi tambahan pendapatan perusahaan ini, maka pada tanggal 3 Mei 1973 di Jakarta didirikan Pusat Philateli di Jl. Cikini Raya 5. Di beberapa Kantor Pos dan Giro dibuka loket khusus untuk philateli. Untuk menampung pesanan prangko baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri di Bagian Bendapos dan Meterai dibuka kesempatan untuk memesan prangko philateli baik secara tunai ataupun secara giral. Peningkatan philateli dilakukan melalui tulisan-tulisan di surat kabar, majalah, pengumuman philateli, folder, catalogus prangko dan pameran prangko.

Untuk mempromosikan benda philateli Indonesia dalam tahun 1978 telah dilakukan/diikuti berbagai pameran philateli di luar negeri maupun dalam negeri, sebagai berikut:

(1) Di luar negeri:
   - "Second International Stamp Fair" di Essen (Republik Federasi Jerman) - Nopember 1978.

(2) Di dalam negeri:
   - Pameran Pembangunan - di Bandung, Agustus 1978.
   - Expo Pembangunan - di Malang, Agustus 1978.
   - Pameran HUT Kemerdekaan RI - di Tulungagung, Agustus 1978.
   - Pameran HAPSAK Pancasila - di Kuningan, Oktober 1978.
   - Pameran HUT Kemerdekaan RI - di Yogyakarta, Agustus 1978.
   - Pameran HUT Kemerdekaan RI - di Ponorogo, Agustus 1978.
   - Pameran HUT Kemerdekaan RI - di Magetan, Agustus 1978.
   - Expo Pembangunan - di Amboina, Agustus 1978.
   - Pameran Prangko 50 Tahun Sumpah Pemuda - di Pusat Philateli Jakarta, Oktober 1978.
   - Pameran Prangko Pekan PBB - di Pusat Philateli Jakarta, Oktober 1978.

Agen Philateli di Luar Negeri yang mengikat kontrak dengan Direktorat Jenderal POSTEL adalah Drs. Hugo J. van Reijen di Amsterdam. Dalam tahun 1978 Agen Philateli tersebut telah membeli benda-benda philateli dari Indonesia sebesar Rp.195.808.066,30.

Digitized by Google

Penjualan Benda-Benda Philateli dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1978 menghasilkan pendapatan seperti yang tercantum pada data di bawah ini.

Tahun	Hasil penjualan dalam negeri	Hasil Penjualan luar negeri	J u m l a h
1974	Rp.37.360.165,40	Rp. 69.494.252,60	Rp.106.854.418,-
1975	Rp.25.260.652,57	Rp. 47.666.418,93	Rp. 72.927.071,50
1976	Rp.33.743.825,-	Rp. 57.966.403,50	Rp. 91.710.228,50
1977	Rp.45.252.652,04	Rp.124.031.020,50	Rp.169.283.672,54
1978	Rp.61.430.717,90	Rp.206.226.319,30	Rp.267.657.037,20

b. Kegiatan di Bidang Giropos dan Dinas-dinas Uang lainnya.

1) Dinas Giropos

Setelah Sentral Giro E di Bandung dibuka pada tanggal 1 Maret 1966. maka dibukalah berturut-turut Sentral Giro lainnya sebagai berikut:
- Sentral Giro F di Semarang pada tanggal 11 Nopember 1966.
- Sentral Giro G di Padang pada tanggal 1 Desember 1966.
- Sentral giro H di Palembang pada tanggal 25 Nopember 1966.
- Sentral Giro J di Yogyakarta pada tanggal 1 Pebruari 1967.

Jumlah Sentral Giro yang berdiri sendiri yang khusus mengerjakan administrasi rekening koran para nasabah giropos pada tahun 1967 menjadi 9 buah. Jumlah ini masih dirasa kurang karena belum merata di seluruh ibukota Propinsi atau di kota di mana terdapat Kantor Pusat Perbendaharaan Negara yang merupakan pemegang rekening yang paling besar dari Dinas Giropos. Mengingat sebagian besar kegiatan Dinas Giropos melayani rekening Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dan untuk mengadakan Sentral Giro yang berdiri sendiri merupakan beban yang mahal bagi P.N. Pos dan Giro, maka diciptakanlah Sentral Giro Gabungan. Sentral Giro Gabungan ialah suatu Kantor Pos dan Giro yang diserahi pula pekerjaan administrasi rekening koran giropos seperti yang dilakukan oleh Sentral Giro. Secara ini maka sentral-sentral pembukuan atau Kantor-kantor Giro dapat diperbanyak secara murah, sehingga nama Kantor Pos dan Giro benar-benar mewakili bidang Pos dan bidang Giro. Di Sentral Giro Gabungan itulah para nasabah setempat dapat menarik dan menguangkan cekposnya langsung di loket pembayaran cekpos. Meskipun demikian tidak semua Kantor Pos dan Giro dijadikan Sentral Giro Gabungan. Jumlah Sentral Giro Gabungan masih dibatasi menurut kebutuhan. Pemerataan pengadaan administrasi rekening koran di tiap Kantor Pos dan Giro memang ideal, akan tetapi banyaknya Sentral Giro dan Sentral Giro Gabungan memerlukan

Digitized by Google

pengawasan yang tidak sedikit kalau jumlah pemegang rekening bertambah banyak. Sebab itu Dinas Giropos bukan suatu sinecure atau sesuatu yang boleh diremehkan karena menuntut ketelitian dan kejujuran pelaksana-pelaksana di lapangan dan pemeriksa-pemeriksanya.

Di bawah ini dicantumkan Sentral-sentral Giro Gabungan yang dibuka berturut-turut sebagai berikut:

- Sentral Giro Gabungan Manado pada tanggal 3 Pebruari 1967.
- Sentral Giro Gabungan Banda Aceh tanggal 12 September 1967.
- Sentral Giro Gabungan Jember tanggal 26 September 1967.
- Sentral Giro Gabungan Pontianak pada tanggal 27 September 1967.
- Sentral Giro Gabungan Kediri pada tanggal 27 September 1967.
- Sentral Giro Gabungan Tanjungpinang pada tanggal 26 September 1967.
- Sentral Giro Gabungan Banjarmasin pada tanggal 28 Oktober 1967.
- Sentral Giro Gabungan Cirebon pada tanggal 1 Pebruari 1968.
- Sentral Giro Gabungan Telukbetung pada tanggal 2 September 1968.
- Sentral Giro Gabungan Pematang Siantar pada tanggal 3 Pebruari 1969.
- Sentral Giro Gabungan Amboina pada tanggal 20 Mei 1969.
- Sentral Giro Gabungan Samarinda pada tanggal 1 Nopember 1969.
- Sentral Giro Gabungan Madiun pada tanggal 6 April 1969.
- Sentral Giro Gabungan Kupang pada tanggal 29 Desember 1970.
- Sentral Giro Gabungan Pangkalpinang pada tanggal 1 September 1971.
- Sentral Giro Gabungan Jambi pada tanggal 2 Januari 1974.
- Sentral Giro Gabungan Palu pada tanggal 2 April 1979.

Sementara itu Dinas Giropos mengalami kemajuan meskipun tidak pesat. Jumlah nasabahnya pada tahun 1978 mencapai 40.508. Dilihat dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia, ini berarti bahwa pada tiap 100 penduduk, hanya terdapat 0.03 rekening. Meskipun demikian perkitaran (turn over) sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1978 melonjak sebagai berikut:

Tahun	Perbuatan	Perkitaran
1969	3.332.927	Rp. 97.631.405.822,84
1970	2.710.017	106.682.386.395,71
1971	2.980.925	124.297.554.661,06
1972	4.793.335	157.258.041.464,60
1973	10.232.993	204.193.605.750,15
1974	11.882.761	325.614.959.714,18
1975	12.190.203	426.430.610.788,14
1976	5.441.858	471.452.281.128,24
1977	4.207.212	660.595.193.824,60
1978	4.026.153	840.342.221.979,78

Digitized by Google

Turunnya jumlah perbuatan pada tahun 1976 disebabkan karena storan untuk nikah, talak, cerai dan rujuk bagi beberapa orang dapat dilakukan secara kolektip, yang pada tahun 1973 dilakukan satu per satu. Dilihat dari besarnya perkitaran, maka perkitaran pada tahun 1978 mengalami kenaikan sebesar lebih dari 85% dibandingkan dengan perkitaran pada tahun 1969.

Sebagian besar dari perkitaran ini adalah perkitaran dari rekening Kantor Perbendaharaan Negara. Namun demikian pelayanan Dinas Giropos bukan hanya ditujukan kepada nasabah-nasabah yang besar, akan tetapi kepada rakyat banyak. Meskipun jumlah pemegang rekening belum banyak, namun nasabah-nasabah dan pemakai saluran pembayaran ini sudah terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat. Saldo minimum pada rekening yang hanya sebesar Rp. 10,- bagi perorangan atau Rp.100,- bagi perusahaan, memungkinkan kalangan kecil membuka rekening giropos, sehingga pemanfaatannya dapat diratakan secara luas di mana daya guna dan hasil gunanya dapat menunjang kegiatan Pemerintah dan Swasta dan di bidang pembangunan. Berhubung dengan itu dengan mekanisme yang sederhana Dinas Giropos dapat merasionalisasi sistem pembayaran di tengah masyarakat yang makin maju dan komplek dalam kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan pelbagai macam lalu lintas pembayaran yang perlu dipermudah dan disederhanakan, tetapi cepat, cermat dan murah pelaksanaannya.

Instansi-instansi yang sering melakukan transaksi pembayaran kepada pegawai-pegawai negeri, tenaga kerja lainnya dan para pensiunan yang tersebar di Indonesia, pada umumnya memanfaatkan Dinas Giropos, misalnya perusahaan-perusahaan asuransi antara lain:

- Perum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- Perum Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- Perum Asuransi Sosial dan Kecelakaan Tenaga Kerja;
- Perusahaan Asuransi Jiwa Buana Putera;
- Perusahaan Asuransi Jiwa Imam Adi;
- Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya;
- Dana Pensiun Pertamina.

Demikian pula perusahaan-perusahaan surat kabar dan majalah membuka rekening giropos untuk keperluan pembayaran uang langganan surat kabar atau majalah. Uang kuliahpun dari beberapa universitas disalurkan melalui rekening giropos universitas tersebut. Dan makin cepat waktu tempuh pos maka perhubungan giropos yang membonceng perhubungan pos makin menarik. Penyampaian surat saldo setiap kali ada mutasi keuangan dalam hal ini merupakan alat penting dalam sistem informasi tiap kreditor yang ingin segera mengetahui apakah pihutang-pihutangnya memenuhi kewajibannya pada waktunya. Mereka tidak memperhitungkan tidak adanya jasa giropos. Yang nyata bahwa Dinas Giropos cocok untuk pembayaran kecil-kecilan.

Bila saldo rekening giropos dirasa cukup berlebih untuk keperluan transaksi yang rutin, para nasabah dapat memindahkan sebagian dari saldonya kepada rekening girobanknya. Antara Dinas Giropos dan Bank terdapat perhubungan giro meskipun

Digitized by Google

Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan/Kantor Pos dan Giro tidak turut serta dalam perhitungan clearing setempat, asal Kepala Sentral Giro/Kepala Kantor Pos dan Giro mempunyai rekening giro di Bank yang menjadi anggota clearing. Untuk keperluan pemindahbukuan, maka cekpos diuangkan dengan cekbank atau girobank atas beban rekening bank Kepala Sentral Giro/Kepala Kantor Pos. Selanjutnya penarik atau pengunjuk menstorkan kertas berharga uang tersebut kepada rekening banknya. Demikian pula sebaliknya, nasabah bank yang mempunyai rekening giropos dapat menambah rekening giropos dengan melakukan storan dengan kertas berharga uang. Secara ini pada hakekatnya sudah terdapat kerja sama dalam perhubungan giro antara Dinas Giropos dan Bank-bank Pemerintah atau Swasta yang menjadi anggota clearing. Secara inilah maka uang berlebih Kas Negara yang terdapat pada rekening giropos di Sentral Giro/Gabungan dipindahkan dari rekening giropos kepada rekening Kas Negara di Bank Negara untuk menambah saldo rekeningnya di Bank yang memberi jasa giro.

Lambatnya perkembangan dinas ini disebabkan antara lain karena para nasabah dan yang belum menjadi nasabah menghendaki adanya pemberian jasa giropos kepada saldo rekeningnya dan menginginkan pula agar bea stor, bea cekpos dan bea giro antar sentral diturunkan. Pemberian jasa giropos hanya dapat ditutup dengan pendapatan penanaman sebagian uang giropos tanpa mengganggu likuiditas perusahaan seperti yang terdapat dalam perbankan. Hal ini belum dapat dilaksanakan selama status Dinas Giropos tetap hanya sebagai Lembaga Keuangan. Berhubung dengan itu statusnya memerlukan landasan hukum yang lebih kuat sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat pemakai sehingga dapat berkembang dan dikembangkan di pasaran yang lebih luas.

Sesuatu yang menggembirakan ialah adanya giro incasso yang dapat dikembangkan lebih cepat lagi di Semarang. Di Semarang bagi nasabah giropos yang mempunyai sambungan telepon, tiap bulan dapat melunasi tagihan telepon dari rekening giroposnya. Untuk keperluan ini ia menguasakan Kepala Sentral Giro untuk melakukan pembayaran.

Tiap bulan petugas dari Sentral Giro Semarang datang di Kantor Telepon untuk mengambil kwitansi. Melalui teknik pemindahbukuan dari rekening nasabah pemakai telepon kepada rekening Kepala Sentral Giro dilakukan pembayaran giral. Selanjutnya Kepala Sentral Giro menarik cekpos yang diuangkannya dengan cekbank atau girobank yang akan diserahkan oleh petugas Sentral Giro kepada Kepala Kantor Telepon. Tanpa datang di Kantor Telepon nasabah giropos itu terlayani dalam memenuhi kewajibannya bulanan kepada Kantor Telepon. Giro incasso ini dapat ditingkatkan lebih lanjut. Bila Kepala Kantor Telepon mempunyai rekening giropos dan dikuasakan langsung oleh nasabah giropos pemakai telepon untuk melakukan pemindahbukuan sebesar tagihan bulanannya dengan mempergunakan surat giropos yang merangkap kwitansi yang perlu diciptakan, maka paripurnalah giro incasso yang menjadi idaman nasabah giropos pemakai telepon. Kalau ada sengketa mengenai besaruang yang tertagih secara giral dapat diselesaikan kemudian. Giro incasso ini akan menjadi ukuran bahwa penagih teliti dalam menetapkan tagihannya dan yang tertagih tertib menyediakan dananya pada rekening giropos

Digitized by Google

yang akan memudahkan kedua belah pihak di mana Sentral Giro menjadi penghubungnya untuk menghemat waktu, tenaga dan uang maupun resiko dalam lalulintas pembayaran. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Dinas Giropos di Indonesia mulai dapat merealisasikan giro incasso seperti yang terdapat di Negeri Belanda, Swedia dan sebagainya.

Dalam perhubungan dengan luar negeri, maka sejak 2 Mei 1977 telah dilaksanakan persetujuan bilateral pembayaran "Guaranteed payment cards" atau Kartu Pembayaran yang terjamin dari Negeri Belanda. Wisatawan-wisatawan dari Negeri Belanda dalam perjalanannya di Indonesia mempergunakan kartu-kartu pembayaran ini dan dapat menguangkannya di Indonesia mempergunakan kartu-kartu pembayaran ini dan dapat menguangkannya di Kantorpos maupun di Kantorpos Pembantu sampai jumlah tertentu. Sebagai tanda pengenal mereka membawa paspor dan giropas. Kartu-kartu pembayaran ini sudah dikurangkan dari saldo rekening nasabah giropos atau sudah "certified". Adalah suatu tantangan bagi Dinas Giropos di Indonesia dalam kenyataan ini di mana Kantorpos berani membayar kartu pembayaran luar negeri, tetapi di dalam negeri sendiri belum dapat melaksanakan cekpos perjalanan. Jumlah Kartu Pembayaran dari Negeri Belanda pada akhir tahun 1978 mencapai 21.194 lembar dengan besar uang Rp.1.053.663.350,-.

2) Dinas-dinas Uang Lainnya.

a) Dinas Weselpos

Weselpos adalah suatu sistem pengiriman uang melalui Pos yang dijamin sepenuhnya oleh Perum Pos dan Giro dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 4/1959 tentang Pos.

Penyelenggaraan dinas weselpos dalam negeri meliputi seluruh wilayah tanah air dalam suatu sistem tatalaksana dan tarif yang seragam.

Sejalan dengan misi Perum Pos dan Giro sebagai pengemban fungsi penunjang dalam wawasan Nusantara dan dalam pemerataan pembangunan, dinas weselpos berfungsi:

- melancarkan lalu lintas uang yang terjamin dan aman;
- secara tidak langsung menunjang perkembangan pendidikan melalui kesempatan mengirim weselpos untuk anak sekolah/mahasiswa secara berlangganan (weselpos berlangganan);
- menunjang perkembangan bidang usaha dan perdagangan, dan menunjang Badan/Instansi Pemerintah dalam memindahkan dana pembangunan dari/ke Pusat/Daerah.

Untuk memenuhi pelbagai kepentingan pemakai-pemakainya terdapat beberapa jenis weselpos ialah:

a) Weselpos biasa;
b) Weselpos telegrap;
c) Weselpos tebusan;

Digitized by Google

d) Weselpos berlangganan;
e) Weselpos kwitansi;
f) Weselpos luar negeri.

(1). Weselpos biasa.

Weselpos biasa dimaksudkan untuk membantu rakyat kecil di daerah/kota kecil untuk cara sederhana dan mudah mengirimkan uangnya ke tempat lain kepada relasi terutama untuk jumlah yang kecil-kecil.

Untuk mempercepat sampainya ke tangan si alamat pengirim ada kemungkinan mengirimkannya secara weselpos kilat.

Weselpos biasa ini merupakan jenis pelayanan jasa pemindahan uang yang paling potensial karena sasarannya terutama ditujukan pada rakyat biasa untuk keperluan sehari-hari.

(2). Weselpos telegrap.

Untuk mengirimkan berita pemindahan uang dipergunakan jasa dinas telegrap dengan beberapa kode tertentu supaya lebih cepat mencapai tujuannya. Pada tahun 1965 ada 12.760 weselpos dengan besarnya Rp.12.719.650,-. Dinas ini dihentikan pada tanggal 1 Juni 1966.

(3). Weselpos tebusan.

Dinas ini dimaksudkan untuk membantu sektor perdagangan dalam hal pemasaran terutama kepada mereka yang tinggal di daerah terpencil. Sebagai sarana mengirimkan barang dagangan kepada pembeli (konsumen) dapat dipergunakan kemudahan tercatat. Uang tebusan yang dipungut oleh kantorpos dikirimkan kepada si pengirim dengan weselpos tebusan.

(4). Weselpos berlangganan.

Dinas weselpos berlangganan dimaksudkan untuk melayani para siswa maupun mahasiswa yang belajar atau kuliah di tempat lain yang jauh dari tempat tinggal para orang tua atau walinya. Weselpos berlangganan adalah suatu perjanjian antara si pengirim dan kantorpos kirim untuk meminta kantor tujuan weselpos berlangganan untuk membayar jumlah uang kepada si alamat pada waktu yang sudah ditentukan secara teratur. Dinas ini dimulai pada tanggal 9 Agustus 1965 dan merupakan suatu dinas yang cukup memadai. Dalam tahun 1979 jumlah pemakainya 1.390 langganan. Jumlah uang yang dibayar Rp.25.474.067,15.

(5). Weselpos kwitansi (Lihat Sub pasal g, Pasal ini)

Digitized by Google

(6). Weselpos luar negeri.

Cara pemindahan uang ke luar negeri secara timbal balik ini sementara hanya dapat dikirimkan dari/kepada kantor tertentu di Indonesia sejumlah 17 kantorpos, akan tetapi dapat ditujukan ke seluruh kantorpos di wilayah Indonesia.

Adapun penyalurannya tidak langsung ke kantor tujuan atau dari kantor kirim, tetapi melalui Kantor Pusat Pos dan Giro Bandung. Sistim yang dipakai sistim kartu dan daftar sesuai dengan keinginan fihak luar negeri yang bersangkutan. Juga mengenai jumlah yang dikirim diadakan batas maksimalnya, untuk masing-masing negeri yang bertalian. Hubungan weselpos luar negeri dimulai tanggal 1 Maret 1971, dengan Nederland dan Jepang. Batas pengiriman uang maksimum masing-masing f.1.000,- dan US $ 500,-. Kemudian tanggal 1 Agustus 1971 dibuka hubungan dengan Thailand dan Hongkong masing-masing maksimumnya adalah $100,- dan £50,-. Selanjutnya tanggal 15 September 1971 dengan Jerman Barat maksimum $250,- dan tanggal 16 Oktober 1971 dengan Taiwan dengan maksimum $250,- dan terakhir tanggal 1 Mei 1972 dengan Malaysia dengan maksimum $100,-.

Kantorpos yang ditunjuk oleh Kantor Pusat Pos dan Giro untuk menerima setoran weselpos ke luar negeri ialah: Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Palembang, Medan, Ujungpandang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Malang, Sukabumi, Cepu, Cilacap, Pakanbaru dan Pontianak. Weselpos luar negeri yang datang ke Indonesia dibayarkan dalam rupiah. Karena penjabaran weselpos luar negeri yang diterima dilakukan oleh Kantor Pusat Perum Pos dan Giro di Bandung, dan penyaluran weselpos luar negeri yang dikirimkan juga melalui Kantor Pusat, maka waktu tempuhnya dapat melebihi 15 hari.

Di bawah ini berturut-turut dicantumkan data mengenai lalu-lintas weselpos dalam negeri dan lalu-lintas weselpos luar negeri.

Dari data lalu-lintas weselpos dalam negeri dapat disimpulkan bahwa walaupun tersedia saluran pengiriman uang melalui Dinas Giro pos atau Bank yang lebih murah, jumlah pengiriman weselpos masih tetap banyak dan meningkat tiap-tiap tahun yang membuktikan bahwa perintah pembayaran ini mempunyai ketahanan sepanjang masa karena cocok bagi pemakai-pemakai kecil.

Digitized by Google

LALU LINTAS WESELPOS DALAM NEGERI
TAHUN 1969 s/d 1978.

Tahun	Bilangan weselpos yang dikirim	Bilangan weselpos yang dibayar	Besar uang weselpos yang dikirim	Besar uang Weselpos yang dibayar
1969	2.358.006	2.304.582	7.472.430.855,45	7.423.589.662,08
1970	2.586.159	2.662.443	10.217.357.019,81	10.151.740.173,20
1971	2.846.192	2.896.100	23.250.323.413,46	13.180.850.179,19
1972	3.124.263	3.028.083	16.192.269.257,14	16.132.042.378,83
1973	3.226.460	3.276.857	22.411.022.964,69	22.372.454.888,30
1974	3.501.468	3.575.151	31.725.294.282,08	31.574.546.949,93
1975	3.768.451	3.961.589	40.756.319.644,51	49.644.415.305,60
1976	3.991.346	3.961.589	49.837.096.029,26	49.644.415.305,60
1977	4.268.669	4.255.443	60.978.081.128,78	60.737.064.008,98
1978	4.452.219	4.438.127	69.824.651.131,54	69.497.484.167,88

Lalu Lintas Weselpos Luar Negeri dari 1971 s/d 1978

Tahun	Bilangan weselpos ke/dari luar negeri	Besar uang weselpos ke/dari luar negeri dalam Rupiah
1971	554	9.907.286,63
	4.485	45.042.847,52
1972	910	21.063.680,19
	14.153	179.405.206,23
1973	1.265	81.394.932,80
	21.956	327.577.180,33
1974	831	23.474.743,77
	30.109	511.182.367,96
1975	903	30.851.170,--
	34.012	666.380.146,06
1976	798	23.776.837,55
	37.379	812.244.174,03
1977	852	27.747.474,20
	40.590	971.158.663,95
1978	1.124	63.066.185,79
	43.986	1.276.755.698,83

Digitized by Google

b) Bank Tabungan Negara

Dalam pemerintahan Orde Baru berdasarkan Undang-undang No. 20 tanggal 18 Desember 1968 (L.N. No.73/1968 dan Tambahan L.N. No. 2873) serta surat ketetapan Menteri Keuangan No. Kep/600/M/IV/12/1968, Bank Negara Unit V dikembalikan lagi menjadi Bank Tabungan Negara terhitung mulai tanggal 31 Desember 1968.

Setelah Bank Tabungan Negara membebaskan pengambilan kembali saldo tabungan nasabah-nasabahnya lewat kantorpos-kantorpos, jumlah tabungan masyarakat pada Bank ini justru meningkat. Pembebasan saldo tabungan ini merupakan salah satu usaha intensifikasi yang dilakukan Bank Tabungan Negara pada tahun 1969 yang berhasil memasukkan tabungan sebesar Rp.130.000.000,- dari penabung-penabung kecil dalam setahun.

Usaha-usaha intensifikasi lain ialah peningkatan suku bunga tabungan 6% menjadi 12% setahun, menggiatkan penabung di antara anak-anak sekolah dan melaksanakan "sales promotion" yang lebih luas.

Untuk memperluas daerah operasi tabungan, Bank Tabungan Negara mengikutsertakan kantorpos-kantorpos dalam dinas tabungan sebanyak mungkin, sebanyak yang tersebar di pesolok-pelosok tanah air termasuk Irian Barat. Untuk ini diadakan "Perjanjian pokok kerja sama Bank Tabungan Negara dengan P.N. Pos dan Giro" mulai 1 Oktober 1970. Dengan adanya Pos Keliling di Jakarta dan di tempat-tempat lain yang melayani Dinas Bank Tabungan Negara, maka Pos Keliling merupakan Bank Keliling pula. Demikian pula dengan adanya Pos Desa sebanyak 362, maka terbukalah kesempatan di pedesaan bagi rakyat kecil untuk menabung pada Bank Tabungan Negara.

Untuk menghargai dan merangsang kesadaran semangat menabung ini, Bank Tabungan Negara turut melaksanakan dengan giat "Tabungan Berhadiah" sesuai dengan instruksi Bank Indonesia.

Untuk melancarkan perhitungan, maka mulai 1 Januari 1970 perhitungan dan pertanggungan jawab keuangan mengenai dinas ini tidak dilakukan secara sentral oleh Kantor Pusat P.N. Pos dan Giro di Bandung dengan Kantor Pusat Bank Tabungan Negara di Jakarta, melainkan dilakukan oleh Kepala Daerah Pos dan Giro tertentu dengan Kepala Cabang Bank Tabungan Negara yang pada umumnya berkedudukan setempat.

Di samping itu terdapat perubahan ganti rugi untuk pekerjaan keagenan ini dari 4% menjadi 5% dari perkitaran uang penabungan dan uang pembayaran kembali.

Mulai 1 Maret 1970 suku bunga dinaikkan dari 6% menjadi 12% setahun tanpa batas maksimum, dan jumlah penabungan pertama ditetapkan paling sedikit Rp.10,-, sedangkan jumlah penabungan atau pembayaran kembali harus merupakan kelipatan Rp.5,-

Untuk menarik lebih banyak penabung jumlah maksimum pembayaran kembali secara langsung oleh Kantorpos (termasuk Kantor Pembantu/Tambahan) ditingkatkan menjadi Rp.5.000,- dalam masa seminggu, sedangkan untuk Kantorpos Besar Klas I jumlah penarikan ditetapkan Rp.25.000,- seminggu.

Digitized by Google

Sejak tanggal 1 Januari 1971 diadakan lagi kesempatan menabung dengan meterai tabungan.

c) Tabungan Pembangunan Nasional.

Pada tahun 1969 Indonesia menghadapi Pelita I. Untuk keperluan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Gubernur Bank Indonesia berpendapat bahwa dalam masyarakat masih banyak dana yang dapat dikerahkan untuk keperluan pembeayaan pembangunan. Dalam tahun 1968 dan 1969, dana yang berada di luar perbankan yang dapat dikerahkan diperkirakan masing-masing berjumlah Rp.40,7 milyar dan Rp.85,5 milyar. Sebagian besar dana yang belum dimobilisasi itu ditabung dengan berbagai cara yang tidak ada manfaatnya bagi pembangunan.

Dengan memperhatikan "rate of saving" yang terus naik dari tahun ke tahun sejak 1968 dapat disimpulkan bahwa rakyat telah mulai terbuka kesadarannya untuk tidak menghabiskan uangnya bagi kepentingan konsumsi, melainkan mulai mengarahkan dana-dananya ke sektor produksi.

Setelah diadakan "forecasting" mengenai tabungan dalam perbankan yang memberi pengharapan yang membesarkan hati, maka dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.4/8-KEP.DIR tanggal 15 Juli 1971 diciptakanlah "TABUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL" yang disingkat dengan nama "TABANAS" dan "TABUNGAN ASURANSI BERJANGKA" yang disingkat "TASKA".

Secara resmi Tabanas dan Taska dimulai tanggal 20 Agustus 1971. Untuk menggairahkan lagi para penabung, Menteri Keuangan dengan surat keputusannya No. Kep-615/NK/11/8/1971 tanggal 12 Agustus 1971 menetapkan tidak akan menagih pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak atas bunga, dividen dan royalty serta bea meterai atas bunga, modal pokok dan tanda bukti dari Tabanas dan Taska. Dan yang hebat lagi: tidak akan diadakan pengusutan atas asal usul uang tabungan. Di samping itu Tabanas dapat pula dijadikan sebagai jaminan kredit bank.

Ketika Tabanas dimulai, P.N. Pos dan Giro yang selama itu menjadi agen Bank Tabungan Pos dan Bank Tabungan Negara, tidak segera diikutsertakan melayani Tabanas bersama-sama Bank-bank lainnya. Baru setelah 10 bulan setelah Tabanas dimulai, P.N. Pos dan Giro diikutsertakan menerima penabungan dan melakukan pembayaran kembali kepada para penabung Tabanas. Untuk keperluan itu diadakan "Perjanjian Khusus Kerjasama Bank Tabungan dengan P.N. Pos dan Giro mengenai tatacara Pelaksanaan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1972. Kalau Bank Tabungan Negara menjadi agen Tabanas, maka dalam pelaksanaan Tabanas di Kantorpos-kantorpos, P.N. Pos dan Giro hanya menjadi sub agen. Meskipun demikian P.N. Pos dan Giro dengan kantorpos-kantorposnya yang tersebar luas di seluruh Indonesia tidak ditinggalkan. Dengan demikian P.N. Pos dan Giro memenuhi fungsinya sebagai pelayan bagi rakyat kecil di bidang tabungan pula.

Di mana ada Kantor Pos dan Giro, di perkotaan dan di pedesaan, rakyat kecil dapat mempercayakan uang tabungannya ke Tabanas melalui P.N. Pos dan Giro.

Digitized by Google

Sesuatu yang berguna dan baik bagi pembangunan nasional dapat dioptimasikan dengan dukungan dan dorongan Pemerintah sehingga terwujud tabungan terpimpin di mana tiap pegawai mempunyai buku tabungan. Khusus mengenai buku tabungan pegawai P.N. Pos dan Giro, saldo buku tabungan ini tiap bulan bertambah secara otomatis sebesar jumlah minimal yang ditetapkan oleh perusahaan. Lebih dari jumlah minimal itu boleh ditetapkan oleh penabung yang merasa dapat melakukan penabungan yang lebih banyak. Jumlah uang tabungan ini tiap bulan langsung dipotong dari gaji pegawai. Secara ini pegawai yang akan berhenti dengan hak pensiun akan menerima tambahan modal yang diusahakannya sendiri. Buku tabungan itu disimpan oleh perusahaan karena selama masih bekerja aktip, pegawai tidak boleh menarik uang tabungannya kecuali dengan ijin Kepalanya.

Tabanas memang sukses dalam usahanya untuk menghimpun dana bagi pembangunan nasional. Namun demikian, dilihat dari segi penyediaan kemudahan atau fasilitas penabung, terdapat kemunduran. Di masa lampau buku tabungan dapat dipergunakan sebagai buku cek perjalanan. Seorang yang mempunyai buku tabungan dari Bank Tabungan Pos bila bepergian, di tengah perjalanan bila memerlukan uang, dapat menarik uang tabungannya di Kantor Pos atas tanggung jawab Kepala Kantor Pos setempat. Buku tabungan yang dapat berfungsi sebagai buku cek perjalanan ini dijalankan oleh beberapa Administrasi Pos, misalnya di Inggris, Jerman Barat dan Austria. Kemudahan ini tidak disediakan lagi oleh Bank Tabungan Negara sebagai agen Tabanas. Di samping itu dahulu buku tabungan dapat dipindahkan dari suatu Kantor Pos ke Kantor Pos lainnya bila penabung pindah alamat. Kemudahan ini juga disediakan pula, sehingga nasabah harus berhenti dahulu sebagai penabung dan mengeluarkan saldo tabungannya seluruhnya meskipun ia tetap menghendaki sebagai penabung. Hal ini kurang memberi kemudahan yang menyenangkan bagi penabung yang tidak ingin membawa uang tunai, sedangkan bagi Tabanas hal ini berarti adanya sebagian saldo tabungan yang lepas.

Selain dari itu penabung merasa kurang senang kalau ia hendak mengambil uangnya dalam jumlah yang besar yang harus dimintakan ijin kepada Bank Tabungan Negara Cabang. Demikian pula permintaan bunga tidak dapat langsung ditambahkan pada buku tabungan nasabah karena harus dikirimkan lebih dahulu kepada Bank Tabungan Negara Cabang berhubung Kantor Pos tidak menyelenggarakan administrasi rekening koran.

Sejak tanggal 1-7-1972 Kantor Pos dan Giro tidak menerima penabungan ke dalam B.T.N. supaya tidak terdapat duplikasi dalam penabungan untuk keperluan pembangunan. Kebijaksanaan ini ditempuh supaya hanya ada satu macam tabungan bagi pembangunan nasional ialah Tabanas.

Untuk pekerjaan Tabanas P.N. Pos dan Giro menerima provisi sebesar 2% dari perkitaran. Mulai 1-1-1978 provisi dihitung berdasarkan jumlah perbuatan.

Meskipun status P.N. Pos dan Giro dalam menyelenggrakan dinas Tabanas agak berbeda dengan Bank, namun karena tersebarnya unit-unit usaha Perum Pos dan Giro menjangkau area yang luas sekali, masih juga dimungkinkan penghimpunan dana yang cukup besar dari masyarakat bagi pembangunan. Di bawah ini dicantumkan data penabungan dan penarikannya.

Digitized by Google

Tahun	Bilangan Penabungan	Penabungan Dalam Rupiah	Bilangan Penarikan	Pembayaran kembali dalam Rupiah
1972	*183.417*	*35.455.564,67*	*60.567*	*179.615.557,46*
1973	*516.362*	*1.414.983.531,63*	*147.188*	*937.028.979,05*
1974	*711.754*	*2.323.827.633,06*	*211.209*	*1.702.995.870,57*
1975	*995.749*	*4.358.181.115,93*	*273.669*	*2.983.097.829,68*
1976	*1.378.053*	*7.042.170.698,99*	*371.685*	*4.766.784.870,80*
1977	*1.366.852*	*7.706.011.191,67*	*335.763*	*4.775.123.498,64*
1978	*2.091.119*	*15.526.004.375,45*	*582.924*	*10.461.694.519,82*

Jumlah penabung Tabanas di Kantor Pos dan Giro diseluruh Indonesia mencapai 860.456 pada tahun 1978 dengan saldo tabungan sebesar Rp.12.900.292.985,38. Berbahagialah penabung yang memenangkan undian Tabanas sebagai hadiah dalam kehadirannya sebagai agen pembangunan nasional.

d) Dinas Penagihan Pajak Radio.

Pada tahun 1967 terjadi sesuatu yang unik. Ketika itu pemilik radio dikenai pajak radio dan sumbangan iuran radio pula mulai 1-1-1964. Penyediaan meterai radio mengalami kesulitan karena ongkos pembuatannya lebih mahal dari pada pajaknya yang hanya sebesar Rp.7.50 uang lama. Berhubung dengan itu diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan untuk menghentikan pemungutan pajak radio mulai 1-1-1967. Meskipun demikian sumbangan iuran radio berjalan terus.

Atas keputusan Menteri Keuangan pemungutan sumbangan iuran radio mulai 1-4-1969 dihentikan dan pajak radio dihidupkan kembali yang pelaksanaannya sebagian dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Dasar pemungutan pajak radio oleh Pemerintah Daerah setempat ialah Undang-undang R.I. No.10 tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah R.I. No.5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.10 tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 No.54; Tambahan Lembaran Negara No.2861). Sejak diserahkannya Pajak Radio kepada Daerah yang berhak, maka semua ketentuan yang mengatur tentang sumbangan radio dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya pemungutan pajak radio tetap dapat dikerjakan oleh P.N. Pos dan Giro, dilakukan pendekatan kepada beberapa Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan Perusahaan dari provisi pemungutan pajak radio ini dilancarkan penerangan dan penjelasan sebagai berikut:

"Pajak radio berdasarkan Undang-undang No.12/1947 pasal 7, pemungutannya diserahkan kepada P.N. Pos dan Giro.

Surat ijin berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan Negara No.8/1946 harus dikeluarkan/diterbitkan oleh P.N. Pos dan Giro.

Digitized by Google

P.N. Pos dan Giro dalam hal ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. P.N. Pos dan Giro menjamin keamanan hasil pungutan. Semua pajak radio yang masuk, meskipun misalnya ada kecurangan oleh pegawai loket, tetap menjadi beban P.N. Pos dan Giro.
Pemda setiap waktu dapat mengetahui saldo rekeningnya dan dapat mengambil uangnya setiap bulan kalau menghendakinya.
Untuk meningkatkan hasil pajak radio, para petugas P.N. Pos dan Giro bersama-sama dengan alat-alat Pemda dapat mengadakan sweeping.
Kantorpos-kantorpos supaya dianggap juga sebagai milik Pemda yang dapat dipergunakan oleh Pemda untuk melancarkan semua penerimaan dan pembayaran. Oleh karenanya tepat sekali kalau pungutan pajak radio diserahkan kepada PN Pos dan Giro."

Hasil dari promosi tersebut pada akhir tahun 1978 sebagai berikut:
- Jumlah Kantor Pos dan Giro yang masih mengerjakan pemungutan pajak radio 53 kantor.
- Jumlah Kantor Pos dan Giro yang hanya mengerjakan surat ijin radio 36 kantor.
- Jumlah pesawat radio yang terdaftar 1.666.003.
- Penerimaan pajak radio sebesar ± Rp.100.000.000,-.

e) Dinas Pemungutan Iuran Televisi.

Setelah siaran televisi terjangkau di luar Jakarta timbullah masalah bagi Yayasan Televisi R.I. untuk menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan pendaftaran, pemberian surat ijin, pembayaran dan pertanggungan sumbangan iuran televisi yang ada di luar Jakarta. Masalah tersebut segera teratasi karena administrasi yang dipersoalkan di atas pada hakekatnya sama dengan administrasi pendaftaran pesawat radio, pemberian surat ijin radio dan pembayaran pajak radio. Setelah diadakan pendekatan dan perundingan seperlunya, akhirnya dengan surat keputusan Menteri Penerangan R.I. tanggal 1-10-1969 No. 74/KEP/Menpen/1969, wewenang pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan pendaftaran, pemberian kartu pendaftaran, pemungutan sumbangan iuran televisi dan sebagainya, dilimpahkan dari pihak Yayasan Televisi R.I. kepada P.N. Pos dan Giro sejak tanggal 1-1-1969. Naskah serah terima wewenang tersebut ditanda tangani oleh Direktur TVRI dan Direktur Giro dan Lalu lintas Uang Pos pada tanggal 2-10-1969.

Di samping wewenang yang dimaksud di atas, maka dengan surat keputusan Menteri Penerangan R.I. No.121/KEP/Menpen/1970 P.N. Pos dan Giro menerima pelimpahan wewenang pelaksanaan penyegelan dan penyitaan pesawat penerima televisi dan penyelenggaraan semua administrasi yang berhubungan dengan penyegelan, penyitaan pesawat penerima televisi. Pelaksanaan pelimpahan wewenang ini berlaku mulai tanggal 1-1-1971.

Sampai tahun 1975, jangkauan siaran televisi hanya mencapai 4% luas daratan Indonesia, atau sekitar 75.600 km persegi. Sementara penduduk yang terjangkau 42 juta atau sekitar 32%.

Digitized by Google

Jumlah pesawat televisi yang terdaftar sampai akhir 1975 sebanyak 429.712, walaupun diperkirakan 500.000 buah. Penduduk yang terjangkau diperkirakan 78 juta.

Lewat program peningkatan siaran TVRI yang dilaksanakan tahun 1976/1977 maka jumlah studio menjadi 9 buah, pemancar menjadi 57 buah. Luas jangkauan menjadi 212.050 km persegi, sedangkan penduduk yang terjangkau menjadi 78 juta atau 56% dari seluruh penduduk Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 1978, jumlah pemegang surat ijin pesawat televisi tercatat 1.156.289 yang berarti 5500% kenaikannya terhadap jumlah surat ijin televisi pada tahun 1969 yang baru mencapai 20.636. Meskipun ada kenaikan sebesar itu, dirasa belum semua pesawat televisi yang ada di masyarakat terdaftar dan belum semua pemiliknya memenuhi pembayaran sumbangan iuran televisi. Berhubung dengan itu keikutsertaan yang didorong kesadaran para pemakailah dalam hal ini mempunyai peranan untuk memudahkan pengumpulan iuran televisi, di mana harus diinsafi bahwa untuk menonton siaran televisi yang menyenangkan selalu diperlukan dana yang cukup. Berhubung dengan itu tiap kali para penonton diingatkan akan kewajiban mereka untuk membayar iuran televisi pada waktunya. Tidak sia-sia pada hakekatnya apa yang dipertunjukkan di layar televisi, terutama untuk bidang pendidikan. Siaran secara audio visual memenuhi peribahasa yang berkata: Sekali melihat melebihi seribu kali mendengar.

Keteraturan dalam melunasi sumbangan iuran televisi melalui Kantor Pos dan Giro dapat dijadikan ukuran pula akan tebalnya rasa wajib bayar iuran televisi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sweeping televisi ada kalanya harus dilancarkan yang didahului dengan pengumuman. Masih juga terdapat orang-orang yang suka menikmati siaran tanpa memperhatikan kepentingan TVRI.

Para Kepala Kantor Pos dan Giro dituntut pula untuk terus menerus mengevaluasi apakah pembayaran iuran televisi sesuai dengan banyaknya televisi yang terdaftar setempat dan banyaknya pesawat televisi yang terjual menurut laporan pedagang pesawat televisi. Pedagang-pedagang diminta kerja sama yang baik dengan memberikan laporan secara tertib tentang jumlah pesawat televisinya yang terjual dan jangan sampai memberikan kwitansi kosong di mana tanggal pembeliannya dikosongkan untuk sementara.

Pada tahun 1975 terdapat sinyalemen tentang adanya pemungutan atau penagihan iuran televisi secara liar dengan mendatangi rumah-rumah para pemilik pesawat televisi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengaku sebagai petugas pos. Untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan nama baik P.N. Pos dan Giro, maka para petugas sweeping P.N. Pos dan Giro diberi ban lengan sebagai tanda pengenal.

Dinas pemungutan iuran televisi merupakan salah satu sumber pendapatan baru. Pada akhir tahun 1978 pemasukan iuran televisi, denda dan sebagainya telah mencapai Rp.500.000.000,-. Untuk pekerjaan tersebut P.N. Pos dan Giro menerima provisi 10%.

Digitized by Google

f) Dinas Rekening Koran dengan Daerah Tingkat I/II.

Dinas ini sebelum Bank-bank Pembangunan Daerah dibuka di Daerah Tingkat I/II dan Bank-bank Negara melebarkan sayapnya di daerah-daerah, pada umumnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, mengingat Kantor Pos dan Giro di ibu kota Kabupaten mempunyai Kantorpos-kantorpos Pembantu yang tersebar di Daerah Tingkat I/II. Setelah Bank-bank itu berdiri, Pemda mengalihkan rekeningnya ke Bank-bank yang memberi jasa giro untuk saldo rekeningnya yang terendah pada bulan yang berjalan.

Sejak tahun 1969 yang tercatat tidak mempergunakan Dinas Rekening Koran dengan Daerah Tingkat I/II, ialah Pemda Ujungpandang, Pare-Pare, Banda Aceh, Pekalongan, Amboina, Ternate, Blitar, Kayuagung, Lubuklinggau, Tembilahan, Gorontalo, Metro, Kotabumi, Rembang, Lahat dan Bangko Jambi.

Sampai dengan 1978 yang masih mempergunakan dinas ini ialah Pemda Baturaja, Pangkalpinang, Rengat, Tanjungpinang, Semarang, Kupang, Padang, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Curup, Jayapura, Sorong, Biak dan Manokwari.

Meskipun jumlah pemakai dinas ini tinggal sedikit, bukti ini menunjukkan bahwa masih terdapat Pemda yang lebih suka mempergunakan kemudahan ini yang paling cocok dengan situasi dan kondisi daerahnya. Perkitaran uang rekening koran dari tahun 1969 dan perbuatannya justru tidak menurun melainkan menanjak. Perkitaran uang (turn over) pada tahun 1969 tercatat sebesar Rp.6.702.412.328,17 dengan 34.777 perbuatan. Pada tahun 1978 perkitaran mencapai Rp.25.088.508.304,13 dengan 136.513 perbuatan. Di samping itu perkitaran uang rekening koran di Jayapura pada tahun 1974 sebesar Rp.762.579.618,68 dengan 6.572 perbuatan. Pada tahun 1978 mencapai Rp.1.008.221.892,90 dengan 6.749 perbuatan. Meskipun jumlah perbuatan tiap hari rata-rata hanya 398, namun masih dipakainya dinas ini oleh Pemda membuktikan bahwa Pemda masih menganggap Kantor Pos dan Giro sebagai Kantor Pembantunya sendiri yang mendapat kepercayaan penuh. Di samping itu tradisi untuk mempergunakan surat perintah membayar uang Kabupaten (spmuk) sebagai alat pembayaran masih kuat sehingga belum dapat diganti dengan cekbank atau cekpos.

g) Dinas Kwitansipos

Dalam Jilid I Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia, Bab II, Subbab 1e, telah diketahui bahwa Dinas Kwitansipos dibuka di Indonesia pada tahun 1882. Selama masa pendudukan Jepang dinas incasso ini tidak dijalankan. Demikian pula setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dinas penagihan secara tunai ini tidak segera dapat dibuka. Baru sejak tanggal 1-2-1976 untuk luar Jawa. Dinas ini memberi kesempatan kepada usahawan-usahawan untuk minta perantaraan Kantor Pos dan Giro yang setempat dengan kediaman pihutang, untuk melakukan penagihan kepada pihutang dan mengirimkan tagihan yang terpungut dengan weselpos kwitansi kepada yang berpihutang.

Digitized by Google

Perkembangan dinas ini masih belum nampak maju seperti yang tercantum pada data di bawah ini.

Tahun	Penagihan		Pelunasan	
	Perbuatan	Besar uang dalam Rupiah	Perbuatan	Besar uang dalam Rupiah
1976	918	Rp. 4.453.905,58	98	Rp. 4.279.755,58
1977	2.362	17.934.360,85	211	17.323.117,85
1978	5.219	64.484.924,95	758	62.511.994,95

Bila data tahun 1978 dibandingkan dengan tahun 1977 dan 1976, hasil penagihan masih sedikit sekali karena hanya mencapai 1½% dari jumlah tagihan yang diajukan. Hal ini disebabkan karena Kantor Pos dan Giro setempat tidak mempunyai kekuatan memaksa. Mungkin karena cara penagihannya dilakukan dengan memberi surat panggilan kepada pihutang supaya datang di Kantor Pos dan Giro untuk melunasi hutangnya, bukan dengan mendatangi pihutang di rumahnya. Karena pihutang harus datang sendiri di Kantor Pos dan Giro inilah dinas ini kurang menarik, karena pihutang harus mengeluarkan beaya untuk memenuhi panggilan tersebut. Penagihan secara ini dapat dijadikan ukuran pula apakah para pihutang itu dapat tertib dan teratur melunasi hutangnya melalui Kantor Pos dan Giro. Sejarah telah membuktikan bahwa pada tahun 1925 banyaknya kwitansi yang dikirim sudah mencapai 418.382 dengan besaruang F 7.292.569,-, sedangkan yang tertagih mencapai 312.303 dengan besaruang F 5.527.918. Dalam perhubungan luar negeri banyaknya kwitansi yang dikirim mencapai 11.731 dengan besaruang F 391.228,40, sedangkan yang tertagih mencapai 9.493 dengan besaruang F 319.155,-. Promosi untuk meningkatkan Dinas Kwitansipos masih perlu dilancarkan dan cara penagihan perlu diperbaiki.

h) Dinas Penagihan Rekening Listrik

Dalam rangka untuk mengembangkan Dinas Giropos dan meningkatkan pendapatan perusahaan, pada tahun 1970 di Semarang dibuka rekening giropos atas nama Perusahaan Listrik Negara Cabang Semarang untuk menampung pembayaran rekening listrik yang makin lama makin banyak. Kerja sama ini dikukuhkan dengan suatu perjanjian antara Kepala Daerah Pos dan Giro II dan Kepala P.L.N. Cabang Semarang. Untuk keperluan pengumpulan pembayaran rekening listrik ini pihak P.L.N. menyediakan pormulir-pormulir daftar penerimaan pembayaran rekening listrik. Pemakai listrik disekitar beberapa gardu listrik melakukan pembayaran rekening listrik kepada Kantor Pos/Tambahan/Sentral yang ditunjuk. Untuk keperluan

Digitized by Google

ini Sentral Giro bahkan melayani 10 loket yang terdiri dari 3 loketnya sendiri di Sentral Giro dan 7 loket di beberapa tempat yang disediakan P.L.N. Untuk pekerjaan ini P.N. Pos dan Giro/Perum Pos dan Giro menerima provisi sebesar 8 permil dengan kewajiban bahwa setelah storan-storan pembayaran rekening listrik masuk rekening giropos, keesokan harinya harus dipindahkan ke rekening giro Bank P.L.N. Cabang Semarang. Demikian pula di Sentral Giro di Yogyakarta.

Mengingat ruangan untuk publik di Sentral Giro di Yogyakarta kecil maka dengan kerjasama para Ketua Rukun Tetangga, pembayaran-pembayaran uang rekening listrik dapat dibayarkan melalui Ketua R.T. yang selanjutnya akan menstorkan uang tersebut kepada Sentral Giro.

Pembayaran rekening listrik di beberapa Kantor Pos dan Giro tidak selalu disalurkan melalui Dinas Giropos. Beberapa Kantor Pos dan Giro dapat menerima pembayaran rekening listrik secara biasa dan secara berkala penerimaan pembayaran rekening-rekening listrik diperhitungkan dengan Kantor P.L.N. setempat. Pada kenyataannya Dinas Penagihan Rekening Listrik ini merupakan suatu perjanjian lokal antara Kepala Daerah Pos dan Giro di satu pihak dengan Kepala P.L.N. setempat di pihak lain mengenai tata cara dan aturan tata kerja penagihan rekening listrik P.L.N. dari para langganan.

Pada dewasa ini Dinas ini dilaksanakan di 6 Daerah Pos dan Giro yang meliputi 27 Kantor Pos dan Giro yang pada tahun 1978 berhasil mengumpulkan pembayaran rekening listrik lebih dari Rp.4.000.000.000,- dengan provisi Rp.32.000.000,-

Digitized by Google

2. Pembangunan Pos dan Giropos Dalam Pelita I dan Pelita II

Sifat kegiatan Perum Pos dan Giro tidak menunjukkan suatu keuntungan budgetair yang spectaculair*), karena harus mengemban tugas sosial yang tidak mudah di mana Perum Pos dan Giro harus dapat membeayai dirinya sendiri tanpa subsidi dari Pemerintah. Meskipun demikian untuk pengembangan Sarana Pos dan Giro, diperoleh Dana dari Pelita di samping Dana Reinvestasi dari Perusahaan sendiri.

Pembangunan Lima Tahun (Pelita I dan Pelita II) adalah pembangunan yang simultan dan terpadu, di mana semua komponen saling terikat satu sama lain. Ada semacam korelasi antara tingkat kemajuan suatu masyarakat dengan perkembangan dinas pos. Didalam dunia internasional dinas pos dipakai sebagai ukuran perkembangan sesuatu negara, disebabkan setiap pergolakan di bidang sosial, politik dan ekonomi akan memberi inpact nyata pada pelaksanaan tugasnya. Konsekuensinya ialah kemerosotan atau kemunduran pengabdian Pos dan Giro di Indonesia mempengaruhi perkembangan sosial politik dan ekonomi, bahkan pada suatu saat dapat menjadi penghalang bagi lajunya pembangunan*). Berhubung dengan itu titik berat pembangunan Pos dan Giro adalah meningkatkan pelayanan untuk mendukung lajunya pembangunan ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan.

a. Repelita I Pos dan Giro

Untuk menangani meningkatnya lalulintas pos sebagai akibat pengembangan Jakarta sebagai ibu kota negara, maka diperlukan peningkatan dalam pelayanan. Demikian pula pelayanan yang lebih, cepat, tepat dan murah bagi seluruh masyara-

*) *Direktur Jenderal, Soehardjono, "Pos dan Telekomunikasi Perkembangannya selama lima tahun terakhir ini," Indonesia sejak supersemar, Laidin Girsang, Yayasan Laita, Jakarta, 1973.*

Digitized by Google

kat yang tinggal di desa harus terus ditingkatkan. Efektivitas dan pengawasan dalam penyelenggaraan dinas-dinas pos merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, terutama dalam rangka Repelita I, dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dinas Pos di Jakarta, perluasan jaringan pos kilat, pendayagunaan Dinas Pos Transit Ambulans, peningkatan pelayanan di Pedesaan, perluasan dan penyempurnaan dinas Giro dan Cekpos, dan penyempurnaan pengawasan serta pengamanan terhadap pelaksanaan dinas.

1). Sasaran dan Pembangunan.

Sasaran yang hendak dicapai serta lokasi pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan 5 buah kantor Pos dan Giro di Ibu Kota, Jakarta, yang meliputi pembangunan Kantor Pos Besar Klas I Jakarta (Pasar Baru), Kantor Pos Besar Kebayoranbaru, Kantor Pos Tambahan Rawamangun, Pasar Kodya dan Grogol.
b) Perluasan jaringan Pos Kilat yang mencakup 19 hubungan, diantaranya dari Jakarta - Jawa Barat - Jawa Tengah - Jawa Timur - Sumatra - Kalimantan - Sulawesi - Nusa Tenggara - Maluku dan Irian Barat.
c) Pembangunan trayek perhubungan Pos Kilat baru sebanyak 23 hubungan, yaitu antara Jakarta dengan kota-kota pedalaman lainnya, diantaranya Bandaaceh, Langsa, Tondano, Tomohon dan Bitung.
d) Pembangunan Dinas Pos Ambulans yang meliputi:
   (1) Dinas Pos Keliling untuk 19 kota, diantaranya Jakarta, Surabaya, Medan, Ujungpandang, Pontianak, Denpasar, Menado, Yogyakarta dan Ampenan.
   (2) Dinas Pos Kereta api untuk trayek-trayek, Jakarta-Semarang-Surabaya pp.; Bandung-Yogyakarta-Surabaya pp.; Merak-Jakarta pp; Kertapati-Panjang pp; dan Surabaya-Banyuwangi pp.
e) Menyempurnakan pelayanan Pos di pedesaan atau pedalaman yang meliputi:
   (1) Peningkatan 360 buah rumahpos menjadi kantorpos desa. Peningkatan pelayanan kantor-kantorpos tetap kepada desa-desa pedalaman; di Jawa 179 buah, Sumatra 63 buah, Kalimantan 20 buah, Sulawesi 16 buah, Maluku 8 buah, Nusa Tenggara 22 buah, dan Irian Barat 19 buah.
   (2) Menyelenggarakan pengadaan 25 buah kantorpos bergerak/mobil di: Jawa Tengah 9 buah, Jawa Timur 4 buah, Jawa Barat 3 buah, Sumatra Selatan dan Lampung 2 buah, Sumatra Utara dan Aceh 3 buah, Kalimantan Barat 2 buah, dan Sulawesi 2 buah.
f) Perluasan dan penyempurnaan Dinas Giro dan Cekpos yang mencakup:
   (1) Pembangunan 4 buah kantor Sentral Giro di Medan, Ujungpandang, Surabaya dan Palembang.
   (2) Pembangunan 5 buah Kantor Sentral Giro Gabungan di Jember, Menado, Denpasar, Pontianak dan Banjarmasin.
g) Penyempurnaan pengawasan dan pengamanan terhadap penyelenggaraan dinas yang meliputi:
   (1) Perluasan Gedung Kantor Pusat Pos & Giro di Bandung. Pembangunan

Digitized by Google

4 buah Biro Kepala Daerah Pos dan Giro di Semarang, Palembang, Medan dan Denpasar.

(2) Perluasan 2 buah gedung peralatan dan perbengkelan di Bandung.

b. Repelita II Pos dan Giro

Titik berat kebijaksanaan Pelita II di bidang Pos dan Giro adalah sebagai berikut:

1) Membina fasilitas Pos dan Giro agar dapat memperluas jaringan pelayanan kepada masyarakat sehingga turut membantu memperlancar usaha pembangunan dan penciptaan kesatuan dalam wawasan Nusantara.
2) Meningkatkan usaha penyempurnaan kelembagaan di bidang Pos dan Giro serta kaitannya dengan bidang angkutan agar tercipta kondisi yang sehat bagi pengembangan lalulintas Pos dan Giro.

Berhubung dengan itu, maka dalam Repelita II akan dibangun 600 Kantorpos Pembantu di daerah-daerah transmigrasi, sehingga manfaat fasilitas Pos dapat langsung membantu pembangunan transmigrasi. Selanjutnya untuk membantu kelancaran lalulintas Pos, direncanakan pengadaan 280 kendaraan pos, 500 buah sepeda motor dan sarana-sarana lain. Secara bertahap akan diadakan pula penyesuaian tarif Pos dan Giro untuk membantu menyehatkan keuangan Pos dan Giro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pelbagai peraturan dan ketentuan pelaksanaan, antara lain wajib angkut pos seperti termaktub dalam Undang Undang nomor 4 tahun 1959 akan lebih ditingkatkan lagi.

c. Pelaksanaan Proyek-proyek Pelita I dan Pelita II.

Sebagaimana biasa tidak semua tujuan dapat dicapai dengan mudah. Dalam pelaksanaan Repelita I dan Repelita II Pos dan Giro terdapat hambatan-hambatan yang merupakan masalah. Hambatan-hambatan itu antara lain:

1) Kesulitan tanah yang cocok untuk lokasi pembangunan Kantorpos/Kantorpos Tambahan/Kantorpos Pembantu.
2) Harga tanah setempat tidak cocok dengan harga yang ditetapkan Daftar Isian Proyek (DIP) atau standar taksiran Pemerintah.
3) Tidak tepatnya (synchronnya) dropping uang dengan saat dibutuhkannya untuk pelaksanaan.
4) Biaya pemasangan saluran listrik yang dibebankan kepada perusahaan yang belum menyediakan dananya pada anggarannya.
5) Pembelian kendaraan bermotor roda empat atau roda dua belum dapat dibeli karena harga penjualan Sole Agent setempat tidak sesuai dengan plafond yang disediakan DIP.
6) Lokasi gedung baru adakalanya kurang strategis karena terpaksa mengikuti perencanaan tata kota, sehingga ada Kantor pos Pembantu berada jauh dari bagian kota yang ramai. Kalaupun dapat didirikan mendekati perkantoran Pemda, Kecamatan yang lokasinya tidak menghadapi jalan besar atau utama, melainkan masuk di jalan simpang.

Digitized by Google

Akibat dari hambatan-hambatan yang diuraikan pada butir 1) sampai dengan butir 5) tersebut di atas, ialah bahwa antara beberapa DIP dengan realisasi pembangunannya terdapat perbedaan yang menyolok, di mana jumlah gedung yang berhasil dibangun jauh dari yang direncanakan, sedangkan dana disediakan. Perbedaan-perbedaan antara DIP dan realisasi pembangunan dapat diikuti pada data di bawah ini.

Tahun	DIP	Realisasi
1969/1970	Rp. 110.000.000,-	Rp. 103.397.000,--
1970/1971	Rp. 121.000.000,-	Rp. 115.537.176,60
1971/1972	Rp. 230.000.000,-	Rp. 218.103.481,20
1972/1973	Rp. 445.900.000,-	Rp. 427.811.950,01
1973/1974	Rp. 649.909.000,-	Rp. 654.195.720,67
1974/1975	Rp. 881.000.000,-	Rp. 856.089.133,30
1975/1976	Rp. 1.528.000.000,-	Rp. 1.441.935.764,48
1976/1977	Rp. 2.208.029.000,-	Rp. 1.876.057.164,37
1977/1978	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 1.724.694.949,36
1978/1979	Rp. 4.096.419.600,-	Rp. 510.573.507,32

Jenis Prasarana	DIP	Realisasi
1. Kantorpos Pembantu Kantorpos Tambahan	586	372
2. Kantorpos	33	21
3. Kantorpos Besar Kantorpos Besar Klas I	11	6
4. Biro Daerah Pos	3	3
5. Sentral Giro	3	2
6. Gedung Pos Ibu Kota	1	1
7. Mess Pengawal Kereta Api	1	1
8. Volswagen (V.W.)	54	36
9. Pick Up	38	22
10. Truk	29	22
11. Jeep	22	9
12. Landrover	16	16
13. Sepeda Motor	597	465
14. Bis Surat	350	350

Proyek-proyek Pos dan Giro yang dibiayai Dana Pelita I dan Pelita II yang diuraikan di atas merata di semua Propinsi di Indonesia kecuali di Irian Jaya. Realisasi Pelita I dan Pelita II ini tiap-tiap tahun dari tahun 1969 s/d 1978 menambah kekuat-

Digitized by Google



Bandung, 23 April 1976
Kantor Kepala Daerah Pos dan Giro ke VIII di Bandung. Diresmikan oleh Direktur Jenderal Postel Soehardjono.



Denpasar, 21 Juni 1978
Gedung Kantor Pos Besar Denpasar diresmikan oleh Dirjen Postel Soehardjono.

Digitized by Google

an alat-alat produksi P.N. Pos dan Giro/Perum Pos dan Giro seperti yang terlihat pada Lampiran 6.

d. Repelita III Pos dan Giro

Sesuai dengan yang ditegaskan dalam GBHN, pembangunan Pos ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya dan dilaksanakan sejajar dengan dan menunjang REPELITA.

Adapun sasaran yang dituju pembangunan Pos dalam Repelita III ialah memanfaatkan secara optimal hasil-hasil yang telah dicapai dan memeratakan pembangunan ke daerah-daerah terpencil, agar sebanyak mungkin rakyat Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

1) Kebijaksanaan dan langkah-langkah

Perkembangan potensi sarana Pos dan Giro yang terdiri dari Kantorpos Besar/ Kelas I, Kantorpos Tambahan/Pembantu, Sentral Giro dan Rumah Pos pada akhir REPELITA I sejumlah 2.547 dan pada akhir REPELITA II sejumlah 2.751 menunjukkan kenaikan 8,009%.

Angka Produksi Jasa Pos dan Giro antara lain lalu-lintas suratpos selama PELITA I sejumlah 860,4 juta dan selama PELITA II sejumlah 1.076,4 juta mengalami kenaikan 25,11%.

Bertumpu pada realisasi pembangunan peningkatan Jasa Pos dan Giro dan perkembangan potensi sarana Pos dan Giro pada akhir Pelita II, maka dalam Repelita III ditempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang Pos dan Giro sebagai berikut:

a) memperluas fasilitas Pos hingga menjangkau ke daerah-daerah dan masyarakat luas, antara lain Kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia, daerah-daerah transmigrasi dan pemukiman baru.
b) bila kebutuhan jasa Pos sudah mendesak untuk kelancaran pemerintahan dan kegiatan sosial dan ekonomi, akan dibangun Pos perintis dengan memperhatikan tersedianya sarana angkutan.
c) pengembangan Dinas Giropos dengan usaha menerapkan sistem perbankan sehingga merangsang masyarakat untuk memakai jasa Giropos.
d) dalam kerjasama internasional, di bidang Pos dan Giro, khususnya antar negara ASEAN, diarahkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan kebudayaan antara negara-negara yang bersangkutan.
e) bidang philateli diarahkan untuk menunjang berhasilnya program Pemerintah, antara lain dengan menerbitkan prangko bertema pendidikan, kebudayaan dan keluarga berencana.

Digitized by Google

2) Sasaran pembangunan

Untuk menambah potensi yang masih dibutuhkan bagi peningkatan pelayanan. ditetapkan sasaran fisik Repelita III sebagai berikut:

a) pembangunan 750 kantorpos pembantu/tambahan/kantorpos yang berlokasi di tingkat kecamatan, daerah-daerah transmigrasi maupun daerah-daerah terpencil seperti yang tercantum pada Lampiran 7.
b) pembangunan 11 buah gedung Kantor Pos Besar.
c) pembangunan 4 buah gedung Kantor Biro Daerah Pos dan Giro.
d) pengadaan 1.500 sepeda motor dinas Pos Keliling Desa serta pengadaan 120 kendaraan roda 4.
e) penambahan 1.000 buah bis surat.

Digitized by Google

3. Produksi Jasa Perum Pos dan Giro

Dengan pegawai yang berjumlah 15.096 pada awal Pelita I yang pada akhir Pelita II bertambah menjadi 16.249, dan dengan berbagai prasarana yang telah diuraikan di atas, maka dalam mengelola perusahaan, Direksi P.N./Perum Pos dan Giro mengambil beberapa keputusan yang mengutamakan:

- peningkatan pelayanan pos dan giropos,
- pemantapan waktu tempuh suratpos,
- peningkatan mutu pegawai,
- pemantapan target daya serap Daerah-daerah Pos dan Giro,
- pembinaan disiplin anggaran,
- pembinaan likuiditas dan
- peningkatan pengawasan secara kesinambungan.

Kebijakan dan langkah-langkah tersebut berhasil mencapai sasarannya dengan tepat dan baik sehingga produktivitas perusahaan terpelihara.

a. Produksi Jasa Pos

Dengan kebijaksanaan yang ditempuh di atas yang dijalankan dengan ketat, Perum Pos dan Giro berhasil dalam memelihara ketahanannya di tengah kompetisi di mana yang baik akan bertahan dan yang kurang baik akan kehilangan pemakai-pemakainya. Meskipun demikian produksi Jasa Pos tergantung pula kepada permintaan (demand) yang tergantung juga kepada kesukaan bangsa Indonesia dalam surat-menyurat dan kebiasaannya mempergunakan Dinas Pos.

Penilaian sampai berapakah prestasi yang telah dicapai suatu pelayanan, adakalanya didasarkan kepada jumlah penduduk. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hingga kini, jumlah surat tiap tahun yang dikirim oleh tiap orang melalui Dinas

Digitized by Google

Pos belum mencapai 2 (dua) pucuk surat. Meskipun demikian produksi suratpos dari tahun 1969 s/d 1978 tiap tahun terus naik seperti yang tercantum pada Lampiran 8.

b. Produksi Jasa Giropos dan Dinas-dinas Uang Lainnya.

Data mengenai produksi Giropos dan Dinas-dinas Uang Lainnya telah dimuat pada Subbab 1,b. Produksi dalam jasa ini menghasilkan produksi sampingan yang berupa jasa giro. Tidak semua uang disimpan di Kantor Pos dan Giro. Untuk keamanannya, sebagian disimpan di Bank-bank Pemerintah yang memberi jasa giro. Secara ini terdapat kerja sama antara Perum Pos dan Giro dan Perbankan.

Produksi sampingan lain yang penting ialah terciptanya likuiditas perusahaan yang tambah kuat. Makin banyak "inflow" daripada "outflow" makin kuat likuiditas perusahaan yang lebih memberi kemampuan untuk berkembang.

c. Produksi Jasa Pengiriman Paketpos

Di bidang pengiriman barang yang tidak menjadi monopoli pos, Perum Pos dan Giro berada dalam kompetisi dengan perusahaan-perusahaan transpor yang kini tumbuh dengan subur. Siang malam terlihat kendaraan-kendaraan besar-besar lalu lalang di rute-rute yang gemuk mengangkut paket-paket.

Data mengenai paketpos yang dikirim di dalam negeri, ke luar negeri dan yang diterima dari luar negeri dari tahun 1969 s/d 1978 dicantumkan pada Lampiran 9.

Dibandingkan dengan jumlah Kantorpos pada tahun 1977 yang ada 184, tidak termasuk Kantorpos Tambahan/Pembantu, maka tiap kantor dalam satu tahun rata-rata menerima 5.443 paketpos atau rata-rata 15 paketpos tiap hari. Berhubung dengan itu, dilihat dari segi akomodasi tiap kantor masih terdapat ruang yang cukup banyak untuk menampung tambahan paketpos. Maka sejak 28-7-1978 Perum Pos dan Giro menerima paketpos udara kilat dalam negeri setelah dari perusahaan penerbangan mendapat tambahan allotment. Dinas khusus ini dinamakan Dinas Paketpos Udara Kilat dalam negeri (Ppuk) dan untuk sementara penyelenggaraannya dibatasi antara kantor-kantor tertentu.

Digitized by Google

4. Hubungan Internasional

Hubungan Internasional di bidang Pos dan Giro mempunyai arti yang tidak kurang pentingnya, karena dari padanya ditentukan lancar tidaknya hubungan pertukaran dan pengiriman suratpos dan sebagainya, yang juga merupakan sebagian dari penjualan jasa oleh Perusahaan Negara Pos dan Giro kepada dan dari konsumen diluar Negara Republik Indonesia.

Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi sebagian pendapatan Perusahaan Negara ini.

Hubungan ini dapat berlangsung dan berkembang dengan sempurna berkat adanya suatu organisasi atau Uni antara negara-negara yang mengatur hubungan dan kerjasama antara negara-negara tersebut.

Keanggotaan dalam Uni ini diwakili oleh pemerintahan atau administrasi dari negara anggota tersebut.

Organisasi tersebut dapat berbentuk khusus dibidang Pos dan Giro atau juga berbentuk Umum diantara negara tertentu berupa kerja-sama, sedangkan bidang Pos dan Giro berupa bagian atau Sub bagian dari padanya.

Organisasi yang khusus di bidang pos dan giro dapat mempunyai dua sifat dipandang dari segi wilayah yang menjadi ruang lingkupnya, ialah:

- Universal ialah Uni Pos Sedunia (= Union Postale Universelle = UPU).
- Regional ialah yang disebut Uni terbatas atau Union Restreinte, antara lain Asian Oceanic Postal Union (= AOPU) yang meliputi juga Wilayah Negara Republik Indonesia.

  Contoh Organisasi atau kerjasama yang bersifat Umum antara negara tertentu dan bidang Pos dan Giro sebagai bagian atau sub bagian yang menyangkut negara Republik Indonesia ialah antara lain:

  * Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan
  * Indonesia - Pakistan Economic and Cultural Comission (IPECC).

Digitized by Google

Pada uraian berikutnya akan diuraikan serba ringkas beberapa kegiatan dari UPU, AOPU dan juga kegiatan dibidang Pos dan Giro dari ASEAN dan IPECC.

a. Universal Postal Union (UPU)

Sebagaimana diketahui, UPU sejak 1 Juli 1948 yakni sejak dinyatakan berlakunya Akta-Akta hasil Kongres ke-XII di Paris tahun 1947, menjadi badan PBB (U.N. Specialized Agency). Dengan demikian mengenai sistim keanggotaan yang sebelumnya bersifat terbuka diubah menjadi keanggotaan yang tertutup. Berarti bahwa untuk dapat diterima menjadi anggota UPU sesuatu calon anggota harus memperoleh dukungan dari 2/3 negara-negara anggota. Keanggotaan UPU pada saat Konggres ke-XVIII di Rio de Janeiro diadakan banyaknya 159 negara. Indonesia adalah anggota dari Badan Tetap UPU sebagai hasil pemilihan konggres. Indonesia sebagai anggota Consultative Committee for Postal Studies pilihan konggres UPU di Ottawa tahun 1957 dan selanjutnya pada kongres-kongres berikutnya selalu terpilih sebagai anggota dari badan tetap tersebut.

Nama Consultative Committee for Postal Studies telah mengalami perubahan di Konggres Wina tahun 1964 menjadi Consultative Council for Postal Studies.

Indonesia menjadi anggota Executive Council pilihan kongres-kongres Brussel 1952 dan Ottawa 1957 dan berikutnya dipilih oleh Kongres Tokyo ke-XVI tahun 1969 dan kongres Lausanne ke-XVII tahun 1974.

Menurut ketentuan pada aturan umum Konstitusi UPU, pasal 102, ayat 3, anggota Executive Council (Dewan Eksekutip) tidak boleh dipilih oleh tiga kali kongres berturut-turut.

Dengan demikian Indonesia tidak mengajukan pencalonan untuk dipilih kembali pada kongres UPU di Rio de Janeiro.

Keanggotaan pada Badan tetap UPU pada dasarnya memperhatikan kepada perwakilan menurut pembagian geografis. Kata perwakilan disini tidak selalu berkonotasi pada wakil yang dipilih karena diajukan oleh kelompok negara-negara dalam wilayah yang bersangkutan, akan tetapi dijumpai pula pencalonan nama negara yang diajukan secara individual tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan semua negara dalam wilayah itu. Apabila negara yang mencalonkan demikian itu terpilih, maka pilihan itu dianggap menduduki salah satu jatah kursi yang menjadi bagian dari wilayah itu.

Indonesia termasuk dalam zone-4, yaitu wilayah Asia Selatan dan Oceania yang dalam Badan tetap UPU diberi jatah sebanyak 10 kursi (menurut keadaan jumlah anggota UPU pada kongres Rio de Janeiro 1979).

Indonesia selalu mengirimkan perutusan ke kongres-kongres UPU.

Azas bagi negara Republik Indonesia untuk menjadi anggota UPU adalah seperti yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; khususnya yang mengenai bidang hubungan Pos (dan Giro) internasional. Sedangkan mengenai tujuannya untuk menjadi anggota UPU ialah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh UPU sendiri yaitu untuk menjamin

Digitized by Google

terbentuknya dan berkembangnya dinas pelayanan pos serta untuk memajukan kerjasama internasional.

Berhubung UPU turut serta dalam lingkup kerjasama teknik yang diselenggarakan oleh PBB, maka Indonesia sejauh-jauh dapat turut serta dalam kerjasama teknik, mengusahakan untuk dapat memperoleh manfaat dari padanya, disamping memberikan sumbangan bagi pembentukan dana UPU "Special Fund. '

Indonesia telah menerima bantuan berupa fellowships, bantuan tenaga ahli dan proyek UNDP lainnya. Indonesia telah meminta menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan study course UPU yang dibiayai dana UNDP dalam bulan Pebruari 1974 dan penyelenggaraan Special Course UPU yang dibiayai oleh UNDP yang diselenggarakan dalam bulan Maret/April 1980.

Proyek-proyek UNDP yang pernah diperoleh Indonesia ialah: Proyek FTA-37 yang dijalankan oleh Mr. H.E. Mc. Clura (Maret/April 1971) mengenai penjajagan akan hal hal yang diperlukan oleh administrasipos Indonesia. Kelanjutan proyek FTA-37, ialah proyek "Postal Development INS/72/013/0/01/41 ' di bawah seorang Chief Expert Mr. G.v.d. Salm yang dilangsungkan selama Januari 1973 sampai Desember 1974.

Experts yang tergabung dalam Team Mr. G.v.d. Salm yaitu Mr. H.R. Epstein, Mr. O.M. Brauer dan Mr. Saburo Matsui.

Proyek berikutnya adalah "Postal Development Project Metropolitan City of Jakarta" INS/75/018/A/01/41 yang dilangsungkan selama Januari 1977 sampai Juni 1978, oleh seorang expert Mr. F.G. Bear.

Memperhatikan kepada azas dan tujuan yang melandasi keanggotaan Indonesia pada UPU, maka dalam mewujudkannya Indonesia mengusahakan supaya sejauh mungkin dapat turut aktif dalam badan-badan tetap UPU, seperti Dewan Eksekutip UPU dan Dewan Konsultatif Studi Pos.

Menjadi anggota dari Dewan Eksekutip UPU berarti turut serta secara aktif dalam hal pengawasan dan pemberian koordinasi atas kegiatan UPU yang diselenggarakan oleh Biro Internasional UPU, selama masa antara dua kongres, selain dapat ikut serta dalam memberikan pemikiran dalam menelaah permasalahan yang timbul dalam kehidupan organisasi Uni Pos Sedunia.

Keanggotaan dalam Dewan Konsultatif Studi Pos, dimana Indonesia selalu terpilih sebagai anggotanya sejak kongres UPU di Ottawa tahun 1957 hingga Kongres di Rio de Janeiro tahun 1979, memikul beban tugas untuk turut serta secara aktif guna mengadakan studi-studi mengenai masalah perposan yang ditugaskan oleh Kongres dan Dewan Eksekutif UPU. Keikutsertaan Indonesia dalam studi UPU memberikan manfaat bagi administrasi pos nya maupun bagi pengembangan pengetahuan di bidang Pos Internasional.

Kongres-kongres UPU yang pernah dihadiri oleh perutusan Indonesia, sesudah berstatus sebagai Negara Republik Indonesia, yaitu Kongres Wina tahun 1964, Kongres Tokyo tahun 1969, Kongres Lausanne tahun 1974 dan baru baru ini di Rio de Janeiro tahun 1979.

Kongres-kongres UPU pada dasarnya bersifat teknis, sehingga yang menjadi materi pembahasan dititik-beratkan pada masalah teknis per-pos-an. Walaupun de-

Digitized by Google

mikian pada setiap kongres tidak dapat dihindari adanya unsur-unsur sosial politik yang disisipkan dalam materi pembahasan, khususnya dalam sidang-sidang pleno dan sidang Komisi yang membahas "general affairs".

Oleh karenanya, perutusan Indonesia ke kongres-kongres UPU selalu dibekali petunjuk-petunjuk politik oleh Pemerintah c.q. Departemen Luar Negeri.

Masalah politik yang menonjol dan menjadi perdebatan dalam sidang pleno kongres-kongres UPU, sejak Kongres Wina tahun 1964, ialah masalah Afrika Selatan yang menjalankan politik apartheid. Sasaran perdebatan bagi negara-negara yang menentang politik apartheid-nya Afrika Selatan yaitu mengusulkan dikeluarkannya Afrika Selatan dari keanggotaan UPU. Indonesia tergolong dalam kubu negara-negara yang menentang politik apartheid. Keputusan di masing-masing kongres UPU, sejak Kongres Wina 1964 sampai Kongres Lausanne 1974, setelah melalui pemungutan suara, hasilnya masih belum mencapai yang maksimal. Afrika Selatan hanya diputuskan dikeluarkan dari sidang-sidang Kongres, dan tidak dikeluarkan dari keanggotaan UPU.

Baru di Kongres UPU di Rio de Janeiro tahun 1979 Afrika Selatan karena politik apartheidnya dikeluarkan dari keanggotaan UPU.

Dalam sidang-sidang kongres UPU di Rio de Janeiro tahun 1979 tidak ada yang mengusik masalah penyatuan kembali Timor Timur, walaupun perutusan Indonesia pada sidang tersebut telah dibekali dengan petunjuk-petunjuk politik, apabila masalah Timor Timur dikemukakan.

Hal lain yang menonjol diantara beberapa Kongres UPU sejak Wina tahun 1964, ialah kejadian di Kongres UPU di Rio de Janeiro tahun 1979 dimana Indonesia mendapat kepercayaan kongres dipilih untuk bertindak selaku salah satu Ketua dari Sidang Komisi.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa Kongres UPU itu diselenggarakan dengan membentuk Komisi-komisi sebanyak 10 komisi. Selain sidang-sidang pleno, juga masing-masing komisi mengadakan sidang-sidangnya sendiri dengan diketuai oleh seorang Ketua Komisi.

Dalam kongres di Rio de Janeiro, Indonesia dipilih menjadi Ketua Komisi 8 yang menggarap materi tentang dinas-dinas keuangan (monetery articles servises). Pemilihan sebagai Ketua Komisi itu adalah yang pertama kali dialami di Indonesia sejak kongres-kongres terdahulu yang pernah diikutinya. Perutusan Indonesia mempercayakan tugas untuk bertindak selaku ketua Komisi 8 itu kepada Drs. Dradjat Soepaat, Bc.A.P. Kepala Sub Direktorat Konvensi dan Peraturan Perundangan Pos/ Giro pada Ditjen Postel, yang dalam menjalankan tugasnya selaku ketua komisi didampingi oleh Sdr. H.E. Kanter, seorang anggota perutusan Indonesia.

Sidang Komisi 8 yang diketuai oleh Indonesia telah berlangsung dengan lancar dan memperoleh sukses.

Kongres UPU setelah dilangsungkan membuahkan Akta-Akta UPU yang terdiri dari Akta organik, Konvensi dan 8 Persetujuan. Akta UPU yang bersifat sebagai Perjanjian Internasional mengandung persyaratan bahwa harus diratifikasi oleh masing-masing negara anggotanya menurut peraturan perundangan yang berlaku di negara masing-masing.

Digitized by Google

Indonesia telah meratifikasi Akta-Akta UPU:

1) Akta Wina 1963 dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1969 tanggal 25 Oktober 1969 (LN 1969 No. 53).
2) Akta Tokyo 1969 dengan Keppres No. 21 tahun 1974 tanggal 10 April 1974 (LN 1974 No. 21).
3) Akta Lausanne 1974 dengan Keppres No. 24 tahun 1977 tanggal 4 April 1977 (LN 1977 No. 30).

Biro Internasional UPU yang berkedudukan di Bern Swiss terdiri dari Direktur Jenderal Biro Internasional UPU dengan seorang Deputy dan 2 orang Asisten Direktur Jenderal beserta stafnya. Staf yang bekerja di Biro Internasional UPU terdiri dari G(eneral) Staffs yang tenaga-tenaganya diambil dari orang Swiss lokal dan P(rofessional) Staffs yang calon-calonnya diambil dari beberapa negara anggota UPU yang berminat. Indonesia pernah mengajukan calonnya untuk mengisi lowongan jabatan yang termasuk kategori P dan diterima, yaitu A.M. Hardigaluh, ex Direktur Perlengkapan dan Pembangunan PN Pos dan Giro, yang bekerja dilingkungan Biro Internasional UPU sejak tahun 1968.

Kini Sdr. A.M. Hardigaluh menduduki jabatan P-5 (Counselor).

b. Asian Oceanic Postal Union (AOPU)

Sebagaimana dimungkinkan oleh Konstitusi UPU (Akta Organik) pasal 8, negara-negara anggota UPU di kawasan Asia dan Oceania sejak tahun 1965 telah membentuk Uni Pos Terbatas yang diberi nama ASIAN OCEANIC POSTAL UNION disingkat AOPU. Indonesia telah masuk menjadi anggota AOPU sejak 12 Nopember 1970 yaitu setelah disahkan keanggotaannya oleh kongres AOPU ke-II yang dilangsungkan di Tokyo Jepang dari tanggal 5 - 17 Nopember 1970. Sebelum mengajukan pencalonan untuk menjadi anggota. Indonesia terlebih dahulu diundang sebagai peninjau pada sidang Dewan Eksekutip AOPU tahun 1968 dan tahun 1969.

Azas dan tujuan pembentukan AOPU (Uni Pos Terbatas) tidak berbeda dengan azas dan tujuan pembentukan UPU yaitu untuk mewujudkan suatu wilayah Pos Tunggal di Dunia di mana ada kebebasan untuk mengirim kirimanpos (Freedom of transit) disamping untuk menggalang kerjasama guna menjamin dan mengembangkan dinas pelayanan pos internasional.

Uni Pos Terbatas dalam mengadakan peraturan untuk pelayanan pos di dalam wilayahnya tidak boleh membuat ketentuan yang mutu manfaatnya lebih rendah tingkatnya dari pada manfaat yang dapat diperoleh dari ketentuan yang telah dibuat oleh UPU, bagi masyarakat.

Indonesia masuk menjadi anggota AOPU sebagai anggota yang ke-9 dan kemudian menyusul keanggotaan India, Pakistan, Malaysia, Bangladesh dan Srilangka.

Sekarang keanggotaannya 15, dimana satu negara disebabkan situasi dalam negerinya tidak aktif dalam kegiatan AOPU tahun-tahun belakangan ini, yaitu Laos.

Bentuk kerjasama AOPU yang terwujud dimana Indonesia turut terlibat di dalamnya, yaitu dapat dilanjutkannya proyek ASIAN OCEANIC POSTAL TRAINING

Digitized by Google

SCHOOL disingkat AOPTS, yaitu suatu pusat pendidikan/latihan yang dibiayai oleh dana UNDP sampai bulan Maret 1977. Berhubung keadaan keuangan UNDP yang memburuk sekitar tahun 1976 maka bantuan dana keuangan bagi AOPTS phase ke-III tidak dapat dilanjutkan lagi. Dengan demikian terhitung mulai 1 April 1977, yaitu permulaan phase ke-III, pembiayaan AOPTS dipikul bersama oleh negara pendukung yang terdiri dari 4 negara anggota AOPU, masing-masing: Thailand, Korea Selatan, Philipina dan Indonesia. Beban biaya yang dipikul oleh negara-negara pendukung (participating countries) itu perimbangannya didasarkan pada banyaknya jumlah siswa yang direncanakan dikirim mengikuti pendidikan/latihan pada AOPTS tersebut. Adalah suatu manifestasi kerjasama yang baik, bahwa diantara negara-negara yang tergolong maju dan menjadi anggota AOPU memberikan donasi tetapnya kepada AOPTS, berupa tunjangan fellowships yang dialokasikan kepada AOPTS guna dapat menerima siswa-siswa (trainees) dikalangan negara-negara donor ialah Australia, Jepang dan Selandia Baru.

Kerjasama lainnya yang telah berjalan ialah tentang pertukaran pejabat (Personnel Exchange Program) sejak tahun 1976 antara Indonesia dengan Thailand, Philipina, Korea Selatan, Malaysia dan Jepang.

Pertukaran Pejabat itu dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada pejabat yang saling berkunjung guna bertukar pengalaman serta mengadakan diskusi tentang beberapa aspek dalam per-posan yang menarik bagi masing-masing negara peserta. Pembiayaan bagi perjalanan pejabat ditanggung oleh negara pengirim, sedangkan uang harian bagi pejabat selama tinggal sebagai tamu dibayar oleh negara penerima, menurut batas-batas yang telah di sepakati bersama (bilateral). Program itu ternyata memberikan beberapa kemanfaatan, karena pejabat yang telah dipertukarkan dapat memperoleh cakrawala tentang kehidupan per-posan yang lebih luas dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pekerjaan maupun untuk pribadi pejabat yang bersangkutan.

Manfaat lain yang telah terwujud di kalangan AOPU ialah dapat menciptakan forum yang lebih akrab, yang diikat oleh kepentingan regional, sehingga dalam menghadapi masalah dalam lingkup UPU dapat saling memberikan pandangan untuk menunjang satu kepada yang lain. Misalnya dalam menghadapi Kongres UPU di Rio de Janeiro negara-negara anggota AOPU dapat membahas usul-usul yang diajukan kepada kongres bersama-sama dengan menentukan sikapnya lebih terbantu.

Dirasakan sekarang ini yang masih merupakan sasaran guna diperjuangkan oleh Negara-negara AOPU, termasuk Indonesia, ialah belum tegasnya batas geografis antara zona Asia Selatan dan Oceania dan daerah Asia lainnya serta penentuan keanggotaan UPU pada Uni Pos Terbatas yang mantap dan tidak dualistis, sehingga akan dapat menjadi faktor penunjang dalam kelancaran melaksanakan kerjasama teknik regional dan Internasional.

Digitized by Google

c. ASEAN

Dalam rangka kerjasama ASSOSIASI NEGARA NEGARA ASIA TENGGARA (ASEAN), maka untuk bidang Pos dan Telekomunikasi dibentuk suatu Sub Komite Postal dibawah lingkungan Komite Transport & Komunikasi, yang dikalangan ASEAN dikenal dengan nama Sub Committee on Posts and Telecommunication.

Pertemuan sidang Sub Komite Postel yang pertama diadakan di Yogyakarta bulan April tahun 1977, pertemuan sidang kedua diadakan di Kualalumpur Malaysia bulan Januari tahun 1978.

Pertemuan Sub Komite ketiga diadakan di Manila dalam bulan Desember 1979 dan pertemuan keempat diadakan di Singapura bulan Maret tahun 1980.

Dalam pertemuan sidang Sub Komite Postel, dibentuk masing-masing kelompok Pos dan Tel. Sidang Sub Komite pertama, Indonesia sebagai tuan rumah dan sidang-sidangnya diselenggarakan di Ambarukmo Palace Hotel Yogyakarta. Materi pembahasan dalam Sub Komite Postel kelompok Pos ialah masalah-masalah yang bertalian dengan kelancaran perhubungan pos antar negara ASEAN, mengembangkan dinas dinas keuangan seperti pertukaran kiriman uang melalui weselpos, dan mencari jalan kearah peningkatan penggunaan alat angkutan udara bagi pengiriman pos.



Rapat Sub/Komite ke I Pos dan Telekomunikasi ASEAN di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 April 1977.

Digitized by Google

Dalam sidang Sub Komite Postel yang pertama Indonesia mengusulkan diadakannya sayembara mengarang surat bagi para remaja dengan judul karangan yang dapat mempopulerkan identitas ASEAN dikalangan kaum remaja. Gagasan itu dikemukakan oleh Indonesia dengan mempertimbangkan bahwa kaum remaja sebagai penerus cita-cita generasi pencetus Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara perlu diberi saluran untuk mengembangkan citra mereka mengenai ASEAN.

Penggalangan kerja-sama dikalangan negara-negara ASEAN sebagai negara yang bertetangga dekat dimana terdapat kepentingan bersama yang saling berkaitan, dalam aspek postal dilihat pula kemungkinannya untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan serta tidak perlu mengurangi kesempatan dapat melakukan kerjasama dalam lingkup Uni Pos Terbatas AOPU yang sudah ada bahkan diharapkan untuk saling bersifat menunjang dalam mengembangkan per-posan di kawasan Asia Selatan dan Oceania.

d. Indonesia-Pakistan Economic and Cultural Cooperation Commission (IPECC).

Kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia - Pemerintah Pakistan dalam bidang ekonomi dan kebudayaan yang semula berbentuk dalam "Indonesia - Pakistan Economic & Cultural Cooperation Organization" yang mempunyai Sekretariat, kemudian disederhanakan bentuknya menjadi "Indonesia - Pakistan Economic & Cultural Commission", sejak tanggal 1 Juni 1973.

Pada sidang Dewan Ekonomi IPECC ke VI bulan Mei 1972 di Islamabad baru pertama kalinya ada dikemukakan mengenai masalah per-posan, yaitu usulan dari fihak Pakistan untuk menerapkan tarip reduksi terhadap kiriman pos laut dan terhadap kiriman pos udara. Pihak administrasi pos Indonesia kurang sependapat mengenai usul itu, karena dipandang merugikan bagi Indonesia. Indonesia mengemukakan keberatannya dengan argumentasi bahwa sesama anggota UPU dalam masalah pertaripan supaya memegang pada ketentuan yang diatur dalam Akta UPU.

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB III
OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB III
OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI

Digitized by Google

Digitized by Google

bab III

OPERASIONAL DAN PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI

1. Kegiatan Di Bidang Pembangunan

a. Umum

Dalam kurun waktu antara tanggal 11 -3-1966 s/d 31-12-1980 peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang menonjol dan mempunyai nilai sejarah di bidang telekomunikasi ialah perkembangan operasi dan pembangunan. Kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam tenggang waktu ini bidang operasi dan pembangunan sangat jauh melompat ke depan. Setelah lahirnya Orde Baru titik berat program Pemerintah adalah bidang ekonomi dan pembangunan. Sebetulnya sebelum periode inipun pembangunan bidang telekomunikasi juga sudah ada, hanya karena keadaan perekonomian negara yang tidak begitu baik, tidak adanya kepastian dana, rencana pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target.

Pembangunan dibidang Telekomunikasi dalam masa Orde Baru sebelum Pelita I, dilanjutkan dengan pembangunan KTO-KTO baru, perluasan sentral-sentral otomat yang telah ada dan dimulainya pembangunan sambungan langsung jarak jauh dengan sistem Gelombang mikro dengan gambaran pembiayaan setiap tahunnya sebagai berikut:

Tahun	Otorisasi**)	Realisasi
1966	Rp. 22.500.00,-	Rp. 17.048.038,55
1967	Rp. 78.920.909,85	Rp. 77.893.129,51

*) *Daftar banyaknya Sentral Telepon, kapasitas Pos-Pos Telepon dan Gedung Kantor Telepon di Indonesia (31-12-1977).*

**) *Memorie Serah Terima Ditpemtel (2-2-1970).*

Digitized by Google

	Rp. 56.430.175,61 (L/N)	Rp. 56.430.175,61 L/N
1968	Rp. 142.188.284,54	Rp. 140.724.575,70
	Rp. 178.488.000,-- (L/N)	Rp. 178.488.000,-- L/N
V/1968	Rp. 30.481.887,18	Rp. 29.197.543,68
JUMLAH :	Rp. 274.091.081,57	Rp. 264.863.287,44
	Rp. 234.918.175,61 (L/N)	Rp. 234.918.175,61 L/N

Untuk menanggulangi pembiayaan proyek-proyek Telekomunikasi dalam kurun waktu 1966/1967 sementara otorisasi belum cair telah diusahakan pula dengan mencari kredit dari pihak ketiga di daerah yang bersangkutan antara lain dari:
- Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan,
- Bank Pembangunan Indonesia Cabang Padang,
- Korem 081 Madiun,
- Obligasi Madiun,
- Pemerintah Daerah Jambi,

yang jumlahnya ± Rp. 17.320.000,- untuk penanggulangan sementara akan kebutuhan dana. Semua kredit telah dilunasi kembali oleh PN TEL dalam tahun 1967 juga.

Bantuan (bukan kredit) telah diperoleh dari Pemerintah Daerah Maluku sejak tahun 1966 s/d 1969 sejumlah Rp.1.600.000,-.

Kegiatan lain adalah membantu pihak lain dalam memenuhi kebutuhan akan sarana telekomunikasi antara lain bantuan untuk ALRI di Jakarta, MPR/DPR dan komando Perairan Jatiluhur (Kopairjat).

Hasil pembangunan selama beberapa tahun itu adalah sebagai berikut:

Tahun	Kegiatan	Kapasitas (dalam L.U.)	Keterangan (mulai dipakai)
1966	1. Perluasan		
	Jakarta Kota	2.000	31-7-1966
	Gambir	2.000	30-7-1966
	Kebayoran Baru	1.000	31-7-1966
	2. Sentral Otomat		
	Palembang	4.000	27-8-1966
1967	Sentral Otomat		
	Bukittinggi	1.000	7-10-1967
	Madiun	2.000	26-11-1967
	Bandung Sentrum	6.000	27-5-1967

Digitized by Google

1968	Sentral Otomat		
	1. Amboina	1.600	April 1968
	2. Semanggi	2.000	20-6-1968
	3. Jatinegara	2.000	24-7-1968
Tri V	Sentral Otomat		
1968	Bandung Utara	2.000	20-3-1969
	JUMLAH:	25.600	

Dengan tambahan diatas, maka ketika mulai memasuki Pelita I jumlah kapasitas telepon di Indonesia telah ada 71.800 L U., yaitu 46.200 L U menurut keadaan pada akhir tahun 1965 ditambah 25.600 L U hasil sejak awal tahun 1966 s/d 31 Maret 1969. Meskipun jumlah tersebut masih relatif rendah, namun penambahan potensi itu tidak dapat diabaikan begitu saja untuk pembangunan berikutnya.
Hasil lainnya pada periode diatas adalah:
Tahun 1967 Microwave Jakarta - Bandung
Tahun 1968
1. Rehabilitasi Gedung Kawitel-IX Banjarbaru.
2. Saluran Transmisi Medan - Tebingtinggi.
3. Saluran Transmisi Palembang - Jambi.
4. MSC/A2 Jakarta.

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang telepon, transmisi dan telegrap telex sebelum Pelita, dapat diketengahkan karyawan-karyawan yang dengan tekun dan gigih telah mencurahkan tenaga dan pikirannya sesuai dengan bidangnya masing-masing antara lain:
- Soetarko .....Bidang Sentral,
- H. Nirman Alm. .....Bidang Power Supply,
- Kayatmo .....Bidang Power Supply,
- Suwoko .....Bidang Radio,
- Firman Hadi Soebroto Bc.TT. .....Bidang Radio,
- J. Wahyu .....Bidang Telegrap,
- Sentot Kusnadi Bc.TT .....Bidang Microwave, dan
- Alex Iskandar .....Bidang Kabel.

Pelaksanaan pekerjaan sipil diawasi oleh Ir. Imam Santoso beserta staf dalam menunjang penyelesaian proyek-proyek Telekomunikasi.
Begitu pula dalam bidang perencanaan kita tidak dapat melupakan nama-nama:
Soemardi Bc.TT, Poernomo Bc.TT, Soerachman Pandoe Soeradhiningrat Bc.TT, A. Syarif Kartaatmadja Bc.TT, RI Sumardi Bc. TT, Ir. Kristanto Rachman dan P. Martono Bc.TT.

Digitized by Google

Tenaga pimpinan pada waktu itu antara lain:
Sabar Soediman, Ir. S. Abdurachman, Ir. Willy Moenandir Mangoendiprodjo, Ir. Theo Suryaman, Ir. Boedi Santoso, Ir. Suhana Subiadisastra, Ir. M. Yunus, Ir. G. Bahder Djohan, Ir. Rollin, R.R. Suwandi Kartoatmodjo Bc.TT dan R. Wikanto Bc.TT.

Pimpinan dalam bidang keuangan dan Administrasi terdiri dari:
Soewardi alm., R.M. A. Soeria Negara dan Drs. Made Martasedana.

Penyelesaian proyek-proyek yang dimaksud diatas didukung kontrak-kontrak penyerahan dan instalasi peralatan L/N, antara lain:

1) STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG:
NINE YEARS TELECOMMUNICATION CONTRACT (April 1964)

2) SIEMENS:
- a.1. East Jawa Project (27-2-1956)
- a.2. Contract for delivery and installation of the equipment for the extension of the automatic telephone network in Jakarta Raya, Jawa and Nusatenggara (6-8-1964)
- b. Fully and semi automatic torn Tape Message Switching Centre A2 for Jakarta Gambir with electronic controle and cross office storages with 51 incoming and 51 outgoing lines (19-7-1965).

3) ERICSSON
Seven Telephone Stations for Sumatra (25-5-1959).

4) A.E.I. (Associated Electrical Industries International Ltd)
"Underground Telephone Cable, Overhead Telephone Cable, P.V.C. Cable and Wire" (1961).

5) SUMITOMO
Contract Microwave Network Jawa & Bali (Jakarta - Bandung).

Dalam tahun 1966 sampai dengan menjelang Pelita I pengelolaan Proyek Telekomunikasi serta koordinasinya mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaannya diatur oleh Direktur Pembangunan Telekomunikasi (Dirpemtel). Bagan organisasi Ditpemtel tercantum pada Lampiran 10 dan 11.

Dalam Investment-Planning diadakan konsultasi dengan ATM yang dipimpin oleh Mr. G.E. Hams secara intensip yang dalam beberapa hal telah menghasilkan modifikasi-modifikasi dalam planning investasi, demi efficiency investasi itu.

Sistem-Planning bidang Telepon dan Transmisi yang dilakukan oleh Direktorat Pembangunan telah mencatat kemajuan-kemajuan dalam tahun-tahun yang lalu yaitu karena disamping adanya bantuan-bantuan dan pertimbangan-pertimbangan

Digitized by Google

dari Missi Telekomunikasi Australia, juga disebabkan usaha-usaha yang sistimatis untuk menangani sistem-sistem perencanaan ini.

Dalam rangka penanaman modal asing sesuai dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967, di bidang telekomunikasi muncul suatu bentuk penanaman modal yaitu pembangunan stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi internasional, melalui satelit komunikasi Intelsat. Realisasi dari ini adalah dengan ditanda-tanganinya Perjanjian antara Pemerintah RI dengan ITT tanggal 9 Juni 1967. Stasiun Bumi yang dibangun di Jatiluhur diresmikan dan mulai beroperasi sejak tanggal 27 September 1969. Peresmiannya dilakukan sendiri oleh Presiden RI Soeharto. Mulai saat itu, hubungan internasional dari Indonesia, sebahagian besar dilewatkan satelit Intelsat yang merupakan babak baru bagi Indonesia di bidang telekomunikasi.

Baiknya hubungan telekomunikasi internasional mendorong perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan hal ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi penanaman modal di Indonesia.

Untuk hubungan dalam negeri, dimulai pembangunan sistim gelombang mikro untuk dapatnya digunakan hubungan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) Tahap pertama dari rencana gelombang mikro Jawa-Bali, pada tahun 1968 telah diselesaikan hubungan antara Jakarta Bandung. Sistim gelombang mikro yang mempunyai mutu teknis jauh lebih tinggi dari mutu sistim transmisi lainnya, yang dimiliki Perumtel waktu itu, juga merupakan tonggak sejarah baru di bidang telekomunikasi di Indonesia.

Proyek gelombang mikro Jawa-Bali ini diresmikan tanggal 10 Maret 1973 oleh Presiden RI Soeharto.

Jaringan gelombang mikro Jawa-Bali adalah merupakan bahagian dari jaringan gelombang mikro Nusantara yang meliputi: jaringan gelombang mikro Jawa-Bali sendiri, gelombang mikro trans Sumatra, Jaringan gelombang mikro Indonesia bahagian Timur, dan jaringan hambur tropo Surabaya-Banjarmasin.

Dalam periode Repelita II Perumtel, pembangunan bidang telekomunikasi dilaksanakan secara besar-besaran. Proyek besar ini meliputi bidang telepon, telegrap/telex, jaringan kabel, Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD), jaringan lintas simpang (spur route), jaringan ekor (tail link) dan lain-lain. Keseluruhan proyek ini kemudian dikenal dengan nama Proyek Telekomunikasi Nusantara.

SKSD Palapa yang telah mulai beroperasi sejak 16 Agustus 1976, selain digunakan untuk keperluan telekomunikasi domestik, dapat juga digunakan untuk keperluan telekomunikasi domestik negara-negara ASEAN, mengingat kapasitas transponder yang memungkinkan. Di samping itu satelit Palapa juga direncanakan untuk digunakan sebagai satelit regional ASEAN yaitu untuk hubungan lintas batas. Tiga negara ASEAN telah menanda tangani perjanjian penyewaan kapasitas transponder satelit Palapa yaitu Philippina, Malaysia dan terakhir Thailand. Selain itu dalam rangka kerja sama ASEAN di bidang telekomunikasi, telah disepakati proyek Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) ASEAN yang menghubungkan kelima negara ASEAN. Antara Indonesia dan Singapore, dibangun SKKL ASEAN I-S (Indonesia-

Digitized by Google



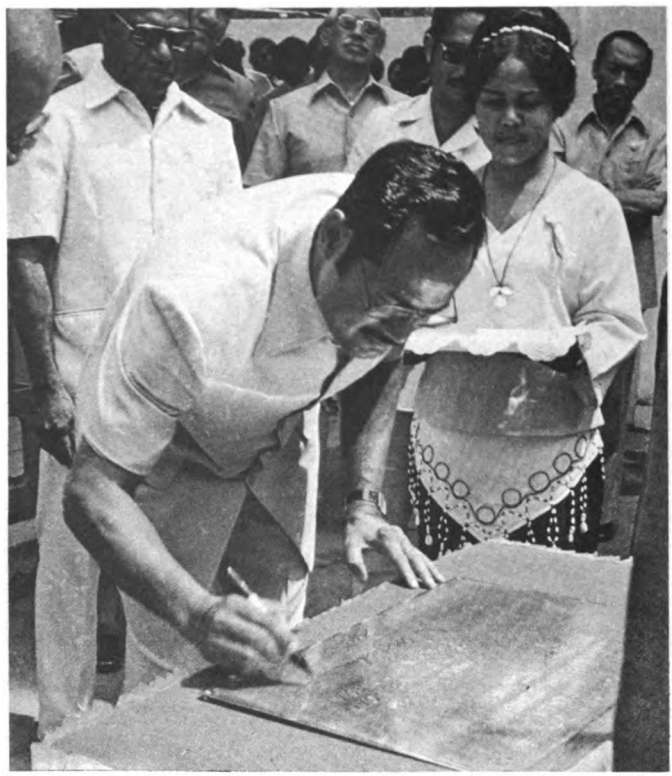
Jambi, 27 September 1968.
Setelah meresmikan hubungan telepon interlokal Jambi-Palembang, Presiden Soeharto selanjutnya meninjau panel-panel mengenai situasi jaringan telekomunikasi di Propinsi Jambi. Dari kiri kekanan Suwandi Kertoatmodjo Bc.T.T. (Kabag Konstruksi PN Telekomunikasi), Prof. Dr. Widjojo Nitisastro (Ketua Bappenas), Ir. Willy Moenandir M (Kdtel IV), Presiden Soeharto dan Menpen Boediardjo.

Digitized by Google



Mataram, 23 Juli 1979.
Peresmian Sentral Telepon Otomat Mataram oleh Dirjen Postel Drs. Suryadi mewakili Menteri Perhubungan RI. Gubernur NTB Gatot Suherman sedang mengadakan pembicaraan telepon lokal.

Digitized by Google



Jayapura, 6 Mei 1980.
Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin sedang menanda tangani prasasti pada peresmian STO Jayapura Irian Jaya.

Digitized by Google

Singapore), yang pembangunannya dimulai tahun 1978.

Pembangunan yang begitu besar dan luas lingkupnya selama periode 1966 sampai dengan tahun 1979, jelas sangat mempengaruhi kegiatan operasi Perumtel. Dengan makin bertambahnya kota-kota di seluruh Indonesia yang dapat melakukan hubungan dengan fasilitas SLJJ, berakibat meningkatnya operasi Perumtel yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan Perumtel. Selesainya pembangunan Proyek Telekomunikasi Nusantara, makin mendekatkan cita-cita menciptakan suatu Sistem Telekomunikasi Nasional yang terpadu, cepat, murah dan dapat diandalkan yang akan merupakan sumbangan nyata untuk mewujudkan Wawasan Nusantara.

b. Pembangunan Stasiun Bumi Jatiluhur.

Setelah pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965 dapat digagalkan, program Pemerintah Orde Baru yang terutama adalah menciptakan stabilitas Nasional, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik, untuk selanjutnya dilakukan serangkaian Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terus, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana, sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi kemerdekaan serta mencapai tujuan Nasional.

Pada tahun-tahun permulaan lahirnya Orde Baru, keadaan perekonomian Indonesia begitu buruknya. Indonesia yang kekurangan modal tidak dapat mengolah sumber alam, kekayaannya yang begitu besar. Kebijaksanaan politik pada masa Orde Lama, yang mengarah ke suatu kekuatan saja, menyebabkan Indonesia menjadi seolah-olah tertutup untuk penanaman modal asing.

Pembangunan Nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap.

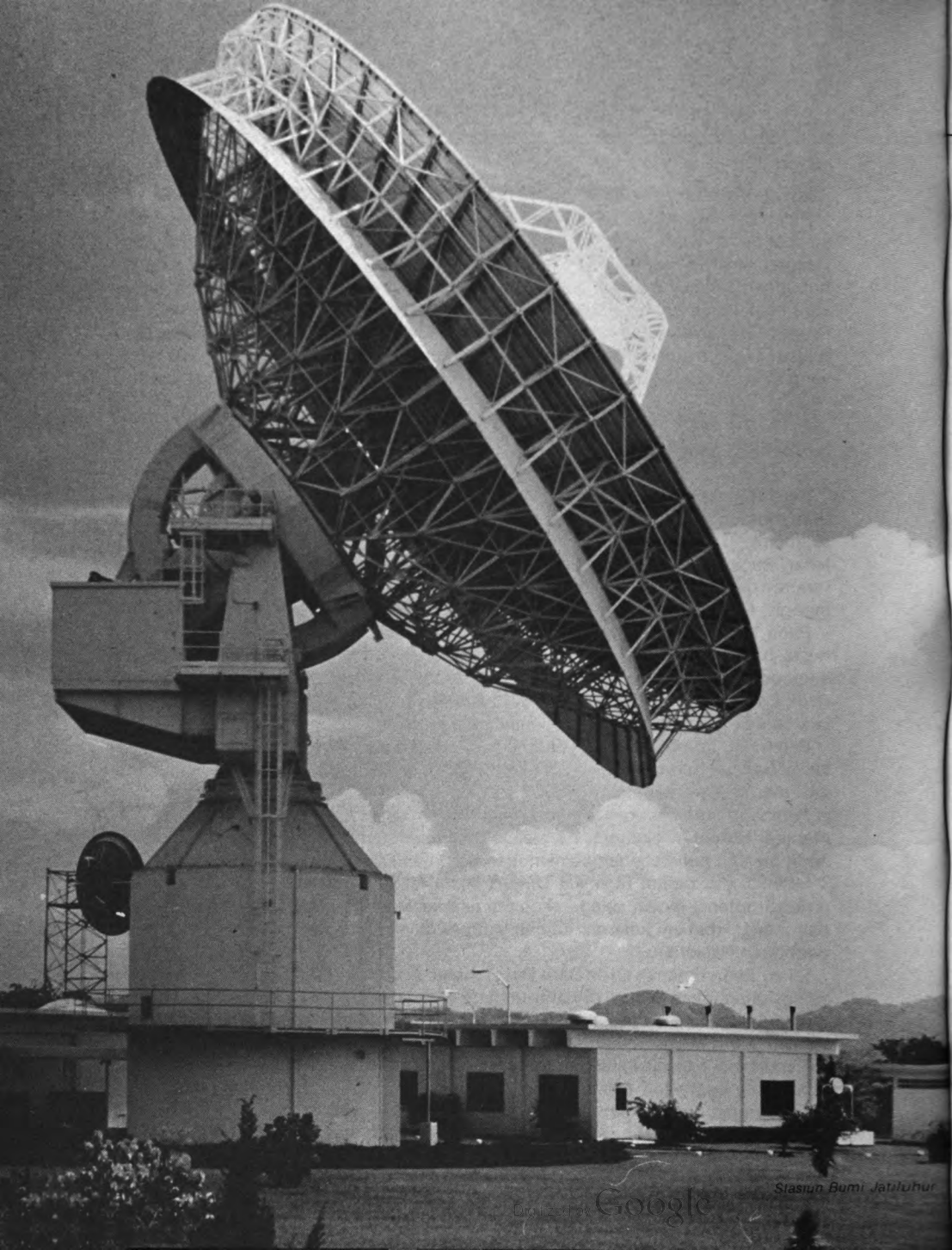
Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial, menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Selama kita belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri, sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan Nasional.

Sikap Pemerintahan Orde Baru yang "membuka pintu" bagi para penanam modal asing, dituangkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya keengganan para perusahaan asing menanamkan modalnya di Indonesia, adalah buruknya hubungan telekomunikasi internasional dari Indonesia. Padahal kelancaran hubungan ini sangat diperlukan bagi yang bersangkutan, agar secara kontinyu dan setiap waktu dapat berhubungan dengan kantor pusatnya di negara asalnya.

Pada tahun-tahun permulaan Orde Baru hubungan telekomunikasi internasional, dilakukan melalui media transmisi HF dan VHF yang tidak bisa bekerja penuh 24 jam sehari. Selain itu hubungan dengan HF/VHF ini hanya terbatas dengan bebe-

Digitized by Google



Stasiun Bumi Jatiluhur

Digitized by Google



Diantara yang hadir dalam peresmian tampak Ibu Tien, Ny. Frans Seda dan tampak sebelah kanan berdiri Dir Postel Soehardjono.



Jatiluhur, 27 September 1969.
Presiden Soeharto dan Dirjen Postel Soehardjono sedang mengamati Lukisan Stasiun Bumi Jatiluhur yang diterima sebagai kenang-kenangan pada peresmian tersebut.

Digitized by Google



Jatiluhur, 27 September 1969.
Presiden Soeharto sedang mengadakan pembicaraan telepon internasional dengan Dubes RI di Washington DC (gambar atas).

Digitized by Google

rapa kota seperti Shanghai, Bern, Amsterdam, California, Calcuta, dan Moskow. Pada waktu itu dunia telah mengenal sistem telekomunikasi melalui satelit komunikasi. Beberapa negara telah menggunakan sistem ini dengan lahirnya Intelsat pada tanggal 20 Agustus 1964. Intelsat (International Telecommunication Satellite Organization) adalah semacam konsorsium, yang beranggotakan negara-negara yang menggunakan fasilitas satelit untuk telekomunikasi.

Sistem satelit adalah merupakan teknologi di bidang telekomunikasi yang mutakhir, yang mempunyai kemampuan tinggi, memiliki kapasitas besar, dapat beroperasi secara terus menerus 24 jam sehari. Salah satu ketentuan dari International Telecommunication Union (ITU) menetapkan bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan yang merugikan (harmful interferance), setiap penyelenggara telekomunikasi diharuskan menggunakan peralatan yang bermutu tinggi. Ketentuan ini telah dianut oleh hampir sebagian besar negara-negara. Pada awal tahun 1967 timbullah ide dari pimpinan Direktorat Jenderal Postel, untuk menggunakan sistem komunikasi satelit Intelsat, untuk hubungan internasional. Keadaan perekonomian Nasional pada waktu itu sangat menyedihkan. P.N. Telekomunikasi yang baru saja berdiri sebagai suatu Badan Usaha Negara, dari segi keuangan tidak mampu untuk membiayai rencana pembangunan suatu stasiun bumi. Di samping terbatasnya kemampuan finansiil, juga kemampuan di bidang personalia dan pengelolaan. Karena sistem ini merupakan suatu sistem yang sama sekali baru bagi P.N. Telekomunikasi.

Ide ini dilaporkan kepada Pemerintah, dan setelah dibahas dalam beberapa kali Sidang Kabinet, Presiden RI menyetujui rencana pembangunan stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi internasional melalui satelit Intelsat. Tawaran dari luar negeri datang dari International Telephone and Telegraph Corporation dari Amerika Serikat (ITT).

Setelah melalui perundingan yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Postel pada pertengahan tahun 1967, disepakati prinsip-prinsip dari Perjanjian antara RI dengan pihak ITT. Hasil-hasil, perundingan ini disampaikan kepada Pemerintah, dan dibahas lagi dalam beberapa kali Sidang Kabinet. Akhirnya Pemerintah dapat menyetujuinya.

Tanggal 9 Juni 1967, ditanda tangani suatu Perjanjian antara Pemerintah RI (yang diwakili oleh Menteri Perhubungan) dengan ITT, mengenai Pembangunan dan Operasi Fasilitas Satelit Komunikasi (The Construction and Operation of Satellite Communications Facilities). Pokok-pokok isi Perjanjian RI-ITT 1967 tersebut adalah, ITT akan membangun suatu Stasiun Bumi yang dapat bekerja dengan sistem satelit Intelsat, untuk menampung hubungan internasional. Setelah Stasiun Bumi selesai dibangun, pemilikannya diserahkan kepada Pemerintah RI dan kemudian Pemerintah RI menyewakan kembali kepada ITT selama 20 tahun. Untuk itu pihak ITT akan membayar uang sewa sebesar 50% dari net profit setiap tahunnya kepada Pemerintah, dengan imbalan ITT dibebaskan dari semua pajak selama mengelola dan mengoperasikan stasiun bumi tersebut. Langkah selanjutnya dimulai dengan survey lapangan, untuk mencari lokasi yang tepat. Dalam survey ini ikut serta para teknisi Perumtel (P N Telekomunikasi). Dari perhitungan-perhitungan teknis, pilihan lokasi jatuh di Jatiluhur. Selanjutnya dimulai tahap pembangunannya, di mana

Digitized by Google

teknisi kita ikut memberikan andilnya.

Seluruh pembangunan stasiun bumi tersebut dapat diselesaikan pada bulan September 1969. Pada tanggal 29-9-1969 ditanda tangani dua Perjanjian antara Pemerintah RI dan ITT, yaitu Perjanjian Penyerahan (Conveyance Agreement) dan Perjanjian Penyewaan (Lease Agreement) masing-masing oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Postel di pihak yang mewakili Pemerintah RI.

Peresmian penggunaan Stasiun Bumi ini, dilakukan oleh Presiden RI pada tanggal 27 September 1969. Sejak tanggal 29 September 1969, Stasiun Bumi Jatiluhur menjadi milik Pemerintah, dan pengoperasiannya selama 20 tahun dilakukan oleh ITT (sampai dengan 29 September 1989).

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, untuk menjalankan usahanya di Indonesia ITT mendirikan suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan Akta Notaris Mohamad Said Tadjoedin No. 55 tanggal 10 Nopember 1968 didirikan P T Indonesian Satellite Corporation (P T Indonsat). Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusannya No.J.A.5/88/24 tanggal 20 Nopember 1968, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor. Pengadilan Jakarta di bawah No.2037 tanggal 25 Nopember 1968 (dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I. No. 26 tahun 1968). Sesuai dengan Perjanjian RI - ITT 1967, P T Indosat diurus oleh suatu Direksi (Board of Directors) yang beranggotakan 7 orang dan terdiri dari seorang Chairman, seorang Managing Director dan lima orang Direktur yang lain. Chairman dan dua orang Direktur lainnya ditunjuk oleh ITT dan lalu diangkat oleh rapat pemegang saham. Pada rapat umum luar biasa pemegang saham P T Indosat yang diadakan tanggal 9 Mei 1968 di Jakarta, dan dimasukkan dalam Berita Acara Akta Notaris Mohamad Said Tadjuddin No.56, untuk pertama kali diangkat Direktur Jenderal Postel Soehardjono sebagai Chairman (of the Boar of Directors). Direktur Keuangan P N Telekomunikasi R Moechamad Asari Soeria Negara, dan Direktur Operasi dan Teknik P N Telekomunikasi Ir. J. Sutanggar Tengker, kedua-duanya sebagai Direktur.

ITT dalam mendirikan Badan Hukum ini diwakili oleh perseroan anaknya (subsidiary) yaitu American Cable & Radio Corporation yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Bagian Deleware Amerika Serikat berkedudukan di New York.

Sejak beroperasinya Stasiun Bumi Jatiluhur tersebut (tanggal 29 September 1969) hubungan telepon dan telegrap internasional dilewatkan satelit Intelsat melalui Stasiun Bumi Jatiluhur. Sesuai dengan perjanjian tahun 1967 tersebut, Pemerintah akan menerima 50% dari net profit setiap tahunnya. Net profit adalah gross revenue dikurangi expenses seperti general and administrative, spare parts, salaries, space segment charges, amortization, interest on debt, AID fees dan pengeluaran lainnya. Dengan pembayaran uang sewa 50% tersebut kepada Pemerintah, P T Indosat berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1971 dianggap telah melunasi pajak-pajak setiap tahunnya yang meliputi: pajak perseroan, pajak atas bunga/ dividen/dan royalty, Bea balik nama Kendaraan Bermotor, Ipeda, Pajak-pajak daerah lainnya.

Setelah beroperasinya S B Jatiluhur hubungan telekomunikasi internasional se-

Digitized by Google

jak tahun 1969 mengalami kenaikan yang drastis, seperti yang tercantum pada kenaikan lalu lintas Telepon Internasional di bawah ini.

TAHUN	JUMLAH PERCAKAPAN	MENIT
1969	53.412	319.585
1970	145.932	1.057.196
1971	143.908	965.162
1972	208.796	1.364.882
1973	257.778	1.919.143
1974	331.133	2.302.055
1975	346.178	3.075.831
1976	545.664	4.294.478

Bila dibandingkan data tahun 1975 dengan tahun 1976, percakapan melalui satelit mengalami kenaikan 57,62% dan jumlah menit naik 39,62%.

Di bidang hubungan telex luar negeri juga mengalami kenaikan yang besar sejak tahun 1969, yakni sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Percakapan	Menit
1969	25.733	256.776
1970	68.259	256.776
1971	124.827	647.520
1972	185.650	920.588
1973	276.408	1.403.250
1974	467.591	2.804.088

Dari angka-angka tersebut jelas bahwa lalu lintas telekomunikasi internasional naik pesat setelah digunakannya satelit Intelsat melalui Stasiun Bumi Jatiluhur. Dan lalu lintas telekomunikasi internasional ini, sejak beroperasinya Stasiun Bumi Jatiluhur, hampir 95% melalui satelit, sisanya masih melewati transmisi HF ataupun VHF.

Perbandingan ini, dari tahun ke tahun terus menuju ke pemakaian media satelit. Hubungan telekomunikasi internasional melalui satelit ini, tidak akan pernah terjadi, kalau tidak menggunakan fasilitas telekomunikasi milik Perumtel, antara lain 150 di Gambir. Dan yang jelas langganan telepon dan telex adalah langganan dari Perumtel bukan P T Indosat. Tetapi sesuai dengan Perjanjian tahun 1967, Perumtel tidak mendapatkan bahagian apa-apa dari hasil lalu lintas telekomunikasi internasional ini. Melihat keadaan yang timpang ini, dan lalu lintas telekomunikasi internasional melalui satelit, yang meningkat terus menerus, membuat pimpinan Perumtel mulai berfikir perlunya keadaan ini diperbaiki.

Mulai tahun 1972/1973 pimpinan Direktorat Jenderal Postel dan Perumtel mulai

Digitized by Google

mengadakan perundingan dengan pihak ITT/P T Indosat, guna membicarakan keadaan yang tidak menguntungkan ini. Perundingan yang memakan waktu lama, akhirnya menghasilkan suatu Perjanjian antara Perumtel dengan P T Indosat tanggal 28 Mei 1974 (International Service Agreement). Menurut Perjanjian itu, Perumtel setiap tahunnya menerima 15% dari net share tolls seluruh inbound dan outbound international telephone calls.

Perjanjian ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1974. Dengan demikian nyata bahwa selalu ada tindakan-tindakan dari pihak Indonesia untuk lebih memperbaiki posisi Indonesia dalam Perjanjian tahun 1967 tersebut.

Pada tanggal 10 Nopember 1979 diresmikan oleh Menteri Perhubungan Indonesia Roesmin Nurjadin penggunaan Antena kedua Stasiun Bumi Jatiluhur. Mulai saat itu Stasiun Bumi Jatiluhur bekerja dengan dua antena, satu dengan Indian Ocean Region (IOR) dan lainnya dengan Pacific Ocean Region (POR).

Sejak ide pembangunan Stasiun Bumi Jatiluhur ini dilontarkan, muncul berbagai pendapat yang tidak menyetujui rencana pembangunan ini. Dan sampai sekarangpun ada berbagai pihak yang memberikan penilaian negatip atas pengadaan stasiun bumi Jatiluhur ini. Terutama yang disorot adalah kondisi Perjanjian RI-ITT tahun 1967 yang dinilai banyak merugikan pihak kita. Langkah-langkah untuk lebih memperbaiki kondisi perjanjian itu, secara nyata telah dilaksanakan oleh Ditjen Postel dan Perumtel. Antara lain dengan berhasilnya ditanda tangani Perjanjian antar Perumtel dan P T Indosat tanggal 28 Mei 1974.

Dengan dicapainya pinjaman antara PERUMTEL/Pemerintah dengan P T INDOSAT/ITT dalam rangka proyek SKKL ASEAN. I—S (Sistem Komunikasi Kabel Laut ASEAN Indonesia-Singapore) tanggal 16 Maret 1978 yang diamandemen tanggal 17 Agustus 1978 lebih memperbaiki lagi posisi Indonesia khususnya PERUMTEL, karena menurut perjanjian ini disamping PERUMTEL menerima 15% service fee tersebut akan menerima pembagian keuntungan yang jumlahnya sampai tahun 1989 diperkirakan sama dengan keuntungan yang diperoleh PT INDOSAT.

Kita semua harus dapat menyadari bahwa Perjanjian RI-ITT dibuat pada tahun 1967, di mana waktu itu kondisi negara kita khususnya di bidang keuangan tidak secerah sekarang. Akan tetapi hasil-hasil positip dari pembangunan Stasiun Bumi Jatiluhur, telah kita rasakan bersama. Yaitu makin baiknya hubungan telekomunikasi internasional, makin meningkatnya lalu lintas telekomunikasi internasional, yang secara langsung menambah pendapatan Perumtel maupun Pemerintah. Secara tidak langsung menunjang pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi, karena meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia.

c. Pembangunan Transmisi Gelombang Mikro Nusantara (Microwave)

Untuk melayani kebutuhan telekomunikasi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan berjarak puluhan ribu kilometer, maka kebutuhan akan suatu jaringan transmisi yang menyeluruh ini merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan bidang usaha PERUMTEL dalam menyediakan telekomunikasi untuk umum.

Pada garis besarnya bidang usaha PERUMTEL dapat dibagi dalam dua kelompok

Digitized by Google

yaitu bidang telegrap dan bidang telepon.

Bidang telegrap menyelenggarakan jasa penyampaian tanda-tanda atau berita secara tertulis melalui alat-alat telegrap dengan sistem-sistem yang tertentu Di bidang telegrap sistim yang tertua adalah sistim morse dengan menggunakan pesawat-pesawat Morse. Pengiriman telegram melalui pesawat morse, dilakukan dengan mengetok tanda-tanda morse yang terdiri dari garis-garis dan titik. Tanda-tanda ini di kantor tujuan dibaca oleh operator dan ditulis dalam huruf biasa untuk kemudian disampaikan kepada sialamat.

Sistem berikutnya adalah sistem Recorder. Dalam sistem Recorder tanda-tanda tersebut tidak lagi berbentuk garis-garis dan titik-titik, melainkan garis-garis, yang berbentuk gigi-gigi tumpul. Sistem terbaru yang kini sudah banyak dipakai, terutama di kantor-kantor telegrap di kota-kota besar adalah sistem teleprinter atau penulis jarak jauh dengan menggunakan pesawat-pesawat teleprinter. Dengan pesawat teleprinter pengiriman telegram-telegram, cukup dilakukan dengan jalan mengetik seperti mesin tik biasa. Sistem teleprinter ini, yang terdapat dalam bidang usaha telegrap akhirnya dikembangkan lagi menjadi bidang usaha baru, yang kita kenal dengan nama Telex atau teleprinter exchange. Seperti halnya langganan telepon, langganan telex harus mempunyai pesawat teleprinter yang dihubungkan dengan sentral telex. Untuk dapat berhubungan dengan langganan lainnya, langganan telex dapat memutar roda pilih yang terdapat pada pesawatnya.

Begitu pula di bidang telepon kita mengenai beberapa sistem telepon, yang dimulai dengan sistem baterai. Sistem baterai adalah sistem yang tertua, atau sering juga dinamakan sistem Locaal Batterij (LB). Dari sistem ini kemudian dikenal adanya sistem baterai sentral atau Central Batterij dengan singkatan CB. Dalam sistem baterai setempat dan baterai sentral masih digunakan tenaga operator di Kantor Telepon, karenanya kedua sistem tersebut juga sering dinamakan "Manual System" atau sistem dengan tangan.

Sistem yang terakhir adalah sistem otomat, yang berarti seorang langganan dapat langsung berhubungan dengan langganan yang lain, dengan jalan memutar roda pilih tanpa melalui operator.

Sistem-sistem telekomunikasi tersebut di atas, untuk dapat disalurkan antar langganan atau pemakai memerlukan berbagai macam sarana atau media, yang termasuk suatu bidang yang dinamakan teknik Transmisi.

Teknik Transmisi mengenal beberapa cara ialah dengan cara menggunakan saluran atas tanah, bawah tanah dan gelombang radio.

Saluran atas tanah pada umumnya menggunakan kawat telanjang yang direntangkan pada tiang-tiang yang diperlengkapi dengan rangka dari besi dan isolator-isolator. Isolator ini dimaksudkan agar kawat-kawat tersebut tidak kontak dengan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya sambungan listrik pendek (kortsluiting). Untuk hubungan jarak jauh penambahan jumlah saluran, biasa dilakukan dengan alat-alat Carrier.

Pada dewasa ini dengan makin majunya teknik pembuatan bahan isolasi dari plastik, mulai banyak dipergunakan kabel-kabel untuk saluran atas tanah tersebut. Kabel udara ini berisi kawat-kawat rangkap yang satu sama lain dipisahkan oleh

Digitized by Google

bahan isolasi dalam jumlah yang cukup besar sesuai dengan kebutuhan.

Saluran bawah tanah menggunakan kabel-kabel tanah, guna menghindari kerusakan-kerusakan yang sering kali sangat mengganggu misalnya kemasukan air pada sambungan-sambungan tertentu, terkena cangkul, dan sebagainya, maka sekarang dikenal sistem DUCT yang telah mulai dipergunakan di Jakarta. Dengan sistim ini kabel-kabel tanah tersebut mendapat perlindungan yang lebih baik dan lebih teratur pemasangannya. Teknik-teknik penyaluran dengan kabel atas dan bawah tanah tersebut di atas adalah untuk hubungan-hubungan dalam kota. Untuk hubungan-hubungan antar kota dikenal adanya kabel pupin yang sebelum perang dunia kedua di Indonesia dipergunakan untuk hubungan interlokal Jakarta - Bogor.

Kabel pupin diperlengkapi dengan pupin-ciils untuk mengurangi peredaman. Di samping kabel pupin, sekarang dikenal kabel Coaxial yang konstruksinya terdiri dari kawat tembaga tipis dan diasingkan satu sama lain dengan cincin-cincin dari plastik. Kabel coaxial lazimnya diperlengkapi dengan urat-urat pembantu yang dipasang sekeliling urat coaxial tersebut yang merupakan urat pokok. Urat-urat pembantu ini sama dengan urat-urat kabel dan gunanya untuk hubungan dinas teknik atau untuk pengawasan dari jauh terhadap stasion-stasion pengeras yang dipasang pada tiap-tiap jarak 9 km sepanjang saluran.

Keuntungan dari penggunaan kabel coaxial ialah bahwa dengan menggunakan pesawat-pesawat carier khusus dengan memasang urat pokok dapat diperoleh aluran-aluran untuk hubungan interlokal sejumlah 960.

Di samping kabel tanah dikenal pula kabel laut ialah kabel-kabel yang khusus dipergunakan di dalam laut, kabel-kabel ini diperlengkapi dengan penguat-penguat dan pada ujung-ujungnya dipasang pesawat-pesawat semacam carrier yang dapat memperbanyak jumlah aluran.

Sistim Transmisi yang terakhir adalah sistim gelombang radio. Dalam sistim saluran atas dan bawah tanah suara-suara dan tanda-tanda yang dikirim disalurkan melalui kawat atau kabel-kabel, sedangkan dalam sistim gelombang radio yang dipancarkan oleh suatu pemancar dan diterima oleh suatu alat penerima. Mengingat akan sifat-sifatnya gelombang radio tersebut, untuk keperluan telekomunikasi dapat dibagi dalam beberapa jenis ialah:

1) Gelombang frekuensi tinggi (high frequency) disingkat dengan H.F.
2) Gelombang frekuensi sangat tinggi (Very High Frequency) disingkat dengan V.H.F.
3) Gelombang frekuensi ultra tinggi (Ultra High Frequency) disingkat dengan U.H.F.
4) Gelombang mikro.

Penggunaan gelombang-gelombang tersebut disesuaikan dengan sifat-sifat gelombang yang bersangkutan, sehingga gelombang H.F. pada umumnya dipergunakan untuk hubungan yang sangat jauh baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan sistim ini penambahan suatu alat lain, jumlah aluran yang diperoleh maksimal hanya 4 aluran.

Digitized by Google

Gelombang V.H.F. dan U.H.F. pada umumnya dipergunakan untuk hubungan-hubungan yang cukup jauh dan dengan suatu tambahan alat lain akan didapat jumlah aluran maksimal sebanyak 120 aluran.

Dengan gelombang mikro jumlah aluran yang diperoleh dapat dinaikkan sampai beberapa ribu aluran walaupun biaya pembangunannya cukup tinggi.

d. Gelombang Mikro dan Perkembangannya

Sejak perang dunia kedua sistem gelombang mikro berkembang dengan pesat. Teknologi ini pertama sekali digunakan untuk perhubungan yang dikenal dengan Time Division Multiplex Transmision System, yang menggunakan pulsa-modulasi, sebagai lanjutan dari teknik pulsa microwave yang dikembangkan untuk kepentingan militer selama perang. Namun demikian karena kerugian-kerugiannya, sistim ini kemudian tidak menjadi populer untuk perhubungan komersiil (Public Communications).

Kerugiannya antara lain ialah:

- Lebar band frequency tiap kanal telepon yang diperlukan relatip lebar.
- Kemajuan teknologi pada saat itu di bidang high speed pulse sangat terbatas.

Oleh karena itu, para akhli kemudian giat mengadakan penyelidikan-penyelidikan teknik phase frequency modulasi pada band V.H.F. dan U.H.F.

Pada tahun 1947 Bell System berhasil mendemonstrasikan (hubungan antara New York dengan Boston), bahwa sistem penyaluran yang reliable dari broadband signal dapat dilaksanakan dengan sistim Frequency modulation microwave dengan Frequency Division Multiplexing. Sejak penemuan ini teknologi microwave berkembang dengan pesat di banyak negara dan digunakan sebagai jaringan transmisi jarak jauh (Long Distance Circuit). Biasanya, dua repeater-station yang berurutan dalam suatu sistem microwave selalu saling bercermin. Sistem ini dikenal dengan Line of Sight System. Bila ada dua repeater tersebut terpisah (oleh laut maupun daratan) sehingga melampaui garis horizon digunakan scatter system. Sistim microwave yang lain untuk menanggulangi berkembangnya traffic perhubungan internasional yang menanjak, adalah sistem komunikasi dengan satelit. Pada mulanya peralatan microwave menggunakan tabung (vacuum-tube). Dan sekarang ini, di banyak negara sudah digunakan solid state microwave system (transistorized), sebagai pengganti vacuum-tube type karena keuntungan-keuntungannya antara lain sebagai berikut:

- Performance stability lebih baik.
- Realibility peralatan lebih baik.
- Lebih ekonomis.
- Peralatan lebih kompak (miniaturisasi).
- Maintenance relatif lebih mudah.
- Membutuhkan daya yang kecil.

Digitized by Google

Di masa datang perkembangan di dalam manufacturing peralatan, setelah diketemukannya solid-state system ini, mengarah kepada:
- Miniatur.
- Memperingan berat.
- Mempertinggi kualitas (high realiability).
- Mengurangi penggunaan daya.

Sedangkan perkembangan dalam sistem-engineering-nya sendiri yang mengarah kepada peningkatan kapasitas dan kualitas antara lain:
- Sistem gelombang mikro dengan Pulsa Code Modulasi (PCM).
- Perkembangan teknik perhubungan dengan satelit.
- Sistem Laser Communication.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa aplikasi sistem microwave di kemudian hari akan memegang peranan yang sangat menentukan baik sebagai jaringan transmisi jarak jauh nasional maupun internasional.

1) Keuntungan dari Sifat dan Kemampuan Gelombang Mikro

Untuk penyederhanaan, uraian akan dibatasi pada sistem "terrestrial line of sight." Jika ditelaah sistem ini banyak menarik perhatian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, karena sifat dan kemampuannya yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan sistem lain yang ada. Adapun keuntungan tersebut ialah:

(a) Kualitasnya tinggi, tidak banyak terpengaruh oleh keadaan cuaca, sehingga memungkinkan hubungan selama 24 jam terus-menerus.

(b) Mampu menyalurkan aluran telepon dengan kapasitas tinggi. Walaupun belum ada definisi yang tegas, dapat dikatakan bahwa: sistem dengan kapasitas rendah mampu menyalurkan antara 60 sampai 120 aluran telepon. Kapasitas medium antara 300 sampai 1.200 aluran, dan kapasitas tinggi dapat sampai 2.700 aluran.

(c) Karena kualitas dan kemampuannya tersebut, memberi pula kemungkinan dilaksanakannya sambungan langsung jarak jauh (SLJJ).

(d) Mempunyai fleksibilitas yang tinggi, yang berarti bahwa perluasan ataupun penambahan aluran hanya dibutuhkan tambahan investasi modal yang relatip kecil. Hal ini mungkin karena dalam perencanaan tidak saja dipertimbangkan kebutuhan aluran pada saat sekarang saja, akan tetapi juga kebutuhan pada 10 - 15 tahun mendatang. Dapat pula dikemukakan, bahwa bilamana karena meningkatnya traffic sudah sedemikian, hingga memerlukan penambahan sistem (bukan aluran) dapat menggunakan rute yang sama dengan stasiun-stasiun yang sudah ada dan beberapa fasilitas lainnya yang ada (misalnya menara antena). Sehingga di sini dapat diambil kesimpulan, bahwa penambahan sistem pun dapat diselenggarakan dengan tambahan modal yang relatip sedikit.

(e) Penggunaan sistem ini memungkinkan pengendalian stasiun antara (repeater)

Digitized by Google

dari jarak jauh (remote-controle). Sehingga stasiun tersebut tidak perlu dijaga. Dan hanya dikunjungi sewaktu ada gangguan teknis saja, atau sekali pada interval waktu yang tertentu: (misalnya sampai 3 bulan).

Namun demikian, selain hal-hal yang menarik seperti terurai di atas, perlu diketahui bahwa karena persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhinya, pada umumnya:

- jarak antara 2 stasiun yang berurutan berkisar antara 50 sampai 100 km, tergantung kepada frekuensi yang digunakan dan kondisi geografisnya. Makin tinggi frekuensi makin pendek jaraknya sehingga kadang-kadang pada hubungan yang tertentu diperlukan stasiun antara dalam jumlah yang banyak.
- lokasi stasiun antara terletak pada tempat-tempat yang tinggi/di atas gunung Maka jelas perlu membangun jalan masuk (acces-road) menuju stasiun tersebut.

Akibatnya, dalam pembangunan suatu jaringan microwave akan dibutuhkan investasi modal mula yang besar. Maka dalam hal ini jelas pemilihan letak/lokasi stasiun (site-selection) akan sangat berpengaruh kepada besarnya investasi modal mula yang harus ditanam.

Pemilihan site yang tepat, teknis memenuhi syarat dengan acces-road yang pendek akan sangat menekan besarnya investasi modal semula tersebut. Pada pemilihan site biasanya perencanaan dihadapkan kepada 2 hal yang kontradiktip satu sama lain ialah:

- site-rendah, dekat kota, acces-road tidak perlu, fasilitas peralatan dengan dimensi besar tetapi kualitasnya tidak baik.
- site-tinggi, di atas gunung maka diperlukan accesroad yang panjang, fasilitas peralatan cukup berdimensi kecil tetapi kualitas tinggi.

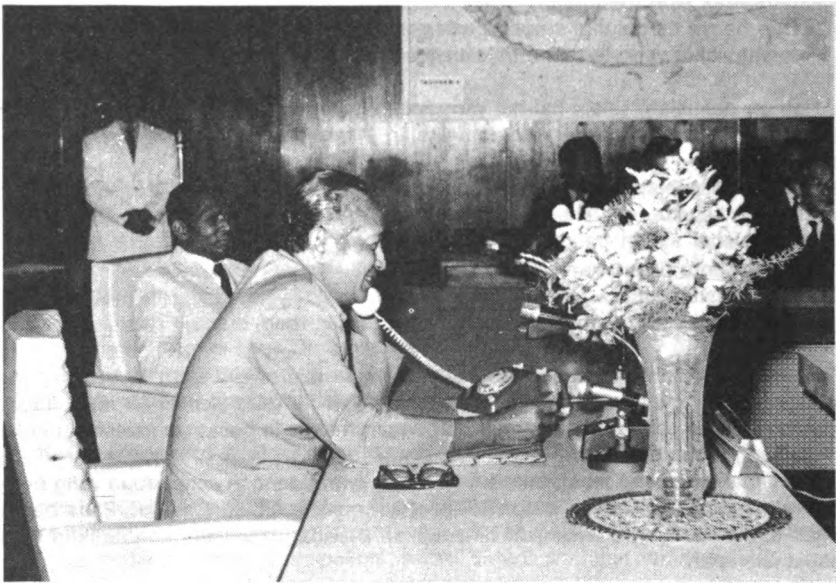
Dari kedua persyaratan, teknis dan ekonomis tersebut yang pada dasarnya bertentangan, harus dicari jalan tengah sehingga didapatkan hasil yang optimum. Guna merealisir pembangunan transmisi gelombang mikro Nusantara, maka Perumtel melakukan pembangunan tersebut secara bertahap sesuai dengan urgensinya suatu daerah.

2) Jawa Bali Micro Wave

Dalam Jilid IV, Bab III, Subbab b, Pasal 2, telah diuraikan tentang Micro Wave Jawa-Bali dan realisasinya sampai tahun 1964. Supaya lebih urut dan lengkap, di bawah ini diungkap lagi perkembangannya sejak tahun 1961 ketika sistem transmisi melalui micro wave ini mulai diteliti.

Pada tahun 1961 lalu lintas telekomunikasi Jakarta - Bandung dilakukan melalui relay station Tangkubanperahu dengan sistem PPM 24/300 STC yang berkapasitas 24 channel. Untuk menghadapi Asian Games dipasang pula PPM FM 120/300 S&H. Mengingat keamanan daerah Tangkuban Perahu sering terganggu, Direktur Jenderal Pos, Telegrap dan Telepon: S.H. Simatupang Bc.A.P. dan Direktur Telekomunikasi F. Leiwakabessy, menginstruksikan diselenggarakannya survey rute antara

Digitized by Google



Jakarta, 10 Maret 1973.
Presiden Soeharto meresmikan proyek Jawa Bali Microwave di Bina Graha dengan didampingi oleh Menteri Perhubungan Drs. Frans Seda.

Jakarta - Bandung lewat Puncak untuk pembangunan minimum 600 channel telepon.

Team survey yang terdiri dari Ir. S. Bratahalim dan Soeparto Bc.T.T. pada tahun 1961 juga mengadakan survey untuk sistem Very High Frequency. Setelah team berhasil menentukan lokasi relay station, maka pada tanggal 1 Maret 1963 diletakkanlah batu pertama pembangunan menara Puncak atau Pasir Sumbul dengan rencana biaya Rp.56,- juta. Relay station Puncak atau Pasir Sumbul ini selesai dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1965. Karena keadaan ekonomi dan moneter pada waktu itu, ternyata pembangunannya menelan biaya sebesar Rp.156,- juta.

Usaha-usaha pembangunan jaringan telekomunikasi yang modern tersebut di

Digitized by Google

atas mendapat perhatian pula dari P.B.B. terbukti dengan diperbantukannya Mr. Mc. Grane seorang expert untuk sistem microwave. Mr. Mc. Grane berpendapat bahwa antara Jakarta - Puncak harus ada tambahan satu repeater stasiun. Walaupun dengan alat-alat survey yang sangat sederhana sekali antara lain kompas altimeter, binnoculair dan maps dapat dilakukan preliminary survey ke arah Timur hingga berakhir di kota Malang.

Pada bulan Pebruari 1964, Direktur Research P.N. Pos dan Telekomunikasi, Ir. Sutanggar Tengker menunjuk Ir. Ong Tjing Hoo dari Laboratorium Postel untuk meneruskan survey dan job training mengenai survey microwave tersebut. Walaupun Mr. Mc Grane ditarik kembali dari Indonesia sehubungan dengan keluarnya Indonesia dari PBB, namun survey secara intensive terus dilakukan.

Pada bulan Oktober 1964 dapat diselesaikan survey tahap Jakarta - Gunung Geulis - Pasir Sumbul (Puncak) - Bandung - Pasir Panenjoan dan Gunung Tukung.

Peristiwa G 30 S/PKI telah membawa pengaruh yang besar sekali terhadap seluruh tata susunan dan keadaan Negara Republik Indonesia. Di bidang telekomunikasi peristiwa tersebut antara lain telah menghentikan usaha-usaha survey di bidang microwave.

Pada bulan Agustus 1968 dimulailah babakan baru dalam pembangunan jaringan microwave Jawa-Bali dalam rangka pembangunan Lima Tahun (Pelita) I Negara Republik Indonesia.

Di bawah pimpinan Direktur Pembangunan PN Telekomunikasi Ir. S. Abdulrachman dimulailah survey lanjutan dan yang kali ini meliputi jaringan yang lebih luas hingga ke Denpasar. Jaringan transmisi microwave ini kemudian dikenal dengan nama Jawa - Bali microwave sebagai pimpinan pelaksana ditunjuk Kepala Bagian Pembangunan Telekomunikasi Suwandi Kertoatmodjo Bc.TT yang dibantu oleh beberapa tenaga akhli survey Perum Telekomunikasi F.B. Moerwanto Bc.TT dan P.A. Martono Bc.TT serta beberapa petugas survey dari Nippon Electric Company/ Sumitomo. Team survey mengadakan survey ulangan dan mirror test pencarian alternatif lokasi repeater dan mencoba merencanakan beberapa rute yang lebih baik dan lebih murah. Survey dapat diselesaikan pada tahun 1969 walaupun belum seluruhnya dapat direncanakan secara detail.

3) Realisasi Pembangunan Gelombang Mikro Jawa-Bali dalam Pelita I

Pada tahun 1969 dimulailah tahap pembangunan Jawa - Bali microwave dengan biaya dari Pemerintah dalam rangka Pelita I. Sebagai pimpinan Proyek ditunjuk Suwandi Kertoatmodjo Bc.TT. Pembangunan jaringan yang meliputi 299.232 channel km dimulai dengan pembangunan jalan-jalan menuju ke site-site yang pada umumnya berada di atas puncak-puncak gunung, yang masih sulit untuk dapat dicapai.

Perlu dicatat bahwa pada awal Pelita I keadaan sarana Perhubungan dan jalan serta fasilitas angkutan adalah sangat memprihatinkan dan tidak memadai, sehingga pelaksanaan survey dan pembangunannya menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Jika tahap pembangunan Jakarta - Bandung memakan waktu hampir 6 tahun

Digitized by Google

(1961 s/d 31-5-1967) dan memakan biaya sebanyak Rp.165.000.000,- dan U.S.$.1.792.364,- maka pembangunan tahap Bandung - Surabaya dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun (1968 s/d 3-10-1972) dengan memakan biaya Rp.620.000.000,- dan U.S.$.2.399.556,- sedangkan tahap Surabaya - Denpasar yang dikerjakan secara simultan dengan tahap Bandung - Surabaya memakan waktu kurang lebih 3 tahun (1-4-1970 - 11-3-1973) dan memakan biaya sebesar Rp.410.000.000,- dan U.S.$.1.360.000,-. Dengan demikian maka seluruh jaringan Jawa Bali microwave telah dikerjakan dalam waktu 5 tahun dengan memakan biaya sebesar Rp.1.195.000.000,- dan U.S.$.5.551.920,- atau kurang lebih sebesar Rp. 3,5 milyard.

Tahap pembangunan Jawa Bali microwave dengan biaya Pelita ini terjadi di bawah pimpinan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi May. Jen. Soehardjono dengan dibantu oleh Sekretaris Jenderal Postel S. Nasoetion Bc.AP, Kepala Direktorat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Postel Sabar Soediman dan Direktur Utama Perum Telekomunikasi Ir. J. Sutanggar Tengker serta Direktur Operasi dan Teknik Perusahaan Umum Telekomunikasi Ir. W. Munandir Mangundiprodjo.

Data-data teknis dalam pembangunan jaringan Jawa Bali microwave ini adalah:

a. panjang jalan baru yang dibangun adalah 39.400 m.
b. panjang jalan yang di up grade di atas tanah milik Perhutani maupun milik rakyat yang telah dibebaskan adalah 17.550 m.
c. pembangunan menara 31 stasiun dengan tinggi antara 10 hingga 82 meter.

Secara berturut-turut terminal dan repeater stasiun yang termasuk jaringan Jawa Bali microwave adalah: Jakarta - Gunung Geulis - Pasir Sumbul - Cisarua - Bandung - Pasir Serewen - Pasir Panenjoan/Cipayung - Pasir Waled - Cirebon - Punung Benda - Pekalongan - Randu Gembiang (Sedandang) - Semarang - Gunung Telomoyo - Yogyakarta - Surakarta - Gunung Kuwarakan - Madiun - Gunung Pandan - Sidolegi - Surabaya - Gunung Gebug - Malang - Tongas - Gunung Melawang - Gunung Besek - Jember - Gunung Gending - Bukit Klatakan - Bukit Tumpang - Denpasar.

Peresmian microwave Jawa Bali ini dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan melakukan percakapan telepon secara SLLJJ dari Bina Graha dengan Gubernur Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 10 Maret 1973.

Para petugas dan pelaksana microwave Jawa-Bali yang pada waktu itu lebih banyak ditangani oleh Kkon dengan sebutan KOPEL (Komandan Pelaksana) antara lain tercatat sebagai berikut:

Di Pusat: M. Dahlan Bc.T.T., Soewandi Kertoatmodjo Bc.T.T., Martono Bc.T.T. F.B. Moerwanto Bc.TT., Tony Hariman Bc.TT., Ir. Imam Santoso, R. Satiman dan Ir. Soedarmadi.

Di Kdtel-II Jateng: Drs. Gondomargono Bc.T.T. dan Rahardjo Bc.T.T.

Sementara itu pembangunan STO2 terus dilancarkan seiring dengan pembangunan Jawa-Bali dan menjelang dibangunnya Microwave Lintas Sumatera. Walau dalam permulaan tahun Pelita kondisi PERUMTEL kurang menguntungkan - baik kualitas maupun kuantitas, namun bertolak dari situasi demikian maka kegencaran pembangunan terus melaju.

Dapat dicatat bahwa dari 175.000 line unit telepon yang terpasang, 57% terdiri dari manual yang peralatannya sudah tua-tua. Transmisi dilakukan dengan open-wire line dan radio HF, kecuali link Microwave antara Jakarta-Bandung. Demikian

Digitized by Google

juga peralatan telegrap sudah sangat tua. Pelayanan telegrap dilakukan melalui morse. Waktu itu telephone density secara keseluruhan hanya 0,16% untuk 100 orang, suatu indikasi perkembangan telepon yang masih rendah.

Secara proposal target yang ingin dicapai dalam Pelita-I sebagai berikut:

Telepon:	58.500 lu	otomat	5.191 lu manual = 63.691 lu
Telegrap:	20	printer	
	12	HF morse	
	6	link baru	
Telex:	400 lu	tambahan nomor	
	2	link telex	
Transmisi:	1.816	microwave/troposcatter	
	14	link radio HF	
	15	Carrier dan VHF	

Dalam Pelita-I pembangunan Sentral Telepon Otomat (STO) dapat diselesaikan hampir memenuhi target. Di tahun 1969 Jakarta-Kota 10.000 lu. Gambir 15.000 lu. Semanggi 2.000 lu. Tanjungpriuk 2.000 lu. Kebayoran baru 5.000 lu. Jatinegara 3.000 lu. Gandaria 100 lu. (Yang waktu itu masuk wilayah Dtel-I Jakarta raya).
Di Dtel-II Semarang: Magelang 1.000 lu. Solo 4.000 lu.
Di Dtel-III Surabaya: Darmo 3.000 lu. Malang-I 4.000 lu. Madiun 2.000 lu.
Di Dtel-IV Palembang: Palembang 4.000 lu. Tanjungkarang 1.000 lu.
Di Dtel-V Padang: Padang 3.000 lu. Bukittinggi 1.000 lu.
Di Dtel-VI Medan: Medan 6.000 lu. Bandaaceh 600 lu.
Di Dtel-VII Ujungpandang: Ujungpandang-I 6.000 lu.
Di Dtel-VIII Bandung: Bandung (centrum) 6.000 lu. Bandung Utara 2.000 lu.
Di Dtel-X Denpasar: Denpasar 1.600 lu. Tuban 100 lu.
Di Dtel-XI Amboina: Amob 1.600 lu.

Pada tahun 1970 menyusul selesainya pembangunan STO/Cirebon dengan 4.700 dan Banjarmasin 3.000 lu.

Kemudian di tahun 1971 berturut-turut Yogyakarta diotomatisir dengan kapasitas 2.000 lu. Tanjungperak (Surabaya) 2.000 lu. Jambi 1.000 lu. Tanjungkarang 1.000 lu. Medan dapat tambahan 4.000 lu.
Di tahun 1972 dapat giliran otomat kota-kota Jakarta (Slipi) 1.000 lu. Kebayoran baru 1000 lu. Kemudian Semarang-I 8.000 lu. Surabaya (Kebalen) 10.000 lu. Bandung sentrum juga dapat tambahan 1.000 lu dan Bandung timur 1.500 lu. Pada tahun 1973 Jakarta mendapat tambahan lagi untuk Gambir 2.000 lu. Kebayoran baru 2.000 lu dan Jatinegara 1.000 lu. Di tahun itu juga Malang-I dapat tambahan 2.000 lu lagi. Kemudian menyusul STO Manado dengan 2.600 lu dan Denpasar dapat tambahan 1.000 lu.

Pada akhir Pelita-I di tahun 1974 pembangunan STO serta perluasan-perluasan meliputi kota-kota Slipi 500 lu sebagai perluasan. Juga diperluas Tanjungkarang dengan 2.000 lu. Kemudian kota Telukbetung memperoleh otomat dengan 2.000 lu dan kota Panjang 400 lu.

Dengan demikian dalam Pelita-I PERUMTEL berhasil menyelesaikan pembangunan 37 buah STO dengan jumlah kapasitas 139.700 line unit.

4) Microwave Trans Sumatera.

a) Perencanaan

Sebagai bagian sistem komunikasi wawasan Nusantara, maka bersamaan dengan

Digitized by Google

pelaksanaan microwave Jawa Bali, pada awal tahun 1968 PERUMTEL c.q. Direktorat Pembangunan yang dipimpin oleh Ir. S. Abdulrachman yang selanjutnya diteruskan oleh Ir. Willy Munandir M, telah melakukan studi untuk memulai survai lapangan microwave Trans Sumatera. Dengan kerja sama dengan pihak ATM9 Australian Telecommunication Mission) dilakukan "preliminary survey" proyek yang selanjutnya dibuat "feasibility study". Dengan diterimanya feasybility oleh pemerintah maupun World Bank, maka proyek ini dimasukkan ke dalam APBN PELITA I (1969-1970).

Lokasi stasiun-stasiun "repeater" MW disesuaikan dengan rencana fihak Bina Marga tentang rencana pembuatan Trans Sumatera Highway, satu dan lain untuk memudahkan pemeliharaannya di kemudian hari.

Mengingat sulitnya keadaan alam, peta topografi yang ada tidak lengkap dan kurang teliti serta jalan-jalan menuju tempat di mana repeater stasiun akan dibangun sangat sulit untuk dicapai kendaraan, maka dalam pelaksanaan survai pemetaan terpaksa digunakan fasilitas pesawat terbang (Cessna) yang dicarter oleh ATM. Agar survai mencapai sasarannya, pada bulan Agustus 1966, bersama-sama ATM, dilakukan "Crash course" program untuk mendidik surveyor PERUMTEL dari beberapa daerah dan Kantor Pusat sebanyak 36 orang (4 Regu), namun kenyataannya yang dilatih hanya 10 orang karena terbatasnya tenaga, sedangkan proyek harus berjalan terus.

Seperti halnya pada survai lokasi proyek MW Jawa Bali, maka pekerjaan survai lokasi proyek MW Trans Sumatera adalah jauh lebih berat. Di samping kondisi jalan yang sangat buruk, medan yang harus ditempuh berbentuk gunung-gunung dan belukar, maka perkampungan jarang-jarang dengan penduduk yang sedikit sekali. Keadaan ini memaksakan supaya team survai harus merupakan team pilihan yang harus bekerja dengan teliti dan cermat.

Team pelaksana survai dipimpin oleh F.B. Moerwanto Bc.T.T. dan Harjana Bc.T.T. yang dibantu oleh petugas Daerah. Pimpinan Proyek dipegang oleh Kepala Bagian Pembangunan Telekomunikasi, Soewandi Kertoatmodjo Bc.T.T.

Pada tahun 1971 survey lapangan masih dilakukan dan mengingat waktunya terbatas, pekerjaan dipercepat dan di samping itu sudah dapat disusun buku spesifikasi tender peralatan proyek, antara lain untuk pengadaan:
- peralatan radio (MWM) dan pembangkit tenaga listrik berikut pemasangannya.
- peralatan menara dan antena serta pemasangannya.
- peralatan multiplex dan pemasangannya.

Pelaksanaan pekerjaan itu dibagi dalam tiga tahap.
Tahap I Jakarta - Palembang
Tahap II Palembang, Padang termasuk Jambi
Tahap III Padang - Medan.

Tender diikuti oleh 6 negara, setelah melalui penelitian Panitya Teknis Perumtel, dan bersama-sama ATM dikeluarkan rekomendasi yang akhirnya ditetapkan sebagai berikut:
- Sumitomo/NBC mengerjakan perangkat radio, pembangkit listrik dan menara antene.
- Citac Ltd. (CIT) mengerjakan perangkat multiplex.

Digitized by Google

Pelaksanaan pembangunan civil work, banyak mengalami hambatan antara lain karena keadaan alam dan cuaca di samping adanya pemborong yang kurang mampu dalam mengatasi permasalahan site dan keuangan. Pembuatan jalan masuk dan gedung yang meliputi 12 terminal station, 6 drop station dan 36 repeater station dilakukan oleh bermacam-macam pemborong. Namun target dicapai sampai pada saat pemasangan instalasi dimulai.

Hambatan pokok justru akibat terjadinya devaluasi dolar, serta adanya perubahan tinggi menara, maka spesifikasi kontrak mengalami perubahan pula. Perbedaan harga kontrak ini berakibat panjang terhadap prosedur administrasi yang menyangkut beberapa instansi, sehingga masalah shipment peralatan yang sudah tiba di pelabuhan tidak segera dapat dikeluarkan untuk sampai ke site-site. Guna memberikan jaminan mutu instalasi, serta pemasangan peralatan power supply, radio multiplex dan menara yang dikerjakan oleh teknisi NEC dan CIT, maka dibentuklah inspecting officer yang bertugas mengawasi pekerjaan kontraktor.

Pada April 1974 tahap I Jakarta - Palembang yang terdiri dari 18 stasiun dapat diselesaikan, dan pada Mei 1974 dapat dioperasikan tanpa SLJJ. Kemudian pada Januari 1975 tahap Palembang - Padang yang terdiri dari 19 stasiun juga dapat diselesaikan. Selanjutnya pada Mei 1975 tahap Padang - Medan untuk menara dan power telah pula selesai, sedangkan multiplexnya selesai Juni 1975. Jumlah terminal dan repeater stasiun untuk microwave Trans Sumatera ada 54 buah ialah:

- Jakarta
- Cikupa
- Gunung Pinang
- Rajabasah
- Gunung Balau
- Tanjungkarang
- Metro
- Negara Bumihilir
- Bukit Kemuning
- Tebing Tangkas
- Simpang Perikanan
- Tebing Pelawi
- Baturaja
- Bukit Asam Lahat
- Panggung Pinang
- Lorok
- Palembang
- Gunung Gajah
- Tebing Tinggi
- Bukit Pedukuh
- Bukit Sulap
- Gunung Pandan
- Sarulangun
- Rawas
- Pauh
- Muara Katalo
- Bukit Paku
- Bajubang
- Jambi
- Bangko
- Bukit Panjang
- Ampelu
- Gunung Medan
- Rasam Tapanggang
- Ngalau Basurat
- Bukit Subang
- Padang
- Bukit Sulasih
- Bukit Timbulun
- Bukit Tinggi
- Bukit Sarik
- Lubuk Arau
- Bukit Bapagar
- Pagaran Tonga
- Ulu Air Silaya
- Dolok Sobohi
- Dolok Martimbang
- Dolok Tolong
- Dolok Simajurunjung
- Pamatang Siantar
- Dolok Singkut
- Kabanjahe
- Medan

Digitized by Google

Kontrak pembelian dan pemasangan perangkat radio MW, termasuk menara antena, peralatan radio dan power plant dilakukan tanggal 31-10-1971 dengan kontraktor Jepang (Sumitomo Shoji Kaisha Ltd.), sedangkan kontrak pembelian dan pemasangan perangkat multiplex dilakukan pada 30-10-1971 dengan kontraktor Perancis (Compagnie Industrielle Des Telecommunications - CIT).

Pada 20-8-1972 sampai 11-9-1972 diadakan Design Review Meeting di Tokyo antara Perumtel dan ATM dengan pihak SSK dan NEC. Meeting ini dimaksud untuk penentuan terakhir dari alternatif lokasi site yang diperkirakan akan menelan biaya dan pekerjaan besar dan penggunaan Single Quad Cable untuk spur ke Sibolga.

Pelaksanaan pemasangan instalasi menara antene, power plant dan radio microwave, dilakukan pihak SSK dan instalasi Multiplex oleh pihak CIT dengan pengawasan langsung oleh petugas Perumtel.

b) Pembiayaan.

Sumber pembiayaan untuk proyek Microwave Trans Sumatra berupa:

- Pinjaman dari Bank Dunia US $ 8,5 juta untuk pembelian perangkat; Radio microwave beserta pemasangan instalasi US $ 7.157.361,62 senilai dengan Yen, dan kontrak pembelian perangkat Multiplex berikut pemasangannya sebesar US $ 1.257.038,20.
- Bantuan Grant Australia yang digunakan untuk: Jakarta cable network Junction & duct System; Rehabilitasi untuk telekomunikasi Sumatra Selatan; Coaxial cable Jakarta Gambir; Medan II Telepon Network; Padang extention Telephone dan Jambi extention telephone network, dan lain-lainnya; kesemuanya sebesar US $ 9,8 juta.
- Biaya berupa Rupiah dipergunakan untuk perencanaan/pemetaan, pembelian tanah, bahan-bahan, peralatan/mesin, pengangkutan, perjalanan, pengeluaran untuk gaji/upah, administrasi terutama untuk konstruksi (pembuatan jalan masuk dan gedung Sro microwave) yang terperinci sebagai berikut:

1. Dana APBN	DIP	1969/1970	Rp. 67.849.000,-
		1970/1971	533.680.500,-
		1971/1972	912.100.000,-
		1972/1973	1.227.790.000,-
		1973/1974	673.751.761,-
2. Dana tambahan Perumtel			2.794.637.370,-
3. DIP 1974 Perumtel			2.156.376.058,-
4. DIP 1975 Perumtel			660.612.000,-
			Rp. 9.026.837.689,-

Dalam pelaksanaan pembangunan microwave Trans Sumatera ini bertindak sebagai pimpinan proyek ialah: Suwandi Kertoatmodjo Bc.TT., dilanjutkan oleh F.B. Murwanto Bc.TT bersama-sama dengan Haryana Bc.TT. dan selanjutnya oleh Drs. Gondomargono Bc.TT.

Peresmian microwave Trans Sumatera tersebut dilakukan oleh Presiden Soeharto

Digitized by Google

pada 7 Agustus 1975 di Medan didampingi oleh Menteri Perhubungan Emil Salim, Direktur Jenderal Postel Mayjen Suhardjono dan Direktur Utama Perumtel Ir. Willy Munandir Mangundiprodjo.

c) Segi lain dari pembangunan Gelombang Mikro Lintas Sumatera.

Hampir semua orang mengakui bahwa pembangunan Microwave Lintas Sumatera atau Trans Sumatera microwave sangat sulit dikerjakan. Trans Sumatera high way yang direncanakan tahun 1950 saja nampaknya sulit dilaksanakan, apa lagi microwave Trans Sumatera yang medannya demikian berat karena lokasi site harus berada di ketinggian, misalnya di bukit-bukit atau gunung-gunung, di mana keadaan medan alam Sumatera sangat berbeda dengan di Jawa. Rata-rata para pelaksana harus mampu menaklukkan hutan dan lembah-lembah curam untuk dapat mencapai puncak perbukitan atau gunung tersebut. Tidak terhitung melengkapi tekad membangun ini dengan keberanian dan ketabahan. Binatang buas masih banyak dijumpai di daerah ini. Namun demikian dorongan Dirjen Postel Soehardjono cukup membesarkan hati. Pokoknya sistem Telekomunikasi wawasan nusantara harus terwujud walau harus jatuh korban.

Survey yang dilakukan di tahun 1968 adalah pekerjaan untung-untungan mengingat PERUMTEL belum banyak memiliki tenaga surveyor. Untuk itu bantuan Australia dengan regu ATM-nya (Australian Telecommunicatin Mission) merupakan regu penolong bagi terselenggaranya pekerjaan tersebut di samping ikut mendidik tenaga PERUMTEU di bidang tersebut.

Dari 36 orang tenaga yang diperlukan, hanya 10 orang saja yang diperoleh. Itu pula sebabnya, walau pekerjaan civil work telah dimulai, pelaksanaan survey belum seluruhnya selesai.

Kesulitan lain bukan saja bersifat alamiyah, tetapi juga tidak tersedianya countermap yang sempurna. Untuk menaklukkan alam Sumatera ini para surveyor terpaksa menggunakan pesawat terbang untuk pekerjaan pemetaan yang makan waktu sampai 2 tahun. Survey dilakukan terus sampai tahun 1973.

Berhubung sistem pembangunan oleh Dirjen ditetapkan dengan target approach, terpaksa beberapa pekerjaan dilaksanakan secara akselerasi. Tetapi walau segala usaha dan daya telah dikerahkan, namun terjadi juga delay yang cukup panjang sampai 6 bulan.

Untuk pertama kali karyawan-karyawan PERUMTEL menghadapi tantangan berat dalam tugasnya yang pernah dialami. Dalam pelaksanaan pembangunan korban demi korban jatuh. Tahap Jakarta - Palembang (Tahap-I) selesai tahun 1974 dengan 18 stasiun. Pada tahap-II Palembang-Padang selesai tahun 1975 dengan 19 stasiun dan tahap-III Padang-Medan juga selesai di tahun itu juga pada bulan Juni dengan 17 stasiun.

Kemudian dilakukan penyempurnaan terutama yang menyangkut hubungan SLJJ antar kota selama 1 bulan, dan pada bulan Agustus 1975 proyek tersebut diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto.

Dalam upacara yang 33 menit itu tampak Dirjen Postel berbangga hati yang dalam laporannya antara lain mengatakan bahwa pembangunan microwave Trans Sumatera walaupun mengalami kelambatan bukanlah kesalahan perencanaan, namun terjadi juga atas sulitnya bahan bakar serta krisis dollar di pasaran dunia, hingga terpaksa dievaluasi. Dikatakan lebih lanjut, bahwa Trans Sumatera sejak hari itu disambungkan dengan microwave Jawa-Bali yang telah diresmikan di tahun 1973 dan diharapkan pada tahun itu juga menyusul digunakannya sistem Troposcatter

Digitized by Google



Medan, 7 Agustus 1975.
Presiden Soeharto dengan didampingi oleh Menteri Perhubungan Prof.Dr. Emil Salim dan Dirut Perumtel Ir. Willy Moenandir meresmikan Proyek Trans Sumatra Microwave.

Digitized by Google

Surabaya-Banjarmasin. Proyek Trans Sumatera microwave yang menelan biaya Rp9.026.837.689.-, merupakan kebanggaan nasional sebagai proyek Pelita dan memiliki tidak kurang dari 436.237 aluran kilometer yan sekaligus dapat digunakan.

Peresmian microwave Lintas Sumatera ini diadakan di Medan dan diikuti oleh kota-kota Palembang, Tanjungkarang, Denpasar yang dipancarkan melalui televisi, di mana seluruh rakyat ikut menyaksikan jalannya upacara.

5) Hambur Tropo (Troposcatter) Surabaya-Banjarmasin

Salah satu Gelombang mikro yang dibangun oleh PERUMTEL adalah Troposcatter, untuk mengatasi hubungan langsung jarak jauh antara Surabaya dan Kalimantan.

Troposcatter atau juga disebut "Tropospheric Scatter Communication System" adalah suatu sistem transmisi di mana gelombang micro dipancarkan ke arah lapisan troposphere yang selanjutnya mengalami gejala penghamburan, sehingga dimungkinkan diterima di tempat yang berjarak antara kurang lebih 100 s/d 1.100 km.

Jelas jarak ini jauh lebih besar dari jarak yang lazim dicapai oleh sistem radio "line of sight" sehingga sistem ini disebut "Over the Horizon". (60 - 80 km)

Sistem tropo merupakan sarana hubungan radio yang dapat digunakan untuk jarak yang terletak antara jangkauan sistem radio "line of sight" dan sistem radio HF dan mempunyai sifat multi-channel dan reliable. Namun sistem ini cocok dibangun untuk lintasan yang sulit dicapai dengan sistem 'line of siphm' seperti halnya antara Surabaya Banjarmasin yang dipisahkan oleh lautan dan berjarak kurang lebih 400 km satu terhadap yang lain. Sistem ini dibangun mengingat hubungan radio antara Banjarmasin dan kota-kota lain di Indonesia saat itu masih menggunakan HF, yang terbatas kemampuannya, khususnya jumlah aluran dan "rehability." Dengan dibangunnya "troposcatter" ini, berarti diperoleh, suatu hubungan radio yang dapat bekerja 24 jam sehari dan memberikan kemungkinan untuk SLJJ antara Banjarmasin dan kota-kota lainnya, secara timbal balik dan sekaligus merupakan kelanjutan gelombang micro Jawa Bali di satu pihak dan dapat diteruskan dari Banjarmasin ke Kalimantan Tengah, Barat dan Timur, misalnya ke Palangkaraya, Sampit, Samarinda dan Balikpapan.

Stasion tropo tersebut dibangun di Gunung Gerakanlalang (Madura) dan Gunung Keramaian (Kalimantan). Kedua stasion tropo tersebut dihubungkan dengan Surabaya dan Banjarmasin dengan sistem radio 'line of sight' (microwave).

Pembangunan Troposcatter diarahkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, kesatuan bangsa yang memerlukan hubungan telekomunikasi cepat, tepat ekonomis, berkapasitas cukup dan kualitas hubungan memenuhi syarat.

Tujuan utama diarahkan pada peningkatan hubungan antar Daerah penghasil dengan pusat perniagaan, pelabuhan export, pusat-pusat industri dan perdagangan melancarkan roda Pemerintahan antara pusat dan daerah. Peningkatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam membangun jaringan transmisi utama perlu diadakan integrasi dan synchronisasi dengan pembangunan (oto-

Digitized by Google

matisasi) sentral-sentral telepon dan fasilitas switching lainnya, hal mana berkaitan dengan usaha menentukan prioritas dan urutan pelaksanaannya.

Proyek ini dibangun tahun 1971 dan dirampungkan tahun 1975 yang selanjutnya dapat dioperasikan pada awal tahun 1976.

Sistem troposcatter Surabaya Banjarmasin merupakan bagian dari jaringan Telekomunikasi Wawasan Nusantara Tahap pembagunan dilakukan pada tahun 1970/1971 yang meliputi persiapan-persiapan Field survey dan persiapan propagation test. Pada tahun 1972 propagation test dilaksanakan dan hasilnya langsung dianalisa oleh Team.

Berdasarkan hasil tersebut dilakukan tender yang dibuka tahun 1973. Dari 6 peserta tender telah dipilih Sumitomo Shoji Kaisha Ltd sebagai pemenang, setelah mengalami penilaian terlebih dahulu. Sebagai Konsultan dari proyek ini ditunjuk NTC (Nippon Telecommunication Consulting Co Ltd). Kegiatan dari kedua konsultan dimulai sejak tahun 1973 hingga tahun 1975 yang meliputi pekerjaan instalasi, pengukuran dan pengoperasian.

Lokasi:
- Surabaya (terminal)
- Gunung Sandangan (repeater)
- Gunung Gerakanlalang (repeater over the horizon station)
- Gunung Keramaian (repeater o/h station)
- Banjarmasin (terminal).

Dengan demikian hubungan jarak jauh, terutama antara Surabaya Kalimantan dan kota-kota lainnya di Pulau Jawa sudah dapat dicapai pula dengan SLJJ.

Dalam pelaksanaan pembangunan proyek Hambur Tropo ini tercatat nama-nama yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, antara lain di Kantor Pusat: R. Wikanto Bc.T.T. selaku perencana, Soewandi Kertoatmodjo Bc.T.T. sebagai Pinpro pertama yang kemudian dialihkan kepada S. Wakidjan Bc.T.T. yang dibantu oleh H.R. Kitting Bc.T.T. Kdtel III Surabaya pada waktu itu ialah R. Goenawan Bc.T.T.

Perlu diketengahkan bahwa di Kantor Pusat waktu itu masih terdapat Direktorat Pembangunan (Dirpemtel) dengan Ir. S. Abdoerachman sebagai Direkturnya yang kemudian diteruskan oleh Ir. Willy Moenandir.

Yang diserahi Urusan Civil Worknya ialah Ir. Imam Santoso, Urusan Repeater ialah R. Satiman dan Urusan STO ialah Ir. Soedarmadi.

6) Gelombang mikro Indonesia Bagian Timur

Dengan rampungnya sistem transmisi microwave Jawa Bali, Trans Sumatera dan Hambur Tropo antara Surabaya dan Banjarmasin, maka Perumtel melanjutkan transmisi microwave ini ke Indonesia bagian Timur, sebagai bagian dari microwave Nusantara, yang kita kenal dengan sebutan Eastern Microwave System.

Pembangunan Eastern Microwave ini dimulai dari pulau Bali menuju Nusatenggara Barat dan Nusatenggara Timur terus ke Utara sampai ke Ujungpandang. Jaringan ini di sebelah Barat dihubungkan dengan microwave Jawa Bali melalui

Digitized by Google

Denpasar.

Pembangunan microwave Indonesia Timur ini, di samping digunakan untuk hubungan telepon jarak jauh, dari dan ke Indonesia bagian Timur, juga digunakan untuk hubungan telex, telegrap dan televisi.

Eastern microwave ini mempunyai dua rute, masing-masing dikenal dengan rute utama (main route), yang melalui pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Tanah Jampea, Selayar terus ke Sulawesi, rute cabang (minor route) yang melalui pula Flores, Sumbawa dan Timor.

Rencana yang dipergunakan untuk microwave Indonesia Timur ini ialah frequency Band 6 Giz dan 4 Giz, dan mempunyai channel maximum 660 channel, yang secara teknis memenuhi persyaratan dari CCIB (Comittee Consultative International Radio) dan CCIT (Comittee Consultative International Telegravique Telephonique).

Eastern microwave ini mempunyai 8 stasiun terminal dan 11 stasiun repeater.

Untuk Stasiun Terminal:

- Denpasar
- Mataram
- Sumbawa Besar
- Bima
- Ruteng
- Waingapu
- Ujungpandang
- Banthain

Untuk Stasiun Repeater:

- Bukittengah
- Bt. Baban
- Jorongkoak
- Ot. Palaning
- Dorosambi
- Doronac
- Pocoranaca
- Saritene
- Bontotino
- P. Salayar
- P. Tanah Jampea

Dalam tahap pelaksanaan pembangunannya dapat dikemukakan di sini:

- Preliminary survey, survey dan feasibility study dilakukan dalam tahun 1971 - 1972.
- Penyelidikan tanah dan pembebasan tanah dilakukan dalam tahun 1972 - 1973.
- Mempersiapkan tender equipment, pembuatan bestek dan gambar CW. Prakualifikasi tender-tender serta persiapan pelaksanaannya dilakukan dalam tahun

Digitized by Google

1973-1974.

- Pelaksanaan pengadaan equipment dan handling, pelaksanaan instalasi radio, multiplex dan power serta pelaksanaan tower dan antene dan feedrs dilaksanakan dalam tahun 1975 - 1976 - 1977.
- Setelah selesai semuanya dilakukan pelaksanaan testing pada tanggal 1 Agustus 1977.

Pelaksanaan civil work dalam pembangunan Eastern microwave ini disinkronkan dengan penyediaan dana dan tibanya equipment.

Penyelesaian pembangunan ini ditargetkan sampai akhir Juli 1978, namun demikian pada tanggal 31 Mei 1978 sudah dapat mulai dioperasikan, walaupun pekerjaan civilnya belum rampung semuanya.

Peralatan-peralatannya semuanya dipesan dari Sumitomo Shoji Kaisha (NEC), atas AID pemerintah Jepang; OECF G to G, sedangkan konsultan ditunjuk NTC (Nippon Telecommunications Consulty Co Ltd) sebagai salah satu syarat dari AID pemerintah Jepang.

Pimpinan proyek ini pertama sekali dipegang oleh Sdr. M. Yani Bc.TT dan akhirnya oleh Sdr. Yasmin Bc.TT. Pihak-pihak luar negeri yang berpartisipasi dalam pembangunan ini ialah Sumitomo Shoji Kaisha Ltd, sebagai kontraktor utama. Nippon Electric Company dan Ganwa Deici Denki Kogyo Co Ltd sebagai sub kontraktor. Partisipasi pembangunan dari dalam negeri sebagai sub kontraktor adalah P T Wijayakarya dan C.V Timur Jaya. Perencanaannya dilayani oleh C.V. Hikmah, C V Kutamas dan C.V Rimbaya.

Sistem Eastern Microwave ini memiliki keistimewaan khusus antara lain ialah dengan adanya urutan hop-hop yang di luar standar yang ada dan pernah dilaksanakan di dunia, yaitu hop-hop:

Doronac - Posoranaka	191 km
Posoranaka - P. Jampea	171 km
P. Jampea - Patah Kayua	114 km
Ot. Palaning - Dorosambi	112 km
Patahkayua - Bontotino	99 km

Pembangunan ini akhirnya berhasil diselesaikan dengan realibility yang memenuhi syarat-syarat dari CCIR dan CCIT.

Jika pembangunan sistem transmisi microwave Jawa Bali, Trans Sumatera, Hambur Tropo dan terakhir Microwave Indonesia Bagian Timur berturut-turut diikuti, dapat dievaluasi bahwa perhubungan telekomunikasi di persada Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat, di mana pada tahun 1968 baru ada SLJJ antara Jakarta-Bandung dan pada saat ini sudah dapat dilakukan SLJJ sebanyak 47 kota besar di seluruh Indonesia.

Para petugas dan pelaksana pembangunan microwave Indonesia bagian Timur ini tercatat antara lain Moch Yanie Bc.T.T. selaku Pinpro, Harjana Bc.T.T., Ir. Muhaminim dan Soewandi Kertoatmodjo Bc.T.T. selaku perencana. Pinpro kemudian dialihkan kepada Jasmin bin Jacub. Pelaksananya di Dtel-X Denpasar ialah Koes

Digitized by Google

Soeharjo Bc.T.T., Moeljadi dan Goenoto Bc.T.T. Di Ujungpandang tercatat J. Torie dan Damiri Bc.T.T. Waktu itu Kdtel-X Denpasar ialah Ir. Theo Surjawan yang kemudian dilanjutkan oleh I Gusti Ngurah Oka Bc.T.T.

Peresmian Gelombang mikro Bagian Timur dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Juni 1978 di Ujungpandang.

e. Proyek Sistem Komunikasi Satelit Domestik

1) Umum

Proyek Sistem Komunikasi Satelit Domestik, disingkat SKSD, yang merupakan proyek di bidang transmisi adalah bahagian dari Proyek Telekomunikasi Nusantara dan masuk dalam lingkup proyek-proyek REPELITA II PERUMTEL.

SKSD adalah sesuatu sistem yang baru untuk Indonesia. Dengan beroperasinya SKSD PALAPA mulai 16 Agustus 1976 Indonesia secara nyata telah mulai memasuki babakan baru di bidang teknologi telekomunikasi khususnya dan teknologi keuangangkasaan pada umumnya.

Untuk mewujudkan proyek besar ini semua aspek dipertimbangkan baik aspek teknis maupun non teknis, yaitu Epoleksosbud dan hankam.

Indonesia pada hakekatnya telah mulai memasuki era satelit telekomunikasi sejak beroperasinya stasiun Bumi Jatiluhur yang dihubungkan dengan satelit Intelsat. Akan tetapi proyek SKSD ini bagi Perumtel mempunyai arti tersendiri selain merupakan tindakan nyata dalam rangka pengisian Wawasan Nusantara, juga dalam pelaksanaan pembangunannya sendiri memberikan tambahan pengalaman bagi Perumtel. Yang tidak bisa dilupakan ialah bahwa Perumtel ternyata mampu melaksanakan proyek yang sama sekali baru di bidang teknologi telekomunikasi. Sebelum proyek ini dilaksanakan ada beberapa pihak yang menuduh bahwa Dirjen Postel bertindak terlalu jauh ke depan, dengan menambahkan diragukannya kemampuan Perumtel mengerjakan proyek ini. Dikatakan selain proyek ini memerlukan biaya yang relatip besar, juga tenaga teknisi Perumtel dinilai belum mampu baik di bidang pelaksanaan proyeknya sendiri, untuk pengoperasiannya, maupun nanti pada tahap pemeliharaan. Ternyata kemudian apa yang diperkirakan tidak sesuai. Direktur Jenderal Postel Soehardjono dan Ir. Willy Moenandir M, Direktur Utama Perumtel dalam salah satu kesempatan menegaskan bahwa suksesnya proyek ini karena partisipasi dari seluruh jajaran Ditjen Postel dan Perumtel. Juga bantuan dari pihak-pihak lain pejabat-pejabat Dephub, Bappenas, Departemen Keuangan, Hankam dan lain-lain.

Siapakah yang mula-mula mencetuskan ide SKSD di Indonesia tidak ada data-tertulis.

Beberapa pihak mengakui bahwa Dirjen Postel, Soehardjono, adalah motivator atau pendorong konsep ini. Untuk menciptakan konsep ini barang tentu Dirjen Postel mendapat bantuan yang berupa telaahan staf baik dari Ditjen Postel maupun PERUMTEL.

Setelah peresmian stasiun bumi Jatiluhur untuk hubungan telekomunikasi inter-

Digitized by Google

nasional pada tanggal 27 September 1969 oleh Presiden RI, Direktur Jenderal Postel mengemukakan gagasan pemakaian sistem satelit untuk telekomunikasi domestik. Presiden akhirnya memberikan pengarahan agar gagasan ini dilaksanakan dalam Repelita II. Berdasarkan pengarahan Presiden, oleh staf Direktorat Jenderal Postel dan Perumtel pada tahun 1970 dan 1971 dilakukan penelaahan yang lebih mendalam atas rencana pembangunan SKSD. Penelaahan tersebut antara lain dengan mengumpulkan data lalu lintas telekomunikasi di Indonesia, permintaan jasa telekomunikasi pada waktu itu dan perkiraan permintaan jasa di masa mendatang. Langkah selanjutnya Ditjen Postel dan Perumtel mengirimkan beberapa stafnya untuk melakukan studi perbandingan ke beberapa negara yang telah memanfaatkan teknologi satelit telekomunikasi.

Pada bulan Maret 1972 telah berhasil dihimpun suatu kumpulan data yang diperlukan untuk rencana pembangunan SKSD baik mengenai satelit maupun stasiun buminya. Tanggal 4 September 1973 oleh Direktur Jenderal Postel telah dibentuk suatu Panitia yang bertugas menelaah baik mengenai segi-segi teknis, operasionil maupun segi-segi non teknis mengenai rencana proyek SKSD. Panitia berkesimpulan bahwa pembangunan SKSD baik dari segi teknis maupun aspek lain akan mempercepat terciptanya suatu sistem telekomunikasi nasional yang terpadu, yang berarti secara langsung menunjang perwujudan Wawasan Nusantara.

Pada waktu itu perusahaan yang dinilai cukup berpengalaman dalam pembuatan satelit adalah Hughes Aircraft dari Amerika Serikat. Hughes telah berhasil membuat satelit untuk Intelsat dan juga satelit domestik Canada (Anik). Oleh karena itu menjadi salah satu pertimbangan pimpinan Ditjen Postel untuk menunjuk Hughes Aircraft nantinya sebagai pembuat satelit.

Perkembangan penelaahan, penjajagan dengan kontraktor selalu dilaporkan kepada baik Pimpinan Departemen Perhubungan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Bapak Presiden memberikan keputusan bahwa proyek SKSD harus dilaksanakan dan merupakan proyek nasional.

Tanggal 5 Juli 1974 ditanda tangani suatu perjanjian antara Perumtel dengan Hughes Aircraft Company mengenai System Definition of the Indonesian Communication Satellite System. Perjanjian ini meliputi ketentuan-ketentuan mengenai system engineering, satellite design, desain stasiun bumi, dan bantuan administratip. Untuk lebih memantapkan dukungan dari semua pihak tentang keputusan Pemerintah yang menetapkan proyek SKSD merupakan proyek nasional, tanggal 9 s/d 12 September 1974 diadakan Seminar di Jakarta yang ditangani bersama antara Departemen Perhubungan, Ditjen Postel, Perumtel, Departemen P.D. dan K., Departemen Penerangan dan Lapan.

Bersama dengan Seminar ini juga diadakan Pameran SKSD yang diikuti antara lain perusahaan-perusahaan, PT Elnusa, PT National Gobel, ITT, PT Indosat, Philips, PT Siemens Indonesia, NEC, LX Bricsson, ITB dan lain-lain.

Pada tanggal 7 s/d 10 Oktober 1975 di Bandung oleh Himpunan Mahasiswa Electro ITB diselenggarakan suatu Symposium untuk membahas segi-segi teknis dari SKSD. Pada Pidato Pengantar RAPBN 1975/1976 dari Bapak Presiden RI tanggal 6 Januari 1975 dikatakan antara lain bahwa SKSD adalah proyek Pemerin-

Digitized by Google

tah, proyek nasional. Bulan Oktober 1974 Hughes Aircraft menyerahkan laporan pendahuluan sebagai realisasi Perjanjian tanggal 5 Juli 1974 di atas. Sedangkan laporan lengkap diserahkan pada bulan Nopember 1974. Sejak itu mulai diadakan perundingan dengan pihak Hughes Aircraft untuk pembuatan dua satelit dan 10 stasiun bumi, dengan Philco Ford dan Federal Electric ITT, kedua-duanya untuk pembuatan dan pemasangan 30 stasiun bumi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Biaya untuk proyek ini direncanakan sebesar US$ 153,4 juta yang dananya bersumber dari Exim Bank Amerika Serikat, dan biaya rupiah untuk pekerjaan sipil.

Keputusan Pemerintah tentang perlunya pembangunan SKSD dilakukan setelah diadakan penelaahan baik yang berupa alasan-alasan, pertimbangan dari segi ekonomi, politis, sosial, budaya, bahkan pertimbangan teknis, dan manfaat yang mendasari pemilihan ini.

Alasan dipilihnya SKSD untuk Indonesia sangat erat hubungannya dengan keadaan geographi Indonesia. Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri dari 13.677 pulau-pulau di mana hanya 6.044 di antaranya didiami oleh kurang lebih 135 juta penduduk. Geografi Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajad bujur barat dan 141 derajad bujur timur dengan panjang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km hampir sepanjang Amerika Serikat dari pantai barat ke pantai timur atau jarak Moskow ke Lisbon. Jarak terjauh dari utara ke selatan sepanjang 1.880 km diapit oleh dua samudra yang merupakan jembatan antara benua Asia dan Australia.

Bumi Indonesia mengandung kekayaan alam yang potensil antara lain minyak bumi, nikel, batubara dan hasil-hasil tambang lainnya, tanahnya cukup subur untuk pertanian dan kehutanan. Kekayaan itulah yang harus diolah melalui program-program pembangunan yang terus-menerus dimaksudkan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang, Garis-garis Besar Haluan Negara disusun dan dituangkan dalam Pola Umum Pembangunan Nasional secara Sistematis antara lain dengan menetapkan Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Wawasan Nusantara merupakan salah satu Pola dasar tersebut yaitu Wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Menyatukan kepulauan Nusantara yang luas itu, dilihat dari sektor perhubungan ialah masalah pendekatan jarak dan memperpendek waktu. Di bidang telekomunikasi masalahnya dapat lebih dijabarkan lagi ialah bagaimana dapat dibangun suatu sistem telekomunikasi nasional yang terpadu, yang dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya suatu sistem telekomunikasi yang dapat diandalkan. Suatu sistem telekomunikasi yang dapat menjamin suatu hubungan 24 jam te-

Digitized by Google

rus menerus dan dapat menjangkau ke seluruh pelosok tanah air. Sistem telekomunikasi yang dipilih ini harus dapat memenuhi baik kebutuhan Pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Dan sistem yang tepat untuk Indonesia adalah SKSD.

2) Pertimbangan-pertimbangan

Keputusan pembangunan SKSD di samping alasan-alasan tersebut di atas juga didasarkan kepada pertimbangan baik di bidang Ekonomis, Politis, Sosial budaya, Pertahanan keamanan dan pertimbangan teknis.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, berbicara dalam banyak bahasa daerah, memeluk berbagai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, akan tetapi merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat. Dengan adanya fasilitas telekomunikasi yang dapat mencakup seluruh Nusantara di mana anggota masyarakat dapat saling berkomunikasi dengan mudah, dapat menyaksikan program televisi yang menggambarkan keadaan di daerah lain, akan lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sistem telekomunikasi yang tepat untuk tujuan ini adalah SKSD.

Dengan adanya SKSD yang dapat mengirimkan berita suara radio maupun televisi dapat diterima sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Siaran-siaran berupa pendidikan, maupun kebudayaan dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.

Dengan tersedianya suatu sistem telekomunikasi nasional yang dapat diandalkan dan dapat mencakup ke seluruh wilayah Indonesia, akan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Daerah-daerah terpencil yang mempunyai telekomunikasi yang baik bisa menarik para pengusaha untuk menanamkan modalnya di situ. Pabrik-pabrik diharapkan banyak didirikan di daerah itu, yang berarti dapat menampung tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Sistem telekomunikasi yang tepat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi ini antara lain adalah SKSD.

Di bidang pertahanan dan keamanan, luasnya wilayah Nusantara merupakan problem tersendiri. Untuk tugas-tugas keamanan dan pertahanan wilayah Nusantara diperlukan adanya hubungan yang cepat, terus menerus dan dapat diandalkan. Inilah salah satu pertimbangan mengapa dipilih SKSD.

Pertimbangan-pertimbangan teknis yang menggambarkan manfaat SKSD adalah sebagai berikut:

- Dalam hal mutu hubungan, SKSD memenuhi ketentuan-ketentuan internasional yaitu ketentuan-ketentuan CCIR dan CCITT di samping sistem gelombang mikro dan sistem kabel laut.
- SKSD mempunyai kemampuan lingkup yang luas, dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia bahkan kawasan Asean. Dibandingkan dengan sistem darat yang harus menggunakan kombinasi beberapa sistem untuk dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia umpamanya gabungan antara sistem gelombang mikro, kabel, VHF, hambur tropo.
- Pembangunan SKSD dapat dilakukan secara bersamaan, secara simultan. Sedangkan sistem darat dalam pembangunan antara hubungan-hubungan tertentu

Digitized by Google

saling kait-mengkait. Dan pembangunan SKSD dapat dilaksanakan dalam waktu relatip lebih singkat.

- Kapasitas SKSD lebih besar dari pada kapasitas sistem darat seperti gelombang mikro, sistem hambur tropo.
- SKSD lebih luwes dalam arti dapat menampung kebutuhan tak terduga di luar rencana semula. Penambahan atau pengurangan jumlah aluran untuk hubungan antara dua tempat tertentu dapat dengan mudah dilakukan.
- SKSD dapat menampung kebutuhan komunikasi untuk meteorologi, penerbangan, pertanian dan lain-lain.
- SKSD dapat memenuhi kebutuhan untuk siaran televisi baik siaran umum maupun siaran pendidikan, karena kapasitasnya memungkinkan untuk itu.

3) Tahap Pembangunan

Setelah dicapai kebulatan untuk membangun SKSD, dimulailah tahap-tahap pelaksanaannya.

Tanggal 5 Juli 1974 antara Perumtel dan Hughes Aircraft Company ditandatangani Perjanjian mengenai System Definition. Perjanjian ini meliputi ketentuan mengenai system engineering, desain satelit, desain stasiun bumi bantuan administratip dan lain-lain, di mana hasil-hasilnya secara lengkap diserahkan oleh pihak Hughes pada bulan Nopember 1974. Mulai saat itu dilakukan perundingan dengan para calon kontraktor yaitu Hughes Aircraft, Federal Electric, ITT, dan Philco Ford.

Sebagaimana proyek-proyek lainnya dalam kaitannya dengan Proyek Telekomunikasi Nusantara, perundingan ini di pihak Indonesia diikut sertakan instansi-instansi Departemen Perhubungan, Bappenas, Departemen Keuangan, Bank Indonesia Ditjen Postel dan Perumtel.

Tanggal 15 Pebruari 1975 berhasil ditutup perjanjian pembangunan SKSD yaitu dengan: 3 perusahaan Amerika Serikat sebagai berikut:

- Hughes Aircraft Company untuk pembuatan 2 buah satelit komunikasi, pembangunan satu stasiun pengendali utama di Cibinong, 5 stasiun lintasan utama dan 4 stasiun lintas tipis di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- Philco Overseas Services untuk pembangunan 7 buah stasiun lintasan utama dan 8 stasiun untuk lintasan tipis di Sumatra, Kalimantan dan sebahagian Sulawesi.
- Federal Electric International - ITT untuk pembangunan 6 stasiun lintasan utama dan 9 stasiun lintasan tipis di sebahagian Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya.

Lokasi stasiun bumi yang dibangun adalah sebagai berikut: Sumatra (Banda Aceh, Medan, Pakanbaru, Jambi, Padang, Palembang, Tanjungkarang, Bengkulu, Pangkalpinang, Batam), pulau Jawa (Jakarta/Cibinong, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Cilacap, Surabaya), Kalimantan (Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Tarakan), Sulawesi (Manado, Kendari, Palu, Soroako, Ujungpandang), Bali dan Nusatenggara (Denpasar, Mataram, Waingapu, Kupang), Maluku (Ambon, Ternate), Irian Jaya (Jayapura, Biak, Manokwari, Fak Fak, Sorong, Merauke, Tem-

Digitized by Google

bagapura, Pulau Gag/Waigeo).

Dalam bulan Maret ditanda tangani suatu Memorandum of Understanding antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Dirjen Postel dengan pihak NASA untuk peluncuran satelit. MOU ini diteguhkan dengan pertukaran nota diplomatik antara kedua pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang dilakukan oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (Roesmin Nurjadin). Sedangkan Perjanjian dengan NASA untuk peluncurannya sendiri baru ditanda tangani tanggal 1 Mei 1975 di Washington, antara Dirjen Postel Soehardjono mewakili Pemerintah R.I. dengan pihak NASA yang diwakili oleh Dr. Noel W Hinners. Untuk asuransi telah ditutup perjanjian antara Perumtel dengan pihak P T Asuransi Jasa Indonesia tanggal 28 April 1975. Sedangkan untuk pembangunan pekerjaan sipil ditanda tangani Perjanjian dengan kontraktor dari dalam negeri (P T Graha Gapura dan CV Modern) pada tanggal 28 April 1975.

Sesuai dengan ketentuan ITU (International Telecommunication Union), sebelum sesuatu dapat beroperasi harus dilakukan terlebih dahulu tahap notifikasi/koordinasi sesuai dengan Radio Regulations dan ketentuan IFRB (International Frequencies Registration Board) sebelum dapat masuk dalam Master Register IFRB).

Koordinasi dengan Intelsat berhasil dilakukan dengan ditanda tanganinya Memorandum of Understanding antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Ir. J. Sutanggar Tengker dengan pihak Intelsat yang diwakili oleh Dirjen Intelsat S. Astrain pada tanggal 25 Nopember 1975 di Washington DC. Pada saat itu Ir. J. Sutanggar Tengker menjabat sebagai Gubernur South East Asia Group (SEAG) Intelsat, disamping menjabat Kepala Direktorat Telekomunikasi. Dalam MOU dengan Intelsat itu disebutkan bahwa pihak Intelsat tidak keberatan satelit PALAPA ditempatkan pada posisi orbit 77 derajad dan 83 derajad bintang timur.

Sudah menjadi suatu kelaziman bahwa suatu satelit komunikasi diberi nama, seperti Anik milik Canada, Stationer milik Rusia. Nama untuk kedua satelit Indonesia sudah banyak yang diusulkan, yang pada akhirnya pada bulan Juli 1975 Presiden RI berkenan memberikan nama untuk kedua satelit tersebut PALAPA. Dipilihnya nama Palapa tersebut diilhami oleh Sumpah Amukti Palapa dari Perdana Menteri Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit.

Inti sumpah sakti tersebut ialah bahwa Gajah Mada tidak akan istirahat sebelum terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam wilayah kerajaan-kerajaan (Nusantara). Wawasannya yang luas, tebalnya kepercayaan akan kekuatan diri sendiri serta kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas besar melembari keyakinannya untuk mempersatukan Nusantara, sehingga ia mengucapkan "Sumpah Palapa" yang terkenal itu pada tahun 1334 sebagai berikut:

"Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun huwus kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjungputs, ring Haru, ring Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa."

(yang artinya kira-kira: jika telah berhasil mempersatukan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah bersatu baru saya akan beristirahat).

Amukti Palapa (Jawa Kuno) mempunyai arti sebagai berikut: Palapa berarti buah

Digitized by Google

hasil karya (wohing gawe). Amukti berarti menikmati. Namun demikian istilah Amukti Palapa berarti istirahat. Jadi Sumpah Amukti Palapa, berarti bahwa Perdana Menteri Gajah Mada tidak akan istirahat, sebelum Nusantara (Indonesia) bersatu.

Setelah kontrak-kontrak ditanda tangani, Pimpinan Proyek SKSD ditunjuk yaitu Ir. A.Ph. Djiwatampu yang dibantu oleh 2 Wakil Pimpinan Proyek, yaitu Harjana Sutarja Bc.TT dan Ir. Muhaimin, sedang Wakil Perumtel di Amerika Serikat ditunjuk Ir. Saleh Gunawan. Disamping itu dalam proyek ini terdapat pula 12 Pemimpin Bahagian Proyek, 40 Pemimpin Sub Bahagian Proyek, Staf Teknik Telekomunikasi dan pekerjaan sipil. Sebagaimana proyek lainnya, proyek ini langsung dikendalikan oleh Dirjen Postel, Direksi Perumtel dan pimpinan teras Ditjen Postel.

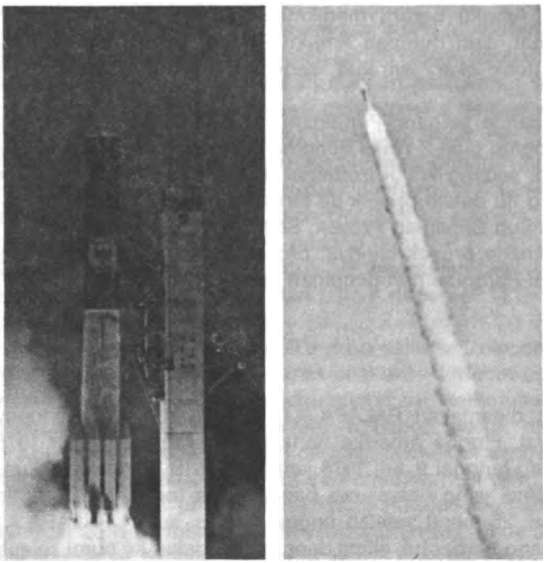
4) Saat Peluncuran

Satelit Palapa I (sekarang dinamakan PALAPA A1) diluncurkan dari Kennedy Space Centre Cape Canaveral, Florida Amerika Serikat pada tanggal 8 Juli 1976 jam 19.31 waktu setempat atau tanggal 9 Juli 1976 jam 06.31 WIB. Peristiwa peluncuran ini merupakan detik-detik yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan kecepatan 35.217 km per jam, 26 menit setelah tinggal landas, satelit PALAPA A1 masuk dalam orbit transfer yang berbentuk ellips dengan titik dekat ke bumi sejauh 231,6 km atau perigee dan titik terjauh 35.000 km atau apogee. Penyalaan apogee motor diperlukan untuk merobah orbit transfer menjadi orbit lingkaran yang menempatkan satelit pada orbit geser atau penghanyutan. Pada tanggal 12 Juli 1976 jam 14.17 WIB apogee motor dinyalakan/ditembakkan dari Stasiun Pengendali Utama Cibinong. Peristiwa ini merupakan saat penting untuk mengatur kedudukan satelit di ruang angkasa. Presiden RI, Soeharto, Menteri Perhubungan Dr. Emil Salim, Menteri/Sekretaris Negara Soedharmono S.H., Wapangab jenderal Surono, Dirjen Postel Soehardjono dan beberapa pejabat tinggi lainnya menghadiri peristiwa penting tersebut.

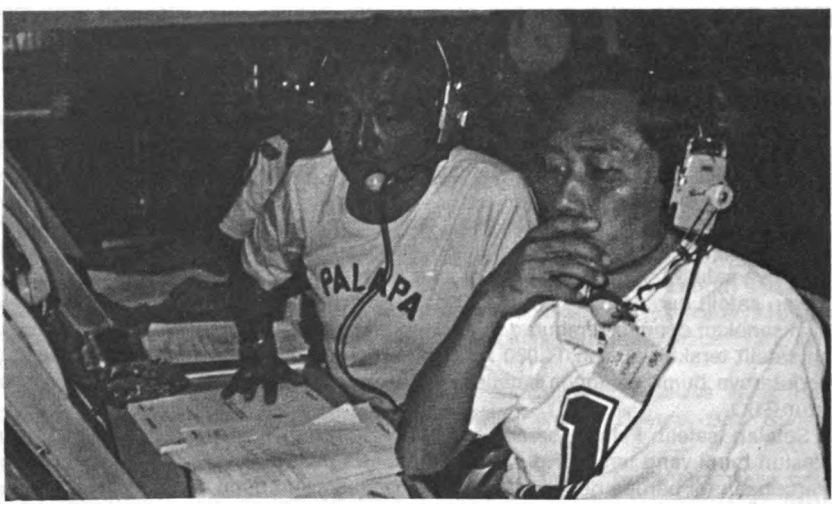
Setelah satelit Palapa berada pada orbit geser, manuver terus dilakukan untuk mengoreksi kecepatan, eksentrita dan sikap sumbu sebanyak 15 kali, sehingga akhirnya satelit berada pada orbit di jalur geostationary satellite orbit (GSO). Kedudukan satelit berada pada orbit GSO pada posisi 83 derajad Bujur Timur. Manuver dilaksanakan dengan semburan dua pasang jet yang tersedia pada satelit. Kecepatan satelit terakhir adalah 11.000 km tiap jam untuk disesuaikan dengan kecepatan berkitarnya bumi, sehingga satelit tersebut nampak diam tetap pada posisinya di jalur GSO.

Setelah satelit Palapa berada pada posisi orbitnya, segera petugas-petugas stasiun bumi yang tersebar di seluruh Indonesia melakukan percobaan-percobaan. Percobaan ini berupa hubungan antara stasiun-stasiun bumi dengan satelit Palapa dan antar stasiun bumi melalui satelit Palapa. Percobaan-percobaan ini berhasil dengan memuaskan.

Digitized by Google



Satelit Palapa A meluncur dengan sukses.



Dirjen Postel Soehardjono, selaku Mission Director Peluncuran Palapa, dengan didampingi oleh Ir. Sutanggar Tengker/Kepala Direktorat Telekomunikasi dan Ir. A.Ph. Djiwatampu/Pimpro SKSD sedang meneliti segala persiapan peluncuran dari "Mission Control Room" NASA di Cape Kennedy (Florida).

Digitized by Google

5) Saat-saat Peresmian SKSD Palapa

Pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden RI Soeharto meresmikan penggunaan SKSD PALAPA, bertempat di gedung DPR RI di Senayan Jakarta. Pada peresmian tersebut Presiden RI melakukan pembukaan prasasti melalui penekanan tombol dari sebilah keris berkelok 17, dan kemudian menanda tangani prasasti tersebut. Selanjutnya dilakukan pembicaraan telepon pertama antara Presiden RI dari Jakarta melalui SKSD PALAPA dengan Gubernur D.I. Aceh Muzakir Walad di Banda Aceh, Gubernur Irian Jaya Sutran di Jayapura. Selanjutnya pembicaraan antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan Bupati Merauke. Seluruh pembicaraan telepon tersebut dapat didengarkan oleh tamu-tamu yang menghadiri upacara tersebut. Upacara peresmian ini dihadiri oleh para anggota DPR RI, Pejabat-pejabat tinggi baik sipil maupun militer, para Duta Besar negara sahabat.

Dengan demikian untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, antara ujung barat dan ujung timur Indonesia dapat dihubungkan dengan suatu jaringan telekomunikasi yang bermutu tinggi.

Satelit Palapa A2 diluncurkan tanggal 10 Maret 1977 jam 18.16,24 waktu setempat atau tanggal 11 Maret 1977 jam 06.16,24 WIB, juga dari Kennedy Space Centre Florida Amerika Serikat. Sebagaimana satelit Palapa A1, satelit Palapa A2 ini sukses peluncurannya dan menempati posisi orbit GSO pada 77 derajad Bujur Timur. Fungsi Palapa A2 adalah sebagai cadangan dan siap dioperasikan bila Palapa A1 mengalami gangguan atau lalu lintas makin padat sehingga tidak bisa ditampung oleh satelit Palapa A1.

Satelit Palapa Generasi Pertama (Palapa A1 dan A2), berumur 7 tahun, sehingga pada tahun 1983 dan 1984 kedua satelit tersebut umurnya akan berakhir. Untuk menjaga kesinambungan operasional Satelit Palapa, pada tanggal 20 Desember 1979 ditanda tangani kontrak pengadaan Satelit Palapa Generasi Kedua yang terdiri dari Satelit Palapa B1 dan B2, oleh Dirut PERUMTEL, Ir. Willy Moenandir M, dengan Wakil Presiden Hughes Aircaraft Co., Paul Visher, yang disaksikan oleh Direktur Jenderal POSTEL, Drs. Suryadi.

f. Pembangunan Proyek Telekomunikasi Nusantara.

Pembangunan adalah suatu proses yang kontinyu dalam usaha mengadakan perubahan dari suatu keadaan tertentu menjadi suatu keadaan yang lebih baik. Dalam mencapai tujuan jalan yang dilalui melalui rangkaian aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang tidak selalu berjalan lancar, tetapi sering dihadapkan dengan adanya hambatan-hambatan besar dan kecil yang sebahagian besar disebabkan karena kekurangan sumber-sumber pembangunan.

Untuk kelancaran pembangunan itu sendiri diperlukan suatu tekad yang bulat, bekal yang cukup dan yang terpenting adanya kerjasama dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, sehingga target pembangunan bisa tercapai dengan memuaskan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi untuk umum

Digitized by Google





Digitized by Google



Jakarta (Gedung DPR-MPR, Senayan) 16 Agustus 1976.
Presiden Soeharto sedang menekan tombol "Remote control" yang terdapat pada keris berkelok 17 (gambar kiri atas) untuk membuka selubung prasasti pada peresmian SKSD Palapa (gambar kiri bawah). Kemudian ***Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan telepon dengan Gubernur Aceh Muzakir Walad (Banda Aceh) dan Gubernur Irian Jaya, Soetran, di Jayapura. Presiden didampingi oleh Menteri Perhubungan Prof. Dr. Emil Salim dan Dirjen Postel Soehardjono.***

Digitized by Google

dan sadar akan kekurangan sarana, PERUMTEL dari tahun ke tahun dari Pelita I dan Pelita II, secara bertahap berusaha meningkatkan volume pembangunan baik kualitas maupun kuantitas.

Pada awal Pelita I keadaan peralatan telekomunikasi untuk umum masih jauh untuk dikatakan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas. Dari jumlah sambungan telepon 157.000, maka lebih dari 50% masih manual, di mana sebahagian besar merupakan peralatan-peralatan peninggalan sebelum Perang Dunia kedua bahkan ada yang sebelum Perang Dunia pertama. Berhubung dengan itu telah menjadi keputusan dan tekad PERUMTEL untuk meningkatkan jasa telekomunikasi kepada masyarakat dan menunjang pembangunan nasional. Kecuali dengan pembangunan yang menyeluruh, maka pilihan lain untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mengadakan rehabilitasi peralatan, penambahan telepon, perluasan jaringan-jaringan yang telah ada dan akhirnya dengan mewujudkan sistem transmisi baru ialah Sistem Komunikasi Satelit Domestik, disingkat SKSD.

Untuk persiapan rencana pembangunan ini, dalam tahun 1972 dipersiapkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Telecommunication Development Plan 1974/1975 - 1978/1979) yang kemudian dikenal dengan nama Repelita II Perumtel.

Untuk menetapkan baik kuantitas maupun kualitas sarana telekomunikasi yang akan dibangun selain digunakan perhitungan-perhitungan teoritis, juga dilakukan survey-survey maupun mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman yang lampau. Dilakukanlah perhitungan-perhitungan jumlah telepon, telegrap dan telex serta aluran-aluran transmisi yang akan dibangun serta kualitas teknis dan target yang harus dicapai.

Untuk mengetahui layak (feasible) tidaknya, serta menguntungkan atau tidaknya pembangunan proyek ini, juga disusun perhitungan mengenai masuk-keluarnya uang perusahaan (cash flow), untuk lebih memantapkan diambilnya keputusan untuk melaksanakan proyek ini.

Hal yang amat penting ialah soal pendanaan untuk proyek ini. Proyek-proyek Perumtel yang lampau banyak yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, karena terbatasnya dana. Soal pendanaan untuk proyek ini Perumtel memperhitungkan bila untuk membiayai proyek digunakan uang pinjaman, atau dengan cara baru yang dikenal dengan Turn Key Project. Hal demikian tidak pernah dialami Perumtel sebelumnya. Untuk proyek-proyek sebelumnya, dananya biasanya bersumber dari dana intern Perumtel ataupun masuk dalam DIP Perumtel. Masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian agar pembangunan dapat dilaksanakan ialah soal pengadaan tenaga pelaksana (man power), baik tenaga-tenaga yang akan melaksanakan (man power), baik tenaga-tenaga yang akan melaksanakan pembangunan itu sendiri, maupun tenaga yang akan mengoperasi dan memelihara peralatan telekomunikasi baru hasil pembangunan itu sendiri. Di samping itu dilakukan perbaikan dalam bidang management dan organisasi. Mengingat begitu banyaknya aspek-aspek yang berkaitan, Perumtel mengambil kebijaksanaan untuk melaksanakan pembangunan yang besar ini berdasarkan pendekatan pencapaian target,

Digitized by Google

dengan memprioritaskan kontraktor-kontraktor yang dapat menyediakan dana dan mampu secara teknis melaksanakan pembangunan dan pengadaan barang-barang yang berkualitas tinggi, dengan harga yang wajar.

1) Perencanaan (1972-1974)

Pembangunan Proyek Telekomunikasi Nusantara dimaksudkan untuk ikut menunjang terwujudnya konsepsi wawasan Nusantara. Pembangunan di bidang telekomunikasi, tidak bisa terlepas dengan perkembangan teknologi. Mengingat dalam abad keduapuluh perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi berjalan begitu pesat untuk pelaksanaan proyek besar ini Perumtel membuat suatu perencanaan yang matang dan mantap dengan mempertimbangkan bahwa:

- dalam membuat perencanaan harus diperhatikan hasil-hasil pembangunan sebelumnya.
- karakteristik perencanaan harus obyektip, luwes dan logis yang menjamin perencanaan dapat dilaksanakan.
- harus selalu diperhatikan skala prioritas pembangunan mengingat terbatasnya sumber-sumber.
- perencanaan harus mencakup semua bidang baik teknis, non teknis antara lain soal tenaga kerja, organisasi dan lain-lainnya.
- dalam merencanakan harus diterapkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini untuk jangka panjang diusahakan adanya perbandingan yang serasi antara pembangunan telepon, telex dan transmisinya.
- perencanaan harus disusun secara bertahap untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- Perumtel sebagai suatu Perusahaan umum selain diharuskan mencari keuntungan juga harus memperhatikan kepentingan umum (public utility).

Konsep-konsep perencanaan yang berhasil disusun oleh Perumtel dalam periode ini antara lain: Buku Repelita II ("Telecommunication Development Plan 1974/1975-1978/1979) hasil penyusunan bersama antara Perumtel dengan pihak P.A. Management Consultant. Buku rencana ini berisi perencanaan kegiatan Perumtel dalam bidang teknik, logistik, keuangan dan kepegawaian.

Dengan surat keputusan Direksi Perumtel No. 578/Dirmatel tanggal 19 Januari 1972, dibentuk Panitia Teknis Switching Nasional yang bertugas menyusun Standarisasi Telepon di Indonesia. Panitia Teknis ini merupakan bahagian dari Panitia Nasional yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dirjen Postel No.43/Dirjen/1972. Panitia ini berhasil menyusun suatu Sistem Keteleponan dan Numbering Plan. Perencanaan bidang keuangan, perlengkapan dan tenaga kerja dilakukan bersama antara Perumtel, Ditjen Postel dan Departemen Perhubungan. Dalam bidang perencanaan kabel dengan Surat Keputusan Direksi Perumtel No.6334/Diruttel/Plantel/1446 tanggal 24 Mei 1974 yang beranggotakan unsur-unsur teknisi Perumtel, Australian Telecommunication Mission (ATM), LPP Postel dan Tenaga ahli dari Bundes Posts sebagai konsultan berhasil menyusun standarisasi dan spesifikasi jaringan kabel.

Digitized by Google

2) Jalan Pemikiran

Pemikiran-pemikiran dalam perencanaan pembangunan telekomunikasi ini datangnya hampir bersamaan antara Perumtel, Ditjen Postel dan Departemen Perhubungan. Penurunan dari perhitungan berapa sebetulnya perteleponan menghasilkan pendapatan, dan pendapatan itu dimasukkan dalam cash flow forecast, beserta jumlah yang akan ditanam kemudian dianalisa kemampuan perusahaan mengembalikan hutang-hutang beserta bunganya, berulang kali dibahas bersama antara Perumtel dengan staf Ditjen Postel.

Mengenai ide proyek Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) dalam Repelita II Perumtel, telah disinggung, meskipun lingkupnya hanya mengenai survey saja. Hal ini karena asumsi bahwa pengadaan dana sangat sulit selain jumlahnya yang besar dan prosedur pengadaannya misalnya dana bantuan dari IGGI atau Bank Dunia. Penjajagan dengan Bank Dunia tidak membawa hasil yang memuaskan karena pihak Bank Dunia hanya dapat menyediakan dana jauh dari yang dibutuhkan, di samping memberikan persyaratan proseduril yang sulit.

Hasil analisa dari 'cash flow forecast' dan studi proposal pihak Hughes, Perumtel berpendapat bahwa proyek SKSD dapat dilaksanakan. Hal ini juga berkaitan dengan pemilihan teknologi telekomunikasi mutakhir yang dapat secara cepat mencakup seluruh Nusantara, guna lebih nyata memberikan andil dalam pencapaian konsepsi Wawasan Nusantara.

3) Bidang Transmisi

Di samping meneruskan pembangunan peralatan transmisi microwave dan High Frequency (HF) maupun Very High Frequency (VHF), juga untuk memenuhi kebutuhan akan aluran transmisi diusahakan penambahan aluran dengan suatu sistem yang dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Penambahan aluran transmisi dibarengi dengan penambahan telepon yang tersambung dengan sistem SLJJ akan menaikkan lalu lintas telekomunikasi. Dari beberapa sistem transmisi perlu dipilih satu sistem yang dapat diandalkan dan mampu beroperasi 24 jam penuh, luwes, mampu menampung aluran yang banyak serta pelaksanaan pembangunan yang relatip lebih cepat dan yang terutama dapat mencakup seluruh Nusantara. Sistem transmisi dengan kabel terbuka, jelas mempunyai kelemahan-kelemahan selain jumlah aluran yang terbatas, juga sangat peka terhadap pencurian/pengrusakan kawat. Selain sistem kabel terbuka ini tidak dapat melewati lautan, di mana wilayah Indonesia yang sebahagian besar merupakan wilayah lautan.

Sistem transmisi dengan kabel laut memerlukan persyaratan-persyaratan yang ketat. Di samping itu sistem kabel laut hanya efektip untuk menghubungkan dua tempat yang padat lalu lintas telekomunikasi.

Sistem transmisi dengan VHF dan microwave, dapat menampung aluran yang relatip lebih banyak, dapat bekerja 24 jam penuh, mempunyai kualitas yang baik, tetapi memerlukan pelaksanaan pembangunan yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena diperlukan waktu untuk menetapkan lokasi dari stasiun penerima (re-

Digitized by Google

peater), pekerjaan sipil yang cukup rumit dan yang terpenting kondisi wilayah Indonesia banyak bahagian yang tidak memungkinkan. Karena adanya jarak yang terlalu jauh antara satu pulau dengan pulau lainnya, yang tidak memungkinkan pembangunan repeater microwave baik dari teknis pelaksanaan maupun pertimbangan ekonomisnya.

Pada akhirnya Perumtel sampai pada pemikiran, bahwa sistem transmisi yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan dapat dibangun dalam waktu yang relatip singkat adalah SKSD.

Untuk menghubungkan stasiun-stasiun bumi dari SKSD dengan kantor-kantor telepon di dekatnya digunakan peralatan transmisi radio microwave dengan kapasitas kecil yang disebut tail (ekor). Di samping itu akan dibangun pula transmisi radio microwave dengan kapasitas kecil untuk memanfaatkan microwave sebagai tulang punggung (backbone) ke kota-kota, sekitar backbone hubungan ini disebut spur route/hubungan lintasan simpang. Dengan adanya hubungan lintasan simpang itu, memungkinkan beberapa kota kecil menggunakan fasilitas SLJJ.

4) Bidang Telepon

Keadaan perteleponan pada waktu itu baik kualitas maupun kuantitas jauh dari memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perencanaan bidang telepon selain dengan penambahan jumlah sambungan juga sekaligus dengan pengotomatisasiannya agar dapat dihubungkan dengan fasilitas SLJJ.

Pembangunan bidang telepon diusahakan untuk lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dari dasar perhitungan bersama antara Perumtel, Ditjen Postel dan Departemen Perhubungan bila untuk Jakarta ada penambahan, hingga mencapai 250.000 sambungan, maka akan dicapai break even point dari pada pendapatan dan investment. Pada akhirnya direncanakan untuk menambah sambungan telepon untuk Jakarta sejumlah 158.000 line unit. Penentuan jumlah line unit telepon ini sangat penting, karena adanya hubungan antara permintaan jasa telepon, investasi peralatan telepon dan pengembalian hutang-hutang beserta bunganya, hal ini disebabkan telepon merupakan bagian yang terbesar dari seluruh pembangunan.

Setelah dicapai kesepakatan antara pihak Perumtel, Ditjen Postel, Departemen Perhubungan dan Bappenas, mengenai perlunya pembangunan bidang telepon, selanjutnya diteruskan dengan diskusi mengenai jumlah line unit maupun sistem teleponnya sendiri. Pembahasan mengenai penentuan sistem telepon merupakan acara yang penting, karena menyangkut masalah teknologi jangka panjang yang juga merupakan penanaman modal yang cukup besar.

Semula Perumtel dan Ditjen Postel beranggapan bahwa perluasan telepon pada Repelita II, seyogyanya berada dalam keadaan mengambang yaitu perluasan sistem yang telah ada, mengingat kaitannya dengan soal interfacing (teknis) dan soal penyediaan tenaga-tenaga yang trampil.

Pada Repelita III direncanakan untuk mengaplikasi hasil-hasil Panitia Switching Nasional, yang menghasilkan kesimpulan bahwa teknologi switching menuju ke sistem common control.

Digitized by Google

Tanggal 14 Mei 1974 diadakan pertemuan antara:
- Menteri Perhubungan
- Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
- Kepala Biro Perencanaan
- Kapal Biro Materil
- Sekretaris Ditjen Postel
- Direktur Utama Perum Telekomunikasi
- Direktur Operasi dan Teknik Perum Telekomunikasi
- Direktur Keuangan Perum Telekomunikasi
- Kabagper Ditjen Postel .

Untuk membicarakan masalah pembangunan Switching. Dalam pertemuan ini dibicarakan rencana pembangunan telepon 250.000 l.u. untuk menunjang proyek SKSD. Agar proyek dapat selesai pada waktunya diusulkan untuk dilaksanakan secara turn key. Pihak Siemens telah mengajukan penawaran dengan biaya US$ 850,- per l.u. dengan harga untuk exchange equipment disebutkan US$ 250,- per l.u.

Kesanggupan suppliers lain masih perlu penjajagan, sehingga harga penawaran pada waktu itu belum diketahui. Untuk mendapatkan harga yang murah harus dilakukan tender, yang tentunya memerlukan waktu. Bila mengikuti prosedur yang diminta oleh World Bank yaitu dengan konsultan Sofrecom memerlukan waktu 12 bulan sebelum pelaksanaan tender. Program lain ialah soal pendanaan yang diperkirakan untuk pembangunan 250.000 l.u. diperlukan dana sebesar US$ 225,- juta dan porsi rupiah sebesar Rp. 32,- milyard (asumpsi US$ 75,- juta). Dari Bank Dunia sudah mendapatkan ketegasan, hanya bisa membiayai sebesar US$ 50,- juta. Untuk penyelesaian pendanaan tersebut pihak Dephub menyanggupi untuk menghubungi Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Tentang sistem telepon dikenal beberapa generasi yaitu:
- Generasi pertama, yang memakai sistem step by step/direct system. misalnya Strowger/Inggris, EMD/Jerman, ARF/Swedia dan UR-49/Belanda.
- Generasi kedua, yang memakai sistem common control/electro mechanical/ waiting time system, misalnya Crossbar ARF/Swedia atau C-400/Jepang.
- Generasi ketiga, yang memakai sistem common control/electronic/waiting time system. Yaitu stored programme computer control system.

Common control system bila dibandingkan step by step system mempunyai keunggulan yaitu lebih luwes dalam operasi, memiliki lebih banyak subscriber facilities dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan switching nasional yang telah ditetapkan.

Untuk langsung menggunakan Stored Programme Control System, tidak dianjurkan pada waktu itu, berhubung dengan problem "kinderzieken" operasional, pemeliharaan, penyediaan personil dan lain-lain. Dalam pertemuan ini juga dibicarakan perlunya pembuatan peralatan tersebut/assembling di dalam negeri oleh pihak supplier yang akan melaksanakan pembangunan.

Digitized by Google

Ketiga-tiga sistem tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan masing-masing. Oleh karena proyek telepon ini dikaitkan dengan fasilitas kredit dari Negara asal supplier, maka dalam kontrak dengan Siemens untuk peralatan EMD disebutkan dalam satu pasal bahwa kontrak baru akan berlaku bila telah ada kepastian dana dari Pemerintah. Akhirnya kontrak dengan Siemens dibatalkan karena syarat-syarat kredit dari Jerman tidak bisa diterima oleh Pemerintah. Pihak Departemen Perhubungan sebelumnya condong untuk menggunakan sistem common control karena kemajuan teknologi berkembang ke arah sistem ini. Untuk menerapkan ini secara nasional perlu dilakukan pendidikan tenaga-tenaga trampil dan penyediaan fasilitas bengkel untuk pemeliharaannya. Langkah selanjutnya dikirim staf Ditjen Postel dan Perumtel ke beberapa negara, guna mempelajari sistem ini. Hasil usaha team ini, setelah dilakukan pembahasan secara mendalam, akhirnya pilihan jatuh pada sistem generasi ketiga di mana ada 2 macam yaitu: full electronic dan semi electronic yang dibagi 2 macam yaitu wired program control dan stored program control (SPC). Berhubung kemajuan teknologi cenderung menuju ke SPC maka dipilihkan SPC. Dari hasil studi sistem ini, yang saat itu berkembang baik adalah 10 C.Metaconta dari Belgia dan PRX dari Belanda. Pemilihan sistem seperti telah diuraikan di atas tergantung juga dari adanya kredit dari negara di mana kredit itu berasal.

5) Kabel Telepon

Pengalaman sebelumnya yang dapat dipetik ialah pemasangan telepon yang tidak lancar, bahkan adakalanya tidak dapat disambungkan karena tidak adanya jaringan kabelnya. Oleh karena itu dalam proyek besar ini harus sekaligus diadakan pemasangan kabelnya. Selain untuk menanggulangi kerusakan kabel-kabel yang ada juga dengan penambahan kapasitas bisa menampung traffic yang terus meningkat.

Untuk jaringan kabel ini Perumtel telah berhasil membuat spesifikasi teknis dan pembakuan yang dipakai sebagai dasar pengeluaran tender. Tender pengadaan kabel untuk tahun 1974/1975 terpaksa dibatalkan karena dana yang disanggupi oleh Pemerintah untuk proyek ini tidak jadi diberikan kepada Perumtel, meskipun tadinya sudah menjadi keputusan bersama antara Dephub, Depkeu, Bappenas, Ditjen Postel dan Perumtel.

6) Telex

Bidang telegrap pada waktu itu keadaannya kurang baik dibandingkan dengan bidang telepon. Peralatan yang digunakan masih konvensionil sudah tua, yaitu menggunakan pesawat morse dengan lewat transmisi radio HF. Penggunaan printer *point to point* jumlahnya masih kurang sekali dibandingkan dengan kebutuhan waktu itu. Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa sistem yang terbaik pada waktu itu adalah Telex (Teleprinter Exchange), yaitu printer yang disambungkan ke sentral (exchange) yang dapat digunakan untuk hubungan lokal, interlokal maupun internasional sebagaimana telepon otomat. Media transmisi tidak menjadi persoal-

Digitized by Google

an bila menggunakan tansmisi SKSD.

Selain telex juga perlu dikembangkan sistem gentex (general telex) yaitu yang menghubungkan semua sentral telex untuk pengiriman telegram dari kota ke kota lainnya. Sistem gentex ini akan lancar bila sistem transmisinya dapat diandalkan. Dalam hal ini dengan sistem microwave atau SKSD tidak lagi menjadi persoalan. Sistem yang dipilih adalah pengembangan dari sistem yang telah ada yaitu sistem Siemens.

7) Pekerjaan Sipil

Pelaksanaan pembangunan secara turn key meliputi pengadaan peralatan, instalasi dan juga pekerjaan sipil/bangunan-bangunan. Karena terbatasnya dana dari Pemerintah untuk pekerjaan sipil, dilaksanakan tersendiri oleh kontraktor-kontraktor dalam negeri. Pekerjaan sipil meliputi antara lain pembangunan gedung sentral telepon, gedung sentral telex, bangunan dan jalan untuk stasiun bumi, galian dan pemasangan kabel.

8) Tenaga Kerja

Untuk menunjang hasil-hasil pembangunan, dan untuk mengimbangi kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi perlu dilakukan penyediaan tenaga kerja yang trampil. Penyediaan tenaga ini, dilakukan baik dengan mendidik tenaga-tenaga yang telah ada ataupun dengan menerima dan mendidik pegawai-pegawai baru. Dalam setiap kontrak dengan kontraktor asing, selalu dimasukkan pasal tentang kewajiban kontraktor untuk memberikan pendidikan dan latihan kepada pegawai Perumtel baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

9) Penyusunan Rencana Pembangunan.

Setelah diperoleh kepastian pendanaan untuk proyek ini disusunlah rencana sebagai berikut:

(a) Program pembangunan di Jakarta meliputi pembangunan sentral telepon dan jaringan kabel karena pembangunan sentral telepon dan jaringan kabel berkaitan satu sama lain. Pembangunan duct yang semua akan dilaksanakan oleh Pertamina berhubung dengan musibah yang dialami oleh Pertamina, harus diambil alih oleh Perumtel, untuk itu perlu disediakan dananya.
Dalam periode 1975-1977 akan diselesaikan sentral telepon berjumlah 222.000 l.u. yang terdiri dari ex bantuan KPW 19.000 l.u., ex bantuan Jepang 8.000 l.u. ex Proyek Kerjasama Pertamina 32.000 l.u., ex Philips 158.000 l.u. dan ex Siemens AG 4.500 l.u. Kecuali untuk PRX (Philips) instalasi harus dilakukan Perumtel, sedang pengadaan peralatan dibiayai dari pinjaman luar negeri. Untuk melayani hubungan SLJJ maupun internasional dibangun trunk exchange Metaconta 10C dengan kapasitas 3.600/3.600 dengan dilengkapi 200 bothway ccts CCIT No. 5 untuk hubungan internasional. Karena penyelesaian

Digitized by Google

sentral diperkirakan akhir tahun 1976 untuk menampung kebutuhan yang mendesak diadakan perluasan SLJJ CIT dengan 522/786 ccts dan sentral ISC dengan 48 both way ccts CCITT No. 5.
Agar sentral telepon yang dibangun dapat beroperasi, perlu dibangun jaringan kabel yang dapat mencatu sentral-sentral telepon tersebut.
Pengadaan kabel dibiayai oleh pinjaman luar negeri, kecuali program yang diprioritaskan (crash program) sejumlah 9.000 l.u. Dalam pembangunan jaringan kabel ini Perumtel menanggung kewajiban pelaksanaan dan pembiayaan untuk instalasi termasuk pembangunan duct kabel. Pengadaan kabel berjumlah 222.000 l.u., di mana kabel primair kurang lebih 1½ kali kapasitas sentral sedangkan kabel secundairnya adalah 1½ kali kabel primair.

(b) Program pembangunan di luar Jakarta, terdiri dari proyek lanjutan dan proyek-proyek baru meliputi bidang telepon, jaringan kabel dan sentral SLJJ. Proyek lanjutan terdiri dari pekerjaan instalasi sentral maupun jaringan kabel berjumlah 39.400 l.u. terdiri dari ex KFW 2.000 l.u. (EMD), 2 kali kerja sama Pertamina 16.000 l.u. (ARF 102), ex Philips 1.000 l.u. (UR 49-a) ex AT M 17.000 l.u. (ARF 102) dan ex proyek Perumtel sendiri 2.600 l.u.
Di samping itu untuk melayani hubungan SLJJ dibangun sentral-sentral telepon di Palembang (300/300 ccts), Padang (500/500 ccts), Medan (600/600 ccts) dan 300/300), Banda Aceh (300/300 ccts), Lhokseumawe (500/500 ccts), Pakanbaru (300/300 ccts) dan Samarinda (200/200 ccts).
Proyek-proyek baru di luar Jakarta meliputi pembangunan sentral telepon. jaringan kabel dan proyek sentral SLJJ.
Peralatan sentral telepon sejumlah 188.200 l.u. yang akan dibangun terdiri dari ex kontrak BTM 44.500 l.u. (Petaconta), 58.000 l.u. (Metaconta), dan ex Siemens 85.700 l.u. (EMD). Untuk proyek ex BT akan dilaksanakan oleh BTM. dengan pengawasan pihak Perumtel. Ex Siemens pelaksanaannya akan dikontrakkan oleh Perumtel dengan supervisi Siemens. Sedang pengadaan tanah. gedung, AC dan genset harus disediakan Perumtel.
Jaringan kabel yang akan dibangun harus bisa mencatu 188.200 l.u. telepon, sedangkan proyek BICC hanya meliputi 136.700 l.u. sisanya untuk sejumlah 51.500 dan 4.500 l.u. (ex Siemens Jakarta) masih harus dicarikan dananya.
Proyek sentral SLJJ selain perluasan yang sudah ada juga pembangunan baru.
Sentral SLJJ CIT dengan jumlah kapasitas 3640/3667 dan 159 BW.
Sentral SLJJ BTM dengan kapasitas 5805/5805 termasuk combined trunk.

(c) Program Pembangunan telex terdiri dari rencana pembangunan sentral terminal dengan jumlah kapasitas 12.500 l.u., pembangunan sentral trunk telex nasional, dengan jumlah 2654 trunk repeaters dan pembangunan sentral trunk telex internasional dengan jumlah 792 trunk repeaters di Jakarta.
Pelaksanaan pembangunan proyek telex ini, meliputi proyek kerja sama Permina, kontrak Siemens dan bantuan World Bank, dan pengadaan kabel lokal.
Proyek kerja sama dengan Pertamina mencakup pengadaan pesawat tele-

Digitized by Google

printer sejumlah 300 buah. Kontrak dengan Siemens meliputi sentral telex di Jakarta berkapasitas 3700 l.u., di luar Jakarta 6300 l.u. Sentral trunk telex Zone Jakarta 1430 trunk repeaters di luar Jakarta 1224 trunk repeaters.
Pengadaan sentral trunk telex internasional di Jakarta 792 trunk repeaters, dan pesawat teleprinter sejumlah 300 buah. Termasuk pula peralatan transmisi telegrap VHF berjumlah 2400 kanal.
Dengan Bank Dunia meliputi pengadaan dan pemasangan sentral terminal telex berkapasitas 550 l.u. Untuk memenuhi pengadaan kabel lokal telex dari kontrak Siemens, pembelian kabel dilakukan dengan NKF dan BICC.

(d) Program pembangunan transmisi dimaksudkan untuk menunjang pembangunan telepon dan telegrap. Pembangunan transmisi ini meliputi proyek SKSD yang meliputi pengadaan 2 buah satelit untuk ruang angkasa dan 40 stasiun bumi.
Pengadaan satelit dan pembangunan 10 buah stasiun bumi termasuk stasiun pengendali utama, dilakukan oleh Hughes Aircraft. Pihak ITT akan membangun 15 stasiun bumi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Sedang 15 sisanya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi oleh Philco-Ford.
Untuk menghubungkan stasiun bumi dengan kantor telepon diperlukan hubungan radio atau kabel tergantung dari type stasiun bumi. Pelaksanaan pembangunan ini dilakukan oleh TRT dari Perancis.
Pembangunan lintasan simpang (spur route) dilakukan oleh CIT, Cable de Lyon dan Thompson/CSF kesemuanya dari Perancis. Lintasan simpang ini dimaksudkan untuk menghubungkan kantor-kantor telepon di luar back bone route jaringan microwave dengan jaringan microwave.

10) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan sekitar tahun 1973 dan 1974. Dalam sejarah Telekomunikasi Perumtel baru mengalami pelaksanaan proyek yang begitu besar dan luas lingkupnya seperti proyek Telekomunikasi Nusantara ini. Penilaian atas proyek ini tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Postel, Perumtel dan Departemen Perhubungan saja, tetapi melibatkan instansi-instansi lain antara lain Departemen Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia. Rencana awal dilakukan bersama antara Ditjen Postel dan Perumtel, yang kemudian dianalisa dengan perbaikan-perbaikan oleh Departemen Perhubungan. Masalah cash flow dibahas secara mendetail antara Departemen Perhubungan, Ditjen Postel dan Perumtel.

Di samping itu masih dibantu dengan saran-saran dari para konsultan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk proyek SKSD pembicaraan lebih meluas dengan melibatkan beberapa Instansi lagi yang dinilai berkaitan yaitu antara lain Departemen Hankam, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Lapan dan lain-lain, bahkan diseminarkan yang bersifat internasional di samping penyelenggaraan symposium oleh ITB dengan peserta dari fakultas teknik Perguruan Tinggi hampir seluruh Indonesia, juga para

Digitized by Google

produsen bidang itu.

Hasil evaluasi bersama ini, sebahagian masih dievaluasi lagi oleh pihak Bank Dunia, Exim Bank Amerika Serikat, Bank-bank yang akan memberikan kredit dan Teleconsult (konsultan) di bidang ini. Kesimpulan evaluasi bahwa proyek ini layak dan perlu dilaksanakan.

Penentuan sistim didasarkan pada hasil studi dan pengamatan yang mendalam. Untuk SKSD dari hasil pengamatan yang bahwa Hughes Aircraft, merupakan perusahaan yang banyak menjual satelit telekomunikasi untuk Intelsat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan merupakan perusahaan yang berpengalaman, khususnya untuk pembuatan satelit dan stasiun pengendalinya. Sedangkan untuk fasilitas peluncuran saat itu, yang dinilai berpengalaman dan baik adalah Nasa (National Aeronautic and Space Administration). Bahkan ada kecenderungan waktu itu monopoli peluncuran satelit adalah NASA. Hal ini yang juga merupakan suatu pertimbangan untuk mengusahakan dana dari Amerika Serikat dan penunjukan pelaksana pembangunan stasiun bumi (ruang buminya) dari perusahaan Amerika Serikat yang jatuh pada ITT dan Philco Ford.

Untuk sistem lokal setelah dievaluasi dan dianalisa, dianjurkan untuk menggunakan sistem PRX (Belanda) dan Metaconta (Belgia). Pihak Bappenas mengeluarkan paper yang menggariskan bahwa untuk kota-kota Medan, Bandung, Surabaya, Semarang dan SLJJ untuk Medan, Jakarta, Bandung dan Surabaya digunakan sistem 10C Metaconta. Sedang untuk Jawa dan Bali kecuali Jakarta dan Bandung menggunakan Pentaconta (Belgia). Untuk perluasan SLJJ di Jawa kecuali kota-kota tersebut di atas tetap menggunakan CIT (Perancis) di luar Jawa menggunakan Pentaconta (Belgia).

Untuk proyek kabel pemilihan tidak begitu sulit karena telah ada spesifikasinya hanya dikaitkan dengan sumber kreditnya. Untuk kabel Jakarta menggunakan NKF (Belanda) luar Jakarta BICC (Inggris) sedangkan untuk tail dan lintasan sijpang kepada TRT dan CIT Alcatel, Thompson CFS dari Perancis.

11) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam arti persiapannya, penanda tanganan kontrak dilakukan Nopember 1974 — Pebruari 1975.

Untuk membiayai proyek yang besar ini, menjelang penyelesaian periode evaluasi, sudah mulai dibicarakan bagaimana proyek ini dibiayai. World Bank yang diharapkan dapat membiayai, ternyata hanya bisa memberikan jumlah pinjaman yang jauh dari mencukupi. Mulailah datang penawaran-penawaran dari luar negeri, untuk membiayai proyek ini yaitu dari negeri Belanda (Algemeene Bank Nederland), dari Inggris (Midland Bank) dan Belgia (Societe Generale le Banque/SGB) dari Jerman (Dresdner Bank dan Kreditanslat fur Wiederbau/KFW), dan dari Amerika Serikat (Exim Bank).

Ditjen Postel dan Perumtel dalam rangka pengadaan dana untuk proyek ini, sesuai dengan policy Pemerintah hanya diserahi tugas-tugas teknis saja. Sedangkan penyelesaian dilakukan oleh Departemen Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia.

Digitized by Google

Dengan demikian pinjaman (loan) ini yang menanda tangani adalah Pemerintah cq Departemen Keuangan. Syarat pokok pinjaman agar dapat diterima harus diusahakan jangka pengembalian tidak kurang dari 12 tahun termasuk masa tenggang (grace period), serta tingkat bunga dengan dasar perhitungan Libo + ¼% maximum (Libo = London Inter Bank Organization). Kenyataannya tidak semua pinjaman memberikan waktu pengembalian 12 tahun. Oleh karena tu cash flow yang disusun Perumtel setiap kali sering harus dirubah mengikuti persyaratan kredit tersebut. Persyaratan lain dari pinjaman luar negeri itu, ialah bahwa umumnya pinjaman itu hanya bisa dibelanjakan di negeri pemberi kredit, baik untuk barang maupun jasa.

Periode penjajagan sumber dana dari luar negeri, berlangsung sampai akhir 1974 dengan hasil positip, yaitu adanya kesediaan bank-bank luar negeri membiayai proyek ini dengan syarat-syarat yang diterima Pemerintah. Kebijaksanaan yang diambil oleh Ditjen Postel dan Perumtel dalam rangka pelaksanaan proyek ini ialah:

- Dalam melaksanakan pembangunan dianut prinsip target approach, dan kepada supplier dipaksakan agar mau menerima prinsip turn key, yaitu bersedia melaksanakan pengadaan peralatan dan pemasangannya dalam jangka waktu tertentu, dan sesuai dengan spesifikasi teknis Perumtel.
- Program pembangunan yang telah disiapkan Perumtel dan hasil penjajagan pendanaannya merupakan dasar untuk menetapkan jumlah dan type peralatan yang akan dibeli dari para supplier luar negeri.
- Harga-harga peralatan yang dibeli tidak boleh lebih mahal dari peralatan yang pernah dibeli oleh Perumtel termasuk jasa.

Menjelang Januari 1975 para supplier dari Jerman, Belanda, Inggris, Belgia, Perancis, Amerika Serikat mulai mengajukan penawaran harga, baik harga barang maupun jasa. Dan bersamaan dengan itu keluar instruksi, agar Ditjen Postel dan Perumtel segera mengevaluasi, menganalisa dan menutup kontrak-kontrak dalam batas waktu yang sangat singkat (10 hari). Dalam waktu 10 - 14 hari tersebut Ditjen Postel/Perumtel berhadapan dengan beban yang amat berat. Di satu pihak harus segera mengadakan penyesuaian-penyesuaian program pembangunan, sesuai dengan keputusan tersebut, menyerahkan kepada supplier untuk membuat penawaran baru, dan baru dievaluasi penawaran baru tersebut. Di samping itu Perumtel harus juga menyiapkan rencana pembiayaan dalam rupiah, untuk kegiatan-kegiatan yang belum masuk dalam penawaran. Di dalam pelaksanaan perundingan Ditjen Postel/Perumtel tidak berhak sepenuhnya memutuskan. Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Bappenas merupakan instansi yang langsung memberikan petunjuk dan pengarahan. Hal ini mengingat masalah pembangunan proyek Telekomunikasi Nusantara merupakan proyek nasional. Setiap saat apabila diperlukan secara periodik Perumtel/Ditjen Postel selalu memberikan laporan hasil perundingan kepada yang berwenang tersebut di atas.

Posisi supplier cukup kuat, karena adanya ketentuan bahwa kredit harus digunakan untuk membeli barang dan jasa dari negara asal pemberi kredit. Ikatan ini cukup menyulitkan kedudukan Ditjen Postel karena beberapa barang dinilai mempunyai harga yang cukup tinggi, di samping ada beberapa peralatan yang tidak begitu sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan Perumtel. Namun demikian

Digitized by Google

segala upaya ditempuh, agar masalah-masalah teknis dapat diatasi, di samping penurunan harga, agar tetap mendekati arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan Patut dicatat bahwa pimpinan Ditjen Postel, yaitu Dirjen Postel, Sekditjen Postel, Kepala Direktorat Telekomunikasi, Kepala Bagian Materil Ditjen Postel, Kasubdit Konvensi, Direksi Perumtel, pejabat teras Perumtel dan staf dari Ditjen Postel serta Perumtel, bekerja tanpa melupakan waktu untuk mengejar target yang ditetapkan

Mengingat sempitnya waktu Team dari Ditjen Postel/Perumtel tidak sempat menyiapkan draft kontraknya, hingga draft kontrak disusun oleh pihak calon kontraktor. Sedangkan team memperjuangkan agar perjanjian tidak merugikan di pihak Indonesia. Dalam suatu perundingan biasanya penyusun draft perjanjian mempunyai kedudukan yang lebih menguntungkan, karena telah memperhitungkan segala aspek yang mungkin dituntut oleh pihak lawan berundingnya.

Dengan susah payah akhirnya ditutup secara berurutan 16 kontrak sebagai berikut :

- Kontrak No. 9/Pem/Tra/74 dengan Hughes Aircraft mengenai sistem definition SKSD (Amerika Serikat).
- Kontrak No.3/Pem/Pon/75 mengenai pembelian serta pemasangan exchange PRX dengan kapasitas 158.500 lu dengan Philips (Belanda).
- Kontrak No. 4/Pem/Pon/75 mengenai pembelian kabel dari NKF (Belanda).
- Kontrak No. 5/Pem/Tra/75 dengan Teleconsult mengenai jasa konsultasi dalam rangka SKSD (Amerika Serikat).
- Kontrak No. 6/Pem/Tra/75 mengenai pembelian satelit dengan bantuan untuk peluncuran dari Hughes Aircraft (Amerika Serikat).
- Kontrak No. 7/Pem/Tra/75 mengenai pembelian beberapa stasiun bumi termasuk stasiun pengendalian utama dengan Hughes Aircraft (Amerika Serikat).
- Kontrak No. 8/Pem/Tra/75 mengenai pembelian beberapa stasiun bumi dengan Philco Overseas Services (Ford) (Amerika Serikat).
- Kontrak No. 9/Pem/Tra/75 mengenai pembelian beberapa stasiun bumi dengan ITT Federal Electric International (Amerika Serikat).
- Kontrak No. 10/Pem/Pon/75 mengenai pembelian kabel beserta pemasangannya untuk luar Jakarta dengan BICC (British Insulated Calenders Cable/Inggris).
- Kontrak No. 11/Pem/Pon/75 mengenai pembelian Exchange Pentaconta dan Metaconta dari Bell Telephone Manufacturing Company (BTM) dari Belgia.
- Kontrak No. 12/Pem/Pon/75 mengenai pembelian dan pemasangan trunk exchange untuk SLJJ Jawa Bali dari CIT Alcatel (Perancis).
- Kontrak No. 13/Pem/Pon/75 mengenai pembelian dan pemasangan exchange END 22.000 lu dan incoming group-group selector untuk SLJJ dan 4.200 lu telex dari Siemens AG (Jerman Barat).
- Kontrak No. 14/Pem/Pon/75 mengenai pembelian dan pemasangan exchange END 68.200 lu dan telex 5.800 lu dari Siemens AG (Jerman Barat).
- Kontrak No. 21/Pem/Tra/75 mengenai alat-alat transmisi Spur route dari CIT Alcatel, Les Cable de Lyon, dan Thompson SFC (Perancis).
- Kontrak No. 27/Pem/Tra/75 pembelian dan pemasangan alat-alat untuk tail connection link dalam rangka SKSD dari Telecommunication Radio Elctriques

Digitized by Google

Telephoniques (TRT) dari Perancis.
- Kontrak No. 34/Pem/Tra/75 dengan Teleconsult Inc mengenai jasa-jasa konsultasi proyek Telekomunikasi Nusantara (Amerika Serikat).

Perjanjian dengan Nasa dilakukan oleh Dirjen Postel atas nama Pemerintah. Selain itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, juga dilakukan perundingan dengan perusahaan dalam negeri untuk pembangunan pekerjaan sipil, jaringan kabel, pengangkutan dan lain-lain. Untuk proyek pemasangan jaringan kabel di Jakarta, mengingat terbatasnya jumlah kontraktor yang dinilai cukup mampu melaksanakan, diambil kebijaksanaan untuk membagi pekerjaan kepada 7 kontraktor nasional. Sedangkan pekerjaan sipil yang berupa bangunan stasiun bumi, pembuatan jalan, gedung sentral telepon, telex, dilakukan dengan tender terbuka.

g. Proyek Kerja Sama Perumtel dan Pertamina

Sebelum usaha-usaha pencarian dana dari luar negeri dilakukan, telah dilakukan usaha mendapatkan dana dari dalam negeri untuk membiayai program pembangunan Perumtel. Salah satu yang berhasil ialah adanya kerja sama antara Pertamina dan Perumtel di mana Pertamina akan membangun proyek telekomunikasi di tempat-tempat Pertamina menjalankan operasinya. Proyek ini meliputi antara lain pembangunan 32.000 lu telepon di Jakarta, dan telex 2.100 lu di Jakarta. Pembangunan telepon 16.800 lu untuk luar Jakarta dan transmisi microwave Medan - Banda Aceh, Padang - Pakanbaru - Tanjung Pinang. Kontrak-kontrak Pertamina dengan Siemens untuk 32.000 lu di Jakarta dan dengan LM Ericsson segera ditanda tangani. Selain itu juga persiapan pelaksanaan pembangunan jaringan kabel lokal, dan junction yang merupakan back bone dari seluruh proyek telekomunikasi di Jakarta segera dimulai. Dalam bidang pembangunan gedung dan jaringan kabel duct, telah mulai dilaksanakan atas dasar surat perintah kerja dari Pertamina. Semula proyek-proyek ini diharapkan selesai pada akhir tahun 1975, sehingga dapat menunjang proyek-proyek lainnya. Namun kemudian ternyata apa yang direncanakan dan diharapkan tidak sesuai dengan yang terjadi kemudian.

Sejak akhir tahun 1974, kemampuan keuangan Pertamina mengalami kegoncangan, sehingga beberaa proyeknya termasuk proyek kerja sama dengan Perumtel, mengalami stagnasi, tidak bisa dilanjutkan. Perkembangan selanjutnya oleh Bappenas dengan suratnya tanggal 17 Juni 1975 No. 1921/WK/6/1975 ditetapkan bahwa proyek-proyek tersebut diserahkan kembali kepada Perumtel.

Atas dasar surat penegasan Bappenas ini, dilakukan negosiasi ulang dengan para kontraktor yang telah mulai bekerja atas dasar surat perintah kerja dari Pertamina. Perundingan ulang ini dilakukan oleh suatu Team yang terdiri dari wakil-wakil Departemen Perhubungan, Bappenas, Departemen Keuangan, Ditjen Postel, Perumtel dan Pertamina. Perjanjian serah terima proyek dari Pertamina kepada Perumtel ditandatangani tanggal 24 Juli 1975.

Permasalahan yang timbul ialah dana untuk proyek ini. Terlambatnya proyek ini bisa mengganggu proyek yang lainnya, sedangkan bila proyek ini dapat terselesaikan pada waktunya akan menunjang proyek secara keseluruhannya.

Digitized by Google

Di samping masalah ex proyek kerja sama Pertamina, Perumtel masih menghadapi masalah soal pembangunan jaringan kabel untuk luar Jakarta, sejumlah 69.700 lu. Dana yang diperlukan untuk proyek ini cukup besar. Pemerintah akhirnya memberikan pengarahan bahwa pengadaan kabel untuk proyek ini ditetapkan yang merupakan produksi dalam negeri. Sebenarnya untuk proyek kabel yang saat itu dikerjakan oleh BICC, Perumtel sudah memikirkan penggunaan kabel dalam negeri. Akan tetapi kondisi produksi kabel dalam negeri waktu itu tidak memungkinkan, di samping itu terikatnya sarat pinjaman yang harus menggunakan produksi kabel asal negara pemberi kredit.

h. Beberapa hal yang perlu diketahui

Meskipun tidak seluruh target proyek Telekomunikasi Nusantara tercapai, yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan Perumtel, akan tetapi harus diakui bahwa proyek besar ini berhasil. Proyek SKSD selesai tepat pada waktunya, kabel BICC selesai pada waktunya dan lainnya. Realisasi proyek ini dapat dilihat pada uraian berikut yang berkaitan dengan Repelita II. Karena pada hakekatnya Proyek Telekomunikasi Nusantara ini merupakan bahagian dari Repelita II Perumtel.

Pengawasan pelaksanaan proyek ini, hari ke hari dilakukan oleh Koordinator proyek, sedangkan setiap hari Kamis diadakan rapat mingguan yang lebih dikenal dengan rapat Kemisan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Postel, Soehardjono.

Mulai awal tahun 1976 sampai dengan pertengahan tahun 1978 setiap minggu Direksi Perumtel dan pejabat-pejabat lain mondar mandir Bandung-Jakarta untuk menghadiri rapat mingguan ini. Teknis kepemimpinan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dirjen Postel Soehardjono ternyata berhasil.

Setiap minggu dianalisa kemajuan proyek, hambatan yang timbul dan langkah-langkah penanggulangannya. Beberapa pejabat yang bertanggung jawab atas suatu hal, secara humor sering mengatakan bahwa hari Rabu adalah hari paling menakutkan. Karena pada hari tersebut harus mempersiapkan bahan-bahan untuk laporan pada hari Kamisnya. Apalagi kalau timbul masalah yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Rapat mingguan ini diadakan dari pagi sampai sore bahkan sering sampai jauh malam.

Pimpinan Ditjen Postel dan Perumtel selalu menegaskan bahwa suksesnya pembangunan yang besar ini, karena jerih payah seluruh karyawan Ditjen Postel dan Perumtel dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari yang berada di Pusat maupun di daerah-daerah terpencil. Satu sumbangan nyata lagi dari Ditjen Postel dan Perumtel bagi bangsa dan negara. Patut dicatat bahwa inisiatip proyek besar ini adalah dari Direktur Jenderal Postel beserta staff, serta Direksi Perumtel. Juga merupakan hal yang baru bagi Perumtel, yaitu dana untuk proyek ini bukan berasal dari APBN tapi dari pinjaman/kredit luar negeri (loan). Pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, yang mengusahakan kredit dari Bank Luar Negeri dan melalui Bank Indonesia, Perumtel diberikan pinjaman dari kredit luar negeri tersebut.

Digitized by Google

i. Repelita I dan Repelita II Perumtel

1) Repelita I

Ketika Repelita I dimulai, kondisi jaringan telekomunikasi sebagai berikut:

Jumlah nomor telepon adalah 172.000 satuan sambungan. Jumlah sentral telepon 532 sentral, terdiri dari 26 sentral otomat dan 506 manual. Sedangkan kantor telegrap berjumlah 495, terdiri dari 23 kantor telegrap berdiri sendiri, 48 kantor telegrap dirangkap kantor telepon, 21 kantor telegrap tambahan, 393 kantor telegrap cabang dan 5 kantor telegrap yang dikerjakan pos.

Untuk hubungan jarak jauh dipergunakan saluran kawat atau radio melalui petugas penyambung (operator). Hanya hubungan Jakarta-Bandung yang sudah menggunakan fasilitas SLJJ.

Kebijaksanaan dalam Repelita I, antara lain ditekankan pada peningkatan dan pengembangan hubungan jarak jauh melalui sistem Microwave Nusantara. Peningkatan dan penambahan telepon terutama dilakukan dengan pengotomatan sentral telepon di kota-kota besar dan penambahan kapasitas sentral telepon sebanyak 85.500 nomor telepon otomat dan 2.340 nomor telepon tangan (CB). Pembangunan telepon otomat sampai dengan akhir tahun 1974 adalah berjumlah 43.760 nomor. Sedang jumlah telepon CB hampir dikatakan tidak ada penambahan karena pembangunan hanya bersifat mengganti peralatan yang sudah usang.

Di bidang transmisi antara lain pembangunan gelombang mikro Jawa-Bali selesai Maret 1973 dan menghasilkan hubungan langsung antara Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta dan Denpasar.

Pembangunan penting lainnya ialah jaringan transmisi gelombang mikro Trans Sumatera. Tahap Jakarta-Palembang diselesaikan tahun 1974, sedang pembangunan tahap lainnya menuju ke Utara berjalan dengan pesat.

Pembangunan transmisi gelombang mikro Indonesia bahagian Timur dan proyek sistem hambur tropo Surabaya-Banjarmasin mulai dilaksanakan.

Hubungan transmisi gelombang pendek hubungan Jakarta-Medan, dan Jakarta-Pontianak dirampungkan. Lain dari pada itu, dikerjakan hubungan antara Ujungpandang-Manado, Ujungpandang-Kendari, Manado-Gorontalo, dan Ambon-Ternate. Sedang hubungan Maluku dan Kalimantan dimulai tahun 1973/1974.

Pada waktu itu Perumtel mempunyai hubungan (circuit) antar kota sekitar 1900 hubungan radio. Pada akhir Repelita II jumlah hubungan antar kota diperkirakan menjadi 4.000 hubungan.

2) Repelita II Perumtel

Repelita II Perumtel meliputi kurun waktu 1974 sampai dengan 31 Maret 1979, akan tetapi praktis pelaksanaan baru bisa dimulai pada tahun 1975. Proyek-proyek yang termasuk dalam Repelita II di bidang telekomunikasi meliputi antara lain Proyek Telekomunikasi Nusantara seperti yang telah diuraikan di atas, proyek trans-

Digitized by Google

misi gelombang mikro Trans Sumatera, Indonesia bahagian Timur, Hambur tropo Surabaya-Banjarmasin, perluasan SLJJ dan beberapa proyek rehabilitasi atau pembangunan sarana telekomunikasi lainnya.

Semula untuk Repelita II direncanakan untuk membangun telepon sejumlah 449.600 ss. Dari rencana tersebut karena adanya kenaikan harga dan lain-lain pelaksanaan pembangunan dikurangi dengan pencapaian target 376.300 ss telepon serta pembangunan sentral telex sejumlah 13.100 ss.

Target Repelita II bidang telepon yang telah dikurangi menjadi 376.300 ss, pada akhir Repelita II hanya bisa diselesaikan 224.300 ss. Sisanya sejumlah 152.000 ss dilanjutkan dalam Repelita III (merupakan carry over).

Target Repelita II bidang transmisi antara lain :

a) Melanjutkan pembangunan sistem transmisi gelombang mikro Trans Sumatera yang dapat diselesaikan dan dioperasikan mulai tanggal 7 Agustus 1975.
b) Melanjutkan pembangunan sistem transmisi gelombang mikro Indonesia bahagian Timur, yang telah diselesaikan dan diresmikan pada tanggal 16 Juni 1978.
c) Meneruskan pembangunan sistem transmisi hambur tropo Surabaya-Banjarmasin, yang telah selesai dan diresmikan tanggal 31 Desember 1975.
d) Penambahan saluran untuk gelombang mikro Jawa-Bali, tahap pertama sejumlah 492 saluran selesai 15 Juni 1976 dan tahap kedua 1134 saluran selesai 20 Agustus 1977. Dengan demikian jumlah saluran menjadi 2.568 saluran.
e) Pembangunan sistem gelombang mikro Surabaya-Pamekasan, dengan jumlah 96 saluran dan dapat diselesaikan Desember 1977.
f) Meneruskan pembangunan gelombang mikro Medan-Banda Aceh.
g) Pembangunan proyek SKSD (SKSD PALAPA) telah diselesaikan pembangunan 40 stasiun bumi, peluncuran 2 satelit PALAPA A1 dan 2. Proyek ini diresmikan tanggal 16 Agustus 1976.
   Pembangunan 10 stasiun bumi kecil yang mendekati penyelesaian, untuk lokasi Gunung Sitoli, Nabire, Cegerkalong, Dilim Tanjungpandan, Gorontalo, Luwuk, Ende, Tua, dan Wamena.
h) Proyek hubungan ekor (tail link) yaitu untuk menghubungkan stasiun bumi dengan coaxial cable di antaranya 12 hubungan radio TP-TV, 15 hubungan radio untuk televisi ke studio/pemancar TVRI dan 24 multipair cable sistem untuk telephone terminated di kantor telepon. Hubungan ekor Samarinda-Balikpapan dengan sistem gelombang mikro yang dapat menyalurkan telepon (2 arah) dan televisi (satu arah).
   Penyelesaian proyek hubungan ekor ini tahap pertama untuk semua hubungan telepon dan televisi bagi lokasi yang sudah ada studio TV dapat diselesaikan tanggal 17 Agustus 1976.
   Tahap kedua terdiri dari sisa hubungan TV dan gelombang mikro Samarina-Balikpapan selesai Juni 1977.
i) Proyek lintas simpang (spur route) yaitu untuk menghubungkan kota-kota yang tidak dilewati oleh jaringan gelombang mikro atau tidak mempunyai stasiun bumi, agar kota-kota tersebut dapat mengadakan SLJJ. Proyek ini meliputi 61 lo-

Digitized by Google

kasi di kota-kota meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan dan telah selesai dipasang untuk 40 lokasi. Yang siap dioperasikan meliputi 10 hubungan yaitu Jakarta ke Cibinong, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Cibinong ke Bogor, Bogor ke Cipanas, Bandung ke Purwakarta, Bekasi ke Karawang, Karawang ke Purwakarta.

j) Penyelesaian proyek transmisi VHF untuk Banjarmasin, Kuala Kapuas dan Pulang.

Proyek transmisi HF untuk lokasi Banjarmasin, Palangkaraya, Kualakurun, Buntok, Muara Tewe, Puruk Cahu, Pagatan, Kotabaru, Sampit dan Pangkalanbun.

Pembangunan bidang telepon diseluruh Indonesia yang direncanakan sejumlah 376.300 lu (semula direncanakan 449.600 ss), dapat diselesaikan sejumlah 224.300, sisanya merupakan carry over yang akan diselesaikan dalam Repelita III.

Pembangunan sentral telex dengan jumlah kapasitas 13.100 ss yang direncanakan, dapat diselesaikan 8.020 ss, sisanya dilanjutkan dalam Repelita III. Target pembangunan pada Repelita II Perumtel akan dapat dicapai bila kondisi dan persyaratan yang diperhitungkan semula dapat dipenuhi. Ternyata menjelang tahun kedua, ketiga dan keempat muncul kesulitan-kesulitan/kendala baik yang muncul dari dalam maupun dari luar Perumtel.

Masalah-masalah yang timbul dan merupakan kesulitan yang menghambat pelaksanaan pembangunan antara lain:

a) Beberapa kontrak dengan Kontraktor Asing timbul masalah kenaikan harga yang dimungkinkan dengan adanya pasal pada perjanjian yang mengatur soal kenaikan harga. Akibatnya dana yang disediakan tidak mencukupi untuk penyelesaian seluruh proyek.

Pada kontrak-kontrak tersebut tersedia dana lain-lain, yang dapat digunakan untuk menutup sebahagian kekurangan tersebut. Hal ini tidak begitu menolong karena terlambatnya pembangunan gedung, sambungan listrik PLN, pengadaan genset, AC dan lain-lain di mana sebahagian besar dari kegiatan ini terlambat karena dana dari Pemerintah yang terlambat.

Karena sulitnya tambahan valuta asing diperoleh untuk proyek-proyek ini, maka satu-satunya jalan yang ditempuh ialah pengurangan volume pekerjaan. Pengurangan volume proyek mendorong Perumtel segera membuat program ulang antara lain sebagai berikut: kontrak jaringan kabel luar Jakarta dengan BICC dikurangi sejumlah kurang lebih 17.000 sambungan, kontrak pembangunan sentral telepon di luar Jakarta dengan Siemens dikurangi dengan 14.500 sambungan, pembangunan jaringan kabel di beberapa lokasi di Jakarta ditunda, dan pembangunan/penyelesaian jaringan gelombang mikro Medan-Banda Aceh ditunda dalam Repelita III.

b) Barang-barang ex proyek Pertamina untuk Jakarta sejumlah 32.000 ss karena lamanya tersimpan di gudang khususnya peralatan sentral telepon mengalami kerusakan berat dan hanya bisa dimanfaatkan sejumlah kurang lebih 8.000 ss. Juga peralatan sentral telex sebahagian besar mengalami kerusakan.

c) Penyediaan dana untuk sebahagian besar proyek jaringan kabel luar Jakarta dalam rangka proyek 60.900 sambungan belum ada.

Digitized by Google

Akibat yang nyata dari terlambatnya proyek ini ialah kurang lebih 15% dari seluruh pembangunan sentral telepon menjadi tidak berdaya guna (idle).

d) Pencairan dana DIP 1976 dan DIP 1977 yang terlembat. Sampai akhir Repelita II hanya sebahagian saja yang dicairkan, padahal DIP 1976 dan 1977 mencakup kegiatan-kegiatan pokok antara lain pembangunan jaringan kabel luar Jakarta, pengadaan AC, power plant, gedung dan lain-lainnya.

e) Masalah tender yang sulit atau tertunda dilaksanakan karena berkaitan dengan kepastian tersedianya dana dari Pemerintah. Masalahnya apakah tender dulu dilaksanakan atas persetujuan dananya.
Masalah ini timbul karena persetujuan dana didasarkan kepada hasil evaluasi dari kontrak-kontrak Perumtel, di mana kontrak-kontrak ini merupakan hasil tender umum. Akibat dari tidak adanya kepastian prosedur persetujuan dana ini beberapa proyek menjadi terbengkalai antara lain jaringan kabel sekunder Medan, Palembang, Malang, Ujungpandang sehingga sentral-sentral telepon-telepon yang bersangkutan tidak dapat dioperasikan pada waktunya.

f) Masalah lain ialah munculnya pekerjaan tambahan pada beberapa bangunan sentral telepon dan bangunan SKSD, yang penyelesaiannya juga terlambat.

g) Harus diakui bahwa mengingat proyek-proyek yang termasuk dalam Repelita II merupakan proyek besar bagi Perumtel sampai saat itu.
Segi ketrampilan pengelolaan proyek yang belum begitu mapan merupakan sebahagian kecil aspek yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembangunan.

Akhirnya perlu dicatat di sini bahwa Anggaran Pembangunan untuk peningkatan jasa Telekomunikasi selama Repelita II bukan dari APBN, tetapi merupakan Anggaran Pembangunan/DIP Perum Telekomunikasi. Realisasinya selama Repelita II sebagai berikut :

Tahun (per 31-12-1978)	Plafon	Realisasi (per 31-12-1978)
1974	Rp. 10.739.585.729,-	Rp. 10.739.585.729,-
1975	Rp. 37.716.306.000,-	Rp. 37.716.306.000,-
1976	Rp. 68.856.435.000,-	Rp. 46.413.458.558,02
1977/1978*)	Rp. 71.901.266.000,-	Rp. 5.548.319.546,77
Jumlah	Rp. 189.213.592.729,-	Rp. 100.417.669.833,97

*) *Catatan: Anggaran Pembangunan PERUMTEL tahun 1977, menjadi satu dalam tahun anggaran 1978.*

Digitized by Google

a. Telepon dan Telegrap/Telex

PEMBANGUNAN	1974	1975	1976	1977	1978	Jumlah
TELEPON OTOMAT						
Sentral baru	3	2	6	11	15	37
Perluasan	–	–	11	6	–	17
Kapasitas	5.000 ss**)	18.600 ss	16.500 ss	57.720 ss	148.880 ss	246.700 ss
TELEPON MANUAL						
Sentral baru	3	*)	3	2	-10*)	
Kapasitas	2.172 ss	*)	5.284 ss	5.145 ss	961*)	
TELEGRAP						
Penambah						
Kantor	1	11	7	4	10	33
TELEX	600 ss	520 ss	800 ss	5.890 ss	3.340 ss	11.150 ss

*) Beberapa sentral diganti dengan sentral otomat

Digitized by Google

j. Repelita III PERUMTEL

Tidak berbeda dengan pembangunan Pos, maka dalam GBHN ditegaskan bahwa pembangunan Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya dan dilaksanakan sejajar dengan dan menunjang REPELITA.

Sasaran pembangunan Telekomunikasi dalam REPELITA III ialah memanfaatkan secara optimal hasil-hasil yang telah dicapai dan memeratakan pembangunan ke daerah-daerah terpencil, agar sebanyak mungkin rakyat Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

a) Kebijaksanaan dan langkah-langkah

Pembangunan-pembangunan PERUMTEL selama periode Repelita I dan Repelita II telah mengantarkan PERUMTEL kepada suatu keadaan di mana secara kuantitatip pelayanan jasa telekomunikasi telah berkembang dengan pesatnya.

Banyaknya Sentral Telepon Otomat pada akhir REPELITA I sejumlah 126.000 satuan sambungan dan pada akhir REPELITA II sejumlah 367.200 satuan sambungan. Pada akhir September 1979 menjadi 438.300 s.s.

Banyaknya pembicaraan telepon otomat (lokal + SLJJ) pada akhir PELITA I adalah 55,1 juta pulsa, naik 3.828%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pulsa pembicaraan telepon meningkat dengan pesat, sebagai akibat otomatisasi sarana telepon, transmisi yang tinggi keandalannya dan peningkatan fasilitas SLJJ. Pada awal 1980 telah 50 kota yang terangkum dalam jaringan SLJJ. Hal ini dimungkinkan terutama karena digunakannya Satelit PALAPA.

Sebagai kelanjutan dari apa yang tercapai pada akhir PELITA II, maka dalam REPELITA III ditempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang Telekomunikasi sebagai berikut :

1) memanfaatkan mutu pelayanan secara optimal hasil-hasil pembangunan di bidang telepon, telegrap, telex dan jaringan transmisi;
2) meningkatkan mutu pelayanan jasa telekomunikasi;
3) mengganti dan menambah beberapa fasilitas secara terpilih (termasuk penggantian Palapa Generasi Pertama);
4) memperluas pelayanan jasa telekomunikasi sampai ke tingkat Kabupaten, Kecamatan, daerah transmigrasi dan daerah-daerah terpencil sepanjang beban pembangunan dalam batas-batas yang wajar.
5) membina sistem komunikasi nasional yang serasi dengan melakukan pengawasan atas pemakaian jaringan telekomunikasi di luar PERUMTEL sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
6) membangun sistem Monitoring Radio Nasional guna mencegah saling mengganggu dalam pemakaian frekuensi.

b) Sasaran pembangunan

Digitized by Google

Sasaran fisik pembangunan di bidang telekomunikasi meliputi penyelesaian proyek-proyek REPELITA II yang belum selesai dilaksanakan sepenuhnya dan proyek-proyek baru. Sasaran tersebut meliputi:

1) pembangunan telepon otomat 232.000 s.s. (satuan sambungan), yang terdiri dari 152.000 s.s. kelanjutan REPELITA II (carry over) dan 80.000 s.s. pembangunan baru. Dari 80.000 s.s. itu, 7.000 s.s. dibangun di tingkat kabupaten, kecamatan dan daerah terpencil.
2) peningkatan pelayanan telepon umum di kota-kota besar sekitar 1% dari jumlah langganan.
3) pembangunan telex 3.910 s.s.
4) penyelesaian pembangunan proyek gelombang mikro Medan-Banda Aceh.
5) penambahan kanal SKSD.
6) perluasan kapasitas gelombang mikro Jawa-Bali dan Indonesia Bagian Timur dan Hambur Tropo.
7) peluncuran Palapa Generasi Kedua (Palapa B1 dan B2), masing-masing pada tahun 1983 dan 1984.
8) pembangunan Sistem Monitoring Radio Nasional guna mencegah saling mengganggu dalam pemakaian frekuensi.
9) pembangunan 27 Stasiun Bumi Kecil (SBK). Sesuai dengan pengarahan BAPPENAS jumlah ini ditambah dengan 48 SBK sehingga menjadi 75 SBK. Lampiran
10) peningkatan kemampuan PERUMTEL di bidang administrasi, keuangan, personalia, pemakaian sarana dan pelayanan kepada masyarakat.

c) Proyek Jaringan Monitoring Frekuensi Radio

Tujuan pembangunan Proyek Jaringan Monitoring Frekuensi Radio ialah untuk mengelola frekuensi radio yang telah dijatahkan, supaya tidak terjadi gangguan yang merugikan (interferensi) dan agar frekuensi dimanfaatkan secara efisien. Juga untuk mengawasi komunikasi radio atau pemancar yang beroperasi secara tidak sah (tanpa ijin).

Mengingat salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi cq Direktorat Pengendalian Frekuensi, melaksanakan pengelolaan frekuensi radio, penelitian dan analisa pemakaian gelombang radio, baik untuk telekomunikasi di dalam negeri maupun dengan luar negeri, maka Ditjen Postel juga melaksanakan pembangunan Proyek Jaringan Monitoring Frekuensi Radio.

Sasaran pembangunan Jaringan Monitoring Frekuensi Radio Nasional direncanakan meliputi 5 (lima) buah Stasion Monitoring Tetap dan 15 (limabelas) buah Stasion Monitoring Bergerak.

1) Lokasi dari Stasion Monitoring Tetap 5 buah di: Jakarta, Tarakan atau Samarinda, Medan, Kupang dan Merauke.
2) Lokasi dari Stasion Monitoring Bergerak 15 buah di: Jakarta, Tarakan atau Samarinda, Medan, Kupang, Merauke, Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Ambon dan Jayapura. Berhubung keterbatasan dana maka dalam REPELITA III hanya akan dibangun Stasion Moni-

Digitized by Google

toring Tetap Jakarta dan Tarakan disamping limabelas buah Stasion Monitoring Bergerak tersebut di atas.

3) Dengan akan dibangunnya Jaringan Proyek Monitoring Radio Nasional maka DITJEN POSTEL, satu-satunya Instansi yang berhak memberikan ijin Komunikasi Radio, akan dapat mengadakan pengawasan terhadap ijin-ijin yang telah dikeluarkan dan untuk seperlunya merencanakan penggunaan spektrum frekuensi. Jaringan Monitoring juga merupakan sarana untuk manajemen frekuensi. Kecuali untuk kepentingan dalam negeri "Jaringan Monitoring Radio Nasional" sejauh mungkin juga akan diikutsertakan dalam "Jaringan Monitoring Internasional"

k. Potensi dan Produksi PERUMTEL

a) Pontensi

Dalam Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I, telah didramatisasikan pembangunan Jalan Pos Raya Daendels yang sebagian besar menyusur pantai atau melalui tanah datar. Pembangunan Telekomunikasi di Indonesia yang telah diuraikan dalam Bab Subbab 1 di atas, kalau didramatisasikan akan melebihi drama pembangunan Jalan Pos Raya Daendels karena meliputi Nusantara dalam rangka Wawasan Nusantara.

Pembangunan menara-menara di atas bukit dan gunung, cukup memberi gambaran betapa sulitnya untuk mewujudkan stasiun-stasiun penghubung seperti yang telah disinggung dalam pembangunan Microwave Lintas Sumatera. Lereng gunung harus didaki, lembah harus dituruni dengan membuat jalan untuk mengangkut peralatan dan perlengkapan bagi pembangunan menara-menara tersebut. Berapa menara yang telah didirikan di tempat-tempat ketinggian itu selama ini, belum tercatat jumlah seluruhnya dalam buku ini. Transmisi gelombang micro itu memang tanpa kawat, namun perhubungan radio ini tidak bisa menembus pegunungan yang tinggi begitu saja. Demikian pula pembangunan stasiun-stasiun bumi yang tersebar di beberapa tempat tidak merupakan pembangunan yang mudah dilihat dari segi pengangkutan. Pembangunan-pembangunan yang spectaculair dilihat dari segi budget dan pelaksanaannya, tidak perlu didramatisasikan lebih lanjut dalam penulisan sejarah ini karena fakta sudah cukup berbicara daripada kata.

Potensi PERUMTEL dengan unit-unit usahanya dan berbagai kemudahannya sebagai hasil pembangunan selama Pelita I dan Pelita II di bidang Telegrap, Telex dan Telepon dapat diikuti pada Lampiran 15 s/d Lampiran 23.

b) Produksi Jasa Telekomunikasi

Jumlah pegawai PERUMTEL pada akhir tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 berturut-turut 22.957, 24.558, 25.268 dan 26.179. Dengan jumlah tenaga kerja yang cukup memadai, yang menangani potensi yang berupa unit-unit usaha dan yang

Digitized by Google

memberi pelayanan kepada pemakai, maka produksi di bidang telegrap, telex dan telepon tiap tahun meningkat. Jumlah pemakaian pulsa melonjak dan permintaan pemasangan sambungan telepon terus mengalir tak terlayani atau sulit memperoleh sambungan telepon baru di daerah-daerah tertentu. Kesadaran masyarakat terhadap modernisasi dalam komunikasi makin tinggi. Bagi yang mampu memiliki sambungan telepon merupakan penghematan untuk mengurangi perjalanan ke luar rumah. Bagi dunia business memiliki sambungan telepon berarti mempercepat proses transaksi yang dapat memberi keuntungan. "Kalah cepat tidak dapat!", adalah kenyataan bagi usahawan yang tidak memiliki sarana komunikasi yang vital ini yang dapat meniadakan dimensi jarak dan mengurangi waktu.

Berapa volume, produksi PERUMTEL, dapat diikuti pada data sampai dengan tahun 1978 pada lampiran 22 sampai dengan 29.

Digitized by Google

2. Kegiatan Di Bidang Industri Telekomunikasi

a. Berdirinya P T Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Seperti dikemukakan dalam Bab I.2 yang menyebut unsur industri maka satu-satunya Badan usaha milik Negara dalam lingkungan Departemen Perhubungan cq Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, yang bergerak dalam industri telekomunikasi adalah P T Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) disingkat: P T INTI (Persero).

P T INTI (Persero) merupakan suatu Badan Hukum yang berdiri sendiri dan berstatus Perusahaan Perseroan, yang menjelma dari kegiatan yang berkaitan dengan P.N. Telekomunikasi.

Sejak didirikan hingga sekarang P T INTI (Persero) berkedudukan di komplek ex Laboratorium P.T.T. Jalan Mohamad Toha No. 77 Bandung.

Perkembangan P T INTI (Persero) dimulai sejak kerja sama antara P N Telekomunikasi dengan Siemens A.G. pada tanggal 25 Mei 1966, dan pelaksanaanya dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi, disingkat menjadi L.P.P. POSTEL.

Untuk merealisasi kerja sama tersebut pada tanggal 17 Pebruari 1968 dibentuk satu Bagian Pabrik Telepon dalam organisasi LPP POSTEL. Dengan adanya unsur "industri" pada lembaga ini, maka selanjutnya LPP POSTEL diubah menjadi Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Industri Pos dan Telekomunikasi yang disingkat L.P.P.I. POSTEL.

Pada tanggal 22 Juni 1968 industri telekomunikasi yang berpangkal pada Bagian

Digitized by Google

Pabrik Telepon, diresmikan pembukaannya oleh Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri EKUIN - Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX.

Pada tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 1970, diadakan Rapat Kerja Pos dan Telekomunikasi di Jakarta. Hasil-hasil Rapat Kerja tersebut antara lain: LPPI POSTEL diberi waktu lebih kurang 4 tahun untuk mempersiapkan diri agar dapat berdiri sendiri di bidang keuangan, kepegawaian dan peralatan.

Pada tahun 1971 diadakan pengembangan/pemisahan antara:

1). Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel yang mempunyai tugas pokok dalam bidang: pengujian, penelitian dan pengembangan sarana Pos dan Telekomunikasi, baik dalam teknis-teknologis maupun teknis-operasionil.
2). Bidang Produksi sebagai Badan Hukum yang berdiri sendiri dengan tugas pokok memprodusir sarana-sarana/alat-alat telekomunikasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Km.32/R/Phb-73 tertanggal 8-3-1973 ditetapkan langkah-langkah berikut:

- Dalam tubuh LPPI POSTEL diresmikan Bagian Industri telekomunikasi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 1968 di Bandung.
- Untuk keperluan industri telekomunikasi tersebut di atas, ditetapkan bentuk usaha dan bentuk hukum yang sebaik-baiknya sehingga mendapatkan cukup fasilitas dalam lingkungan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Industri Pos dan Telekomunikasi - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- Dalam tahun 1972 struktur organisasi formil Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Industri Postel (LPPI POSTEL) telah diubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel (LPP POSTEL).
- Berhubung dengan itu dianggap tepat apabila industri yang tersebut di atas ditetapkan sebagai Proyek Industri Telekomunikasi yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel (LPP POSTEL).
- Proyek Industri Telekomunikasi tersebut dipimpin Oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel yaitu Ir. M. Junus.

Maksud dan tujuan dari pada Proyek Industri Telekomunikasi ialah:

- Meningkatkan produksi-produksi dalam negeri yang berupa alat-alat/perangkat telekomunikasi baik untuk memenuhi kebutuhan Perum Telekomunikasi maupun badan/organisasi lainnya yang ada di Indonesia ataupun untuk kepentingan export.
- Penghematan devisa bagi kebutuhan alat-alat/perangkat telekomunikasi.
- Membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung sejumlah besar tenaga kerja.

Tugas Proyek dimaksud adalah merencanakan dan menetapkan:

- Bentuk usaha dan bentuk hukum badan-badan usaha perindustrian telekomunikasi yang diperlukan.
- Peraturan-peraturan tentang pemisahan atau penyediaan materiil dan fasilitas dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel untuk dimanfaatkan oleh Badan Usaha Perindustrian Telekomunikasi yang bersangkutan.

Digitized by Google

– Tata cara dan Prosedur pendirian badan hukum perusahaan Perindustrian Telekomunikasi dengan kemungkinan mengikut sertakan modal dalam/luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1974 tentang: Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Industri Telekomunikasi, Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan perlu dijadikan suatu badan pelaksana kegiatan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam meningkatkan dan mengembangkan prasarana telekomunikasi.

– Agar pelaksanaan kegiatan produksi tersebut di atas dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidangnya, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1969.
– Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 penyertaan Negara dalam rangka pendirian suatu perusahaan perseroan (persero) diatur dengan Peraturan Negara.
– Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi.
– Pelaksanaan pendirian Persero dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1969.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974, Akte Notaris Abdul Latief Jakarta No. 322, proyek industri telekomunikasi diubah bentuknya menjadi P T Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sejak tanggal 30 Desember 1974. Dengan modal dasar perseroan berjumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), dan modal perusahaan yang ditempatkan besarnya Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) serta modal yang ditempatkan telah disetor penuh sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dimulailah tugas P T Inti dengan susunan Direksi:

Direktur Utama : Ir. M. Junus
Direktur : Drs. Abdul Talib Rachman
Direktur : Mochamad Dahlan, Bc.T.T.

Dewan Komisaris P T INTI (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 25 Pebruari 1975 Nomor 206/MK/IV/2/1975 adalah:

Komisaris Utama: Soehardjono
Komisaris : Drs. A.K.M. Husein
Komisaris : Ir. Sukarno Abdulrachman.

Digitized by Google

Kemudian berdasarkan Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel tertanggal 5 Maret 1974 No. 310/TK/LPP perihal Tanah dan Bangunan di Kompleks Jalan Mohamad Toha No. 77 Bandung kepada Diruttel dan Surat Diruttel tertanggal 3 April 1974 No. 4138 dan Surat Dirjen Postel tertanggal 11 Juli 1975 No. 5546 maka seluruh tanah dan bangunan serta inventaris yang ada di Jalan Mohamad Toha No.77 Bandung, dan Jl. Moh. Toha Km 6,4 Palasari Bandung dipisahkan dari inventaris Perum Telekomunikasi untuk dimasukkan dalam modal/inventaris P T INTI (Persero).

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 234/KMK.06/1978 tanggal 12 Juni 1978 ditetapkan susunan Direksi untuk masa berikutnya ialah:

Direktur Utama : Ir. M. Junus
Direktur : Drs. Abdul Talib Rachman
Direktur : Tjaroso, Bc.T.T.
Direktur : Soebijanto Bc.T.T.

Perlu dikemukakan, bahwa Soebijanto Bc.T.T. almarhum berjasa sebagai perintis Bagian Pabrik Telepon sejak sebelum tahun 1968.

Dalam tahun 1978 Dewan Komisaris P T INTI (persero) diganti sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 13 Desember 1978, no. 492/KMK.001/1978 sebagai berikut:

Komisaris Utama: Drs. Suryadi
Komisaris : Drs. A.K.M. Husein
Komisaris : Ir. Sukarno Abdulrachman.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut hingga tanggal 22 Januari 1980 belum mengalami perubahan.

b. Industri Telekomunikasi

Dalam Pelita II telah disebutkan, bahwa kebanyakan alat-alat telekomunikasi berasal dari import, sedang kebutuhannya cukup besar, maka diusahakan produksi dalam negeri. Berhubung pembeli alat-alat ini terbatas, adalah penting untuk merencanakan pengembangannya industri ini secara teliti.

Untuk memenuhi kebutuhan akan perangkat telekomunikasi itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1974 tanggal 23 September 1974 tentang penyerahan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Industri Telekomunikasi, dengan Akta Notaris Abdul Latif No. 322/1974 telah didirikan P T Industri Telekomunikasi Indonesia disingkat P T. INTI (Persero) P T ini, secara teknis bertanggung-jawab kepada Menteri Perhubungan, sedangkan pengesyahan Anggaran Belanja oleh Menteri Keuangan selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Tujuan didirikannya P T INTI adalah untuk mengurangi ketergantungan sarana Telekomunikasi dari Luar Negeri dan menghemat devisa Negara dan menjaga sta-

Digitized by Google

bilitas serta kontinuitas pembangunan per-telekomunikasi-an dengan adanya produksi Dalam Negeri.

P T INTI dalam Pelita antara lain bertugas menyediakan tahap demi tahap, kebutuhan peralatan telekomunikasi, untuk unit-unit usaha dan instansi-instansi dalam lingkungan Departemen Perhubungan. Juga penyediaan kebutuhan peralatan telekomunikasi untuk instansi-instansi di luar Departemen Perhubungan dan swasta yang dapat menunjang kelancaran roda Pemerintahan, perekonomian dan pembangunan.

Perkembangan P T INTI dimulai sejak kerja sama antara P N Telekomunikasi dengan Siemens A.G. pada tanggal 24 Mei 1966, dan pelaksanaannya dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel, kemudian terbentuk satu bagian Pabrik Telepon yang seterusnya akan menjadi salah satu bagian Industri dalam P T INTI.

Bentuk kerja sama teknik tersebut dilanjutkan dalam masa terbentuknya P T INTI, sejak periode 1974 sampai dengan periode 1980, yang tercatat sebagai berikut:
"Sebagai tindak lanjut dari pada kerja sama antara P N Telekomunikasi dengan Siemens A.G., yang sudah dimulai pada tahun 1966, maka pada tanggal 19 Maret 1974 diadakan kembali perjanjian kerja sama antara PT INTI dengan Siemens A.G. Jerman Barat.
Bentuk kerja sama tersebut meliputi perakitan/pembuatan :
- *Sentral telepon otomat sistem E.M.D. (Rock, Panil, Role, Wessel Board, Wahlerrahmen, IDF, MDF)*
- *Pesawat Telepon Meja.*

Untuk memenuhi kebutuhan/permintaan dari Perum Telekomunikasi dalam kebutuhan peralatan/perangkat telekomunikasi, maka untuk kebutuhan tersebut di atas perlu kerja sama teknik dengan BELL. Pada tanggal 13 Juni 1975 diadakan kerja sama teknik tersebut dengan dasar agreement No. 11/Pem/PDN/75 tertanggal 15 Pebruari 1975 antara Perum Telekomunikasi dan BELL, serta kerja sama teknik PT INTI dan BELL - Belgia.

Kerja sama teknik tersebut memerlukan sarana tempat kerja yang harus diadakan dan karena dirasa sangat perlu untuk perkembangan kelanjutannya pada P T INTI. Maka pada tahun 1975 dilakukan pengadaan tanah dan bangunan yang memadai untuk keperluan sarana pabrik tersebut di atas, di samping untuk keperluan perkembangan pembangunan PT INTI masa-masa mendatang.

Sejak April 1975 pelaksanaan pembangunan pabrik itu dimulai dengan luas lantai ± 3.700 m² bertempat di Jalan Mohamad Toha KM 6,4 (Palasari) Bandung.

Pabrik tersebut dapat dimulai beroperasi pada tahun 1976. Produksi-produksinya meliputi pekerjaan perakitan/pembuatan:
- Sentral telepon otomatsistem crossbar Pentaconta.
- Pesawat Telepon.
- P.A.B.X./Pentaconta.
- Pair Saver.

Digitized by Google

Dengan Japan Radio Coy Ltd. (J.RC) ini PT INTI telah banyak mengadakan kerja sama teknik sebelumnya. Penjajagan mulai sebelum tahun 1974 dan pada peningkatan selanjutnya dengan perjanjian pada tanggal 25 Agustus 1976.

Perjanjian ini termasuk pengiriman tenaga-tenaga Indonesia untuk mendapat latihan/pendidikan dan pengalaman di J.R.C. Jepang. Dalam kerja sama teknik mencakup pekerjaan perakitan/pembuatan alat-alat/perangkat telekomunikasi.

- Sistem HF, VHF, UHF, LHF Transceiver, HV Transmitter, HF Receiver.
- VHF Sambungan telepon kendaraan bermotor (STKB)
- Sambungan telepon jarak jauh (STJJ)
- Stasiun Bumi Kecil, dan
- Peralatan telekomunikasi lainnya.

Dengan makin banyaknya kebutuhan peralatan telekomunikasi dalam negeri dan sebagai penunjang sarana Perum Telekomunikasi dan untuk memenuhi penambahan-penambahan peralatan tersebut maka diadakan lagi perjanjian kerja sama PT INTI dengan Nippon Electric Company Ltd (N.E.C. Co Ltd) Sumitomo. Perjanjian tersebut ditanda tangani pada tanggal 19 Juli 1978. Perjanjian ini meliputi juga pengiriman tenaga-tenaga Indonesia untuk mendapat latihan/pendidikan dan pengalaman di N.E.C. Jepang. Kerja sama tersebut meliputi pekerjaan perakitan/pembuatan peralatan Radio Multiplex.

Di samping meningkatnya kebutuhan sarana telekomunikasi, di bidang hubungan antar manusia, diperlukan hubungan komunikasi data, yang sangat diperlukan sekali untuk masa sekarang dalam menunjang sarana pembangunan nasional.

Fungsi komunikasi data, untuk mengetahui keadaan situasi alam sekeliling pada masa/waktu sekarang dan kemungkinan beberapa waktu/jam kemudian. Peralatan ini sangat diperlukan oleh Pusat Meteorologi dan Geofisika.

Untuk menunjang sarana pembangunan komunikasi tersebut, maka PT INTI mengadakan kerja sama teknik dengan V.I.Z. Manufacturing Corporation mulai bulan Oktober 1978. Kerja sama tersebut meliputi pula pengiriman-pengiriman tenaga Indonesia untuk mendapat latihan/pendidikan dan pengalaman di pabrik VIZ manufacturing corporation Amerika Serikat.

Hasil-hasil pekerjaan perakitan/pembuatan peralatan ialah:

- Radio Sounde dan
- Wind sounde.

Di samping kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pada PT INTI terdapat bengkel penunjang yang disebut Bengkel PUSAT. BENGKEL PUSAT PT INTI yang menunjang kebutuhan pabrik, meliputi pekerjaan-pekerjaan dalam bidang perkakas plastik, mekanik, konstruksi dan hasil-hasil produksi dari Bengkel Pusat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan part-part dalam lingkungan PT INTI sendiri maupun kebutuhan di luar perusahaan.

c. Repelita III Industri Telekomunikasi

Digitized by Google

1) Kebijaksanaan dan langkah-langkah.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah dibidang industri telekomunikasi dalam REPELITA III adalah:

Pembinaan industri telekomunikasi dalam negeri menuju standarisasi peralatan yang sesuai keperluan dalam negeri, antara lain perangkat telepon, telegrap, telex, kabel, peralatan transmisi dan komponen-komponen lainnya.

2) Sasaran pembangunan.

a) Sasaran strategi

(1) Memperluas kesempatan kerja.
(2) Meningkatkan "transfer of know-how" dan teknologi.
(3) Meningkatkan "local content" dan mengurangi ketergantungan dari luar negeri dan peningkatan devisa.
(4) Melaksanakan Keppres 14/1979 dalam pembinaan industri telekomunikasi.

b) Sasaran teknis.

(1) Standarisasi sistem switching nasional.
(2) Standarisasi pesawat telepon (1980).
(3) Produksi telekomunikasi pedesaan.
(4) Standarisasi sistem transmisi (1980).
(5) Produksi Stasion Bumi Kecil (SBK).
(6) Persiapan produksi radio maritim.
(7) Peningkatan local content radio sonde/wind sonde s/d 60 prosen dan memperbesar kapasitas s/d 25.000 set per tahun (1980/1981).

3) Evaluasi pelaksanaan tahun anggaran pertama REPELITA III

Realisasi tahun pertama REPELITA III dapat dievaluasikan dalam 3 bidang: administrasi/keuangan, bidang produksi dan bidang pemasaran.

a). Bidang Administrasi/Keuangan.

(1) Pendapatan (penerimaan eksploitasi) s/d September 1979 tercapai Rp.1.337.843.000,- atau 64 prosen dari target.
(2) Biaya eksploitasi s/d 30 September 1979 terrealisir Rp.1.192.814.000,- atau 60 prosen dari target sehingga hasil operasionil yang diperoleh Rp.145.029.000,- atau 126 prosen dari target.
(3) Realisasi anggaran kas diperoleh saldo akhir kas Bank sebesar Rp.252.969.000,- atau 170 prosen dari target.

Digitized by Google

Dari segi operasionil dapat dievaluasi sebagai berikut:

a) Operating ratio dicapai 89 prosen.
b) Liquidity ratio sesuai dengan target atau dalam batas tolok ukur.
c) Leverage ratio dicapai masih dalam batas tolok ukur.
d) Activity ratio juga dicapai dalam batas tolok ukur.
e) Profitability ratio umumnya dalam batas tolok ukur.

b) Bidang produksi.

Realisasi produksi s/d September 1979 adalah sebagai berikut:

(1) Bidang radio dan transmisi
   (a) Kerjasama teknik dengan JRC tercapai sebesar 469 set atau 81 prosen dari target.
   (b) Kerjasama teknik dengan Viz tercapai sebesar 3.875 set atau 33 prosen dari target.

(2) Bidang Switching
   (a) Kerjasama teknik dengan Siemens AG tercapai sebesar 24.400 buah atau 127 prosen dari target.
   (b) Kerjasama teknik dengan BTM tercapai 26.524 set atau 54 prosen dari target.

c) Bidang pemasaran.

Hasil operasionil pemasaran tahun 1979 dapat dievaluasikan sebagai berikut:

(1) Dari segi kontrak yang dihasilkan:
   (a) Bidang radio tercapai sebesar Rp.1.657.165.000,- atau 105 prosen dari target.
   (b) Bidang telepon kerjasama dengan Siemens AG tercapai 170 prosen dari target.
   (c) Bidang telepon kerjasama dengan BTM tercapai 71 prosen dari target.

(2) Dari segi rekanan: penjualan kepada PERUM Telekomunikasi tercapai 177 prosen dari target, Penjualan kepada Instansi Pemerintah lainnya tercapai 100 prosen dari target. Penjualan kepada swasta tercapai 48 prosen dari target.

4) Rencana Produksi Tahun 1980/1981.

a). Pelaksanaan pekerjaan sisa Proyek ex Pertamina 32.000 s.s. (satuan sambungan) merupakan penunjang stabilitas usaha.
b). Kerjasama dengan BTM:
   (1) Produksi 31.400 telepon set.
   (2) Produksi 1.400 set filter ato 8170.
   (3) Produksi 3.000 set PCB.

Digitized by Google

c) Kerjasama dengan Siemens
   (1) Produksi sisa 5.000 set telepon masterset 111 (untuk umum).
   (2) Menyelesaikan order Telnus 9.100 buah telepon.

d). Dibidang radio merencanakan produksi kurang lebih 233 unit radio sonde/wind sonde kurang lebih 6.000 set.
   (1) Dibidang plastik parts lebih kurang 70.500 buah parts.
   (2) Mekanik kurang lebih 2.167 buah parts.

d. Produksi PT INTI (Persero)

Berdasarkan kerja sama teknik yang telah diuraikan, maka PT INTI sampai dengan tahun 1980 dapat merencanakan produksinya sebagai berikut:

1) Bidang Switching Telephone.
   - Pesawat telepon/telepon meja
   - Sentral Telepon Otomat Sistem EMD
   - Sentral Telepon Otomat Sistem Crossbar Pentaconta
   - Key Telephone
   - P.A.B.X (T.R.O.)

2) Bidang Radio dan Transmisi.
   - Transceiver HF - SSB
   - Transmitter & Receiver SSB/ISB
   - VHF Single Channel
   - R.T.T.E. (Radio Telephone Terminal Equipment)
   - S.T.K.B. (Sambungan Telephone Kendaraan Bermotor)
   - S.T.J.J. (Sambungan Telepon Jarak Jauh) Subscriber Radio Telephone
   - Multi Channel Radio
   - Multiplex Equipment
   - Radio Marine Equipment
   - Peralatan Meteorologi & Geofisika
   - Stasiun Bumi Kecil
   - Peralatan telekomunikasi lainnya seperti:
   - Antenne, alat ukur khusus radio, spare part dan lain-lainnya.

3) Bidang Jasa:
   - Consulting
   - Survey
   - Instalasi
   - Service/maintenance
   - Sistem design.

Rencana hasil dan Hasil produksi tersebut di atas sangat membantu perkembangan per-telekomunikasi-an di kawasan Nusantara. Seperti misalnya produksi semen-

Digitized by Google

jak berdirinya PT INTI sampai sekarang (1974 sampai dengan awal tahun 1980) di antaranya yang bekerja sama/berhubungan dengan:

Perum Telekomunikasi dalam masa pembangunan ini memerlukan banyak sekali sarana/peralatan penunjang untuk dapat lebih memeratakan kebutuhan masyarakat dalam bidang hubungan jarak jauh maupun sedang.

PT INTI sebagai produser peralatan Telekomunikasi dalam memenuhi permintaan Perum Telekomunikasi memproduksi:

- Peralatan-peralatan pesawat Radio Komunikasi.
- Peralatan sambungan-sambungan kabel telepon.
- Peralatan S.T.J.J. (Sambungan Telepon Jarak Jauh).
- Peralatan S.T.K.B. (Sambungan Telepon Kendaraan Bermotor).
- dan Peralatan-peralatan telekomunikasi lainnya.

Untuk S.T.K.B. P T INTI membangun Gedung Stasiun & Peralatannya di Jalan Gatot Subroto Jakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan peralatan pesawat Radio Komunikasi di seluruh Pelabuhan Udara Perintis pada tahun 1976, PT INTI bekerja sama dengan "Proyek Peningkatan Fasilitas & Jasa Pelabuhan Udara Perintis", mengadakan sarana/peralatan Radio Komunikasi di seluruh Pelabuhan Udara Perintis.

Mulai tahun 1977 untuk memenuhi kebutuhan Nasional dalam rangka keamanan teritorial ataupun hubungan antara station-station pantai dengan kapal-kapal patroli, PT INTI bekerja sama dengan sarana Perhubungan Bea & Cukai/Direktorat Bea & Cukai, mengadakan sarana/peralatan Radio Komunikasi pada kapal-kapal patroli dan stasion-stasion pantai.

Dalam menghadapi pemilihan umum di Indonesia tahun 1977 maka pada awal tahun 1976 PT INTI telah menyiapkan sarana/peralatan telekomunikasi yang diperlukan. PT INTI bekerja sama dengan Badan Perbekalan & Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum, dalam pengadaan sarana/peralatan Radio Komunikasi, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Gedung Departemen Dalam Negeri, di Gedung Lembaga Pemilihan Umum di Matraman Raya dan juga peralatan telekomunikasi lainnya. Perlu dikemukakan bahwa awal dari adanya Saluran Telepon Kendaraan Bermotor (STKB) adalah untuk memenuhi sarana kebutuhan Radio Komunikasi dari Kendaraan Bermotor (mobil) yang dapat berhubungan dengan telepon langganan Perum Telekomunikasi baik secara lokal maupun interlokal pada waktu menghadapi Pemilu 1977.

Sekarang STKB sudah mulai di beberapa kota besar lainnya dan memasyarakat. Menghadapi sarana STKB ini PT INTI bekerja sama dengan Perum Telekomunikasi.

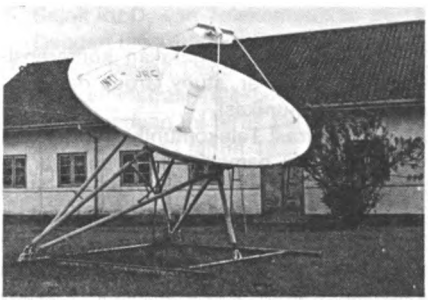
Dalam memenuhi kebutuhan "alat Telekomunikasi" dari Pusat Meteorologi & Geofisika PT INTI merintis pengadaan memprodusir peralatan-peralatan tersebut, dari mulai peralatan pesawat Radio Komunikasi di stasion-stasion Meteorologi & Geofisika sampai dengan peralatan-peralatan pesawat Radio pencari data (Radio Sonde dan Wind Sonde). Peralatan Radio Sonde dan Wind Sonde ini sangat diperlukan untuk mengenal situasi alam (Ramalan Cuaca, dan sebagainya).

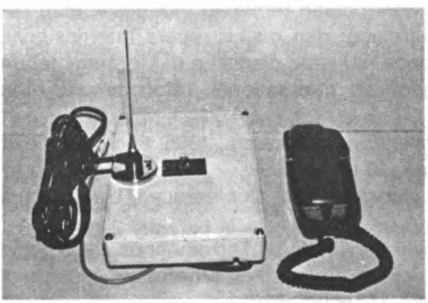
Dari segi keamanan PT INTI menjajagi segala kemungkinan kebutuhan peralatan Telekomunikasi/Radio Komunikasi, yang sangat dibutuhkan di dalam negeri.

Digitized by Google

Selain dari yang tersebut di atas, untuk meningkatkan partisipasi dalam menyongsong perkembangan teknologi nasional, pemerataan kebutuhan "hubungan" telekomunikasi PT INTI mempunyai banyak hubungan/bekerja-sama dengan Instansi-instansi Pemerintah ataupun swasta lainnya dalam memenuhi permintaan perangkat peralatan telekomunikasi.







Produksi PT INTI (dari atas ke bawah): pesawat telepon INTI III, Stasion Bumi Kecil (SBK) dan Sambungan Telepon Kendaraan Bermotor (STKB).

Digitized by Google

3. Hubungan Internasional

a. Fora Internasional Di Bidang Telekomunikasi Yang Penting.

Dalam periode tahun 1966 - tahun 1979 banyak diselenggarakan konferensi-konferensi, sidang-sidang, pertemuan-pertemuan, Seminar, study Group dan lain-lain forum yang bersangkutan dengan bidang telekomunikasi.

Dalam kegiatan hubungan internasional, Administrasi Telekomunikasi Indonesia (DITJEN POSTEL/PERUMTEL) turut serta pula dalam pameran-pameran internasional, yaitu pada pameran TELECOM 75 di Jenewa dari tanggal 2 - 8 Oktober 1975 dan pameran TELECOM 79 di Jenewa juga pada tanggal 20 - 26 September 1979.

Dalam uraian ini selanjutnya akan diutarakan beberapa forum Internasional yang dianggap penting dalam arti mempunyai nilai sejarah. Bukan berarti bahwa fora Internasional lainnya menjadi tidak penting, akan tetapi yang ditonjolkan dalam sejarah ini yang langsung mempunyai akibat positip terhadap Indonesia, atau setidak-tidaknya kepentingan Indonesia dilindungi dan diakui secara Internasional.

Hasil-hasil dari Plenipotentiary Conference ITU yang diadakan di Montraux tahun 1965 berupa suatu Convention menggantikan International Telecommunication Convention Geneva 1959.

International Telecommunication Convention Montreaux 1965 telah diratifisir oleh Indonesia dengan Undang Undang no. 10 tahun 1969.

Selanjutnya tahun 1973 diadakan lagi plenipotentiary Conference ITU di Malaga Torremolinos.

International Telecommunication Convention Malaga Torremolinos 1973 yang menggantikan International Telecommunication Convention Montreaux 1965, juga telah diratifisir dengan Undang Undang no. 11 tahun 1976.

Digitized by Google

Arti sebenarnya dengan ratifikasi ini, bahwa ketentuan Convention tersebut beserta Peraturan Administratipnya yaitu Telegraph Regulations, Telephone Regulations, Radio Regulations dan Additional Radio Regulations telah menjadi Hukum Nasional.

Plenipotentiary berikutnya akan diadakan dalam tahun 1982 di Nairobi, Kenya.

Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap anggota ITU (International Telecommunication Union), disamping mempunyai hak-hak juga harus tunduk kepada kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam convention.

Untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Convention (Konvensi) maupun peraturan-peraturan lainnya, negara anggota yang bersangkutan harus menunjuk suatu Departemen atau dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu.

Departemen atau dinas ini disebut Administrasi Telekomunikasi. Sejak tahun 1966 sampai tahun 1972 terdapat dualisme tentang instansi yang bertindak sebagai Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

Dewan Telekomunikasi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden R.I. no. 209 tahun 1964 yang seharusnya hanya merupakan suatu forum pertimbangan kepada Presiden di bidang Telekomunikasi, ternyata kemudian diberikan wewenang menjalankan tugas-tugas keprajaan yaitu mengelola frekuensi, menerbitkan ijin penyelenggaraan telekomunikasi dan lain-lain.

Sejak itu Dewan Telekomunikasi bertindak sebagai Administrasi Telekomunikasi.

Dengan dibentuknya organisasi baru yaitu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bawah Departemen Perhubungan, pada tahun 1966 timbul dualisme tentang Administrasi Telekomunikasi ini, apakah Ditjen Postel atau Dewan Telekomunikasi. Keadaan ini terus berlarut-larut hingga tahun 1972. Dengan keputusan Presiden R.I. no. 13 tahun 1972 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden R.I. no. 18 tahun 1975 kedudukan Dewan Telekomunikasi dikembalikan sebagai forum pertimbangan, tidak lagi menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Sejak tahun 1972 Administrasi Telekomunikasi Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Setelah mulai beroperasinya setasiun bumi Jatiluhur tahun 1969, tahun 1971 Indonesia menjadi anggota Intelsat.

Dalam sidang Assembly of Parties Intelsat tanggal 9 - 13 Oktober 1978 di Rio de Janeiro, Brazil, Indonesia mendapatkan kehormatan dengan terpilihnya calon dari Indonesia, yaitu Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid sebagai anggota Panel Legal Expert Intelsat. Hal ini patut dicatat mengingat saingan untuk menduduki posisi ini cukup berat.

Hasil Lobying pihak KBRI di Brazil (Duta Besarnya Sdr. A. Adiwoso), dan usaha-usaha pendekatan/mencari dukungan dari negara-negara sahabat oleh delegasi Republik Indonesia merupakan langkah-langkah yang menyebabkan calon dari Indonesia bisa terpilih. Delegasi R.I. ke sidang ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Postel, Drs. Suryadi dengan anggota delegasi antara lain Ir. Theo Suryawan, Ir. Willy Moenandir M, E. Soepandi Bc.A.P., Drs. Dasrul Rasul (Staff KBRI), Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid dan P. Sartono S.H. Agar dapat terwakili oleh seorang Gubernur dalam Intelsat, diisyaratkan suatu jumlah investmen share tertentu yang setiap kali berubah.

Digitized by Google

Indonesia, Thailand dan Philipina bergabung dalam satu group yang dinamakan Sout East Group (SEAG).

Jabatan Governor SEAG Intelsat diatur bergiliran. Sejak didirikannya SEAG Intelsat, Indonesia telah dua kali mendapat giliran sebagai Gubernur SEAG Intelsat yaitu Ir. J. Sutanggar Tengker dan Ir. A.Ph. Djiwatampu.

Sedangkan jabatan Gubernur pengganti (Alternate Governor) juga diatur secara bergiliran diantara Thailand Philipina dan Indonesia. Alternate Governor SEAG Intelsat ini berkedudukan di Washington DC.

Dalam Extraordinary Meeting Assembly of Parties yang diadakan tanggal 2-3 April 1979 di Manila, Intelsat dapat menerima penggunaan satelit Palapa B sebagai regional Satelit.

Seperti diketahui bahwa setiap anggota Intelsat yang akan membuat suatu sistem satelit Internasional yang berbeda dengan satelit Intelsat, harus dilakukan koordinasi dulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Intelsat Agreement). Dalam ketentuan article XIV(d) Intelsat Agreement diatur mengenai technical dan economic comptability dari suatu sistem yang dibangun oleh suatu anggota Intelsat di mana sistem itu terpisah dari sistem untuk hubungan Intenasional/regional. Koordinasi antara Indonesia dan Intelsat secara teknis formil sudah mulai dilakukan sejak Mei 1978. Hasil perundingan antara Indonesia dan Intelsat bulan Pebruari 1979 di Washington, diterima dalam sidang BG/T ke 27 (Sidang Technical Advisory Board of Governors Intelsat).

Sedang koordinasi mengenai economic comptability, yaitu regional satellite tersebut (Satelit Palapa B) tidak akan menimbulkan kerugian ekonomis kepada Intelsat (significant economic harm), telah dirintis sejak kunjungan Direktur Jenderal Intelsat ke Jakarta bulan Juni 1978.

Direktur Jenderal Intelsat mengajukan usulan pembatasan-pembatasan penggunaan satelit Palapa B sebagai regional satellit sebagai berikut:

1). Hanya diperbolehkan menampung lalu-lintas terbatas pada remote areas yang tidak tersambung dengan wide band facilities pada Intelsat Earth Stations.
2). Lalu-lintas lewat satelit Palapa B tersebut tidak melebihi 20% dari total lalu-lintas Internasional lewat satelit Intelsat antara negara ASEAN.

Usulan Direktur Jenderal Intelsat tersebut dibahas dalam sidang Board of Governors yang ke 36 bulan Januari 1979.

Tahap selanjutnya dilakukan pembicaraan yang lebih mendalam antara Gubernur SEAG Intelsat (yang saat itu dijabat oleh Ir. Ph. Djiwatampu) dengan pihak Dirjen Intelsat, yang akhirnya berhasil menelorkan suatu kesepakatan.

Khusus mengenai usulan pembatasan Dirjen Intelsat tersebut dirumuskan kembali oleh Chairman Board of Governor bersama-sama Dirjen Intelsat.

Sidang Board advise (rekomendasi) untuk disampaikan pada Assembly of Parties Intelsat, bahwa satelit Palapa B memenuhi ketentuan article XIV Intelsat Agreement dan dapat digunakan sebagai regional satellite sampai dengan tahun 1990.

Advise dari Board of Governor tersebut akhirnya dapat diterima oleh Extra-

Digitized by Google

ordinary Meeting Assembly of Parties yang diadakan tanggal 2 - 3 April 1979 di Manila.

Hal ini berarti secara resmi Intelsat dapat menerima rencana Indonesia untuk menggunakan satelit Palapa B sebagai regional satellite.

Hal yang penting dalam keputusan tersebut, bahwa pembatasan-pembatasan yang diusulkan oleh Dirjen Intelsat dihapuskan, dengan pengertian bahwa lalu-lintas melalui regional satelit tersebut tidak akan "mengambil" lalu-lintas Internasional Intelsat di kawasan ASEAN.

Delegasi Indonesia ke Extraordinary Meeting Assembly of Parties tanggal 1 - 3 April 1979 di Manila tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Postel Drs. Suryadi, dengan anggota delegasi Ir. Theo Suryawan, Ir. Willy Munandir M, Ir. A. Ph. Djiwatampu dan Ir. Remedi Peranginangin.

b. Kerja sama ASEAN di bidang telekomunikasi.

Tujuan dari Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan damai serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktip harus diabadikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia perlu diikuti secara seksama, agar dapat diketahui pada waktunya, kemungkinan-kemungkinan yang dapat menggoncangkan stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan Pelita ketiga, sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankannya.

Peranan Indonesia dalam memupuk kerja sama serta persahabatan antara negara-negara yang sedang membangun harus dipelihara dan lebih ditingkatkan untuk membantu mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru yang lebih adil. Di wilayah Asia Tenggara kerja sama dan organisasi ASEAN perlu lebih diperkuat untuk mempertinggi ketahanan nasional masing-masing negara dalam rangka ketahanan regional.

Untuk lebih memperkuat kerja sama ASEAN, di bidang telekomunikasi perlu dibentuk suatu bentuk kerja sama di antara Administrasi Telekomunikasi negara-negara anggota ASEAN.

Bentuk kerja sama ASEAN di bidang telekomunikasi yang lebih kongkrit dan bermanfaat untuk semua anggota ASEAN, adalah:

1). Pembangunan proyek Sistem Komunikasi Kabel Laut ASEAN (SKKL).
2). Pemanfaatan satelit Palapa untuk regional satellite dan telekomunikasi domestik negara-negara ASEAN.

Digitized by Google



Rio de Jáneiro 9 sampai 13 Oktober 1978.
Delegasi Indonesia pada Sidang Ketiga "Assembly of Parties Intelsat". Dari kiri ke kanan, Ir Willy Moenandir M, Drs Suryadi (ketua delegasi), Ir Theo Suryawan, P Sartono SH dan Drs Dasrul Rasul.

Digitized by Google

Ide untuk menyelenggarakan kerja sama ASEAN di bidang telekomunikasi ini yang mulai dibicarakan di antara negara-negara ASEAN pada tahun 1974, dalam waktu yang relatip singkat dapat dilaksanakan.

Pembangunan SKKL ASEAN untuk jalur Philipina - Singapore (SKKL ASEAN P-S) mulai beroperasi pada tahun 1978. SKKL ASEAN I-S (Indonesia - Singapore) beroperasi mulai April 1980.

Pembangunan proyek ini, selain dalam rangka mempererat kerjasama antar negara ASEAN, juga untuk menunjang sistem yang telah dipakai selama ini, yaitu melalui satelit INTELSAT, karena lalulintas telekomunikasi antara Indonesia dan Singapura sangat padat.

Sampai dengan akhir tahun 1979 tiga negara ASEAN telah menandatangani perjanjian penyewaan kapasitas transponder satelit Palapa untuk keperluan telekomunikasi domestiknya.

1) Proyek Sistem Komunikasi Kabel Laut 'ASEAN Indonesia-Singapore' (Proyek SKKL ASEAN I-S)

a). Sejarah Perkembangan SKKL.

Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dimulai dengan dikembangkannya kabel laut telegrap yang menggunakan getah perca (gutta percha) sebagai bahan isolator di tahun 1847.

Pada tahun 1850 kabel laut telegraph untuk pertama kali direntangkan menyeberangi English Channel oleh Brett bersaudara dengan menggunakan kapal "Goliath". Usaha ini kemudian dilanjutkan dengan penggunaan kawat pelindung (armour wires) pada tahun 1851. Lima tahun kemudian, Cyprus W. Field mencoba membangun kabel laut telegrap menyeberangi Samudra Atlantik yang menghubungkan Valentia (Ireland) dengan Newfoundland sejauh 3.200 km. Walaupun usaha ini ternyata gagal tetapi kabel ini dianggap sebagai kabel laut telegrap trans-Atlantic pertama.

Kemudian, tanpa mengenal lelah Field terus berusaha membangun kabel laut telegrap ini sampai akhirnya berhasil di tahun 1865.

Kabel laut telepon yang pertama dibangun pada tahun 1891 menghubungkan Inggris dan Perancis. Sejarah kemudian mencatat perkembangan SKKL di mana kabel koaksial mulai diperkenalkan pada tahun 1937, percobaan penggunaan submerged repeater (pengulang) pada tahun 1943, penggunaan polythene sebagai bahan dielektrik pada tahun 1944 dan penggunaan submerged repeater untuk pertama kali di tahun 1946.

Kemajuan di bidang teknologi elektronika membawa pula kemajuan baru pada SKKL dengan penggunaan komponen-komponen elektronika mutakhir. Kalau pada masa pertama digunakannya submerged repeater jumlah saluran telepon hanya berkisar 5 sampai 36 kanal (dekade 1946 - 1956), kini jumlah saluran telepon dapat mencapai 5.520 kanal atau 1 saluran TV + 1800 kanal telepon. Diperkirakan

Digitized by Google

jumlah saluran di masa mendatang dapat mencapai 14.400 kanal telepon.

Di Indonesia, SKKL telah dikenal sejak tahun 1881 dengan dibangunnya jaringan kabel laut telegraph Singapore - Jakarta No. 1 selanjutnya dibangun pula jaringan-jaringan kabel laut telegrap antara lain: Jakarta - Cocos (1908), Singapore - Jakarta No. 2 (1925), pengganti Singapore - Jakarta No. 1 (1954), Jakarta - Biliton dan Jakarta - Semarang.

Jaringan kabel laut telegrap tersebut berhenti beroperasi pada tahun 1966 dengan dicabutnya konsensi dari Cable & Wireless oleh pemerintah RI.

b) Manfaat SKKL

Dibandingkan dengan Sistem Komunikasi Satelit, SKKL dipandang kurang ekonomis bila ditujukan untuk komunikasi yang bersifat aneka ragam, artinya dapat menghubungkan banyak titik tujuan. Tetapi SKKL memiliki faktor lain yang menguntungkan yaitu waktu transmisinya yang jauh lebih singkat dibandingkan Sistem Satelit pada orbit geostasioner. Dengan demikian untuk jarak hubungan yang sangat jauh biasanya digunakan 1 hop Sistem satelit + jaringan SKKL.

Kebutuhan dunia akan telekomunikasi yang cepat, murah dan dapat diandalkan memaksa manusia membangun Sistem Telekomunikasi yang bersifat saling tunjang menunjang (diversity). Sistem seperti ini memungkinkan permintaan hubungan yang dapat diandalkan selama 24 jam sehari terus menerus dan kemanapun tujuan nya di seluruh dunia. Untuk memenuhi ini SKKL dan Sistem Komunikasi Satelit dapat saling isi mengisi, sehingga bila salah satu sistem tak dapat dipakai (gagal) maka sistem yang lain dapat menggantikannya.

Walaupun demikian, adalah sudah menjadi kewajiban untuk meneliti kelayakan dari pada sistem komunikasi yang akan dibangun, sehingga pemilihan antara kedua sistem tersebut dapat dilakukan setepat mungkin.

Proyek Sistem Komunikasi Kabel Laut ASEAN Indonesia - Singapore (SKKL ASEAN I-S) pertama kali dibahas dalam First SEA Cable Meeting tanggal 18 September 1974 di Manila. Dalam pertemuan tingkat Menteri negara-negara ASEAN, diputuskan untuk membentuk suatu Working Group khusus mempelajari kemungkinan pembangunan SKKL ASEAN. Tanggal 1-3 September 1976 di Bangkok diadakan Meeting of the Working Group on ASEAN Submarine Cable Network. Dalam meeting ini dibahas secara mendalam baik segi teknis maupun non teknis pembangunan proyek SKKL ASEAN. Tanggal 19-20 Januari 1977 diadakan Joint Meeting of the Working Group on Regional Satellite Communications System for ASEAN and the ASEAN Submarine Cable Network. Dalam meeting ini antara lain ditetapkan route SKKL ASEAN.

Meeting of the ASEAN Economic Minister yang diadakan awal tahun 1977 di Kualalumpur, antara lain memutuskan perlunya kerjasama ASEAN di bidang telekomunikasi yang meliputi:

- Direalisirnya ASEAN Regional Satellite.
- Pembangunan SKKL ASEAN.

Digitized by Google

Meeting tersebut juga membentuk suatu komisi yaitu Committee on Transportation and Communication ASEAN (Cotac), yang terdiri dari beberapa Sub Komite antara lain sub komite Postel ASEAN.

Sub Komite Postel ASEAN pertama kali mengadakan sidangnya tanggal 20 - 22 April 1977 di Yogyakarta.

Dalam Meeting ini diputuskan menerima hasil study Working Group tersebut, dan mengenai proyek SKKL ASEAN diputuskan antara lain sebagai berikut:

- SKKL ASEAN I-S (Indonesia - Singapore) diharapkan selesai tahun 1980/1981.
- SKKL ASEAN S-M (Singapore - Malaysia) tahun 1980/1981.
- SKKL ASEAN M-T (Malaysia - Thailand) tahun 1980/1981.
- SKKL ASEAN P-T (Philipina - Thailand) tahun 1982/1983.
- SKKL ASEAN P-S (Philipina - Singapore) tahun 1978.

Proyek SKKL ASEAN P-S teleh selesai September 1978 dan telah mulai beroperasi.

Tanggal 26 Juni 1977 di Singapore diadakan First Meeting of the ASEAN Minister of Transportation and Communication. Dan selanjutnya tanggal 29 Juni 1977 ditandatangani suatu MOU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah RI dan Singapore mengenai Pembangunan SKKL ASEAN I-S.

Sebagai kelanjutan dari MOU tersebut diadakan beberapa kali Rapat Koordinasi antara Telecome (Singapore) dan Perumtel, baik di Jakarta maupun di Singapore. Rapat koordinasi ini guna menyusun suatu Spesifikasi Tender. Tender dibuka tanggal 1 Pebruari 1978 dan ditutup tanggal 1 April 1978. Dari 5 perusahaan yang diundang hanya 3 yang mengajukan penawaran yaitu NEC/Jepang, Submarcom/Perancis dan STC/UK. Hasil evaluasi Tender dari Team gabungan Perumtel-Telecoms merecomendasikan NEC sebagai pemenang tender. Dengan penunjukan Direksi Perumtel dan GM Telecoms, NEC ditetapkan sebagai pemenang.

Dalam pelaksanaan pembangunan turut berpartisipasi PT INDOSAT, sebagaimana tercantum dalam Memorandum of Understanding Direktorat Jenderal POSTEL/ PERUMTEL dengan PT INDOSAT pada tanggal 14 Nopember 1977, mengenai perencanaan pembangunan dan operasional. Telah ditanda tangani pula perjanjian pada tanggal 16 Maret 1978 yang kemudian dibuat amandemennya pada tanggal 12 Agustus 1978, mengenai pembiayaan pembangunan proyek tersebut.

Proyek SKKL ASEAN dibangun sejak 10 September 1978 dan selesai pada akhir April 1980 dan diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1980 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Roesmin Nurjadin di Jakarta dan Menteri Perhubungan Republik Sigapura Ong Teng Cheong di Singapura.

2) Proyek Sistem Komunikasi Kabel Laut Medan - Penang (SKKL Menang)

Dalam acara kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Datuk Hoesen Onn ke Indonesia tanggal 6 Maret 1979 di Yogyakarta telah ditanda tangani suatu komunike

Digitized by Google



Inaugural Ceremony for the ASEAN Indonesia - Singapore Submarine Cable 8 Aug 1980



Jakarta - Singapura, 8 Agustus 1980.
Menteri Perhubungan RI Roesmin Nurjadin dengan didampingi Dirjen Postel Drs Surjadi (kiri) dan Dirut Perumtel Ir Willy Moenandir M (kanan, gambar atas) mengadakan pembicaraan telepon Internasional dari Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik Singapura Ong Teng Cheong di Singapura. Pada kesempatan tersebut Menteri Perhubungan Singapura didampingi oleh Telecoms Chairman Singapura Frank Yung (tengah) dan Dubes RI di Singapura Sudjatmiko.

Digitized by Google

bersama (joint Communique) antara ke dua Kepala Pemerintahan Malaysia dan Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Soeharto yang antara lain disepakati untuk membangun suatu proyek bersama di bidang telekomunikasi, yaitu proyek SKLL Medan - Penang.

Sebagai kelanjutan dari Komunike Bersama ini tanggal 29 Maret 1979 di Jakarta telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) antara Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Roesmin Nusjadin) dan Minister of Energy, Telecommunication and Post Malaysia (Leo Moggie) mengenai pembangunan SKLL Medan - Penang dan penyewaan kapasitas transponder satelit Palapa.

Dalam sambutannya Menteri Perhubungan antara lain dikatakan bahwa dengan disepakatinya pembangunan sistem komunikasi kabel laut antara Medan dan Penang merupakan upaya yang mempererat hubungan Indonesia dan Malaysia.

3) Pemanfaatan Satelit Palapa untuk Regional Satellite dan telekomunikasi domestik negara-negara ASEAN.

Sejak SKSD PALAPA direncanakan, di pihak Ditjen Postel dan Perumtel sudah timbul gagasan agar kelas satelit Palapa mengingat kemampuan kapasitasnya, dapat juga dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk keperluan domestiknya. Di samping itu juga dapat dimanfaatkan sebagai satelit regional, antara lain untuk hubungan lintas batas. Tanggal 19 - 20 Januari 1977 di Bangkok diadakan Joint Meeting of the Working Group on Regional Satellite Communications System for ASEAN and the Submarine Cable Network. Dalam meeting ini tawaran Indonesia pada prinsipnya diterima oleh negara-negara ASEAN.

Selanjutnya masalah ini oleh pimpinan Direktorat Jenderal Postel dan Perumtel disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan.

Dalam Meeting of the ASEAN Economic Minister yang diadakan juga dalam tahun 1977, antara lain diputuskan perlunya kerja sama ASEAN di bidang telekomunikasi dengan merealisir ASEAN Regional Satellite.

Selanjutnya masalah ini dibicarakan dalam Sidang Sub Komite Postel ASEAN yang pertama tanggal 20-22 April 1977 di Yogyakarta.

Dalam sidang ini kembali Indonesia menawarkan pemanfaatan satelit Palapa baik untuk keperluan domestik negara-negara ASEAN, maupun sebagai satelit regional, Uang sewa per-transponder per-tahun yang ditawarkan lebih rendah dari pada sewa ke Intelsat.

Sidang Sub Komite ini memberikan rekomendasi mengenai masalah penggunaan satelit Palapa sebagai berikut:

- Negara-negara ASEAN akan mempertimbangkan penggunaan satelit Palapa untuk keperluan telekomunikasi domestiknya.
- Akan diformulasikan kemungkinan pemakaian 1 transponder atau setengah

Digitized by Google

transponder.
- Dibentuk suatu Working Group untuk mempelajari kemungkinan penggunaan satelit Palapa sebagai regional satelit.
- Agar Komite Transport dan Perhubungan ASEAN memberitahukan kepada Komite yang menangani masalah Media Masa dan Sosial Budaya agar juga mempertimbangkan pemanfaatan satelit Palapa.

Indonesia dalam kesempatan itu juga menawarkan pemakaian satelit Palapa tanpa pembayaran, untuk kegiatan-kegiatan pertukaran kebudayaan, olah raga dan lain-lainnya.

Kelompok studi mengenai ASEAN Regional satelit dan hubungan lintas batas (The Study Group on ASEAN Regional Satellite and on Border Communications) sesuai dengan keputusan Sidang Sub Komite Postel ini, mengadakan pertemuannya pada tanggal 2-6 Juni 1977 di Bandung. Dalam pertemuan ini masalah-masalah lebih mendetail mengenai penggunaan satelit Palapa sebagai regional satelit dibicarakan.

Dalam pertemuan ini juga dirumuskan pengertian hubungan lintas batas. Pada prinsipnya negara-negara ASEAN dapat menerima pemakaian satelit Palapa sebagai regional satelit dan untuk hubungan lintas batas.

Keputusan-keputusan Sidang Sub Komite Postel ASEAN pertama tersebut, dan Hasil Kelompok Studi di Bandung dilaporkan dan dibahas pada Sidang Komite Transport dan Komunikasi ASEAN bulan Juni itu juga di Kualalumpur. Hasil-hasil kedua Sidang tersebut diterima dengan baik oleh Sidang Komite ini dengan Philipina (Commitee on Transportations and Communications ASEAN).

Tanggal 26-30 Juli 1977 Pemerintah Indonesia mengirim suatu delegasi ke Manila guna melakukan penjajagan dengan pihak Philipina mengenai penggunaan satelit Palapa, untuk keperluan domestik Philipina. Delegasi ini dipimpin oleh Dirjen Postel Soehardjono.

Dalam perundingan ini diputuskan antara lain bahwa:
- Lokasi untuk hubungan lintas batas adalah Manado dan Davao City, dan akan disalurkan melalui satelit Palapa.
- Pihak Philipina (Domsatphil/Philcomsat) menyatakan akan menyewa transponder satelit Palapa untuk telekomunikasi domestik dan televisi.
- Mengingat kondisi dari beberapa stasiun bumi yang akan dibangun oleh Philipina tidak begitu baik penerimaannya, dan juga Philipina sebagai negara ASEAN yang pertama akan menyewa, disepakati tarip sewa satu transponder satu tahun adalah sebesar US$ 693.000,- (dalam Sidang Sub Komite Postel di Yogyakarta ditetapkan sebesar US$ 750.000,-)

Tahap selanjutnya perundingan dilakukan dengan surat menyurat, ataupun mela-

Digitized by Google



Menteri Perhubungan RI Roesmin Nurjadin dan Menteri Tenaga, Telekomunikasi dan Pos Malaysia Leo Moggie sedang menanda tangani MOU di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1979 (atas). Delegasi RI pada Sidang AP-4 INTELSAT di Manila dipimpin oleh DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi pada tanggal 2-3 April 1979 (bawah).

Digitized by Google



Jakarta, 3 Maret 1979
DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi (ujung kanan) dan Mr. Sribhumi Sukhanetr sedang menandatangani MOU mewakili Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand.

Digitized by Google

lui telex sebelum dapat diadakan perundingan guna membicarakan draft perjanjiannya sendiri.

Pada tanggal 4 - 7 April 1978 di Manila diadakan pertemuan antara Team dari Indonesia dengan Team dari Philipina (Domsatphil)

Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembicaraan mengenai draft Perjanjian Penyewaan Kapasitas Transponder Satelit Palapa dan soal koordinasi teknis.

Tanggal 17-22 April 1978 di Manila, perundingan dilanjutkan untuk membicarakan masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam rapat sebelumnya, baik mengenai beberapa pasal dari draft Perjanjian, maupun hal-hal yang berkaitan dengan soal koordinasi teknik. Susunan Team dari Indonesia tetap seperti sebelumnya. Dalam pertemuan ini juga disepakati pokok-pokok dari draft Technical Memorandum of Agreement.

Dalam perundingan yang menjadi masalah cukup rumit ialah yang berkaitan dengan soal penangguhan perjanjian bila interupsi dalam space segment bukan disebabkan karena force majeur.

Tanggal 1 - 6 Juni 1978 di Manila diadakan lagi pertemuan antara Team Perumtel dengan team dari Philipina untuk menyelesaikan baik draft Perjanjian maupun draft Technical Memorandum of Agreement.

Perundingan ini berhasil menyelesaikan final draft Perjanjian dan Technical Memorandum of Agreement. Tanggal 23 Juni 1978 Team dari Philipina datang ke Jakarta, dan mengadakan perundingan lagi dengan pihak Indonesia. Hasil-hasil perundingan hanya berupa koreksi-koreksi kecil atas draft Perjanjian.

Tanggal 23 Juni 1978 dilakukan penanda tanganan Perjanjian Penyewaan Kapasitas Transponder Satelit Palapa antara pihak Indonesia dengan pihak Philipina dalam hal ini Domestic Satellite Philippines Inc./Domsatphil.

Upacara penanda tanganan Perjanjian ini disaksikan juga oleh pejabat-pejabat Departemen Perhubungan, Departemen Luar Negeri, Seknas ASEAN, Dirjen Postel, dan Duta Besar negara-negara ASEAN. Dalam perjanjian ini Philippina menyewa 1½ transponder untuk masa 5 tahun.

a) Dengan Malaysia

Pada tanggal 29 Maret 1979 di Jakarta diadakan pertemuan antara Direktur Jenderal Postel dengan Ketua Pengarah Jabatan Telekom Malaysia. Pada pertemuan tersebut disepakati antara lain soal penyewaan satelit Palapa untuk keperluan telekomunikasi Domestik Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sama ditanda tangani suatu Memorandum of Understanding antara Menteri Energi, Telekomunikasi dan Pos Malaysia dengan Menteri Perhubungan, masing-masing mewakili Pemerintahnya. Dalam MOU tersebut disepakati antara lain bahwa Malaysia akan menggunakan/menyewa satelit Palapa untuk telekomunikasi domestiknya. Pembi-

Digitized by Google

caraan lebih mendetail akan dilakukan sesegera mungkin.

Perundingan selanjutnya diadakan tanggal 5 - 7 Juni pembahasan draft Perjanjian tidak mengalami banyak kesulitan karena draft Perjanjian sudah disiapkan oleh pihak Perumtel, dan dibuat standard.

Semula Perjanjian penyewaan dengan Malaysia ini akan ditanda tangani di Jakarta tanggal 21 Agustus 1979, berhubung sesuatu hal yang menyangkut proseduril baru bisa ditanda tangani di Kualalumpur tanggal 29 Agustus 1979. Perjanjian Penyewaan Transponder Satelit Palapa ini di pihak Malaysia diwakili oleh Ketua Pengarahan Telekom Malaysia/Jabatan Telekom Malaysia, dan di pihak Indonesia oleh Direktur Utama Perumtel. Dalam perjanjian ini pihak Malaysia menyewa satu transponder untuk masa 5 tahun.

b) Dengan Thailand

Perundingan dengan pihak Thailand diadakan tanggal 1-3 Maret 1979 di Jakarta.

Dalam pertemuan ini disepakati draft Memorandum of Understanding (MOU) antara Thailand dan Indonesia mengenai penyewaan kapasitas transponder satelit Palapa. MOU itu sendiri akhirnya ditanda tangani tanggal 12 Maret 1979 di Jakarta antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Dirjen Postel Drs. Suryadi dan di pihak Thailand diwakili oleh Mr. Sribhumi Sukhanetr.

Tanggal 19-20 Nopember 1979 di Jakarta kembali diadakan perundingan antara Thailand dan Indonesia. Pada pertemuan ini disepakati draft Perjanjian, sedangkan bila ada usulan-usulan perobahan akan disampaikan secara surat menyurat atau per telex.

Perjanjian Penyewaan Kapasitas Transponder Satelit Palapa oleh pihak Thailand ditanda tangani tanggal 19 Desember 1979 di Bangkok dan di Bandung.

c. WARC 1979

World Administrative Radio Conference 1979 (WARC 1979) diadakan tanggal 26 September - 7 Desember 1979 di Jenewa. WARC 1979 ini diadakan sesuai dengan Resolusi No. 28 dari Plenipotentiary Conference ITU Malaga - Torremolinos 1973.

Tujuan diselenggarakan WARC 1979 adalah untuk merevisi dan menata kembali Radio Regulations (RR) dan Additional Radio Regulations secara umum untuk semua jenis pelayanan. WARC semacam ini yang meliputi semua jenis pelayanan diadakan terakhir tahun 1959. Hasil-hasil WARC 1979 diharapkan untuk dapat mengatur masalah pertelekomunikasian untuk masa 20 tahun mendatang.

Dari tahun 1959 sampai saat diselenggarakannya WARC 1979, Konperensi-Konperensi yang diadakan hanya untuk suatu jenis pelayanan saja misalnya Aero-

Digitized by Google



Jenewa, 1979.
Diantara delegasi Indonesia yang hadlir pada Kongres WARC 79, dari kiri kekanan; P Sartono SH, Susatyo, R Wikanto BcTT dan PA Martono BcTT.

Digitized by Google

nautical, Maritime dan Broadcasting Satellite. Alasan diadakannya WARC 1979 antara lain untuk menata kembali hasil-hasil WARC untuk suatu jenis pelayanan yang diadakan sejak tahun 1959 tersebut kedalam Radio Regulations dalam urutan yang teratur. Juga karena adanya perkembangan yang pesat dibidang teknik telekomunikasi dalam masa 20 tahun terakhir ini disamping bertambahnya jumlah negara merdeka sejak tahun 1959 yang menjadi anggota ITU.

Delegasi R.I. ke WARC 1979 dipimpin oleh DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi, dengan Wakil Ketua I (Ketua Harian) R. Wikanto Bc.T.T. dan Wakil Ketua II P.A. Martono Bc.T.T.

WARC 1979 dihadiri oleh 145 negara dari 154 negara anggota ITU, dengan jumlah peserta lebih dari 2.000 orang ditambah 30 Organisasi Internasional yang hadir sebagai peninjau.

Anggota Delegasi RI Ke WARC 1979 berjumlah 23 orang yang terdiri dari Wakil-wakil Ditjen Postel, PERUMTEL, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Hankam, Departemen Luar Negeri dan Departemen Penerangan.

Hasil-hasil WARC 1979 antara lain: Radio Regulations yang telah ditata kembali yang meliputi 13 Chapter, 44 Appendixes, 87 Resolusi dan 90 Rekomendasi serta Final Protocol.

Radio Regulations sebagaimana tercantum dalam Final Act WARC 1979 akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1982. Masalah GSO menjadi salah satu acara yang terberat dalam pembahasannya, dimana sampai dibentuk Komite Ad Hoc yang beranggotakan hampir semua negara yang hadir.

d. Masalah Geostationary Satellite Orbit (GSO).

GSO (Geostationary Satellite Orbit) adalah suatu sumber alam terbatas berupa "jalur" yang terletak diatas garis katulistiwa, pada ketinggian kurang lebih 36.000 km dari permukaan bumi/laut. Panjang (keliling) jalur GSO kurang lebih 225.000 km. Bila suatu satelit ditempatkan didalamnya maka masa berkitar satelit tersebut akan sama dengan masa berkitarnya yaitu dari Timur ke Barat, sehingga satelit tersebut akan nampak "tetap" tidak bergerak bila dilihat dari bumi. Dengan demikian memungkinkan untuk hubungan telekomunikasi secara terus menerus antara satelit tersebut dengan stasion bumi yang dipasang dibumi. GSO yang merupakan sumber alam yang terbatas, merupakan tempat terbaik untuk penempatan satelit telekomunikasi karena sifat-sifat alamiah dan ciri-ciri teknisnya itu.

Masalah GSO selain dibicarakan dalam Forum ITU juga dibicarakan dalam UN Copuos (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outerspase).

UN Copuos adalah suatu Komite yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1959 untuk menangani masalah penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai.

Indonesia menjadi anggota sejak tahun 1974. Jumlah anggota Komite pada saat

Digitized by Google

ini adalah 47 negara.

Komite ini terdiri dari 2 Sub Committee yaitu:

1) The Scientific and Technical Sub Committee (Sub Komite Ilmiah dan Teknik).
2) The Legal Sub Committee (Sub Komite Hukum).

Sampai tahun 1979 Komite telah bersidang 22 kali, Sub Komite Ilmiah dan Teknik bersidang 16 kali dan Sub Komite Hukum 18 kali. Hasil sidang Sub Komite dilaporkan dan disahkan oleh Komite yang selanjutnya Komite melaporkan kepada General Assembly (Majelis Umum PBB).

Sejak tahun 1979 Direktorat Jenderal POSTEL diikut sertakan dalam susunan Delegasi R.I. ke sidang-sidang Komite ini, yaitu ikut menghadiri:

- Sidang Sub Komite Ilmiah Teknik ke 16 yang diadakan di New York tanggal 5 - 23 Pebruari 1979.
- Sidang Sub Komite Hukum ke 18 tanggal 12 Maret - 6 April 1979 di New York. Sidang Komite ke 22 (tanggal 16 Juni - 3 Juli 1979 di New York).
- Sindang Sub Komite Ilmiah dan Teknik ke 17 di New York tanggal 28 Januari - 15 Pebruari 1980.
- Sidang Sub Komite Hukum ke 19 di Geneve tanggal 10 Maret — 4 April 1980.
- Sidang Komite ke 23 di New York tanggal 23 Juni — 3 Juli 1980.

Usaha-usaha di bidang pembangunan telekomunikasi ini akan diteruskan untuk mendekatkan dan mempersatukan bangsa Indonesia sendiri, bangsa-bangsa ASEAN dan bangsa-bangsa lainnya di dunia supaya dapat bekerja sama dan bersatu lebih akrab.

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB IV
PERISTIWA PERISTIWA MUTAKHIR SAMPAI AKHIR 1980

Digitized by Google

Digitized by Google

bab IV
PERISTIWA-PERISTIWA MUTAKHIR SAMPAI AKHIR 1980

Kata Pengantar

Sejarah Pos dan Telekomunikasi Jilid V, Masa Orde Baru yang sedang berjalan, mula-mula untuk sementara direncanakan akan mencakup peristiwa-peristiwa dalam kurun waktu antara 11 Maret 1966 sampai dengan 31 Maret 1979. Kurun waktu ini kemudian diteruskan sampai 8 Agustus 1980.

Perjalanan sejarah yang cepat memperlihatkan bahwa sesudah Pelita II sampai tahun 1980 yang akan berakhir, banyak peristiwa terjadi yang mengesankan dan layak dimuat sekaligus dalam Jilid V ini. Sementara itu penulisan Jilid V ini belum rampung. Berhubung dengan itu Panitia Penyusun dan Perumus dengan persetujuan Dirjen Pos dan Telekomunikasi, memandang perlu untuk memasukkan peristiwa-peristiwa penting menjelang akhir Pelita II sampai akhir 1980 dalam Jilid V ini sebagai peristiwa-peristiwa mutakhir yang belum dimuat dalam Bab-Bab sebelumnya.

1. Struktur dan Organisasi

a. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Pada tanggal 13 Nopember 1980 Direktur Jenderal Postel, Drs. Suryadi, atas nama Menteri Perhubungan melantik Kepala Direktorat Pengendalian Frekuensi (Kaditfrek) Ditjen Postel, Syarifuddin. Direktorat Pengendalian Frekuensi sebagaimana telah disinggung dalam Bab I, Sub bab 1, h, merupakan Direktorat baru di Ditjen Postel yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 47 Tahun 1979. Dengan adanya Direktorat Pengendalian Frekuensi ini maka susunan organisasi Ditjen Postel adalah seperti yang tercantum pada Lampiran 39.

Digitized by Google

b. Perum Pos dan Giro

Selama tahun 1979 diadakan beberapa perubahan dan atau penyempurnaan dalam bidang Organisasi, antara lain mengenai struktur organisasi Perusahaan, perumusan fungsi dan tugas pokok, pembagian lebih lanjut dalam unit-unit kerja yang bertalian, pengangkatan para pejabat dan alih tugasnya.

1) Pengawas Umum

Dengan Surat Keputusan Direksi Pos dan Giro tanggal 27 Maret 1979 No. 6991/ Dirutpos ditetapkan tentang dihapuskannya kata "Internal Audit" sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dirutpos tanggal 31 Desember 1976 No. 32971/ Dirutpos dan penetapan tentang Fungsi dan Tugas Pokok serta pembagian lebih lanjut dalam Unit-unit Kerja Pengawasan Umum dalam 3 (tiga) Bagian, yaitu "Bagian Pengawasan Pusat dengan daerah pengawasan Kantor Pusat; "Bagian Pengawasan Daerah Selatan" dengan daerah pengawasan Dapos I, II, III, VIII dan X" dan "Bagian Pengawasan Daerah Utara" dengan daerah Pengawasan Dapos IV, V, VI, VII, IX dan XII". Setiap Bagian dari Pengawasan Umum dipimpin oleh seorang pembantu Pengawas Umum yang setingkat dengan Kepala Bagian.

2) Kelompok Tenaga Ahli

Dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 20 Agustus 1979 No. 20975/Dirutpos ditetapkan tentang pembentukan unit kerja "Kelompok Tenaga Ahli" sebagai forum para tenaga ahli di berbagai keahlian dengan tugas membantu Direksi Perum Pos dan Giro dalam memikirkan dan menelaaah masalah-masalah pokok Perusahaan.

Susunan Kelompok Tenaga Ahli terdiri dari:

a) "Ketua" yang harus berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana-Muda dan berpangkat setinggi-tingginya dalam golongan IV/c PGP POSGIRO-1977;

b) "Sekretaris" yang harus berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana-Muda dan berpangkat setinggi-tingginya dalam golongan IV/b PGP POSGIRO-1977; yang dibantu oleh 2 (dua) orang Pembantu Sekretaris yang harus berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas dan berpangkat setinggi-tingginya dalam golongan III/c PGP POSGIRO-1977;

c) "Anggota-anggota" paling banyak 6 (enam) orang ahli yang dipandang berkeahlian dan berpengalaman dalam berbagai (masing-masing) bidang, yang harus berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana-Muda dan berpangkat setinggi-tingginya dalam golongan IV/b PGP POSGIRO-1977. Bidang-bidang tersebut terdiri dari: pemasaran, perencanaan, permodalan, produksi, biaya dan hukum.

Dengan Surat Keputusan Dirutpos tanggal 3 September 1979 No. 21829/Dirutpos diangkat Harsono, Bc.A.P. sebagai Ketua Kelompok Tenaga Ahli Perum Pos dan Giro dan Richard Simatupang, Bc.A.P., sebagai Sekretaris Kelompok Tenaga Ahli

Perum dan Pos Giro.

3) Pusat Pendidikan dan Latihan Pos dan Giro, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Giro

Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan P.N. Pos dan Giro yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dirutpos tanggal 3 Pebruari 1976 No. 2691/Dirutpos, sesuai dengan perkembangan dan status usaha di bidang Pos dan Giro dan diperlukannya pranata untuk menyelenggarakan "Pendidikan dan Latihan" serta "Penelitian dan Pengembangan" yang masing-masing berdiri sendiri, maka status dan struktur organisasinya mengalami perubahan.

Dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 20 Agustus 1979 No. 20973/Dirutpos ditetapkan tentang pencabutan Surat Keputusan Dirutpos tanggal 3 Pebruari 1976 No. 2691/Dirutpos dan penetapan "Susunan Organisasi dan Tata-kerja Pusat Pendidikan dan Latihan Pos dan Giro". Demikian pula dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 20 Agustus 1979 No. 20974/Dirutpos dicabut Surat Keputusan Dirutpos tanggal 3 Pebruari 1976 No. 2691/Dirutpos dan ditetapkan "Susunan Organisasi dan Tata-kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Giro".

Dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 2 September 1979 No. 21828/Dirutpos ditetapkan pengangkatan Sudarna, Bc.A.P., sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perum Pos dan Giro dan Ir. Marsoedi sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Pos dan Giro.

Berhubung dengan perubahan-perubahan yang diuraikan di atas, maka struktur organisasi Kantor Pusat Perum Pos dan Giro yang terakhir tersusun seperti pada Lampiran 40.

c. PERUMTEL

1) Direktur Muda

Untuk mengurangi rentang kendali Direktur yang dirasa terlampau luas, diadakan jabatan Direktur Muda yang berada langsung di bawah Direktur dan di atas Kepala Bagian. Setiap Direktur membawahkan 2 sampai 3 Direktur Muda. Tiap Direktur Muda membawakan 3 sampai 5 Kepala Bagian.

Dengan adanya Direktur Muda maka rentang kendali Direktur cukup tertangani oleh Direktur.

Susunan Organisasi PERUMTEL sampai dengan tingkat Direktur Muda ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sedangkan pengangkatan pejabat Direktur Muda ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PERUMTEL.

2) Kelompok Tenaga Ahli

Dalam rangka usaha penyempurnaan susunan organisasi PERUMTEL yang disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi Perusahaan, diadakan Staf Ahli yang kemudian diubah menjadi Kelompok Tenaga Ahli, yang dipimpin

Digitized by Google

oleh seorang Ketua Kelompok Ahli. Ketua Kelompok Tenaga Ahli dibantu oleh 6 Anggota Kelompok Ahli yang mempunyai keahlian di bidang pemasaran, perencanaan, permodalan, produksi, biaya dan hukum. Untuk sementara hanya terdapat Anggota Kelompok Ahli Bidang Pemasaran, Anggota Kelompok Ahli Bidang Perencanaan, Anggota Kelompok Ahli Bidang Produksi, Anggota Kelompok Ahli Bidang Biaya.

Berbeda dengan susunan Kelompok Tenaga Ahli pada Perum Pos dan Giro, maka dalam Kelompok Tenaga Ahli pada PERUMTEL disamping kelompok Tenaga Ahli diadakan Bagian Sekretariat Kelompok yang melayani Ketatausahaan Kelompok. Sedangkan didalam Kelompok Tenaga Ahli terdapat Sekretaris Kelompok Ahli.

Ketua Kelompok Ahli yang pertama ialah Ir. Damai Sinulingga.

Kepala Bagian Sekretariat Kelompok Ahli ialah R. Achmad Koesoemaningjoen BC.A.T.

Sekretaris Kelompok Ahli ialah Ir. Bambang Bangoen Soeksmantoro.

3) Inspektorat

Kalau di Perum Pos dan Giro diadakan Pengawasan Umum, maka di PERUMTEL diadakan Inspektorat yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Tugas pokok Inspektur ialah melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan terhadap semua unsur yang meliputi operasi, teknik, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Inspektur dibantu oleh 5 Inspektur Pembantu yang terdiri dari: Inspektur Pembantu Keuangan, Inspektur Pembantu Kepegawaian, Inspektur Pembantu Pembangunan, Inspektur Pembantu Perlengkapan dan Inspektur Pembantu Operasi dan Teknik.

Selanjutnya Inspektur Pembantu dibantu oleh sejumlah Pemeriksa menurut kebutuhan.

Pekerjaan Tata Usaha Inspektorat dilayani oleh Bagian Sekretariat Inspektorat yang dimpimpin oleh Kepala Bagian Sekretariat Inspektorat.

Yang pertama-tama diangkat menjadi Inspektur ialah R.A. Soerjadi Bc.A.T., seorang karyawan yang dipenuhi semangat pengabdian. Ia tidak lama menduduki jabatan tersebut karena penyakit lever mengakhiri kariernya. Sebagai pengganti Inspektur Perusahaan diangkat R.M. Soemarno Atmosoebroto Bc.T.T.

4) Pusat Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan (PUSDIKLITBANGTEL)

Berbeda dengan Pusdiklitbangpos yang dipecah menjadi dua unit kerja yang masing-masing berdiri sendiri, hingga kini Pusdiklitbangtel tetap mempunyai dua bidang ialah Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklattel) dan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbangtel).

Setelah Ir. Soehana diangkat menjadi Direktur Personalia dan Tata Usaha, sebagai penggantinya diangkat Soeharto Bc.T.T.

Digitized by Google



Bandung, 29 Nopember 1980.
KABADANDIKLAT Departemen Perhubungan R. Soekardjono SH sedang memukul gong pada penutupan Training mengenai Domestik Satelit yang diikuti oleh peserta-peserta dari negara ASEAN, bertempat di PUSDIKLITBAG PERUMTEL Bandung (gambar kiri) DIRUTTEL Ir. Willy Moenandir M sedang menyerahkan piagam tanda penghargaan kepada salah seorang peserta training (gambar bawah).



Digitized by Google





Para peserta bergambar bersama setelah selesai upacara penutupan (gambar atas). Diantara undangan yang nadir pada saat pembukaan antara lain dibaris depan dari kiri kekanan DIROPTEKTEL, Ir. Boedi Santoso, DIRJEN PTD Thailand Suchart P. Sakorn, DIRPEGTEL, Ir. Suhana, Expert dari ITU Ir. Sutanggar Tengker dan DIRKAPTEL, Soemardi Bc.T.T. (gambar bawah).

Digitized by Google

Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan ialah Koeslan Silam Bc.T.T.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan ialah Ir. Ben Soetanto.
Berhubung dengan perubahan-perubahan yang diuraikan di atas, maka struktur organisasi Kantor Pusat PERUMTEL yang terakhir tersusun seperti pada Lampiran 41.

2. Pembinaan

a. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

1) Penerbitan prangko

Dalam Bab II, Sub bab 1, a, 5), telah disinggung bahwa yang mempunyai wewenang mencetak atau menerbitkan prangko ialah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Penerbitan prangko di Indonesia ini didasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/1959.

Berdasarkan Konvensi Internasional, pada sebuah prangko harus diterakan nama negara yang menerbitkannya. Karenanya sekaligus berfungsi sebagai alat politis. Dari prangko dapat dinilai identitas dan bonafiditas sesuatu negara. Berhubung dengan kebijaksanaan penerbitan prangko ditetapkan oleh Dirjen Postel. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ini Dirjen Postel dibantu oleh sebuah Panitia yang disebut Team Pembina Perprangkoan dan Philateli. Team ini untuk pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Nopember 1971 dengan surat Keputusan Dirjen Postel tanggal 10 Nopember 1971 No. 43/Dirjen/1971. Mengingat kepada tugasnya, maka susunan keanggotaan Team Pembina Perprangkoan dan Philateli ini berbagai kalangan yaitu unsur Direktorat Jenderal Postel (segi pembinaan dan kebijaksanaan), unsur Perum Pos dan Giro (segi operasional), unsur Seniman (segi artistik), unsur Philatelis (segi Philateli) dan unsur Perum Peruri (segi teknik pencetakan).

Adapun tugas Team Pembina Perprangkoan dan Philateli ialah:
- menyusun program penerbitan prangko untuk satu tahun;
- membina mutu perprangkoan;
- mempelajari serta membahas hal ikhwal perprangkoan dan philateli;
- membina perkembangan philateli di dalam negeri.

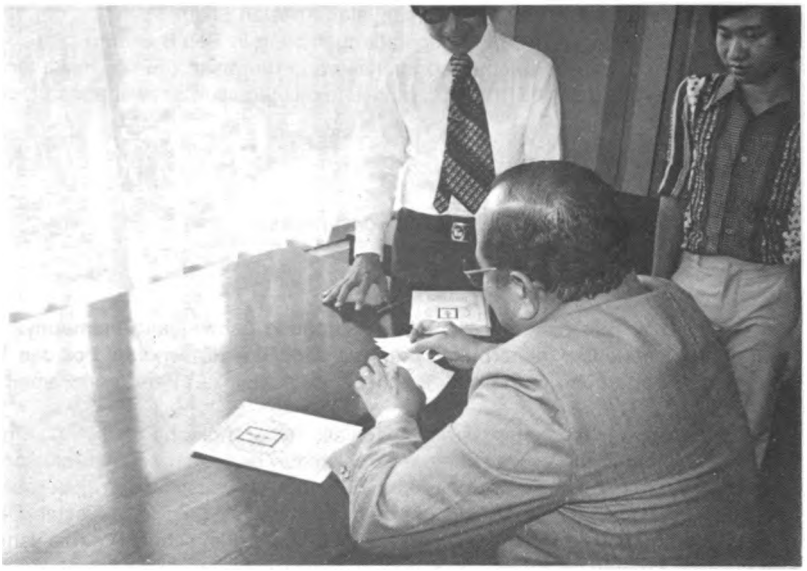
Pencetakan prangko seluruhnya dilakukan oleh Perum Peruri. Pencetakannya menggunakan teknik rotogravure. Sejak tahun 1980 telah dipersiapkan mesin cetak prangko 5 warna, sehingga mutu prangko akan dapat lebih ditingkatkan.

2) Perphilatelian

Perphilatelian sebagai suatu hal yang mengasyikkan mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1930. Pada waktu itu dibentuk perkumpulan philateli yang pertama dengan nama V.P.N.I. (Vereniging van Postzegelverzamelaar in Nederlands Indie).

Pada tahun 1947 perkumpulan ini berganti namanya menjadi A.V.P.I. (Algemeene Vereniging van Philatelisten in Indonesia). Pada tahun 1953 namanya berubah men-

Digitized by Google

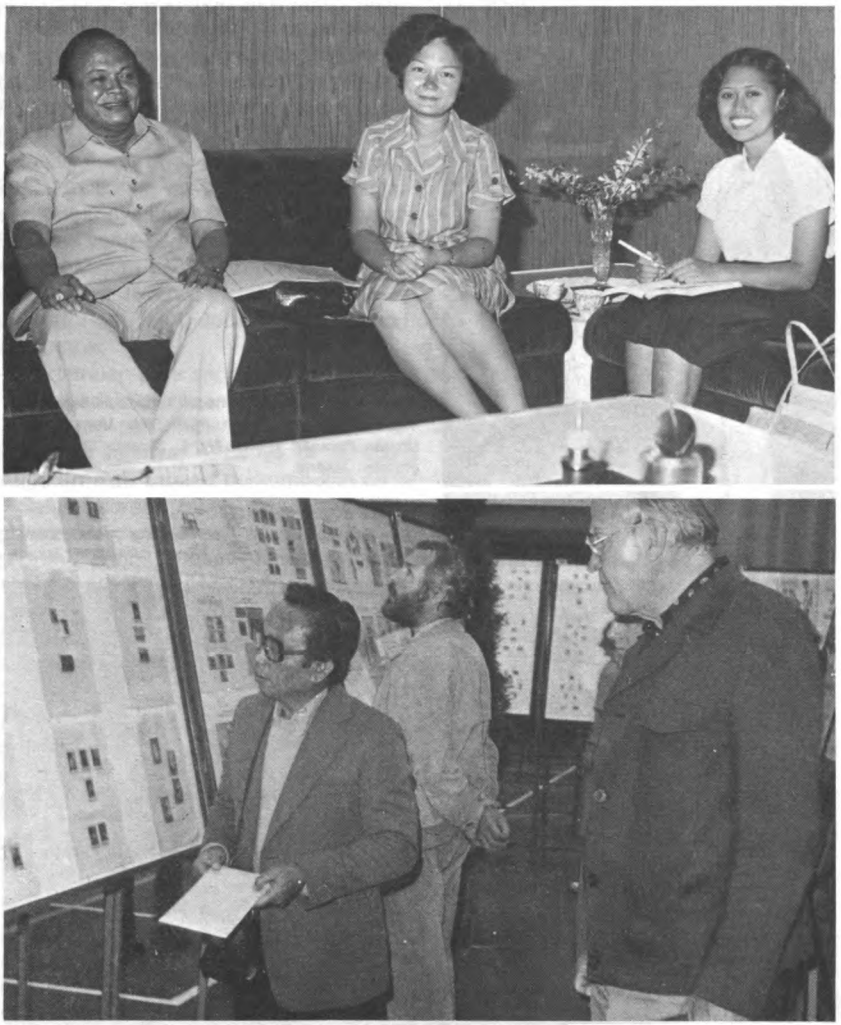


Jakarta, 22 Maret 1979
DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi sedang menanda tangani Sampul Hari Pertama seri "Anggrek Indonesia 1979", sewaktu mengadakan kunjungan ke Pusat Philateli Jakarta.



Eindhoven, 23 - 27 Mei 1980.
Delegasi dari Perkumpulan Philatelis Indonesia, LIEM YUNG LIENG dan ANNA YUDIANA MADINA pada pameran philateli di YUPOSTEX - HOLLAND bergambar bersama para juri dari 12 negara

Digitized by Google



Sebelum berangkat ke Holland delegasi mengadakan kunjungan kepada DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi diruang kerjanya. Gambar bawah Sumeleh Bc.A.P. dari DITJEN POSTEL dengan salah seorang Pimpinan Aerophilateli De Oligende Hollander, sedang menyaksikan pameran.

Digitized by Google



Jakarta, 28 Oktober 1979.
Penyerahan hadiah dan medali kepada pemenang Pameran Perangko Pekan PBB Oleh Menteri Muda Urusan Peranan Wanita Ny. L. Sutanto SH di Pusat Philateli Jakarta.

Jakarta, 3 April 1980.
Dirjen Postel Drs. Suryadi sedang menyampaikan pengarahannya pada musyawarah ORARI DKI Jakarta.



Digitized by Google

jadi P.U.P.I. (Perkumpulan Umum Philateli Indonesia).

Pada tahun 1965 P.U.P.I. mengadakan Konggresnya yang pertama kali dan berhasil membuat Anggaran Dasar Perkumpulan. Dalam konggres itu pula namanya diganti menjadi Perkumpulan Philatelis Indonesia (tidak disingkat). Dalam tahun 1969 Perkumpulan ini menjadi anggota dari Federation International Asian Philatelique (F.I.A.P.).

Sejak berdirinya, Perkumpulan Philatelis Indonesia telah mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka memperkenalkan hobby ini di seluruh negeri. Mengingat bertambahnya kegiatan perphilatelian, maka pada tanggal 3 Mei 1973 dibuka Pusat Philateli yang pertama di Jakarta. Pendirian Pusat Philateli ini dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan prangko dan untuk menunjang kegiatan philateli di Indonesia. Bagi Jakarta, Pusat Philateli ini telah merupakan pusat kegiatan philateli di Ibukota Republik Indonesia khususnya. Pusat Philateli tersebut antara lain digunakan untuk:

- Pertemuan para anggota dan pengurus perkumpulan.
- Mengadakan pameran, pelelangan dan ceramah perphilatelian.

Kegiatan perphilatelian ternyata tidak hanya terdapat di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lainnya, misalnya di Surabaya, Semarang, Yogyakarta telah diadakan kegiatan oleh cabang perkumpulan philateli.

Salah seorang tokoh philateli yang banyak jasanya dalam pengembangan perphilatelian di Indonesia ialah Laksamana Udara Suryadarma yang menjadi salah seorang anggota Team Pembina Perprangkoan dan Philateli sejak 10 Nopember 1971. Pendirian Pusat Philateli pada tahun 1973 merupakan salah satu gagasannya dalam usahanya untuk membantu mengembangkan perphilatelian di Indonesia. Dengan meninggalnya tokoh philateli tersebut pada tanggal 16 Agustus 1975, Indonesia kehilangan seorang Bapak Philateli yang ulet.

Pembinaan philateli selanjutnya dilakukan dengan teratur oleh Direktorat Jenderal Postel maupun Direksi Perum Pos dan Giro. Bantuan moral dan material diberikan kepada Perkumpulan Philateli menambah kemampuan organisasi ini untuk lebih berkembang, sehingga dapat mengirimkan utusannya untuk mengunjungi pameran di luar negeri.

3) Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia

Tidak dapat diragukan lagi bahwa telekomunikasi adalah suatu media yang vital bagi perkembangan suatu bangsa yang modern. Berhubung dengan itu telekomunikasi wajib dibina dan diatur secara teratur dan berencana. Telekomunikasi yang tidak teratur belum merupakan suatu alat media yang vital, bahkan akan merugikan negara sendiri.*)

Ditinjau dari segi penggunaannya dikenal telekomunikasi untuk: tetap (fixed), hubungan udara (aeronautical service) dan hubungan laut (maritime service).

Disamping penggolongan itu dikenal adanya "broadcast," termasuk televisi.

*) *Kelengkapan dari P.P. No. 21/THN 1967.*

Digitized by Google

Tiap-tiap golongan telekomunikasi tersebut mempunyai ciri-ciri yang khusus yang masing-masing diatur pula oleh suatu peraturan atau prosedure khusus. Terutama didalam pemakaian gelombang radio, tiap penggolongan atau dinas mempunyai gelombang-gelombang radio yang khusus pula.

Pemakaian gelombang radio yang tidak teratur dapat mengganggu suatu hubungan radio yang mengakibatkan suatu hambatan. Hambatan yang mengakibatkan kelambatan hubungan akhirnya dapat menimbulkan suatu kerugian yang besar pula bagi pemakainya. Berhubung dengan itu tiap-tiap jenis hubungan radio harus diamankan supaya tidak timbul gangguan radio yang dapat menghambat kelancaran telekomunikasi. Disamping itu telah dimaklumi bahwa frekuensi radio yang dipergunakan untuk lalulintas pemberitaan telah padat sekali sehingga diperlukan alat-alat pemancar/penerima yang bermutu tinggi.

Selain telekomunikasi untuk kepentingan umum dan telekomunikasi yang bersifat khusus yang diuraikan di atas, terdapat penggunaan telekomunikasi sebagai kegemaran atau hobby dari masyarakat yang ingin pula mengikuti perkembangan dalam bidang elektronika yang dikenal dengan nama Amatir Radio. Radio Amatirisme ini disamping dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang elektronika bagi Amatir Radio sendiri, dapat merupakan suatu kekuatan yang dapat membantu Pemerintah dalam mengembangkan telekomunikasi pula. Dengan adanya radio amatirisme diperoleh bibit-bibit tenaga yang baik yang dapat dipergunakan Pemerintah dalam mengatasi kekurangan tenaga ahli. Selanjutnya jaringan radio amatir dalam keadaan darurat dapat dipergunakan pula oleh Pemerintah untuk keperluan hubungan yang mendadak.

Amatir Radio di Indonesia sudah ada sejak sebelum perang kemerdekaan. Jumlahnya ketika itu masih terbatas sekali.

Di masa perang kemerdekaan Amatir Radio di Indonesia tetap ada. Mereka tergabung dalam Persatuan Amatir Radio Indonesia, disingkat PARI. Organisasi Amatir Radio itu meskipun sudah ada tetapi belum mempunyai landasan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Berhubung dengan itu diperlukan pengaturan ketertiban supaya tidak menimbulkan gangguan-gangguan siaran satu sama lain. Maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 21/Thn. 1967 pada tanggal 30 Desember 1967 dan Keputusan Ketua Dewan Telekomunikasi R.I. No. 004/KPTS/1968 tanggal 4 Mei 1968 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Sejak itu Amatir Radio di Indonesia secara resmi telah diakui dan diberi wadah oleh Pemerintah.

Pada tanggal 8 Juli 1968 s/d 9 Juli 1968 diadakan Konggres Pertama Amatir Radio yang berhasil membentuk sebuah organisasi di bidang hobby radio elektronika yang diberi nama Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia, disingkat ORARI. Pada Konggres ORARI Ke-dua diputuskan bahwa singkatan ORARI diubah artinya menjadi Organisasi Amatir Radio Indonesia.

Sejak dikeluarkannya P.P. No. 21/1967 beserta petunjuk pelaksanaannya No. 004/KPTS/1968, ijin-ijin Amatir Radio beserta pengurusan segala permasalahannya dikerjakan oleh Dewan Telekomunikasi R.I. Hingga tanggal 14 Nopember 1980, ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebagai berikut:

– jumlah ijin yang diberikan: 3383 (kepada WNI: 3289, WNA: 94);

Digitized by Google

- jumlah ijin yang masih berlaku: 1225 (WNI: 1204, WNA: 21);
- jumlah ijin yang tidak berlaku: 2158 (WNI: 2085, WNA: 73).

WNA yang memperoleh ijin Amatir Radio Indonesia antara lain berkebangsaan: Jerman Barat (13), Amerika Serikat (66), Canada (5), Swedia (3), Inggris (4), Australia (2) dan Argentina (1).

P.P. No. 21/Thn. 1967 mengandung dasar pengaturan tentang amatir radio yang lazim disebut radio amatir QSO sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Radio Regulations 1959 Geneve 1959 artikel 41. P.P. No. 21/Thn.1967 ini pada tanggal 23 Juni 1980 diubah dan ditambah dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1967 TENTANG RADIO AMATIRISME DI INDONESIA. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang amatir radio yang semula berada pada Dewan Telekomunikasi dialihkan kepada Menteri Perhubungan.

Sesuai dengan Pasal I, 5, b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tersebut dan sehubungan dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979, maka berdasarkan surat Menteri Perhubungan Nomor A.509/PT.307/MPHB tanggal 12 Juli 1980 Menteri Perhubungan melimpahkan wewenang untuk memberikan ijin radio amatir kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

4) Radio Siaran Non Pemerintah

Dengan adanya minat yang besar di kalangan masyarakat untuk menyelenggarakan radio siaran yang berfungsi pelayanan sosial, tanpa mengganggu ketentuan internasional, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Pemberian Ijin Radio Siaran oleh Menteri Perhubungan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK/25/T/1971 tangggal 23 Januari 1971. Sebagai pelaksana utamanya ialah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan di daerah, Gubernur Kepala Daerah berwewenang:

a) memberikan rekomendasi terhadap surat-surat permohonan yang diajukan oleh suatu Badan Penyelenggara;
b) mendaftarkan ijin yang telah diberikan;
c) memberikan pembinaan umum atas ditaatinya ijin.

Petunjuk-petunjuk Umum tentang penyelenggaraan acara serta isi siaran bagi RSNP dilakukan oleh Menteri Penerangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 39/Kep/Menpen/1971 tanggal 20 April 1971 yang berlaku sejak 1 Januari 1971, sedangkan pengawasan terhadap RSNP didasarkan Pasal 24 dan 25 Undang-undang No.5/1964.

Sejak tahun 1980 telah dijajagi rencana penambahan RSNP dengan sistem frekuensi modulasi yang selama ini masih dibekukan.

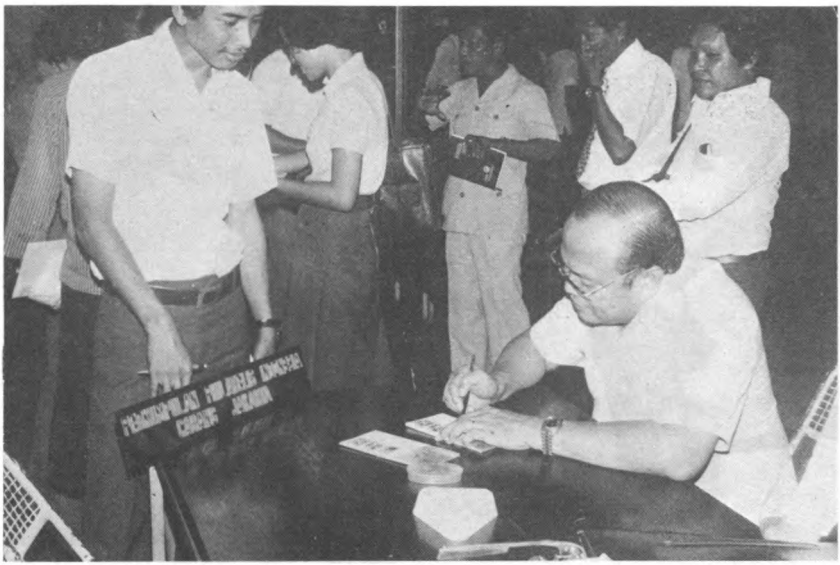
Digitized by Google

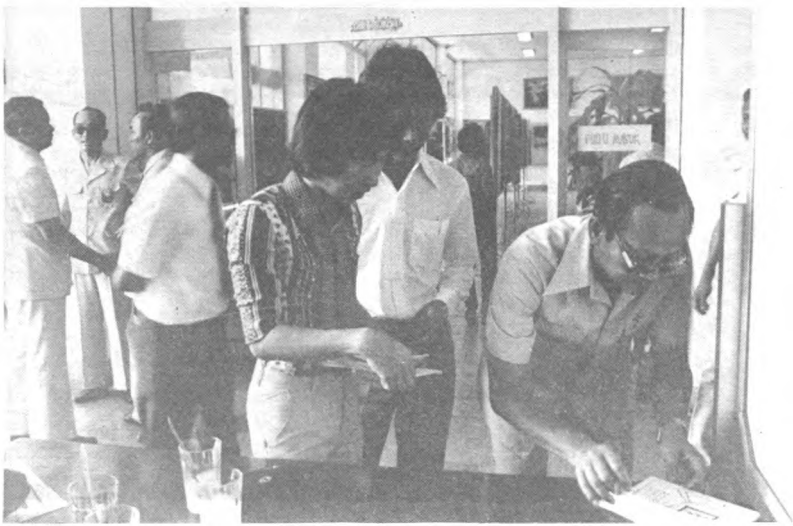




Jakarta, 14 - 17 Nopember 1980.
KADITFREK DITJEN POSTEL, Syarifuddin, mewakili DIRJEN POSTEL sedang menyampaikan sambutannya pada musyawarah Nasional ke-III Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) - (gambar atas). Diantara yang hadir antara lain nampak digambar bawah bekas Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX (ketiga dari kiri) dan DIRJEN RTF DEPPEN Drs. Sumadi (keempat dari kiri).

Digitized by Google

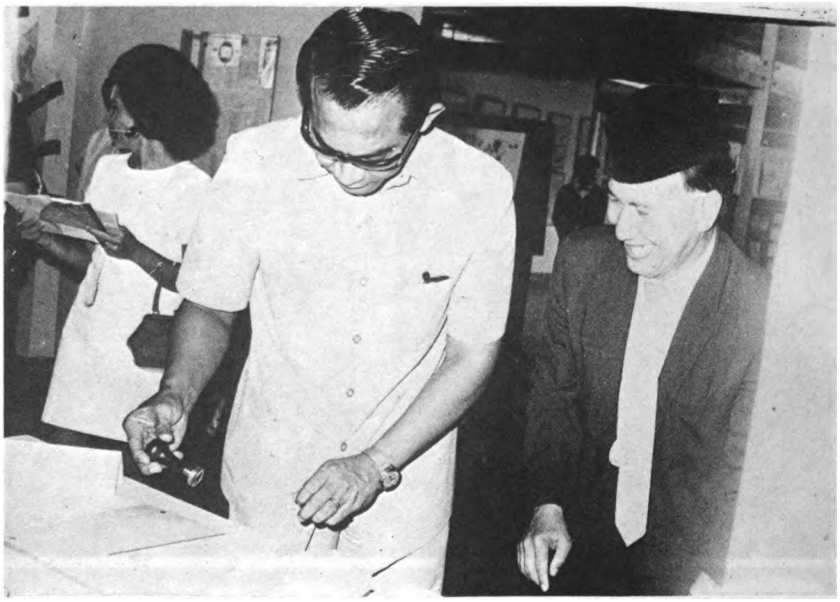




Malang, 9 Juni 1979

DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi dan DIRUTPOS Moeljoto Bc.A.P. sedang menanda tangani surat yang diajukan oleh para Philatelis, pada pameran perangko di kota Malang (gambar atas dan bawah).

Digitized by Google



Jakarta, 22 Juli 1970.
Gubernur DKI, Ali Sadikin dengan didampingi oleh Ketua PPI Marsekal (Purn) S. Suryadarma, sedang mencap surat pada pameran prangko; dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke 443 di Taman Ismail Marzuki.

Digitized by Google



Surabaya, 9 April 1980.
DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi dengan didampingi oleh KADITPOS M. Soelaeman Bc.A.P. sedang memimpin pertemuan dengan Pengurus Persatuan Philatelis Indonesia dan Pengurus ORARI Cabang Surabaya dan bergambar bersama selesai pertemuan (gambar atas dan bawah).

Digitized by Google

5) Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)

Sudah beberapa lama masyarakat dapat memanfaatkan komunikasi radio telepon yang selama ini dikenal "Citizen Band," disingkat "CB" untuk tujuan menjalin hubungan sosial masyarakat. Komunikasi Radio ini dikenal sebagai Komunikasi Radio Antar Penduduk, disingkat KRAP, ialah komunikasi radio yang menggunakan band frekuensi yang ditentukan secara khusus untuk komunikasi telepon radio jarak pendek di dalam negeri.

Amerika Serikat yang merupakan beberapa negara bagian dengan tanah yang amat luas, merupakan negeri asal mula penggunaan komunikasi antar penduduk. Federal Communications Commissions (FCC) meresmikan adanya komunikasi radio antar penduduk sejak tahun 1958.*)

Mengingat komunikasi radio telepon tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat, dan diperlukan ketentuan-ketentuan persyaratan serta perijinan komunikasi radio telepon antar penduduk, maka Menteri Perhubungan menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SI, 11/HK 501/Phb-80 tentang Perizinan Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk tanggal 6 Oktober 1980.

Seperti di Amerika Serikat, Indonesia juga memberikan frekuensi 26.965 sampai dengan 27.405 untuk keperluan komunikasi radio antar penduduk. Frekuensi ini dibagi menjadi 40 aluran sama dengan yang di AS. Aluran 9 dikhususkan untuk penyampaian berita gawat/darurat yang menyangkut keamanan negara, ketertiban umum, keselamatan jiwa dan harta benda manusia.*)

Band frekuensi dengan aluran-aluran itu merupakan frekuensi dan aluran yang digunakan bersama, tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang ijin dan tidak dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan.

Pemancar radio yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknik yang berlaku, yakni hanya dibolehkan menggunakan modulasi AM, baik dengan DSB (Double Side Band) maupun dengan SSB (Single Side Band). Daya pancar DSB 4 watt carrier power dan SSB sebesar 12 watt peak envellope power. Antena harus emnidirectional. Pancaran gelombang harmonik harus ditekan sekecil-kecilnya agar tidak mengganggu komunikasi radio lain.

Sekali pun sama-sama menggunakan gelombang radio, CB atau KRAP berbeda dengan Radio Amatir. Masing-masing dibatasi dalam penggunaan dalam gelombang radio yang dijatahkan dan penggunaannya. Dengan KRAP orang tidak bisa bereksperimen, karena keterbatasan lebar gelombang dan batas daya pancarnya. Antenenya pun hanya jenis omnidirectional dengan ground wave sejauh 50 Km.

Untuk melakukan eksperimen teknik radio tempatnya adalah radio amatir yang pengaturannya telah dimuat di atas.

*) *"Chandra tertolong oleh CB," RA/jos/hadi, Kompas tanggal 14 Desember 1980.*

Digitized by Google

6) Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk (RAPI)

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SI 11/HK 501/Phb-80 tentang Perizinan Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk maka perlu didirikan suatu Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk yang bertugas antara lain membantu Pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap para penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk Untuk keperluan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian organisasi tersebut perlu segera ditetapkan susunan Pengurus Pusat organisasi tersebut. Berhubung dengan itu dengan Keputusan Dirjen Postel Nomor 125/Dirjen/1980 Dirjen Postel menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENDIRIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT ORGANISASI KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.

Didirikanlah Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk disingkat RAPI, sebagai satu-satunya organisasi bagi para penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk pada tanggal 10 Nopember 1980.

Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Organisasi RAPI ialah sebagai berikut:

I. Pembina	: Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
II. Penasehat	: Soedarto Dr. Eriyono Harimun Sabit
III. Pengurus Pusat	
Ketua Umum	: Eddie Marzoeki Nalapraya
Wakil Ketua	: (ditetapkan kemudian)
Sekretaris Umum	: Lukman Arifin SH
Wakil Sekretaris Umum	: Raya Siahaan
Bendahara I	: Ava Susilo Tjokropanolo
Bendahara II	: Eddin Eman
Ketua Bidang Teknik dan Monitoring	: Soetikno Buchari
Ketua Bidang Organisasi/-Personil	: Djohan Iskandar Salim
Ketua Bidang Pendidikan/-Pembinaan	: Th. A. Pratomo, Bc.T.T.
Ketua Bidang Kemasyarakatan:	

b. Perum Pos dan Giro

1) Pusdiklatpos

Untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang lebih trampil, diselenggarakan pendidikan reguler dan non reguler dalam tahun 1979, baik di dalam negeri maupun

Digitized by Google



Jakarta, 10 Nopember 1980.
DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi sedang mengucapkan selamat kepada Ketua Pengurus Pusat RAPI Eddie Marzoeki Nalapraya selesai upacara pelantikan.

di luar negeri dalam pelbagai bidang guna meningkatkan kemampuan dan pengalaman.

Sesuai dengan G.B.H.N. yang sudah ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.R.I. dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1978, dalam tahun 1979 terdapat 334 pegawai golongan III dan IV yang telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tipe A dan 383 pegawai golongan I dan II telah mengikuti Penataran P4 tipe B.

Dalam tahun 1980 diadakan lagi UPU Regional Course di bidang "Postal Development, Planning dan Statistics" di Bandung yang diselenggarakan di Pusdiklatpos. Kursus ini diadakan dari tanggal 31 Maret 1980 s/d 30 April 1980 dan diikuti oleh peserta-peserta dari beberapa Negara anggota AOPU. Indonesia mengirimkan 6 peserta.

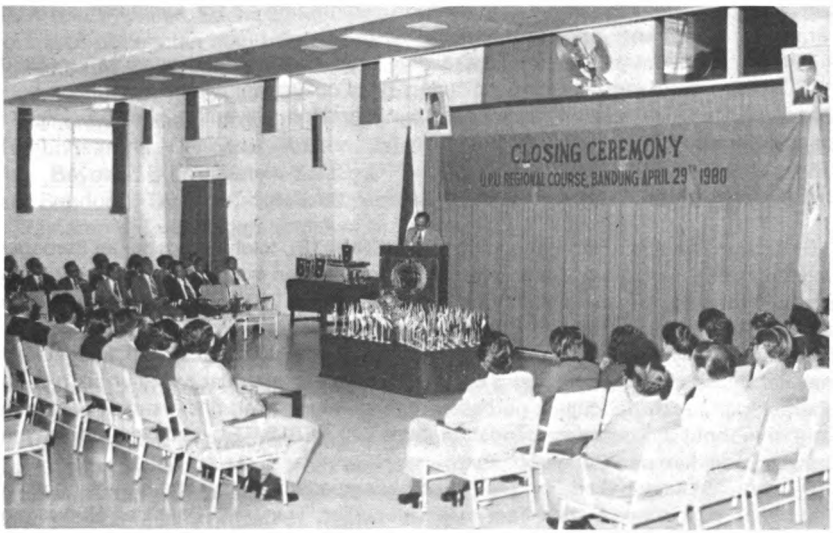
2) Puslitbangpos

Sejak Puslitbangpos berdiri sendiri dan mempunyai anggaran yang memadai, terdapat kegiatan penelitian terus-menerus. Di bidang sarana dilakukan penelitian dan pembaharuan mengenai beberapa sarana untuk dijadikan standar yang meli-

Digitized by Google



Bandung, 31 Maret 1980
Para peserta "UPU Regional Course" bergambar bersama KADITPOS M. Soelaeman Bc.A.P., UPU Training ***Expert Zahid Malik dan Direksi PERUM Pos dan Giro selesai upacara pembukaan.***



Bandung, 29 April 1980
DIRUTPOS Moeljoto Bc.A.P. sedang menyampaikan sambutannya pada upacara penutupan.

Digitized by Google

puti bis surat, meja tuang, meja cap harian, almari sortir, kereta dorong, bak surat, kereta kantong beroda, kursi putar tanpa injakan dan yang pakai injakan.

Dalam tahun 1980 Puslitbangpos dalam Sub Proyek Penelitian Postel pada Proyek Penelitian Umum Departemen Perhubungan melakukan pelbagai penelitian yang terdiri dari: Standard Performance, Penelitian Harga Pokok Paketpos, Jaringan Pos Jabotabek sampai dengan tahun 2000, Kemungkinan Mekanisasi Pos, Penelitian Dinas Pos Umum, Penelitian Mutu Standar Kantongpos ITT, Sistem Pos Nasional, Sistem Informasi Manajemen Pos, Penelitian Pengolahan Data, Matrik Data/ Kode Pos, Kantor Model, Kantor Pos Perintis, Penelitian Mesin Captanggal, Museum Pos di Taman Mini Indonesia Indah, Penelitian Pos Udara dan Penelitian Angkutan Udara dan Pos Darat di Indonesia Timur.

c. PERUMTEL

1) Bidang Diklat

Pusat Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Umum Telekomunikasi bertujuan: menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan sarana Telekomunikasi yang mencakup tugas merencanakan serta melaksanakan pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan sesuai pola yang ditetapkan.

Pada tahun 1979 di bidang Pendidikan dan Latihan, PERUMTEL telah mengadakan beberapa tingkat pendidikan maupun "upgrading" para karyawan sebagai sarana pengkaderan.

Untuk mendesentralisasi Pendidikan dan Latihan di daerah, dalam tahun 1980 PERUMTEL membangun 28 gedung/ruang kelas di 28 tempat yang antara lain berlokasi di Medan, Padang, Semarang, Ujungpandang, Jayapura, Jakarta, Gegerkalong Bandung.

2) Bidang Litbang

Di bidang Penelitian dan Pengembangan PERUMTEL telah mengadakan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan Studi Perbandingan, pengembangan fasilitas sentral PRX, penelitian pengaturan standar Telepon/Telegrap/Telex/Data dan lain-lainnya.

Di samping itu beberapa kegiatan yang dikelompokkan dalam hal pengatasan masalah-masalah teknik di bidang operasi, pembuatan alat-alat bantu untuk bidang operasi, pengujian-pengujian, perbaikan dan kalibrasi, telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Kerjasama dengan instansi luar PERUMTEL diadakan pula dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.

Di tahun 1979 telah diadakan penelitian beberapa jenis pelayanan baru yang akan digunakan di Indonesia ialah Facsimile/Telecopier, Transmisi Data dan Hubungan Langsung Internasional (H.L.I.).

Dalam rangka pengembangan Mekanisasi Administrasi telah dibangun 6 buah

Digitized by Google

gedung Mekanisasi Administrasi yang terdiri dari gedung komputer dan pengadaan barang yang berlokasi antara lain di Jl. Gunungsahari Jakarta, di Medan, di Medan, di Bandung dan di Ujungpandang.

3. Operasional

a) Perum Pos dan Giro

Angka-angka produksi di bidang operasional dalam tahun 1979 menunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan angka-angka dalam tahun 1978. Hambatan-hambatan yang menyangkut bidang operasional tetap ada baik yang intern antara lain kurangnya pengawasan, sedangkan yang ekstern antara lain kurang teraturnya frekuensi transportasi dari kantor-kantor penghubung misalnya ke daerah-daerah transmigrasi karena kurang baiknya prasarana jalan-jalan, adanya gangguan alam karena banjir, tanah longsor, terputusnya jembatan dan lain-lain.

Sehubungan dengan terjadinya pembatalan-pembatalan penerbangan Garuda dari tanggal 29 Januari 1980 s/d 3 Pebruari 1980, terdapat penumpukan sejumlah kiriman Pos Udara di Jakarta dan beberapa kota pelabuhan udara, terutama di Medan, Semarang, Surabaya, Ujungpandang dan Jakarta. Hambatan ini sudah dapat diatasi sejak awal Pebruari 1980 dengan memanfaatkan penerbangan-penerbangan lainnya, misalnya dengan pesawat-pesawat Hercules AURI, M.N.A. dan Boeing 707 Pelita Air Service.

Dalam tahun 1979 dan 1980 telah dicetak beberapa prangko definitif yang terdiri dari seri Presiden Soeharto dan Pelita. Di samping itu diterbitkan pula beberapa prangko peringatan atau istimewa yang dapat diikuti di belakang.

Pendapatan Philateli dalam tahun 1979 di Dalam Negeri Rp.66.301.606,00 dan di Luar Negeri Rp.213.698.394,30.

Pameran Philateli di Dalam Negeri diadakan di Rembang, Malang, Bandung, Tanjungkarang, Denpasar, Ambon, Jakarta/Pusat Philateli, Lubuklinggau, Ampenan, Boyolali, Blora, Klaten, Salatiga, Purbalingga, Purwodadi, Grobogan, Kuningan, Bandung, Tabanan, Kotabumi, Watan Soppeng, Sungguminasa dan Surabaya.

Pameran di Luar Negeri diadakan di Dortmund dan di Ottawa.

b) PERUMTEL

Dalam usaha meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi maka PERUMTEL telah melembagakan secara bertahap fungsi pemasaran dalam tubuh organisasinya dengan mengadakan Bagian Pemasaran di Kantor Pusat dan Sub dinas Pemasaran di Jakarta.

Kebijaksanaan pemasaran yang dituangkan dalam peraturan-peraturan beserta tarip-tarip diarahkan untuk lebih memperhatikan kebutuhan para langganan pada umumnya dan para pemakai jasa telekomunikasi pada khususnya tanpa mengabaikan kepentingan PERUMTEL dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Tata cara penjualan jasa sambungan telepon dan telex di Jakarta telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga lebih terbuka, lebih sederhana dan lebih cepat. Media

Digitized by Google

iklan serta selebaran (folders) telah digunakan sebagai sarana penerangan (informasi) dan pendidikan (edukasi) sehingga merupakan usaha baru melalui kegiatan promosi.

Dengan telah selesainya pembangunan jaringan telepon/telex di Jakarta dan di beberapa kota besar lain maka peningkatan jumlah pemasangan sambungan telepon/telex telah digunakan jasa pihak ke tiga (instalatir) sehingga tidak diperlukan penambahan tenaga secara proporsional untuk pemasangan sambungan baru.

Target jumlah pemasangan sambungan telepon/telex baru beserta target jangka waktu pemasangan yang ditetapkan PERUMTEL telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai usaha peningkatan pelayanan yang nyata. Meskipun demikian, melonjaknya jumlah permintaan yang tersebar di seluruh penjuru kota maupun yang mengelompok (real estate, office building dan sebagainya) dan belum dapatnya disediakan saluran untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan tersebut, merupakan sumber penyebab keluhan masyarakat. Disamping itu perkembangan kebutuhan masyarakat maupun kemajuan teknologi telah membawa serta peningkatan standar kebutuhan serta persyaratan yang lebih baik yang kesemuanya merupakan tantangan PERUMTEL untuk dapat memenuhinya dengan pelayanan yang bermutu tinggi. Untuk mengukur ada atau tidaknya peningkatan dan atau perbaikan pelayanan, PERUMTEL telah menetapkan beberapa ukuran untuk masing-masing operasionalnya dan penilaian dari masyarakat. Khusus untuk modal operasional digunakan Sistem Informasi Manajemen dan "Performance Standard" dengan tolok ukurnya, sedangkan penilaian dari masyarakat diambil dari media massa yang ada, surat-surat dan telepon.

Untuk keperluan moda operasional telah ditetapkan 36 moda operasional yang diteliti terus menerus kualitasnya. Masing-masing moda tersebut ditetapkan tolok ukurnya yang merupakan batasan maksimal yang masih dapat ditolerir.

Di bidang operasional, keteleponan atau "switching" tampak sangat menonjol karena adanya modernisasi baik yang mengenai sistem maupun sarananya. Sistem manual makin menciut dan sistem otomat makin meluas. Hubungan antar kota dan antar pusat ke daerah yang cepat merupakan kebutuhan yang mendesak. Berhubung dengan itu otomatisasi keteleponan merupakan garis kebijakan Pemerintah. Karenanya otomatisasi telepon bukan saja terbatas untuk kota-kota besar atau untuk lokal, tetapi juga untuk interlokal. Setiap Sentral Telepon Otomat (STO) selalu diperlengkapi dengan trunk Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Untuk menunjang terlaksananya usaha itu diperlukan sistem transmisi yang baik dan bermutu tinggi.

Sampai akhir tahun 1980 otomatisasi Sentral-sentral Telepon sudah hampir merata sampai ke semua Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten dan kota-kota potensial lainnya di Indonesia yang semuanya berjumlah 96 kota yang memiliki fasilitas telepon otomat dengan jumlah kapasitas 540.000 satuan sambungan (S.S.). STO-STO itu masing-masing diperlengkapi dengan fasilitas SLJJ dan berkapasitas penuh. Hanya STO Merauke belum dibuka secara resmi yang menurut rencana baru dapat diresmikan pembukaannya oleh Pemerintah di awal tahun 1981. Nama-nama kota, kapasitas satuan sambungan (S.S.) dan kode wilayah STO-STO tercantum pada Lampiran 38.

Digitized by Google

Dilihat dari segi situasional, Telekomunikasi Nusantara yang merupakan salah satu perwujudan Wawasan Nusantara telah menjadi kenyataan. Fasilitas atau kemudahan SLJJ sudah tersedia dari Sabang sampai ke Merauke. Orang tinggal memutar atau menekan telepon dan sambungan langsung jarak jauh terjalin dan mempersatukan mereka yang berkomunikasi. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Pos dan Telekomunikasi turut membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk Ketahanan Nasional.

Sambungan langsung jarak jauh tidak hanya terbatas di dalam negeri. Sejak tanggal 8 Agustus 1980 PERUMTEL memperluas hubungan luar negeri dengan melalui jaringan Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang beroperasi dengan: Singapura (kode 65), Jerman Barat (kode 49), Australia (kode 61), Papua Nugini (kode 675), Jepang (kode 81) dan Selandia Baru (kode 64), Amerika Serikat (kode 1) dan Taiwan (kode 886) disamping tersedianya percakapan melalui operator 104.

3. Hubungan Internasional

a. Pembelian seluruh saham PT Indosat dari ACR/ITT oleh Pemerintah

Dalam Bab III, Sub bab 1, b, posisi Indonesia dalam Perjanjian antara Pemerintah RI dengan ITT mengenai Pembangunan dan Operasi Fasilitas Satelit Komunikasi kurang menyenangkan karena kondisi Indonesia di bidang keuangan pada waktu perjanjian tersebut ditandatangani, kurang cerah. Meskipun pada tanggal 28 Mei 1974 telah diadakan Perjanjian antara Perumtel dengan PT Indosat sebagai tindakan untuk memperbaiki posisi Indonesia, dalam perkembangannya Pemerintah berpendapat bahwa operasi PT Indosat yang mendasarkan pada Perjanjian RI-ITT 1967 tidak sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang telekomunikasi. Berhubung dengan itu dengan Keputusan Presiden No. 52 tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980, Presiden RI menugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas Dr. J.B. Sumarlin untuk mengadakan perundingan kembali semua perjanjian yang diadakan Pemerintah dan PERUMTEL dengan ITT, ACR dan PT Indosat untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang telekomunikasi, serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Untuk pelaksanaan perundingan tersebut, Menpan dibantu oleh suatu Team Perundingan yang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan Ditjen Postel, BKPM, PERUMTEL, BI dan Instansi lain yang dianggap perlu. Menteri Perhubungan dan Direksi PERUMTEL membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas tersebut agar berjalan lancar.

Dengan Keputusan MENPAN No. 63/Menpan/1980 tanggal 18 September 1980 dibentuk Team Perundingan Kontrak-kontrak di bidang telekomunikasi dengan susunan sebagai berikut:

1) Team Pengarah Perundingan:
   – J.B. Sumarlin, selaku Ketua merangkap anggota,

Digitized by Google

- Letjen TNI (pur) Achmad Tahir, Sekjen Dephub selaku anggota,
- Drs. Suryadi, Dirjen Postel selaku anggota,
- Drs. Muchtaruddin Siregar MA, Asisten Menko bidang EKUIN selaku anggota.

2) Team Pelaksana perundingan terdiri dari:
   - Drs. Oskar Surjaatmadja Ma Sc, Dirjen Moneter Dalam Negeri Depkeu selaku Ketua,
   - Drs. Astar Siregar MA, Sekditjen Moneter Dalam Negeri selaku Sekretaris merangkap anggota;
   - Ir. Willy Moenandir Mangoendiprodjo, Dirut PERUMTEL selaku anggota;
   - Ir. Sukarno Abdurachman, Kepala Biro Perencanaan DEPHUB selaku anggota;
   - Drs. Oesman Sjafiudin, Kepala Biro Fasilitas dan Perijinan pada BKPM selaku anggota;
   - Drs. Sumantri Sumodirono Ma Sc, Direktur Akuntan Negara Ditjen Pengawasan Keuangan Negara selaku anggota;
   - T.M. Sjakur Machmud SH, Urusan Hukum dan Perundang-undangan Bank Indonesia, selaku anggota.

Selanjutnya dengan Keputusan Ketua Team Pelaksana Perundingan Kontrak-kontrak Di Bidang Telekomunikasi No. KEP-01/TPP/1980 tanggal 19 September 1980 dibentuk Sub Team Pembantu yang terdiri dari Sub Team Keuangan, Sub Team Teknis, Sub Team Hukum, Sub Team Sekretariat.

Anggota dari Sub Team Keuangan adalah pejabat-pejabat dari Depkeu, Dephub, BKPM, Ditjen Postel (Drs. Hudijono) dan PERUMTEL (Drs. Paminto Adjie).

Sub Team Teknis diketuai oleh Dirut PERUMTEL beranggotakan pejabat-pejabat Ditjen Postel/Perumtel yaitu Ir. A.Ph. Djiwatanpu, Nurtjahjo Bc. TT dan Eem Rachmat Bc.TT.

Sub Team Hukum diketuai oleh T.M. Sjakur Machmud SH dari BI, dengan anggota dari DEPKEU (A. Warouw SH), BI (Alex Merukh SH), DEPHUB (Fuad SH MPIA) dan DITJEN POSTEL (P. Sartono SH).

Pada tanggal 19 September 1980 Menpan mengeluarkan surat kepada Presiden ACR yang isinya memberitahukan bahwa Pemerintah RI berkehendak membeli semua saham ACR pada PT Indosat atas dasar kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Alasan rencana pembelian itu antara lain adanya pertimbangan hukum dan implikasi ekonomi yang mendasar dari Perjanjian RI-ITT 1967 sehingga Pemerintah sampai kepada keputusan untuk membeli PT Indosat tersebut.

Pada tanggal 13 Oktober 1980 Team dari ACR dan ITT/PT Indosat mulai melakukan perundingan, di mana prinsipnya pihak ACR/ITT bersedia menjual sahamnya. Perundingan yang diadakan sampai dengan tanggal 15 Oktober 1980 belum mencapai kompromi terutama mengenai "formula" harga di mana Pemerintah mendasarkan pada nilai buku sekarang (Net book value) dengan "adjustment", sedangkan pihak ACR mendasarkan pada Present Value dengan suatu discounted factor.

Pada tahap perundingan ini Team Perunding RI menegaskan bahwa apapun yang terjadi, tanggal 1 Januari 1981 Pemerintah menguasai PT Indosat.

Kedua pihak menyetujui bahwa sejak tanggal 13 Oktober 1980 sampai tercapai-

Digitized by Google

nya perjanjian jual beli, PT Indosat di bawah pengawasan Pemerintah. Pengeluaran-pengeluaran lebih dari US$ 25.000.- harus diketahui oleh Pemerintah yang dalam hal ini diawasi oleh Direktur Akuntan Negara dan Dirut PERUMTEL.

Perundingan tahap ke dua dilakukan tanggal 17 s/d 20 Nopember 1980. Akhirnya pada tanggal 20 Nopember 1980 tercapai kesepakatan antara Pemerintah yang diwakili oleh Menpan/Wakil Ketua Bapennas Dr. J.B. Sumarlin dan ACR/ITT (kecuali harga jual beli) yang diwakili oleh James T. Woolf yaitu dengan ditanda-tanganinya: Share sale agreement dan Release and Indemnity Agreement.

Perundingan tahap berikutnya diadakan antara tanggal 12 s/d 16 Desember 1980, dimana dalam perundingan ini dibicarakan soal harga jual beli saham tersebut (purchase price).

Semula pada tahap pertama perundingan pihak ACR menawarkan harga sejumlah US $ 93 juta, sedangkan pada tahap kedua perundingan tersebut harga penawaran diturunkan menjadi US 72 juta.

Dalam Tahap ketiga perundingan ini yang bersangkutan datang dengan menawarkan harga sebesar US$ 60 juta. Team Indonesia langsung dipimpin oleh Dr. J.B. Sumarlin dalam melakukan perundingan harga ini, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Drs. Ek. Orkar Surjaatmadja (Dirjen Moneter Dalam Negeri) dibantu oleh Drs. Ak. Sumantri Sumodirono Masc (Direktur Akuntan Negara), Ir. Sukarno Abdurachman dan T.M. Sjakur SH (pejabat BI). Team perunding harga Indonesia tahap pertama menawar dengan harga US$ 30 juta, sedangkan pihak ACR turun tawarannya menjadi US$ 55 juta.

Tahap kedua tawaran Indonesia naik menjadi US$ 40 juta, sedangkan pihak ACR tetap bertahan dengan harga US$ 55 juta. Setelah melalui perundingan yang rumit akhirnya harga jual beli tersebut disetujui sebesar Rp. 27.260.000.000,- atau US$ 43,616,000,- (dengan kurs 1US$ = Rp. 625,-).

Sehingga rumus harga menjadi sebagai berikut:

Purchase price (PP) = X + NWC (Net working capital) - LTL (long term liabilities).

PP = Rp. 45.460.000.000 + (- Rp. 4.000.000.000,-) - Rp. 14.200.000.000,-

PP = Rp. 45.460.000.000,- - Rp. 4.000.000.000,- - Rp. 14.200.000.000,-

PP = Rp. 27.260.000.000,-

Tanggal 16 Desember 1980 dicapai kesepakatan tentang harga jual beli yang dituangkan dalam suatu perjanjian (Supplemental Agreement). Uang muka (down payment) sebesar Rp. 6.500.000.000,- akan dibayarkan dalam waktu 1 minggu setelah tanggal 16 Desember 1980. Sedangkan Closing date ditetapkan pada tanggal 30 Desember 1980 yang berarti mendahului effective date (tanggal 31 Desember 1980). Kebijaksanaan ini diambil oleh karena alasan praktis saja dimana bank-bank akan tutup pada tanggal 31 Desember 1980, sehingga pelunasan harga jual beli lebih baik dilakukan 1 hari lebih awal.

Pada saat closing date tersebut seluruh perjanjian antara Pemerintah RI dan Perumtel dengan pihak ITT/ACR atau PT Indosat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengenai perobahan status PT Indosat, Pemerintah memutuskan menjadi suatu perusahaan-perseroan (Persero) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Indosat.

Digitized by Google

PT Indosat baru tersebut diberikan wewenang dalam menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional, sedangkan Perumtel ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri.

Dengan demikian untuk memberikan landasan kerja bagi PT Indosat tersebut perlu dilakukan penyesuaian peraturan perundangan dibidang telekomunikasi untuk umum dengan jalan mengadakan perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1974.

Rapat Board of Directors PT Indosat (lama) yang terakhir diadakan tanggal 17 Desember 1980 dimana dalam rapat tersebut seluruh anggota Board of Directors menandatangani pengunduran diri yang akan berlaku pada saat pengangkatan Direksi baru PT Indosat.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi baru PT Indosat dilakukan pada tanggal 31 Desember 1980.



Jakarta, 20 Nopember 1980.
James T. Woolf yang mewakili ACR/ITT dengan didampingi oleh Menteri Negara PAN/Wakil Ketua BAPPENAS Dr. J.B. Sumarlin sedang menyampaikan sambutannya, selesai upacara penanda tanganan mengenai pembelian seluruh saham P.T. INDOSAT dari ACR/ITT oleh Pemerintah R.I.

Digitized by Google

b. Pengadaan dan peluncuran Satelit Palapa Generasi Ke dua (Palapa B-1 dan B-2)

1) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit Palapa B-1 dan B-2.

Dalam Bab III, Sub bab 1, j, tentang Repelita III, telah dicantumkan bahwa dalam tahun 1983 dan 1984 akan diluncurkan Palapa Generasi Ke dua (Palapa B-1 dan B-2) untuk mengganti Palapa Generasi Pertama yang berawal dan berakhir seperti telah disinggung dalam Prakata Jilid V ini. Latar belakang penggantian Palapa Generasi Pertama dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satelit Komunikasi Domestik PALAPA Generasi Pertama yang terdiri dari PALAPA A-1 dan A-2 yang diluncurkan masing-masing pada tanggal 9 Juli 1976 dan 11 Maret 1977, umurnya akan berakhir 7 tahun setelah berada di angkasa atau tepatnya pada bulan Juli 1983 dan bulan Maret 1984.

Untuk menjaga agar kesinambungan operasional SKSD PALAPA ini dapat tetap dipertahankan, perlu dipikirkan pengadaan satelit pengganti yang akan diluncurkan berturut-turut sebelum umur satelit yang digantikannya berakhir. Untuk ini perlu dipersiapkan suatu perencanaan yang matang jauh hari sebelumnya, mengingat bahwa pembuatan satelit membutuhkan waktu normal 30 bulan.

Menyadari hal ini, Dirjen Postel dengan Surat Keputusannya No. 6/DIRJEN/78 tertanggal 1 Maret 1978 telah membentuk Team Perencanaan Satelit Palapa Generasi Ke dua yang tugasnya antara lain menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan rencana penggantian satelit-satelit Palapa Generasi Pertama. Team ini kemudian berhasil menyusun suatu spesifikasi teknik yang dituangkan kedalam suatu dokumen tender pengadaan satelit-satelit Palapa B.

Untuk memperoleh bahan tambahan demi penyempurnaan spesifikasi tersebut di atas, maka pada tanggal 23 Nopember 1979 oleh Dirjen Postel beserta staf telah diadakan pembeberan (expose) dihadapan para ahli maupun para pemakai SKSD dari berbagai Departemen dan Lembaga non Departemen termasuk Dewan Telekomunikasi. Ternyata bahwa pembeberan ini mendapat tanggapan yang positip.

Mengawali kegiatan tersebut diatas, Ditjen Postel dan PERUMTEL juga telah menyelesaikan kegiatan pendaftaran dan koordinasi dengan fihak IFRB untuk penentuan frekuensi dan lokasi orbit. Sedangkan untuk kendaraan peluncur telah pula diadakan penjajagan dengan fihak NASA-Amerika Serikat dan ESA-Eropa.

Setelah diadakan suatu seleksi (semacam pra-kualifikasi) dan berdasarkan Keppres No. 14/1979, PERUMTEL pada tanggal 8 Mei 1979 telah mengundang 4 (empat) pembuat satelit komunikasi komersial yaitu: FACC (Ford Aerospace & Communications Corp), HCI (Hughes Communications International Incorporation of America), TRW dan RCA, untuk mengajukan penawaran harga dua buah satelit komunikasi sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditetapkan. Pada hari terakhir penyerahan penawaran ini, yaitu tanggal 13 Agustus 1979, hanya FACC dan HCI yang menyerahkan penawaran harga sedangkan TRW dan RCA telah menyatakan mengundurkan diri.

Penawaran yang diajukan oleh FACC dan HCI ini untuk selanjutnya diserahkan

Digitized by Google

untuk dinilai kepada suatu Panitia Tender Palapa B yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK 35/OT.001/Phb-79 tertanggal 13 Juni 1979 di mana anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen Perhubungan Kem. Negara Riset & Teknologi, LAPAN, Departemen Keuangan, BAPPENAS, Bank Indonesia, Ditjen Postel dan PERUMTEL. Panitia ini bertugas antara lain menilai dan meneliti penawaran yang masuk dan memberi rekomendasi kepada Menteri Perhubungan.

Oleh karena harga yang diajukan oleh kedua peserta tender terlalu tinggi maka dinyatakan tidak ada pemenangnya. Untuk memperoleh harga yang mendekati anggaran yang direncanakan, kepada kedua peserta tender diberikan kesempatan untuk mengajukan penawaran ulang dengan spesifikasi yang sama. Kesempatan ini mendapat tanggapan yang positip dari kedua peserta dengan diterimanya penawaran harga baru pada tanggal 10 September 1979. Setelah Panitia melakukan penilaian dan penelitian ulang terhadap harga-harga penawaran ulangan tersebut, Panitia menyampaikan suatu rekomendasi kepada Menteri Perhubungan pada pertengahan Oktober 1979 yang berisi antara lain daftar urutan penawaran yang terbaik yaitu HCI pada tempat pertama dan FACC pada urutan ke dua.

Menurut ketentuan dalam Prosedur Evaluasi Tender Palapa B yang ditetapkan jauh sebelum kegiatan evaluasi diadakan, maka kesempatan pertama untuk bernegosiasi diberikan kepada HCI yang diadakan dari tanggal 22 Oktober s/d 15 Nopember 1979. Pada umumnya negosiasi dapat berjalan dengan lancar.



Jakarta, 20 Desember 1979
Penandatanganan kontrak pengadaan satelit Palapa B. Dari kiri kekanan nampak DIRUTTEL Ir. Willy Moenandir M, DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi dan Mr. Paul S. Visher Vice President Hughes Aircraft Co.

Digitized by Google

Akhirnya pada tanggal 18 Desember 1979 Menteri Perhubungan dengan suratnya yang ditujukan kepada Direktur Utama PERUMTEL No. A 43 D/PT.305/PHB telah menetapkan HCI (Hughes Communications International Incorporation) sebagai pemenang tender Palapa B dengan harga US$ 79,893,950.00 yang terdiri:

- Ruas Angkasa (2 buah satelit) US$ 74,505,480.00
- Ruas Bumi (peralatan pengon-
  trol satelit dan Modifikasi
  Stasiun Bumi, Pendidikan
  dan Suku Cadang) US$ 5,388,470.00

Dalam jumlah ini belum termasuk beaya peluncuran dan asuransi.

Pada tanggal 20 Desember 1979 jam 19.00, bertempat di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ditandatanganilah kontrak pengadaan Satelit Palapa Generasi Ke dua (Palapa B). Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur Utama PERUMTEL Ir. Willy Moenandir M. dan Vice President Hughes Aircraft Company Mr. Paul S. Visher, dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Drs. Suryadi.

Jumlah seluruh kontrak sebesar US$ 79,893,950.00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat).

Hadlir dalam upacara tersebut, para pejabat Departemen Perhubungan/Ditjen Postel, Bappenas, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Wakil-wakil dari Komisi V/DPR-RI, para Wartawan serta para undangan lainnya.

2) Penandatanganan Persetujuan Peluncuran Satelit Palapa B-1 dan B-2.

Setelah jadwal peluncuran ditentukan, dicari pesawat peluncur yang mampu membawa beban satelit Palapa B kedalam orbit, pada jadwal yang dikehendaki. Pengalaman dengan NASA untuk peluncuran Palapa A yang telah berhasil dengan baik, mengarahkan Indonesia untuk menghubungi NASA lagi. Setelah beberapa kali diadakan pembicaraan dalam tahun 1978, pihak Indonesia pada bulan Desember 1978 itu juga memilih peluncuran dengan Peluncur Ulang Alik (Space Shuttle).

Dalam bulan April 1979 ditandatangani sebuah Memorandum of Understanding antara Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi di pihak Indonesia dan National Aeronautics and Space Administration dari Amerika Serikat, di mana dicantumkan bahwa kedua belah pihak akan merundingkan draft surat perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan tentang jasa peluncuran itu serta masalah-masalah penyesuaian teknik yang harus diperhatikan.

Sementara itu pihak NASA mengorganisasi pertemuan-pertemuan berkala yang selalu dihadiri oleh Wakil-wakil Indonesia, untuk penjelasan masalah-masalah jadwal dan tehnik. Karena jadwal peluncuran kurang pasti, NASA setuju untuk mengadakan fasilitas peluncur cadangan dengan roket Delta, meskipun roket Delta ini harus ditingkatkan kemampuannya untuk beban yang lebih besar sesuai dengan perkembangan kapasitas satelit-satelit komunikasi. Indonesia juga menyetujui perjanjian kerjasama yang telah dimulai oleh NASA dan TELESAT - CANADA, untuk

Digitized by Google

peningkatan kemampuan roket Delta ini dan menggunakannya apabila Peluncur Ulang Alik mengalami pergeseran lagi. Secara ini Palapa B-1 pasti akan dapat diluncurkan pada saat yang telah ditentukan untuk mengganti Palapa A-1.

Pada tanggal 9 Desember 1980, bertempat di aula Ditjen Postel dilakukan penandatanganan Persetujuan Peluncuran Satelit Palapa B-1 dan B-2 oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Penandatanganan Perjanjian itu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Drs. Suryadi, atas nama Pemerintah R.I. dan Dr. Stanley I. Weiss, Wakil Kepala Operasi Angkutan Antariksa NASA.

Hadir dalam upacara tersebut antara lain DUBES Amerika Serikat Edward E. Masters, para pejabat Departemen Perhubungan/DITJEN POSTEL/PERUMTEL, Departemen HANKAM, LAPAN, Wakil dari Komisi V/DPR-RI dan para undangan lainnya.

Kedua satelit akan memberikan pelayanan suara, video, telepon, dan data sangat cepat kepada Indonesia serta anggota-anggota ASEAN lainnya: Filipina, Muang Thai, Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan persetujuan itu, Indonesia akan bertanggungjawab dalam hal pemeriksaan satelit dan menyatukan satelit dengan pesawat peluncur yang akan mendorong satelit-satelit tersebut ke garis edar peralihan berbentuk elips, dari mana satelit-satelit itu akan digerakkan menuju garis edar operasinya. NASA akan menyediakan semua jasa yang berhubungan dengan peluncuran melalui Pusat Antariksa Kennedy di negara bagian Florida.

Kedua satelit tersebut akan diluncurkan pada awal tahun 1983 dan awal tahun 1984 dengan mempergunakan pesawat Ulang-Alik atau Roket Delta.

Beberapa karakteristik teknik Palapa B dapat disebutkan sebagai berikut:
- kapasitas 24 transponder per satelit (dua kali kapasitas Palapa A).
- daerah kerja meliputi kawasan ASEAN.
- lokasi orbit 108, 113 atau 118 B.T. (kira-kira di atas Kalimantan).
- pancaran efektif 35 DBW (Desible Walt) dengan daya pancar 10 Watt.
- umur 8 tahun.

Peluncuran Satelit Palapa B akan ditangani dengan keahlian dan kemampuan yang merupakan tradisi NASA yang memberikan makna lebih lanjut tentang pendekatan penggunaan antariksa secara rutin dan operasional. Jika tidak ada aral melintang, jaman Pesawat Ulang-Alik akan segera lahir di mana Indonesia akan turut menghadapi dan akan meneruskan pemeliharaan pelayanan telekomunikasinya yang telah dimulai dengan peluncuran Palapa A.

Digitized by Google



Jakarta, 9 Desember 1980

Penanda tanganan peluncuran satelit Palapa B oleh NASA, masing-masing diwakili oleh DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi (kanan) dan Dr. Stanley I. Weiss dari NASA (gambar atas). Diantara yang hadir antara lain nampak dari kanan ke kiri Ketua LAPAN Dr. Sunarjo, DIRUT PERUMTEL Ir. Willy Moenandir M, DUBES AS di Indonesia Edward E. Masters dan SEKDITJEN POSTEL Ir. Rollin (gambar tengah).

Digitized by Google





Gambar atas dari kanan ke kiri Wakil Ketua Komisi V/ DPR-RI Suprantijo, Anggota Komisi V/DPR-RI Jusuf Amin dan ASKOMLEK HANKAM Marsekal Muda Tedjo Soewarno

Samarinda, 15 Nopember 1980.
Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin sedang menanda tangani prasasti pada peresmian STO Samarinda. Tampak mendampingi DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi (kanan), DIRUTTEL Ir. Willy Moenandir M (kiri) dan Kawitel IX Ir. Djoko Soelistijohadi Bc.T.T. (tengah).

Digitized by Google





Semarang, 11 Juli 1980.
Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam mewakili Menteri Perhubungan R.I. sedang menanda tangani prasasti pada peresmian Gedung Kantor Pos Besar Kelas I Semarang. Nampak menyaksikan, antara lain DIROPPOS H.A. Mustafa Bc.A.P. (paling kiri) dan DIRKAPPOS Soetrisno Bc.A.P. (kedua dari kanan). Gambar bawah Gedung Kantor Pos Besar Kelas I Semarang.

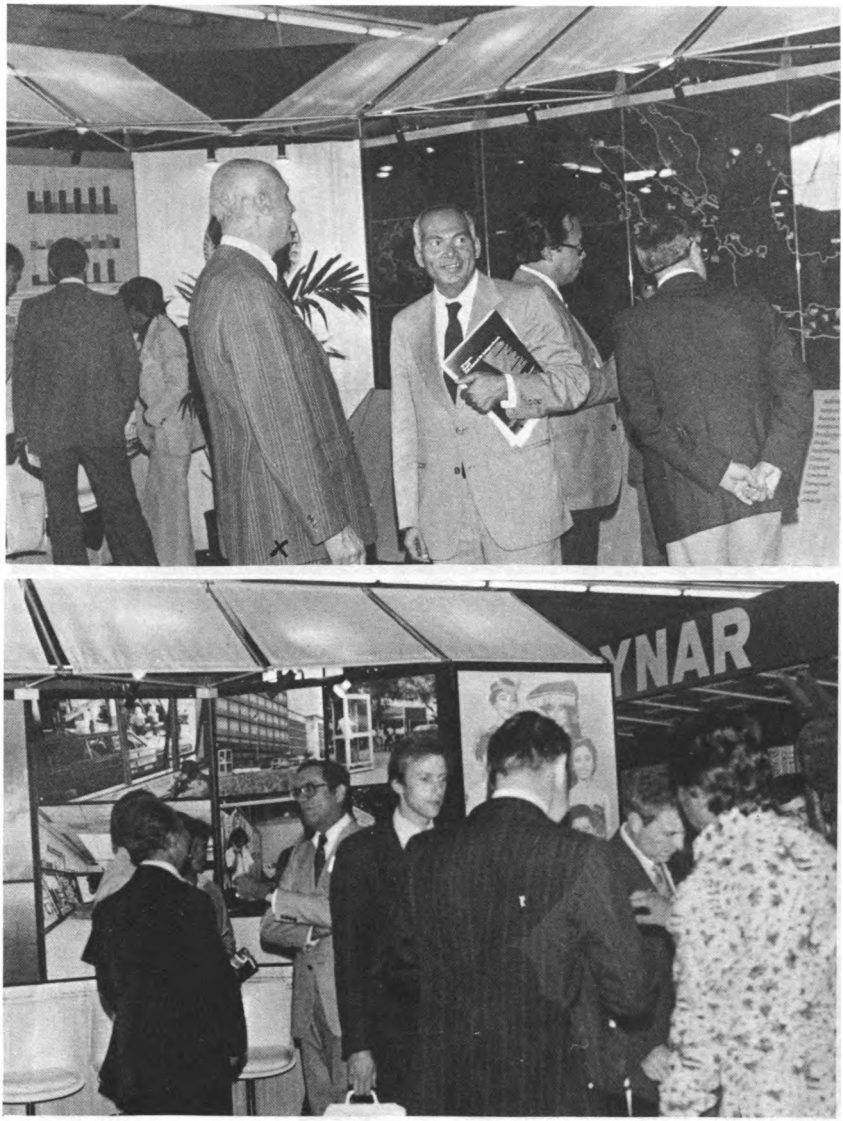
Digitized by Google





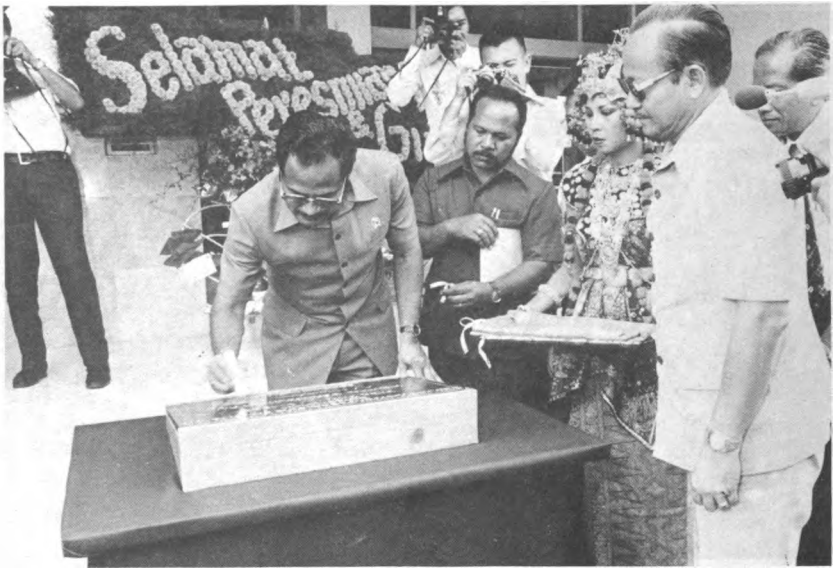
Jenewa, 20 - 26 September 1979.
Para pengunjung Stand Administrasi Telekomunikasi Indonesia pada Telecom 79. Gambar atas, Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin (x), DIRUTTEL Ir. Willy Moenandir (xx). Gambar bawah, DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi (x).

Digitized by Google



Gambar atas SEKJEN ITU Mr. Mili (x) dan pengunjung lainnya. Gambar bawah, paling kiri Ketua Delegasi Indonesia E. Supandi Bc.AP dan paling kanan (berbaju batik) Drs. Musjafri Effendy, anggota delegasi.

Digitized by Google





Digitized by Google



Palembang, 7 Pebruari 1980.
Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin sedang menanda tangani prasasti pada peresmian Kpb I Palembang (gambar kiri atas). Pengguntingan pita oleh Gubernur Sumatera Selatan Saiman Sagiman (gambar kiri bawah) Gambar atas, Gedung Kpb I Palembang yang baru diresmikan.

Digitized by Google



Surabaya, 10 April 1980.
SEKJEN DEPHUB A. Tahir sedang menanda tangani prasasti pada peresmian Gedung Kantor Daerah Pos dan Giro III/Sentral Giro Surabaya.

Digitized by Google

LAMPIRAN

Digitized by Google

Digitized by Google

LAMPIRAN

Lampiran 1

T.T.C.
Bandung

EXPERTS WORKING ON THE PROJECT INS/68/516
PHASE - I

NO.	TITLE	NAME	DURATION OF ASSIGNMENT
1.	Project Manager	M. KINOSHITA	23. 7.68 to 31.12.71 *
2.	Training Adviser	J. WILLMOT	23.11.68 to 12. 3.71
3.	Telephone Switching	H.J. HEYMANN	1. 6.69 to 31.12.71 *
4.	Line & Cable	S.G. SALLANDER	12.12.68 to 2. 6.71
5.	Line Transmission	A.M. SKINNER	18. 1.69 to 15. 1.71
6.	Radio/Microwave	R. INANO	24.12.68 to 31.12.71 *
7.	Telegraphy	H.E.A. SCHNITZKE	10. 2.69 to 31.12.71 *
8.	Power Plant	D. ROSENBAUM	19.11.69 to 31.12.71 *

Note: * mark indicates that the service of experts continued to Phase-II project.

EXPERTS WORKING ON THE PROJECT INS/71/536
PHASE - II & EXTENSION

NO	TITLE	NAME	DURATION OF ASSIGNMENT
1.	Project Manager	M. KINOSHITA	1. 1.72 to 31.12.72
	Project Manager	R. INANO	1. 1.73 to 31.12.78
2.	Telephone Switching	H.J. HEYMANN	1. 1.72 to 31.10.75
	Telephone Switching	E.A.E. ANDERSSON	30.12.76 to 31.12.78
3.	Outside Plant	W.J. KEYNES	22. 9.72 to 21.11.75
4.	Line Transmission	T. KURODA	26. 5.72 to 25.11.75
5.	Microwave/HF Radio	R. INANO	1. 1.72 to 31.12.72
	Microwave/HF Radio	S. FUJIO	29.10.73 to 31.12.78
6.	Telegraphy	H.E.A. SCHNITZKE	1. 1.72 to 31.10.75
7.	Power Plant	D. ROSENBAUM	1. 1.72 to 31.10.75
8.	Traffic Engineering	P.J. O'SULLIVAN	20. 1.73 to 31.10.75
9.	Telephone & Telegraph Traffic Operation	J.B. KING	4. 6.72 to 31.12.75
10.	Administration & Store Supply	J.D. JORDAN	16.11.74 to 15.11.76
11.	Data Transmission	H. KUPITZ	12. 1.77 to 31.12.78
12.	General Telecom. Theory	T.E. MEXTER	2. 2.77 to 31.12.78
13.	Satellite Communication (Senior)	J.S.R. LAWSON	13. 8.78 to 12. 8.79
14.	Broadband Transmission (Senior)	A.K. ROS	25. 9.78 to 24. 9.79
15.	Associate Expert in Crossbar Switching	E.A.E. ANDERSSON	30. 9.75 to 25.12.76

Digitized by Google

T.T.C.
BANDUNG

TABLE / " I ANNUAL SUMMARY OF TRAINING COURSES
1969 - 1971 (INS/68/516)

As at 31 December 1971.

Year	Type of training	No. of trainees							Trainee-weeks	Remarks
		I	C.F.	T	F	C.T.	D	T		
1969	Long - term	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Courses commenced in 1969
	Short - term	103	0	103	79	21	3	103	1,202	1 Course continued to 1970
	Sub - total	103	0	103	79	21	3	103	1,202	
1970	Long - term	290	0	290	0	269	21	290	8,235	11 Classes of RTU continued 1970
	Short - term	412	21	433	406	21	6	433	3,885	30 Courses commenced in 1970
	Sub - total	702	21	723	406	290	27	723	12,120	1 Course continued to 1971
1971	Long - term	0	269	269	257	0	12	269	7,395	11 Classes of RTU COMPLETED
	Short - term	416	21	437	377	59	2	437	3,784	33 Courses commenced in 1971
										4 Courses continued to 1972
	Sub - total	416	290	706	634	58	14	706	11,179	
Total 1969 - 1971	Long - term	290	-	-	257	0	33	290	15,630	For INS/68/516 Project 58 students continued to INS/71/536 Project.
	Short - term	931	-	-	862	58	11	931	8,871	
	Sub - total	1,221	-	-	1,119	58	44	1,221	24,501	

N o t e : I - Intake, C.F. —continued from previous year, F - Finished, C.T. -Continued to next year,
D. - Dropouts, T - Total.

Long - term = Course duration more than 1 year,
Short - term = Course duration less than 1 year

File AB 5/1

Lampiran 2

Digitized by Google

T.T.C.
Bandung

TABLE I ANNUAL SUMMARY OF TRAINING COURSES
1972 - 1978 (INS/71/536)

As at 30 Sept. 1978

Year	Type of training	No. of trainees							Trainee-weeks	Remarks
		I	C.F.	T	F	C.T.	D	T		
1972	Long-term	418	0	418	0	375	43	418	11,398	15 classes continued to 1973.
	Short-term	322	58	380	352	25	3	380	3,298	26 up-grading courses commenced in 1972
	Sub - total	740	58	798	352	400	46	798	14,696	
1973	Long-term	319	375	694	260	398	36	694	19,335	13 classes continued to 1974.
	Short-term	566	25	591	488	101	2	591	3.592	33 up-grading courses commenced in 1973
	Sub - total	885	400	1,285	748	499	38	1,285	22,927	
1974	Long-term	280	398	678	109	514	55	678	20,295	18 classes continued to 1975
	Short-term	702	101	803	634	167	2	803	7,846	37 up-grading courses commenced in 1974
	Sub - total	982	499	1,481	743	681	57	1,481	28,141	
1975	Long-term	743	514	1,257	465	759	33	1,257	43,778	31 classes continued to 1976
	Short-term	990	167	1,157	867	273	17	1,157	13,129	47 up-grading courses commenced in 1975
	Sub - total	1,733	681	2,414	1,332	1,032	50	2,414	56,907	
1976	Long-term	634	759	1,393	306	1,028	59	1,393	48,486	46 classes continued to 1977
	Short-term	910	273	1,183	1,073	90	20	1,183	17,109	41 up-grading courses were commenced in 1976
	Sub - total	1,544	1,032	2,576	1,379	1,118	79	2,576	65,595	
1977	Long-term	256	1,028	1,284	541	706	37	1,284	41,896	31 classes continued to 1978
	Short-term	978	90	1,068	843	213	12	1,068	13,000	51 up-grading courses were commenced in 1977.
	Sub - total	1,234	1,118	2,352	1,384	919	49	2,352	54,896	

Note : I - Intake, C.F. - Continued from previous year, F - Finished, C.T. - Continued to next year, D - Dropouts, T - Total.

File : AB 5/1.

Digitized by Google

T.T.C.
Bandung

TABLE I ANNUAL SUMMARY OF TRAINING COURSES AT TTC BANDUNG

As at 30 Sept. 1978

Year	Type of training	No. of trainees							Trainee-weeks	Remarks
		I	C.F.	T	F	C.T.	D	T		
1978	Long-term	250	706	956	384	566	6	956	26,121	
	Short-term	1,028	213	1,241	794	410	37	1,241	13,426	
	Sub - total	1,278	919	2,197	1,178	976	43	2,197	39,547	
	Long-term									
	Short-term									
	Sub - total									
	Long-term									
	Short-term									
	Sub - total									
	Long-term									
	Short-term									
	Sub - total									
	Long-term									
	Short-term									
	Sub - total									
1972 - 78 Total	Long-term	2,900	-	-	2,065	566	269	2,900	211,309	
	Short-term	5,496	58	-	5,051	410	93	5,554	71,400	
	Sub - total	8,396	58	-	7,116	976	362	8,454	282,709	

Note : I - Intake, C.F. - Continued from previous year, F - Finished, C.T. - Continued to next year, D - Dropouts, T - Total.

File : AB 5/1.

Lampiran 4

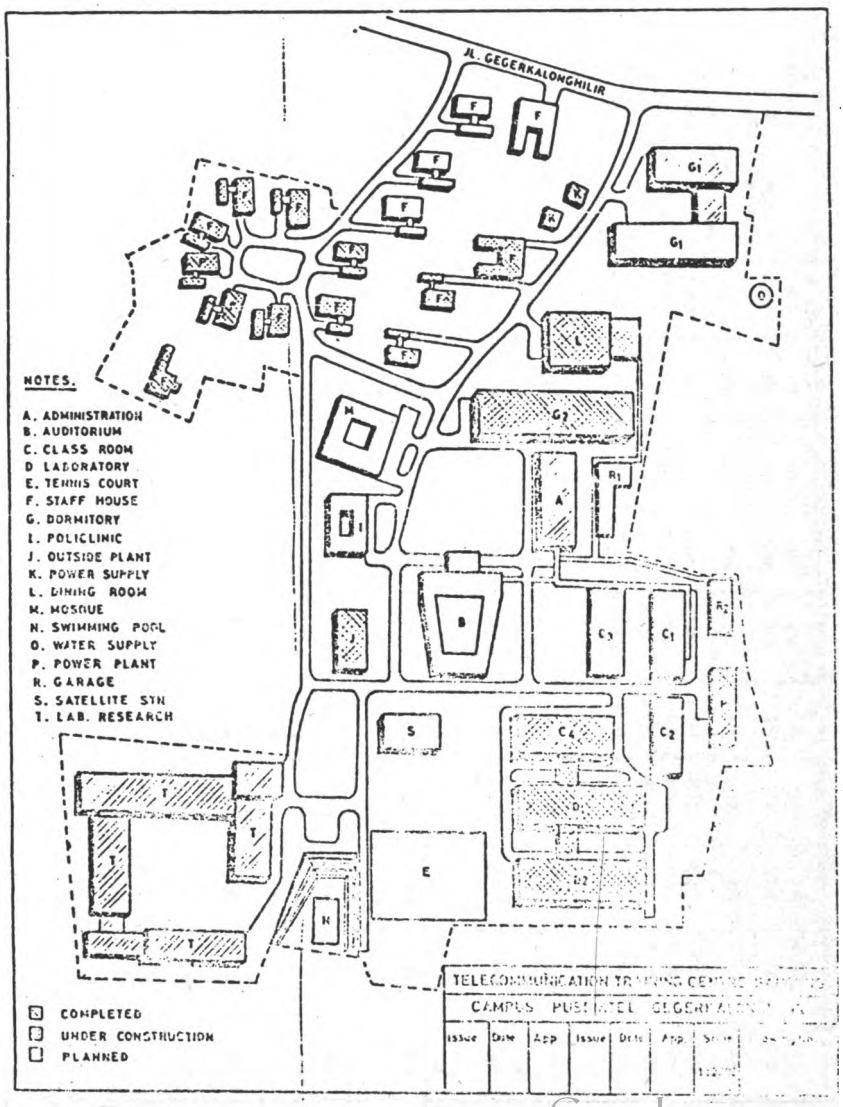
316

Digitized by Google

Lampiran 5

LAY-OUT OF BUILDINGS

AT GEGERKALONG SITE.



Digitized by Google

PERKEMBANGAN JARINGAN PRODUKSI JASA 1969 s/d 1978

No urut		Uraian	PELITA I					PELITA II				
			1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
	I.	Kantor Pos dan Giro.										
1.		Kantor Pos	193	196	197	197	199	196	174	177	184	194
2.		Kantor Pos Tambahan	73	84	105	121	135	138	147	155	169	180
3.		Kantor Pos Pembantu	792	803	810	821	820	830	873	890	922	977
4.		Sentral Giro	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5.		Loket Ekstension	9	10	11	13	22	24	27	32	31	34
		Kios Benda Pos dan Meterai	8	8	8	8	19	17	16	15	15	23.
		Jumlah :	1.084	1.110	1.140	1.169	1.204	1.214	1.246	1.278	1.330	1.417
	II.	Pos Bergerak										
1.		Pos Keliling Kota	8	8	10	24	27	34	34	37	50	61
2.		Pos Keliling Desa	80	80	107	118	84	262	262	309	478	491
		Jumlah	88	88	117	142	111	296	296	346	528	552
	III.	Unit Pelayanan Pos.										
1.		Rumah Pos	1.351	1.346	1.350	1.349	1.343	1.357	1.385	1.400	1.392	1.378
2.		Agenpos	1	4	3	9	5	5	7	9	11	13
		Jumlah	1.352	1.350	1.353	1.358	1.348	1.362	1.392	1.409	1.403	1.391
	IV.	Fasilitas Pos Lainnya.										
1.		Pemegang Depot Benda Pos dan Meterai	781	934	1.103	1.241	1.400	1.477	1.489	1.607	1.784	1.978
2.		a. Kotakpos tersedia	7.259	7.259	7.259	7.259	7.429	7.622	8.055	8.055	10.628	11.956
		b. Kotakpos disewa	4.009	4.013	4.011	4.014	4.474	4.679	5.166	5.166	8.357	9.448
3.		Tromolpos	1.761	1.761	1.762	1.762	1.845	2.491	2.753	2.753	2.886	2.639
4.		a. Prangko berlangganan untuk majalah	259	278	360	428	465	510	538	588	658	718
		b. Prangko berlangganan untuk surat kabar	240	290	321	346	365	396	409	434	448	469
5.		Bulkpos	295	311	314	316	317	318	318	318	318	318

Digitized by Google

Lampiran 7

RENCANA PEMBANGUNAN KANTORPOS TAMBAHAN/PEMBANTU DI PROPINSI-PROPINSI

NO.	PROPINSI	PHISIK					
		79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	Total Repelita III
1.	D.K.I. Jakarta	6	10	12	13	7	48
2.	Jawa Barat	18	20	24	21	16	99
3.	Jawa Tengah	17	22	26	22	15	102
4.	Jawa Timur	19	23	24	22	16	104
5.	D.I. Aceh	4	5	6	3	2	20
6.	Sumatera Utara	11	11	12	12	6	52
7.	Sumatera Barat	3	7	8	8	8	34
8.	Sumatera Selatan	3	7	8	7	5	30
9.	Kalimantan Tengah	3	3	2	1	1	10
10.	Sulawesi Utara	5	2	1	1	1	10
11.	Sulawesi Selatan	2	5	3	2	2	14
12.	M a l u k u	2	2	2	2	2	10
13.	Nusatenggara Barat	3	4	4	2	2	15
14.	B a l i	2	3	3	3	4	15
15.	Kalimantan Selatan	3	5	8	5	4	25
16.	Kalimantan Barat	3	3	4	3	2	25
17.	D.I. Yogyakarta	3	4	5	4	4	20
18.	R i a u	3	5	3	3	3	17
19.	J a m b i	3	3	2	1	1	10
20.	Lampung	4	5	6	5	5	25
21.	Sulawesi Tengah	2	2	2	2	2	10
22.	Nusatenggara Timur	3	4	4	2	2	15
23.	Kalimantan Timur	3	4	5	4	4	20
24.	Bengkulu	3	2	2	2	1	10
25.	Sulawesi Tenggara	1	2	3	2	2	10
26.	Irian Jaya	1	2	3	2	2	10
27.	Timor Timur	–	–	–	–	–	–
	J u m l a h :	130	165	182	154	119	750

Digitized by Google

Lampiran 8

IKHTISAR LALU-LINTAS SURATPOS MASA 1969 S/D 1978

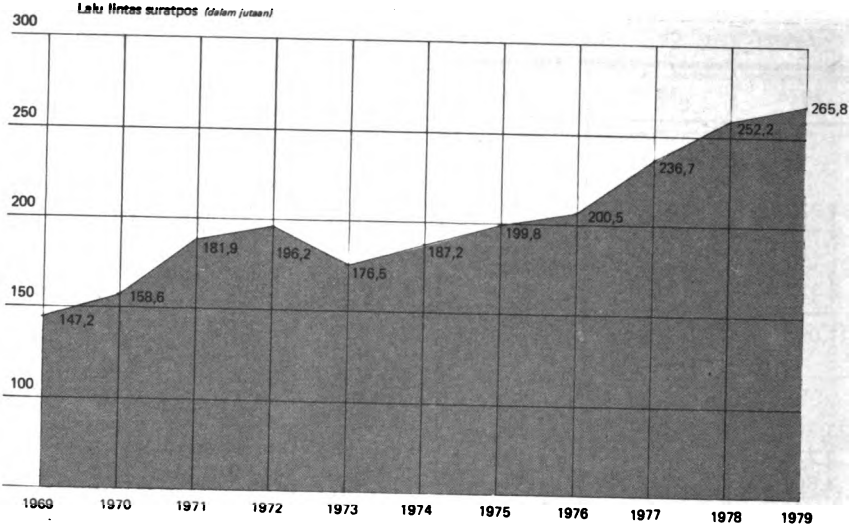
URAIAN	1969	1970	1971	1972
A. Dikirim Dalam Negeri				
I. Dengan Porto:				
1. Surat biasa	81.284.000	82.934.000	92.761.478	102.144.5
2. " tercatat	2.352.000	2.219.000	2.850.015	2.907.9
3. " kilat	9.030.000	14.379.000	20.409.443	21.642.1
4. " kilat khusus	—	—	98.282	709.7
JUMLAH:	92.666.000	99.532.000	116.119.218	127.404.3
II. Bebas Porto:				
1. Suratpos dinas biasa	28.428.000	29.440.000	29.801.608	29.411.8
2. " " terdaftar	2.593.000	2.701.000	2.626.158	2.568.5
3. " militer	7.076.000	7.005.000	7.230.114	9.531.7
JUMLAH:	38.097.000	39.146.000	39.657.880	41.512.12
B. Dikirim ke Luar Negeri :				
1. Suratpos biasa	4.093.000	5.682.000	7.277.860	7.586.98
2. " tercatat	645.000	804.000	956.904	1.027.5
3. " dinas biasa	5.000	5.000	6.214	7.4
4. " dinas terdaftar	3.000	3.000	2.236	2.2
5. " militer	—	—	—	—
JUMLAH:	4.746.000	6.494.000	8.183.214	8.624.1
JUMLAH: A + B	135.509.000	145.172.000	163.960.312	177.540.6
C. Diterima dari Luar Negeri				
1. Suratpos biasa	11.292.000	13.021.000	17.476.719	18.044.3
2. " tercatat	413.000	446.000	483.184	698.6
3. " dinas (biasa)	—	—	130	5.1
4. " dinas(terdaftar)	1.000	2.000	910	6
JUMLAH:	11.706.000	13.469.000	17.960.943	18.748.7
JUMLAH: A + B + C	147.215.000	158.641.000	181.921.255	96.289.4

Digitized by Google

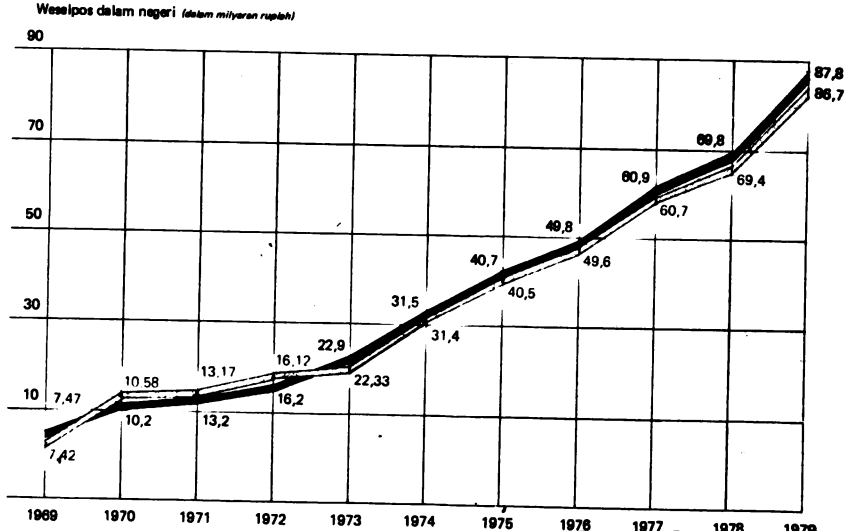
1973	1974	1975	1976	1977	1978
9.669.260	84.923.440	89.813.462	93.742.242	98.529.964	100.109.756
2.624.786	2.709.699	2.345.298	2.621.201	3.024.687	1.806.604
7.022.980	31.130.248	35.465.552	43.312.465	52.269.372	60.789.250
1.452.656	2.329.447	3.170.564	3.857.874	4.211.910	4.714.186
0.769.682	121.092.834	130.764.876	143.533.782	158.035.923	175.413.796
5.998.310	23.710.674	24.556.090	23.681.294	26.530.166	27.455.383
2.829.710	2.274.818	2.330.718	2.344.212	2.603.848	2.765.113
2.473.156	1.801.120	1.841.639	2.891.270	2.102.148	1.913.107
1.301.176	27.786.612	28.728.447	28.916.776	31.236.162	32.134.103
3.301.670	10.968.776	10.413.936	9.366.032	10.903.548	10.721.737
1.072.058	1.158.190	1.083.004	1.056.848	1.069.484	1.110.538
5.252	1.664	1.456	1.794	338	2.002
5.720	4.836	5.408	4.498	6.084	6.201
—	—	—	—	—	—
0.384.700	12.133.466	11.508.804	10.429.172	11.985.454	11.840.478
1.655.558	161.012.912	170.997.127	182.879.730	201.257.539	219.388.377
1.584.089	25.770.589	26.234.078	17.027.372	34.703.227	31.986.214
501.267	444.327	706.978	653.926	731.146	909.987
429	5.434	7.761	26	11.258	9.347
494	702	14.430	3.484	182	1.053
5.086.279	26.221.052	26.963.247	17.684.810	35.445.813	32.906.601
3.541.837	187.233.964	197.960.374	200.564.540	236.703.352	252.294.978

Digitized by Google

Lampiran 8A



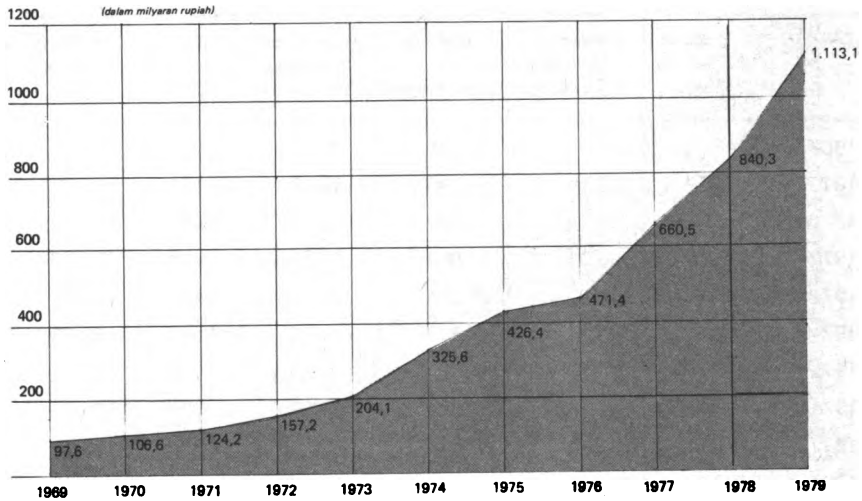
Lampiran 8B



Digitized by Google

Lampiran 8C

Omzet Giro dan Cekpos



Lampiran 8D

JARINGAN POS KILAT KHUSUS

Ambon
Ampenan

Balikpapan
Bandaaceh
Banjarbaru
Banjarmasin
Banyuwangi
Belawan
Binjai
Bogor
Bukittingi

Cepu
Cianjur
Cilacap
Cimahi
Cirebon

Denpasar

Indramayu

Jakarta Kota
Jakarta Utara
Jambi
Jatinegara
Jember

Kebayoran
Kebumen
Klaten
Kuningan
Kupang

Madiun
Magelang
Malang
Manado
Medan

Padang
Palangkaraya
Palembang
Palu
Pangkalpinang
Pasuruan
Pekalongan
Pekanbaru
Pematang Siantar
Pontianak
Probolinggo
Purbalingga
Purwokerto

Salatiga
Samarinda
Semarang
Serang
Sidoarjo
Solo
Sukabumi
Sumedang
Surabaya

Tanjungkarang
Tanjungpinang
Tangerang
Tasikmalaya
Tebingtinggi
Tegal
Telukbetung

Ujungpandang

Yogyakarta

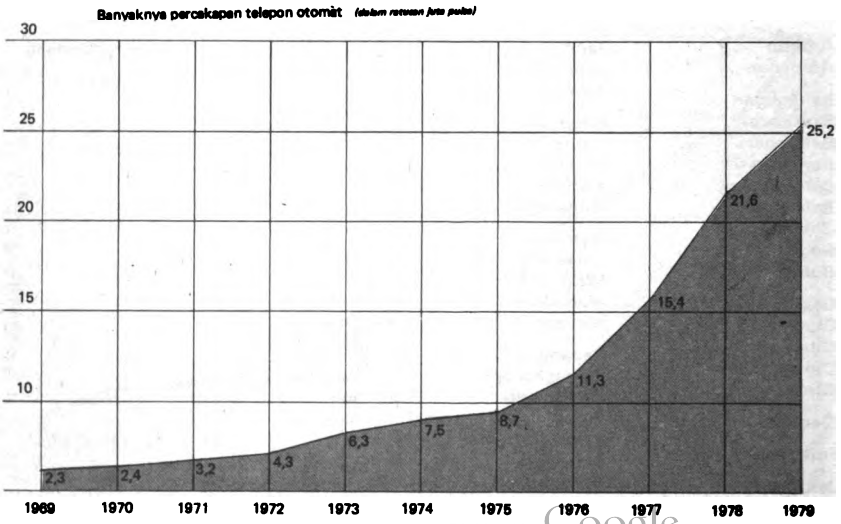
Digitized by Google

Lampiran 9

LALU LINTAS PAKETPOS DARI TAHUN 1969 s/d 1978

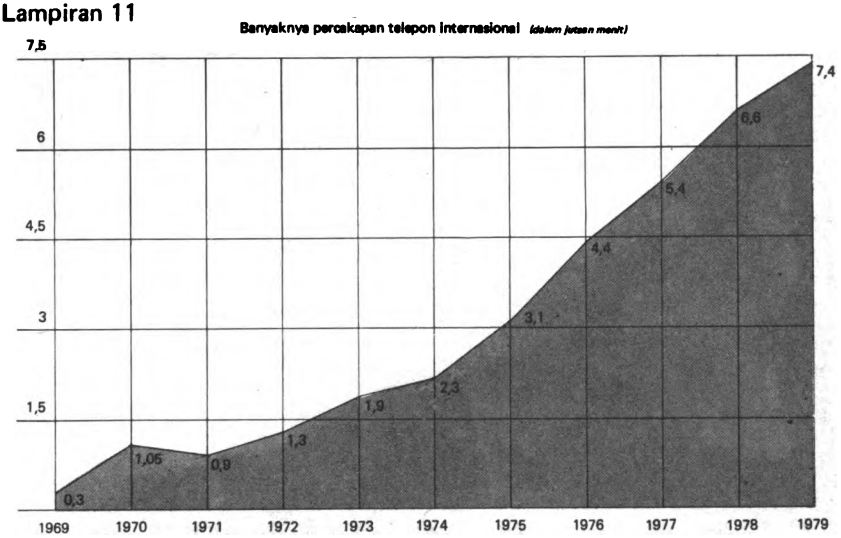
TAHUN	Dikirim Di Dalam Negeri	Prosentase Terhadap Th. Lalu	Dikirim Ke Luar Negeri	Prosentase Terhadap Th. Lalu	Diterima Dari Luar Negeri	Prosentase Terhadap Th. Lalu
1969	350.423	–	7.431	–	441.988	39 –
1970	365.975	104,43	11.740	157,98	172.694	39,07
1971	351.921	96,15	17.992	153,25	181.937	105,35
1972	303.750	86,31	20.806	115,64	157.154	96,37
1973	288.072	94,83	29.874	143,58	165.405	105,25
1974	347.453	120,61	31.817	106,5	234.683	141,88
1975	401.426	115,53	43.153	135,62	349.503	148,92
1976	420.439	104,73	39.209	90,86	312.812	95,5
1977	473.346	112,63	38.026	96,98	490.235	156,71
1978	540.577	114,20	43.273	113.79	229.114	46,73

Lampiran 10

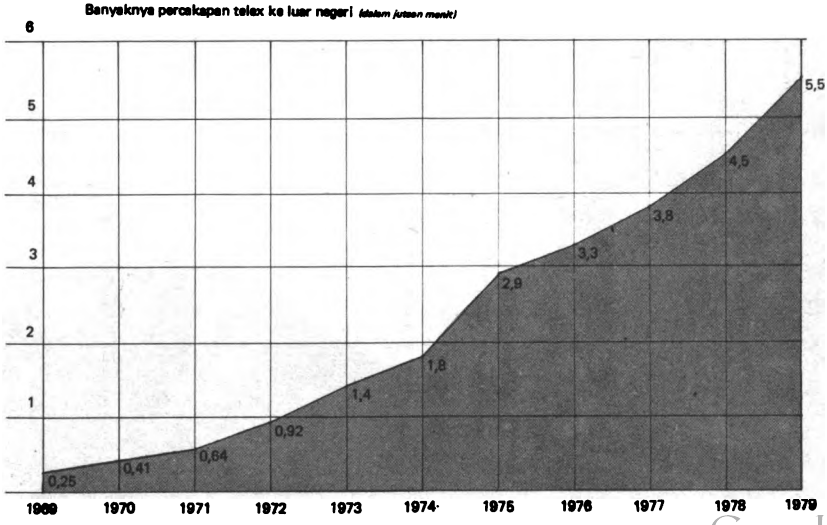


Digitized by Google

Lampiran 11

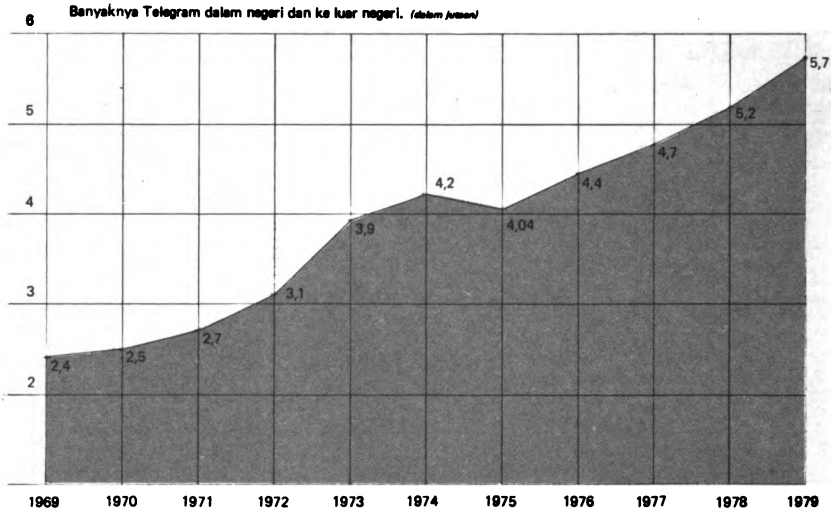


Lampiran 12

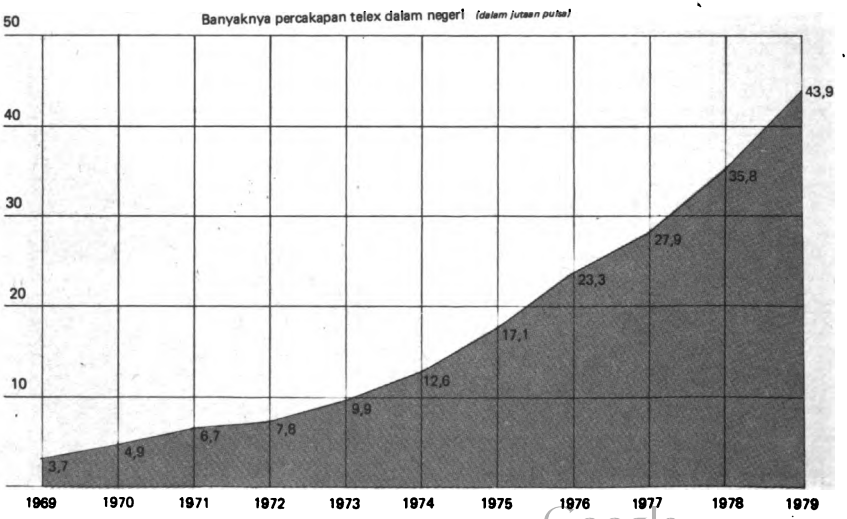


Digitized by Google

Lampiran 13



Lampiran 14



Digitized by Google

Lampiran 15

LOKASI SETASIUN BUMI - SBK - RENCANA SBK DAN SENTRAL TELEPON DI INDONESIA

NO.	PROPINSI	SB & SBK YANG SUDAH ADA	NO.	RENCANA SBK	SENTRAL TLP CB-LB-MC
1	2	3	4	5	6
1	D.I. ACEH	BANDA ACEH	1.	TAKENGON	LB 200
			2.	MEULABOH	CB 600
			3.	SINABANG	LB 100
			4.	TAPAKTUAN	LB 100
			5.	KUTACANE	LB 100
			6.	SINGKIL-BARU	LB 100
			7.	BLANGPIDI	LB 100
2.	SUMUT	MEDAN GN. SITOLI (P. NIAS)		-	
3.	SUMBAR	PADANG	8.	MUARA SIBERUT	LB 50
			9.	PAINAN	LB 100
4.	RIAU	PAKANBARU, P. BATAM, DUMAI.	10.	BENGKALIS	LB 100
			11.	TEMBILAHAN	CB 550
			12.	TANJUNG PANDAN	
			13.	RENGAT	LB 100
			14.	DABOSING-KEP	LB 50
			15.	BAGAN SIAPI API	MC 900
			16.	TANJUNG BATU TAMBELAN (CADANGAN)	

Digitized by Google

1	2	3	4	5	6
5.	JAMBI	JAMBI	17.	SUNGAI PENUH	MC 900
			18.	MUARA BUNGO	LB 200
			19.	KUALA TUNGKAL	CB 650
	BENGKULU	BENGKULU	20.	BINTUHAN	LB 100
			21.	MANNA	LB 100
			22.	ARGA MAKMUR	LB 100
7.	SUMSEL	PALEMBANG, PANGKAL PINANG.	23.	SEKAYU	LB 100
8.	LAMPUNG	TANJUNG KARANG.	24.	KRUI	
9.	DKI JAYA	JAKARTA		-	
10.	JABAR	BANDUNG GEGERKALONG, (PUSDIKTEL).		-	
11.	JATENG	SEMARANG, CILACAP.		-	
12.	D.I. YOGYAKARTA	YOGYAKARTA		-	
13.	JATIM	SURABAYA		-	
14.	BALI	DENPASAR		-	
15.	N.T.B.	MATARAM		-	
16.	N.T.T.	KUPANG	25.	WAIKABUBAK	LB 100
		WAINGAPU	26.	LARANTUKA	LB 100
		ENDEH	27.	MAUMERE	CB 550
			28.	KALABAHI	LB 100
			29.	ATAMBUA	LB 100
				REO (CADANGAN)	

Digitized by Google

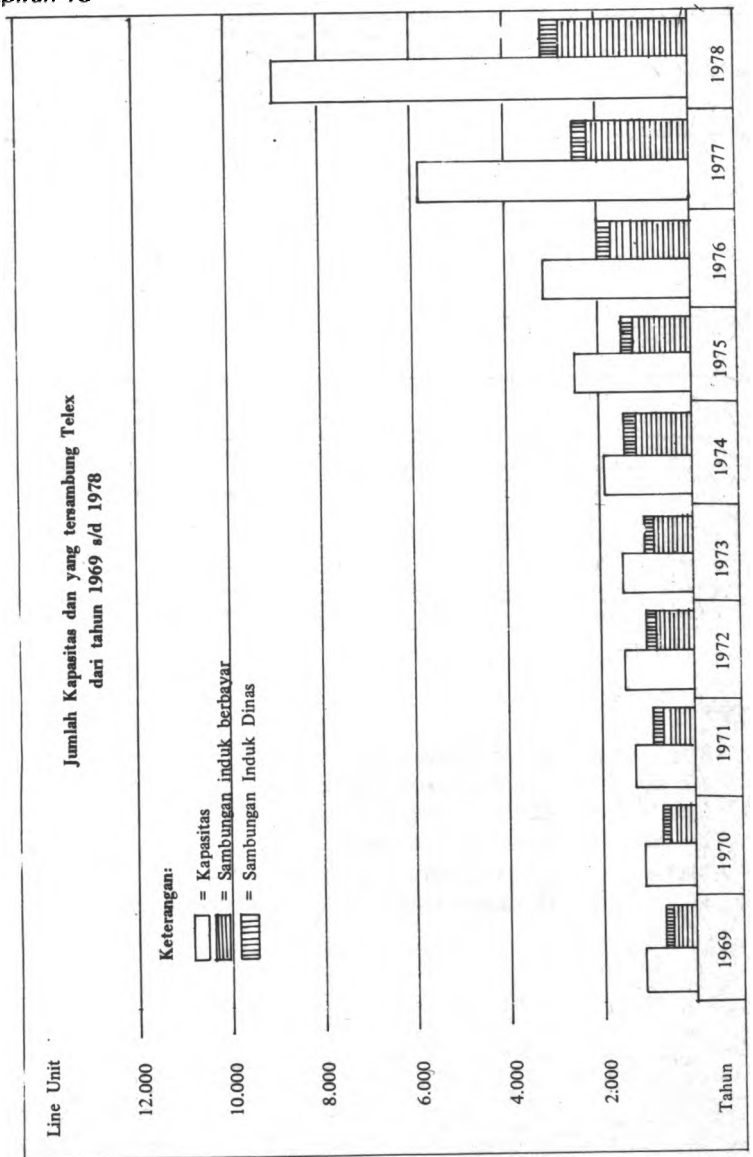
1	2	3	4	5	6
17.	MALUKU	AMBON	30.	MASOHI	
		TERNATE	31.	NAMLEA	
		TUAL	32.	SAUMLAKI	
			33.	SOASIU	
			34.	TOBELO	
			35.	JAILOLO	
				LABUHAN	
				(CADANGAN)	
18.	IRIAN JAYA	JAYAPURA	36.	KAIMANA	
		BIAK	37.	TANAH MERAH	
		WAMENA	38.	SERUI	
		NABIRE	39.	SARMI	
		MANOKWARI	40.	TEMINABUAN	
		FAK-FAK		ENAROTALI	
		SORONG		(CADANGAN)	
		MERAUKE			
		TEMBAGAPURA			
		PULAU			
		WAIGEO			
19.	SULUT	MANADO	41.	TAHUNA	LB 200
		GORONTALO	42.	KOTAMOBAGU	LB 200
20.	SULTENG	PALU	43.	POSO	MC 900
		LUWUK	44.	TOLI-TOLI	
			45.	KOLAKA	LB 200
21.	SULAWESI	KENDARI	46.	BAU-BAU	LB 100
	TENGGARA		47.	RAHA	-
22.	SULSEL	UJUNGPANDANG	48.	RANTEPAO	-
		SOROAKO	49.	WATAMPONE	CB 450
			50.	ENREKANG	-
			51.	SINJAI	LB 50
			52.	PALOPO	LB 100

Digitized by Google

1	2	3	4	5	6
23.	KALTIM	SAMARINDA	53.	NUNUKAN	
		TARAKAN	54.	TANJUNG REDEB	LB 50
			55.	TANJUNG SELOR	
				BATU PUTIH (CADANGAN)	
24	KALTENG	PALANGKARAYA	56.	PANGKALANBUN	LB 100
			57.	SAMPIT	CB 600
			58.	MUARATEWE	LB 100
			59.	BUNTOK	LB 50
			60.	KUALA KURUN	LB 50
			61.	KUALA PEMBUANG	LB 50
25.	KALSEL	BANJARMASIN	62.	KOTABARU	LB 50
26.	KALBAR	PONTIANAK	63.	SINGKAWANG	MC 900
			64.	SINTANG	
			65.	KETAPANG	LB 200
			66.	SANGGAU	LB 100
			67.	PUTUH SIBAU	LB 100
			68.	KARIMATA	
			69.	SAMBAS	LB 50
			70.	KENDAWANGAN	
27	TIM-TIM	DILLI		-	MC 900

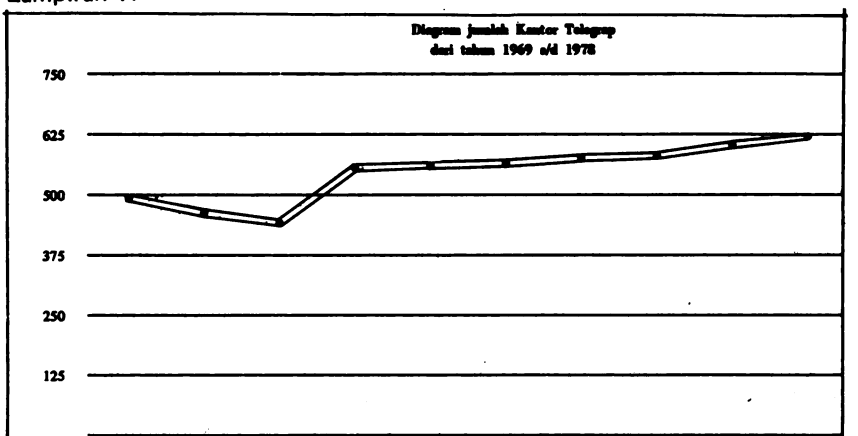
Digitized by Google

Lampiran 16



Digitized by Google

Lampiran 17



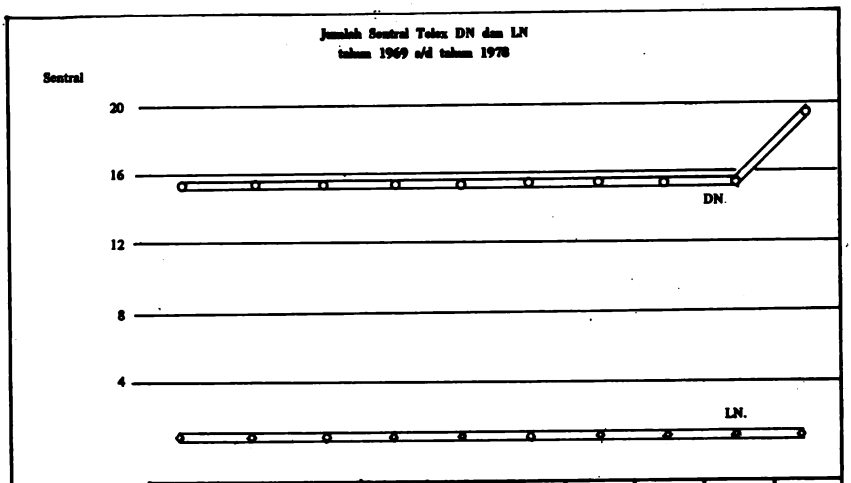
Tahun	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Ktg p	23	23	23	28	29	29	30	30	30	30
Ktlp/Tgp	48	48	48	48	49	49	48	48	49	49
Kttb	21	21	21	12	11	11	11	12	12	15
Kt Cab	398	369	363	499	498	502	509	515	520	527
Kts/pos	5	5	5	5	4	1+	1+	1+	1+	1+
Jumlah	495	466	460	592	591	592	599	606	612	622

Keterangan :

1. Ktgp = Kantor Telegrap berdiri sendiri
2. Ktlp/tsp = Kantor Telegrap dirangkat Kantor Telepon
3. Kttb = Kantor Telegrap Tambahan
4. Kt. Cab. = Kantor Telegrap Cabang
5. Ktg/Pos = Kantor Telegrap yang dikerjakan Pos
6. +) = Di Wilayah Telekomunikasi ke III (Sungai Liat)

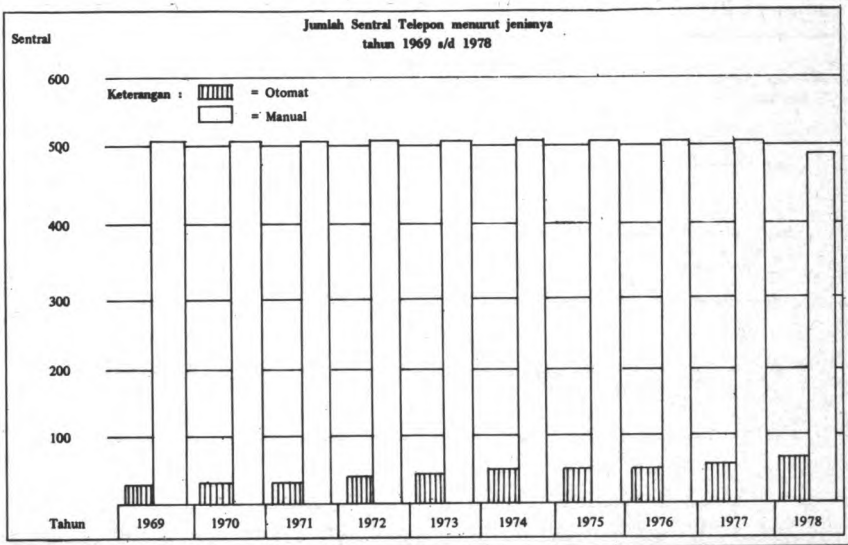
Digitized by Google

Lampiran 18



Tahun	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Dalam negeri	15	15	15	15	15	15	15	15	15	19
Luar negeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

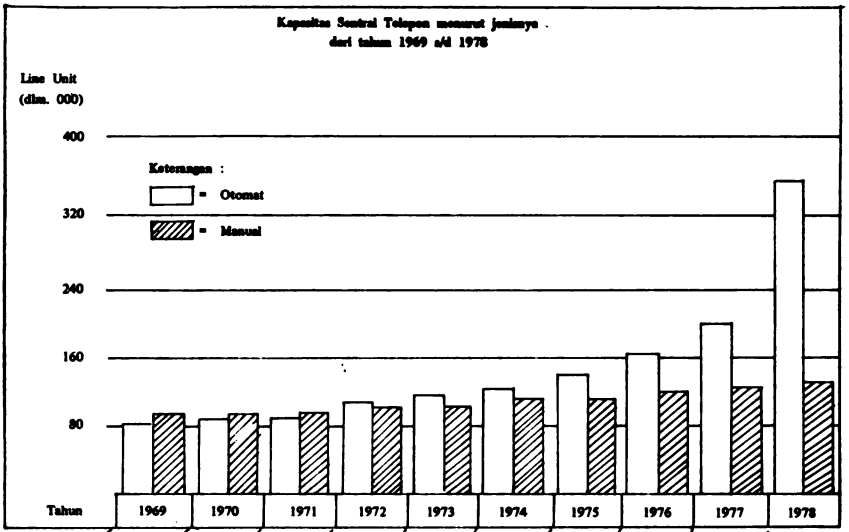
Lampiran 19



Tahun	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Otomat	26	28	28	33	34	37	39	39	54	69
Manual	506	504	505	507	504	507	507	507	503	493
Jumlah	532	532	533	540	538	544	546	546	557	562

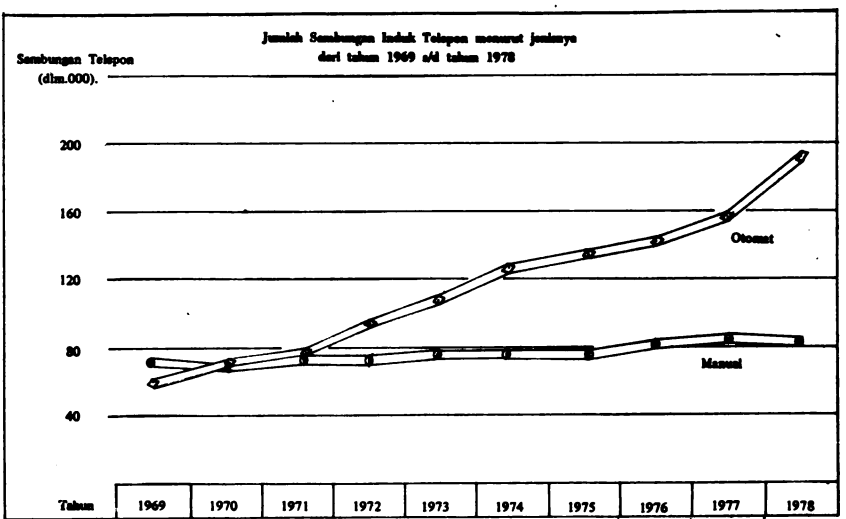
Digitized by Google

Lampiran 20



	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Otomat	84.660	90.660	90.660	110.860	121.460	126.000	144.100	161.100	218.320	367.200
Manual	103.718	102.167	102.292	105.509	103.663	106.964	99.858	103.992	107.292	108.253
Jumlah	188.378	192.827	192.952	216.429	225.125	232.964	249.958	265.092	325.612	475.453

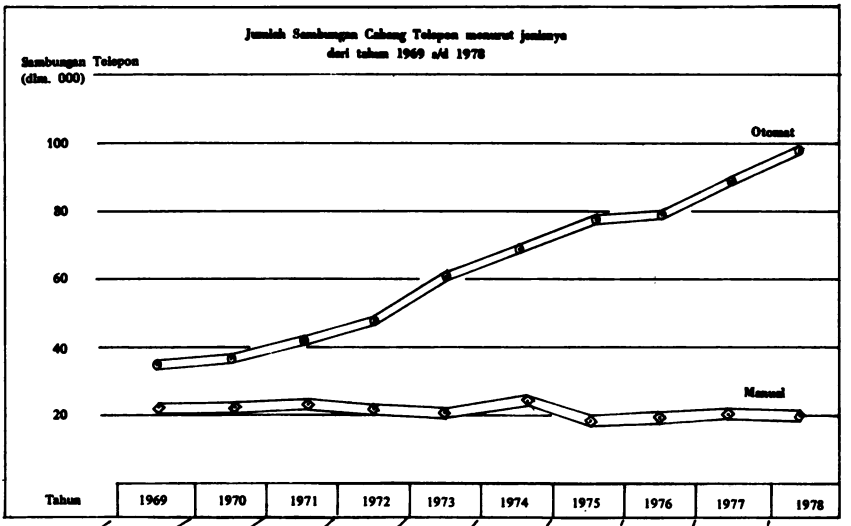
Lampiran 21



	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Otomat	65.691	72.864	77.437	95.414	105.762	115.298	130.752	138.722	156.358	192.857
Manual	73.515	72.117	74.709	72.791	77.603	82.273	76.726	50.706	54.661	82.268
Jumlah	139.206	144.981	197.571	168.205	183.365	207.478	219.428	241.019	241.019	295.125

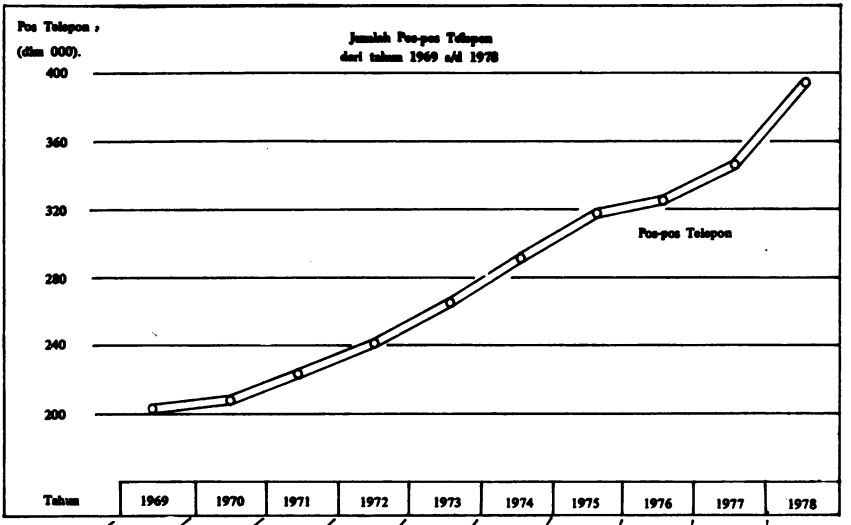
Digitized by Google

Lampiran 22



	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Otomat	35.778	37.135	43.853	48.807	61.539	67.076	78.827	79.001	87.404	97.361
Manual	25.482	25.081	25.780	23.816	21.533	24.327	18.883	20.400	20.675	20.077
Jumlah	61.260	62.216	69.633	72.623	83.072	91.403	97.710	99.491	108.079	117.438

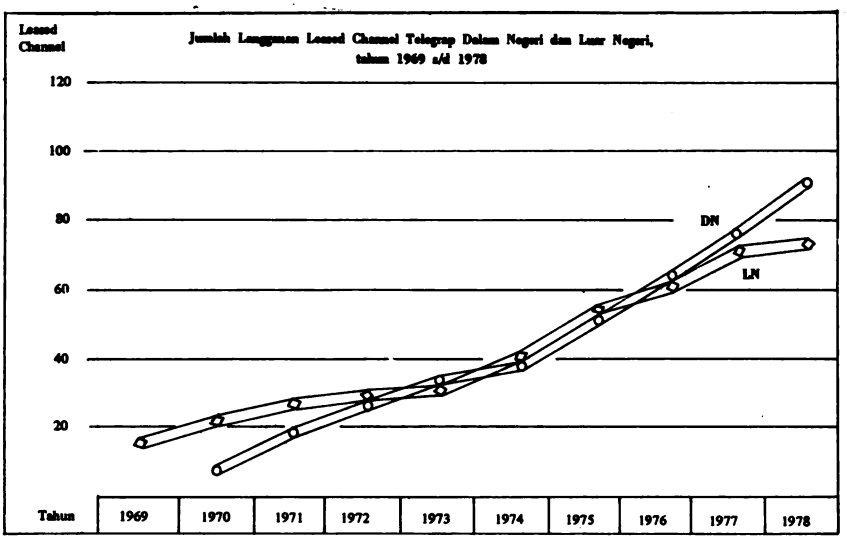
Lampiran 23



	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Sambungan Induk	139.206	144.981	152.146	168.205	183.365	197.571	207.478	219.428	241.019	275.125
Sambungan cabang	61.260	62.216	69.633	72.623	83.072	91.403	97.710	99.491	108.079	117.438
Pos-pos telepon	200.466	207.197	221.779	240.828	266.437	288.974	305.188	318.919	349.098	392.563

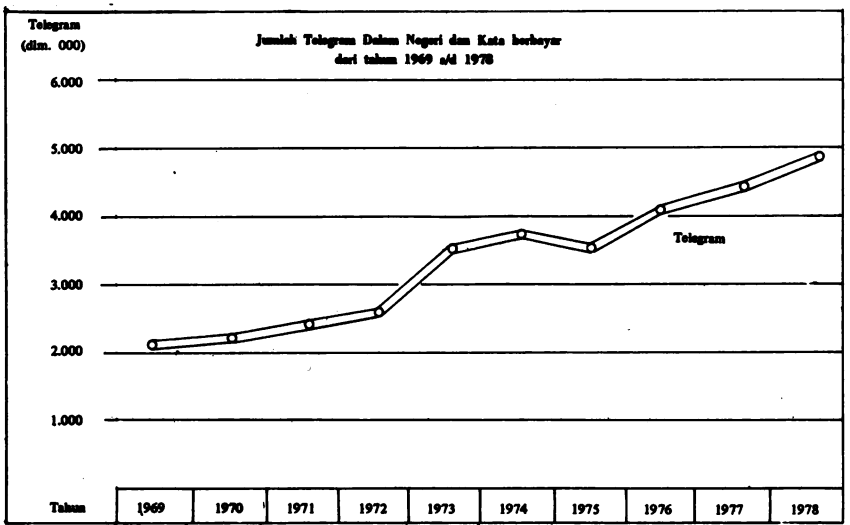
Digitized by Google

Lampiran 24



	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Dalam negeri	—	7	18	24	32	37	52	63	78	97
Luar negeri	14	21	26	27	31	39	53	61	72	75
Jumlah	14	28	44	51	63	76	105	124	150	172

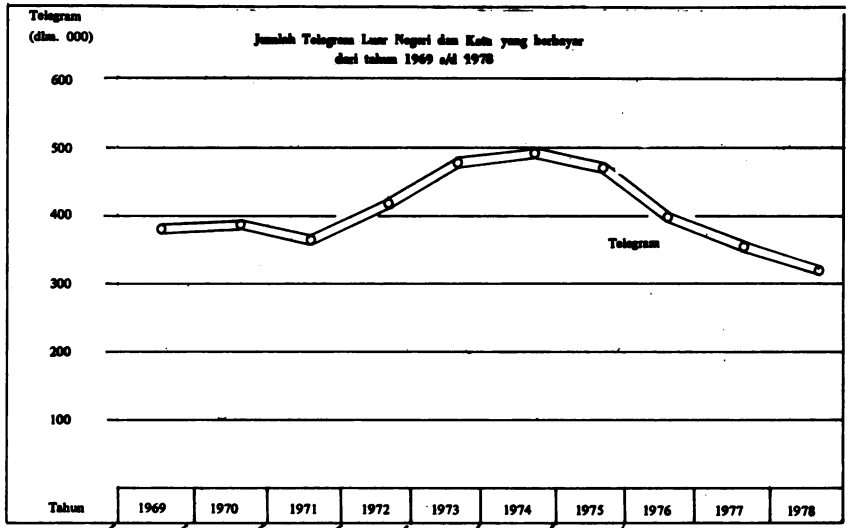
Lampiran 25



	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Telegram	2.084.411	2.133.540	2.389.918	2.696.494	3.590.057	3.776.079	3.574.065	4.070.380	4.403.603	4.905.365
Kata	55.816.612	61.058.800	69.731.398	78.131.679	105.514.216	113.527.553	106.354.626	125.386.134	134.402.206	150.103.105

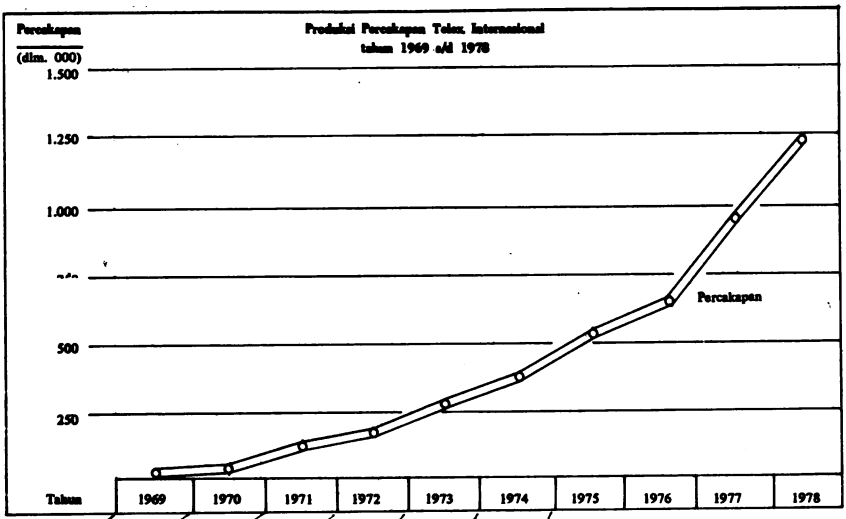
Digitized by Google

Lampiran 26



Tahun	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Telegram	389.389	390.843	379.177	411.356	488.325	493.747	470.099	400.259	351.330	307.631
Kata	12.348.174	12.503.564	11.663.008	12.102.973	14.727.461	15.419.688	14.730.816	13.243.498	11.529.926	9.682.358

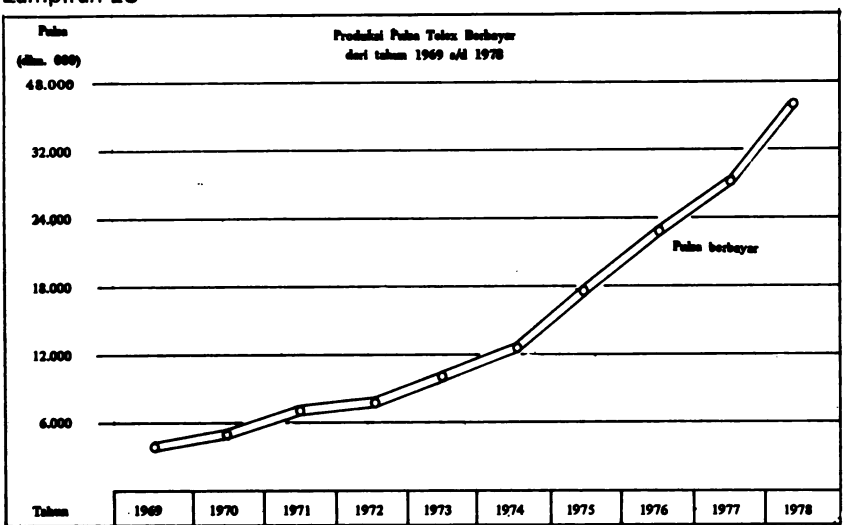
Lampiran 27



Tahun	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Percakapan	25.733	68.259	124.827	185.650	276.408	368.752	540.220	667.119	992.221	1.284.654
Menit	256.776	414.957	647.520	920.588	1.430.250	1.863.465	2.595.205	2.928.435	3.884.996	4.510.950

Digitized by Google

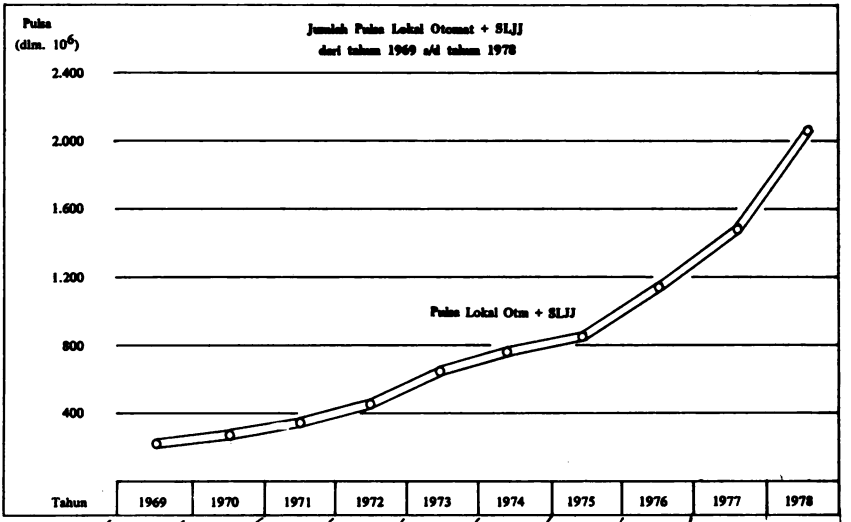
Lampiran 28



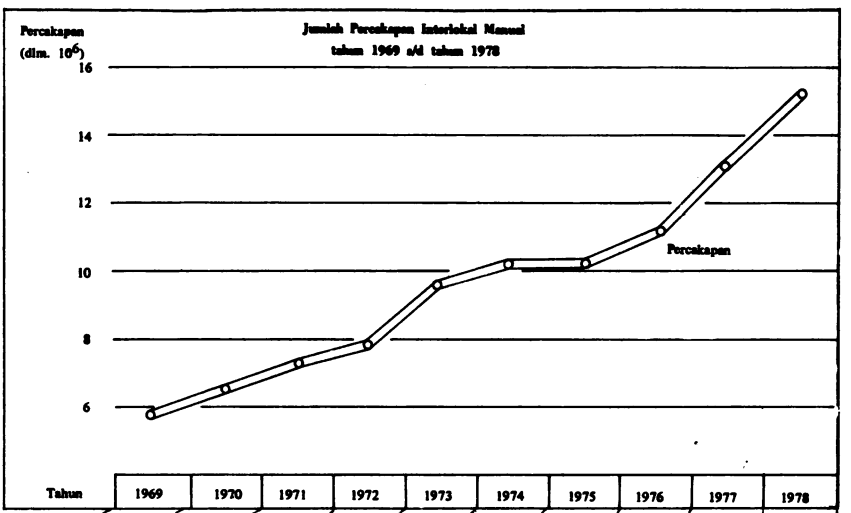
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Berbayar	3.701.671	4.394.027	6.786.670	7.876.159	9.925.255	12.664.686	17.090.904	22.862.062	28.026.348	35.894.260
Dinas	215.543	350.250	338.129	962.417	1.632.264	2.734.922	6.336.955	10.916.501	11.076.939	16.917.824
Jumlah	3.917.214	4.744.277	7.124.799	8.838.576	11.557.519	15.399.608	23.427.859	33.778.563	39.103.287	52.812.084

Digitized by Google

Lampiran 29

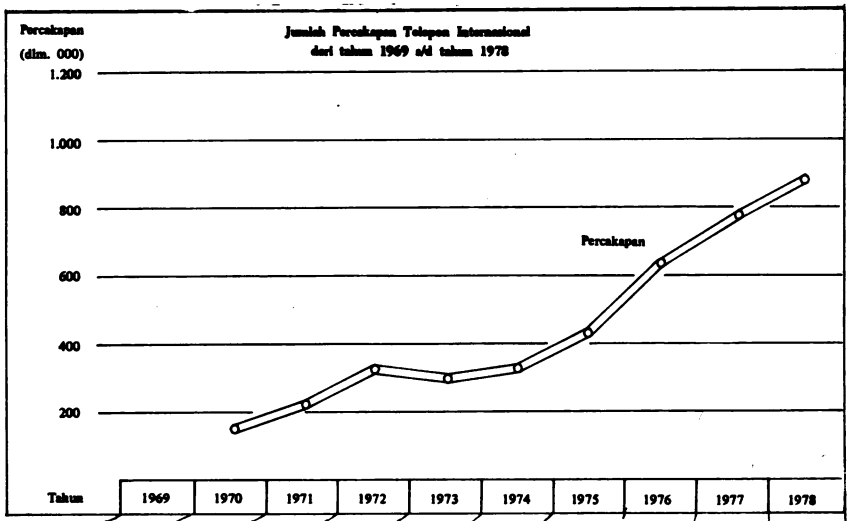


Lampiran 30



Digitized by Google

Lampiran 31



Tahun	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Percakapan	—	161.163	216.810	330.693	257.778	319.621	414.257	629.256	774.414	860.044
Menit	—	1.099.699	1.249.109	1.366.330	1.919.143	2.299.213	3.195.400	4.431.029	5.426.757	6.616.919

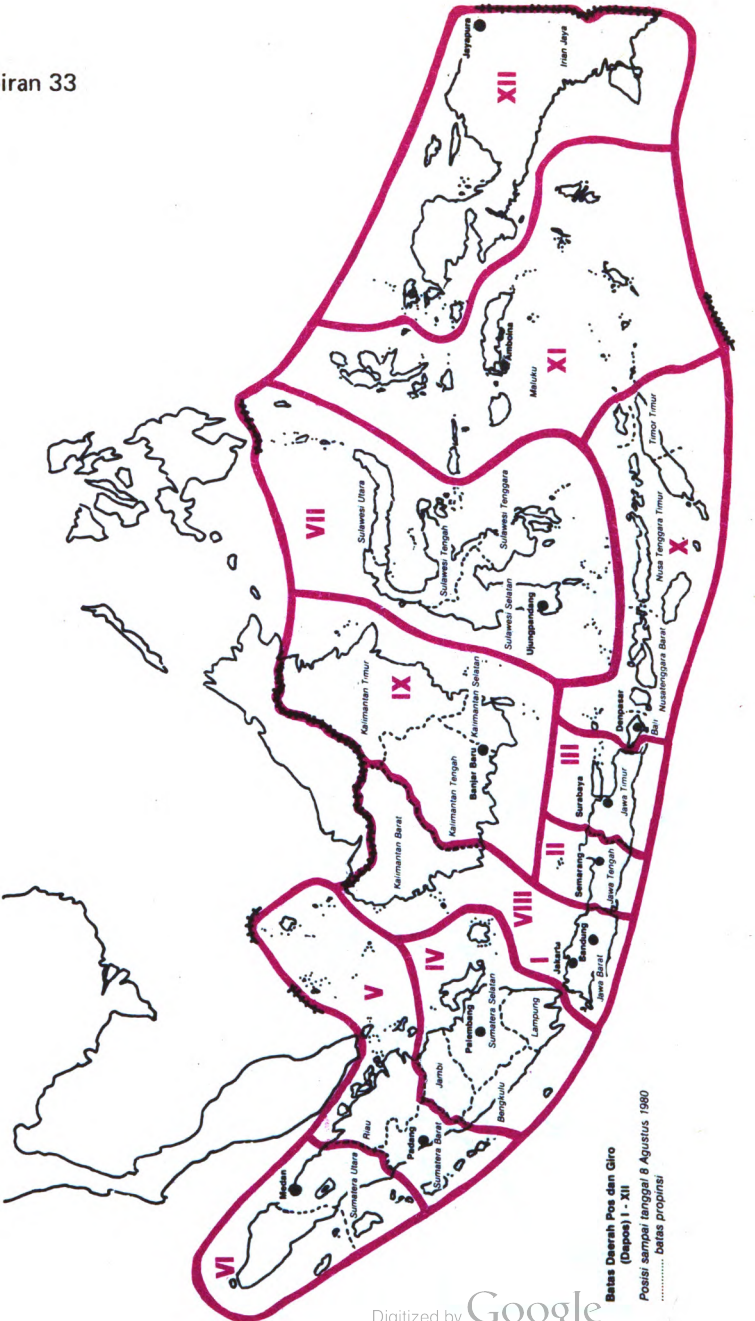
Lampiran 32

Jumlah Kapasitas dan yang tersambung Telex dari tahun 1969 s/d 1978

Tahun	Kapasitas	Tersambung		
		Bayar	Dinas	Total
1969	1.090	538	12	550
1970	1.090	628	51	679
1971	1.100	690	56	746
1972	1.210	807	90	897
1973	1.210	894	85	979
1974	1.810	1.109	85	1.194
1975	2.330	1.430	141	1.571
1976	3.130	1.736	206	1.942
1977	5.890	2.159	238	2.397
1978	9.230	2.871	329	3.200

Digitized by Google

Lampiran 33



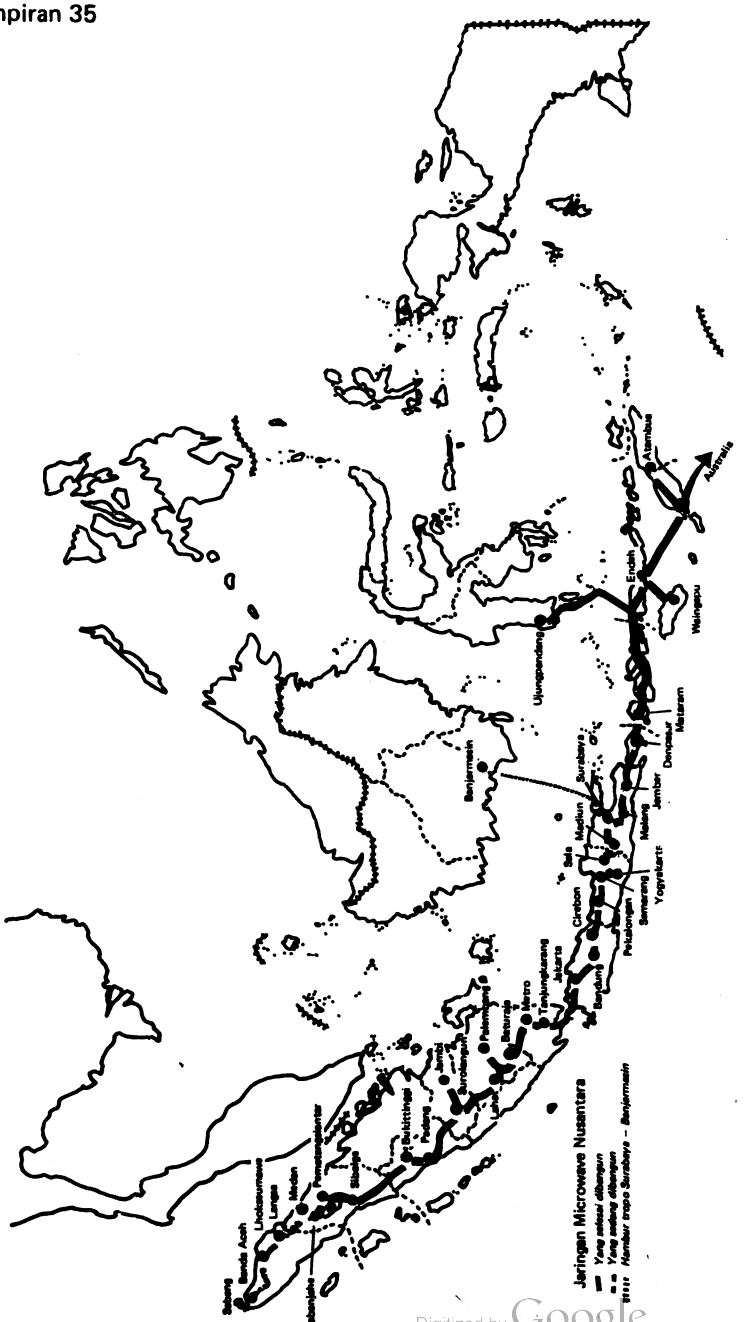
Digitized by Google

Lampiran 34



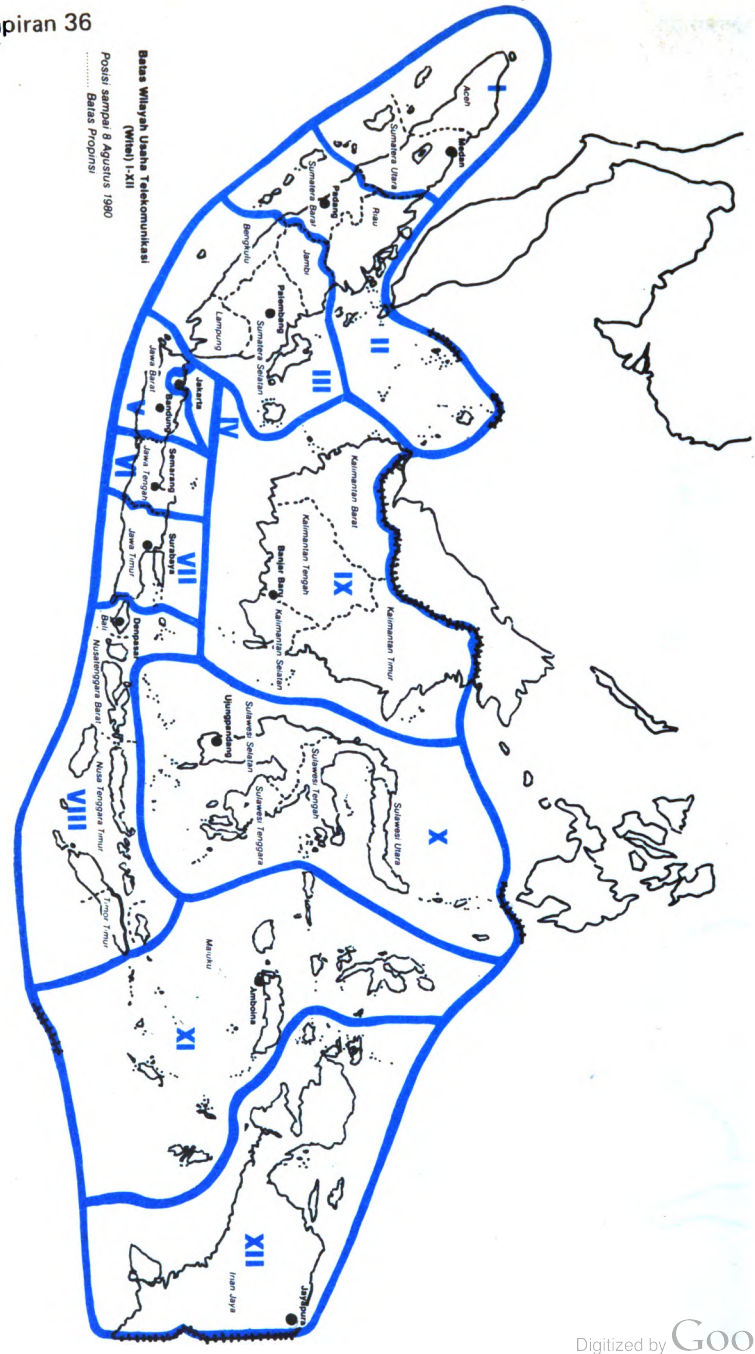
Digitized by Google

Lampiran 35



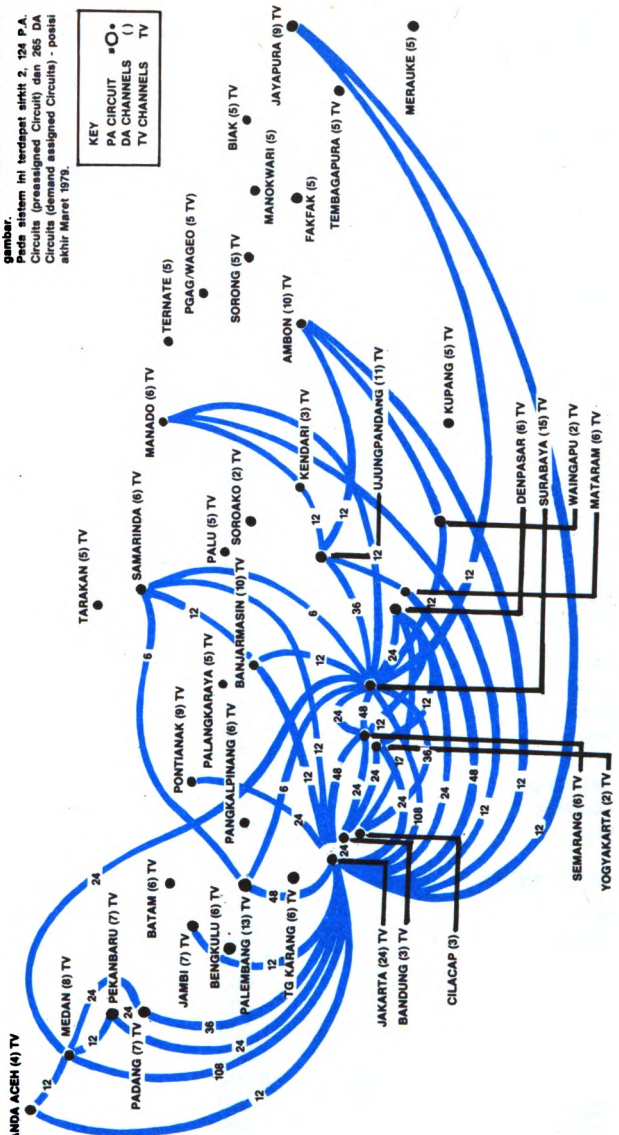
Digitized by Google

Lampiran 36



Digitized by Google

Lampiran 37



Digitized by Google

Lampiran 38

DAFTAR SENTRAL TELEPON OTOMAT DENGAN KAPASITAS SATUAN SAMBUNGAN (S.S.) DAN KODE WILAYAH

IBUKOTA PROPINSI

NAMA KOTA	KAPASITAS (S.S.)	KODE WILAYAH
1. Ambon	2.000	0911
2. Bandaaceh	1.000	0651
3. Bandung	19.000	022
4. Bengkulu	3.000	0736
5. Banjarmasin	3.000	0511
6. Denpasar	5.000	0361
7. Dili	800	—
8. Jakarta	260.000	021
9. Jambi	3.000	0741
10. Jayapura	1.000	0967
11. Kendari	1.000	0401
12. Kupang	1.000	0391
13. Manado	3.000	0431
14. Mataram	1.000	0364
15. Medan	20.000	061
16. Padang	3.000	0771
17. Palembang	7.000	0711
18. Palangkaraya	1.000	0514
19. Palu	1.000	0451
20. Pekanbaru	1.000	0761
21. Pontianak	2.000	0561
22. Samarinda	2.000	0541
23. Semarang	20.000	024
24. Surabaya	46.000	031
25. Tanjungkarang	5.000	0721
26. Ujungpandang	18.000	0411
27. Yogyakarta	9.000	0274

KOTA-KOTA LAINNYA

28. Balikpapan	2.000	0542
29. Banyuwangi	3.000	0333
30. Biak	1.000	0961
31. Binjai	1.000	0619
32. Bireun	400	0644
33. Bekasi	1.000	0219
34. Blitar	1.000	0342
35. Bogor	8.000	0251
36. Bojonegoro	1.000	0353
37. Bondowoso	1.000	0332
38. Bukittinggi	2.000	0752
39. Cianjur	1.000	0263

Digitized by Google

40.	Cibinong	1.000	0219
41.	Cilacap	1.000	0282
42.	Cimahi	3.000	0229
43.	Cipanas	1.000	0255
44.	Cirebon	5.000	0231
45.	Dumai	1.000	0765
46.	Gadog/Cisarua	1.000	0251
47.	Garut	1.000	0262
48.	Gresik	1.000	0319
49.	Idi	400	0646
50.	Jember	3.000	0331
51.	Jombang	1.000	0321
52.	Karawang	1.000	0264
53.	Kebumen	1.000	0287
54.	Kediri	3.000	0354
55.	Kendal	1.000	0294
56.	Kisaran	1.000	0623
57.	Klaten	1.000	0272
58.	Kualasimpang	400	0641
59.	Kudus	2.000	0291
60.	Lahat	1.200	0731
61.	Lhokseumawe	1.000	0645
62.	Lhoksukon	400	0645
63.	Lumajang	1.000	0334
64.	Madiun	2.000	0351
65.	Magelang	1.000	0293
66.	Malang	11.000	0341
67.	Merauke	1.000	0791
68.	Mojokerto	3.000	0321
69.	Pamekasan	2.000	0324
70.	Pare-Pare	1.000	0421
71.	Pasuruan	1.000	0343
72.	Pati	1.000	0295
73.	Pekalongan	2.000	0285
74.	Pematangsiantar	4.000	0622
75.	Ponorogo	1.000	0351
76.	Prapat	1.000	0622
77.	Prigen	1.000	0343
78.	Probolinggo	1.000	0335
79.	Purwakarta	1.000	0264
80.	Purwokerto	3.000	0281
81.	Sabang	400	0652
82.	Salatiga	1.000	0298
83.	Serang	1.000	0254
84.	Sidoarjo	1.000	0319
85.	Situbondo	1.000	0332
86.	Solo	5.000	0271
87.	Subang	1.000	0264

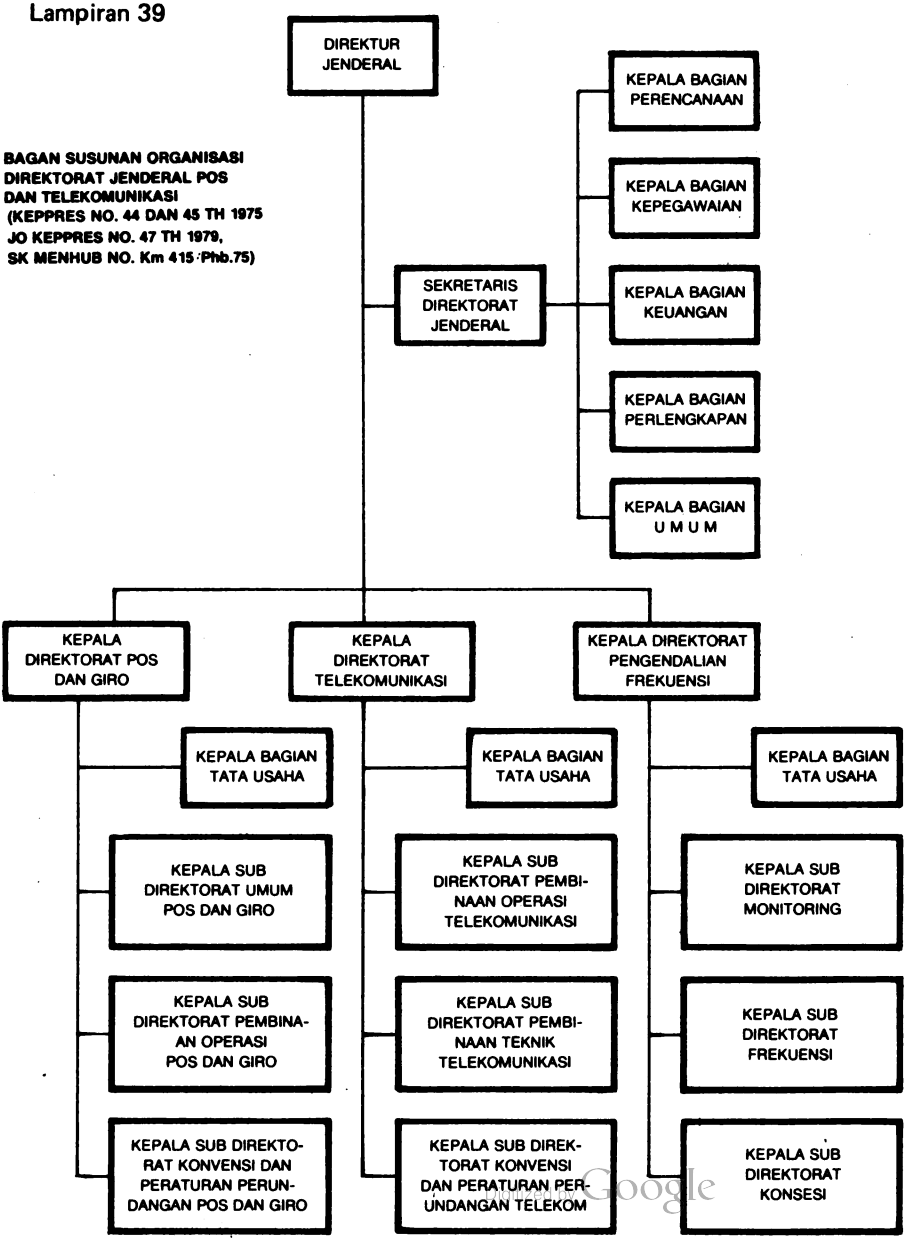
Digitized by Google

88.	Sukabumi	1.000	0266
89.	Sumbawa Besar	3.000	0371
90.	Sumedang	1.000	0261
91.	Tangerang	1.000	0219
92.	Tanjungpinang	1.000	0771
93.	Tasikmalaya	2.000	0265
94.	Tebingtinggi	1.000	0621
95.	Tegal	3.000	0283
96.	Tulungagung	1.000	0355

Digitized by Google

Lampiran 39

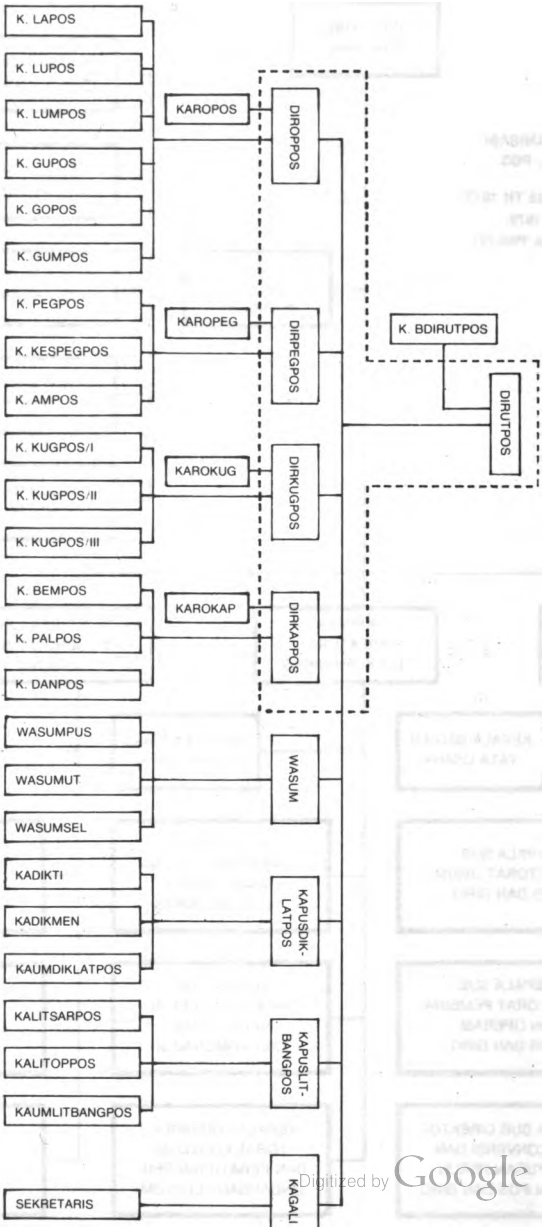
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI (KEPPRES NO. 44 DAN 45 TH 1975 JO KEPPRES NO. 47 TH 1979, SK MENHUB NO. Km 415/Phb.75)



Digitized by Google

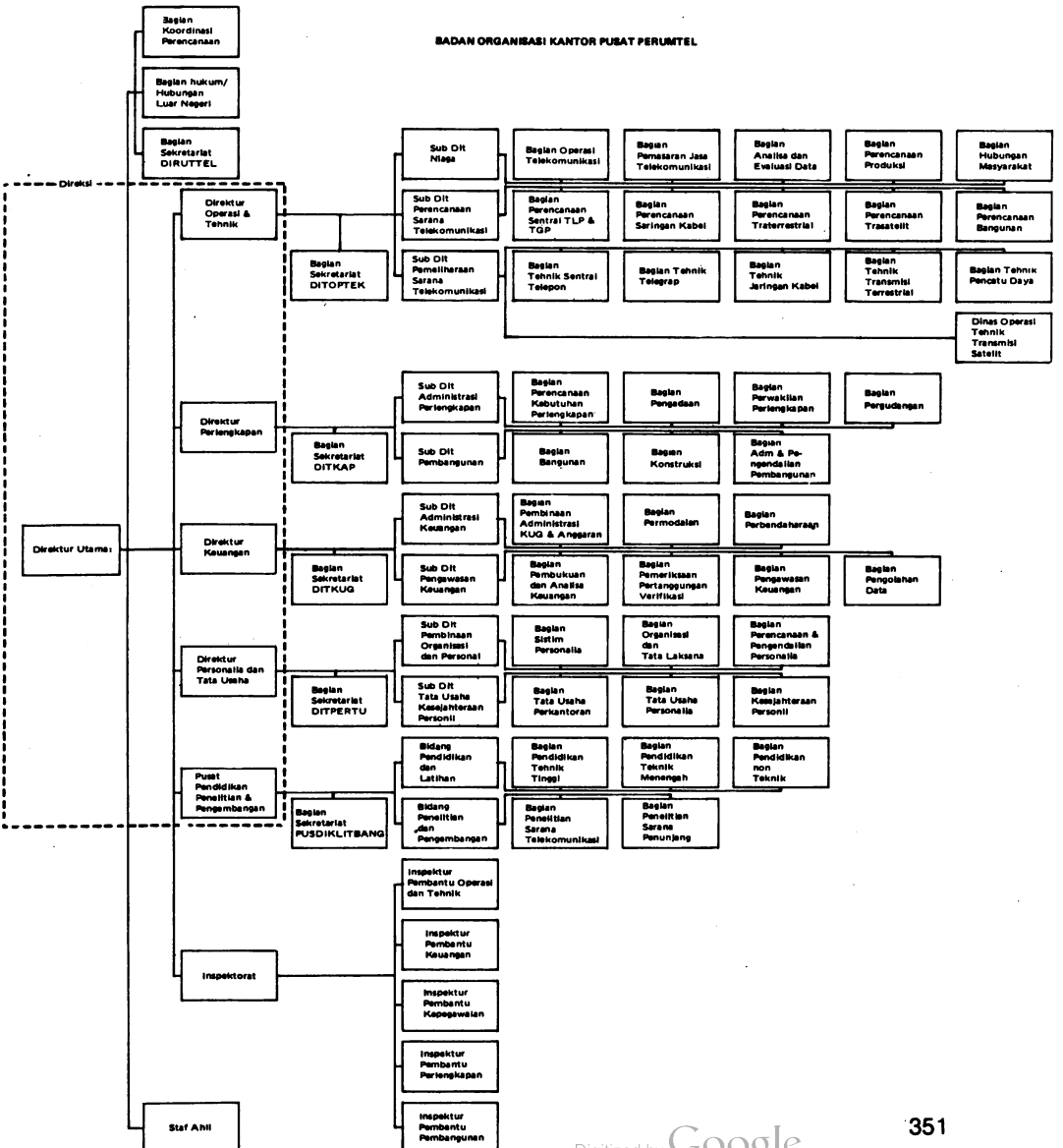
Lampiran 40

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PERUM POS DAN GIRO



Digitized by Google

Lampiran 41



Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOGRAFI

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOGRAFI

Buku

1. Kowani, "Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia", Balai Pustaka.
2. UPU, "Consultative Council For Postel Studies", Berne, 1970.
3. UPU, "Consultative Council For Postel Studies", Berne, 1969.
4. UPU, "Executive Council Summary Record", Tokyo, 1969.
5. UPUI "Executive Council Summary Record", , 1972
6. KORPRI, "Himpunan Hasil-hasil Musyawarah Nasional Pertama KORPRI". Jakarta, 1978.
7. UPU, "Laporan Sidang Executive Council", Bern, 1971.
8. UPU, "Laporan Sidang CCPS", Bern, 1970.
9. Ditjen Postel, "Laporan Tahunan", Jakarta, 1972 s/d 1978.
10. Ditjen Postel, "Laporan Pekan Orientasi Wartawan Subsektor Postel". Jakarta, 1978.
11. UPU, "Laporan Sidang Dewan Eksekutif Uni Pos Sedunia", Bern, 1974.
12. UPU, "Laporan Sidang Konsultatif Penyelidikan Pos Uni Pos Sedunia". Bern, 1973.
13. UPU, "Laporan Sidang Dewan Eksekutif Uni Pos Sedunia", Bern, 1973.
14. Ditjen Postel, "Memorandum serah terima Jabatan Kepala Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perum Telekomunikasi", Bandung, 1978.
15. Ditjen Postel, "Memorandum serah terima Jabatan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi", Jakarta, 1978.
16. P.N. Pos dan Giro, "Lecture tentang Masalah Pembinaan Personil Pos dan Giro", Bandung, 1973.
17. Ditjen Postel, "Kertas-kertas Kerja Peserta Pekan Orientasi dan Rapat Koordinasi Humas di Lingkungan Ditjen Postel", Jakarta, 1980.
18. Laidin Girsang, "Indonesia Sejak Supersemar", Yayasan Laita, Jakarta, 1973.

Digitized by Google

19. Laidin Girsang, "Indonesia Sejak Orde Baru", Yayasan Laita, Jakarta, 1973.
20. Departemen Penerangan, "Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama. 1969/1970 - 1973/1974".
21. Departemen Penerangan, "Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua. 1974/1975 - 1978/1979".
22. UNDP/ITU, "Telecommunication Training Centre. Indonesia.', Geneve, 1979.
23. Direktorat Jenderal Postel, "Proyek Penelitian Umum Departemen hubungan Sub Proyek Penelitian Postel", Jakarta, 1978, Halaman 1.
24. Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Pembangunan Subsektor Pos dan Telekomunikasi Dalam Pelita III, 23-1-1980.

Majalah, Naskah dan Penerbitan Lain.

1. PT INTI/Humas, "INTI", Bandung, 1978.
2. PT INTI/Humas, "Press Release", Bandung, 1979.
3. PN Pos dan Giro/Humaspos, "Merpatipos", Bandung.
4. Perum Telekomunikasi/Humas, "Microwave Indonesia Bagian Timur". Bandung, 1979.
5. Perum Telekomunikasi/Humas, "Microwave Nusantara", Bandung. 1979.
6. Perum Telekomunikasi/Humas Panitia Microwave Jawa-Bali, "Microwave Jawa-Bali".
7. Perum Telekomunikasi/Humas, "Microwave Trans Sumatera".
8. Periska Postel, "Naskah Kongres IV Periska Postel", Jakarta, 1972.
9. Periska Postel, "Program Kerja Pendidikan Non Formil Periska Postel" Bandung, 1979.
10. Perum Pos dan Giro, "Peraturan Dinas No. 1 sampai dengan No. 6 ', Bandung.
11. Perum Pos dan Giro, "Surat Keliling No. 1", Bandung, 1965 s/d 1979.
12. Willy Munandir Mangoendiprodjo, Ir., "Komunikasi lewat Satelit". Humas Perum Telekomunikasi, Bandung.
13. Suparman Sumahamijaya, "Suatu tantangan bagi para sarjana dan kaum cendekia", Majalah Pustaka Nomor 8 Tahun II.
14. Bahan Penataran Khusus P4 untuk DHARMA WANITA Sub Unit Ditjen Postel.

Nama-nama Yang Diwawancarai.

1. Moehamad Oesman, Pensiunan Karyawan PN Pos dan Giro, Bandung, Desember 1979.
2. Goerjama, Karyawan Perum Pos dan Giro, Bandung, Desember 1979.
3. Soerjono Bc.A.P., Karyawan Perum Pos dan Giro, Semarang, Oktober 1979.
4. Soetomo Bc.A.P., Karyawan Perum Pos dan Giro, Amboina, September 1979.
5. H.A. Karouw, Karyawan Perum Pos dan Giro, Bandung, September 1979.
6. R. Soetedjo Bc.A.P., Pensiunan Karyawan Ditjen Postel, Jakarta Desember 1979.
7. Ir. Agus Darman, Karyawan Ditjen Postel, Jakarta, Oktober 1979.
8. E. Soepandi Bc.A.P., Karyawan Ditjen Postel, Bandung, Desember 1979.

Digitized by Google

9. Koeslan Silam Bc.TT., Karyawan PERUMTEL, bandung, Desember 1979.
10. Eem Rachmat Bc.T.T., Karyawan PERUMTEL, Bandung, december 1979.
11. Ir. Willy Munandir, Karyawan PERUMTEL, Jakarta, Desember 1979.
12. Sachloel Nasution Bc.A.P. S.H., Karyawan Departemen Perhubungan, Jakarta, 11 Maret 1980.
13. Ir. M. Junus, Karyawan Inti, Bandung, Desember 1979.
14. Drs. Dradjat Soepaat Bc.A.P., Karyawan Ditjen Postel, Jakarta, Maret 1980.
15. Soehardjono, Pensiunan Karyawan, Ditjen Postel, Jakarta, 23 Januari 1980.
16. Sumeleh Bc.A.P., Karyawan Ditjen Postel, Jakarta, Maret 1980.

Digitized by Google

Digitized by Google

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI PADA UPACARA
PERINGATAN HARI POSTEL KE-XXXV TANGGAL 27 SEPTEMBER 1980
DI BANDUNG

Saudara-saudara karyawan Postel sekalian yang saya hormati,

Marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan ridho-Nya kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati hari Postel yang ke-35. Sudah selayaknya pada hari ini kita menundukkan kepala sejenak menghormati jasa-jasa para pahlawan Postel yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk Nusa dan Bangsa.

Kita jadikan hari ini suatu peristiwa untuk lebih membulatkan tekad guna melanjutkan pembangunan di sektor perhubungan, khususnya di subsektor Pos dan Telekomunikasi. Pembangunan di sektor perhubungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, sebagai hakekat dari pada pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang telah dan akan kita wujudkan melalui Trilogi Pembangunan, Sapta Krida Kabinet Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Keadaan perekonomian kita menjelang akhir tahun 1980 cukup memberikan landasan yang kokoh untuk melanjutkan pembangunan yang terus meningkat dalam PELITA III. Dengan perekonomian yang stabil telah terbuka kesempatan yang luas untuk berproduksi dan berpartisipasi membangun bangsa dan negara bagi semua lapisan dan golongan masyarakat.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagian besar dari kita telah mengikuti penataran P4. Penataran tersebut diadakan Pemerintah bukan sekedar untuk belajar kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara tetapi tujuannya adalah lebih luhur dan lebih jauh yaitu agar kita semua lebih menghayati kemudian mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN dalam semua segi kehidupan kita.

Dengan ridho Ilahi, tujuan nasional hanya dapat kita capai melalui Pancasila sebagai dasar negara. Sebab sejarah telah membuktikan bahwa dengan Pancasila, negara dan bangsa Indonesia dapat mengatasi segala macam rongrongan dan malapetaka yang mencoba menghapus dan membelokkan cita-cita bangsa Indonesia yang telah dikumandangkan sejak tanggal 17 Agustus 1945. Kewajiban kita sekarang adalah memperkokoh kehidupan bangsa yang tertib dalam segala bidang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila demi pencapaian cita-cita tersebut.

Digitized by Google

Saudara-saudara sekalian,

Sebagai aparat Pemerintah sudah menjadi kewajiban kita sekalian untuk senantiasa mempertinggi pengabdian kepada negara dan bangsa. Ini berarti dalam melaksanakan tugas sehari-hari kita harus lebih mementingkan kepentingan dinas diatas kepentingan pribadi. Salah satu ciri dari aparat yang baik adalah selalu mengisi seluruh jam kerja untuk hal-hal yang bermanfaat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Berilah contoh yang baik kepada rekan sejawat dan bawahan kita.

Dalam kesempatan ini marilah kita bertekad untuk menjadi karyawan yang baik, yang dapat mengatur waktu, yang dapat menyumbangkan segenap tenaga dan fikirannya tidak hanya untuk kepentingan sendiri tapi yang terpenting adalah untuk kepentingan bersama yang lebih berguna dan bermanfaat.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Sebagai salah satu modal yang dapat mendorong karier kita kedepan adalah selalu berusaha dan berkeinginan untuk mempertinggi kemampuan diri sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik dan lebih sempurna. Dengan adanya kesempatan untuk lebih meningkat, diharapkan kelambanan cara bekerja berangsur-angsur akan hilang dan tertib administrasi akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Kita sudah menyaksikan tadi penyerahan piagam penghargaan kepada para pegawai yang telah berdinas aktip selama 20 dan 25 tahun serta penyerahan buku "Sejarah Postel di Indonesia" kepada saya oleh Ketua Panitya Sejarah Postel.

Saya mengucapkan selamat kepada Saudara-saudara tersebut yang telah menunjukkan kesetiaan dan dedikasinya kepada perusahaan khususnya dan negara umumnya. Semoga kesetiaan dan dedikasi Saudara-saudara sekalian dapat menjadi suri tauladan bagi kita semuanya.

Buku "Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia" berisikan fakta dan peristiwa tentang Postel di Indonesia pada waktu-waktu yang lalu yang penting untuk diketahui oleh kita dan generasi yang akan datang.

Fakta dan peristiwa dimasa yang lalu perlu kita ketahui agar kita dapat menghargai para pendahulu kita dan terutama kita dapat menghubungkan masa lalu dengan masa kini untuk langkah kita kedepan. Dengan lain perkataan kita dapat belajar dari sejarah. Penerbitan buku sejarah POSTEL adalah suatu pekerjaan yang bersifat monumental, dan akan dikenang sepanjang masa, baik oleh kita sekarang ini, maupun oleh generasi-generasi mendatang.

Buku sejarah ini adalah milik kita bersama, karenanya kita semua, warga besar Postel, berkewajiban untuk memeliharanya, menghayatinya, bahkan menyempurnakan dan mengembangkannya.

Digitized by Google

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan salut kepada team sejarah dan kepada setiap fihak yang telah memungkinkan selesainya buku sejarah POSTEL.

Sebagaimana baru saya ucapkan, hasil jerih payah Saudara-saudara ini akan dikenang sepanjang masa. Saya merasa gembira dan bangga bahwa Saudara-saudara dapat menyelesaikan tugas berat itu tepat pada waktunya dan baik.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Demikianlah sambutan singkat saya. Sekali lagi, marilah kita bulatkan tekad kita untuk bersatu meneruskan pembangunan di subsektor Postel demi tercapainya tujuan nasional kita. Selamat, selamat selamat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita sekalian.

Terima kasih.

Bandung, 27 September 1980.

Digitized by Google





Bandung, 27 September 1980.
Panitia Parumus Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia, E. Supandi, sedang menyerahkan Buku Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I dan II kepada DIRJEN POSTEL Drs. Suryadi.

Gambar 1, 2 & 3.

Rapat Paripurna Panitia Pengarah dan Perumus Sejarah Postel di Indonesia. Nampak memimpin rapat, Dirjen Postel Drs. Suryadi yang didampingi oleh Kapusjarah ABRI Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.

Rapat-rapat Panitia Perumus Sejarah Postel di Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Panitia E. Supandi Bc.A.P., Ketua I Liliek Soehadi Bc.A.P. dan Ketua II Ir. Suhana, yang didampingi oleh Pembimbing teknis Dra. Rokhmani Santoso. (Gambar 4 & 5.). *Gambar 6. Panitia Perumus bergambar bersama. Duduk dari kiri kekanan: Soedarmadi Bc.A.P., Liliek Soehadi Bc.A.P., E. Supandi Bc.A.P., Ir. Suhana dan Dra. Rokhmani Santoso. Berdiri dari kiri kekanan: Drs. Usuadibrata, Drs. Mizwar Muin, GM Moeljoto Bc.A.P., Drs. Soetadjo Bc.A.P., Drs. Musjafri Effendy, W.Th. Soeharto Bc.A.P., RM Subari Bc.A.P., Drs. Sjamsuddin T, Drs. K. Sodikin, Drs. Abdurrachim, Omdali Bc.A.P., Agus Suroso Bc.A.P., Drs. Suprapto Bc.A.P., Zahari Maludin SH, Suwadi dan Djamil Suherman.*

Digitized by Google



Gambar 1



Gambar 2

Digitized by Google

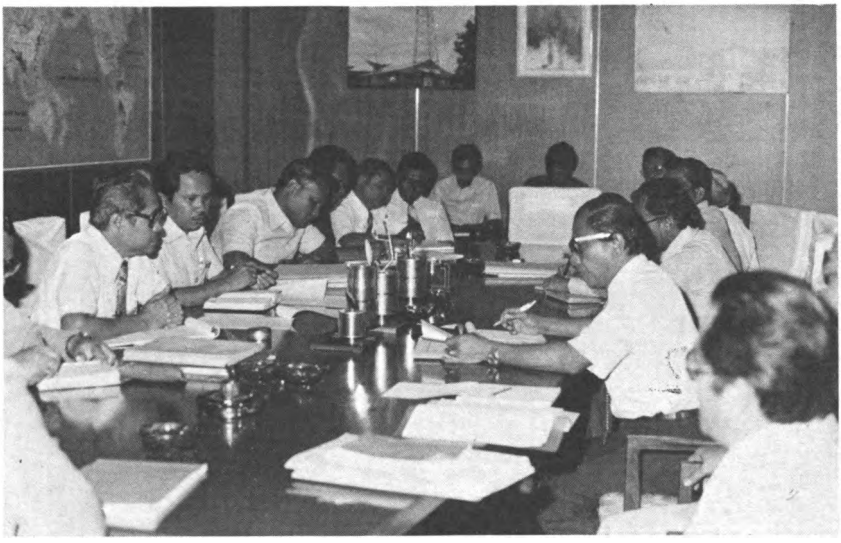


Gambar 3



Gambar 4

Digitized by Google



Gambar 5



Gambar 6

Digitized by Google

Digitized by Google

INDEX

Digitized by Google

Digitized by Google

INDEX

A

Abdoesoeki, H. 30
Abdoesoeki, H, Ny. 86
Abdullah, Bc.A.P. 83, 84
Abdultalib Rachman, Drs. 241, 242
Abdulrachman, Ny. 86
Achmad Koesoemaningjoen R. Bc.AT., 274
Act of free choice 48
Adiwinata, R.R., Bc.A.P. 24, 41
Adiwoso, A. 251
Adjas Baheram 84
Administrasi Telekomunikasi 251
Aerobik 104
Afganistan 74
Agenpos 278
Akademi 68
Ahmad Mustafa, H. Bc.A.P. 27
Ainaro 58, 59
Aileu 58
Akta 19, 163, 184
Algemeene Bank Nederland 225
Amir Machmud 9
Amir Adiwidjaja 85
Ampera, kabinet 15
Amukti Palapa 210
ambivalen 69
Anik 206
Angkutanpos 110, 111
Angola 57
AEI 174
A.O.P.U. (ASIAN OECEANIC POSTAL UNION) 70, 160, 164, 165, 167
AOPTS (ASIAN OCCEANIC POSTAL TRAINING SCHOOL) 70, 165
Apogee 211
Araujo, Arnaldo Dos Reis 56
Ardian Muhammad Hardigaluh 24, 25, 164
Arfan Elison 85
Arnaldo Ribeiro Moniz 57
ARF 223
ASEAN 74, 160, 166, 167, 253, 256, 257, 259, 260
Atang, R. Bc.A.P. 27, 83
ATM 174, 198, 199
Atauro 58, 59
Atmanto Bc.A.P. 83, 84
AURI 57
Aviation Orange 125

Digitized by Google

B

Badan Penasehat Perusahaan 39
Badrun, F. Ir. 85
Bahdar Djohan, G. Ir. 83
Bambang Bangoensoeksmantoro 274
Bank Dunia 218, 225
Bank Tabungan Negara 142
Bappenas 219, 236
Basuki Rachmat 9
Baucau 58, 59, 60
Bazar Tete 58
Bea Cukai 248
Belgia 243
Bell 189, 243
Bendapos 125
Ben Soetanto, Ir. 277
Bhutan 74
BICC 224
Bima 78
Biro Internasional 164
Bis Surat 122
Bhinneka 78
Bhutan 74
BKOW 90
Bobounaro 58
Boedi Santoso, Ir. 30, 84, 85
Bolavolley 103
Bratahalim, S.H. 192
Bridge 103
Bulkpos 278
Bulu Tangkis 103

C

C.400. 220
Cap Tanggal 123
Carrier 77, 187
Cash Supply 58
Catur 103
CB (Centraal Batterij) 187
CCIR 203, 204, 208
CCITT 203, 204, 208
CCPS 161
Chairul Saleh 9
Cighra 119, 121
CIT 196, 198
City Bold huruf 125
CKV Postel/LVRI 39
Clauss, Pesawat 122
Clearing 137
Common Control 220
COTAC 257
CPRM (Companhia Portuguesa Radio Marconi) 56
Crossbar 56
Crosbar ARF 220
CTT (Correios, Telegrafos, Telefones) 53

D

Dading Kalbuadi, Brigjen 56
Damai Sinulingga, Ir. 85 274
Dasrul Rasul, Drs. 251
Datuk Husein Onn, P.M. Malaysia 264
Demokrasi Terpimpin 9
Departemen Perhubungan 22
Departemen Pos dan Telekomunikasi 15
Depot Bendapos dan Meterai 276
Dewan Musyawarah Pepera (DMP) 51
Dewan Telekomunikasi 22
Dharma Wanita 90
Dili 56
DIP 153, 154
Direktorat Jenderal 15
Direktorat Pembangunan P.N. Telekomunikasi 285, 286
Direktur Muda 273
Djaelani Hidayat, Drs. Ak. 102
Djamil Soeherman 96
Djiwatampu, Ir. A.Ph. 211
DLLAJR 111
Dresdner Bank 225
Dradjat Soepaat, Bc.A.P., Drs. 163
Duct, sistem 188

Digitized by Google

E

Eastern Microwave System 202
Eem Rachmat Bc.T.T. 85, 86
Eem Rachmat, Ny. 87
Eksentrita 211
Ekspress, Suratpos
Electrolite 77
Electronic Mail 11
Electronic waiting system 220
Elnusa 206
Emil Salim, Dr. 199
Epoleksosbud 205
Ericsson, L.M. 174
Ermera 58, 59
Exim Bank Amerika 225

F

Faah, E.Z. Bc.A.P. 53
Fachri Pasaribu 95
Fac simile 11, 132
Federation International Asian Philatelique (FIAP) 281
Formulir berharga 131
Frans Seda Ny. 90
Frequency modulation 189

G

Ganwa Deici Denki Kogyo Co Ltd. 204
Gajah Mada 210
G.B.H.N. 109
Gegerkalong 74
Gelombang mikro 186, 191, 195
Gema Telekomunikasi 95, 96
G.30.S/P.K.I. 9, 80
G.S.O. (Geostationary Satellite Orbit) 211, 266
Giropas 138
Giropos 134
Gondomargono Drs.Bc.T.T. 194
Grane Mr. 193
Gunadi 56
Gunawan R, Bc.T.T. 202

H

Hambur Tropo: (troposcatter) 201
Harjana Bc.T.T. 204
Haroen Al Rasyid A.H. 30, 85
Harsono Bc.A.P. 67 272
Hidayat 53
High Frequency (HF) 188, 244
Hikmah C.V. 204
Hoetaoeroek S.M., Bc.A.P. 83
Hop (-hop) 204
Hubungan Internasional 160, 250
Hughes Aircraft 206, 207, 209, 225
Husein A.K.M., Drs. 241, 242

I

Idris Adjam 30
IGGI 218
I Gusti Ngurah Oka 85
Imam Santoso Ir. 173, 194
Iman Mintarsa Bc.A.P. 83
Indosat 184, 206, 257
Industri 239, 242, 244
Inspektorat 274
Inspektur 274
International Serial Data System 95
Intelsat 183
International Service Agreement 186
Inti, majalah 96
Inti, P.T. 19, 88, 239, 243
IPECC 160, 167
Irian Jaya 48
ITB 103, 206
Ito Alnito 56
ITT 206, 209
ITU, International Telecommunication Union 68, 95
Iuran Televisi 146, 147

Digitized by Google

J

JEC, Junior Engineer Course 69, 71

K

Kabel coaxial 188
Kabel pupin 189
Kabinet Ampera
Kanter, H.E. 163
Kantongpos 123
Kantospos/Besar/I. 154
Kantorpos Pembantu 154, 278
Kantorpos Tambahan 154, 278
Kapalpos 119
KB Postel/Marhaenis 39
Kebon Sirih 15
Kelompok Tenaga Ahli 272
Kemal Asmara Hadi 99
Kehumasan 90
Kementerian 15
Kenedy Space Centre, Florida, AS. 211, 213
Kesenian 99
Kespekri 59
Khmer 74
Kikin Sodikin, Drs. 95
Kilat Khusus, Suratpos 114
Kilat, Suratpos 113
Kodahankam 56
Kolinamil 57
Komunikasi 9
Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) 288
Konggres Pertama Amatir Radio 282
Koesdiono 102
Koeslan Silam Bc.A.T. 84, 85 277
Koesman 53
Koko 56
Komar Ramim, Ir. 85
Kontrak 227, 228
Konvensi 163
Korni P.T. INTI 105
Korpri 78, 81, 82, 83, 84
Kotakpos 123
Kowani 88
Kredittanslat Fur Wiederbau 225
Kupang 56
Kutamas C.V. 204
Kwitansipos 148

L

Laksus Pangkopkamtibda 62, 66
Lalijan 96
Lambang Pos dan Giro 124
Laos 74
Laser Communication 190
Local Batterij (LB) 187
Le Haire Akto
Leimena 9
Leiwakabessy F 191
Lembaga 18, 19, 68, 239, 240
Leonard, A.D. Ch. 53
Libo 226
Liliek Soehadi Bc.A.P. 27, 83, 101
Line Of Sight 189
Lintasan simpang 224
Liquisa 57, 58, 59
Lissabon 57
Loket Extension 278
London Inter Bank Organization 226
Lospalos 58, 59, 60

M

Macao 57
Made Martasedana, Drs. 30, 84, 85
Maliana 58, 59
Maksum Arsyad 85
Malaga International Telecommunication Convention 250
Manatuto 58, 59
Mata uang 48
Mardijono Bc.A.P. 27, 83
Mardijono, Ny. 86, 101

Digitized by Google

Martono P.A., Bc.T.T. 193, 194
Marsoedi, Ir. 273
Maubara 58
Maubisse 58
Memed 56
Menteri Perhubungan 22
Merah Putih 50
Merpatipos 95
Messakh. H. 53
Metaconta 221, 222
Midjil Hariyadi Bc.T.T. 104
Midland Bank 225
Microwave 40, 188
Mixer Standard 77
Mizwar Muin, Drs. 105
Mochamad Dahlan, Bc.T.T. 85, 194, 241
Mohamad Hoesen 84, 85
Moeljoto, Bc.A.P. 27, 83
Moeljoto, Ny. 87, 94
Moerwahono, R. 84
Moerwanto, B.F. Bc.T.T. 193, 194
Momod Ranawidjaja, Ny. 86, 87
Monitoring Frekuensi Radio 236
Monopolipos 112
Montreaux, International Telecommunication Convention 250
Morse 187
Mozambique 57
Muchtil Joenoes, Ir. 30, 241, 242
Muchtil Joenoes, Ny. 94
Muhaminim, Ir. 204
Mustafa, Ny. 87
Musjafri Effendy, Drs. 96
Mutiara Utara 119

N

Nairobi 251
Naryadi 56
NASA 210, 225
NASAKOM 80
Nasution, E. Ny. 86
National Gobel P.T. 206
Nirbhaya 119, 121
Nippe No. 320 T.
Nippon Electric Company (NEC) 204
Noel W Hinners Dr. 210
Noertjahjo, Bc.T.T. 85, 96
Notohamidjojo, Ny. 86
NTC (Nippon Telecommunication Consulting) 202, 204
Nusa Tenggara 121
Nyoman Rai 41

O

OB Postel/GOBSI 59
Oesadi, S.H. 24
Oesman, Moch. 101, 112
Olah Raga 99
Oma Somantri 56
Ong Teng Cheong 257
Ong Tjing Hoo, Ir. 193
OPM 50
Orbit 211
Orde Baru 9, 11, 12, 40
Organisasi 15
Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk (RAPI) 289
Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) 281
Organ resmi 95
Ossu 58
Over the Horizon 201

P

PABX 243
Pair Saver 243
Pajak Radio 145
Paketpos 159
Palapa, Satelit 47, 213
Pameran 250
Pamongpraja 51
Pante Makasar (Oekusi) 58, 59
Pangkopkamtib 61, 66
Partai Apodeti 57

Digitized by Google

Paul Visher 213
P.B.B. 48, 267
P-4 244
PCM (Pulsa Code Modulasi) 190
Pelita I 151, 153, 154, 156
Pelita II 151, 153, 154, 156
Pemungutan Iuran Televisi 146
Penentuan pendapat rakyat (Pepera) 48, 49, 51, 52
Pelni 111
Peluncuran Satelit Palapa B-1 dan B-2 301
Peluncur Ulang Alik 301
Pemasaran 293
Pembangunan 171
Pembinaan 61
Penandatanganan Kontrak Pengadaan 299
Penandatanganan Persetujuan 301
Pendidikan 66
Penelitian 74, 75, 76, 77
Penentuan Pendapat Rakyat 48, 51
Pengawas Umum 272
Pentaconta 56
Perakitan 243, 244
Peralatanpos 121
Periska Postel 86
Perjanka 111
Perkumpulan Philatelis Indonesia 281
Persatuan Karyawan Wanita Postel 39
Persetujuan 163
PGP Pos dan Giro 77, 70
Pertamina 228
PERUMTEL 199
Philateli 132, 133
Philco-Ford 224, 225
Philco Ford 207, 209
Phillips 206
Pipin Iskandar 56
PJKA 163
Point to point 77
Potensi 200
POR 100
Porkes Pos Giro 99, 100
Porkes Postel 99
Porkestel 99
Portugis 53, 56, 57
POPTT 99
Pos Ambulan Kereta Api 118
Pos Keliling Desa 115, 278
Pos Keliling Kota 115, 278
Pos dan Giro, P.N. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 158
Pos dan Giro, Perum 23, 158
Pos dan Telekomunikasi, Dirjen 15
Pos Kilat 113
Postel, LPP 239
Potensi 173, 237
Prangko Biasa 126
Prangko Peringatan 127
Prangko Darurat 130
Prangko Pungut 131
Prijatna Abdurrasjid, Dr. 251
Produksi 158, 159, 237, 247
propinsi 27, 52
PRX 221
Pusdiklitbangpos 67
Pusdiklitbangtel 67, 73, 74
PW Postel 86

R

Raalten, R. Van. 30
Radio Komunikasi 248
Radio Siaran Non Pemerintah 283
Radio Sounde 244
Rebo, Bc.A.P. 24, 25
Receiver 244
Recorder 187
Regional Satellite 259
Rekening Koran, Dinas 148
Rekening Listrik 148
Release and Indemnity Agreement 297
Remote Controle 191
Repeater station 197

Digitized by Google

Repelita I 151, 156, 230
Repelita II 152, 153, 230 235, 236, 244
Repelita III 156
Revolusi Komunikasi 11
Rhombic, antena 51, 52
Richard Simatupang Bc.AP. 272
Rimbaya, CV. 204
Rio de Janeiro 161, 163, 251
Roesli, Bc.A.P. 24
Roesli, Ny. 86
Roesmin Noerjadin, Menhub 60, 257
Roket Delta 301
Rollin, Ir. 30, 46, 47, 83, 94
Rumah Pos 278
Ruteng 78

S

Sabarsoediman 30, 83, 194
Sabarsoediman, Ny. 87
Sabur Brigjen 9
Sachloel Nasoetion, Bc.A.P. 24, 41, 46, 83, 100, 194
Sahala Holomoan Simatupang Bc.A.P. 191
Sahertian, M.J. 41
Saiful Pamulangan Pohan 95
Salim Badjideh 53
Samuel Pandau 50
Salvador Vicira Gomes Ribeiro 57
Sandhyakara Murti 90
Same 58, 59
Samoa Barat 74
Sartono, P. S.H. 251
Satelit/Satellite 9
Satelit Palapa B-1 dan B-2 299
Satgasningda 61
Satyadharma, A.B. 83
SB Postel 66
SEAG 252
Sejarah 9
Senior Technician Course (SEC) 69
Sentral Giro 134, 278
Sentral Giro Gabungan 135
Sentral (Telepon) Otomat 172, 173, 178
Sepak Bola 104
Share Sale Agreement 297
Siemens A.G. 243, 174
Sinecure 138
Sjarifudin, Kolonel 47
SKKL 255, 256, 258
SKSD 41, 205, 206
SLJJ 190
Sobari 56
Soebagjo, R. Bc.A.P. 27
Soebagjo Ny. 86
Soebijanto, Bc.T.T. 242
Soedarmadi Ir. 194
Soedihardjo, Bc.T.T. 30, 83
Soedihardjo, Ny. 87
Soehardjono 40, 46, 100, 121, 184, 194, 205
Soehardjono, Ny. 86, 241
Soeharto Bc.T.T. 85 274
Soeharto, Presiden R.I. 9
Soekandar, Ms.Bc.A.P. 24, 46, 83
Soekarmoen, Bc.T.T. 84
Soekarno, Presiden 9
Soekarno Bc.A.P. 27
Soekarno, Ny. 87
Soekarno Abdulrahman, Ir. 30, 202, 241, 242
Soekendar, Bc.A.P. 25, 26
Soekendar, Ny. 86
Soekinoen R. Bc.A.P. 84
Soelaeman, Mas, Bc.A.P. 27, 46, 47, 83
Soelaeman, Mas, Ny. 86, 87, 94
Soemardi, Bc.T.T. 30, 85
Soemarno Atmosoebroto, RM Bc.TT. 274
Soembodo 84
Soemrambah, Bc.A.T. 85
Soenarjo Martosendjojo, Raden 30, 31
Soepandi, M.E., Bc.A.P. 251

Digitized by Google

Soeparto Bc.T.T. 192
Soerjadi RA, Bc.AT. 85 274
Soeroso Bc.A.P. 102
Soesilo, R.M. Dr. 84
Soetedjo, R, Bc.A.P. 52, 56, 83
Soetjipto, Stephanus, Bc.A.P. 84
Soetrisno, Bc.A.P. 27, 83
Soetrisno, Ny. 87
Soewandi Kertoatmodjo Bc.T.T. 193, 194, 202, 204
Soewandi J, Ny. 87
Soewandi Bc.T.T. 53
Soewardi 30, 31
Societe Generale Banque 225
Special Fund 162
Srihadi Soemodihardjo, R, Bc.T.T. 85
Sri Wirasto R.M., Bc.A.P. 84, 85
Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX 240
SKLL 256, 257, 259
Standard Elektrik Lorenz AG
Stanley I Weiss, Dr. 302
STKB 247, 248
SSPTT 39
STJJ 248
STKB 248, 249
Stasiun Bumi 60
Stasiun Bumi Jatiluhur 42, 179
Stasiun Bumi Kecil 60, 244, 247
Stasiun Pengendali 74, 209
Stasiun Lintasan Tipis 209
Stasiun Lintasan Utama 209
Stationer 206
Step By Step, Sistem 220
Stored Programme Controle (SPC) 220, 221
Struktur 15
Suai 58, 59
Subandrio 9
Submarine 256
Sudarna Bc.AP. 273
Suhana, Ir. 30, 49, 84, 85
Sumeleh, Bc.A.P. 83
Sumitomo Shoji Kaisha Ltd. 174, 196, 198, 204
Sumbangan iuran radio 145
Sunarjo Martosendjojo 30
Sumpah Palapa 210
Sundari 111
Supersemar 9
Surapos 113, 114, 115, 280, 281
Surianegara, R.M.A. 30
Surjono, Bc.A.P.
Suryadi, Drs. 46, 94, 243
Suryadi Ny. 94
Sutanggar Tengker, Ir. 30, 46, 193, 194
Suwarli 50, 56
Suwarno 56
Sydney 57
Symposium 206

T

Tabanas, Tabungan Pembangunan Nasional 143
Talib A, Drs. 85
Tangkubanperahu 191
Tang Perfa 123
Tang plombir 123
Taxi Orange 125
Task Force 52, 53, 56
Team Pembina Perprangkoan dan Philateli 277
Team Pendamping 53, 56, 57, 58
Team Pengamanan Dan Pengawasan 66
Team Screening 61, 62, 64
Theo Suryawan 39, 46, 47, 251
Theo Suryawan Ny. 94
Teleprinter 187
Telex 187
Teningban Dtel 64
Teningban LPP Postel.
Teningda 64
Teningpu 66
Teningtel 64
Tenis 103

Digitized by Google

Tenis Meja 103
Terrestrial 190
Tetum 57
Theo Suryawan, Ir. 83
Timbangan 122
Time Division Multiplex Transmission System 189 152
Timur Jaya, C.V. 204
Timor Timur 58
Tjaroso, Bc.T.T. 85, 242
Tjiptadi Bc.T.T. 84, 85
Tony Harriman Bc.T.T. 194
Tohamim 84, 85
Toto Rachmat Dailami Bc.A.P. 83
Transceiver LHF 244
Transmisi 188
Transmitter, H.F. 244
Transportasi 9
Transponder 259, 263, 264
Tromolpos 123
Troposcatter 40
TTC 71, 73
Tugas pokok 17
Turn Key Project 216
TVRI 146, 147

U

UHF (Ultra High Frequency) 188, 189, 244
Ukar Didi Sutardi 56
Uni Terbatas 160
UN COPOUS (United Nations Committee on the Peaceful uses of Outer Space) 266
UNDP 165
UNTEA 50
UPU 73, 161, 164, 165
UR 49, 220
Usnadibrata, Drs. 85, 99

V

VHF (Very High Frequency) 188, 189, 244
Villa Salazar 57
Viqueque 58, 59

W

Wakijan, S.E. Bc.T.T. 202
WARC 264, 265
Warna operasi 124
Wawasan Nusantara 208
Warna Operasi Pos dan Giro 124
Wateningban Dtel 64
Weselpos 138, 139, 140, 141
Widyadara 70
Wijayakarta, P.T. 204
Willy Munandir, Ir. 30, 83, 84, 194, 202, 205, 251
Willy Munandir, Ny. 87, 94
Wind Sounde 244
Wing 73
World Bank 196, 225
Woerjadi, R. Bc.A.P. 25, 26

Y

Yani, M. Bc.T.T. 204
Yayat Ruchiyat I 56
Yayat Ruchiyat II 56
Yasmin Bc.T.T. 204
Yunirman Bahar, Drs. 85

Digitized by Google

Digitized by Google

PRANGKO YANG DITERBITKAN
PADA MASA ORDE BARU
1 MARET 1966 SAMPAI 8 AGUSTUS 1980

Digitized by Google

1966 PRANGKO PAHLAWAN REVOLUSI



Digitized by Google

1966 PRANGKO REPTIL









Digitized by Google

1967 PRANGKO ALAT-ALAT MUSIK NASIONAL



Digitized by Google

1967 PRANGKO ALAT-ALAT MUSIK NASIONAL



1967 PRANGKO HARI PENERBANGAN NASIONAL



Digitized by Google

1967 PRANGKO THOMAS CUP IV





Digitized by Google

1967 *PRANGKO PARIWISATA*



Digitized by Google

1967 PRANGKO PARIWISATA



TOURISM PASSPORT
TO PEACE

INTERNATIONAL
TOURIST YEAR 1967

Digitized by Google

1967 PRANGKO POS KILAT





1967 PRANGKO MONUMEN PAHLAWAN REVOLUSI







Digitized by Google

1967 PRANGKO LUKISAN R. SALEH





Digitized by Google

1967 *PRANGKO LUKISAN R. SALEH*



Digitized by Google

1967 PRANGKO BENCANA ALAM SEMPER









Digitized by Google

1967 PRANGKO BENCANA ALAM SEMPER



Digitized by Google

1968 *PRANGKO HAK-HAK AZASI MANUSIA*





1968 *PRANGKO INTEGRASI AKABRI*



1968 *PRANGKO BOROBUDUR*





Digitized by Google

1968 PRANGKO BOROBUDUR



Digitized by Google

1968 PRANGKO 20 TAHUN W.H.O.





1968 PRANGKO 100 TAHUN KERETA API DI INDONESIA





Digitized by Google

1968 PRANGKO PRAMUKA WIRAKARYA







Digitized by Google

1968 PRANGKO PARIWISATA



Digitized by Google

1968 PRANGKO PARIWISATA



Digitized by Google

1968 PRANGKO POS KILAT











1968 PRANGKO OBSERVATORIUM BOSCHA





Digitized by Google

1968 PRANGKO OLYMPIADE MEXICO









Digitized by Google



Digitized by Google

1968 PRANGKO BUAH-BUAHAN







Digitized by Google

1968 PRANGKO BUAH-BUAHAN



Digitized by Google

1968 PRANGKO BUAH-BUAHAN



Digitized by Google

1969 *PRANGKO I.L.O.*



1969 *PRANGKO PAHLAWAN KE-VI*



Digitized by Google

1969 PRANGKO KEBANGKITAN WANITA INDONESIA



1969 PRANGKO LIGA PALANG MERAH





1969 PRANGKO KONFERENSI KELUARGA BERENCANA





Digitized by Google

1969 PRANGKO TOURISME







Digitized by Google

1969 *PRANGKO TOURISME*



Digitized by Google

1969 PRANGKO PELITA I/II



Digitized by Google

1969 PRANGKO SATELIT KOMUNIKASI JATILUHUR





1969 PRANGKO POS KILAT







1969 PRANGKO 50 TAHUN PENERBANGAN INGGRIS-AUSTRALIA





Digitized by Google

1969 PRANGKO KERANG LAUT



1970 PRANGKO EXPO '70



1970 PRANGKO PEMURNIAN PERADILAN



Digitized by Google

1970 PRANGKO GEDUNG U.P.U. YANG BARU





1970 PRANGKO PARIWISATA





Digitized by Google

1970 PRANGKO PARIWISATA



Digitized by Google

1970 PRANGKO A.P.Y.



1970 PRANGKO ¼ ABAD R.I.



1970 PRANGKO ¼ ABAD POSTEL





Digitized by Google

1970 PRANGKO ¼ ABAD P.B.B.



1970 PRANGKO TAHUN PENDIDIKAN INTERNATIONAL





Digitized by Google

1970 PRANGKO SERANGGA







1971 PRANGKO VISIT ASEAN LAND







Digitized by Google

1971 PRANGKO VISIT ASEAN LAND



Digitized by Google

1971 PRANGKO H.U.T. JAKARTA KE 444







Digitized by Google

1971 PRANGKO H.U.T. JAKARTA KE 444



Digitized by Google

1971 PRANGKO FESTIVAL RAMAYANA





1971 PRANGKO P.T.T.I.



1971 PRANGKO U.P.U. DAY



Digitized by Google

1971 PRANGKO UNICEF





1971 PRANGKO IKAN HIAS LAUT







Digitized by Google

1972 *PRANGKO ECAFE*







1972 *PRANGKO KAMPANYE JANTUNG*



1972 *PRANGKO 50 TAHUN I.T.T.*



Digitized by Google

1972 *PRANGKO TAHUN BUKU INTERNATIONAL*



1972 *PRANGKO KOSMOS*







1972 *PRANGKO 10 TAHUN HOTEL INDONESIA*



Digitized by Google

1972 PRANGKO OLYMPIADE MUNCHEN



1972 PRANGKO KELUARGA BERENCANA



Digitized by Google

1972 PRANGKO KEBUDAYAAN INDONESIA







1972 PRANGKO IKAN HIAS LAUT







Digitized by Google

1973 PRANGKO THOMAS CUP



1973 PRANGKO I.M.O. - W.M.O.



1973 PRANGKO ¼ ABAD W.H.O.



Digitized by Google

1973 PRANGKO PARIWISATA



1973 PRANGKO TABANAS



Digitized by Google

1973 PRANGKO P.O.N. KE VIII







1973 PRANGKO INTERPOL





Digitized by Google

1973 PRANGKO KEBUDAYAAN INDONESIA







1973 PRANGKO PROGRAM PANGAN



Digitized by Google

1973 PRANGKO KELUARGA BERENCANA







1973 PRANGKO IKAN HIAS LAUT







Digitized by Google

1974 PRANGKO DHARMA SAMUDRA



1974 PRANGKO KEBUDAYAAN INDONESIA







Digitized by Google

1974 PRANGKO P.A.T.A













Digitized by Google

1974 PRANGKO P.A.T.A













Digitized by Google

1974 PRANGKO P.A.T.A.













Digitized by Google

1974 PRANGKO P.A.T.A.









Digitized by Google

1974 PRANGKO P.A.T.A.









Digitized by Google

1974 PRANGKO PRESIDEN SOEHARTO I













Digitized by Google

1974 PRANGKO TAHUN KEPENDUDUKAN



1974 PRANGKO KELUARGA BERENCANA







1975 PRANGKO DONOR DARAH



Digitized by Google

1974 PRANGKO SEABAD U.P.U.









Digitized by Google

1974 PRANGKO IKAN HIAS LAUT







Digitized by Google

1974 PRANGKO PERMINYAKAN









Digitized by Google

1974 PRANGKO PERMINYAKAN









Digitized by Google

1975 PRANGKO METROLOGI



1975 PRANGKO KEBUDAYAAN INDONESIA







Digitized by Google

1975 *PRANGKO TAHUN WANITA INTERNASIONAL*





1975 *PRANGKO PARIWISATA (ANGGREK)*







Digitized by Google

1975 PRANGKO BOROBUDUR









Digitized by Google

5 PRANGKO 30 TAHUN R.I.









Digitized by Google

1975 PRANGKO MONUMEN PAHLAWAN



1975 PRANGKO KELUARGA BERENCANA







Digitized by Google

1975 *PRANGKO IKAN HIAS LAUT*







Digitized by Google

1976 PRANGKO SEABAD TELEPON



1976 PRANGKO UBER & THOMAS CUP









Digitized by Google

1976 PRANGKO PEMUKIMAN







Digitized by Google

1976 PRANGKO KEBUTAAN



1976 PRANGKO OLYMPIADE MONTREAL



1976 PRANGKO TOURISME



Digitized by Google

1976 PRANGKO SATELIT (S.K.S.D.)







1976 PRANGKO PRESIDEN SOEHARTO II









Digitized by Google

1976 PRANGKO ANGGREK

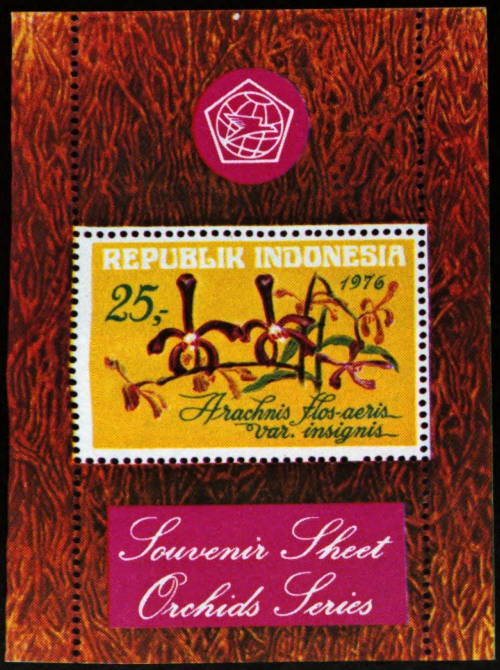






Digitized by Google

1976 PRANGKO ANGGREK



Digitized by Google

1976 PRANGKO PENGHIJAUAN



1976 PRANGKO KEBUDAYAAN INDONESIA







Digitized by Google

1976 PRANGKO KEBUDAYAAN INDONESIA



Digitized by Google

1976 PRANGKO BACAAN ANAK-ANAK





1976 PRANGKO UNICEF



1977 PRANGKO PEMILU







Digitized by Google

1977 PRANGKO JAMBORE



1977 PRANGKO A.O.P.U.



1977 PRANGKO H.U.T. JAKARTA KE 450.



Digitized by Google

1977 PRANGKO H.U.T. JAKARTA KE 450.



Digitized by Google

1977 PRANGKO AMPHILEX





Digitized by Google

1977 PRANGKO AMPHILEX



Digitized by Google

1977 PRANGKO M.T.Q. MANADO





1977 PRANGKO P.O.N. IX







Digitized by Google

1977 PRANGKO ASEAN







1977 PRANGKO I.P.E.C.C.



Digitized by Google

1977 PRANGKO ANGGREK







Digitized by Google

1977 PRANGKO ANGGREK



Digitized by Google

1977 PRANGKO KESEHATAN



1978 PRANGKO MARGASATWA







Digitized by Google

1977 PRANGKO MARGASATWA



Digitized by Google

1978 PRANGKO U.N.D.P.



1978 PRANGKO A.S.I.





1978 PRANGKO PALESTINA



Digitized by Google

1978 PRANGKO WORLD CUP





1978 PRANGKO WAYANG







Digitized by Google

1978 *PRANGKO HYPERTENSI*



1978 *PRANGKO KONGRES GURU INTERNASIONAL*



1978 *PRANGKO ANTI APARTHEID*



Digitized by Google

1978 PRANGKO KONGRES KEHUTANAN





1978 PRANGKO SUMPAH PEMUDA







Digitized by Google

1978 PRANGKO MARGASATWA







Digitized by Google

1978 PRANGKO MARGASATWA



Digitized by Google

1978 *PRANGKO MARGASATWA*



Digitized by Google

1978 PRANGKO ANGGREK







Digitized by Google

1978 PRANGKO ANGGREK



Digitized by Google

1979 PRANGKO H.U.T. GARUDA







Digitized by Google

1979 *PRANGKO THOMAS CUP*





1979 *PRANGKO PELITA III*











Digitized by Google

1979 PRANGKO ANGGREK







Digitized by Google

1979 PRANGKO ANGGREK



Digitized by Google

1979 PRANGKO ANGGREK



Digitized by Google

1979 PRANGKO HARI KARTINI



1979 PRANGKO I.B.E.



1979 PRANGKO SEA GAMES







Digitized by Google

1979 PRANGKO 4 WINDU KOPERASI



1979 PRANGKO TAHUN ANAK-ANAK INTERNASIONAL





1979 PRANGKO TELCOM 79



Digitized by Google

1979 PRANGKO NARKOTIKA



1979 PRANGKO MARGASATWA







Digitized by Google

1979 *PRANGKO MARGASATWA*



Digitized by Google

1963 PRANGKO IRIAN-BARAT















Digitized by Google















Digitized by Google

1963 PRANGKO IRIAN-BARAT



Digitized by Google

1968 PRANGKO MUSYAWARAH BESAR RAKYAT IRBAR





1968 PRANGKO FLORA DAN FAUNA IRBAR

















Digitized by Google

1970 PRANGKO BURUNG IRBAR





970 PRANGKO UKIRAN KAYU IRBAR





















Digitized by Google

12 - 3 - 1980 PRANGKO "SPICE RACE"





Digitized by Google

21 - 3 - 1980 PRANGKO "REMAJA PENCINTA ALAM."









Digitized by Google

12 - 3 - 1980 PRANGKO SHEET SOEVENIR



Digitized by Google

15 - 4 - 1980 PRANGKO "ANTI SMOKING CAMPAIGN."



21 - 4 - 1980 PRANGKO "FESTIVAL BUNGA 1980."





24 - 4 - 1980 PRANGKO "25 TAHUN KONPERENSI A.A. KE I."



Digitized by Google

24 - 4 - 1980 PRANGKO "25 TAHUN KONPERENSI A.A. KE I."

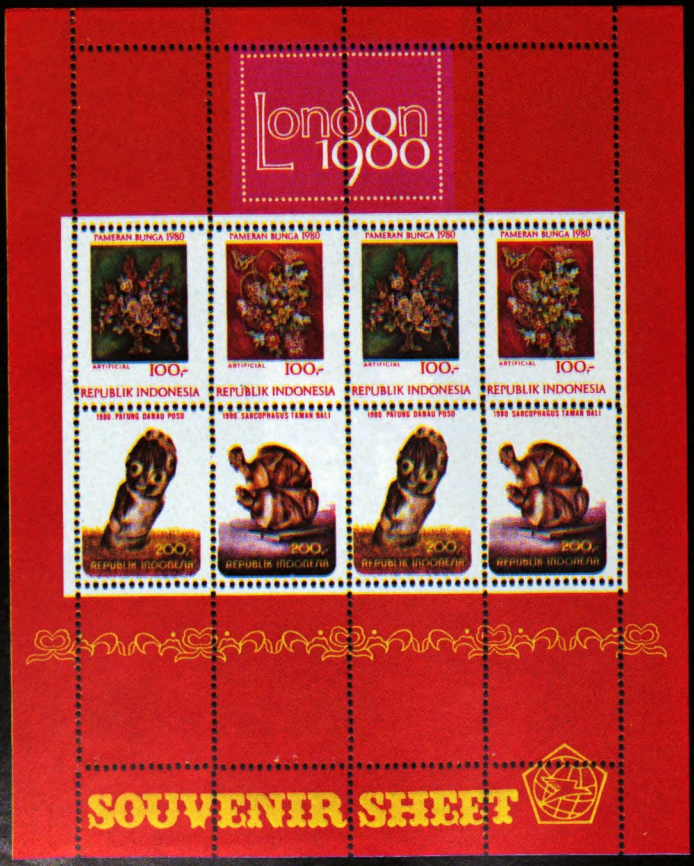


2 - 5 - 1980 PRANGKO "KEBUDAYAAN INDONESIA 1980."



Digitized by Google

2 - 5 - 1980 PRANGKO SHEET "KEBUDAYAAN INDONESIA 1980."



Digitized by Google

18 - 5 - 1980 PRANGKO "HUT KE 30 KORPS CACAT VETERAN."



18 - 5 - 1980 PRANGKO "OLYMPICS FOR THE DISABLED."



Digitized by Google

6 - 6 - 1980 PRANGKO "PRESIDEN SOEHARTO."



17 - 7 - 1980 PRANGKO "SENSUS 1980."



8 - 8 - 1980 PRANGKO SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT



Digitized by Google

17-8-1980 PRANGKO HUT KE-35 KEMERDEKAAN R.I.







10-9-1980 PRANGKO PERINGATAN 10 TAHUN AOPTS (ASIAN OCEANIC POSTEL TRAINING SCHOOL)



Digitized by Google

14-9-1980 PRANGKO OPEC (ORGANIZATION OF PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES)



5-10-1980 PRANGKO KEMANUNGGALAN ABRI DENGAN RAKYAT DENGAN THEMA: ABRI MASUK DESA.





Digitized by Google

25-11-1980 PRANGKO MARGASATWA IV



10-12-1980 PRANGKO ANGGREK V/ 1980.



Digitized by Google

RALAT JILID V

Hal	Baris	Salah	Seharusnya
3	6	Hutagaol, Bc.A.P.,Drs, SH	Hutagaol, Bc.A.P.,Drs, S.M.
3	7	Moher Malana	Moher Malano
10	11	Sistim (dan seterusnya kalau ada kata sistim)	Sistem
40	1	memprihatinkan. Baik	memprihatinkan, baik yang mengenai transmisi
70	16	Universel	Universal
97	4	(gambar atas). Stand	(gambar atas). Halaman 98: Stand
174	29	Bagan organisasi Ditpemtel tercantum pada lampiran 10 dan 11	dihapuskan
203	11	CCIB	CCIR
236	20	Lampiran	Lampiran 15
237	12	a) Pontensi	a) Potensi
271	15	akhir Pelita II sampai akhir 1980	akhir 1980
288	30	emnidirectional	omnidirectional
297	18	Drs.Ek.Orkar Surjaatmadja	Drs. Ek. Oskar Surjaatmadja
sesudah 377	3	8 Agustus	akhir

Digitized by Google

Digitized by Google

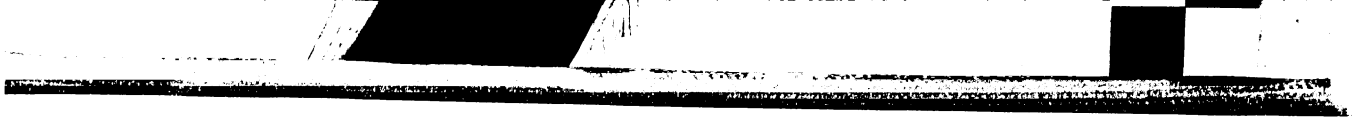


Digitized by Google

186865

4199 78

Digitized by Google



Digitized by Google

89055108724

b89055108724a

Digitized by Google